PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2021

Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD

Kabupaten Majene Tahun 2021 – 2026



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi-misi Bupati, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2021 - 2026;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2021 – 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NasionaL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
33. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 52);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022;
41. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
43. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2013 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 16);
45. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 Nomor 4);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 9);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 12);
48. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 22) ;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021–2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Sulawesi Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai tahun 2022.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Majene adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai tahun 2026.
16. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun

17. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
18. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
21. Tujuan adalah Sesuatu kondisi yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka 5 (lima) tahunan
22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang mengambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat Daerah yang di peroleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah
23. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
24. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
25. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di laksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan,program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran *(output),* Hasil *(Outcome),* dampak *(impact)*;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan visi, dan misi kepala daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan,Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta programPerangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN,RPJMD Provinsi, dan RPJPD Kabupaten Majene secara sinergis dan terpadu.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai:

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah;

b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;

c. pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

(3) RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

(4) Tata cara penyusunan penjabaran perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, serta tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.

(5) Perangkat Daerah penanggung jawab pelaksanaan program ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Penyusunan Dokumen RPJMD tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : Pendahuluan
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi daerah
c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
d. BAB IV : Permasalahan Dan isu-isu Strategis
e. BAB V : Penyajian Visi, Misi,Tujuan dan Sasara
f. BAB VI : Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan
g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
i. BAB IX : Penutup

(2) Penjabaran dan uraian lebih lanjut terkait sistematika RPJMD Kabupaten Majene periode 2021-2026 sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evalausi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah, Indikator kinerja dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.

(3) Tata cara pengendalian dan evalausi sebagaiman di maksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 7

Dokumen RKPD tahun 2022 menjadi bagian dari Dari RPJMD periode 2021-2026.

Pasal 8

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan pada masa transisi, maka penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang dijadikan pedoman adalah RPJPD Kab. Majene, RPJMD Provinsi dan RPJMN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal, 24 Desember 2021

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KAB. MAJENE,

CAP/TTD

H. ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

FAUZAN, SH, MH
Pangkat : Pembina
NIP : 19771015 200502 2 007

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROPINSI SULAWESI BARAT: 38 TAHUN 2021.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1

1.1. Latar Belakang ..... I - 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I - 4

1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I - 11

1.3.1. RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJM Nasional ..... I - 12

1.3.2. RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat ..... I - 14

1.3.3. RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJPD Kabupaten Majene ..... I - 15

1.3.4. RPJMD Kabupaten Majene dengan Renstra PD ..... I - 16

1.3.5. RPJMD Kabupaten Majene dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ..... I - 17

1.3.6. RPJMD Kab. Majene dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW-N, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten) ..... I - 18

1.3.7. RPJMD Kab. Majene dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Majene ..... I - 19

1.4. Maksud dan Tujuan ..... I - 19

1.5. Sistematika Penulisan ..... I - 20

Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II- 1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... II- 1

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ..... II- 1

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ..... II - 1

2.1.1.2. Letak Dan Kondisi Geografis ..... II - 5

2.1.1.3. Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng ..... II - 6

2.1.1.4. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah ..... II - 6

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi ..... II - 10

2.1.1.6. Kondisi Klimatologi ..... II - 12

2.1.1.7. Pola Penggunaan Lahan ..... II - 14

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ..... II- 16

2.1.3.1. Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya ..... II - 16

2.1.3.2. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) ..... II - 45

2.1.3. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ..... II- 50

2.1.3.1. Daya Dukung Pangan ..... II - 51

2.1.3.2. Daya Dukung Air ..... II - 54

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana ..... II- 57

2.1.5. Kondisi Demografi dan Kependudukan ..... II- 64

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II- 69
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..... II- 70
2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).... II - 70
2.2.1.2. Laju Inflasi ..... II - 78
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ..... II- 83
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..... II - 83
2.2.2.2. Perkembangan Perspektif Kemiskinan Kabupaten Majene II - 91
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ..... II- 97
2.3. Aspek Pelayanan Umum ..... II- 98
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar..... II- 98
2.3.1.1. Urusan Pendidikan..... II - 98
2.3.1.2. Urusan Kesehatan..... II - 106
2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang ..... II - 117
2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.... II - 124
2.3.1.5. Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat..... II - 130
2.3.1.6. Urusan Sosial..... II - 131
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar..... II- 133
2.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja ..... II - 133
2.3.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... II - 135
2.3.2.3. Urusan Pangan ..... II - 139
2.3.2.4. Urusan Pertanahan ..... II - 140
2.3.2.5. Urusan Lingkungan Hidup ..... II - 141
2.3.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil .. II - 144
2.3.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa..... II - 147
2.3.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II - 148
2.3.2.9. Urusan Perhubungan ..... II - 150
2.3.2.10. Urusan Komunikasi dan Informasi ..... II - 152
2.3.2.11. Urusan Koperasi & Usaha Kecil Menengah..... II - 153
2.3.2.12. Urusan Penanaman Modal..... II - 155
2.3.2.13. Urusan Kepemudaan & Olahraga..... II - 156
2.3.2.14. Urusan Statistik ..... II - 158
2.3.2.15. Urusan Persandian..... II - 159
2.3.2.16. Urusan Kebudayaan..... II - 159
2.3.2.17. Urusan Perpustakaan..... II - 160
2.3.2.18. Urusan Kearsipan ..... II - 162
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan..... II- 163
2.3.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan ..... II - 163
2.3.3.2. Urusan Pariwisata ..... II - 165
2.3.3.3. Urusan Pertanian ..... II - 166

2.3.3.4. Urusan Kehutanan ..... II - 173
2.3.3.5. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral..... II - 174
2.3.3.6. Urusan Perdagangan ..... II - 176
2.3.3.7. Urusan Perindustrian ..... II - 178
2.3.3.8. Urusan Transmigrasi..... II - 179
2.3.4. Fokus Layanan Urusan Pendukung Pemerintahan..... II- 180
2.3.4.1. Sekretariat Daerah ..... II - 180
2.3.4.2. Skretariat DPRD..... II - 183
2.3.5. Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan..... II- 186
2.3.5.1. Urusan Perencanaan ..... II - 186
2.3.5.2. Urusan Keuangan ..... II - 188
2.3.5.3. Urusan Kepegawaian..... II - 194
2.3.5.4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan..... II - 196
2.3.5.5. Urusan Penelitian dan Pengembangan ..... II - 197
2.3.5.6. Urusan Pengelolaan Perbatasan..... II - 200
2.3.6. Fokus Layanan Urusan Pengawasan Pemerintahan ..... II- 200
2.3.6.1. Inspektorat Daerah..... II - 200
2.3.7. Unsur Kewilayahan ..... II- 203
2.3.8. Unsur Pemerintahan Umum ..... II- 205
2.3.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik ..... II - 205
2.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... II- 207
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... II- 207
2.4.1.1. Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga Per Kapita..... II - 207
2.4.1.2. Nilai Tukar Petani..... II - 210
2.4.1.3. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita ..... II - 212
2.4.1.4. Produktivitas Total Daerah ..... II - 213
2.4.1.5. Kemajuan dan Kemandirian Desa ..... II - 214
2.4.1.6. Neraca Perdagangan (Trace Balance)..... II - 217
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ..... II- 219
2.4.2.1. Statistik Jalan..... II - 219
2.4.2.2. Ketaatan Terhadap RTRW..... II - 220
2.4.2.3. Luas Wilayah Produktif ..... II - 221
2.4.2.4. Wilayah Banjir dan Genangan ..... II - 222
2.4.2.5. Luas Wilayah Kekeringan (Lahan Kritis)..... II - 224
2.4.2.6. Luas Wilayah Perkotaan ..... II - 225
2.4.2.7. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang ..... II - 226
2.4.2.8. Jumlah Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Hiburan ..... II - 229
2.4.2.9. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih ..... II - 230
2.4.2.10. Komunikasi dan Informasi..... II - 231
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ..... II- 234
2.4.3.1. Angka Kriminalitas..... II - 234
2.4.3.2. Proses dan Kemudahan Perijinan ..... II - 236
2.4.3.3. Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah ..... II - 239
2.4.3.4. Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Usaha..... II - 242

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ..... II- 243
2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja..... II - 243
2.4.4.2. Tingkat Ketergantungan ..... II - 244
2.5. Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II- 207
2.6. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ..... II- 268
2.6.1. Urusan Pendidikan ..... II- 268
2.6.2. Urusan Kesehatan ..... II- 274
2.6.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II- 275
2.6.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman . II- 277
2.6.5. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... II- 278
2.6.6. Urusan Sosial ..... II- 278
2.7. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)..... II- 280
2.7.1. Indikator TPB Terlaksana dan Mencapai Target (SS) .... II- 286
2.7.2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB) ..... II- 302
2.7.3. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (BB)..... II- 316
2.7.4. Indikator TPB yang Belum Memiliki Data (TAD) ..... II- 319
Bab III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH..... III - 1
3.1. Kinerja Keuangan Masa lalu ..... III - 1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ..... III - 1
3.1.2. Neraca Daerah ..... III - 24
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu..... III - 29
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ..... III - 33
3.2.2. Analisis Pembiayaan ..... III - 38
3.3. Kerangka Pendanaan..... III - 39
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja ..... III - 31
3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan..... III - 51
Bab IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH ..... IV - 1
4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Majene ..... IV - 2
4.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah ..... IV - 38
4.2.1. Isu Strategis Internasional ..... IV - 38
4.2.2. Isu Staregis Nasional ..... IV - 53
4.2.3. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Barat ..... IV - 55
Bab V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ..... V - 1
5.1. Visi ..... V - 1
5.2. Misi..... V - 2
5.3. Tujuan dan Sasaran..... V - 11

Bab VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..... VI - 1

6.1. Strategi ..... VI - 1

6.2. Arah Kebijakan ..... VI - 4

6.3. Prioritas Pembangunan Daerah ..... VI - 17

6.4. Program Pembangunan Daerah ..... VI - 22

Bab VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... VII - 1

Bab VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... VIII - 1

Bab IX PENUTUP ..... IX - 1

MATRIKS I Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Majene

MATRIKS II Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Majene Tahun 2020	II - 2
Tabel 2. 2	Nama-Nama Sungai Di Kabupaten Majene Di Rinci Berdasarkan Per Kecamatan Tahun 2020	II - 11
Tabel 2. 3	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020	II - 13
Tabel 2. 4	Kelembaban Udara Rata-rata dan Suhu Udara Rata-Rata Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020	II - 14
Tabel 2. 5	Pola Penggunaan Lahan Bukan Sawah Kab. Majene Tahun 2020	II - 16
Tabel 2. 6	Kesesuaian Lahan Untuk Pertanian Lahan Basah	II - 19
Tabel 2. 7	Luas Lahan Pemanfatan Pertanian Lahan Basah	II - 20
Tabel 2. 8	Kesesuaian Lahan Untuk Pertanian Lahan Kering	II - 21
Tabel 2. 9	Luas Lahan Pemanfatan Pertanian Lahan Kering	II - 22
Tabel 2. 10	Luas Panen Produktif Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020	II - 23
Tabel 2. 11	Luas Panen Produktif Per Komoditas Hortikultura Kabupaten Majene Tahun 2016-2020	II - 25
Tabel 2. 12	Luas Panen Produktif Komoditi Unggulan Sektor Perkebunan Kab. Majene Kurun Waktu 2016 – 2020	II - 28
Tabel 2. 13	Perkembangan Komoditas Unggulan Sektor Peternakan Kurun Waktu 2016-2020	II - 29
Tabel 2. 14	Kawasan Sentra Pengembangan Ternak Kabupaten Majene	II - 30
Tabel 2. 15	Perkembangan Komoditi Unggulan Sektor Perikanan Kabupaten Majene kurun waktu 2016 – 2020	II - 33
Tabel 2. 16	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 – 2020	II - 35
Tabel 2. 17	Potensi Pertambangan Kabupaten Majene	II - 38
Tabel 2. 18	Ketersedian, Kebutuhan, dan Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Setiap Kecamatan di Kabupaten Majene	II - 52
Tabel 2. 19	Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Kabupaten Majene	II - 53
Tabel 2.20	Ketersedian, Kebutuhan, dan Status Daya Dukung Penyediaan Air Setiap Kecamatan di Kabupaten Majene	II - 55
Tabel 2.21	Status Daya Dukung Penyediaan Air Kabupaten Majene	II - 56
Tabel 2.22	Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Majene Tahun 1969 – 2018	II - 58

Tabel 2.23	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Majene 5 Tahun Terakhir (2016 – 2020)	II - 64
Tabel 2. 24	Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Majene Tahun 2020	II - 66
Tabel 2. 25	Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Majene Tahun 2020	II - 67
Tabel 2. 26	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Majene Tahun 2020	II - 68
Tabel 2. 27	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut Kabupaten Majene Tahun 2020	II - 69
Tabel 2. 28	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 2010 Kab. Majene Tahun 2016 – 2020	II - 73
Tabel 2. 29	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kab. Majene Tahun 2016 – 2020	II - 74
Tabel 2. 30	Distribusi Persentase PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majene Periode 2016 – 2020	II - 75
Tabel 2. 31	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majene Periode 2016 – 2020	II - 77
Tabel 2. 32	Proporsi Perbandingan PDRB dan Jumlah Penduduk Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020	II - 78
Tabel 2. 33	Tingkat Inflasi Umum dan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2020	II - 82
Tabel 2. 34	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten se-Sulawesi Barat Tahun 2016 – 2020	II - 84
Tabel 2. 35	Perkembangan IPM dan Indikator Pendukung IPM Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020	II - 85
Tabel 2. 36	Perkembangan Olah Raga, Seni & Budaya Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020	II - 98
Tabel 2. 37	Angka Partisipasi Kasar PAUD – SMP Sederajat Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020	II - 99
Tabel 2. 38	Angka Partisipasi Murni PAUD – SMP Sederajat Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020	II - 100
Tabel 2. 39	Angka Partisipasi Sekolah PAUD – SMP Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020	II - 100
Tabel 2. 40	Jumlah Fasilitas Pendidikan PAUD-SMP di Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020	II - 101
Tabel 2. 41	Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI – SMP/MTs Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020	II - 102
Tabel 2. 42	Angka Kelulusan Jenjang SD – SMA Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020	II - 102

Tabel 2. 43 Angka Melanjutkan Jenjang SD Ke SMP Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020 ..... II - 103

Tabel 2. 44 Ratio Guru dan Murid Kab. Majene 2016 - 2020..... II - 104

Tabel 2. 45 Kondisi Ruang Kelas (SD – SMP) Sederajat Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020..... II - 105

Tabel 2. 46 Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Membaca Dan Menulis Tahun 2016-2019..... II - 105

Tabel 2. 47 Rasio Posyandu Terhadap Per Satuan Balita di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 107

Tabel 2. 48 Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling Per Satuan Penduduk di Kab. Majene 2016-2020. II - 108

Tabel 2. 49 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 109

Tabel 2. 50 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 110

Tabel 2. 51 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 111

Tabel 2. 52 Pelayanan Kesehatan Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan di Kab. Majene Tahun 2016 – 2020..... II - 112

Tabel 2. 53 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kab. Majene Tahun 2016 – 2020..... II - 114

Tabel 2. 54 Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020..... II - 115

Tabel 2. 55 Cakupan Pelayanan Kebidanan Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020 ..... II - 116

Tabel 2. 56 Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020..... II - 116

Tabel 2. 57 Jumlah Tenaga Medis di Kab. Majene Tahun 2016-2020. II - 117

Tabel 2. 58 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Jalan Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020 ..... II - 118

Tabel 2. 59 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020 ..... II - 118

Tabel 2. 60 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020 ..... II - 119

Tabel 2. 61 Panjang Jalan Memiliki Drainase/Saluran Pembuangan Air Kab. Majene Tahun 2016–2020 ..... II - 121

Tabel 2. 62 Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kab. Majene Tahun 2016 – 2020 ..... II - 122

Tabel 2. 63 Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020 ..... II - 123

Tabel 2. 64 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020..... II - 124

Tabel 2. 65 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020 ..... II - 125

Tabel 2. 66 Rumah Tangga Bersanitasi Layak Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 126

Tabel 2. 67 Lingkungan Permukiman Kumuh Kab. Majene Tahun 2017 – 2020 ..... II - 126

Tabel 2. 68 Perkembangan Infrastruktur Perumahan di Kab. Majene Tahun 2016 – 2020 ..... II - 129

Tabel 2. 69 Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi Kab. Majene Tahun 2016 - 2020..... II - 132

Tabel 2. 70 PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kab. Majene Tahun 2016 - 2020 ..... II - 133

Tabel 2. 71 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan Kab. Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 134

Tabel 2. 72 Kondisi Urusan Ketenagakerjaan Kab. Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 134

Tabel 2. 73 Data Kegiatan Pembinaan Ketenagakerjaan Kabupaten Majene Tahun 2020 ..... II - 135

Tabel 2. 74 Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Majene 2016 – 2020 ..... II - 136

Tabel 2. 75 Indikator Sasaran Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 139

Tabel 2. 76 Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 140

Tabel 2. 77 Penyelesaian Kasus Pertanahan Kab. Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 140

Tabel 2. 78 Jumlah Timbulan, Pengurangan dan Penanganan Sampah Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020 ..... II - 141

Tabel 2. 79 Pencemaran Status Mutu Air Tahun Kab. Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 143

Tabel 2. 80 Jumlah Penegakan Hukum Lingkungan Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 143

Tabel 2. 81 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Kab. Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 144

Tabel 2. 82 Indikator Kepemilikan KTP Kab. Majene Tahun 2016 - 2020 ..... II - 145

Tabel 2. 83 Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majene Tahun 2016 - 2020..... II - 145

Tabel 2. 84 Indikator Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020 ..... II - 146

Tabel 2. 85 Jumlah PKK Aktif Kab. Majene Tahun 2016-2018 ..... II - 147

Tabel 2. 86 Jumlah Posyandu Aktif Kab. Majene Tahun 2016-2020.... II - 148

Tabel 2. 87 Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Majene Tahun 2016– 2020 II - 150

Tabel 2. 88 Indikator Perhubungan (Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis) Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2019 ..... II - 150
Tabel 2. 89 Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 151
Tabel 2. 90 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2016-2020 Kab. Majene ..... II - 152
Tabel 2. 91 Presentase Koperasi Aktif Kab. Majene Tahun 2016-2020. II - 154
Tabel 2. 92 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 155
Tabel 2. 93 Indikator Kinerja Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2016-2020 ..... II - 156
Tabel 2. 94 Indikator Pemuda Olahraga (Jumlah Organisasi Pemuda) Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020 ..... II - 157
Tabel 2. 95 Indikator Pemuda Olahraga (Jumlah Organisasi Pemuda) Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020 ..... II - 157
Tabel 2. 96 Indikator Pemuda Olahraga (Lapangan Olahraga) Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020 ..... II - 158
Tabel 2. 97 Capaian Indikator Ketersediaan Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2016-2020 ..... II - 159
Tabel 2. 98 Rasio Pelayanan Persandian Kab. Majene Tahun 2015 - 2020 ..... II - 159
Tabel 2. 99 Indikator Kebudayaan (Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya) Kab. Majene Tahun 2016 – 2020 ..... II - 160
Tabel 2. 100 Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020 ..... II - 160
Tabel 2. 101 Indikator Kearsipan Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020 ..... II - 162
Tabel 2. 102 Jumlah Produksi Beberapa Komoditas Unggulan Perikanan di Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020 ..... II - 163
Tabel 2. 103 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 – 2020 ..... II - 165
Tabel 2. 104 Indikator Pariwisata 2017-2020 Kabupaten Majene ..... II - 165
Tabel 2. 105 Produktivitas dan Luas Lahan Tanaman Padi dan Bahan Pangan Pokok Lokal Lainnya Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 167
Tabel 2. 106 Produktivitas Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 169
Tabel 2. 107 Jumlah Produksi Komoditi Peternakan Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 170
Tabel 2.108 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 178
Tabel 2.109 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 180

Tabel 2. 110 Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 184
Tabel 2. 111 Indikator Perencanaan Pembangunan Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 187
Tabel 2.112 Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 187
Tabel 2.113 Indikator Keuangan Kab. Majene Tahun 2016-2020..... II - 189
Tabel 2.114 Kondisi Jumlah Pegawai di Kabupaten Majene Tahun 2016–2020 ..... II - 195
Tabel 2.115 Indikator Kepegawaian 2016 – 2020 Kabupaten Majene .... II - 196
Tabel 2.116 Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 198
Tabel 2.117 Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 202
Tabel 2.118 Indeks Kepuasan Masyarakat Se Kecamatan Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 205
Tabel 2.119 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada DI Kabupaten Majene Tahun 2015, 2017 dan 2020..... II - 206
Tabel 2.120 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 208
Tabel 2. 121 Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Barat Pada Triwulan IV Tahun 2018-2020 ..... II - 211
Tabel 2. 122 Persentase Pengeluaran Komsumsi Non Pangan Perkapita Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 213
Tabel 2. 123 Produktifitas Total Daerah Berdasarkan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Majene Tahun 2016-2020..... II - 214
Tabel 2. 124 Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Di Kabupaten Majene Tahun 2021 ..... II - 215
Tabel 2. 125 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 218
Tabel 2.126 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (Km) Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 219
Tabel 2. 127 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II -221
Tabel 2.128 Persentase Luas Wilayah Produktif Terhadap Luas Wilayah Budidaya Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 221
Tabel 2.129 Lokasi Banjir, Genangan, dan Chatsment Area Di Kota Majene ..... II - 223
Tabel 2. 130 Luas Lahan Kritis di Luar dan di Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 225
Tabel 2.131 Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 227

Tabel 2. 132 Posisi Pinjaman (Rupiah dan Valuta Asing) yang diberikan Bank Umum dan BPR (juta rupiah) Kabupaten MajeneTahun 2016 – 2020 ..... II - 228

Tabel 2.133 Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diberikan Bank Umum dan BPR menurut Skala Usaha Di Kabupaten Majene (juta Rp) Tahun 2016 - 2020 ..... II - 228

Tabel 2. 134 Jumlah Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Hiburan Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 229

Tabel 2. 135 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020 ..... II - 230

Tabel 2. 136 Rasio Ketersediaan Daya Listrik Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 231

Tabel 2. 137 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 232

Tabel 2. 138 Persentase Penduduk Pengguna HP/Telepon Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 233

Tabel 2.139 Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Majene Menurut Kepolisian Sektor Tahun 2016 - 2020 ..... II - 235

Tabel 2.140 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor, Tahun 2016 - 2020 ..... II - 235

Tabel 2. 141 Angka Kriminalitas Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 II - 236

Tabel 2.142 Pelayanan Perizinan OSS dan Non OSS (SiCantik Cloud) Kabupaten Majene Tahun 2020-2021 ..... II - 238

Tabel 2. 143 Realisasi Pendapatan Menurut Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 241

Tabel 2. 144 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Di Kabupaten Majene Hingga Tahun 2020 ..... II - 242

Tabel 2. 145 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Di Kabupaten Majene Tahun 2020..... II - 244

Tabel 2. 146 Rasio Ketergantungan Kab. Majene Tahun 2016–2020..... II - 245

Tabel 2.147 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Terhadap Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 247

Tabel 2.148 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Terhadap Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 249

Tabel 2.149 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Terhadap Aspek Pelayanan Umum K abupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 250

Tabel 2.150 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Majene Tahun 2020 ..... II - 274

Tabel 2.151 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene Tahun 2020 ..... II -276

Tabel 2.152 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majene Tahun 2020 .... II - 277

Tabel 2.153 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majene Tahun 2020 ..... II - 278

Tabel 2.154 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Majene Tahun 2020 ..... II - 279

Tabel 2.155 Capaian Indikator TPB Kabupaten Majene ..... II - 281

Tabel 2.156 Capaian Indikator TPB KLHS RPJMD Kabupaten Majene 2021-2026 ..... II - 282

Tabel 2.157 Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan pada Setiap Tujuan TPB di Kabupaten Majene ..... II - 283

Tabel 2.158 Jumlah Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan pada Setiap Tujuan TPB di Kabupaten Majene ..... II - 285

Tabel 2.159 Sebaran Indikator TPB pada Kelompok Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target di Kabupaten Majene Tahun 2021 ..... II - 287

Tabel 2.160 Sebaran Indikator TPB pada Kelompok Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target di Kabupaten Majene Tahun 2021 ..... II - 303

Tabel 2.161 Sebaran Indikator TPB pada Kelompok Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target di Kabupaten Majene Tahun 2021 ..... II - 317

Tabel 2.162 Sebaran Indikator TPB pada Kelompok Indikator Belum Memiliki Data di Kabupaten Majene Tahun 2021 ..... II - 320

Tabel 3. 1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020 ..... III - 3

Tabel 3. 2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Majene ..... III - 3

Tabel 3. 3 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 ..... III - 11

Tabel 3. 4 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Majene ..... III - 14

Tabel 3. 5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Majene ..... III - 21

Tabel 3. 6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Majene.. III - 23

Tabel 3. 7 Rincian SILPA Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Majene ..... III - 23

Tabel 3. 8 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Majene ..... III - 25

Tabel 3. 9 Pertumbuhan Rasio Keuangan Kabupaten Majene ..... III - 29

Tabel 3. 10	Pertumbuhan Rasio Keuangan Kabupaten Majene.....	III - 33
Tabel 3. 11	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Majene Tahun 2018 - 2020	III - 34
Tabel 3. 12	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Majene	III - 36
Tabel 3. 13	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Majene	III - 37
Tabel 3. 14	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Majene Tahun 2021-2026	III - 37
Tabel 3. 15	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Majene	III - 39
Tabel 3. 16	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Majene	III - 39
Tabel 3. 17	Target Tahun 2021 dan Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 s/d Tahun 2026 Kabupaten Majene	III - 41
Tabel 3. 18	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Majene	III - 50
Tabel 3. 19	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Majene	III - 51
Tabel 4. 1	Permasalahan Daerah Berdasarkan Capaian Indikator RPJMD dan Aspek Pelayanan Umum	IV - 6
Tabel 5. 1	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dan Pertumbuhannya Tahun 2016 – 2020.....	V - 5
Tabel 5. 2	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dan Pertumbuhannya Tahun 2016 – 2020.....	V - 6
Tabel 5. 3	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dan Pertumbuhannya Tahun 2016 – 2020.....	V - 9
Tabel 5. 4	Keselarasan Misi Pada RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJMD Sulawesi Barat 2017 – 2022	V - 10
Tabel 5. 5	Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator sasaran.....	V - 12
Tabel 5.6	Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Visi : “MAJENE UNGGUL, MANDIRI DAN RELIGIUS”.....	V - 15
Tabel 6.1	Strategi Pembangunan Daerah berdasarkan Rumusan Tujuan dan Sasaran.....	VI - 2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Majene	VI - 6
Tabel 6.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene Periode Tahun 2021 – 2026.....	VI - 19
Tabel 6.4	Tema Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026	VI - 21
Tabel 6.5	Operasionalisasi Strategi dan Arah Kebijakan dalam Program Pembangunan Daerah.....	VI - 22
Tabel 6.6	Matriks Keterkaitan Visi, Misi dan Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati Majene	VI - 39

Tabel 7. 1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Majene	VII- 2
Tabel 8. 1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majene Tahun 2021-2026	VIII- 2
Tabel 8. 2	Penetapan Indikator Kinerja Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Majene Tahun 2021-2026	VIII- 4
Tabel 8. 3	Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal.....	VIII- 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan SKPD	I - 12
Gambar 1. 2	Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	I - 17
Gambar 1. 3	Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan RKPD Perangkat Daerah	I - 18
Gambar 1. 4	Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan RTRW Kabupaten Majene	I - 18
Gambar 2. 1	Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kab. Majene Tahun 2020	II - 2
Gambar 2. 2	Posisi Kabupaten Majene dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat	II - 3
Gambar 2. 3	Peta Administrasi Kabupaten Majene	II - 4
Gambar 2. 4	Peta Topografi Kabupaten Majene	II - 6
Gambar 2. 5	Peta Geologi Kabupaten Majene	II - 7
Gambar 2. 6	Peta Hidrologi Kabupaten Majene	II - 12
Gambar 2. 7	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Majene	II - 15
Gambar 2. 8	Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Majene	II - 49
Gambar 2. 9	Peta Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Kabupaten Majene	II - 53
Gambar 2.10	Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air Kabupaten Majene	II - 56
Gambar 2.11	Peta Risiko Multi Bahaya di Kabupaten Majene	II - 63
Gambar 2. 12	Jumlah Penduduk Kabupaten Majene 5 Tahun Terakhir Tahun 2016 – 2020	II - 65
Gambar 2. 13	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Majene Periode 2016 – 2020	II - 65
Gambar 2.14	Piramida Penduduk Menurut Persentase Penduduk Kelompok Umur (5 Tahunan) dan Jenis Kelamin	II - 68
Gambar 2. 15	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Majene dan Regional Sulawesi Barat Tahun 2016 – 2020	II - 71
Gambar 2. 16	Perbandingan PDRB ADHK Kab. Majene terhadap PDRB ADHK Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 – 2020	II - 72
Gambar 2. 17	PDRB Per Kapita Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 – 2020	II - 78
Gambar 2. 18	Tingkat Inflasi Regional Kab. Majene Tahun 2020	II - 80

Gambar 2. 19 Persentase Tingkat Inflasi Tahun 2010 – 2020 Di Regional Sulawesi Barat Menurut Kelompok Pengeluaran ..... II - 81
Gambar 2. 20 Tingkat Inflasi Regional Tahun 2016 - 2020 ..... II - 83
Gambar 2. 21 Usia Harapan Hidup Kab. Majene, Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2015 – 2020 ..... II - 86
Gambar 2. 22 Harapan Lama Sekolah Kab. Majene, Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2015 – 2020 ..... II - 87
Gambar 2. 23 Rata-rata Lama Sekolah Kab. Majene, Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2015 – 2020 ..... II - 88
Gambar 2. 24 Pengeluaran per Kapita Kab. Majene, Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2015 – 2020 (Juta Rupiah)..... II - 89
Gambar 2.25 Perbandingan Indeks Gini/Koefisien Gini antara Kab. Majene, Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2016 – 2020 ..... II - 90
Gambar 2. 26 Prevelensi Stunting Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020 ..... II - 91
Gambar 2. 27 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Majene dan Provinsi Sulbar, Periode 2016 – 2020 ..... II - 92
Gambar 2. 28 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Majene Periode 2016 - 2020..... II - 94
Gambar 2. 29 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kab. Majene dan Prov. Sulbar Periode 2016 – 2020 ..... II - 95
Gambar 2. 30 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kab. Majene dan Prov. Sulbar Periode 2016 – 2020 ..... II - 96
Gambar 2. 31 Grafik Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020 ..... II - 119
Gambar 2. 32 Grafik Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020 ..... II - 120
Gambar 2. 33 Grafik Drainase Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020 ..... II - 122
Gambar 2. 34 Grafik Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020 ..... II - 124
Gambar 2. 35 Persentase Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Majene Tahun 2016–2020 ..... II - 128
Gambar 2. 36 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Majene 2016 – 2020 ..... II - 137
Gambar 2. 37 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Majene 2016 – 2020 ..... II - 138
Gambar 2. 38 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Majene 2016 – 2020 ..... II - 148
Gambar 2. 39 Contraseptive Prevalence Rate (CPR) Kab. Majene Tahun 2016–2020 ..... II - 149

Gambar 2. 40 Grafik Perkembangan Jumlah Produksi Peternakan Kab. Majene Tahun 2016–2020 ..... II - 171

Gambar 2. 41 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab. Majene Tahun 2016-2020..... II - 172

Gambar 2.42 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Pertambanhan dan Penggalian Kab. Majene Tahun 2016-2020..... II - 176

Gambar 2. 43 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan Kab. Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 177

Gambar 2. 44 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perindustrian Kab. Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 179

Gambar 2. 45 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perindustrian Kab. Majene Tahun 2016-2020 ..... II - 194

Gambar 2. 46 Persentase Jumlah Pemilih dan Tidak Memilih Pilkada Di Kab. Majene Tahun 2015, 2017 dan 2020 ..... II - 206

Gambar 2. 47 Persentase Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) Kabupaten Di Sulawesi Barat Tahun 2020 ..... II - 210

Gambar 2. 48 Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Barat Pada Triwulan IV Tahun 2016-2020 ..... II - 212

Gambar 2. 49 Nilai Net Ekspor (X-M) Dalam (Miliar Rupiah) Kabupaten Majene 2016-2020..... II - 218

Gambar 2. 50 Laju Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi Menurut lapangan Usaha Kabupaten Majene (Persen), 2016 - 2020..... II - 233

Gambar 2. 51 Grafik Realisasi Pendapatan Menurut Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020 II - 241

Gambar 2. 52 Rasio Ketergantungan Kab. Majene Tahun 2016-2020.... II - 245

Gambar 2.53 Kelompok Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Majene 2021-2026..... II - 283

Gambar 2.54 Indikator TPB Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target di Kabupaten Majene..... II - 286

Gambar 2.55 Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Di Kabupaten Majene..... II - 302

Gambar 2.56 Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Di Kabupaten Majene..... II - 316

Gambar 2.57 Indikator TPB yang Belum Belum Memiliki Data Di Kabupaten Majene..... II - 319

Gambar 3. 1 Gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020 ..... III - 6

Gambar 3. 2 Grafik Laju Pertumbuhan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020..... III - 7

Gambar 3. 3 Komposisi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020..... III - 8

Gambar 3. 4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhannya Tahun 2016 – 2020 ..... III - 9

Gambar 3. 5 Realisasi Dana Perimbangan dan Pertumbuhannya Tahun 2016 – 2020 ..... III - 12

Gambar 3. 6 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Pertumbuhannya Tahun 2016 – 2020 ..... III - 13

Gambar 3. 7 Gambaran Target dan Realisasi Belanja Daerah di Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020 ..... III - 15

Gambar 3. 8 Grafik Laju Pertumbuhan Target dan Realisasi Belanja Daerah di Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020 ..... III - 16

Gambar 3. 9 Komposisi Belanja Daerah Tahun 2016 – 2020 ..... III - 16

Gambar 3. 10 Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Pertumbuhannya Tahun 2016 – 2020 ..... III - 18

Gambar 3. 11 Grafik Realisasi Belanja Langsung dan Pertumbuhannya Tahun 2016 – 2020 ..... III - 20

Gambar 3. 12 Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pertumbuhannya Tahun 2016 – 2020 ..... III - 22

Gambar 3. 13 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dan Pertumbuhannya Tahun 2016 – 2020 ..... III - 22

Gambar 4. 1 Transformasi MDGs Menjadi SDGs ..... IV - 40

Gambar 4. 2 Pembangunan Rendah Karbon Indonesia Sebagai Platform Baru Pembangunan Nasional ..... IV - 44

Gambar 4. 3 Proses kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMN 2020-2024 dan Pembangunan Rendah Karbon ..... IV - 53

Gambar 4. 4 10 Strategi Prioritas Nasional terhadap Revolusi Industri 4.0 ..... IV - 52





BAB

I



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majene yang dilaksanakan pada tahun 2020 menetapkan Bapak H. Andi Achmad Syukri Tammalele sebagai Bupati dan Bapak Arismunandar sebagai Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Majene dengan jargon politik pada saat kampanye mewujudkan Majene Aman, Sejahtera, Terarah, Agromarine, Responsif, Inovatif, dan Sustainabel atau disingkat dengan AST – ARIS yang merupakan singkatan dari nama Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati setelah dilantik berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat dengan RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta petunjuk teknis dalam penyusunan RPJMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD di tetapkan paling lambat 6 bulan setelah pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Majene melalui beberapa tahapan yaitu (1) persiapan penyusunan RPJMD; (2) penyusunan rancangan awal RPJMD; (3) penyusunan rancangan RPJMD; (4) pelaksanaan musrenbang RPJMD; (5) perumusan rancangan akhir RPJMD; dan (6) penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.



Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran periode keempat atau tahapan terakhir dari RPJPD Kabupaten Majene tahun 2005-2025 dengan visi **Kabupaten Sebagai Pusat Pendidikan Sebagai Konsep Pembangunan Berkelanjutan Tatanan Masyarakat Madani.**

Dokumen RPJMD tersebut disusun dengan menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan, baik pendekatan yang berorientasi proses, maupun pendekatan berorientasi substansi.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses antara lain:

1. Pendekatan Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh proses penyusunan RPJMD dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten.
2. Pendekatan Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodasinya saran dan masukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene.
3. Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan perencanaaan yang mengakodomasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang RPJMD.
4. Pendekatan *Top-down dan Buttom Up*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah



pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukan oleh konsistensi Penyusunan RPJMD yang mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022. Komitmen ini dilaksanakan melalui telaah kebijakan, konsultasi dan evaluasi Ranperda RPJMD dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu penyusunan kebijakan dan program RPJMD juga mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Majene.

Sementara Pendekatan berorientasi pada substansi yang digunakan meliputi pendekatan Holistik- Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Pendekatan tersebut merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

1. Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Dalam hal ini penyusunan RPJMD sudah memperhatikan lokasi dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah.

Dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Majene juga memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen KLHS RPJMD diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Majene tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idiil Pancasila
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 6
3. Landasan Operasional, yaitu:
    1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
    2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
    3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
    4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14) Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
15) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
16) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembanguan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
24) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
25) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

26) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 31, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6633);
29) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
30) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
31) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
32) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
33) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
34) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102);

42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
43) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
45) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 52);
46) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 85);
47) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 92);
48) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;
49) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 9);
50) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 12);

51) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12).
52) Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Majene tahun 2020.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat Nasional maupun Daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, dimana dokumen tersebut adalah:

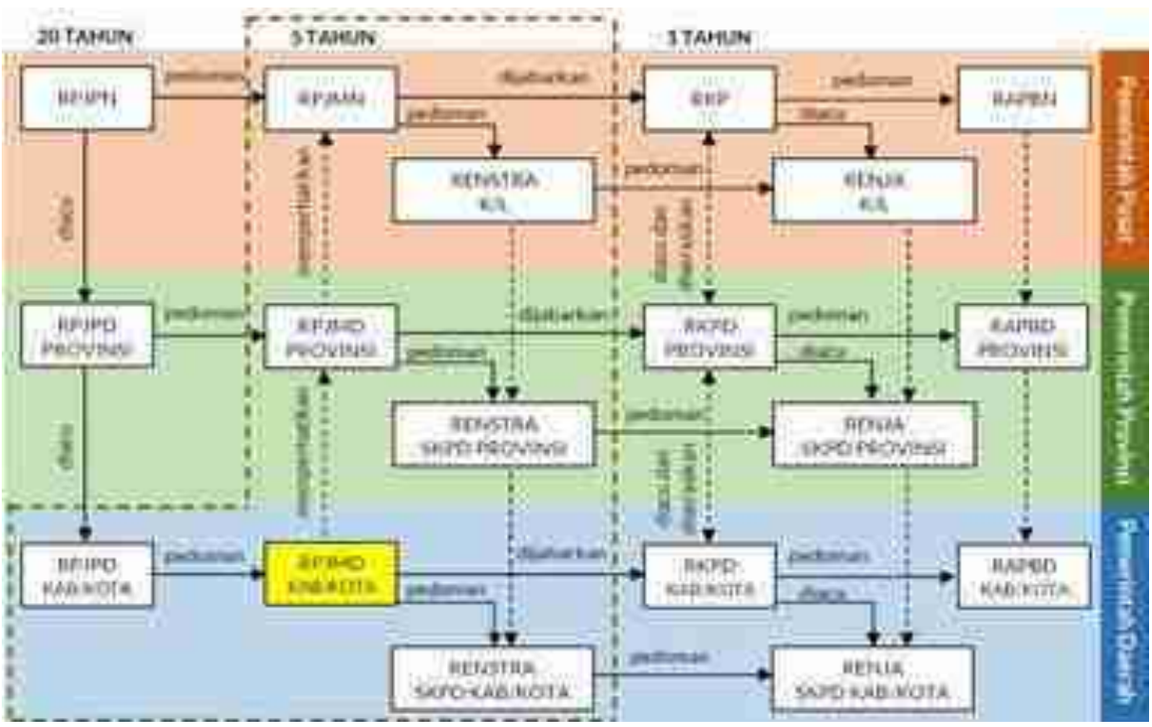
1. RTRW Nasional 2008-2028
2. RTR Pulau Sulawesi 2011-2031
3. RPJPN Periode 2005-2025
4. RPJMN Periode 2020-2024
5. RPJPD Provinsi Sulawesi Barat periode 2005-2025
6. RTRW Provinsi Sulawesi Barat periode 2014-2034
7. RPJMD Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022
8. RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2005 – 2025
9. RTRW Kabupaten Majene Tahun 2011-2031

Secara substansi, keberadaan RPJMD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Sementara dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah, baik dalam skala lokal RTRW Kabupaten, skala wilayah RTRW Provinsi dan skala Nasional RTRW Nasional.

Hubungan keterkaitan antara dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan SKPD



1.3.1. RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJM Nasional

RPJMD memperhatikan dan mempedomani RPJMN, sehingga penyusunan RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPJMN yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.



Dalam Peraturan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa RPJPN 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024. Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, adalah:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan BerkepribadianBerlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.



2. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses kekawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhan akan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan



7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

1.3.2. RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat

Mekanisme Penyusunan RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 berdasarkan pada Gambar 1.1 tetap memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergitas pembangunan antara program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan program pembangunan di Kabupaten Majene.

1.3.3. RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJPD Kabupaten Majene

Pada gambar 1.1 terlihat bahwa RPJMD mempedomani RPJPD. RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD tahun keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2005-2025 dengan visi "*Kabupaten Majene sebagai Pusat Pendidikan Dengan Konsep Pembangunan Yang Berkelanjutan Menuju Tatanan Masyarakat Madani*". Di satu sisi, RPJMD periode 2021-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian Visi pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPD mengenai sasaran pokok yang harus sesuai dengan arah kebijakan pada setiap tahapan periode pelaksanaannya. Pada tahapan RPJMD ini merupakan periode keempat dari tahapan RPJPD yang harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana yang telah diatur dalam RPJPD Kabupaten Majene 2005 - 2025 dan kemudian disinkronisasikan dengan Visi, Misi dan rencana pembangunan Bupati dan wakil bupati terpilih sehingga pembangunan dapat berjalan searah dan sinergis serta sesuai dengan tahapan perencanaan yang telah ditetapkan.



Namun di sisi yang lain, fokus kebijakan di RPJMD tahun 2021-2026 ini adalah percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak pendemi COVID-19 yang mulai terjadi di awal tahun 2020. Diperkirakan, pembatasan sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 akan berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan tingkat inflasi, pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Pandemi COVID-19 juga berpengaruh secara signifikan pada kemampuan keuangan daerah sebagai penggerak perekonomian daerah.

Karena itu, visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Majene masa bakti tahun 2021-2026 harus merespon:

1. Penuntasan pemulihan sosial ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19,
2. Penuntasan pencapaian visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Majene Tahun 2005-2025.

1.3.4. RPJMD Kabupaten Majene dengan Renstra PD

RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Dokumen Renstra PD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan sampai kepada penentuan indikasi program dan kegiatan setiap bidang dan/atau fungsi pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh masing-masing Kepala PD yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Majene sebagai leading sektor penyusunan Dokumen ini.

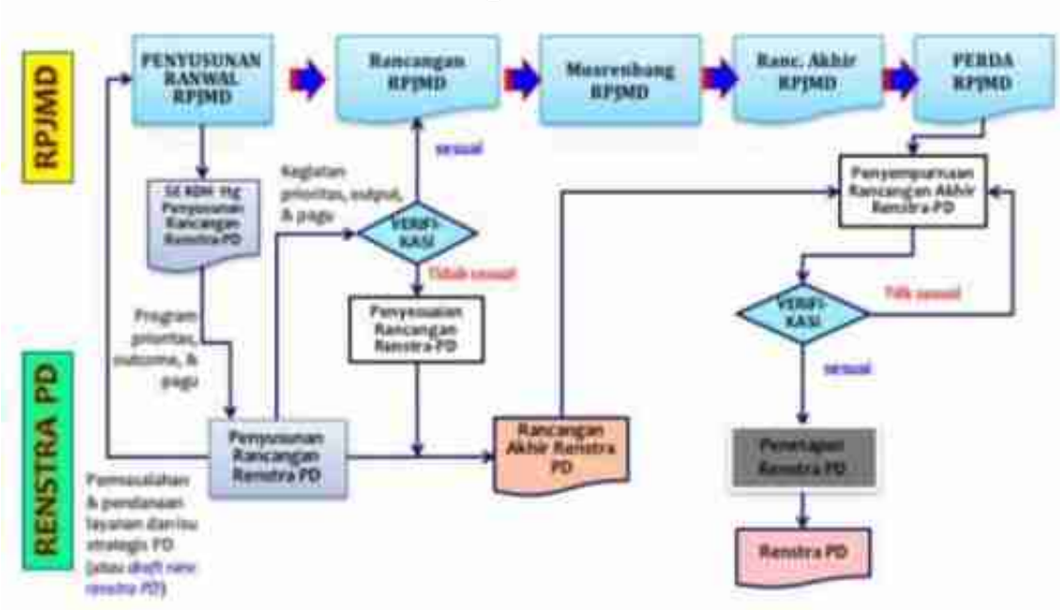
Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra PD) ini dimaksudkan untuk pencapaian target atau sasaran program yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Visi dan Misi yang ingin diwujudkan oleh masing-

masing PD pada akhir periode Renstra ini harus selaras dan sejalan dengan apa yang menjadi pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam dokumen RPJMD.

Proses perumusan Renstra PD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyusunan RPJMD. Pada tahapan penyusunan Renstra PD ini dilaksanakan secara bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Rancangan awal Renstra PD ini merupakan dokumen pendukung untuk menyusun dan menyempurnakan dokumen RPJMD. Sementara itu penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD dalam rangka menyempurnakan dokumen Renstra PD berpedoman kepada Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyempurnaan ini bertujuan untuk mempertajam visi, misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Gambar 1.2

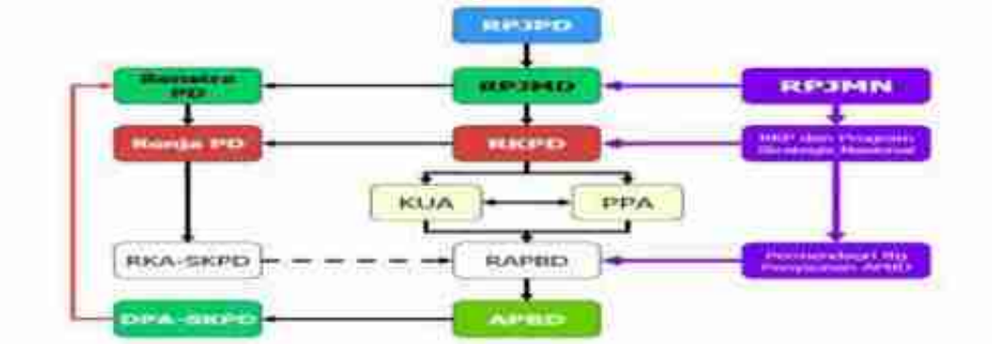
Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



1.3.5. RPJMD Kabupaten Majene dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD sebagai dokumen strategis dijabarkan kedalam kebijakan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi acuan bagi masing-masing Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Program dan kegiatan tahunan (Renja PD) yang kemudikan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKPD ini akan menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

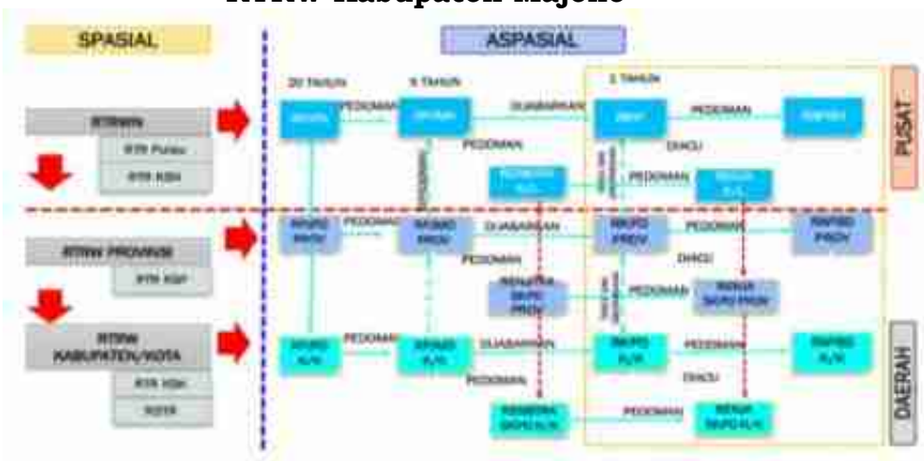
Gambar 1.3
Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan RKPD Perangkat Daerah



1.3.6. RPJMD Kab. Majene dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW-N, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten)

Sementara Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah, baik dalam skala lokal RTRW Kabupaten, skala wilayah RTRW Provinsi dan skala Nasional RTRW Nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, bermanfaat secara maksimal dan berkesinambungan di setiap wilayah pembangunan.

Gambar 1.4
Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan RTRW Kabupaten Majene



1.3.7. RPJMD Kab. Majene dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Majene

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam Revisi RPJMD Kabupaten Majene yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalamRenstra-PD).

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Majene agar terarah, terpadu dan berkesinambungan, serta menjabarkan RPJPD kabupaten Majene tahun 2005 – 2025.



Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang akan menjadi acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
b. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur;
c. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Kabupaten Majene tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Majene.



BAB II **Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Majene.**

Bab ini menjelaskan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan.

BAB III **Gambaran Keuangan Daerah.**

Bab ini berisi gambaran Kinerja Keuangan Masa Lalu; Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, serta Kerangka Pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2021 - 2026.

BAB IV **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.**

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaaan daerah dalam jangka menengah.

Bab V **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.**

Bab ini berisi visi, penjelasan pokok visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Bab VI **Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.**

Bab ini berisi tentang Strategi, Arah Kebijakan , Prioritas Pembangunan Daerah , dan Program Pembangunan Daerah.

Bab VII **Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**.

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan



Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bab ini berisi tentang indikator kinerja daerah yang terdiri atas indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Bab IX Penutup.

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan





BAB II

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan sebagai berikut:

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini akan ditinjau berbagai aspek yang menyangkut Aspek Geografi dan demografi Kabupaten Majene, yang meliputi; gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana, sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Majene merupakan kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi dan merupakan salah satu daerah otonom yang termasuk dalam 6 (enam) kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, terletak di pesisir pantai barat Propinsi Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara. Secara administratif Kabupaten Majene berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

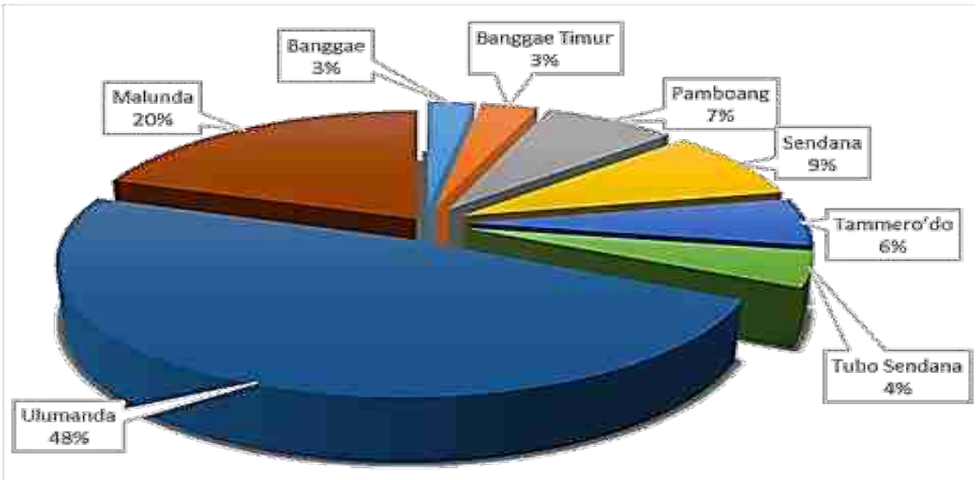
Luas wilayah daratan Kabupaten Majene adalah 947,84 km² atau 5,6% dari luas Provinsi Sulawesi Barat dan luas wilayah laut ±13.124km², dengan panjang garis pantai ±125 km². Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Majene Nomor 7 Tahun 2010 dan Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pemekaran Desa/Kelurahan, maka sejak tahun 2011 Kabupaten Majene mengalami pemekaran wilayah dari 40 desa/kelurahan menjadi 82 desa/kelurahan. Sehingga secara administratif Kabupaten Majene terdiri dari 8 kecamatan, 20 kelurahan, 62 desa dan 361 SLS (Satuan Lingkungan Setempat) yang terbagi dalam 257 dusun dan 104 lingkungan. Adapun pembagian administrasi, luas dan persentase wilayah kecamatan secara detail di Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.1.
Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Majene Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (Km²)	%	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Banggae	25.15	2.65	6	2
2	Banggae Timur	30.04	3.17	8	1
3	Pamboang	70.19	7.41	2	13
4	Sendana	82.24	8.68	2	14
5	Tammero'do	55.40	5.84	-	7
6	Tubo Sendana	41.17	4.34	-	7
7	Ulumanda	456	48.11	-	8
8	Malunda	187.65	19.80	2	10
Jumlah		**947.84**	**100.00**	**20**	**62**

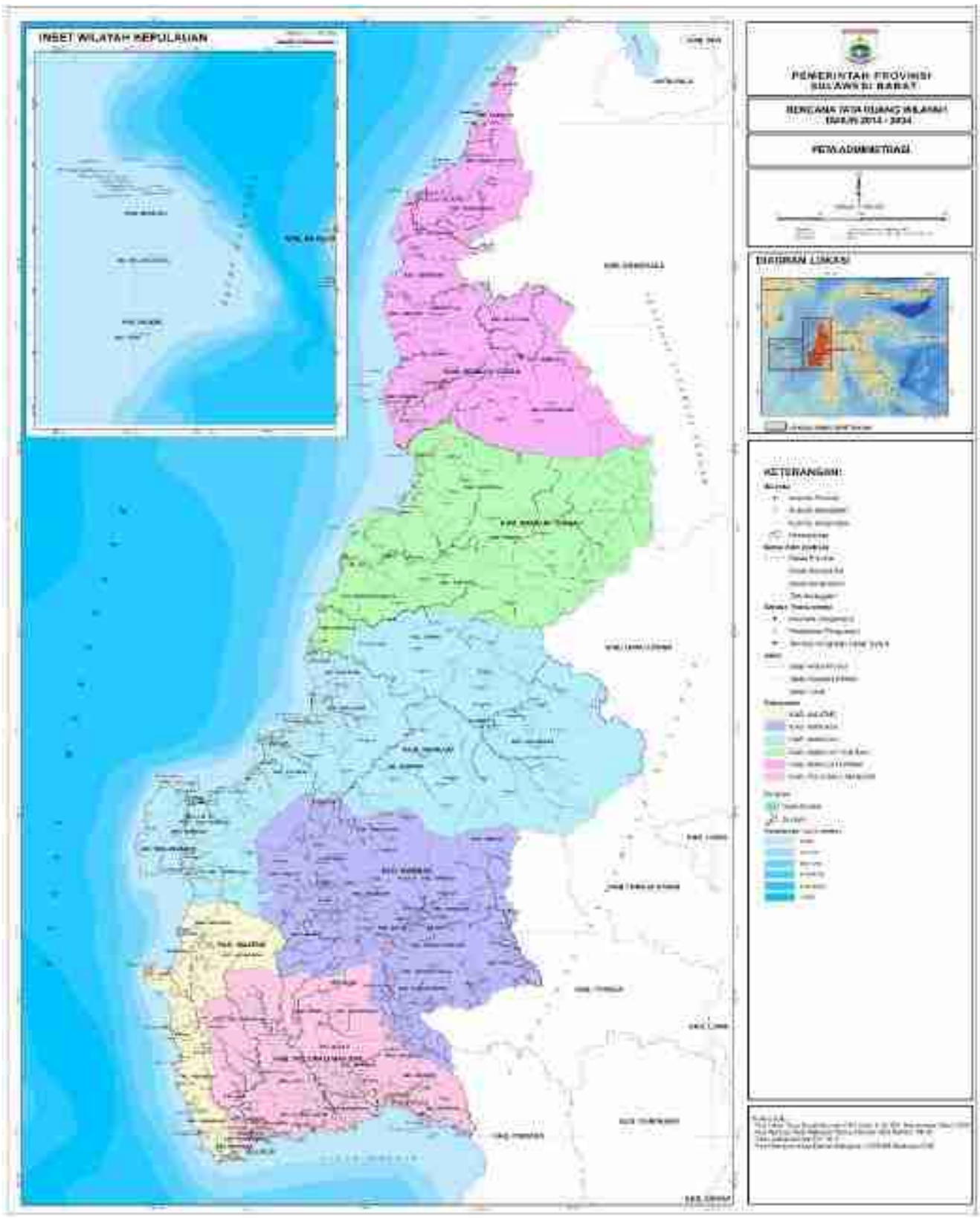
Sumber : Kabupaten Majene Dalam Angka, 2021

Gambar 2.1.
Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kab. Majene Tahun 2020



Sumber : Kabupaten Majene Dalam Angka, 2021

Gambar 2.2.
Posisi Kabupaten Majene dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat



Sumber : Bapeda Kab. Majene, 2021

Gambar 2.3.
Peta Administrasi Kabupaten Majene



Sumber : Bapeda Kab. Majene, 2021

Kecamatan Ulumanda merupakan wilayah kecamatan terluas dibanding dengan luas wilayah kecamatan lainnya yakni 456Km² atau 48,11%, kemudian Kecamatan Malunda dengan luas wilayah 187,65 Km2 atau 19,80%, sedangkan wilayah kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Banggae dan Banggae Timur, dengan luas wilayah masing-masing adalah Kecamatan Banggae 25,15 Km² atau 2,65% dan Kecamatan Banggae Timur 30,04 Km2 atau 3,17% dari luas total wilayah Kabupaten Majene.

2.1.1.2. Letak Dan Kondisi Geografis

Pada dasarnya wilayah Kabupaten Majene sangat berpengaruh terhadap daerah sekitarnya ini dapat dilihat dari letak Kabupaten Majene secara geografis terletak antara 20^0 38’ 45” – 30^0 38’ 15” Lintang Selatan dan antara 118^0 45’ 00” - 119^0 4’ 45” Bujur Timur. Kabupaten Majene terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi, yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. 95% dari total wilayah perairan Kabupaten Majene masuk dalam alur pelayaran Selat Makassar, yang menghubungkan Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan masuk memanjang dari Selatan ke Utara.Jarak Kabupaten Majene ke ibukota Propinsi Sulawesi Barat kurang lebih 146 km. Letak geografis Kabupaten Majene berada dalam jalur lintas barat Pulau Sulawesi yang menghubungkan antara Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.

Kabupaten Majene terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yang masuk dalam wilayah adminsitrasi, diantaranya Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur merupakan kecamatan yang terletak di Ibukota Kabupaten Majene, dengan kondisi wilayah yang relatif datar. Sedangkan enam kecamatan lainnya yaitu Pamboang, Sendana, Tammerodo, Tubo, Malunda dan Ulumanda didominasi wilayah berbukit dan pegunungan. Persentase luas wilayah Kabupaten Majene dengan rata-rata ketinggian lokasi yang berada pada ketinggian 100 – 500 mdpl adalah 38,7%.

Secara kondisi Geomorfologi Kabupaten Majene berada pada ketinggian (5-1.327) meter dari permukaan laut. Berdasarkan keadaan bentang alamnya terdiri atas satuan 4 morfologi yaitu : Satuan Morfologi Pegunungan, satuan ini menempati Pegunungan Manatattuang; Satuan Morfologi Perbukitan terletak di Daerah Banggae dan Pamboang; Satuan Morfologi Karst menempati daerah pantai selatan dan utara (Daerah Tubo) dan Satuan Morfologi Pedataran menempati pesisir pantai barat.

2.1.1.3. Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng

Kondisi topografi sangat berpengaruh dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Kabupaten Majene dibangun oleh wilayah yang topografinya bervariasi dari datar sampai berbukit dan bergunung, dengan kemiringan lereng kurang dari 3 % sampai lebih dari 100 %. Hamparan daerah dengan topografi datar ditemukan di sepanjang wilayah paralel dengan garis pantai kabupaten ini. Hamparan wilayah datar terutama ditemukan mulai dari pantai barat Kecamatan Sendana menuju ke selatan sampai ke Kecamatan Banggae dan Banggae Timur yang merupakan (Ibukota Kabupaten). Sebagian besar wilayah Kabupaten Majene dengan kondisi topografi berbukit dan bergunung yang hampir merata di semua kecamatan di Kabupaten Majene.

Gambar 2.4.
Peta Topografi Kabupaten Majene



Sumber : Bapeda Kab. Majene, 2021

Klasifikasi ketinggian wilayah Kabupaten Majene dari permukaan air laut mulai dari 0-25 m sampai diatas 1.000 meter. Berdasarkan kelas ketinggian muka laut yang tersebar pada umumnya tergolong kelas ketinggian 100-500 meter yakni 38,69% dan ketinggian 500-1000 meter

yakni 35,98% dari total keseluruhan wilayah kabupaten. Kecamatan Ulumanda merupakan wilayah dengan luas wilayah terluas pada umumnya dan merupakan wilayah yang berada di pegunungan dengan ketinggian antara 500-1000 meter dengan luas sebesar 30.219 Ha.

2.1.1.4. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Bentang alam wilayah Kabupaten Majene yang merupakan wilayah datar, bergelombang, berbukit sampai bergunung yang tersebar di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Majene. Secara umum jenis tanah yang tersebar di wilayah Kabupaten Majene adalah Alluvial, Mediteran, Latosol, Gromosol, Poksolik Merah, dan Laterik yang tersebar di semua kecamatan. Kondisi geologi regional wilayah Kabupaten Majene sangat spesifik karena merupakan pertemuan dua gugusan benua yaitu Benua Asia dan Australia. Karakteristik geologis wilayah perencanaan merupakan satu kesatuan dengan kondisi geologis wilayah Majene yang terbagi kedalam kondisi geomorfologi, fisiografi, statigrafi dan struktur batuan yang dijelaskan sebagai berikut.

Gambar 2.5.
Peta Geologi Kabupaten Majene



Sumber : Bapeda Kab. Majene, 2021

1. Geomorfologi

Daerah Kabupaten Majene berada pada ketinggian (5-1.327) meter dari permukaan laut. Berdasarkan keadaan bentang alamnya terdiri atas satuan 4 morfologi yaitu :

1) Satuan Morfologi Pegunungan, satuan ini menempati Pegunungan Manatattuang di Kecamatan Ulumanda.

2) Satuan Morfologi Perbukitan terletak di Daerah Banggae, Banggae Timur dan Pamboang.
3) Satuan Morfologi Karst menempati daerah pantai selatan dan utara (Wilayah Kecamatan Tubo).
4) Satuan Morfologi Pedataran menempati pesisir disepanjang pantai barat Kabupaten Majene.

2. Fisiografi

Kondisi Fisiografi adalah kondisi yang menggambarkan kondisi pegunungan yang membentang dari arah utara sampai ke timur. Secara fisiografis dilihat dari utara, selatan, dan timur membujur Kawasan Pegunungan. Jalur fisiografisnya berupa sesar naik yang dimulai dari sesar kontak di wilayah Majene dan berakhir dengan sesar naik di daerah Pasangkayu. Secara keseluruhan terdiri dari sesar naik dan kontak diselang Antiklin dan Siklin yang membentuk daerah menjadi bergelombang mulai dari tepi pantai. Umumnya sesar ini membentuk daerah berbukit-bukit dengan batas daerah yang datar.

3. Stratigrafi

Secara umum stratigrafi Kabupaten Majene dicirikan oleh singkapan-singkapan dari batuan sedimen, pbatuan gunung api yang bersifat menengah, dan basa serta batuan terobosan. Batuan-batuan mempunyai usia yang berbeda-beda yaitu usia tersier dan kwarter yang terjadi pada zaman yang berbeda : Paleosen, Oligosen, Miosen, Pliosen, Plestosen, dan Holosen. Umumnya batuan-batuan ini kaya akan kandungan mineral.

4. Struktur Batuan

Litologi jenis batuan di daerah penyelidikan ditentukan berdasarkan kenampakan fisik yang dijumpai di lapangan, dengan tetap mengacu pada formasi batuan yang telah ditentukan oleh para peneliti terdahulu. Lokasi penyelidikan / pengukuran geolistrik dan topografi di sepanjang poros jalan provinsi Trans Sulawesi Bagian Barat, Kecamatan Banggae dan Pamboang. Secara keseluruhan litologi jenis batuan daerah tersebut tersusun oleh Satuan Napal Tufaan (Qm=Quarter Marl) dan Endapan Alluvial (Qal=Quarter Alluvial) yang dijelaskan berikut ini :

1) Batuan Napal Tufaan, Periode Kwarter (Qm)

Satuan Napal Tufaan terdiri atas perselingan antara napal tufaan dengan bongkah koral, serpin napalan, batupasir tufaan dengan lensa-lensa konglomerat. Hasil pengamatan lapangan pada setiap perselingan batuan adalah sebagai berikut :

a. Napal tufaan ; berwarna abu-abu kecoklatan, struktur tidak berlapis dan bersifat agak rapuh atau tidak terkonsolidasi dengan baik, terdapat bongkah koral pada permukaan.
b. Serpihan Napalan ; berwarna putih abu-abu, tekstur klastik halus, porositas besar dan permiabilitas kecil. Struktur menyerpih sangat kuat dengan bentuk sperodial (kulit bawang), resistensi batuan sangat rendah. Pada batuan ini dijumpai perlapisan, jurus perlapisan berarah Barat laut – Tenggara dengan kemiringan Timur laut (N 305oE/18o).
c. Batu pasir Tufaan ; berwarna putih pucat dan putih dengan bercak berwarna coklat pada lapisan bagian bawah. Batu pasir tufaan terdiri dari dua lapisan yakni pada bagian atas dengan tekstur klastik halus serpih napalan dan bagian bawah dengan tekstur agak kasar. Secara umum struktur batuan kompak (terkonsolidasi dengan baik).

Hasil pengukuran stratigrafi terukur menunjukan urutan perlapisan batuan adalah bagian atas dengan napal tufaan dengan ketebalan 5,4 meter. Selanjutnya pada bagian bawah terdiri atas perselingan antara batu pasir tufaan dengan serpih napalan. Perulangan perlapisan sebanyak 5 lapisan untuk batu pasir tufaan, dan 4 lapisan untuk serpih napalan. Ketebalan masing-masing berkisar antara (0,6 – 2) meter pada batu pasir tufaan, dan antara (0,4 – 1,8) meter pada serpih napalan. Selanjutnya pada bagian bawah terdiri atas batu pasir kasar dengan ketebalan 1,5 meter (ketebalan tersingkap). Satuan batuan ini dominan menempati daerah perbukitan dan sedikit pedataran.

2) Batuan Endapan Alluvial, Periode Kwarter (Qal)

Endapan Alluvial terdiri atas koral, kerikil, pasir, lempung dan lumpur. Penyebarannya sempit menempati daerah pedataran sepanjang garis pantai. Endapan ini merupakan endapan geologi muda, tidak terkonsolidasi dengan baik, dan belum terkompasi menjadi batuan (merupakan sedimen lepas).

Formasi batuan penyusun geologi di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur Majene adalah batuan dari formasi Mapi, yang terdiri dari batu pasir, batu lanau, batu lempung, batu gamping pasiran, dengan ketebalan sekitar 400 meter. Di wilayah Pamboang hingga Tubo, banyak dijumpai endapan alluvial yang merupakan endapan tanah lempung dan pasir. Berdasarkan sistem klasifikasi taksonomi tanah, tanah di wilayah pesisir Majene termasuk dalam golongan entisol, yang terbentuk dari hasil proses erosi dan senantiasa mengalami pengendapan sehingga proses pembaruannya berlangsung cepat. Di Wilayah Tubo hingga Malunda, tekstur tanah relatif bervariasi dari tanah kasar berpasir lempung hingga sampai tekstur halus liat.

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Majene sangat berkaitan dengan tipe iklim yang ada, dilain sisi juga dipengaruhi oleh kondisi stratigrafi dan struktur batuan dimana dicirikan oleh singkapan-singkapan dari batuan sedimen, batuan gunung api yang bersifat menengah, dan basa serta batuan terobosan dan litologi jenis batuan daerah tersebut tersusun oleh Satuan Napal Tufaan (Qm=Quarter Marl) dan Endapan Alluvial (Qal=Quarter Alluvial). Keberadaan air tanah dangkal ± 4 m. Kondisi hidrologi permukaan juga ditentukan oleh sungai-sungai yang ada dengan jumlah sungai yang tersebar di wilayah Kabupaten Majene berkisar 73 sungai baik besar maupun kecil. Pada umumnya debit air sungai-sungai tersebut relatif besar yaitu Sungai Tubo, Tammerodo yang berada di wilayah Kecamatan Sendana, sungai Maitting, Manyamba, Pamboang di Kecamatan Pamboang, sungai Malunda di Kecamatan Malunda dan sungai Kaiyong. Sungai terbesar yang di Kabupaten Majene adalah Sungai Tubo

dan sungai Maitting yang memiliki debit air yang relatif besar dan merupakan sungai yang berhulu di pegunungan dan bermuara di Selat Makassar. Untuk lebih jelasnya potensi sumberdaya air di Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Nama-Nama Sungai Di Kabupaten Majene
Di Rinci Berdasarkan Per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Sungai	
1.	Banggae	• Sungai Majene	• Sungai Camba
2.	Banggae Timur	• Sungai Lembang Siruppa	
3.	Pamboang	• Sungai Pamboang • Sungai Koi • Sungai Lembang Piung • Sungai Lembang Taduang	• Sungai Lembang Abaga • Sungai Lembang Lena • Sungai Lembang Teppo
4.	Sendana	• Sungai Mosso • Sungai Pumalla • Sungai Teleppo • Sungai Apoleang • Sungai Para • Sungai Sirua Kota	• Sungai Labuang • Sungai Lembang • Sungai Palipi • Sungai Kadopo • Sungai Palla Pallang • Sungai Manyamba
5.	Tammeroddo Sendana	• Sungai Potandek • Sungai Polo - Polo • Sungai Sipitu • Sungai Wai Sepong • Sungai Taridi	• Sungai Lombongan • Sungai Tamerodo • Sungai Mayatapi • Sungai Mayamba • Sungai Talakomi
6.	Tubo Sendana	• Sungai Sumakuyu • Sungai Wai Sering • Sungai Labuang • Sungai Pumbiu • Sungai Tapamekan • Sungai Labuang Onang	• Sungai Laia • Sungai Galung - Galung • Sungai Batu Roro • Sungai Pulung • Sungai Kulasi • Sungai Takombe • Sungai Salabulo
7.	Malunda	• Sungai Asa – Asaang • Sungai Tamalere • Sungai Meletung • Sungai Ipo • Sungai Maliaya • Sungai Reruang • Sungai Lombang	• Sungai Kalangae • Sungai Serepo • Sungai Samalio • Sungai Ratte Punaga • Sungai Malunda • Sungai Dopi • Sungai Lemo
8.	Ulumanda	• Sungai Potenaan • Sungai Malamakula • Sungai Toe - Toe • Sungai Samabaho - Baho • Sungai Pesawang • Sungai Pulosok • Sungai Maiting • Sungai Tikaung • Sungai Tambung • Sungai Lamoliang • Sungai Tapango • Sungai Lemo • Sungai Palang	• Sungai Kayang • Sungai Lombongan • Sungai Tatung • Sungai Pekalong • Sungai Pondang • Sungai Lasa • Sungai Tubo • Sungai Baulu • Sungai Tamerindi • Sungai Takang • Sungai Makulak • Sungai Manda • Sungai Tamalonag

Sumber: Kabupaten Majene Dalam Angka, 2021

Gambar 2.6.
Peta Hidrologi Kabupaten Majene



Sumber : Bapeda Kab. Majene, 2021

Keberadaan debit air sungai tersebut perlu dijaga kelestariannya mengingat masih banyak penduduk yang memanfaatkan air sungai sumber keperluan rumah tangga dan ke depan perlu dikembangkan sebagai sumber air bersih mengingat pertambahan penduduk semakin merasakan pentingnya air bersih.Sumberdaya air disamping berfungsi untuk kehidupan sehari-hari juga berfungsi untuk berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia seperti pertanian, perikanan, perindustrian, pembangkit tenaga listrik dan sebagainya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kedaan hidrologi yaitu curah hujan, tipe iklim dan sungai. Kondisi hidrologi di Kabupaten Majene, meliputi potensi air tanah dan potensi air sungai, dimana potensi air tanah di Kabupaten Majene cukup baik.

2.1.1.6. Kondisi Klimatologi

Parameter klimatologi Kabupaten Majene adalah tipe iklim, curah hujan dan suhu udara. Kondisi iklim wilayah Kabupaten Majene dan sekitarnya secara umum ditandai dengan hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin musim, hal ini dikarenakan wilayahnya berbatasan dengan laut lepas (Selat Makassar dan Teluk mandar). Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Majene yang merupakan laporan hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Kab. Majene, Curah Hujan terbesar di Kabupaten Majene pada tahun 2020 terjadi pada bulan Januari dengan curah hujan sebesar 325,7 mm^3 dan

curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan curah hujan 20,2 mm^3. Untuk hari hujan terbanyak berdasarkan bulan pada tahun 2020 terjadi pada bulan Desember yaitu sebanyak 25 hari hujan dan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan 10 hari hujan. Berdasarkan data pada tabel tersebut, memperlihatkan bahwa musim penghujan berada pada Bulan Desember hingga Bulan April dan setelah itu memasuki musim kemarau pada bulan Mei sampai dengan September.

Tabel 2.3.
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan
Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Bulan	Curah Hujan (mm^3)					Hari Hujan (hari)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Januari	167	115,2	189,4	94,6	325,7	20	18	20	18	15
2	Februari	94	107,6	212,8	55,7	153,5	20	13	19	13	12
3	Maret	70	87,8	146,2	134,1	71,7	14	15	20	15	18
4	April	307	109,3	172,1	152,6	107,7	20	9	22	19	18
5	Mei	166	158,1	60,2	68,9	66,3	20	23	16	8	19
6	Juni	238	45,6	119,1	68,6	87,5	22	18	14	13	16
7	Juli	120	74,7	44,1	4,3	91,3	11	14	10	5	15
8	Agustus	3	38,9	0,5	9,7	20,2	7	11	33	4	10
9	September	44	92,5	11,3	0,0	60,3	12	13	5	2	16
10	Oktober	225	202,5	226,0	185,4	132	16	18	14	13	15
11	November	120	235,4	106,8	99,5	95,8	19	25	19	10	21
12	Desember	129	529,9	310,3	16,1	215,4	22	23	21	13	25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, 2021

Sementara kondisi kelembapan udara dan suhu udara rata-rata pada data tahun terakhir (tahun 2020) memperlihatkan bahwa kisaran rata-rata kelembapan udara pada bulan januari-desember adalah 73%-80%. Kelembapan udara tertinggi berada pada bulan februari-mei serta bulan desember dan terendah berada pada bulan Agustus. Sedangkan pada suhu udara rata-rata pada tahun 2020 menunjukkan bahwa suhu udara terendah berada pada bulan desember dengan suhu 27,3 ^0C dan tertinggi berada pada bulan oktober dengan suhu udara sebesar 28,4 ^0C. lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Kelembaban Udara Rata-rata dan Suhu Udara Rata-Rata
Di Kabupaten Majene 4 Tahun Terakhir (2016-2020)

No	Bulan	Kelembaban Udara (%)					Suhu Udara (⁰C)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Januari	81	77	77	79	79	28,5	27,7	27,7	27,8	28,2
2	Februari	82	74	81	81	80	28,2	28,3	27,2	27,8	28,2
3	Maret	79	78	79	78	80	28,7	27,9	27,6	28,0	28,3
4	April	82	80	80	80	80	28,3	28,0	27,9	28,3	28,3
5	Mei	83	83	80	80	80	28,3	27,7	28,4	28,4	28,3
6	Juni	83	82	80	82	78	27,5	27,3	27,6	27,5	27,9
7	Juli	80	78	77	76	78	27,9	27,6	27,5	27,2	27,5
8	Agustus	78	75	75	74	73	28,1	27,7	28,0	27,4	28,1
9	September	76	75	72	72	74	28,4	28,1	28,4	28,1	28,3
10	Oktober	79	78	77	74	76	28,1	28,3	28,4	28,6	28,4
11	November	81	81	79	78	79	28,2	27,9	28,3	28,8	28,2
12	Desember	73	82	80	76	80	28,2	27,3	27,6	28,9	27,3

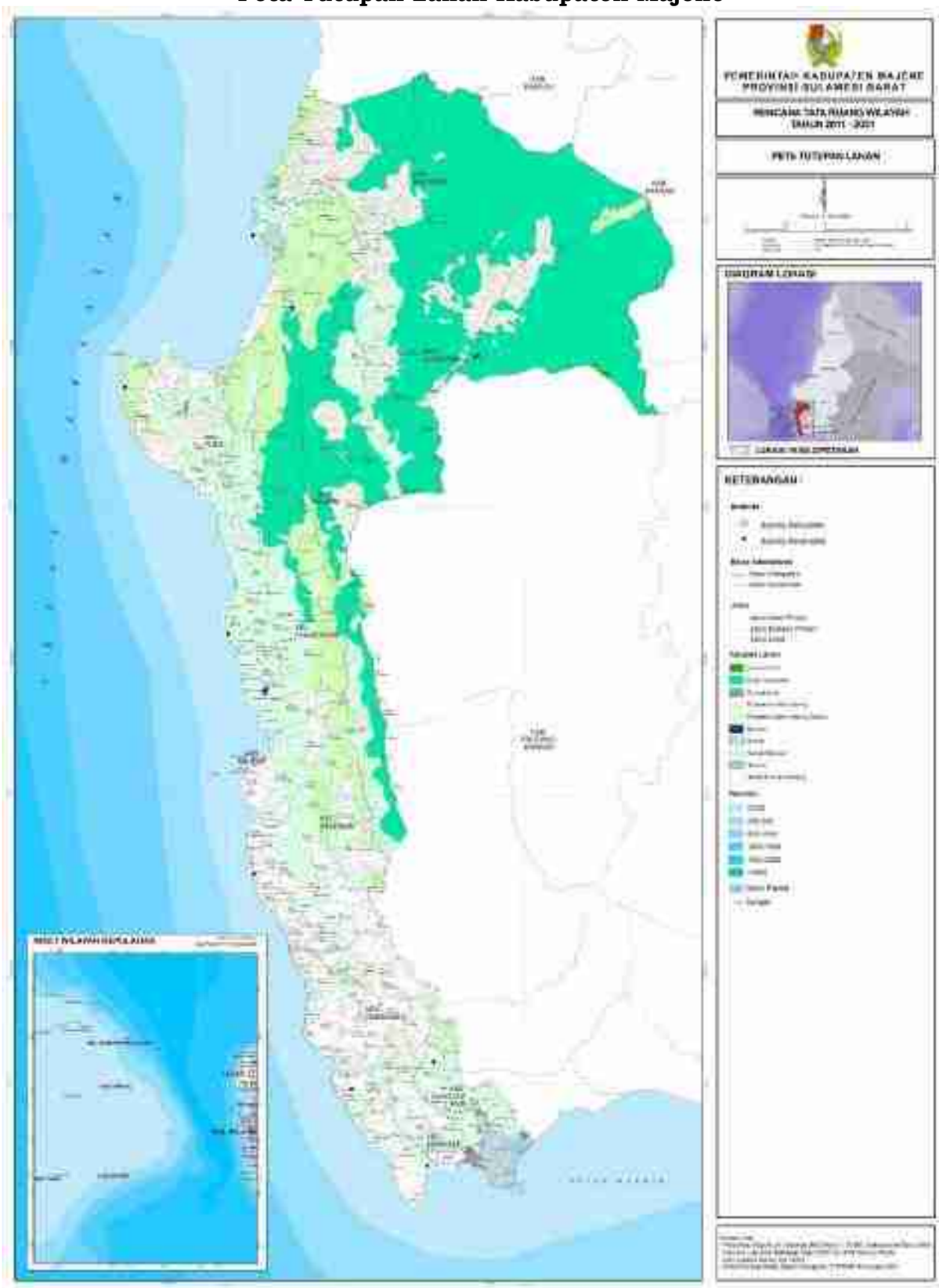
Sumber; Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, 2021

2.1.1.7. Pola Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Majene pada tahun 2020, terdiri dari lahan sawah yang meliputi irigasi teknis, dan non irigasi/tadah hujan. Untuk lahan pertanian bukan sawah meliputi tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat, kolam/empang/tebat, padang gembalaan/rumput, dan lahan yang belum diusahakan. Sedangkan lahan bukan pertanian meliputi pekarangan dan lainnya. Dari tabel di bawah dapat di lihat bahwa luas penggunaan lahan Kabupaten Majene pada tahun 2020 berdasarkan pola penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020 yaitu 90.456 Ha yang terbagi kedalam 3 (tiga) jenis penggunaan lahan yaitu lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian.

Untuk lahan sawah, jenis penggunaan lahan terbesar yaitu non irigasi/tadah hujan yang mencapai angka 1.235 Ha dengan tingkat persentase 75,81 % sedangkan untuk lahan sawah yang beririgasi hanya mencapai 394 Ha dengan tingkat persentase 24,19 %. Untuk lahan pertanian bukan sawah, jenis penggunaan lahan terbesar yaitu hutan rakyat yang mencapai angka 35.733 Ha dengan tingkat persentase 44,79%, sedangkan untuk yang terendah yaitu penggunaan lahan berupa kolam/empang/tebal yang mencapai 430 Ha dengan persentase 0,55%.

Gambar 2.7.
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Majene



Sumber : Bapeda Kabupaten Majene, 2021

Untuk lahan bukan pertanian mencapai angka 8.678 Ha dengan tingkat persentase terhadap luas keseluruhan penggunaan lahan yaitu mencapai 9,59%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dan Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Majene sebagai berikut.

Tabel 2.5
Pola Penggunaan Lahan Bukan Sawah
Kab. Majene Tahun 2020

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	**Lahan Sawah**	**1.629**	**100,00**
	1. Irigasi	394	24,19
	2. Non Irigasi/Tada Hujan	1.235	75,81
2	**Lahan Pertanian Bukan Sawah**	**80.149**	**100,00**
	1. Tegal/Kebun	11.961	14.92
	2. Ladang/Huma	7.638	7,87
	3. Perkebunan	16.173	20,94
	4. Hutan Rakyat	35.733	44,79
	5. Kolam/Empang/Tebat	430	0,55
	6. Padang Gembalaan/Rumput	5.198	6,76
	7. Sementara Tidak Diusahakan	3.016	3,99
3	**Lahan Bukan Pertanian**	**8.678**	**100,00**
Jumlah		**90.455**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, 2021

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Majene memiliki kekayaan alam yang beragam. Potensi sumber daya alam merupakan modal dasar bagi pembangunan wilayah ini. Selain itu, Kabupaten Majene memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah Kabupaten Majene dimasa mendatang. Adapun potensi sumber daya tersebut diuraikan sebagai berikut:

2.1.2.1. Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

A. Sub Sektor Kawasan Hutan

1. Sektor Hutan Produksi Terbatas

Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Majene yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan secara terbatas. Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2012-2032 yang bersumber dari Surat Keputusan

Kementerian Kehutanan Nomor 6029 Tahun 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Sulawesi Barat Tahun 2017 yang menunjukkan bahwa Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas di Kabupaten Majene dengan luas ± 7.485,06 Ha yang tersebar diwilayah Kecamatan Ulumanda dengan luas ± 2.827,64 Ha, Kecamatan Malunda dengan luas ± 4.627,81 Ha dan Kecamatan Tubo Sendana dengan luas ± 29,61 Ha.

Pada umumnya Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Majene merupakan hutan pegunungan dengan kondisi tanah kering dan lereng landai. Kondisi penutupan lahan masih berhutan dengan potensi kayu rendah sampai sedang. Jenis yang cocok untuk dikembangan dalam rangka pembangunan hutan tanaman industri (HTI) adalah sengon dan Acacia mangium. Berdasarkan hal tersebut, maka arahan rencana pemanfaatan budidaya kehutanan dengan peruntukan sebagai kawasan peruntukan hutan produksi adalah:

a. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
b. Pemanfaatan kawasan dilaksanakan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi yang optimal;
c. Pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan dalam bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
d. Pemanfaatan hasil hutan dilakukan dalam bentuk usaha pemanfaatan hutan alam dan usaha pemanfaatan hutan tanaman. Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam; dan

e. Pemungutan hasil hutan meliputi pemanenan, penyaradan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran yang diberikan untuk jangka waktu tertentu.

2. Sektor Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan kelestarian sumber daya hutan, tanah, dan air, serta untuk mendukung kecukupan luas kawasan berhutan, baik dalam skala DAS, Kabupaten, maupun Provinsi. Kawasan peruntukan hutan rakyat terdapat di Kecamatan Malunda, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Tubo Sendana dengan luasan ± 6.962 Ha. Lokasi tersebut bertipe hutan pegunungan dengan kondisi lereng landai-bergelombang. Jenis tanaman yang cocok untuk dikembangkan adalah jenis Kemiri dan Sengon. Aksesibilitas menuju ke lokasi huta rakyat dapat ditempuh melalui jalan darat dengan waktu perjalanan ± 2 jam dari ibukota kabupaten. Dimana kondisi jalan umumnya berupa jalan aspal/beton serta berupa tanah yang telah diperkeras.

B. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan

1. Pertanian Lahan Basah

Pertanian lahan basah memerlukan kedalam efektif tanah (solum tanah) minimal 60 cm. Produktivitas dan mutu panen cenderung menurun bila kedalaman efektif tanah semakin dangkal. Batas ambang kedalaman efektif tanah ini adalah 30 cm, sedangkan tekstur tanah yang baik bagi jenis pertanian lahan basah adalah tanah yang berliat, berdebu halus, sampai berlempung halus. Tanah-tanah yang berkuarsa sangat tidak sesuai untuk pengembangan pertanian kecuali kandungan kuarsanya sedang. Potensi banjir dan genangan musiman tidak baik bagi tanaman lahan basah.

Produktivitas dan kualitas panen dapat menurun bila resiko banjir dan genangan musiman berlangsung antara 2 sampai 7 bulan tanpa adanya genangan permanen. Batas resiko banjir dan

genangan yang tidak dapat ditolerir lagi adalah pada kondisi terjadi genangan permanen dan banjir musiman 7 bulan atau lebih.Berdasarkan dari hasil analisis, maka pengembangan lahan basah yang termasuk dalam tanaman pangan berkelanjutan terdapat di Kecamatan Malunda seluas 697 Ha, Kecamatan Sendana seluas 410 Ha, Kecamatan Tubo Sendana seluas 67 Ha dan Kecamatan Ulumanda seluas 446 Ha. Sedangkan pengembangan untuk budidaya tanaman padi sawah yang bukan termasuk tanaman pangan berkelanjutan terdapat di Kecamatan Sendana dengan luas 280 Ha, Kecamatan Tubo Sendana seluas 60 Ha, Kecamatan Ulumanda seluas 94 Ha dan Kecamatan Malunda seluas 503 Ha. Adapun kesesuaian lahan pengembangan pertanian lahan basah, sebagaimana pada tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6.
Kesesuaian Lahan Untuk Pertanian Lahan Basah

No	Kriteria	Sesuai	Sesuai Bersyarat	Tidak Sesuai
1	Jenis Tanah	• Grumusol, Alluvial As. Hidromorp	• Latosol • Regosol	• Mediteran • Latosol
2	Lereng	0% - 15%	-	> 25%
3	Kedalaman Efektif	> 60 Cm	30 – 60 Cm	< 30 Cm
4	Tekstur Tanah	Rendah	Agak rendah dan agak tinggi	Tinggi dan sangat tinggi
5	Porositas	Rendah	Agak rendah dan agak tinggi	Tinggi dan sangat tinggi
6	Curah Hujan	1.000 – 5.000 mm	500 – 1.000 mm	< 500 mm dan > 5.000 mm
7	Drainase	Terhambat	Agak terhambat, sangat terhambat	Baik, agak cepat dan sangat cepat
8	Banjir dan Genangan Air Musiman	Tanpa banjir dan genangan	Antar 2 – 7 bulan, tanpa ada genangan permanen	> 7 bulan dan atau genangan permanen

Sumber : Laboratorium PWK-ITB

Dari hasil kesesuaian lahan diatas maka, kriteria pengembangan kawasan peruntukan pertanian lahan basah di Kabupaten Majene meliputi:

a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan basah dan termasuk dalam lahan pertanian berkelanjutan.
b. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah mampu memberikan manfaat:

- Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
- Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- Meningkatkan fungsi lindung;
- Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam untuk pertanian pangan;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
- Menciptakan kesempatan kerja;
- Meningkatkan ekspor; dan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil analisis tersebut bahwa, luas lahan pemanfaatan pertanian lahan basah di Kabupaten Majene terdiri dari sesuai 1.580 Ha atau 1,6% dan sesuai bersyarat 937 Ha atau 0,98 % dari luas total Kabupaten Majene. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7.
Luas Lahan Pemanfatan Pertanian Lahan Basah

No	Klasifikasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sesuai	1.580	1.60
2	Sesuai Bersyarat	937	0.98
3	Tidak Sesuai	-	-

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020

2. Pertanian Lahan Kering

Pertanian lahan kering juga memerlukan kedalaman efektif tanah minimal 60 cm. Produktivitas dan mutu panen pada pertanian lahan kering cenderung menurun bila kedalaman efektif tanah menurun. Batas ambang kedalaman efektif tanah ini adalah 30 cm. Sedang tekstur tanah yang terbaik bagi jenis pertanian lahan kering adalah tanah yang berliat, berdebu halus, sampai berlempung halus. Dalam hal ini tanah-tanah yang berkuarsa sangat tidak sesuai untuk pengembangan pertanian kecuali

kandungan kuarsanya sedang. Potensi banjir dan genangan musiman tidak baik bagi tanaman lahan kering. Pertanian lahan kering sangat sesuai pada kelerengan 0-15 %, namun pada kelerengan antara 15 – 25 % masih memungkinkan untuk dikembangkan. Sebaran pertanian lahan kering tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Majene, dimana luas lahan yang dapat dikembangkan sebagai lahan kering adalah 6.218 Ha atau 6,5% dari luas Kabupaten Majene. Adapun kriteria kesesuaian lahan kering, sebagaimana pada tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8.
Kesesuaian Lahan Untuk Pertanian Lahan Kering

No	Kriteria	Sesuai	Sesuai Bersyarat	Tidak Sesuai
1	Jenis Tanah	• Grumusol, Alluvial • As. Hidromorp	• Latosol, Regosol	• Mediteran, Latosol
2	Lereng	0% - 15%	-	> 25%
3	Kedalaman Efektif	60 Cm	30 – 60 Cm	< 30 Cm
4	Tekstur Tanah	Berliat,Berdebu halus,Berlempung Halus	Berdebu halus dan kasar, berkuarsa sedang.	Berkuarsa
5	Porositas	Tinggi dan Sangat Tinggi	Sedang dan rendah	Sangat rendah
6	Curah Hujan	1.000 – 5.000 mm	500 – 1.000 mm	< 500 mm dan>5.000 mm
7	Drainase	Baik	Agak cepat	Cepat, sangat cepat, terhambat, sangat terhambat
8	Banjir dan Genangan Air Musiman	Tanpa	Antar 2 – 4 bulan, tanpa ada genangan permanen	> 4 bulan dan atau genangan permanen

Sumber : Laboratorium PWK-ITB

Sesuai dengan tabel kesesuaian lahan ditas, maka kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman padi ladang dan palawija. Kriteria kawasan tanaman pangan lahan kering adalah kawasan yang tidak mempunyai sistem atau potensi pengembangan pengairan dan memiliki:

a. Ketinggian < 1000 m dan Kelerengan < 40%;
b. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm; dan
c. Curah hujan antara 1500 – 4000 mm pertahun.

Adapun kriteria kawasan peruntukan pertanian lahan kering meliputi:

a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan kering.
b. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan kering mampu memberikan manfaat:
   - Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
   - Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
   - Meningkatkan fungsi lindung;
   - Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam untuk pertanian pangan;
   - Meningkatkan pendapatan masyarakat;
   - Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
   - Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan ekspor; dan
   - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya analisis luas lahan pemanfaatan pertanian lahan kering di Kabupaten Majene, sebagaimana pada tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9.
Luas Lahan Pemanfatan Pertanian Lahan Kering

No	Klasifikasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sesuai	6.218	6,5
2	Sesuai Bersyarat	-	-
3	Tidak Sesuai	-	-

Hasil Analisis Tim Tahun 2020

Wilayah pengembangan peruntukan budidaya tanaman padi ladang terdapat di Kecamatan Sendana seluas 150 Ha, Kecamatan Tammero'do Sendana seluas 150 Ha, Kecamatan Tubo Sendana seluas 50 Ha, Kecamatan Ulumanda seluas 200 Ha, dan Kec. Malunda seluas 150 Ha.

Sedangkan pengembangan budidaya tanaman palawija terdapat di Kecamatan Banggae Timur seluas 200 Ha, Kecamatan Bangae seluas 300 Ha, Kecamatan Pamboang seluas 300 Ha,

Kecamatan Sendana seluas 500 Ha, Kecamatan Tammerodo Sendana seluas 100 Ha, Kecamatan Tubo Sendana seluas 250 Ha, Kecamatan Ulumanda seluas 700 Ha dan Kecamatan Malunda seluas 500 Ha. Adapun luas panen produktif beberapa komoditas tanaman pangan di Kabupaten Majene tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Luas Panen Produktif Komoditas Tanaman Pangan
Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Komoditi	Luas Lahan (Ha)					Lokasi Pengembangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Padi Sawah	2.201	2.442	2.049	2.379	2.199	4 Kec.
2	Padi Ladang	2.660	2.792	3.579	14.556	4.701	5 Kec.
3	Ubi Kayu	334	310	288	223	305	8 Kec.
4	Ubi Jalar	70	87	80	94	167	8 Kec.
5	Jagung	1.630	1.152	1.812	4.861	3.952	8 Kec.
6	Kacang Hijau	75	59	54	78	187	8 Kec.
7	Kedelai	*	*	837	2.677	251	8 Kec.

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Majene, 2020
*Keterangan : * Data Belum Tersedia*

Berdasarkan pada tabel diatas, memperlihatkan bahwa Kabupaten Majene di Tahun 2020, luas panen produktif untuk komoditas tanaman pangan terbesar berupa komoditi padi ladang yang mencapai 4.701 Ha yang terbagi di 5 kecamatan (Kecamatan Sendana, Tammerodo Sendana, Tubo Sendana, Malunda, Ulumanda), kemudian jenis komoditi jagung dengan luas panen 3.952 Ha yang berlokasi di 8 (delapan) Kecamatan se kabupaten majene. Jenis komoditas tanaman pangan yang luas panen produktif terendah adalah komoditi Ubi Jalar yang hanya mencapai 167 Ha di tahun 2020.

C. Sub Sektor Pertanian Holtikultura

Strategi dasar pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Majene dapat diawali dengan optimalisasi komoditas unggulan yang telah berkembang seperti pisang, mangga, dan sayuran secara terfokus dan terarah kemudian dikembangkan melalui pendekatan agribisnis dengan memperhatikan keterkaitan hulu-hilir

secara berkesinambungan. Pengembangan kawasan hortikultura tidak berdiri sendiri, namun lebih merupakan keterpaduan dari beberapa program dan kegiatan pengembangan antar sektor/sub sektor, antar institusi dan antar pelaku yang telah ada, yang terfokus dikawasan.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian bahwa penetapan kawasan budidaya hortikultura dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai kesesuaian lahan yang didukung dengan sarana dan prasarana budidaya, panen, dan pasca panen.
2. Memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura.
3. Mempunyai akses, prasarana transportasi jalan serta pengangkutan yang mudah dan dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi.

Wilayah pengembangan pertanian holtikultura di Kabupaten Majene adalah seluas kurang lebih 5,776 Ha yang terdapat di Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Ulumanda, dan Kecamatan Malunda dengan komoditi andalan yaitu komoditi nasional berupa Nenas di Kecamatan Pamboang dan Komodita lokal pisang pere di Kecamatan Pamboang.

Berdasarkan tabel dibawah, menunjukkan bahwa terdapat komoditas hortikultura yang produktif mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2017-2019 yaitu komoditas jagung dimana di tahun 2017 luas panen sebesar 1.152 Ha mengalami peningkatan luas panen setiap tahun yang mencapai 1.812 ha di tahun 2018 dan 4.861 Ha di tahun 2019 sementara di tahun 2020 mengalami penurunan dengan luas panen sebesar 3.952. Kemudian komoditas pisang, dimana di tahun 2017 luas panen hanya mencapai 1.739 ha dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2018 yang mencapai luas panen sebesar 3.239 ha dan komoditas cabai, dimana di tahun 2018 luas panen sebesar 181 ha dan mengalami peningkatan luas panen di tahun 2019 sebesar 193 ha tetapi tahun 2020 mengalami

penurunan dengan luas panen 157 ha serta komoditas tomat yang hanya mencapai luas panen 5 ha di tahun 2018 dan meningkat sebesar 53 ha di tahun 2019 kemudian meningkat kembali di tahun 2020 dengan luas panen 71 ha. Adapun luas panen produktif komoditas hortikultura dalam periode 2016 – 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11.
Luas Panen Produktif Per Komoditas Hortikultura
Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

a.

Komoditas	Luas Panen Produktif (Ha)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jagung	1.630	1.152	1.812	4.861	3.952
Pisang	1.240	1.739	3.239	23.7175	48.245
Durian	232,10	232,20	232,20	23.415	3.000
Mangga	652	652	653	67.132	40.705
Langsat	203,24	*	*	29.183	8.990
Nenas	1,84	25	40	*	*
Rambutan	39,23	*	*	2.912	1.216
Sukun	210,72	*	*	*	*
Pepaya	18,12	*	*	3.341	3.889
Nangka	66,46	*	*	*	*
Ubi Kayu	334	310	288	*	305
Ubi Jalar	70	89	80	*	167
Kacang Tanah	58	48	71	*	108
Kacang Ijo	75	59	54	*	187
Bawang Merah	24	70	90	56	73
Cabai	604	181	141	193	157
Lombok Besar	104	77	57	49	50
Tomat	52	*	5	53	71
Terong	55	46	33	28	*
Ketimun	23	31	36	25	54
Kacang Panjang	71	61	68	40	51
Bayam	85	68	73	56	64
Kangkung	73	63	63	41	42

Sumber : BPS Kabupaten Majene Dalam Angka 2021
*Keterangan : * Data Belum Tersedia*

Selain itu terdapat beberapa komoditas yang mengalami penurunan luas panen di tahun 2018-2019, diantaranya komoditas Bawang Merah, dimana di tahun 2018 luas panen mencapai 90 ha dan mengalami penurunan luas panen di tahun 2019 menjadi 56 ha tetapi pada tahun 2020 kembali meningkat dengan luas panen 73 ha.

Komoditas berikutnya adalah terong, dimana di tahun 2018 luas panen sebesar 33 ha dan mengalami penurunan sebesar 28 ha di tahun 2019 dan tahun 2020 data luas panen belum tersedia. Untuk komoditas kacang panjang juga mengalami penurunan, dimana di tahun 2018 luas panen mencapai 68 ha dan mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 40 ha tetapi tahun 2020 meningkat dengan luas panen 51 ha. Komoditas lainya yang juga mengalami penurunan luas panen dari tahun 2018-2019 adalah komoditas ketimun, bayam dan kangkung tetapi tetap meningkat di tahun 2020.

D. Sub Sektor Perkebunan

Kriteria kesesuaian lahan bagi pengembangan tanaman keras/ tahunan/perkebunan sangat beragam sesuai dengan jenis komoditinya. Pada dasarnya berbagai jenis tanaman keras dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 0 – 2.500 m di atas permukaan laut. Kriteria kawasan peruntukan perkebunan meliputi:

1. Kawasan perkebunan (skor <125) / yang berada di luar kawasan lindung
2. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan
3. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan perkebunan mampu memberikan manfaat :
    a. Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
    b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
    c. Meningkatkan fungsi lindung;
    d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam untuk pertanian pangan;
    e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
    f. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
    g. Menciptakan kesempatan kerja;
    h. Meningkatkan ekspor;
    i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan perkebunan ini dipergunakan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan pada :

1. Meningkatkan perekonomian penduduk disekitar kawasan penyangga hutan lindung melalui pengembangan agroforestry yang sudah ada dengan jenis komoditas yang komersial dan memiliki keterkaitan dengan industri serta dapat memantapkan fungsi kawasan lindung;
2. Area lahan tegalan, semak/belukar atau alang-alang dengan kemiringan lahan 15 - 40 % sehingga dapat berfungsi sebagai penyangga kawasan lindung;
3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas perkebunan dalam mendukung pertumbuhan agroindustri;
4. Pembukaan lahan baru untuk perkebunan pada kawasan yang mempunyai kelerengan lebih dari 25 % perlu dilakukan dengan land covering untuk mencegah erosi. Sedangkan pembukaan lahan perkebunan pada daerah rawa perlu dibuat drainase untuk mengeringkannya dan tetap menyisakan sebagian wilayahnya tetap berupa rawa untuk mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah;
5. Pengawasan dan pengendalian pembukaan lahan perkebunan baru sehingga tidak terjadi overlap dengan kegiatan lainnya;
6. Perbaikan sistem pemasaran hasil produksi perkebunan.
7. Pembinaan dan penyuluhan terpadu terutama untuk perkebunan rakyat dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang untuk memudahkan pengelolaan dan penanganan pasca panen.

Kawasan perkebunan dipergunakan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Arahan kawasan pengembangan perkebunan di Kabupaten Majene yaitu seluas kurang lebih 28.056 Ha, terdiri atas :

1. Kawasan perkebunanKopi, terdapat di Kecamatan Ulumanda;
2. Kawasan perkebunanKelapa Dalam, terdapat di Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Sendana,

Kecamatan Pamboang, Kecamatan Tammero'do, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Malunda;

3. Kawasan yang potensial untuk komoditas kakao yang terdapat di Sendana, Tubo Sendana, Tammero'do Sendana, Malunda, dan Ulumanda;
4. Kawasan yang potensial untuk komoditas kemiri yang terdapat di Tammero'do Sendana dan Tubo Sendana.

Tabel 2.12.
Luas Panen Produktif Komoditi Unggulan Sektor Perkebunan Kab. Majene Kurun Waktu 2016 – 2020

No	Jenis Komoditi	Luas Lahan (Ha)					Lokasi Pengembangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kakao	8.198,5	13.168	13.171	11.159	13.759	8 Kec
2	Kelapa Dalam	6.501,0	8.273	8.273	8.273	8.318	8 Kec
3	Kelapa Hibrida	652,43	757	757	757	717	8 Kec
4	Kemiri	2.631	2.369	2.369	2.369	2.369	6 Kec
5	Cengkeh	652	865,0	857	857	1.174	4 Kec
6	Kopi Robusta	607	607	607	707	707	4 Kec
7	Kopi Arabika	387,5	388	388	369	369	4 Kec
8	Pala	49,0	49	49	49	87	8 Kec
9	Lada	17,5	18	18	18	19	8 Kec
10	Jambu Mete	456,5	304,0	267	267	267	8 Kec
11	Kapok	80,0	53,0	80	80	79	8 Kec
12	Vanili	29,5	8,0	20	20	20	6 Kec
13	Aren	117,4	66,0	116	117	117	8 Kec
14	Sagu	89,2	39	89	89	36	8 Kec
15	Nilam	17,5	10,0	18	18	18	8 Kec

1.
Sumber : BPS Majene Kab. Majene dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 15 komoditi produktif sektor unggulan perkebunan Kabupaten Majene tahun 2016-2020, diantaranya kakao, kelapa dalam, kelapa hibrida, kemiri, cengkeh, kopi robusta, kopi arabika, pala, lada, jambu mete, kapok, vanili, aren, sagu dan nilam. Luas panen terbesar di tahun 2016-2020 berada pada komoditi kakao yang ditahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan. Selain itu komoditas kelapa dalam juga memiliki luas panen yang cukup besar dan di tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Dan terakhir adalah komoditas kemiri yang juga memiliki luas panen yang cukup besar di Kabupaten Majene hingga tahun 2020.

E. Sub Sektor Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Majene meliputi ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam buras, ayam petelur, ayam potong, itik dan itik manila. Perkembangan populasi ternak sapi pada kurun waktu 2016-2020 rata-rata mengalami peningkatan jumlah produksi. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penduduk Kabupaten Majene memiliki ternak keluarga yang dikelola secara tradisional, namun hasilnya dapat menjadi sumber pendapatan tambahan sehingga komoditas ini potensial untuk dikembangkan.

Komoditi ternak kambing merupakan primadona dan bahkan daerah ini menjadi pusat peternakan Kambing di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Majene memiliki potensi pengembangbiakan ternak besar (sapi), ternak kecil (kambing), dan juga ternak unggas. Pengembangan ternak berdasarkan jenisnya tersebar di beberapa kecamatan, yang meliputi:

1. Lokasi Peternakan Sapi Terdapat Di Kecamatan Sendana, Tammero'do, Tubo Sendana, Ulumanda Dan Kecamatan Malunda.
2. Lokasi Peternakan Kambing Terdapat Di Kecamatan Pamboang, Kecamatan Banggae, dan Kecamatan Sendana.
3. Lokasi Peternakan Unggas Terdapat di Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang.

Tabel 2.13.
Perkembangan Komoditas Unggulan Sektor Peternakan
Kurun Waktu 2016-2020

No	Jenis Komoditi	Jumlah Produksi (ekor)					Lokasi Pengembangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Sapi	17.022	17.371	17.753	18.144	18.508	8 Kec.
2	Kerbau	156	232	459	172	175	5 Kec.
3	Kuda	193	185	190	193	197	8 Kec.
4	Kambing	66.251	68.199	69.222	70.953	72.513	8 Kec.
5	Ayam Buras	74.555	76.270	77.945	191.105	194.927	8 Kec.
6	Ayam Potong	56.350	57.646	292.467	596.614	608.546	8 Kec.
7	Ayam Petelur	1.750	6.600	24.881	35.622	44.780	2 Kec.
8	Itik	13.337	13.738	14.040	14.433	14.751	8 Kec.
9	Itik Manila	2.346	2.563	2.619	2.685	2.744	8 Kec.

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Majene, 2021

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 9 jenis komoditi unggulan sektor peternakan kurun waktu 2016-2020 di Kabupaten Majene. Jenis komoditi dimaksud adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam buras, ayam potong, ayam petelur, itik dan itik manila. 9 komoditi unggulan sektor peternakan tersebut setiap tahunnya (2016-2020) mengalami peningkatan, ini memperlihatkan bahwa di Kabupaten Majene mengalami peningkatan dalam hal pengembangan wilayah pada sektor peternakan berdasarkan komoditasnya. Untuk pengembangan wilayah pada sektor peternakan berdasarkan komoditas dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.14.
Kawasan Sentra Pengembangan Ternak Kabupaten Majene

No.	Wilayah (Kecamatan)	Jenis Komoditi
1.	Banggae	Kambing dan Ayam Buras
2.	Banggae Timur	Kambing, Sapi dan Ayam Buras
3.	Pamboang	Kambing dan Sapi
4.	Sendana	Kambing dan Sapi
5.	Tammeroddo Sendana	Kambing dan Sapi
6.	Tubo Sendana	Kambing, Sapi dan Ayam Buras
7.	Malunda	Kambing, Sapi dan Ayam Buras dan Itik
8.	Ulumanda	Kambing, Sapi dan Ayam Buras

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Majene, 2020

Dalam upaya pengembangan komoditas unggulan pada sektor Peternakan, maka Pemerintah Kabupaten Majene menggarap Upaya Khusus (Upsus) Pengembangan ternak kambing jenis Peranakan Etawa (PE), sebagai langkah konkrit Pemerintah Kabupaten Majene untuk dapat ditetapkan menjadi Sentra Pengembangan Kambing Nasional oleh Menteri Pertanian RI. Dalam upaya mewujudkan keseriusan menjadikan Majene sebagai Sentra Pengembangan Nasional dimana upaya tersebut telah dilakukan dalam kurung waktu tahun 2018-2020, dimana Pemerintah Kabupaten Majene melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Sentra Pembibitan Kambing pada wilayah Dusun kaida Desa Betteng Kecamatn Pamboang.

2. Pengembangan Sentra pembibitan Kambing sesuai dengan Dokumen Grand Design Sentra Pengembangan Kambing Kabupaten Majene yang telah disusun.
3. Mengoptimalkan lahan seluas + 2 Ha sebagai lokasi Hijauan Makan Ternak dan kawasan Pengembalaan Kambing.

F. Sub Sektor Perikanan

Penangkapan ikan, pelabuhan dan pengolahan ikan dipandang sebagai satu sistem. Pendekatan satu sistem pada kegiatan perikanan tersebut disebabkan masyarakat di Kabupaten Majene sudah menyatu pada kegiatan ini, sehingga lokasi penangkapan ikan, lokasi pelabuhan (penampungan) ikan dan lokasi pengolahan ikan perlu berada pada sebaran yang optimal dari perhitungan ekonomi skala masyarakat. Kawasan peruntukan perikanan ditetapkan dengan kriteria:

- Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau
- Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Majene dibagi atas:

1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kabupaten Majene, terdapat di Kecamatan Banggae, Kecamatan Sendana dan Kecamatan Tammero'do dengan luasan kurang lebih 13,124 Km^2.
2. Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kabupaten Majene, terdapat di Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tubo Sendana dan Kecamatan Malunda luas kurang lebih 600 Ha untuk budidaya di darat dan kurang lebih 500 Ha untuk budidaya laut.
3. Arahan Kawasan Budidaya Perikanan:
   - Budidaya Air Tawar terdapat di 8 (delapan) kecamatan
   - Budidaya Air Laut disepanjang pantai di Kabupaten Majene
4. Kawasan pengolahan ikan, terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Majene, yang diantaranya:

- Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Palipi Kecamatan Sendana;
- Pengembangan Unit Pengelolaan Ikan (UPI) tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Majene sebanyak 300 Unit;
- Pengembangan tempat pelelangan ikan (TPI) di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, dan di Palipi Kecamatan Sendana; dan
- Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Palipi Kecamatan Sendana.

5. Pengembangan Pulau Lereklerekan sebagai pusat pengembangan kelautan dan perikanan.
6. Kawasan Industri Kapal/ Pembuatan Kapal Nelayan secara resmi modern dan tradisional di semua kecamatan di Kabupaten Majene
7. Pengembangan Galangan Kapal Rakyat di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae.
8. Pengembangan *Fish Apartement* (Apartemen Ikan) sebagai habitat baru budidaya perikanan.
9. Ikan dan sebagai pengganti terumbu karang yang rusak, direncanakan disepanjang pantai di Kabupaten Majene.

Konsepsi pengembangan infrasruktur penunjang budidaya perikanan terpadu yang diarahkan untuk menjadikan Kabupaten Majene sebagai kabupaten dengan potensi aktivitas perikanan potensiil di Provinsi Sulawesi Barat. Upaya- upaya yang ditempuh, antara lain:

1. Pengembangan industri kecil/kerajinan rakyat khususnya perikanan darat dan laut menuju usaha yang semakin efisien, mampu berkembang/mandiri serta mampu mendorong lapangan kerja baru;
2. Pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha kerajinan rakyat untuk kemudahan dan interaksi yang saling menguntungkan dengan dunia usaha dan lembaga perbankan dan keuangan hubungannya dalam peningkatan modal usaha;
3. Pengembangan sistem informasi dan promosi hasil-hasil industri;
4. Pembangunan industri harus tetap memperhitungkan prinsip-

prinsip pemanfaatan sumberdaya kini dan masa datang, sehingga orientasi perkembangan industri senantiasa dilaksanakan berdasarkan kelestarian lingkungan dan daya dukung sumberdaya yang ada;

5. Pemberiaan kemudahan dalam hal permodalan dan pemasaran kepada industri-industri kecil dan menengah;
6. Penataan struktur industri disertai dengan penetapan kawasan pengembangan industri pada lokasi-lokasi strategis yang telah ditetapkan atau yang akan ditetapkan;
7. Pengembangan kawasan/zona industri yang terpadu dengan mengikutsertakan para investor dalam menamkan modalnya dalam sektor industri menengah dan besar;
8. Pengembangan kawasan/zona industri yang terpadu dengan tingkat kemudahan infrastruktur dan pemanfaatan transportasi moda darat dan laut;
9. Kebijakan pendukung, seperti regulasi dan peraturan lainnya yang mempermudah industriawan untuk berusaha secara maksimal, yang dimulai dari kemudahan perizinan, pajak dan retribusi mulai dari proses produksi serta pasca produksi.

Untuk lebih jelasnya jenis komoditi, jumlah produksi sentra sentra produksinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15.
Perkembangan Komoditi Unggulan Sektor Perikanan
Kabupaten Majene kurun waktu 2016 – 2020

No	Jenis Komoditi	Jumlah Produksi (Ton)					Lokasi Pengembangan/Penangkpan Kecamatan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Perikanan Tangkap							
1	Ikan Tuna	802,4	912,9	1.194,2	573	911,5	8 Kecamatan
2	Cakalang	517,5	670,5	533,05	604,7	615,9	8 Kecamatan
3	Tongkol	1.415	1.604,8	1.118,9	1,554.8	1.211,4	8 Kecamatan
4	Layang	556	105	381,8	212.7	213,5	Banggae, Banggae Timur, Sendana, Tubo Sendana, Malunda
5	Ikan Terbang	536	591	562,53	3,625.5	644,8	Banggae, Pamboang, Sendana, Tammeroddo Sendana, Tubo Sendana, Malunda, Ulumanda
6	Kakap Merah	186,00	219,2	164,02	409.3	437,7	8 Kecamatan
7	Campuran	667,00	3.176,0	3.513,13	3,625.5	3.795,2	8 Kecamatan

No	Jenis Komoditi	Jumlah Produksi (Ton)					Lokasi Pengembangan/Penangkpan Kecamatan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Perikanan Budidaya							
1	Udang Windu	22	21,3	20,43	21.68	21,1	Banggae Timur, Pamboang dan Malunda
2	Ikan Bandeng	480,61	483,23	368,11	401.92	400,4	Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tubo Sendana, Ulumanda dan Malunda
3	Ikan Mas	12,30	11,37	11,34	12.34	*	8 Kecamatan
4	Ikan Nila	48,70	49,13	41,56	46.56	*	8 Kecamatan
5	Ikan Lele	49	52,77	62,12	82.12	*	8 Kecamatan
6	Udang Vanname	230	236,02	167,21	125.45	383,6	Banggae Timur, Pamboang, Tubo Sendana, Malunda dan Ulumanda
7	Udang Putih	8	8,12	7,34	6.36	*	8 Kecamatan
8	Mujair	*	*	11,49	11.76	*	8 Kecamatan
9	Lainnya	*	*	*	*	178,6	8 Kecamatan

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Majene, 2021
*Keterangan : * Data Belum Tersedia*

Berdasarkan tabel diatas terkait komoditas unggulan untuk perikanan tangkap adalah ikan campuran dan ikan tongkol berada pada urutan pertama dan kedua. Pada tahun 2019 jumlah produksi ikan campuran sebesar 3.625,5 ton mengalami peningkatan ditahun 2020 sebesar 3.795,2 ton, sedangkan ikan tongkol mengalami penurunan produksi pada tahun 2020 sebesar 1.211,4 ton bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1.554,8 ton. Sedangkan komoditas unggulan untuk perikanan budidaya, tidak terlalu mengalami peningkatan jumlah produksi dari tahun 2019-2020 diantaranya adalah udang windu, ikan bandeng, ikan mas, ikan nila, ikan lele, dan mujair serta hanya terdapat dua komoditas yang mengalami penurunan produksi yaitu udang windu dan ikan bandeng yang sebelumnya di tahun 2019 sebesar 21,68 ton dan 401,92 ton menurung ditahun 2020 sebesar 21,1 ton dan 400,4 ton.

Selain itu capaian kinerja terkait urusan kelautan dan perikanan dalam periode 4 tahun terakhir (2017-2020) memperlihatkan bahwa jumlah produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu tersebut terus meningkat, dimana pada tahun 2017 jumlah produksi perikanan tangkap mencapai 7.279,80 ton dan meningkat di tahun 2018 sampai 2020 yang masing-masing mencapai 7.361,8 ton, 7.461,8 ton dan 7.830 ton. Sedangkan jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2017 sebesar 861,94 ton dan

mengalami penurunan jumlah produksi di tahun 2018 menjadi 689,60 ton. Pada tahun 2019 dan 2020 jumlah produksi kembali meningkat menjadi 789,60 ton dan 983,7 ton. Selain dari capaian indikator jumlah produksi tersebut indicator untuk konsumsi ikan mengalami penurunan dari tahun 2017-2019, dimana pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 43,60 kg/orang/pertahun dan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 41,60 kg/orang/pertahun dan pada tahun 2020 kembali mengalami peninhgkatan menjadi 42,11 kg/orang/pertahun.

Tabel 2.16.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2017 – 2020

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	7.279,80	7.361,8	7,461.8	7.830
2	Jumlah Produksi Perikanan budidaya (Ton)	861,94	689,60	789.60	983,7
3	Konsumsi Ikan (Kg/Orang/pertahun)	43,60	43,60	41.60	42,11

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

G. Sub Sektor Pertambangan

Litologi jenis batuan di Kabupaten Majene ditentukan berdasarkan kenampakan fisik dengan tetap mengacu pada formasi batuan. Lokasi penyelidikan/pengukuran geolistrik dan topografi di sepanjang poros jalan provinsi Trans Sulawesi Bagian Barat, Kecamatan Banggae dan Pamboang. Secara keseluruhan litologi jenis batuan daerah tersebut tersusun oleh Satuan Napal Tufaan (Qm=Quarter Marl) dan Endapan Alluvial (Qal=Quarter Alluvial) yang dijelaskan berikut ini :

1. Batuan Napal Tufaan, Periode Kwarter (Qm)
   Satuan Napal Tufaan terdiri atas perselingan antara napal tufaan dengan bongkah koral, serpin napalan, batupasir tufaan dengan lensa-lensa konglomerat.
2. Batuan Endapan Alluvial, Periode Kwarter (Qal)
   Endapan Alluvial terdiri atas koral, kerikil, pasir, lempung dan lumpur. Penyebarannya sempit menempati daerah pedataran sepanjang garis pantai. Endapan ini merupakan endapan geologi muda, tidak terkonsolidasi dengan baik, dan belum terkompasi menjadi batuan (merupakan sedimen lepas).



Sektor pertambangan yang memiliki potensi dikembangkan di Kabupaten Majene pada umumnya adalah berupa tambang mineral dan batubara; minyak dan gas bumi serta air tanah. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat lokal, maka diarahkan ekplorasi tambang ini akan mampu menyebabkan bertambahnya daya ungkit perekonomian wilayah Kabupaten Majene dan sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat. Selain itu harus pula dipikirkan pembangunan sumber pendapatan baru dari hasil keuntungan penambangan ini, serta revitalisasi fungsi lingkungan pasca tambang. Rincian rencana pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Majene, yaitu:

1. Desa Seppong Kecamatan Tammero'do Sendana dan Desa Tallubanua Kecamatan Sendana berupa kawasan pertambangan Batu Bara;
2. Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda berupa kawasan pertambangan Batu Gamping;
3. Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Malunda, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Tubo Sendana berupa kawasan pertambangan Lempung;
4. Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae berupa kawasan pertambangan Oker;
5. Desa Bambangan Kecamatan Malunda, Kelurahan Lalampanua – Desa Betteng Kecamatan Pamboang, Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana, Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda berupa kawasan pertambangan Dasit / Andesit;
6. Desa Seppong Kecamatan Tammero'do Sendana berupa kawasan pertambangan Zeolit;
7. Desa Bambangan Kec. Malunda berupa kawasan pertambangan Basal;
8. Sungai Deking Desa Lombang Kecamatan Malunda, Sungai Manyamba Kecamatan Tammero'do Sendana, Sungai Tubo

Kecamatan Tubo Sendana, Sungai Panawar Desa Andolang Kecamatan Pamboang berupa kawasan pertambangan Kerakal Bongkah;

9. Sungai Deking Desa Lombang Kecamatan Malunda, Sungai Tubo Kecamatan Tubo Sendana dan Pattipor Kecamatan Pamboang berupa kawasan pertambangan Pasir;
10. Sungai Punawar Dusun Punawar Desa Adolang Kecamatan Pamboang, Sungai Deking Kecamatan Malunda, Sungai Tubo Kecamatan Tubo Sendana berupa kawasan pertambangan Kerikil;
11. Sungai Mosso Kecamatan Pamboang, Dusun Kayuangin Kecamatan Malunda, Dusun Tatibajo Kecamatan Ulumanda, Sungai Seppong Kecamatan Tammero'do Sendana berupa kawasan pertambangan Sirtu;
12. Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Sendana, dan Kecamatan Malunda berupa kawasan pertambangan Tanah Liat;
13. Lingkungan Soreang, Lingkungan Rangas Kecamatan Banggae, Lingkungan Pappota, Lingkungan Segeri Kecamatan Banggae Timur, Dusun Totolisi Kecamatan Sendana dan Dusun Lemo Kecamatan Malunda berupa kawasan pertambangan Batu Pasir;
14. Dusun Sambabo Kecamatan Ulumanda berupa kawasan pertambangan Bijih Besi; dan
15. Desa Betteng Kecamatan Pamboang, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda berupa kawasan pertambangan Emas.

Selain potensi kawasan pertambangan mineral dan batu bara tersebut, Kabupaten Majene terdapat potensi kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi, berupa:

1. Blok Malunda seluas 5.148,68 Km2 terdapat di perairan Selat Makassar, Kecamatan Malunda, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Tubo Sendana;
2. Blok Karama seluas 5.389,68 Km2 terdapat di perairan Selat Makassar, Kecamatan Malunda, Kecamatan Ulumanda, Kecamatan Tubo Sendana dan Kecamatan Tammero'do Sendana;

3. Blok Mandar seluas 4.196,25 Km2 terdapat di perairan Selat Makassar, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kecamatan Sendana, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur; dan
4. Blok South Mandar seluas 3.882 Km2 terdapat di perairan Selat Makassar Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur.

Peruntukan Air Tanah di kawasan pertambangan, terdapat di semua kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan peruntukan setelah dilakukan studi dan kajian kelayakan pengusahaan secara ekonomi, lingkungan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Adapun gambaran potensi pertambangan dan lokasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17.
Potensi Pertambangan Kabupaten Majene

No	Komoditi	Manfaat	Lokasi (Kecamatan)	Sumberdaya (TON)
1	Batu Gamping	- Bahan baku peleburan dan pemurnian besi dan logam - Penjernihan Air - Menghilangkan karbonat	Desa Tubo Selatan, Kec. Tubo Sendana.	19.100.000
			Lingk. Tunda, Kec. Banggae Timur.	26.565.000
			Desa Palipi Soreang; Kec. Banggae.	18.270.000
			Desa Mekkatta, Kec. Malunda.	163.750.000
2	Bentonit	- Industri Sawit - Industri Kosmetika	Desa Tinambung, Kec. Pamboang.	1.740.000
			Desa Sula, Kec. Ulumanda.	6.967.500
3	Felspar	- Industri Keramik - Isolator dalam Industri Kaca/ Gelas	Dusun Pesuloang, Kec. Pamboang.	1.940.000
4	Zeolit	- Menghilangkan bau - Pertukaran ion	Desa Bukit Samang, Kec. Sendana.	3.450.000
5	Dasit	- Bahan Konstruksi (Cipping) - Batu Alam - Penahan Abrasi Pantai (Boulder)	Desa Pattipor, Kec. Pamboang.	4.235.920
6	Batu Bara	- Alternatif Bahan Bakar	Desa Manyamba, Kec. Tammerodo Sendana; Desa Ratte Padang Kec. Tubo Sendana.	2.036.000

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Majene, 2021

H. Sub Sektor Industri Kecil dan Menengah

Industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah sehingga keberadaan dan tingkat pertumbuhan sektor industri umumnya dapat menentukan seberapa besarnya perkembangan ekonomi daerah tersebut. Melihat potensi tersebut maka program pengembangan industri di Kabupaten Majene, adalah sebagai berikut:

1. Kawasan-kawasan yang mempunyai bahan baku yang cukup memadai, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri, dan tidak terletak atau berdekatan dengan kawasan lindung dan pertanian lahan basah;
2. Lokasi industri yang tidak sesuai rencana tata ruang harus dikendalikan pengembangannya dan untuk lokasi industri baru ditempatkan di zone industri yang telah direncanakan atau disekitarnya.
3. Kegiatan industri yang mempunyai potensi untuk mencemari lingkungan perlu dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah industri;
4. Pengembangan kegiatan industri ditujukan untuk dapat menyerap tenaga kerja, menggalakan ekspor, dan pengembangan industri yang terkait dengan sektor pertanian;
5. Pengeluaran izin lokasi kegiatan industri baru harus di lengkapi dengan ijin pemanfaatan ruang dan persyaratan teknis yang berlaku.

Melihat potensi dan pengembangan sektor industri baik industri kecil maupun menengah di Kabupaten Majene, maka pengembangan di sektor industri diarahkan pada :

1. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Majene diarahkan dengan Pembangunan Pusat Kawasan Industri Majene.
2. Industri sedang berupa Pengolahan Ikan di Palipi Kecamatan Sendana;
3. Industri sedang berupa pembuatan es balok di Palipi Kecamatan Sendana, di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan

Banggae dan di Lingkungan Tamo Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur;

4. Industri sedang berupa Penggaraman dan Pengeringan Ikan di Palipi Kecamatan Sendana;
5. Industri Sedang berupa Batu Bata dari Tanah liat di Lingkungan Leppe Kecamatan Banggae Timur;
6. Industri Sedang berupa gula Merah di Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tubo Sendana dan Kecamatan Malunda;
7. Industri sedang pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Malunda dan Ulumanda;
8. Industri sedang berupa Pembuatan Perahu di Kecamatan Sendana, Kecamatan Pamboang dan di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae;
9. Industri sedang berupa Pupuk Alam di Kecamatan Sendana dan Kecamatan Malunda;
10. Industri Sedang berupa pengolahan Minyak Kelapa di Kecamatan Banggae Timur; dan
11. Industri sedang berupa Penggilingan dan pembersihan Padi-Padian di Kecamatan Malunda.

Sedangkan untuk peruntukan kawasan/lokasi industri rumah tangga (*home industry*), diarahkan pada:

1. Industri Pengolahan Minyak Kelapa di Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Sendana dan Kecamatan Malunda;
2. Industri Pembuatan Perahu di Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana dan Kecamatan Banggae;
3. Industri Pengolahan Tebu di Kecamatan dan Kelapa di Kecamatan Banggae Timur;
4. Industri Meubel di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur;
5. Industri Pandai Besi di Desa Pamboborang Kecamatan Banggae;
6. Industri Pengupasan hasil-hasil Pertanian di Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan

Tammero'do Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda;

7. Industri penerbitan jasa Foto Copy dan Foto-Foto (Graffer) di semua kecamatan;
8. Industry Bahan Kimia berupa Arang Aktif di Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Tammero'do Sendana, dan Kecamatan Malunda;
9. Industry Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga di Kecamatan Banggae, Kecamatan Tubo Sendana, dan Kecamatan Ulumanda;
10. Industri Percetakan di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur;
11. Industri Barang-Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi di Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Tubo Sendana, dan Kecamatan Malunda; dan
12. Industri Makanan di Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammero'do Sendana, dan Kecamatan Malunda.

I. Sub Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Objek wisata di Kabupaten Majene meliputi objek wisata alam, wisata budaya, maupun objek wisata buatan. Untuk pengembangan kegiatan wisata di Kabupaten Majene, maka beberapa obyek wisata yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri atas :
   - Kawasan Museum Mandar terletak di Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
   - Kawasan Mesjid Tua Salabose di Puncak Salabose Kelutahan Pangali – Ali Kecamatan Banggae;
   - Kawasan Mesjid Raya/Mesjid Tua di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae;
   - Kawasan Upacara Maulid Nabi Muhammad SAW di Puncak Salabose Kelurahan Pangali – Ali Kecamatan Banggae;

- Kawasan Upacara Pa'bandangan Manu – Manu di Pettaweang Desa Kayuanging Kecamtan Malunda;
- Kawasan Makam Raja-Raja Banggae di Ondongan Lingkungan Pa'leo Tobandaq Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
- Kawasan Makam Syekh Abdul Mannan di Lingkungan Salabose Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
- Kawasan Benteng Ammana Wewang di Desa Betteng Kecamatan Pamboang;
- Kawasan Makam Raja-Raja Pamboang di Lingkungan Kopel Desa Lalampanua Kecamatan Pamboang;
- Kawasan Makam Imannang di Lingkungan Pamboborang Kelurahan Baru Kecamatan Banggae;
- Kawasan Makam Tabulese di Lingkungan Camba Utara Kecamatan Banggae;
- Kawasan Makam Lombeng Susu dan Puang Rambang di Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur;
- Kawasan Makam Nenenk Ular, Makam Reso dan Makam Pappesse Bassi yang terletak di Lingkungan Segeri Kelurahan Baruga dan Kecamatan Banggae Timur; dan
- Kawasan Makam Mara'dia Parappe di Lingkungan Tangnga-Tangnga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur.
- Kelompok Pandai Besi di Kawasan Pamboborang Desa Pamboborang Kec. Banggae sebagai Kawasan Wisata Budaya dan merupakan kawasan perindustrian tradisional
- Perayaan Budaya Cakkuriri di Kecamatan Sendana.

2. Kawasan peruntukan pariwisata alam, terdiri atas:
   - Wisata Puncak Salabose Kelurahan Pangali – Ali Kecamatan Banggae;
   - Wisata Puncak Pohon Pinus di Segeri Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur;
   - Wisata Agro Wisata Bambangan di Bambangan Desa Bambangan Kecamatan Malunda;
   - Wisata Takkesi di Bambangan Desa Bambangan Kecamatan Malunda;

- Wisata Terumbu Karang Pantai Pacitan Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
- Wisata Terumbu Karang Pantai Rangas di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae;
- Wisata Pantai Pasir Putih dan Terumbu Karang Pantai Leppe, Barane, Tamo dan Pangale di Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur;
- Pantai Luaor dan Pantai Pasir Putih soreang di Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae;
- Pantai Rewataa di Kecamatan Pamboang;
- Pulau Pantai Maluno, Pulau Idaman Tai Manu, dan Pantai Pasir Putih Bonde-Bonde serta Pulau Lere-Lerekang yang terletak di Kecamatan Sendana;
- Permandian Sungai Teppo di Kelurahan Baru Kecamatan Banggae;
- Air Terjun Orongan Puawang di Lingkungan Puawang Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur;
- Permandian Udhuhun Pokki di Galung Kecamatan Pamboang;
- Permandian Sungai Tubo di Kecamatan Tubo Sendana;
- Permandian Air Panas di Limboro dan Makula serta Wisata Wai Makula Tinggas di Kecamatan Sendana; dan
- Air Terjun Mario dan Takkulilia di Kecamatan Malunda.
- Terumbu Karang Pantai Pacitan Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae;
- Terumbu Karang Pantai Rangas di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae; dan
- Terumbu Karang Pantai Bautapa di Lingkungan Baurung Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur.
- Wisata Pantai Dato Kel. Baurung – Kel. Lembang Kec. Banggae Timur
- Wisata Pantai Barane Kel Baurung Kec. Banggae Timur
- Wisata Pantai Tarraujung Kel. Lalampanua Kec. Pamboang

- Wisata Pantai Baluno/Hutang Mangrove Desa Binanga Kec. Sendana
- Wisata Alam Air Panas Makula Desa Tallubanua Utara, Desa Limboro Ratte Kec. Sendana
- Wisata Pantai Ulidang Desa Ulidang Kec. Tammerodo Sendana
- Wisata Pantai Tubo Selatan Desa Tubo Selatan Kec. Tubo Sendana
- Wisata Pantai Tubo Tengah Desa Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana
- Wisata Pantai Lembang Putih Desa Tubo Kec. Tubo Sendana
- Wisata Embung Sulai Desa Sulai Kec. Ulumanda
- Wisata Pantai Salutambung Desa Salutambung Kec. Ulumanda
- Wisata Pantai Bukit Tinggi Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda
- Wisata Alam Air Terjung Palappang Desa Paminggalan Kec. Sendana
- Wisata Alam Air Terjung Lembang Tallullotang Desa Mekkatta Kec. Malunda
- Wisata Bawah Laut Terumbu Karang Tubo Desa Tubo Selatan, Desa Tubo Tengah dan Desa Tubo Kec. Tubo Sendana.
- Agrowisata Takakesi Desa Bambangan Kec. Malunda.

3. Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan, terdiri atas:
   - Kolam Renang Tirta di Deteng – Deteng kelurahan Totoli Kecamatan Banggae.
   - Pusat Rekreasi Masyarakat (Pusrekmas) Labuang di Kel. Labuang Kec. Banggae Timur
   - Taman Kota Majene Kel. Banggae Kec. Banggae
   - Perencanaan Kawasan Waterfront City Majene di Kel. Banggae-Pangali Ali Kec. Banggae
   - Pasar Ikan Tradisional Pacitan Kel. Pangali Ali Kec. Banggae
   - Wisata Kuliner Labuang Somba di Kel. Mosso Kec. Sendana
   - Wisata Kuliner Apoleang Desa Bukit Samang Kec. Sendana
   - Wisata Kuliner Onang Desa Onang Kec. Tubo Sendana

- Wisata Kuliner Tubo Tengah Desa Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana
- Kawasan Pengrajin Cenderamata/Souvenir Pariwisata Tenung Sarung Sutera Mandar Desa Bonde Kec. Pamboang
- Kawasan Pengrajin Cenderamata/Souvenir/Pariwisata Nuget Ikan Parappe Kel. Labuang Kec. Banggae Timur
- Kawasan Pengrajin Cenderamata/Souvenir Miniatur Perahu Sandeq Mini Parappe Kel. Labuang Kec. Banggae Timur
- Kawasan Pengrajin Cenderamata/Souvenir Pariwisata Rumah Seni Lembang Kel. Baruga Dhua Kec. Banggae Timur.

2.1.2.2. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Kabupaten Majene memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah Kabupaten Majene dimasa mendatang sesuai yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2012-2032, yang diantaranya adalah:

A. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene, diarahkan pada:

1. Kawasan Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara, terdapat di Kecamatan Sendana;
2. Kawasan Strategis Agropolitan, terdapat di Kecamatan Malunda;
3. Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata, meliputi Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang dan Kecamatan Sendana;
4. Kawasan Strategis Minapolitan, Meliputi Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang dan Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana.
5. Pengembangan kawasan pesisir/pulau-pulau kecil Pulau Lerelerekang.

B. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Majene akan diarahkan pada:

1. Kawasan Budaya yang terdapat di Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, dan Kecamatan Malunda.
2. Kawasan Pusat Pendidikan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) terdapat di sebagian Wilayah Kelurahan Labuang, Sebagian Wilayah Kelurahan Baurung, Sebagian Wilayah Kelurahan Tande Timur, Sebagian Wilayah Kelurahan Labuang Utara, dan Sebagian Wilayah Kelurahan Banggae.
3. Kawasan Water Front City Kota Majene terdapat di sepanjang pesisir Kelurahan Baru, Kelurahan Labuang, Kelurahan Pangali-ali dan Kelurahan Banggae.
4. Kawasan Pusat Pemerintahan terpusat Kabupaten Majene terdapat di Kelurahan Totoli dan Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae.

C. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi di Kabupaten Majene, diarahkan pada :

1. Kawasan Pengelolaan sumber daya alam minyak Blok South Mandar dengan luas 3882 Km2 meliputi perairan Selat Makassar Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur;
2. Kawasan Pengelolaan sumberdaya alam minyak Blok Malunda dengan luas 5148,68 Km2 meliputi perairan Selat Makassar Kecamatan Malunda, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Tubo Sendana;
3. Kawasan Pengelolaan sumber daya alam minyak Blok Karama dengan luas 5389,68 Km2 meliputi perairan Selat Makassar Kecamatan Malunda, Kecamatan Ulumanda, Tubo Sendana dan Kecamatan Tammero'do Sendana;
4. Kawasan Pengelolaan Sumber daya alam pertambangan Batubara terdapat di Desa Seppong Kecamatan Tammero'do Sendana dan Desa Talubanua Kecamatan Sendana;
5. Kawasan pertambangan Batu Gamping terdapat di Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Banggae, Kecamatan

Banggae Timur, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda;

6. Kawasan pertambangan Lempung terdapat di Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Malunda, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Tubo Sendana;
7. Kawasan pertambangan Oker terdapat di Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae;
8. Kawasan pertambangan Dasit / Andesit terdapat di Desa Bambangan Kecamatan Malunda, Kelurahan Lalampanua – Desa Betteng Kecamatan Pamboang, Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana, Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda;
9. Kawasan pertambangan Zeolit terdapat di Desa Seppong Kecamatan Tammero'do Sendana;
10. Kawasan pertambangan Basal terdapat di Desa Bambangan Kecamatan Malunda;
11. Kawasan pertambangan Kerakal Bongkah terdapat di Sungai Deking Desa Lombang Kecamatan Malunda, Sungai Manyamba Kecamatan Tammero'do Sendana, Sungai Tubo Kecamatan Tubo Sendana, Sungai Panawar Desa Andolang Kecamatan Pamboang;
12. Kawasan pertambangan Emas terdapat di Dusun Sambabo Kecamatan Ulumanda berupa kawasan pertambangan Bijih Besi; dan Desa Betteng Kecamatan Pamboang, Kecamatan Ulumanda dan Kecamatan Malunda;
13. Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) terdapat di Kelurahan Totoli dan Desa Palipi Soreang Kecamatan Banggae.

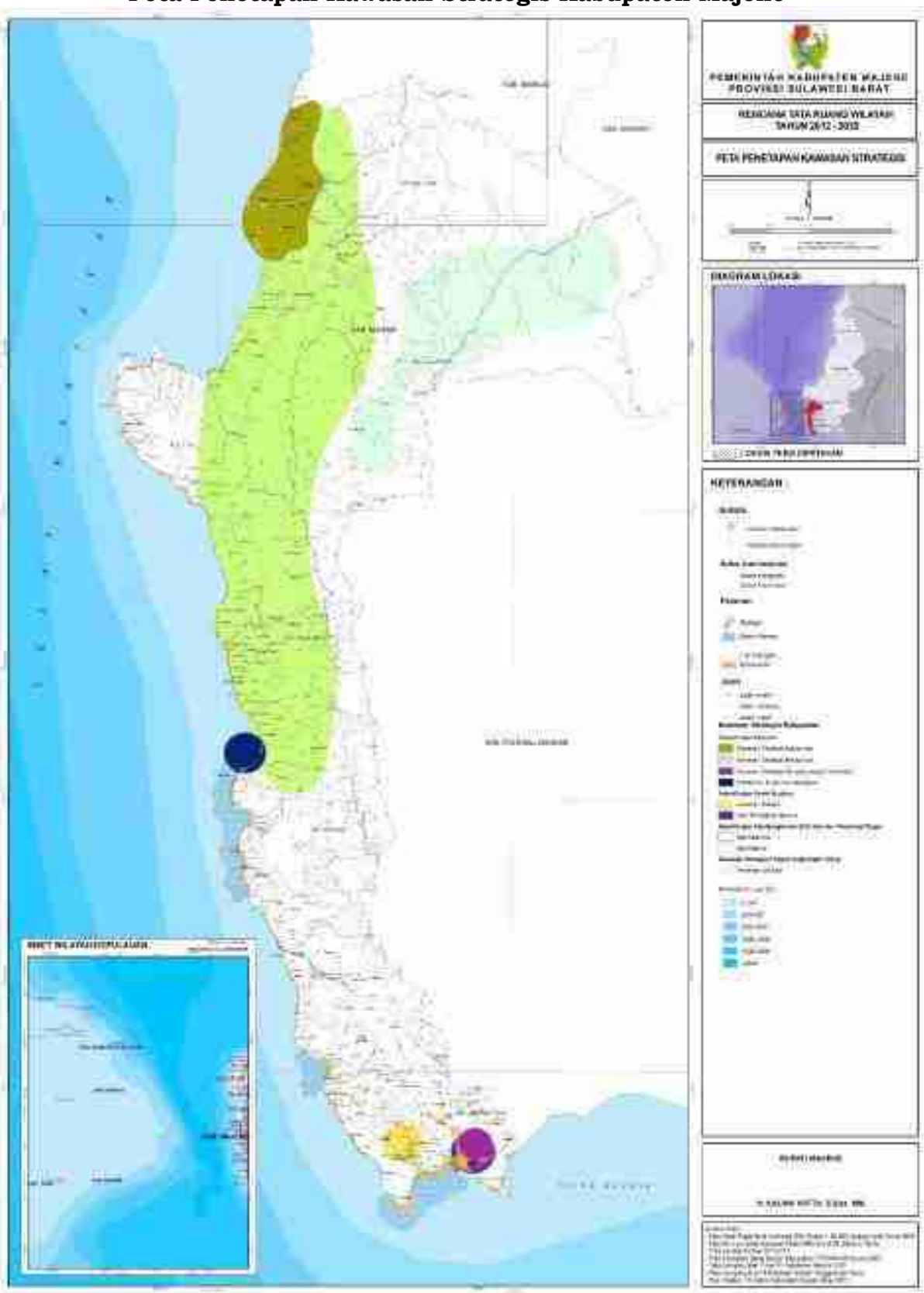
D. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Majene, diarahkan pada :

1. Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Rakyat yang tersebar Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Malunda, dan Kecamatan Ulumanda;

2. Kawasan Cagar Alam Geologi yang meliputi:
   - Satuan Morfologi Pegunungan, satuan ini menempati pegunungan Manatattuang;
   - Satuan Morfologi perbukitan terletak di daerah Kecamatan Banggae dan Kecamatan Pamboang;
   - Satuan Morfologi Karst menempati daerah pantai selatan dan utara di daerah Tubo Kecamatan Tubo Sendana; dan
   - Satuan Morfologi pedataran menempati pesisir pantai barat.
3. Kawasan perlindungan laut di sekitar Pulau Pantai Maluno, Pulau Idaman Tai Manu, dan Pulau Lereklerekan yang terletak di Kecamatan Sendana;
4. Kawasan Terumbu Karang yang meliputi:
   - Kawasan terumbu karang Pantai Pulau Lereklerekan di Kecamatan Sendana;
   - Kawasan terumbu karang Pantai Rangas di Lingkungan Rangas Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae;

Gambar 2.8.
Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Majene



Sumber : Bapeda Kabupaten Majene, 2021

- Kawasan Karang Pantai Bautapa di Lingkungan Baurung Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur;
- Kawasan terumbu karang di Kecamatan Pamboang, Sendana, Tubo Sendana, Tammero'do Sendana, Ulumanda dan Kecamatan Malunda; dan
- Kawasan terumbu karang di Desa Tubo Selatan, Desa Tubo Tengah dan Desa Tubo Kec. Tubo Sendana.

5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau meliputi Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammero'do, Kecamatan Tubo Sendana dan Kecamatan Malunda; dan
6. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Majene.

2.1.3. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendeskripsikan bahwa kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Adapun daya tampung lingkungan hidup digambarkan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Sehingga Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dipahami sebagai suatu analisis yang dilakukan dengan mengukur kemampuan suatu ekosistem guna mendukung satu atau serangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada.

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam pembangunan sebagai pertimbangan dalam pembangunan, sehingga dapat berjalan secara berkelanjutan. Daya dukung lingkungan dimulai dari klasifikasi karakteristik *ekoregion* yang terdiri dari bentang lahan, tipe vegetasi alami dan karateristik penutupan lahan. Hal tersebut, menjadi bahan utama pembuatan dan perhitungan peta jasa lingkungan. Saat ini, pendekatan jasa lingkungan sebagai dasar analisis status daya dukung penyediaan untuk pangan dan air yang menggunakan pendekatan ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*).



Perbandingan antara ketersediaan dengan kebutuhan menghasilkan status daya dukung pada suatu wilayah. Ketersedian diperoleh dari hasil analisis Indeks Jasa Lingkungan (IJL) penyediaan pangan dan air berdasarkan hasil analisis data bentang lahan vegetasi dan pentupan lahan. Sedangkan kebutuhan pangan berdasarkan analisis Angka Kecukupan Energi (AKE) penduduk dan analisis kebutuhan air domestik yang mengacu pada Permen LHK No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Selain kebutuhan air domestik, kebutuhan air berdasarkan tutupan lahan perlu diikutsertakan dalam perhitungan kebutuhan air pada suatu wilayah. Apabila kebutuhan melampaui ketersediaan, maka status Daya Dukung terlampui. Sedangkan kebutuhan lebih kecil dari keteresdian, maka diperoleh informasi status Daya Dukung belum terlampaui. Adapun masing-masing status Daya Dukung Pangan dan Air adalah sebagai berikut:

2.1.3.1. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan menggambarkan kondisi perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan. Dimana untuk ketersediaan, digambarkan dari potensi ketersediaan bahan makanan yang diperoleh dari data Neraca Bahan Makanan Kabupaten Majene yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene, berdasarkan kondisi eksisting nilai ketersediaan kalori per kapita sebesar 2.150 kkal/hari/kapita. Hasil pengolahan data dihasilkan ketersediaan bahan pangan Kabupaten Majene untuk kondisi saat ini sebesar 33.351.090.250 kkal/tahun. Nilai tersebut kemudian didistribusikan ke dalam sistem grid berdasarkan indeks jasa lingkungan penyediaan pangan Kabupaten Majene untuk mendapatkan peta ketersediaan pangan. Asumsinya adalah semakin tinggi nilai indeks jasa lingkungan penyediaan di wilayah tersebut, maka semakin besar sebaran potensi ketersediaan di wilayah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
Ketersedian, Kebutuhan, dan Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Setiap Kecamatan di Kabupaten Majene

No	Kecamatan	Model Densitas Populasi Sistem Grid		Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Selisih	Ambang Batas Penduduk	Selisih Ambang Batas	Keterangan
		Luas	Pddk						
		(ha)	(Jiwa)	(Kkal/Tahun)	(Kkal/Tahun)	(Kkal/Tahun)	(Jiwa)	(Jiwa)	
1	Banggae	2.399,21	42.499	7.124.268.799	33.351.090.250	-26.226.821.451	9.078	-33.421	TERLAMPAUI
2	Banggae Timur	3.356,57	32.092	13.594.237.304	25.184.197.000	-11.589.959.696	17.334	-14.758	TERLAMPAUI
3	Malunda	18.808,75	19.018	65.721.163.981	14.924.375.500	50.796.788.481	83.823	64.805	BELUM TERLAMPAUI
4	Pamboang	7.445,43	23.698	20.258.429.263	18.597.005.500	1.661.423.763	25.815	2.117	BELUM TERLAMPAUI
5	Sendana	10.948,57	23.829	31.474.432.470	18.699.807.750	12.774.624.720	40.125	16.296	BELUM TERLAMPAUI
6	Tammerodo	8.765,18	12.439	29.410.206.335	9.761.505.250	19.648.701.085	37.539	25.100	BELUM TERLAMPAUI
7	Tubo	6.346,26	9.441	21.348.127.178	7.408.824.750	13.939.302.428	27.229	17.788	BELUM TERLAMPAUI
8	Ulumanda	31.949,63	9.136	111.206.170.191	7.169.476.000	104.036.694.191	141.844	132.708	BELUM TERLAMPAUI
Kabupaten Majene		**90.019,60**	**172.152**	**300.137.035.522**	**135.096.282.000**	**165.040.753.522**	**382.787**	**210.635**	**BELUM TERLAMPAUI**

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

Tabel 2.19.
Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Kabupaten Majene

No	Kecamatan	Wilayah Belum Terlampaui		Wilayah Terlampaui		Total	
		(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
1	Banggae	489,18	0,54	1.910,03	2,12	2.399,21	2,67
2	Banggae Timur	950,02	1,06	2.406,56	2,67	3.356,57	3,73
3	Malunda	17.314,60	19,23	1.494,15	1,66	18.808,75	20,89
4	Pamboang	5.062,37	5,62	2.383,06	2,65	7.445,43	8,27
5	Sendana	9.941,32	11,04	1.007,25	1,12	10.948,57	12,16
6	Tammerodo	8.765,18	9,74		-	8.765,18	9,74
7	Tubo	6.346,26	7,05		-	6.346,26	7,05
8	Ulumanda	31.949,63	35,49		-	31.949,63	35,49
Total		**80.818,56**	**89,78**	**9.201,04**	**10,22**	**90.019,60**	**100,00**

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

Gambar 2.9.
Peta Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Kabupaten Majene



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

Secara umum, Kabupaten Majene memiliki kondisi daya dukung penyediaan pangan belum terlampaui. Hal tersebut terlihat dari ambang batas penyediaan pangan di Kabupaten Majene sekitar 382 ribu penduduk, sedangkan jumlah pendududk saat ini berada pada kisaran 172 ribu penduduk. Namun hal yang perlu dicermati, bahwa Kecamatan Banggae dan Banggae Timur telah dalam kondisi terlampaui penyediaan pangannya. Sehingga perlu ada pendistribusian pangan ke wilayah tersebut yang mengalami penyediaan pangan telah terlampaui.

Seperti halnya penjelasan sebelumnya bahwa sebahagian besar wilayah Kabupaten Majene dalam kondisi belum terlampaui status daya dukung penyediaan pangannya. Kecamatan Banggae dan Banggae Timur sebagaian besar wilayahnya telah memiliki status terlampaui penyediaan pangan. Kecamatan yang lain, seperti Kecamatan Malunda, Pamboang, dan Sendana sebagaian besar wilayah dalam kondisi status belum terlampaui penyediaan pangan. Adapun Kecamatan Tammerodo, Tubo, dan Ulumanda seluruh wilayahnya dalam kondisi status belum terlampaui penyediaan pangan.

2.1.3.2. Daya Dukung Air

Daya dukung penyediaan air juga menggambarkan kondisi selisih ketersediaan dengan kebutuhan air. Kebutuhan air yang didistribusikan secara grid dengan dua jenis kebutuhan air yaitu domestik atau rumah tangga, dan untuk lahan seperti tambak, sawah, dan holtikultura, dan perkebunan. Kebutuhan air domestik didasarkan pada angka standar air minum, dan rumah tangga sebesar 43,2 m3/tahun dengan koefisien 2,0 merupakan faktor koreksi untuk memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan lahan, domestik dan lainnya. Kebutuhan air domestik sekitar 275.443.200 m3/tahun. Kebutuhan air untuk lahan didasarkan setiap jenis tutupan lahan sebesar 1 liter/detik. Luas lahan Majene sekitar 90 ribu hektar, sehingga kebutuhan air untuk lahan sebesar 184.047.828 m3/tahun. Berdasarkan hal tersebut, total dari kebutuhan air di Kabupaten Majene sebesar 459.491.028 m3/tahun.

Ketersediaan air berdasarkan pada indeks jasa lingkungan penyediaan air yang terdistribusi dengan sistem grid. Ketersedian air yang ada di Kabupaten Majene mencapai 6,8 miliar m3/tahun. Sehingga ambang batas penduduk dalam penyediaan air sekitar 4.1 juta jiwa. Berdasarkan selisih antara ketersedian dan kebutuhan air tersebut, Kabupaten Majene dalam kondisi daya dukung belum terlampaui karena ketersediaan lebih besar dari kebutuhan. Bahkan terjadi surplus air yang besar yang mencapai angka lebih dari 6,3 miliar m3/tahun atau hampir setara 3,8 juta jiwa penggunaan air dalam setahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20.
Ketersedian, Kebutuhan, dan Status Daya Dukung Penyediaan Air Setiap Kecamatan di Kabupaten Majene

No	Kecamatan	Model Densitas Populasi Sistem Grid		Ketersediaan Air	Kebutuhan Air Untuk Lahan	Kebutuhan Air Untuk Domestik	Kebutuhan Air Total	Selisih	Ambang Batas Penduduk	Selisih Ambang Batas	Ket
		Luas	Pddk								
		(ha)	(Jiwa)	(m^3/Tahun)	(m^3/Tahun)	(m^3/Tahun)	(m^3/Tahun)	(m^3/Tahun)	(Jiwa)	(Jiwa)	
1	Banggae	2.399,21	42.499	166.047.963	7.406.382	67.998.400	75.404.781,79	90.643.181,41	99.163,00	56.664,00	BELUM TERLAMPAUI
2	Banggae Timur	3.356,57	32.092	287.534.732	23.123.062	51.347.200	74.470.262,45	213.064.469,45	165.266,00	133.174,00	BELUM TERLAMPAUI
3	Malunda	18.808,75	19.018	1.421.821.719	22.471.168	30.428.800	52.899.968,03	1.368.921.751,24	874.875,00	855.857,00	BELUM TERLAMPAUI
4	Pamboang	7.445,43	23.698	509.058.891	8.322.342	37.916.800	46.239.142,18	462.819.748,90	313.005,00	289.307,00	BELUM TERLAMPAUI
5	Sendana	10.948,57	23.829	792.792.963	27.211.950	38.126.400	65.338.350,46	727.454.612,93	478.549,00	454.720,00	BELUM TERLAMPAUI
6	Tammerodo	8.765,18	12.439	715.190.100	38.395.259	19.902.400	58.297.658,62	656.892.441,01	423.029,00	410.590,00	BELUM TERLAMPAUI
7	Tubo	6.346,26	9.441	518.899.185	18.143.363	15.105.600	33.248.963,24	485.650.221,93	312.998,00	303.557,00	BELUM TERLAMPAUI
8	Ulumanda	31.949,63	9.136	2.434.498.794	38.974.302	14.617.600	53.591.901,58	2.380.906.892,28	1.497.618,00	1.488.482,00	BELUM TERLAMPAUI
TOTAL		**90.019,60**	**172.152**	**6.845.844.347**	**184.047.828**	**275.443.200**	**459.491.028,35**	**6.386.353.319,15**	**4.164.503,00**	**3.992.351,00**	BELUM TERLAMPAUI

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

Tabel 2.21.
Status Daya Dukung Penyediaan Air Kabupaten Majene

No.	Kecamatan	Wilayah Belum Terlampaui		Wilayah Terlampaui		Total	
		(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
1	Banggae	2.323,23	2,58	75,99	0,08	2.399,21	**2,67**
2	Banggae Timur	3.356,57	3,73		-	3.356,57	**3,73**
3	Malunda	18.808,75	20,89		-	18.808,75	**20,89**
4	Pamboang	7.445,43	8,27		-	7.445,43	**8,27**
5	Sendana	10.948,57	12,16		-	10.948,57	**12,16**
6	Tammerodo	8.765,18	9,74		-	8.765,18	**9,74**
7	Tubo	6.346,26	7,05		-	6.346,26	**7,05**
8	Ulumanda	31.949,63	35,49		-	31.949,63	**35,49**
TOTAL		**89.943,61**	**99,92**	**75,99**	**0,08**	**90.019,60**	**100,00**

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

Gambar 2.10.
Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air Kabupaten Majene



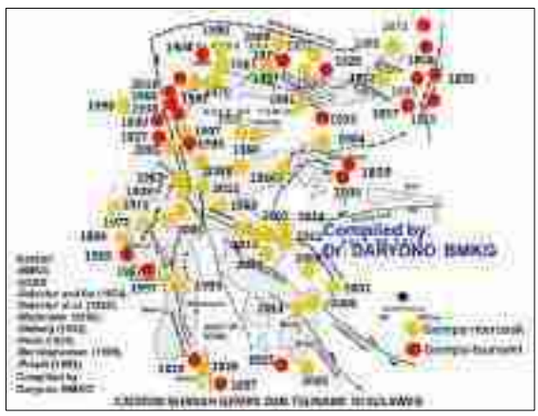
Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

Secara keseluruhan, Kabupaten Majene memiliki kondisi daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hal tersebut terjadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa dapat dilihat dari ambang batas penyediaan air. Jika dilihat lagi perkecamatan, bahwa seluruh kecamatan dalam kondisi belum terlampaui termasuk Kecamatan Banggae dan Banggae Timur selaku ibukota Kabupaten Majene. Secara lebih detail dengan melihat sebaran secara spasial, daya dukung penyediaan air Kabupaten Majene, hampir keseluruhan wilayah dalam kondisi belum

terlampaui. Berdasarkan kecamatan, juga terlihat hampir seluruh kecamatan dalam kondisi belum terlampaui kecuali Kecamatan Banggae. Kecamatan Banggae memiliki wilayah dalam kondisi telah terlampaui penyediaan airnya seluas 75,99 hektar atau 0,08 persen dari luas total Kabupaten Majene.

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Undang Undang No. 24 tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai "peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis". Data mengenai bencana alam merupakan bahan informasi yang sangat penting dalam merumuskan Rencana Tata Ruang Kabupaten Majene, dimana bencana alam yang terjadi, seperti; bencana alam geologi, bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor serta tsunami dan abrasi pantai.



Kawasan rawan bencana alam, diarahkan pada daerah-daerah yang rawan gempa akibat adanya patahan dan sesar, juga pada daerah rawan bencana tsunami di pesisir pantai, daerah tanah longsor dan banjir. Pengalokasian ini ditujukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh bencana alam. Potensi rawan bencana Kabupaten Majene didasarkan pada kecenderungan kejadian alam ataupun kejadian-kejadian masa lampau, baik yang terjadi secara periodik, maupun yang terjadi sewaktu-waktu.

Sejarah kejadian bencana dijabarkan berdasarkan kejadian bencana yang pernah terjadi. Dari catatan sejarah kebencanaan, Kabupaten Majene merupakan wilayah yang tidak terlepas dari ancaman bencana. Meskipun frekuensinya tidak terlalu banyak namun bencana-bencana ini telah menyebabkan kerugian. Salah satu informasi untuk mendapatkan catatan

sejarah kejadian bencana Kabupaten Majene diperoleh dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Catatan data DIBI ini memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kejadian serta dampak yang ditimbulkan.

Kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Majene menurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) adalah bencana banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, serta gempabumi masing-masing satu kejadian yaitu banjir pada tahun 2011 dengan dampak yang ditimbulkan adalah 10 unit rumah terendam dan 1 unit fasilitas pendidikan mengalami kerusakan. Gempabumi terjadi satu kali pada tahun 2011 yang menimbulkan kerusakan 1 unit fasilitas peribadatan dan 5 unit fasilitas pendidikan, sedangkan gelombang ekstrim dan abrasi yang terjadi pada tahun 2015 tidak menimbulkan dampak apapun.

Terakhir terjadi Gempa bumi yang cukup besar di Kabupaten Majene dengan wilayah terdampak bencana sebanyak 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Tubo, Ulumanda dan Malunda. Bencana gempa terjadi sebanyak dua kali yakni pada tanggal 14 Januari 2021 dengan 5,9 Magnitudo dan terjadi lagi pada tanggal 15 Januari 2021 dengan 6,2 Magnitudo menyebabkan 11 orang meninggal dunia 3 orang belum ditemukan, 1.474 orang luka-luka, mengungsi 27.850 orang serta mengakibatkan kerusakan pada rumah, sarana dan prasarana serta fasilitas umum dan sosial dengan tingkat kerusakan berat, sedang maupun ringan. Berikut disajikan tabel sejarah kejadian bencana di Kabupaten Majene yang dimulai dari Tahun 1969-2018, sebagai berikut.

Tabel 2.22.
Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Majene Tahun 1969 – 2018

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban (jiwa)			Rumah (unit)				Sarana dan Fasilitas (unit)		
		Meninggal & Hilang	Luka	Menderita & Mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Kesehatan	Peribadatan	Pendidikan
1 Banjir	4	1	-	-	-	-	77	131	-	1	6
1 Tanah Longsor	2	1	4	-	10	-	-	-	-	-	-
1 Gelombang Ekstrim dan Abrasi	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Gempa bumi (tanpa tsunami)	5	-	-	-	6	466	111	-	-	-	-
1 Kebakaran	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Gempa Bumi	1	64	11	-	-	1	1	-	-	-	-
Jumlah	13	72	1474	-	16	467	189	131	1	1	6

Sumber : https://dibi.bnpb.go.id/ Bencana Indonesia, 1970-2021

Kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Majene menurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB adalah

1. Bencana banjir : 4 kejadian, terjadi pada tahun 2004, 2007, 2011 dan 2015 dengan dampak yang ditimbulkan adalah 1 orang meninggal/hilang, rumah rusak ringan 25 unit, rumah terendam 250 unit dan keruskan fasilitas pendidikan 8 unit.
2. Tanah longsor: 2 kejadian, terjadi pada tahun 2003 dan 2012 dengan dampak yang ditimbulkan adalah 7 orang meninggal/hilang, 6 orang luka-luka.
3. Gelombang ekstrim dan abrasi: 1 kejadian, terjadi pada tahun 2008 dengan dampak yang ditimbulkan adalah 5 orang luka-luka.
4. Cuaca ekstrim (angin puting beliung): 5 kejadian, terjadi pada tahun 2007, 2012, 2013, 2015 dan 2016 dengan dampak yang ditimbulkan adalah 8 unit rumah rusak berat, 488 unit rumah rusak sedang dan 131 unit rumah rusak ringan.
5. Kekeringan: 3 kejadian, terjadi pada tahun 2003 dan 2011, tidak ada dampak korban jiwa.
6. Gempabumi: 2 kejadian, terjadi pada tahun 1969 dan 2021, dengan dampak yang ditimbulkan adalah 64 orang meninggal/hilang, 97 orang luka-luka pada tahun 1969 dan 11 orang meninggal dunia, 3 orang belum ditemukan, 1.474 orang luka-luka dan mengungsi 27.850 orang pada tahun 2021.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Majene yang teridentifikasi yaitu:

1. Bencana Alam Geologi

Kawasan rawan bencana alam geologi di Kabupaten Majene, terdiri atas:

1. Kawasan rawan gempa bumi, terdapat di Kecamatan Sendana dan Kecamatan Tammero'do Sendana yang masing-masing terdapat kawasan pusat gempa dan di Kecamatan Ulumanda yang terdapat dua kawasan pusat gempa;

2. Kawasan rawan gerakan tanah, terdapat di Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana; Kecamatan Tubo Sendana; dan Kecamatan Ulumanda.
3. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, melintang dari arah arah timur membentang di sepanjang gunung Majene mengarah kearah barat daya menuju ke Kabupaten Mamuju dan sesar yang melintas di wilayah perairan Majene;
4. Kawasan rawan tsunami, terdapat di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Majene; dan
5. Kawasan rawan abrasi, terdapat di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Majene.

2. Bencana Tanah Longsor



Bencana tanah longsor potensial terjadi di Kabupaten Majene dengan bentuk topografi bergelombang hingga daerah pegunungan. Kawasan bencana longsor dapat diidentifikasi di sepanjang jalan Kecamatan Sendana, dimana pada saat-saat tertentu apabila terjadi longsor akan berdampak terhadap akses jalan regional. Selain itu, potensi longsor terjadi di Kecamatan Ulumanda dengan konsentrasi permukiman yang berada di daerah pegunungan. Selain itu, kawasan bencana tanah longsor juga terdapat:

1. Kecamatan Banggae
2. Kecamatan Banggae Timur
3. Kecamatan Pamboang
4. Kecamatan Sendana (Sepanjang Jalan Poros Kecamatan Sendana)
5. Kecamatan Ulumanda khususnya Desa Tandeallo, Sambabo dan Desa Kabiraan
6. Kecamatan Malunda khususnya di Dusun Toppo Desa Lombong
7. Kecamatan Tubo Sendana di Desa Tubo dan
8. Kecamatan Tammerodo Sendana di Desa Ulidang, Seppong dan Desa Tallambalao.

3. Bencana Banjir



Bencana banjir dapat disebabkan oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi, serta meluapnya air sungai, sehingga terjadi genangan didaerahdataran rendah. Seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Majene, seperti; di daerah perkotaan, juga terjadi banjir akibat genangan air hujan hal tersebut disebabkan oleh bentuk topografi yang sangat datar serta sistem drainase yang belum berfungsi dengan baik. Selain itu, bencana banjirjugaterjadi di daerah pedesaan khususnya pada wilayah-wilayah yang dilintasi oleh sungai besar, akibat volume air yang cukup tinggi apalagi kondisi sungai yang tidak bertanggul diantaranya:

1. Kecamatan Banggae di Kelurahan Banggae, Kelurahan Pangali Ali, Kelurahan Baru dan Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae Timur di Kelurahan Labuang dan Kelurahan Baurung dan Kelurahan Lembang,
2. Kecamatan Pamboang di desa Adolang, Kelurahan Sirindu; dan Kelurahan Lalampanua,
3. Kecamatan Sendana di Desa Apoleang; Kelurahan Mosso dan Mosso Dhua serta Desa Apoleang,
4. Kecamatan Tammero'do di desa Seppong,
5. Kecamatan Malunda di Kelurahan Malunda dan desa Lombong. serta disepanjang Bantaran Sungai yang ada di Kecamatan Malunda; dan
6. Kecamatan Ulumanda di Desa Ulumanda, Desa Salutambung dan Desa Sulai.

4. Bencana Gempa Bumi

Pada umumnya Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang sangat rawan terhadap gempa, dimana dilintasi oleh beberapa lempeng, sehingga setiap saat akan terjadi gempa bumi.

Begitupun halnya dengan Kabupaten Majene yang terletak diBagian Barat Pulau Sulawesi, dimana terdapat titik gempa serta dilintasi oleh jalur sesart yakni; sesart paternoster serta patahan Walanae yang berpotensi menimbulkan gempa bumi tepatnya di sepanjang pegunungan Majene serta patahan di perairan Selat Makassar.

Dari data dan informasi, titik gempa berada di beberapa wilayah kecamatan, yakni; di Kecamatan Sendana dengan kedalaman 0-90 Km, Kecamatan Tammerodo Sendana dengan tingkat kedalaman 500-599 Km dimana terdapat masing-masing satu pusat titik gempa, sedangkan di Kecamatan Ulumanda terdapat dua titik pusat gempa.

5. Bencana Stunami dan Abrasi Pantai



Kabupaten Majene sebagai wilayah pesisir dengan garis pantai yang cukup panjang dan terletak di perairan Selat Makassar. Berdasarkan peta Nasional potensi Tsunami, dimana Selat Makassar rawan terjadinya tsunami, sehingga Kabupaten Majene memiliki tingkat kerawanan terjadinya tsunami. Selain itu, bencana alam berupa abrasi pantai juga mengancam kawasan pesisir, dimana hal tersebut disebabkan oleh instrusi air laut akibat gelombang pasang yang cukup tinggi. Dari hasil survey lapangan, terdapat kawasan pesisir dengan tembok penahan ombak, akan tetapi tidak mampu menahan hantaman ombak, sehingga terjadi kerusakan di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Majene.

Gambar 2.11.
Peta Risiko Multi Bahaya di Kabupaten Majene



Sumber : BPBD Kabupaten Majene, 2021

2.1.5. Kondisi Demografi dan Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk dan perpindahan penduduk senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Beragam faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk seperti wabah penyakit atau epidemi, kelaparan, dan bencana alam. Di lain pihak, kestabilan wilayah, peningkatan gizi, dan kesehatan dapat mengakibatkan jumlah penduduk cenderung naik. Fenomena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kelahiran (fertilitas atau natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi).

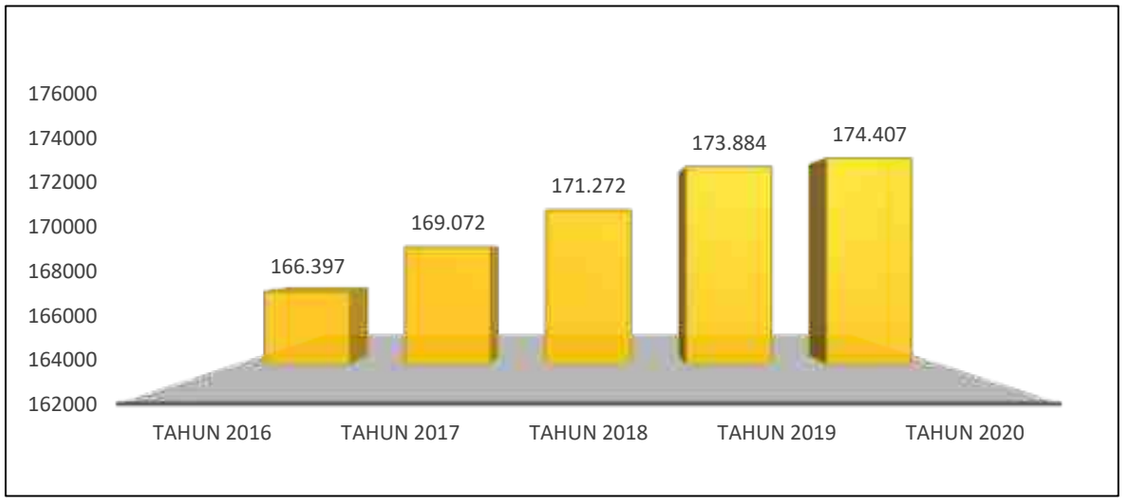
Data perkembangan jumlah penduduk yang tersaji dalam sistem pendataan merupakan akumulasi dari faktor-faktor tersebut. Berdasarkan tabel dan gambar dibawah, memperlihatkan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Majene dari tahun 2016-2020 menunjukkan angka peningkatan. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Majene periode tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2.23.
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Majene 5 Tahun Terakhir (2016 – 2020)

No	Kecamatan	Perkembangan Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Banggae	41.370	42.134	42.777	43.532	43.304
2	Banggae Timur	31.384	31.919	32.362	32.879	30.579
3	Pamboang	22.369	22.626	22.816	23.059	24.087
4	Sendana	22.966	23.383	23.734	24.147	24.299
5	Tammerodo Sendana	11.525	11.678	11.803	11.953	12.646
6	Tubo Sendana	9.003	9.138	9.249	9.379	9.759
7	Malunda	18.749	19.051	19.301	19.597	19.894
8	Ulumanda	9.031	9.143	9.230	9.338	9.839
Kab. Majene		**166.397**	**169.072**	**171.272**	**173.884**	**174.407**

Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2021

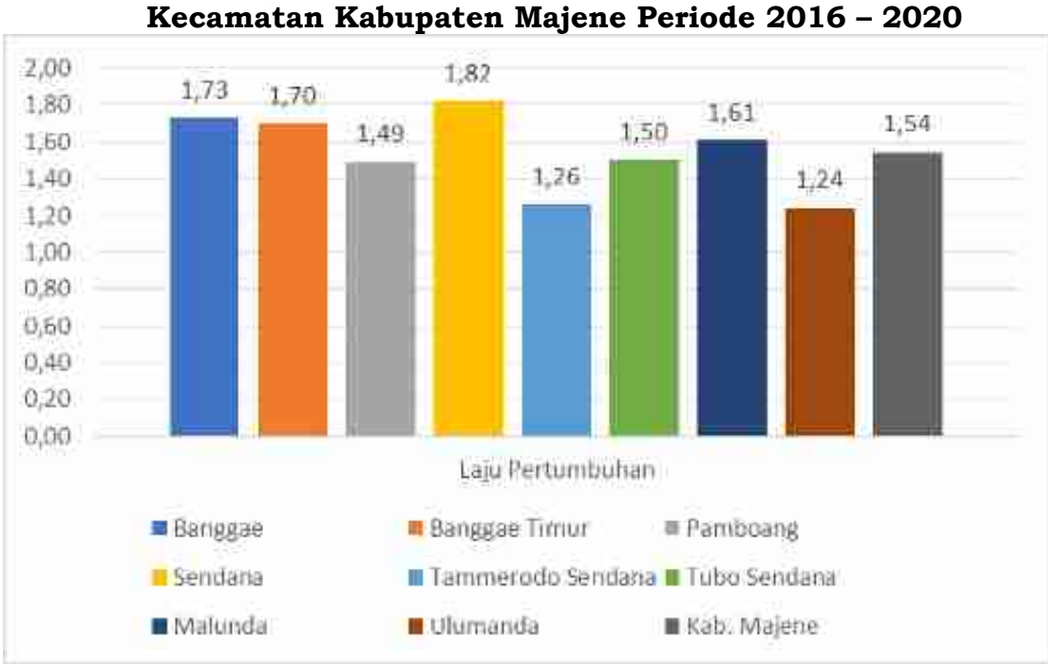
Gambar 2.12.
Jumlah Penduduk Kabupaten Majene 5 Tahun Terakhir
Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Majene pada tahun 2016 berjumlah 166.397 jiwa, dan pada tahun 2017 dan 2018 terus mengalami kenaikan masing-masing berjumlah 169.072 jiwa dan 171.272 jiwa, begitupun pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 173.884 jiwa hingga pada tahun 2020 mencapai 174.407 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun (2016-2020) sekitar 1.54%.

Gambar 2.13.
Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Majene Periode 2016 – 2020



Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2021

Berdasarkan pada grafik diatas, memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk pada tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Majene pada periode 2016-2020, dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Sendana Sebesar 1,82%, kemudian Kecamatan Banggae dan Banggae Timur yang masing-masing sebesar 1,73% dan 1,70% sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Ulumanda yaitu sebesar 1,24%.

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk suatu wilayah berdasarkan batas-batas geografis maupun batas-batas administrasi pemerintahan yang memberi gambaran terhadap pola persebaran permukiman dan kecenderungannya. Pada dasarnya jumlah penduduk yang terdistribusi pada suatu wilayah, mempengaruhi tingkat konsentrasi pelayanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan penduduk pada wilayah tersebut. Secara rinci persebaran dan kepadatan penduduk di Kabupaten Majene diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.24.
Persebaran dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Majene Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Jumlah Kel./Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1	Banggae	25.15	8	43.304	1,722
2	Banggae Timur	30.04	9	30.579	1,018
3	Pamboang	70.19	15	24.087	343
4	Sendana	82.24	16	24.299	295
5	Tammerodo Sendana	55.40	7	12.646	228
6	Tubo Sendana	41.17	7	9.759	237
7	Malunda	456	12	19.894	106
8	Ulumanda	187.65	8	9.839	22
Kab. Majene		**947.84**	**82**	**174.407**	**184**

Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2021

Berdasarkan data tabel dibawah, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Majene pada tahun 2020 terdistribusi pada 8 wilayah kecamatan. Masing-masing kecamatan memiliki tingkat distribusi penduduk yang berbeda, sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur sebagai Ibukota Kabupaten Majene dengan jumlah penduduk di Kecamatan Banggae sebanyak 43.304 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar

1.722 jiwa/km2 sedangkan jumlah penduduk di Kecamatan Banggae Timur sebanyak 30.579 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.018 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk terendah berada pada Kecamatan Ulumanda dengan jumlah penduduk sebesar 9.839 jiwa dengan kepadatan penduduk 22 jiwa/km^2.

Data BPS Tahun 2021 menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin/Sex Ratio (SR) penduduk Kabupaten Majene adalah 99 artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin tertinggi berada pada Kecamatan Tameroddo dengan angka 102,21 sedangkan rasio terendah berada pada Kecamatan Banggae Timur sebesar 96,07 dimana jumlah perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Untuk lebih jelasnya lihat tabel sebagai berikut:

Tabel 2.25.
Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Majene Tahun 2020

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
1	Banggae	100
2	Banggae Timur	96
3	Pamboang	100
4	Sendana	99
5	Tammero'do Sendana	102
6	Tubo Sendana	99
7	Malunda	100
8	Ulumanda	101
Jumlah		**99,59**

Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2021

Sementara Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur (5 Tahunan) dan Jenis Kelamin Kabupaten Majene Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Majene Tahun 2021 menunjukan jumlah penduduk Kabupaten Majene menurut jenis kelamin, dimana penduduk laki-laki sebesar 87.025 jiwa atau sebesar 49,90% sedangkan penduduk perempuan sebesar 87.382 jiwa atau sebesar 50,10%.

Kelompok umur 0-4 tahun memiliki jumlah yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok umur lainnya dengan jumlah penduduk sebesar 19.690 jiwa yang terbagi kedalam jenis kelamin laki-laki sebesar 9.992 jiwa dan perempuan sebesar 9.698 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 103 jiwa. Sedangkan persentase penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin terendah berada pada kisaran umur 70-74 tahun dengan dengan jumlah penduduk sebesar 2.599 jiwa yang terbagi kedalam

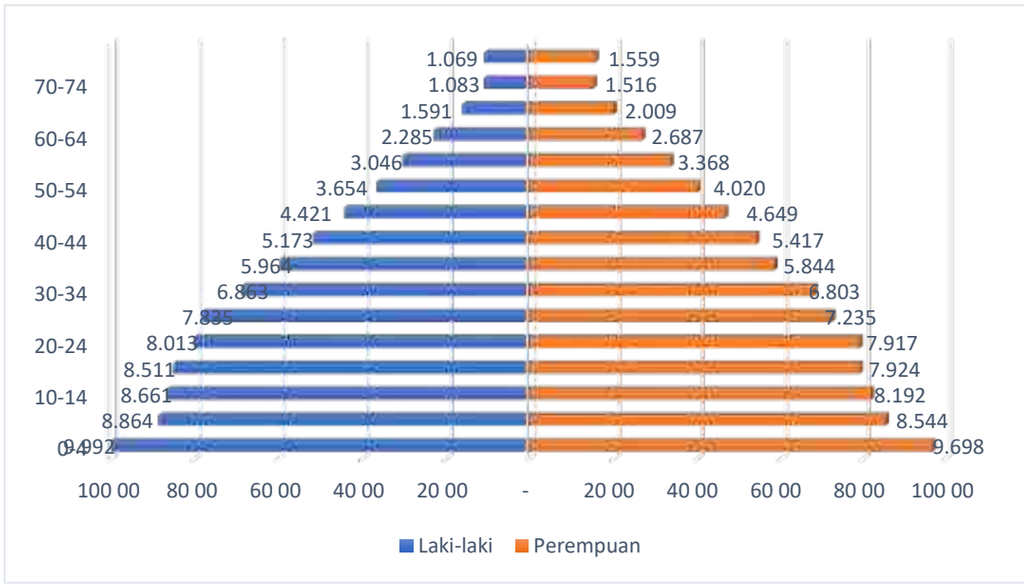
jenis kelamin laki-laki sebesar 1.083 jiwa dan perempuan sebesar 1.516 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 71 jiwa. Untuk rasio jenis kelamin secara keseluruhan, kelompok umur 75+ memiliki rasio terendah dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tabel 2.26.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Majene Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	0-4	9.992	1.069	19.690	103,03
2	5-9	8.864	8.544	17.408	103,75
3	10-14	8.661	8.192	16.853	105,73
4	15-19	8.511	7.924	16.435	107,41
5	20-24	8.013	7.917	15.930	101,21
6	25-29	7.835	7.235	15.070	108,29
7	30-34	6.863	6.803	13.666	100,88
8	35-39	5.964	5.844	11.808	102,05
9	40-44	5.173	5.417	10.590	95,50
10	45-49	4.421	4.649	9.070	95,10
11	50-54	3.654	4.020	7.674	90,90
12	55-59	3.046	3.368	6.414	90,44
13	60-64	2.285	2.687	4.972	85,04
14	65-69	1.591	2.009	3.600	79,19
15	70-74	1.083	1.516	2.599	71,44
16	75+	1.069	1.559	2.628	68,57
Jumlah		**87.025**	**87.382**	**174.407**	**99,59**

Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2021

Gambar 2.14.
Piramida Penduduk Menurut Persentase Penduduk Kelompok Umur (5 Tahunan) dan Jenis Kelamin
Kabupaten Majene Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2021

Jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama di Kabupaten Majene pada tahun 2020 didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 164.887 jiwa sedangkan penduduk beragama Protestan sebanyak 167 orang, Katolik sebanyak 64 orang, Hindu hanya terdapat 1 orang, Budha sebanyak 22 orang, dan lainnya hanya sebanyak 4 orang. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kabupaten Majene harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik dimasyarakat. Lebih jelasnya jumlah penduduk menurut agama di Kabupaten Majene tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut Kabupaten Majene Tahun 2020

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Banggae	40.227	74	33	1	18	2
2	Banggae Timur	31.437	71	29	-	4	2
3	Pamboang	23.112	5	1	-	-	-
4	Sendana	22.371	9	1	-	-	-
5	Tammero'do Sendana	12.314	3	-	-	-	-
6	Tubo Sendana	8.933	2	-	-	-	-
7	Malunda	17.511	3	-	-	-	-
8	Ulumanda	8.972	-	-	-	-	-
Jumlah		**164.887**	**167**	**64**	**1**	**22**	**4**

Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyatnya untuk menikmati umur panjang, memperoleh pengetahuan, dan menjalani standar kehidupan yang layak. Pembangunan yang berpusat pada manusia akan menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat pembangunan.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah daerah adalah daerah maju, daerah berkembang atau daerah terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, serta kemampuan daya beli diperoleh dari Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Riil.

Selain IPM, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, yang di defenisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang disajikan dalam satu tahun wilayah tersebut.

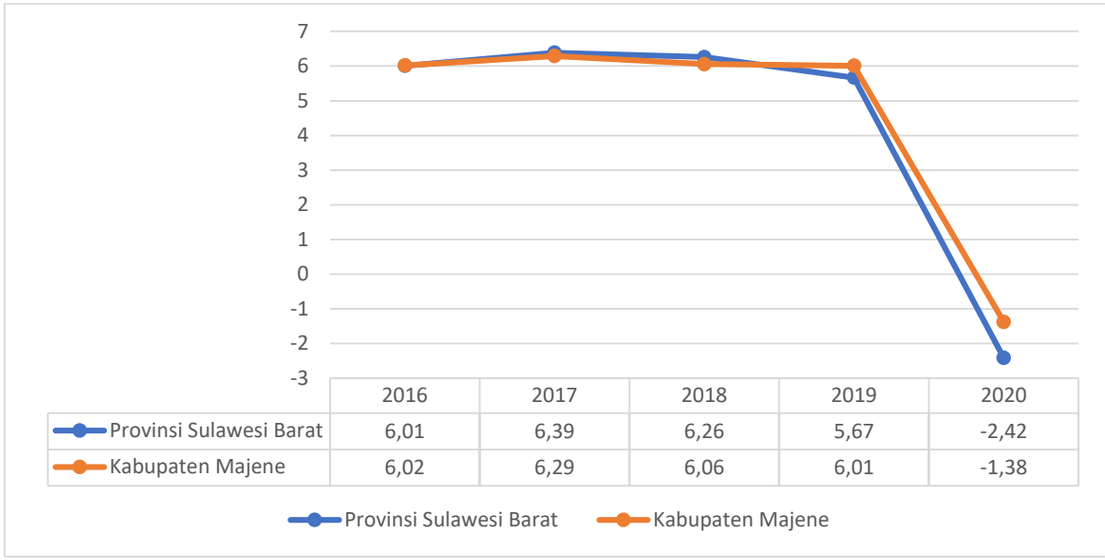
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis aspek kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Majene, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Majene. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Secara kumulatif Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene Tahun 2020 tumbuh negatif. Pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami kontraksi sebesar -1,38% lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang masih tumbuh positif yaitu sebesar 6,01%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene juga sejalan dengan arah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat di mana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami kontraksi sebesar -2,42%, juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat 5,67%. Adapun perbandingannya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene dan provinsi Sulawesi Barat selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Gambar 2.15.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Majene dan Regional Sulawesi Barat Tahun 2016 – 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Sulawesi Barat	6,01	6,39	6,26	5,67	-2,42
Kabupaten Majene	6,02	6,29	6,06	6,01	-1,38

Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2021

Faktor terkontraksinya pertumbuhan ekonomi tersebut di atas dipengaruhi oleh kondisi ketidakpastian perekonomian global maupun domestik karena pandemi COVID-19. Kebijakan lockdown di berbagai negara dunia termasuk Indonesia turut berdampak pada kinerja di berbagai sektor usaha. Selain itu, sikap masyarakat juga cenderung berhati-hati dalam berbelanja di tengah ketidakpastian kondisi tersebut. Kualitas konsumsi juga tergolong rendah karena perdagangan durable goods yang tertahan. Proyek infrastruktur Pemerintah Daerah mengalami penundaan karena penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID-19, sedangkan pihak swasta cenderung bersikap wait and see disebabkan kondisi ekonomi yang kurang kondusif. Peran Pemerintah ke depan perlu diperkuat melalui perbaikan pola belanja dan penguatan program kerja yang mengarah pada peningkatan sektor usaha yang minim risiko (low risk) dari dampak COVID-19 namun memiliki efek multiplier/pengganda yang tinggi.

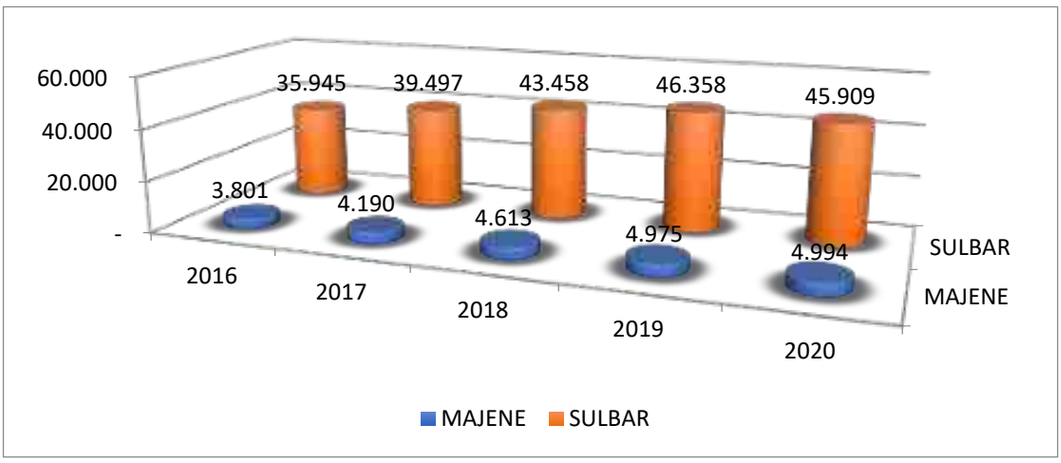
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai alat ukur untuk menghitung pendapatan

perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain suatu data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Majene pada tahun 2016 mencapai 3.801 milyar rupiah, di tahun 2017 mencapai 4.190 milyar dan tahun 2018 meningkat menjadi 4.613 milyar rupiah, tahun 2019 kembali meningkat menjadi 4.975 milyar rupiah, dan di tahun 2020 mencapai sebesar 4.994 milyar rupiah. Jika dibandingkan dengan perkembangan PDRB Sulawesi Barat, maka rata-rata PDRB Kabupaten Majene berkontribusi 10,83%. Jumlah ini relatif tidak proporsional, karena PDRB Sulawesi Barat diakumulasikan oleh 6 Kabupaten. Oleh karena itu, untuk Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah yang tepat dalam melakukan intervensi pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan proporsional. Adapun Perbandingan PDRB ADHK Kab. Majene terhadap PDRB ADHK Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.16.
Perbandingan PDRB ADHK Kab. Majene terhadap PDRB ADHK Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 – 2020



Sumber Data: BPS Prov. Sulbar, Tahun 2021

Struktur ekonomi suatu daerah dapat menggambarkan sejauh mana suatu kategori lapangan usaha dalam menciptakan nilai tambah untuk menyumbang perekonomian daerah pada kurun waktu tertentu. Penggambaran struktur ekonomi daerah antara lain digunakan untuk merancang suatu kebijakan dalam rangka pengembangan kategori lapangan usaha tertentu kemasa yang akan datang. Adapun Komposisi PDRB Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020 (Juta Rp.) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28.
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 2010 Kab. Majene Tahun 2016 – 2020

Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020**	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.001,7	33,5	1.060,8	33,4	1.144,7	33,9	1.230,1	34,4	1.248,7	35,4
Pertambangan dan Penggalian	77,7	2,6	83,1	2,6	89,7	2,7	95,0	2,7	89,9	2,5
Industri Pengolahan	158,3	5,3	173,8	5,5	185,7	5,5	196,6	5,5	199,9	5,7
Pengadaan Listrik dan Gas	3,6	0,1	3,9	0,1	4,1	0,1	4,4	0,1	4,6	0,1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,3	0,1	4,6	0,1	5,0	0,1	5,1	0,1	5,1	0,1
Konstruksi	229,5	7,7	250,2	7,9	265,4	7,9	277,4	7,8	244,4	6,9
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	290,6	9,7	307,2	9,7	323,6	9,6	340,7	9,5	335,4	9,5
Transportasi dan Pergudangan	54,0	1,8	55,3	1,7	58,2	1,7	60,6	1,7	57,3	1,6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,9	0,3	9,1	0,3	9,6	0,3	10,8	0,3	10,1	0,3
Informasi dan Komunikasi	155,3	5,2	172,0	5,4	183,7	5,4	207,7	5,8	218,9	6,2
Jasa Keuangan dan Asuransi	107,9	3,6	110,6	3,5	113,7	3,4	118,3	3,3	126,6	3,6
Real Estate	102,0	3,4	107,3	3,4	113,4	3,4	120,1	3,4	123,4	3,5
Jasa Perusahaan	1,6	0,1	1,7	0,1	1,8	0,1	1,8	0,1	1,7	0,0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	364,2	12,2	374,8	11,8	384,8	11,4	395,5	11,1	370,3	10,5
Jasa Pendidikan	287,3	9,6	310,6	9,8	324,4	9,6	339,8	9,5	320,5	9,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	44,4	1,5	47,9	1,5	51,2	1,5	51,7	1,4	53,4	1,5
Jasa lainnya	101,1	3,4	107,7	3,4	114,3	3,4	120,4	3,4	116,3	3,3
Total	**2.992,3**	**100,0**	**3.180,6**	**100,0**	**3.373,4**	**100,0**	**3.576,1**	**100,0**	**3.526,8**	**100,0**

Sumber : BPS Kabupaten Majene Tahun 2021
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Tabel 2.29.
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kab. Majene Tahun 2016 – 2020

Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.328,2	34,9	1.475,1	35,2	1.680,1	36,4	1.827,3	36,7	1.894,7	37,9
Pertambangan dan Penggalian	105,1	2,8	112,9	2,7	123,7	2,7	133,1	2,7	128,2	2,6
Industri Pengolahan	190,6	5,0	217,1	5,2	234,1	5,1	251,8	5,1	261,5	5,2
Pengadaan Listrik dan Gas	2,5	0,1	2,9	0,1	3,1	0,1	3,2	0,1	3,4	0,1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,5	0,1	4,8	0,1	5,2	0,1	5,3	0,1	5,4	0,1
Konstruksi	265,2	7,0	298,6	7,1	327,5	7,1	353,4	7,1	313,3	6,3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	427,1	11,2	474,5	11,3	517,1	11,2	548,5	11,0	547,0	11,0
Transportasi dan Pergudangan	69,0	1,8	71,0	1,7	75,3	1,6	79,1	1,6	76,0	1,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,1	0,3	11,9	0,3	12,8	0,3	14,5	0,3	13,8	0,3
Informasi dan Komunikasi	184,4	4,9	209,8	5,0	229,4	5,0	260,2	5,2	274,3	5,5
Jasa Keuangan dan Asuransi	141,6	3,7	151,2	3,6	160,9	3,5	169,9	3,4	182,0	3,6
Real Estate	134,5	3,5	144,3	3,4	152,8	3,3	162,1	3,3	167,2	3,3
Jasa Perusahaan	1,9	0,0	2,0	0,0	2,1	0,0	2,2	0,0	2,1	0,0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	435,9	11,5	453,4	10,8	473,5	10,3	504,6	10,1	485,6	9,7
Jasa Pendidikan	329,2	8,7	375,1	9,0	413,1	9,0	449,5	9,0	429,6	8,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53,8	1,4	58,6	1,4	63,6	1,4	64,6	1,3	67,3	1,3
Jasa lainnya	116,3	3,1	127,3	3,0	138,2	3,0	145,6	2,9	142,1	2,8
Total	**3.801,0**	**100,0**	**4.190,4**	**100,0**	**4.612,7**	**100,0**	**4.974,9**	**100,0**	**4.993,5**	**100,0**

Sumber : BPS Kabupaten Majene Tahun 2021
** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan pada Tabel 2.28. dan Tabel 2.29. diatas, terkait perkembangan 17 sektor PDRB Kabupaten Majene dalam periode 2016 – 2020 baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku menunjukkan bahwa Perekonomian Kabupaten Majene dominan bersumber dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan dominasi lebih dari sepertiganya dan juga mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati urutan kedua dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Majene meskipun setiap tahunnya hanya memberikan kontribusi rata-rata 11% pada PDRB atas dasar harga berlaku dan 9,5% pada PDRB atas dasar harga konstan.

Diurutan ketiga dan keempat yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Majene adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor jasa pendidikan. Meskipun demikian pertumbuhan kedua sektor tersebut dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan. Namun pada sektor informasi dan komunikasi menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya dan menempati urutan kelima dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Majene.

Capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu menjadi harapan yang diinginkan disetiap periode pemerintahan. Pertumbuhan eknonomi yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan dari suatu pembangunan. Selain mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, pemerintah juga diharapkan memperhatikan pemerataan dari pembangunan yang telah dicapai tersebut. Secara umum, perekonomian Kabupaten Majene tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 menurun menjadi -1.38 persen, lebih besar dari tahun 2019 yang mencapai 6,01 persen. Adapun jika dicermati selama lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Majene cenderung mengalami perlambatan dimana tahun 2016 pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 6,02 persen. Lebih jelasnya terkait Distribusi Persentase PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majene Periode 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30.
Distribusi Persentase PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majene Periode 2016 – 2020

Lapangan Usaha / Kategori	2016		2017		2018		2019		2020	
	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,9	33,5	35,2	33,4	36,4	33,9	36,7	34,4	37,9	35,4
Pertambangan dan Penggalian	2,8	2,6	2,7	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,5
Industri Pengolahan	5,0	5,3	5,2	5,5	5,1	5,5	5,1	5,5	5,2	5,7
Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Konstruksi	7,0	7,7	7,1	7,9	7,1	7,9	7,1	7,8	6,3	6,9
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,2	9,7	11,3	9,7	11,2	9,6	11,0	9,5	11,0	9,5
Transportasi dan Pergudangan	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7	1,5	1,6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Lapangan Usaha / Kategori	2016		2017		2018		2019		2020	
	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
Informasi dan Komunikasi	4,9	5,2	5,0	5,4	5,0	5,4	5,2	5,8	5,5	6,2
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5	3,4	3,4	3,3	3,6	3,6
Real Estate	3,5	3,4	3,4	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	3,5
Jasa Perusahaan	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,5	12,2	10,8	11,8	10,3	11,4	10,1	11,1	9,7	10,5
Jasa Pendidikan	8,7	9,6	9,0	9,8	9,0	9,6	9,0	9,5	8,6	9,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,4	1,5	1,4	1,5	1,4	1,5	1,3	1,4	1,3	1,5
Jasa lainnya	3,1	3,4	3,0	3,4	3,0	3,4	2,9	3,4	2,8	3,3
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Sumber : BPS Kabupaten Majene, 2021

Pada tahun 2020, jika dirinci menurut kategori lapangan usaha Nampak kategori yang menunjukkan pertumbuhan yang paling cepat yaitu Jasa Keuangan & Asuransi serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan masing-masing hingga 7,03 persen dan 3,21 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhan kategori lapangan usaha lainnya. Kategori yang menunjukkan kontraksi pertumbuhan yang paling tinggi yaitu Konstruksi dan Administrasi Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib masing-masing -11,88 persen dan -6,36 persen. Untuk kategori yang lainnya di tahun 2020 juga mengalami penurunan dan kontraksi pertumbuhan dari tahun sebelumnya.

Salah satu indikator lain dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah adalah PDRB Perkapita. PDRB Perkapita atau pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat secara makro. PDRB perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Dalam periode beberapa tahun terakhir ini, PDRB perkapita Kabupaten Majene selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. PDRB perkapita pada tahun 2016 sebesar 21,25 Juta Rupiah, meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 22,84 Juta Rupiah, pada tahun 2018 PDRB perkapita Kabupaten Majene berada pada angka 24,79 Juta Rupiah. Untuk tahun 2019 angka sementara berada pada kisaran 26,93 Juta Rupiah dan di tahun 2020 yang merupakan angka sangat sementara yaitu sebesar 28,61 Juta Rupiah.

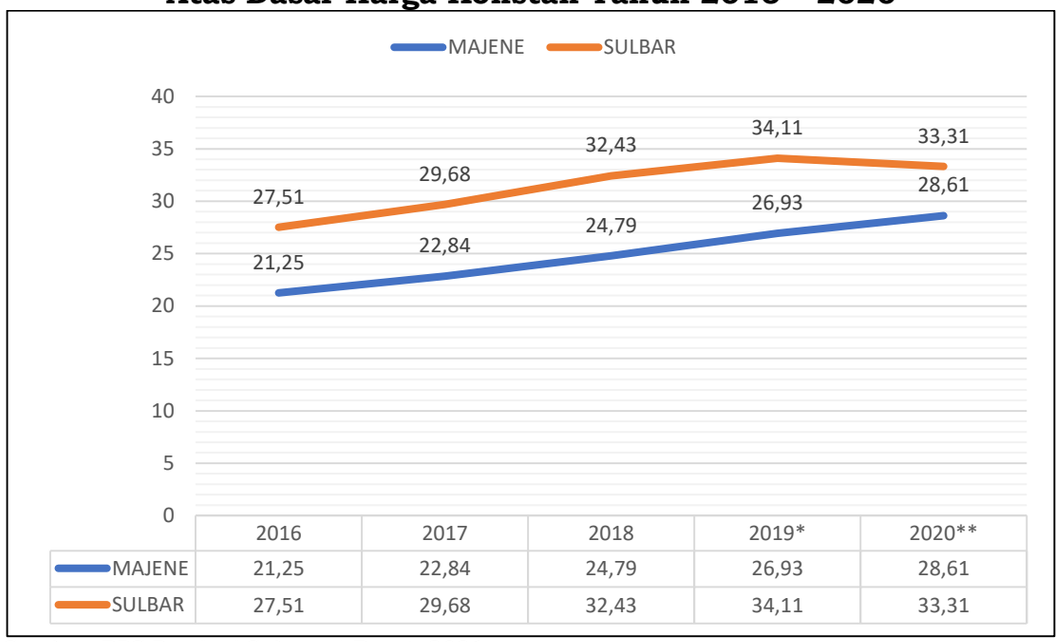
Tabel 2.31.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Majene Periode 2016 – 2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian Kehutanan & Perikanan	4,63	5,91	7,91	7,46	1,51
2	Pertambangan dan Penggalian	4,25	7,02	7,92	5,9	-5,39
3	Industri Pengolahan	4,34	9,82	6,83	5,91	1,66
4	Pengadaan Listrik & Gas	20,21	6,89	6,02	6,28	5,14
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	6,61	6,21	7,85	2,74	0,64
6	Konstruksi	7,53	9,04	6,05	4,53	-11,88
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4,68	5,68	5,35	5,28	-1,55
8	Transportasi & Pergudangan	0,67	2,48	5,2	4,09	-5,34
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	9,73	2,46	5,69	11,98	-6,04
10	Informasi & Komunikasi	10,53	10,76	6,81	13,09	5,36
11	Jasa Keuangan & Asuransi	18,12	2,49	2,82	4,04	7,03
12	Real Estate	5,04	5,18	5,72	5,87	2,79
13	Jasa Perusahaan	4,45	5,76	3,8	4,32	-4,94
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	5,66	2,9	2,68	2,78	-6,36
15	Jasa Pendidikan	7,55	8,12	4,44	4,75	-5,68
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	8,12	7,82	7,01	1,04	3,21
17	Jasa Lainnya	5,76	6,53	6,14	5,3	-3,41
Produk Domestik Regional Bruto		**6,02**	**6,29**	**6,06**	**6,01**	**-1,38**

Sumber : BPS Kabupaten Majene, 2021

Angka PDRB perkapita Kabupaten Majene masih berada dibawah jika dibandingkan dengan angka PDRB perkapita Propinsi Sulawesi Barat. Adapun perbandingan PDRB perkapita Majene dengan PDRB perkapita Sulawesi Barat, dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar 2.17.
PDRB Per Kapita Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 – 2020



	2016	2017	2018	2019*	2020**
MAJENE	21,25	22,84	24,79	26,93	28,61
SULBAR	27,51	29,68	32,43	34,11	33,31

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Proporsi Perbandingan PDRB Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 terlihat sebesar 10,56% dan mengalami peningkatan yang tidak cukup signifikan di tahun 2020 mencapai 10,73%. Sedangkan proporsi jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 12,74% dan mengalami penurunan di tahun 2020 yang hanya mencapai 12,29%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32.
Proporsi Perbandingan PDRB dan Jumlah Penduduk Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

Tahun	PDRB Majene (Milyar Rupiah)	PDRB Sulbar (Milyar Rupiah)	Proporsi	Penduduk Majene	Penduduk Sulbar	Proporsi
2016	3.485,08	32.987,55	10,56	166.397	1.306.502	12,74
2017	3.802,41	35.958,50	10,57	169.072	1.330.961	12,70
2018	4.195,41	39.617,97	10,59	171.272	1.355.550	12,63
2019	4.613,49	43.454,25	10,62	173.884	1.380.260	12,60
2020	4.973,30	46.360,39	10,73	174.407	1.419.229	12,29

Sumber : BPS Kab. Majene, Tahun 2021

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi

adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

Inflasi dihitung pada 82 kota pada 34 Provinsi se-Indonesia. Tingkat inflasi suatu daerah ditentukan berdasarkan kota terdekat yang dilakukan perhitungan oleh BPS. Untuk Kabupaten Majene maka nilai inflasi diambil berdasarkan Nilai Inflasi daerah terdekat yang dilakukan perhitungan inflasi oleh BPS yaitu Kabupaten Mamuju. Inflasi dihitung berdasarkan pemantauan harga eceran berbagai komoditas Barang dan jasa yang dilakukan oleh BPS dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/ jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

1. Perkembangan Inflasi Bulanan (*Month on Month*)

Inflasi bulanan adalah perbandingan IHK bulan n dibanding bulan n-1. Pada Desember 2020, terjadi inflasi sebesar 0,30 persen. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,44 persen; pakaian dan alas kaki 0,30 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,53 persen; kesehatan 1,63 persen; transportasi 0,49 persen; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,15 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,09 persen.

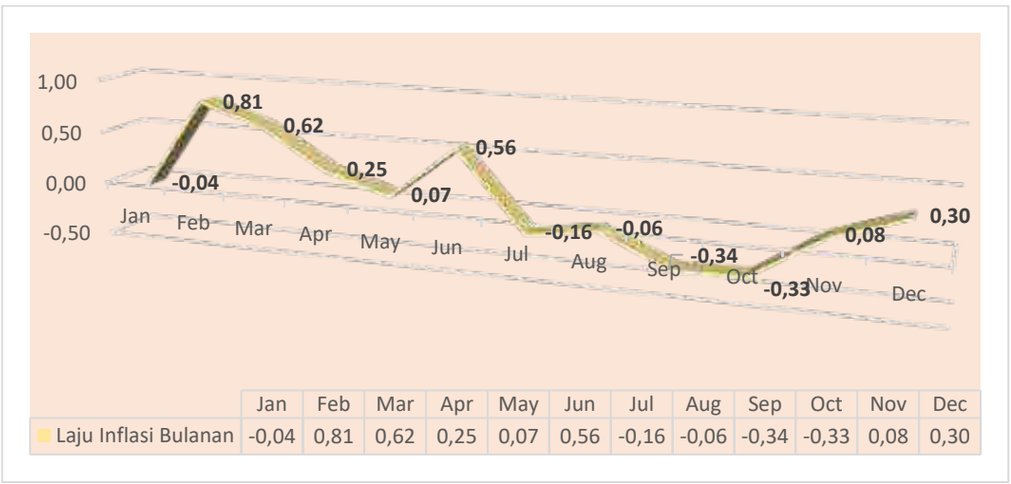
Inflasi tertinggi pada tahun 2020 tercatat pada bulan februari yaitu sebesar 0,81%. Inflasi pada bulan tersebut sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga kelompok pengeluaran Seperti, kelompok makanan, minuman dan tembakau menyumbang inflasi sebesar 1,88 persen. Kelompok pakaian dan alas kaki menyumbang inflasi 0,26 persen. Sedangkan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga setor inflasi sebesar 0,38 persen. Selanjutnya, pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya menyumbang

inflasi sebesar 1,80 persen. Kelompok penyedia makanan, minuman (restoran) 2,35 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 1,43 persen.

Pada bulan Januari dan bulan Juli – Oktober terjadi deflasi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar; pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; transportasi; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Untuk lebih jelasnya tingkat inflasi pada bulan Januari s/d Desember tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.18.
Tingkat Inflasi Regional Kab. Majene Tahun 2020



	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Laju Inflasi Bulanan	-0,04	0,81	0,62	0,25	0,07	0,56	-0,16	-0,06	-0,34	-0,33	0,08	0,30

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, kelompok bahan makanan memiliki pola yang sangat fluktuatif terutama ikan segar. Hal ini disebabkan komoditas-komoditas ini sangat tergantung pada musim sehingga sulit untuk mengendalikannya, berbeda dengan beberapa kelompok pengeluaran lainnya yang cenderung tidak mengalami perubahan harga atau stabil seperti kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 inflasi bulanan pada tahun 2019 nilainya sebagian besar dibawah tahun 2018, ini menunjukan sudah mulai berjalan usaha pemerintah

daerah untuk mengendalikan laju inflasi pada tahun 2019. Hanya pada bulan Mei, Agustus, Oktober, November dan Desember yang nilai inflasi tahun 2019 lebih besar dibandingkan nilai inflasi yang terjadi di tahun 2018. Rata-rata Inflasi Regional Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2010-2019 adalah 3,09%. Tertinggi pada tahun 2013 yaitu 5,91 % dan terendah tahun 2019 yakni 1,43%, sebagaimana pada grafik berikut:

Gambar 2.19.
Persentase Tingkat Inflasi Tahun 2010 – 2020 Di Regional Sulawesi Barat Menurut Kelompok Pengeluaran



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2020

2. Perkembangan Inflasi Tahun Kalender

Inflasi tahun kalender adalah perbandingan IHK bulan n tahun y dibanding bulan Desember tahun y-1. Laju inflasi secara umum pada tahun 2020 adalah 1,78 persen. Apabila ditinjau dari kelompok pengeluaran, kelompok pengeluaran Rekreasi, dan Olahraga merupakan kelompok pengeluaran dengan laju inflasi yang tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 7,81 persen.Sementara itu, laju inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Personal Care and Other Services mencapai 5,47 persen. Pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau, laju inflasi pada tahun 2020 mencapai 4,07 persen. Dari seluruh kelompok pengeluaran, Transportasi; Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan; Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dan Kesehatan merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi pada tahun 2020. Tercatat, pada tahun 2020 laju deflasi paling tinggi dialami oleh

kelompok pengeluaran Transportasi dengan laju -4,52 persen. Sedangkan untuk kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan; Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dan Kesehatan laju deflasi masing-masing pada tahun 2020 tercatat sebesar -0,58 persen, -0,17 persen, dan -0,57 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33.
Tingkat Inflasi Umum dan Inflasi
Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2020

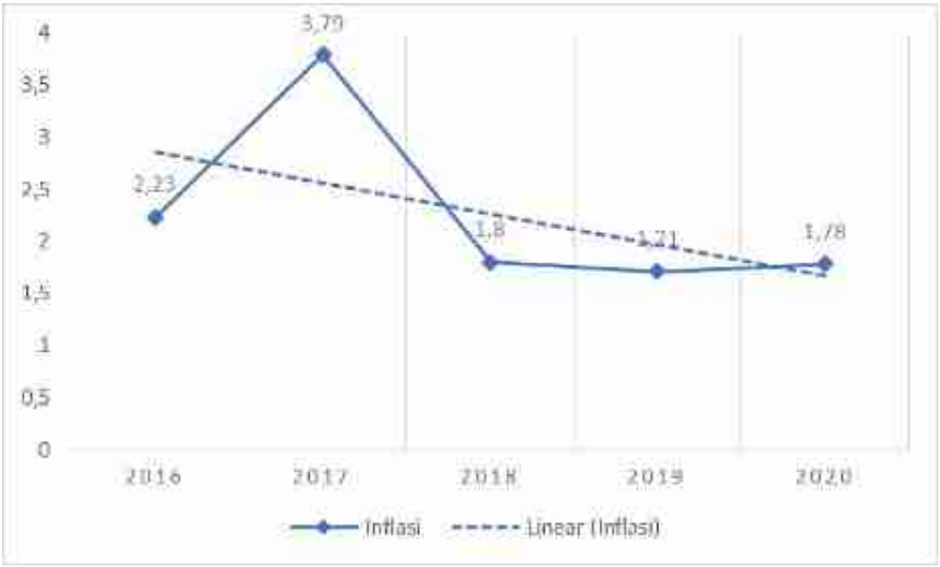
No.	Rincian	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2020
	Inflasi Umum	**1,78**
	Menurut Kelompok Pengeluaran	
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	4.07
2	Pakaian dan Alas Kaki	2.84
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0.17
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2.49
5	Kesehatan	-0.57
6	Transportasi	-4.52
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.58
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	7.81
9	Pendidikan	0.65
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2.74
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5.47

Sumber data BPS Sulbar Tahun 2021

3. Perkembangan Inflasi Tahun ke Tahun (Year on Year)

Inflasi Tahun ke Tahun (YoY) adalah perbandingan IHK bulan n tahun y dibanding bulan n tahun y-1. Selama kurun waktu tahun 2013-2020 inflasi tertinggi tercatat di Tahun 2014 yakni sebesar 7,88 persen dan pada tahun 2015 – 2016 laju inflasi dapat ditekan, namun kembali meningkat pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya tingkat inflasi dari tahun 2013 - 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.20.
Tingkat Inflasi Regional Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2021

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan. Sasaran pembangunan manusia adalah tercapainya penguasaan atas sumber daya guna memperoleh peningkatan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta pendapatan untuk mencapai kehidupan yang layak. Namun kondisi ideal dalam pembangunan manusia bukan hanya sampai pada pencapaian target tersebut, tetapi sampai pada pemanfaatan dari capaian target telah dicapai. Dengan terbuka luasnya akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan taraf hidup masyarakat, diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan mental yang tercermin dalam pola hidup, pola sikap dan tingkat kesejahteraan. Keberhasilan pembangunan manusia tersebut dapat diukur dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat;

pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Pembangunan Kesejahteraan Sosial berkorelasi positif dan berbanding lurus dengan IPM. Dengan demikian apabila tingkat IPM semakin tinggi maka bisa dipastikan pembangunan ke arah kesejahteraan semakin dekat dan apabila kesejahteraan sosial tercapai maka IPM suatu daerah akan tinggi.

Di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020, Kabupaten Majene dalam 5 (lima) tahun terakhir berada di peringkat ke 3 (tiga) nilai IPM yaitu sebesar 66,91 dan lebih besar dari nilai IPM Provinsi Sulawesi Barat yang hanya mencapai 66,11 atau lebih besar 0,8. Nilai IPM terbesar di Sulawesi Barat berada di Kabupaten Mamuju dengan nilai IPM sebesar 68.15 atau dengan selisih 1.24 dari IPM Kab. Majene dan kemudian disusul Kabupaten Pasangkayu dengan nilai IPM 67,79 atau dengan selisih 0.88 dari nilai IPM Kabupaten Majene. Sedangkan nilai IPM terendah di Provinsi Barat berada di Kabupaten Polewali Mandar dengan nilai IPM sebesar 63.84 atau lebih kecil 3,07 nilai IPM dari Kabupaten Majene.

Tabel 2.34.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten se-Sulawesi Barat
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Uraian	Majene	Polman	Mamasa	Mamuju	Pasang kayu	Mamuju Tengah	SulBar
2016	IPM	**64,80**	60,87	65,17	65,09	65,17	62,89	**63,60**
	Peringkat	**3**	6	4	1	2	5	
2017	IPM	**65,40**	62,35	63,92	66,32	65,67	63,64	**64,30**
	Peringkat	**3**	6	4	1	2	5	
2018	IPM	**66,01**	63,14	64,66	67,11	66,60	64,43	**65,10**
	Peringkat	**3**	6	4	1	2	5	
2019	IPM	**66,59**	63,74	65,32	67,72	67,27	65,10	**65,73**
	Peringkat	**3**	6	4	1	2	5	
2020	IPM	**66,91**	63,84	66,02	68,15	67,79	65,71	**66,11**
	Peringkat	**3**	6	4	1	2	5	

Sumber : BPS Kabupaten Majene Tahun 2021

Dalam kurun waktu Tahun 2016–2020 menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Majene mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data Tahun 2020, IPM Kabupaten Majene telah mencapai 66,91 atau meningkat sebesar 0,32 poin dari Tahun 2019. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Majene untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia yang diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk yang tercermin dalam bentuk kontribusi komponen utama IPM yang meliputi: Indikator Kesehatan dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH); Indikator pengetahuan penduduk diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah, serta Indikator Ekonomi melalui indikator Pengeluaran per Kapita. Capaian IPM Kabupaten Majene pada tahun 2016-2020 yang senantiasa menempatkan Kabupaten Majene sebagai Peringkat IPM tertinggi ketiga di wilayah Sulawesi Barat. Perkembangan pencapaian IPM Kabupaten Majene serta ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35.
Perkembangan IPM dan Indikator Pendukung IPM Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020

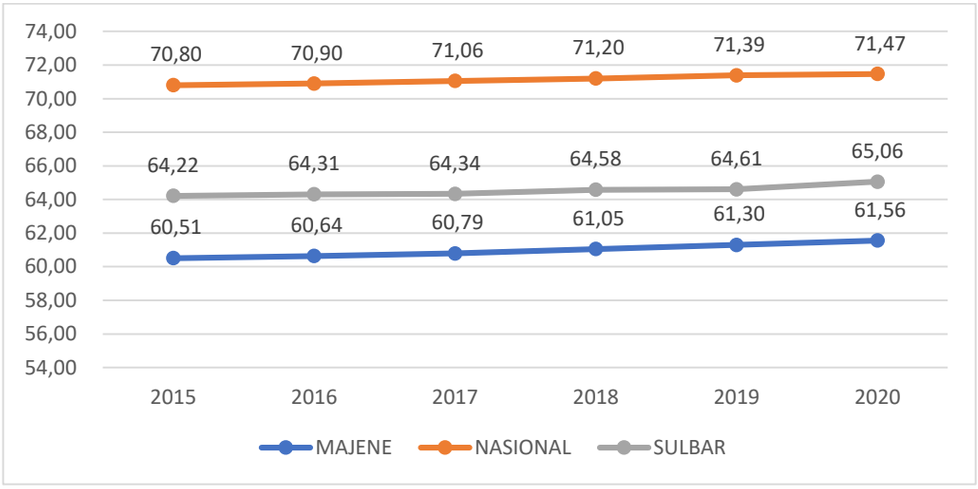
Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	Harapan lama Sekolah (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)
2016	64,80	60,64	13,54	7,81	9.441
2017	65,40	60,79	13,57	8,14	9.559
2018	66,01	61,05	13,58	8,25	9.904
2019	66,59	61,30	13,60	8,25	10.063
2020	66,91	61,56	13,61	8,65	10.056

Sumber : BPS Kabupaten Majene Tahun 2021

1. Angka Harapan Hidup saat Lahir

Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk. Angka Harapan Hidup saat lahir merupakan gambaran pembangunan di bidang kesehatan. Adapun perbandingan usia harapan hidup Kab. Majene, Sulawesi Barat dan Nasional adalah sebagai berikut:

Gambar 2.21.
Usia Harapan Hidup Kab. Majene, Sulawesi Barat dan Nasional
Tahun 2015 – 2020



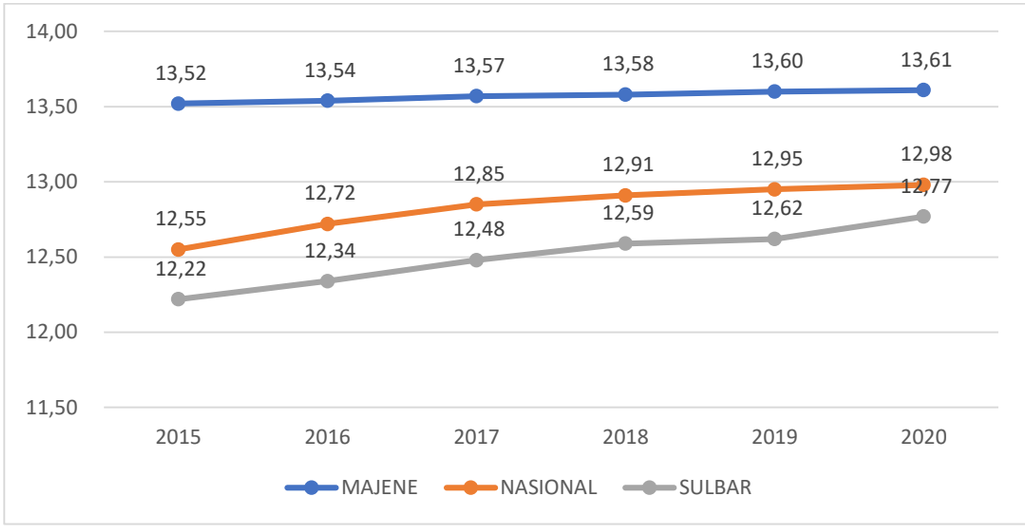
Sumber : BPS Provinsi Sulbar, Tahun 2021

Berdasarkan gambar diatas, Capaian pembangunan terlihat dari meningkatnya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Majene dari sebesar 60,51 tahun pada tahun 2015 meningkat menjadi 61,56 tahun pada tahun 2020. Nilai ini masih berada di bawah angka usia harapan hidup Sulawesi Barat dan Nasional. Usia harapan hidup Sulawesi Barat pada tahun 2020 adalah 65,06 tahun, sementara usia harapan hidup nasional pada tahun 2020 adalah 71,47 tahun.

2. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefnisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Adapun perbandingan Harapan Lama Sekolah Kab. Majene, Sulawesi Barat dan Nasional dalam periode 2015 – 2020 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.22.
Harapan Lama Sekolah Kab. Majene, Sulawesi Barat dan Nasional
Tahun 2015 – 2020



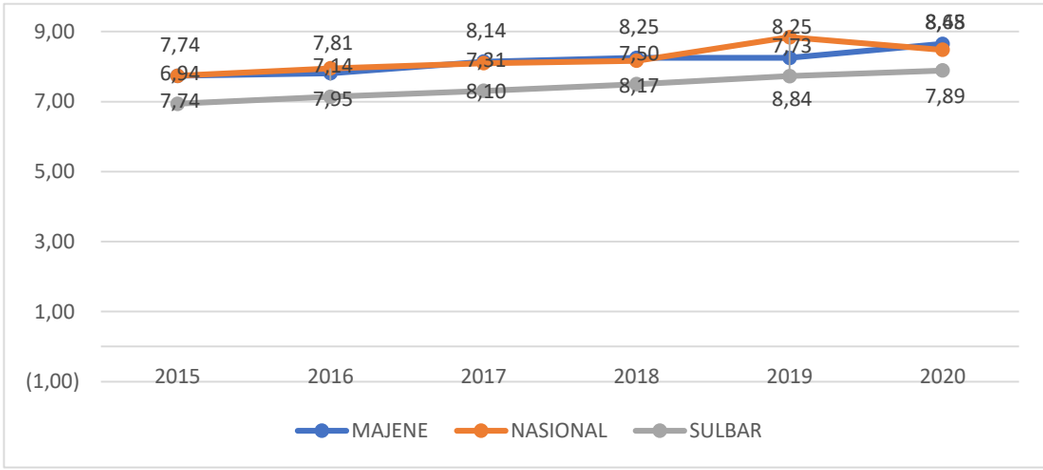
Sumber : BPS Provinsi Sulbar, Tahun 2021

Harapan Lama Sekolah merupakan gambaran pembangunan di bidang pendidikan ini dilihat dari meningkatnya Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Majene dari sebesar 13,52 tahun pada tahun 2015 meningkat menjadi 13,61 tahun pada tahun 2020. Nilai ini berada di atas angka Harapan Lama Sekolah Sulawesi Barat dan Nasional. Harapan Lama Sekolah Sulawesi Barat pada tahun 2020 adalah 12,77 tahun, sementara Harapan Lama Sekolah nasional pada tahun 2010 adalah 12,98 tahun.

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Majene penduduk usia 15 tahun keatas yang bersekolah (dalam tahun) pada tahun 2015 sebesar 7,74 tahun, meningkat pada tahun 2020 menjadi 8,65 tahun. Angka ini berada di atas angka rata-rata lama sekolah Sulawesi Barat dan angka rata-rata Nasional. Rata-rata lama sekolah Sulawesi Barat pada tahun 2020 adalah 7,89 Tahun, adapun rata-rata lama sekolah Nasional pada tahun 2020 adalah 8,48 Tahun atau lebih rendah dari angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Majene. Adapun perbandingan rata-rata lama sekolah Kab. Majene, Sulawesi Barat dan Nasional dalam periode 2015 – 2020 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.23.
Rata-rata Lama Sekolah Kab. Majene, Sulawesi Barat dan Nasional
Tahun 2015 – 2020



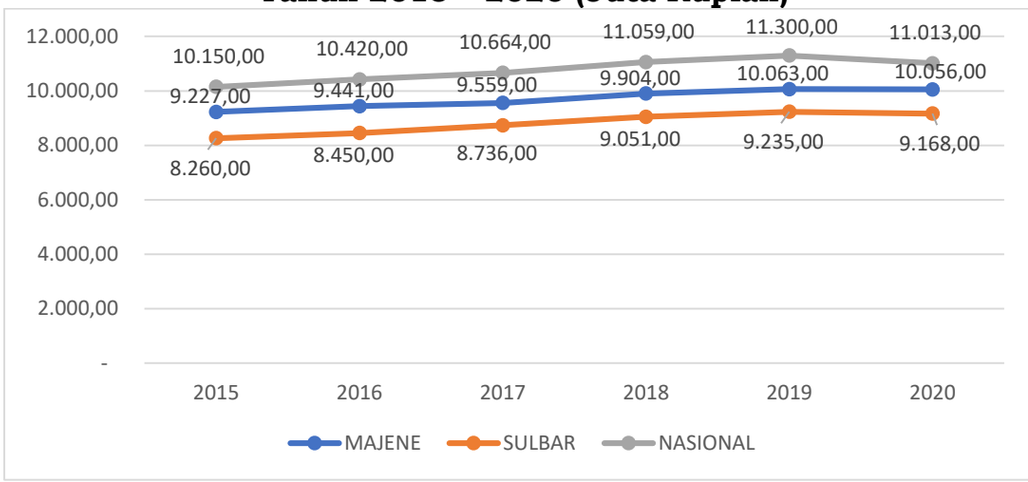
Sumber : BPS Provinsi Sulbar, Tahun 2021

Jika dikonversikan pada tingkat kelulusan, maka rata-rata tingkat pendidikan Kabupaten Majene tidak tamat SLTP atau masih kelas 3 (tiga) SLTP, oleh karena itu untuk mencapai RLS maksimal 9 tahun (setara Wajar 9 tahun) masih memerlukan pembenahan pada sistem pendidikan yang diselenggarakan pemerintah.

4. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per Kapita Kabupaten Majene mengalami peningkatan dari Rp. 9.227 Juta/orang/tahun pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 10.056 Juta/orang/tahun pada tahun 2020. Nilai ini berada diatas daya beli Sulawesi Barat namun masih berada dibawah pengeluaran per kapita Nasional. Pengeluaran per kapita Sulawesi Barat pada tahun 2020 adalah Rp. 9.168 Juta/orang/tahun, dan pengeluaran per kapita Nasional pada tahun 2020 mencapai Rp. 11.013 Juta/orang/tahun. Adapun perbandingan pengeluaran per Kapita Kab. Majene, Sulawesi Barat dan Nasional dalam periode 2015 – 2020 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.24.
Pengeluaran per Kapita Kab. Majene, Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2015 – 2020 (Juta Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Sulbar, Tahun 2021

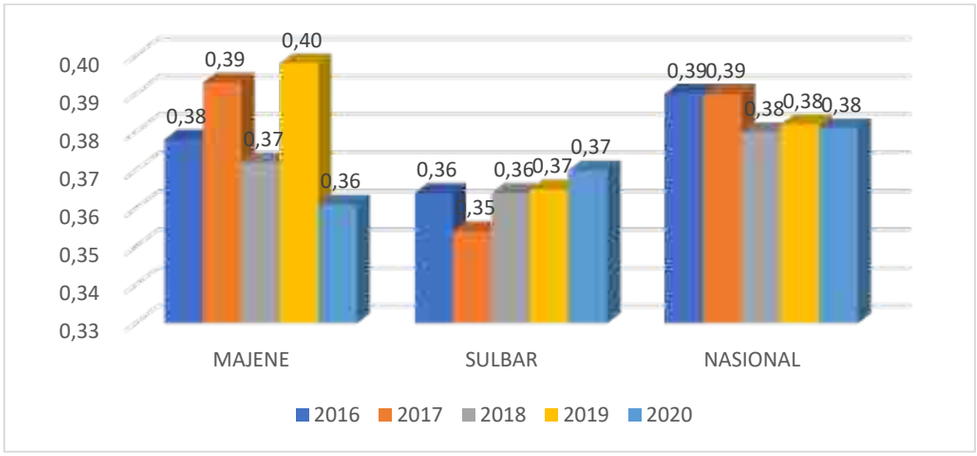
5. Indeks Gini /Koefisien Gini

Indeks gini/koefisien gini merupakan salah satu indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan atau dengan kata lain indikator pengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Angka koefisien gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Angka koefisien gini yang semakin mendekati nol berarti dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar.

Koefisien gini Kabupaten Majene pada pada periode Maret tahun 2016 mencapai 0,38% dan meningkat pada tahun 2017 periode Maret sebesar 0,02% atau 0.39%. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Majene dalam kurung waktu 2016-2017 masih dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu antara 0,38%-0,39%. Koefisien gini Kabupaten Majene masih lebih besar dibandingkan dengan koefisien gini Provinsi Sulawesi Barat dan lebih kecil dari tingkat Nasional di tahun 2018, pada tahun 2019 Koefisien gini Kabupaten Majene lebih besar dibandingkan dengan koefisien gini Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional. Sedangkan tahun

2020 Koefisien gini Kabupaten Majene lebih kecil dibandingkan dengan koefisien gini Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Artinya, kondisi distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Majene masih dapat dikatakan lebih baik dibanding rata-rata di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun perbandingan Indeks Gini/Koefisien Gini Kab. Majene, Sulawesi Barat dan Nasional dalam periode 2016 – 2020 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.25.
Perbandingan Indeks Gini/Koefisien Gini antara Kab. Majene, Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS Provinsi Sulbar, Tahun 2021
** Tahun 2017-2019 Data Indeks Gini/Koefisien Gini Kab. Majene Belum Dirilis.*

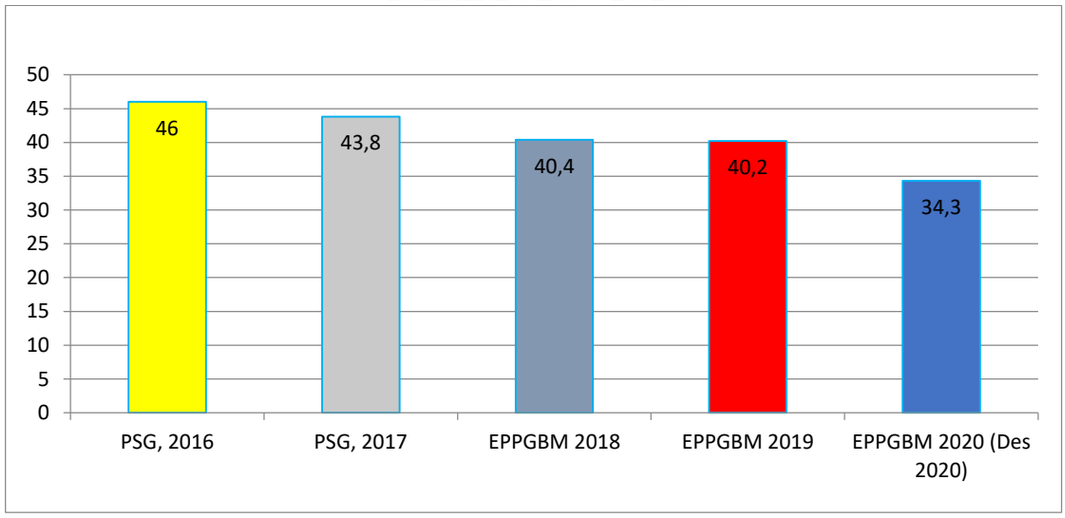
6. Prevelensi Balita Stunting

Selain permasalahan diatas, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah *stunting* (kerdil) dimana kondisi balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.

Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Majene menunjukkan perkembangan yang makin baik dari tahun 2016 sebesar 46% (data PSG) menjadi 43,8% pada tahun 2017 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 40,4% sedangkan di tahun 2019 dan 2020 angka prevelensi stunting kembali menurun dengan masing-masing berada di angka 40,2% dan 34,3%. Data perkembangan prevelensi stunting secara keseluruhan dari tahun 2016-2020 yaitu terjadi penurunan sebesar 11,7%. Hal ini tidak terlepas dari upaya

pencegahan dan penurunan stunting yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Majene berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan guna mengurangi jumlah balita stunting di Kabupaten Majene, seperti dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.26.
Prevelensi Stunting Kabupaten Majene
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Perencanaan Daerah Kab. Majene, Tahun 2021

2.2.2.2. Perkembangan Perspektif Kemiskinan Kabupaten Majene

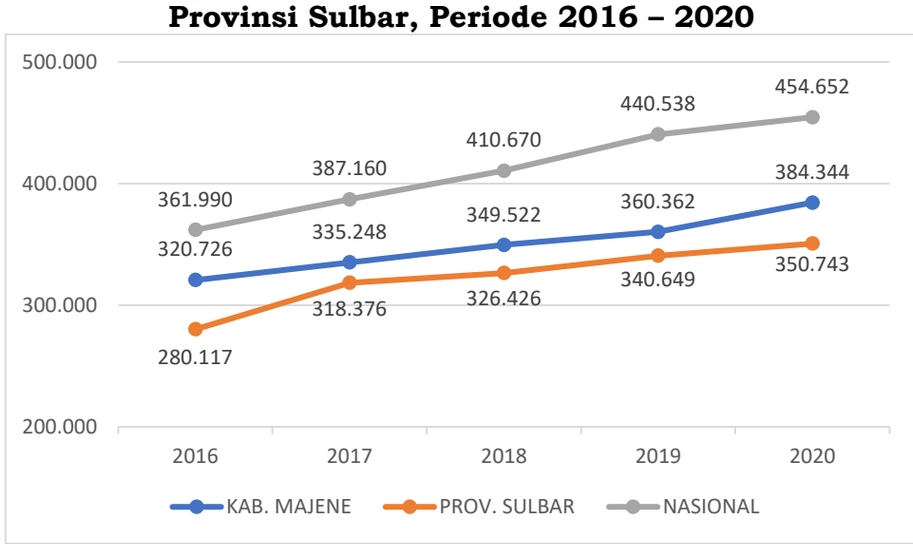
Dinamika kemiskinan dari waktu ke waktu dapat dilihat dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan tren tingkat kemiskinan selama kurun waktu 2015 – 2020. Paparan kemiskinan ini mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, serta tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak-mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut Garis Kemiskinan (makanan & bukan makanan). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kkalori per kapita per hari). Sedangkan Garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non makanan lainnya.

1. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Majene

Garis Kemiskinan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan dan 51 komoditi non-makanan (47 komoditi di desa) yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan kilo kalori per kapita per hari. Dengan kata lain, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai pengeluaran minimum yang dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimalnya. Besaran garis kemiskinan menjadi tolak ukur pemerintah dalam menentukan apakah seseorang termasuk kategori miskin atau tidak. Untuk lebih jelasnya terkait Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Majene terhadap Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional dapat dilihat pada gambar grafik berikut :

Gambar 2.27.
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Majene dan Provinsi Sulbar, Periode 2016 – 2020



Sumber: BPS Prov. Sulawesi Barat Tahun 2021

Dari grafik di bawah dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan garis kemiskinan di Kab. Majene meningkat setiap tahunnya seiring dengan Prov. Sulbar. Peningkatan ini tidak lepas dari inflasi yang terjadi rutin tiap tahunnya. Adapun besaran garis kemiskinan Kab. Majene ditahun 2020 sebesar 384.344 rupiah/kapita/bulan masih berada di atas garis kemiskinan Prov. Sulawesi Barat sebesar 350.743 rupiah/kapita/bulan (meski masih berada di bawah garis kemiskinan nasional yang mencapai 454.652 rupiah/kapita/bulan) dapat disimpulkan bahwa harga kebutuhan pembentuk garis kemiskinan di

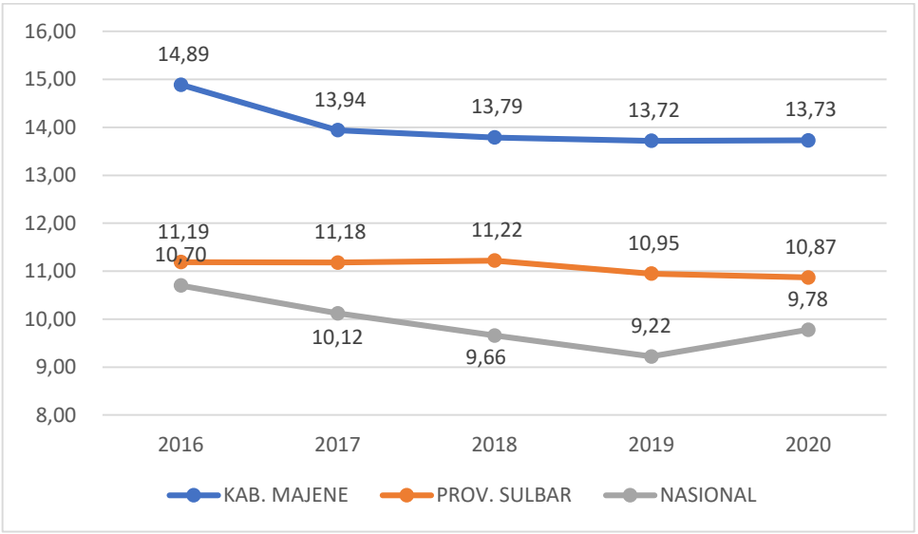
Kab. Majene masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi dan memerlukan langkah strategis pemerintah dan swasta dalam menjaga kestabilan harga di tengah pergerakan inflasi rutin tahunan.

2. Persentase Penduduk Miskin

Selama periode 2016 – 2020, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kab. Majene mengalami fluktuatif, kondisi tersebut setiap tahunnya seiring dengan penurunan angka kemiskinan skala Prov. Sulbar dan Nasional. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene mengalami penurunan selama empat tahun terakhir (2016-2019) hingga mencapai angka 13,72 persen pada tahun 2019 dan di tahun 2020 mengalami kenaikan 13,73 persen. Artinya, pada tahun 2019 terdapat 13-14 dari 100 penduduk Majene yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, persentase penduduk miskin tertinggi adalah tahun 2016 (14,89 persen), sedangkan persentase penduduk miskin terkecil berada pada tahun 2019 yaitu 13,72 persen.

Persentase penduduk miskin menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Dari grafik di bawah terlihat bahwa Kab. Majene telah menunjukkan kinerja yang baik, dimana Kab. Majene dalam periode lima tahun mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,16%, lebih baik dibandingkan dengan kinerja pengentasan kemiskinan pada skala Provinsi Sulawesi Barat yang mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,32% dan lebih dibawah dari kinerja pengentasan kemiskinan secara nasional yang hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,92%. Meski demikian, angka kemiskinan di Kab. Majene masih jauh di atas angka kemiskinan skala provinsi, dengan selisih sebesar 2,86%. Hal tersebut menjadi catatan pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang berprinsip keberpihakan dengan harapan angka kemiskinan di Kab. Majene dapat terus ditekan hingga paling tidak berada di bawah angka kemiskinan rata-rata di Provinsi Sulawesi Barat maupun Nasional.

Gambar 2.28.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Majene
Periode 2016 – 2020



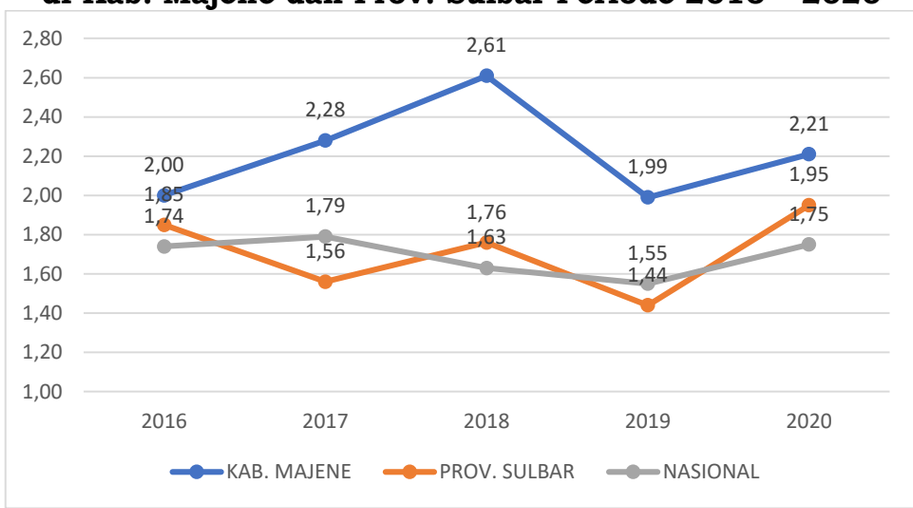
Sumber: BPS Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan kabupaten Majene

Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Persoalan kemiskinan bukan hanya mengacu pada jumlah dan persentase penduduk miskin. Tingkat kedalaman dan Tingkat keparahan kemiskinan merupakan dimensi lain yang ikut menjadi parameter kemiskinan suatu wilayah. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman (P1) dan keparahan dari kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kabupaten Majene dibandingakn dengan kabupaten lain dalam provinsi dan perbandingannya dengan capaian provinsi dan nasional.

Gambar 2.29.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan
di Kab. Majene dan Prov. Sulbar Periode 2016 – 2020



Sumber: BPS Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020

Dari grafik di atas terlihat bahwa selama periode 2016 – 2020 terjadi fluktuasi pada indeks kedalaman kemiskinan, dimana terjadi peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan perlambatan ekonomi se-Sulbar yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat dalam memperoleh komoditi makanan dan non makanan.

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Majene tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,22 dibanding tahun sebelumnya, ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Majene semakin jauh di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.

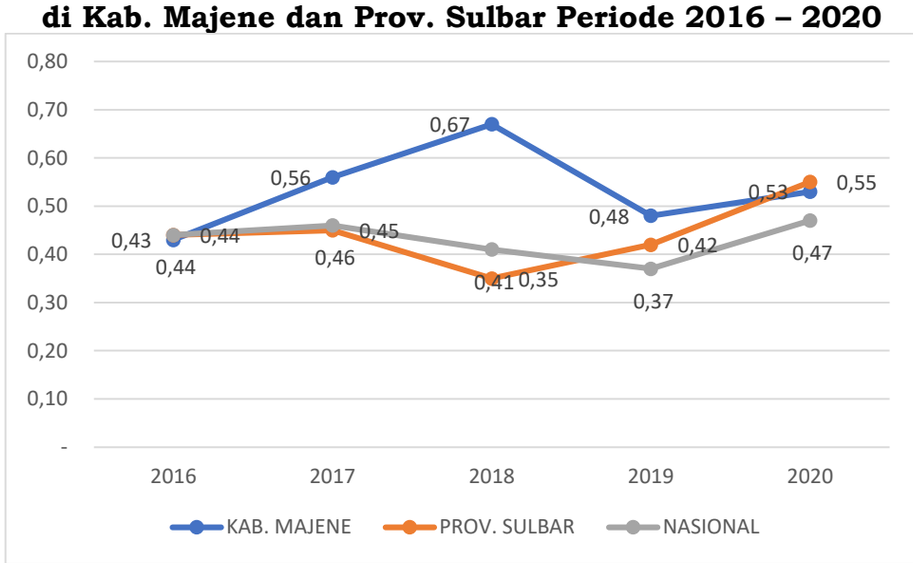
Secara nasional, indeks kedalaman kemiskinan stabil di angka 1,75 poin sementara di Kab. Majene meningkat sebesar 0,22 poin, lebih tinggi dibanding kenaikan skala provinsi yang juga mengalami kenaikan sebesar 0,51 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga komoditi di Kab. Majene masih sangat rentan terhadap instabilitas perekonomian. Oleh sebab itu, kebijakan pemerataan pembangunan menjadi langkah strategis yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga agar kesenjangan antar warga miskin tidak semakin melebar

4. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Majene

Indeks keparahan kemiskinan (P2) atau Poverty Severity Index memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) selama tahun 2018 – 2019 cenderung menurun. Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2018 naik 0,19 poin dibanding tahun 2017, menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi. Begitu juga dengan tahun 2020, dimana indeks kedalaman kemiskinan naik 0,05 dibanding tahun sebelumnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.30.
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kab. Majene dan Prov. Sulbar Periode 2016 – 2020



Sumber: BPS Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020

Dari grafik di atas terlihat bahwa selama periode 2016 – 2020 terjadi fluktuasi pada indeks keparahan kemiskinan, khususnya pada periode 2016 – 2018 dimana terjadi peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan perlambatan ekonomi se-Sulbar yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat dalam memperoleh komoditi makanan dan non makanan. Secara nasional, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikan di angka 0,47 poin sementara skala Provinsi Sulawesi Barat juga mengalami kenaikan seiring kenaikan ditingkat nasional sebesar 0,55 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Majene menghadapi kondisi yang lebih pelik dari rata-rata penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat. Oleh sebab itu, kebijakan bantuan dan jaminan sosial tepat sasaran menjadi langkah strategis yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga agar warga miskin di Kab. Majene tidak semakin terpuruk dalam kemiskinan yang akan semakin mempersulit perwujudan komitmen Pemkab. Majene dalam pengentasan kemiskinan.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Majene ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negative budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Majene sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan Bahasa Mandar dilingkungan pendidikan dan instansi pemerintah. Kabupaten Majene merupakan bagian dari peradaban Mandar. Oleh karena itu, maka pembangunan kebudayaan dan kepemudaan difokuskan pada pengembangan budaya mandar. Pembangunan kebudayaan dan kepemudaan tentu tidak terlepas dari grup seni dan klub olah raga.

Berdasarkan tabel dibawah, Perkembangan Olah Raga, Seni & Budaya Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020 tidak mengalami perubahan dimana jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk tetap berada di angka

0,89, berikutnya jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk masi tetap berada di angka 0,06. Untuk jumlah klub olahrag per 10.000 penduduk berada di angka 2,66 dan terakhir jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk berada di angka 0,44. Penyebab tidak adanya peningkatan perkembangan olahraga, seni dan budaya tersebut disebabkan karna hingga tahun 2020 tidak ada suatu pembangunan yang cukup signifikan berupa gedung olahraga maupun gedung kesenian. Tidak adanya capaian pembangunan tersebut juga diikuti dengan kurangnya grup kesenian dan klub olahraga hingga tahun 2020. Adapun Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Di Kab. Majene Tahun 2016-2020, sebagai berikut :

Tabel 2.36.
Perkembangan Olah Raga, Seni & Budaya Kabupaten Majene
Tahun 2016 – 2020

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	2.66	2,66	2,66	2,66	2,66
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Sumber : Pengolahan Data, Tahun 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pemerintahan Kabupaten Majene selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai berikut;

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Secara umum, dari jenjang PAUD sampai SMP/MTs sederajat. Angka Partisipasi Kasar di Kab. Majene mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020 walaupun tidak mengalami pergesaran angka yang cukup besar. Untuk PAUD dari angka 83,16 di tahun 2016 menjadi 58,61 di tahun 2020. Jenjang SD/MI dari 109,36 di tahun 2016 menjadi 103,91 di tahun 2020. Pada jenjang SMP/MTS dari 77,54 ditahun 2016 menjadi 84,25 di tahun 2020. Penurunan pada APK PAUD pada dasarnya disebabkan oleh pemutakhiran data yang menyertakan data anak yang sebelumnya tidak terdata pada KK terakhir keluarganya. Untuk lebih jelas dapat dlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37.
Angka Partisipasi Kasar PAUD – SMP Sederajat Kabupaten Majene
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PAUD/TK	83,16	81,62	50,37	44,13	58,61
2	SD/MI	109,36	101,08	102,91	113,45	103,91
3	SMP/MTs	77,54	104,41	84,16	92,94	84,25

Sumber: BPS Provinsi Sulbar, Tahun 2021
*Keterangan : * Data Belum Tersedia*

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Secara umum, dari jenjang PAUD sampai SMP/MTs Angka Partisipasi Murni di Kab. Majene mengalami fluktuasi Secara umum, dari jenjang PAUD sampai SMP/MTs sederajat Angka Partisipasi Kasar di Kab. Majene mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020 walaupun tidak mengalami pergesaran angka yang cukup besar. Untuk jenjang SD/MI dari 99,61 di tahun 2016 menjadi 96,86 di tahun 2020. Pada jenjang SMP/MTS dari 71,10 ditahun 2016 menjadi 71,81 di tahun 2020. Untuk lebih jelasnya Angka Partisipasi Murni SD s/d SMP sederajat di Kab. Majene tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.38.
Angka Partisipasi Murni PAUD – SMP Sederajat Kabupaten Majene
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PAUD/TK	*	*	*	*	*
2	SD/MI	96,16	91,44	96,43	97,00	96,86
3	SMP/MTs	71,10	62,60	71,21	71,00	71,81

Sumber: BPS Provinsi Sulbar, Tahun 2021
*Keterangan : * Data belum tersedia*

3. Angka Partisipasi Sekolah

Secara umum, dari jenjang SD sampai SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah di Kab. Majene juga masih mengalami fluktuasi. Untuk jenjang SD dari 96,16 di tahun 2016 naik menjadi 96,55 di tahun 2017 dan turun menjadi 96,43 di tahun 2018. Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 87,13 lalu kembali mengalami peningkatan menjadi 96,86 pada tahun 2020. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2016 nilai APS sebesar 90,26 dan mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi 91,63 dan tahun 2018 kembali mengalami kenaikan menjadi 93,14. Pada tahun 2019 kembali turun diangka 60,42 dan diakhir tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 92,72. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.39.
Angka Partisipasi Sekolah PAUD – SMP Kabupaten Majene
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PAUD	*	*	*	*	*
2	SD/MI	96,16	96,55	96,43	87,13	96,86
3	SMP/MTs	90,26	91,63	93,14	60,42	92,72

Sumber Data : Indikator Strategis Statistik Sosial BPS Kab. Majene, 2021
*Keterangan : * Data belum tersedia*

4. Fasilitas Pendidikan PAUD-SMP Sederajat

Secara umum, Fasilitas Pendidikan di Kab. Majene mengalami peningkatan di beberapa jenis fasilitas pendidikan. Jenjang PAUD pada tahun 2016-2020 jumlah PAUD sebanyak 187 unit. Jenjang TK pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan sebesar 6 unit dan RA dibawah

naungan Kementerian Agama sebanyak 19 unit. Untuk jenjang SD pada tahun 2016-2020 sebanyak 171 unit dan mengalami penambahan sebanyak 1 unit dari tahun 2018-2019 dan ditahun 2018 mengalami pengurangan sebanyak 8 unit SD sedangkan MI di tahun 2016-2020 sebanyak 20 unit dan mengalami penambahan sebanyak 1 unit hingga tahun 2019. Jenis fasilitas pendidikan berupa SMP di tahun 2016 sebanyak 36 unit dan mengalami penambahan sebanyak 1 unit hingga tahun 2020 menjadi 37 unit, sedangkan MTs di tahun 2016-2018 sebanyak 23 unit dan mengalami penambahan sebanyak 1 unit hingga tahun 2020 atau sebanyak 24 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.40.
Jumlah Fasilitas Pendidikan PAUD-SMP di Kabupaten Majene
Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Fasilitas Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PAUD	187	187	187	187	187
2	TK/RA	116	129	120	126/19	126/19
3	SD/MI	177/19	178/19	170/19	171/20	171/20
4	SMP/MTs	36/23	37/23	37/23	37/24	37/24

Sumber Data : BPS Kab. Majene Dalam Angka Tahun 2021 dan Data Dinas Pendidikan & Pemuda Olahraga 2021

5. Angka Putus Sekolah (APS)

Secara umum, Angka Putus Sekolah di Kab. Majene mengalami fluktuasi. Jenjang SD/MI tahun 2016 sebesar 1,94% dan mengalami penurunan kembali menjadi 0,28% di tahun 2017 dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan dan berada pada angka 0,18% sehingga pada tahun 2019 dan 2020 kembali meningkat menjadi 0,33%. Untuk jenjang SMP/MTs dari 0,97% di tahun 2016 menurun di tahun 2017 sebesar 0,16% dan tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 0,50%. Dan pada tahun 2019 dan 2020 turun menjadi 0,22%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI – SMP/MTs
Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	1,94	0,28	0,18	0,15	0,33
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,97	0,16	0,50	0,66	0,22

Sumber Data : Data Dinas Pendidikan & Pemuda Olahraga 2021 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Majene, 2021

6. Angka Kelulusan Jenjang SD-SMP Sederajat

Secara umum, Angka kelulusan di Kab. Majene mengalami tidak mengalami banyak perubahan dari tahun 2016-2020. Terutama pada jenjang SD/MI dari tahun 2016-2020 stabil pada angka 100%. Untuk jenjang SMP dari 98,80% di tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2017-2018 dengan tingkat kelulusan stabil atau berada diangka 100%. Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 94,48%, tetapi pada tahun 2020 kembali berada di angka 100%. Untuk lebih jelasnya angka kelulusan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42.
Angka Kelulusan Jenjang SD – SMA Kabupaten Majene
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98.80	100	100	94,48	100

Sumber : Dinas Pendidikan & Pemuda Olahraga 2021

7. Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan

Secara umum, Angka melanjutkan pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kab. Majene mengalami penurunan. Dari 98,8 di tahun 2016 turun menjadi 97,14 di tahun 2017 lalu kembali turun menjadi 95,98 di tahun 2018. Angka ini kembali turun di tahun 2019 menjadi 89,89 lalu kembali turun menjadi 72,65 di tahun 2020. Menurunnya angka melanjutkan dari tingkat SD/MI ke SMP/MTs disebabkan oleh factor ekonomi sehingga diharapkan bisa mengoptimalkan biaya operasional sekolah (BOS) melalui bantuan beasiswa. Sementara pada jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA angka melanjutkan sekolah

mengalami peningkatan dari 2016 berada di angka 89,70, sedangkan pada tahun 2018 berada pada 122,96 dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2019 di angka 123,84 dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan di angka 125,49. Tingginya angka melanjutkan sekolah pada jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA disebabkan oleh banyaknya siswa yang mengulang ujian pada jenjang ujian akhir SMP/MTs sehingga angka melanjutkan ke jenjang berikutnya lebih besar dari pada jumlah murid yang ujian pada jenjang SMP/MTs. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.43.
Angka Melanjutkan Jenjang SD Ke SMP Kabupaten Majene
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98,8	97,14	95,98	89,89	72,65
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	89,7	*	122,96	123,84	125,49

Sumber Data : Data Dinas Pendidikan & Pemuda Olahraga 2020
*Keterangan : * Data Belum Tersedia*

8. Ratio Guru dan Murid Sekolah

Kabupaten Majene terkenal sebagai kota pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Untuk rasio guru murid sekolah di Kabupaten Majene dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Rasio guru dan murid untuk jenjang TK setiap tahunnya mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 mencapai 8,03 kemudian meningkat di tahun 2017 sebesar 10,36, tahun 2018 naik menjadi 12,69 dan kembali turun di tahun 2019 sebesar 10,13 dan pada tahun 2020 ratio guru dan murid mengalami kenaikan menjadi menjadi 10,74. Pada jenjang SD di tahun 2016 berada diangka 9,83, pada tahun 2017-2018 naik diangka 10,17 dan 14,91 pada tahun 2019 kembali menurun diangka 10,68. Pada tahun 2020 Ratio Guru dan Murid Sekolah kembali mengalami peningkatan yang tidak terlalu tinggi di angka 10,78. Rasio guru/murid untuk jenjang Pendidikan Menengah Pertama pada tahun 2016 berada pada 18,25 dan mengalami penurunan di

tahun 2017 menjadi 17,31 sedangkan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan di angka 19,67 sedangkan ditahun 2019 kembali menurun menjadi 11,51 dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 12,80. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.44.
Ratio Guru dan Murid Kab. Majene 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio guru/murid TK	8,03	10,36	12,69	10,13	10,74
2	Rasio guru/murid SD/MI	9,83	10,17	14,91	10,68	10,78
3	Rasio guru/murid SMP/MTs	18,25	17,31	19,67	11,51	12,80

Sumber Data : Data Dinas Pendidikan & Pemuda Olahraga 2021

9. Kondisi Ruang Kelas (SD-SMP) Sederajat

Secara umum, kondisi Fasilitas Pendidikan berupa ruang kelas di Kab. Majene menunjukkan angka yang cukup baik berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga tahun 2021 melalui situs statistik pendidikan kemdikbud. Jenjang SD/MI dari 100% baik di tahun 2016-2019 dan pada tahun 2020 kondisi menurun di angka 99,57% dengan status rusak ringan dan 98,96 dengan kondisi rusak sedang. Ini disebabkan oleh adanya beberapa gedung sekolah yang mengalami kerusakan akibat umur gedung tersebut sudah lama hingga tahun 2020.

Untuk jenjang SMP/MTs kondisi ruang kelas berada di angka 98,17% pada tahun 2016-2017 dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 97,71%, dan kembali mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 97,48%, kembali turun di tahun 2020 menjadi 96,83%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.45.
Kondisi Ruang Kelas (SD – SMP) Sederajat Kabupaten Majene
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI kondisi ruang kelas (baik)	100	100	100	100	99,57
2	SMP/MTs kondisi ruang kelas (baik)	98,17	98,17	97,71	97,48	96,83

Sumber Data : Data Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga 2021, dan http://statistik.data.kemdikbud.go.id

10. Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Membaca Dan Menulis Tahun 2016-2020

Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Di Kabupaten Majene Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Membaca Dan Menulis pada tahun 2016 adalah sebesar 110.920 jiwa dan naik di tahun 2017 menjadi 116.250 jiwa atau mengalami kenaikan sebesar 5.330 jiwa. Sedangkan di tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar 40 jiwa atau sebesar 116.290 jiwa dan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan menjadi 113.121 jiwa dan 115.457 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.46.
Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Membaca Dan Menulis Tahun 2016-2019

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Membaca Dan Menulis	110.920	116.250	116.290	113.121	115.457

Sumber Data : Data Dinas Pendidikan & Pemuda Olahraga 2021
*Keterangan : * Data Belum Tersedia*

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

1. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Keberadaan posyandu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatankhususnya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi dan balita. Melalui posyandu diperoleh berbagai pelayanan dan informasi kesehatan dasar ibu, bayi dan balita.

Pada Kabupaten Majene jumlah posyandu hingga akhir tahun 2020 sebanyak 326 dengan rasio perbandingan 1 posyandu melayani 60 balita. Rasio posyandu per satuan balita menunjukkan trend yang fluktuatif, dimana setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 tercatat rasio posyandu per satuan balita sebesar 20,22, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 mengalami penurunan diangka 20,05 dan terus menurun di tahun 2018 menjadi 19,53, namun tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 19,93 dan kembali menurun di tahun 2020 menjadi 16,56. Trend perkembangan rasio tersebut memperlihatkan kenaikan yang cukup baik dan hanya di tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang cukup besar sehingga ditakutkan besarnya jumlah balita yang akan terus bertambah dan kurang diseimbangi oleh banyaknya jumlah posyandu, sehingga dapat menurunkan angka rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Majene. Hal ini guna mewujudkan lebih terhadap wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47.
Rasio Posyandu Terhadap Per Satuan Balita
di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu	323	321	325	337	326
2	Jumlah Balita	15.975	16.009	16.640	16.907	19.690
3	Rasio Perbandingan	1 : 49	1 : 50	1 : 51	1 : 50	1 : 60
4	Rasio Per 1000 Balita	20,22	20,05	19,53	19,93	16,56

Sumber Data : Dinas Kesehatan & RSUD Kab. Majene Tahun 2021

2. Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling Per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas, pustu dan puskesmas keliling bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan tersebut dalam memenuhi pelayannya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Selain bermanfaat, keberadaan fasilitas kesehatan tersebut merupakan salah

satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Berdasarkan tabel dibawah memperlihatkan bahwa Rasio puskesmas persatuan penduduk tahun 2016 adalah 0,07 bergerak konstan pada angka rasio sebesar 0,07 sampai tahun 2017 dan di tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan angka rasio menjadi 0,06. Untuk puskesmas pembantu rasio per satuan penduduk tahun 2016 adalah sebesar 0,20 dan mengalami peningkatan 0,01 di tahun 2017 atau sebesar 0,21. Pada tahun 2018 kembali berada diangka 0,20 atau mengalami penurunan sebesar 0,01 dan kembali mengalami penurunan yang sama di tahun 2019 yaitu 0,18, dan kembali mengalami peningkatan sebesar 0,04 atau berada diangka 0,22. Sedangkan Rasio Puskesmas Keliling di Kabupaten Majene belum menunjukkan trend cukup baik atau masih bergerak konstan dari tahun 2016-2018 yang berada diangka 0,10 di setiap tahunnya, hingga pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,02 atau berada diangka 0,08 persatuan penduduk dan ditahun 2020 kembali mengalami penurunan 0,01 atau berada diangka 0,07 persatuan penduduk. Untuk lebih jelasnya Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling Per Satuan Penduduk tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48.
Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling Per Satuan Penduduk di Kab. Majene 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	11	11	11	11	11
2	Jumlah Pustu	34	35	35	32	39
3	Jumlah Puskel	17	17	17	14	12
4	Jumlah Penduduk	166.397	169.072	171.272	173.884	174.407
5	Rasio Puskesmas Per 1000 Penduduk	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
6	Rasio Pustu Per 1000 Penduduk	0,20	0,21	0,20	0,18	0,22
7	Rasio Puskel Per 1000 Penduduk	0,10	0,10	0,10	0,08	0,07

Sumber Data : Dinas Kesehatan & RSUD Kab. Majene Tahun 2021

3. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara kuantitas, hingga tahun 2020 tidak terjadi penambahan jumlah rumah sakit. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terhitung konstan di angka 0,06, hal ini terjadi karena jumlah rumah sakit tidak bertambah selama kurun waktu 5 tahun terakhir sedangkan jumlah pertumubuhan penduduk cenderung sangat sedikit, sehingga rasio Rumah Sakit per jumlah penduduk statis di angka 0,06. Berikut adalah tabel jumlah dan rasio rumah sakit per satuan penduduk tahun 2016-2020 di Kabupaten Majene.

Tabel 2.49.
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk	166.397	169.072	171.272	173.884	174.407
3	Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk 10.000	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Sumber Data : Dinas Kesehatan & RSUD Kab. Majene Tahun 2021

4. Rasio Dokter Persatuan Penduduk

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter terus meningkat hingga tahun 2017 di Kabupaten Majene sehingga rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Majene terus meningkat. Berbeda di tahun 2018 dan 2020 jumlah dokter berkurang cukup signifikan yang disebabkan oleh banyaknya dokter yang

melanjutkan pendidikan spesialis dan pada tahun 2019 jumlah dokter kembali meningkat yang disebabkan oleh adanya beberapa dokter yang kembali bertugas sehabis menjalankan pendidikan spesialis serta adanya penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2018-2019 sehingga mempengaruhi jumlah keberadaan dokter di Kabupaten Majene.

Pada tahun 2016 jumlah dokter sebanyak 28 orang dengan rasio tercatat 0,17 serta rasio perbandingan sebesar 1:5.943, tahun 2017 rasio dokter per satuan penduduk meningkat menjadi 0,22 dengan jumlah dokter sebanyak 37 orang sehingga perbandingannya sebesar 1:4.570 dan pada tahun 2018 jumlah dokter mengalami kekurangan yang cukup signifikan di angka 21 dokter dengan rasio persatuan penduduk diangka 0,12 atau perbandingan sekitar 1:8.156, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2019 dengan jumlah dokter sebanyak 31 orang dengan rasio persatuan penduduk berada diangka 0,19 dengan perbandingan rasio dokter terhadap jumlah penduduk sebesar 1:5.609. Tahun 2020 jumlah dokter kembali mengalami kekurangan menjadi 28 dokter dengan rasio persatuan penduduk berada diangka 0,16 dengan perbandingan rasio dokter terhadap jumlah penduduk sebesar 1:6.223. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50.
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter	28	37	21	31	28
2	Jumlah Penduduk	166.397	169.072	171.272	173.884	174.407
3	Rasio Dokter Persatuan Penduduk 1000	0,17	0,22	0,12	0,19	0,16
4	Rasio Dokter Terhadap Jumlah Penduduk	1:5.943	1:4.570	1:8.156	1:5.609	1:6.223

Sumber Data : Dinas Kesehatan & RSUD Kab. Majene Tahun 2021

5. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk di Kabupaten Majene pada tahun 2016 adalah 2,08 dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 346 orang serta rasio perbandingan tenaga kesehatan sebesar 1:481, mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 2,22 dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 376 orang serta rasio perbandingan tenaga kesehatan sebesar 1:450. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 1,79 dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 307 orang serta rasio perbandingan tenaga kesehatan sebesar 1:558, kembali mengalami penurunan di tahun 2019 diangka rasio 1,63 dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 284 orang serta rasio perbandingan tenaga kesehatan sebesar 1:612. Tahun 2020 tenaga kesehatan mengalami penambahan sehingga rasio berada diangka 1,94 dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 338 dengan rasio perbandingan tenaga kesehatan sebesar 1:516 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.51.
Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk dan Jumlah Penduduk di Kab. Majene Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Kesehatan	346	376	307	284	338
2	Jumlah Penduduk	166.397	169.072	171.272	173.884	174.407
3	Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk 1000	2,08	2,22	1,79	1,63	1,94
4	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk	1:481	1:450	1:558	1:612	1:516

Sumber Data : Dinas Kesehatan & RSUD Kab. Majene Tahun 2021

6. Pelayanan Kesehatan Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan

Secara umum, jumlah kunjungan bayi ke fasilitas kesehatan di Kab. Majene mengalami fluktuasi dilihat dari data tahun 2016 mencapai 100% dan megalami penurunan tahun 2017 menjadi 92,43%. Pada tahun 2018 kembali mencapai 100%, mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 96,47% dan tahun 2020 kembali naik dan berada di angka 99,50%. Hal ini terkait dengan kinerja petugas dalam mencakup sasarannya secara keseluruhan. Sementara itu, jumlah

balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kab. Majene berada diangka 100% dari tahun 2016-2020 dengan artian bahwa semua balita yang menderita gizi buruk telah tertangani di semua fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Majene.

Adapun terkait Universal Child Immunization (UCI) berdasarkan jumlah Desa/Kelurahan UCI di Kab. Majene mengalami peningkatan dilihat dari data tahun 2016 sebesar 57,30% dan naik menjadi 80,85% di tahun 2017. Sementara pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan menjadi 56,10% dan kembali mengalami penurunan menjadi 51,20%. Hal ini terjadi karena berkurangnya jumlah desa dengan cakupan sasaran imunisasi dasar lengkap yang mencapai target.

Secara umum, persentase balita gizi buruk di Kab. Majene mengalami kenaikan setiap tahunnya, dilihat dari data tahun 2016 sebesar 1,17% naik menjadi 2,41% pada tahun 2017 lalu kembali mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 2,41. Tahun 2018 tetap mengalami kenaikan menjadi 4,74% dan diakhir tahun 2019 dan 2020 persentase balita gizi buruk mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang berada di angka 26,40% dan 23,4%. Meningkatnya persentase balita gizi buruk setiap tahunnya menunjukkan kurangnya peningkatan upaya perbaikan pada gizi balita.

Sedangkan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Majene masih stabil dari tahun 2016-2018 dengan angka kelangsungan hidup bayi sebesar 0,98% dan hanya mengalami penurunan yang tidak cukup signifikan di tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,87%. Berbeda dengan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup bayi, dimana tahun 2016 angka kematian bayi sebesar 18,30% dan menurun di tahun 2017-2019 sebesar 13,30%, 12,80%, 3,40% dan hingga di akhir tahun 2020 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup kembali mengalami peningkatan menjadi 12,23% yang disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan saat mengandung pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada serta masih minimnya tenaga-tenaga kesehatan pada wilayah-wilayah terpencil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.52.
Pelayanan Kesehatan Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan di Kab. Majene Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Kunjungan Bayi	100	92,43	100	96,47	99,5
2	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100
3	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	57,30	80,85	56,10	56,10	51,20
4	Persentase Balita Gizi Buruk	1,17	2,41	4,74	26,40	23,4
5	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	0,98	0,98	0,98	0.87	0.87
6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	18,30	13,30	12,80	3,40	12,23
7	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	18,33	17,70	13,90	12,50	0,54
8	Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran hidup	225,6	136,1	271,9	267,7	163,1
9	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	71,8	72,75	72,80	72,75	70,50
10	Cakupan Pelayanan Anak Balita	79,1	80,00	79,52	80,10	73,95

Sumber Data : Dinas Kesehatan & RSUD Kab. Majene Tahun 2021

Berbeda dengan Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup setiap tahunnya mengalami penurunan, ini dilihat data pada tahun 2016 sebesar 18,33%, turun di tahun 2017 menjadi 17,70%. Tahun 2018-2020 kembali memperlihatkan trend yang cukup baik yang berada diangka 13,90%, 12,50% dan 0,54. Sedangkan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup masih fluktuasi dari tahun ketahun, ini dilihat bahwa pada tahun 2016 angka kematian ibu sebesar 225,6, mengalami penurunan di Tahun 2017 sebesar 136,1 dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 271,9. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 trend penurunan kembali terlihat yang berada diangka 267,7 dan 163,1 dengan arti bahwa tahun 2018 kembali mengalami peningkatan dan tahun 2019-2020 mengalami penurunan.

Berikutnya terkait Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di fasilitas kesehatan Kabupaten Majene adalah 71,8% di tahun 2016 dan mengalami kenaikan yang tidak cukup signifikan sebesar 72,75% di tahun 2017. Untuk tahun 2018 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil sebesar 72,80% dan hingga tahun 2019-2020 cakupan kunjungan ibu hamil kembali berada di angka 72,75% dan 70,50%. Sedangkan Cakupan Pelayanan Anak Balita di tahun 2016 sebesar 79,10% dan mengalami

kenaikan menjadi 80,00% di tahun 2017. Pada tahun 2018 Cakupan Pelayanan Anak Balita kembali turun yang berada diangka 79,52% dan pada tahun 2019 dan 2020 kembali berada di angka 80,10% dan 73,95% di tahun 2020.

7. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Secara umum, jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin ke fasilitas kesehatan di Kab. Majene setiap tahunnya berada pada posisi stagnasi/tetap, ini dilihat dari data tahun 2016 sampai pada tahun 2020. Berdasarkan tabel dibawah tersebut memperlihatkan bahwa perubahan status kepesertaan dari Askeskin menjadi PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN yang dikelola oleh BPJS serta adanya Kartu Indonesia Sehat (KSI). Stagnasi data terjadi dari tahun 2016 sampai 2020. Sedangkan cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat, cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) dan cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi <24 jam menunjukkan angka yang sama dimana pada tahun 2016 hingga 2020 berada diangka 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.53.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pasien Masyarakat Miskin dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kab. Majene Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	82,14	82,14	82,14	100	100
2	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat	100	100	100	100	100
3	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100
4	Cakupan Desa /Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi < 24 Jam	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan & RSUD Kab. Majene Tahun 2021

8. Pelayanan, Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular

Secara umum, jumlah penderita DBD di Kab. Majene sudah 100% ditangani sesuai SOP dengan jumlah penanganan di tahun 2019-2020 sebanyak 57 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya 2018 yaitu 32 pasien. Secara umum, jumlah penderita penyakit TBC BTA yang ditemukan dan diobati di Kab. Majene mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2018 dan mengalami penurunan di tahun 2019, ini dilihat dari data tahun 2016 sebesar 276 kemudian meningkat menjadi menjadi 299 dan di tahun 2018 terjadi peningkatan yang besar dengan jumlah pasien sebesar 530 orang. Jumlah menurun pada tahun 2019 menjadi 406 orang dan meningkat 492 orang di tahun 2020. Hal ini terjadi karena bertambahnya kaus penderita baru TB BTA (+).

Selain penyakit tersebut, masih terdapat beberapa penyakit lain yang berupa diare, malaria, diduga rabies, cacingan, kusta dan typus dengan komplikasi yang ditangani dan juga angka kejadian beberapa penyakit tersebut mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga 2019. Penyakit lain yang ditemukan dan dirawat adalah jenis penyakit campak yang ditemukan pada tahun 2020 yang masing-masing sebanyak 1 orang dengan penanganan mencapai 100% sedangkan untuk tingkat kematian akibat malaria dan juga cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD berada di angka stabil. Untuk data jumlah pelayanan penyakit diduga rabies, cacingan, campak, TBC, Kusta, Typus di tahun 2020 belum tersedia atau masih dalam perampungan data dari setiap pusat-pusat kesehatan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.54.
Jumlah Pelayanan Penyakit Menular Kabupaten Majene
Tahun 2016 – 2020

No	Pelayanan Penyakit Menular	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Diare	4.850	3.790	3.498	3.307	3.045
2	Malaria	22	41	140	159	104
3	Diduga Rabies	35	56	23	19	43
4	Cacingan	1.235	742	348	206	*
5	Campak	-	-	1	*	1
6	DBD	126	15	32	57	57

No	Pelayanan Penyakit Menular	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	TBC Paru-Paru	276	299	530	406	492
8	Kusta	51	42	61	36	26
9	Typus	278	282	57	225	272

Sumber Data : Dinas Kesehatan & RSUD Kab. Majene Tahun 2021
*Keterangan : * Data Belum Tersedia*

9. Cakupan Pelayanan Kebidanan

Secara umum, jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi kebidanan di Kab. Majene mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ini terlihat dari data tahun 2016 sebesar 75,64%, meningkat menjadi 78,50% di tahun 2017 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 80,50% pada tahun 2018 lalu kembali meningkat 87,1% di tahun 2019. Berbeda di tahun 2020 mengalami penurunan cakupan pelayanan kebidanan menjadi 80,3%. Penurunan cakupan tersebut dikarenakan berkurangnya minat ibu hamil untuk bersalin di fasilitas kesehatan. Secara umum, jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di Kab. Majene juga mengalami fluktuasi dilihat dari data tahun 2016 sebesar 80,21% meningkat menjadi 92,7% pada tahun 2017 dan hingga akhir tahun 2018 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani kembali meningkat mencapai 101,1% dan menurun diangka 90,6% di tahun 2019 dengan arti bahwa komplikasi kebidanan tertangani dengan baik. Sedangkan data tahun 2020 menunjukkan adanya kembali peningkatan dari tahun sebelumnya atau berada diangka 94,7%.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua komplikasi kebidanan yang ditemukan dapat ditangani dengan segera oleh karena keterlambatan penanganan medis terhadap ibu hamil dan melahirkan resiko tinggi. Pada tahun 2020 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan menurun menjadi 80,3% namun cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami kenaikan atau berada diangka 94,7%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.55.
Cakupan Pelayanan Kebidanan Kabupaten Majene
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	75,64	78,5	80,5	87,1	80,3
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80,21	92,7	101,1	90.6	94,7

Sumber Data : Dinas Kesehatan & RSUD Kab. Majene Tahun 2021

10. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup (AHH) adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang kesehatan. Secara umum, menurut data yang tersedia angka usia harapan hidup di Kab. Majene mengalami peningkatan dari 60,79 di tahun 2016 menjadi 61,30 di tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 berada pada angka 61,56. Lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.56.
Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Majene
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	60,79	60,79	61,05	61,30	61,56

Sumber Data : Dinas Kesehatan & RSUD Kab. Majene Tahun 2021

11. Jumlah Tenaga Medis

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jumlah tenaga medis di Kabupaten Majene dari tahun 2016 sampe dengan 2020, dimana pada tahun 2020 jumlah dokter umum sebanyak 17 orang, dokter spesialis sebanyak 11 orang, dan dokter gigi sebanyak 14 orang. Kemudian tenaga kesehatan berupa perawat di tahun 2020 sebanyak 114 orang, bidan sebanyak 154 orang, apoteker sebanyak 23 orang, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 29 orang dan tenaga gizi sebanyak 14 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57.
Jumlah Tenaga Medis di Kab. Majene Tahun 2016-2020

Tenaga Medis	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter Umum	14 orang	20 orang	12 orang	15 orang	17 orang
Dokter Spesialis	4 orang	6 orang	8 orang	6 orang	11 orang
Dokter Gigi	10 orang	11 orang	8 orang	7 orang	14 orang
Perawat	129 orang	125 orang	118 orang	114 orang	114 orang
Bidan	146 orang	151 orang	137 orang	137 orang	154 orang
Apoteker	6 orang	7 orang	7 orang	12 orang	23 orang
Tenaga KesMas	7 orang	11 orang	14 orang	12 orang	29 orang
Tenaga Gizi	9 orang	18 orang	10 orang	9 orang	14 orang

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Majene, 2021

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah bagaimana kondisi infrastruktur termasuk didalamnya adalah jalan. Panjang jalan di Kabupaten Majene hingga tahun 2020 adalah 621,20 Km yang dibagi kedalam 4 kondisi jalan yaitu kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Panjang jalan dalam kondisi baik setiap tahunya masih fluktuatif, dimana tahun 2016 kondisi jalan baik sepanjang 442,22 km dan kondisi tersebut menurun di tahun 2017 menjadi 246,15 km sampai pada tahun 2019 menjadi 236,04 km dan tahun 2020 meningkat menjadi 275,26 km. Sementara kondisi jalan sedang, rusak dan rusak berat memperlihatkan makin membaik, ini disebabkan karena adanya kegiatan rehabilitasi kondisi jalan di setiap tahunnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58.
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Jalan Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	442,22	246,15	228,03	236,04	275,26
2	Panjang Jalan Dalam Kondisi Sedang (Km)	74,39	129,11	122,01	104,45	79,62
3	Panjang Jalan Dalam Kondisi Rusak (Km)	14,46	108,76	139,08	106,96	170,90
4	Panjang Jalan Dalam Kondisi Rusak Berat (Km)	93,71	140,76	132,08	173,74	95,41

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Majene Tahun 2021

Secara umum kondisi jalan di Kabupaten Majene terus membaik, ini ditandai dengan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 5 (lima) tahun terakhir mengalami tren peningkatan pada tahun 2018-2020, dimana ditahun 2016 sebesar 71,19% dan mengalami penurunan yang cukup tinggi di tahun 2017 sebesar 39,60% diakibatkan oleh data panjang jalan berubah dari OPD teknis sehingga pada tahun 2018 hingga 2020 data panjang jalan dalam kondisi baik menunjukkan trend baik dimana tahun 2018 menjadi 36,70%, tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 38,00% dan tahun 2020 menjadi sepanjang 44,31%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59.
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	442,22	246,15	228,03	236,04	275,26
2	Panjang Jalan Seluruhnya (Km)	621,20	621,20	621,20	621,20	621,20
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	71,19	39,60	36,70	38,00	44,31

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

2. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, persentase rumah tinggal bersanitasi cenderung meningkat. Hal ini ditandai dengan peningkatan sebesar 5,08% dari tahun 2016 ke tahun 2020 yang bergerak pada kisaran 65,92 % dan mengalami peningkatan akses di tahun 2017 menjadi 70,80 %. Pada tahun 2018 kembali meningkat di angka 74,14%. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah akses yang disebabkan oleh banyaknya sarana sanitasi yang mengalami kerusakan akibat usia sarana yang sudah lama dan jenis sarana yang sudah tidak layak pakai dikisaran angka 69,30% sedangkan tahun 2020 persentase rumah tinggal bersanitasi kembali meningkat menjadi 71,00% karena disebabkan adanya beberapa program yang membenahi sarana sanitasi yang tidak layak menjadi layak pakai. Berdasarkan kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Majene dalam mendukung Pembangunan

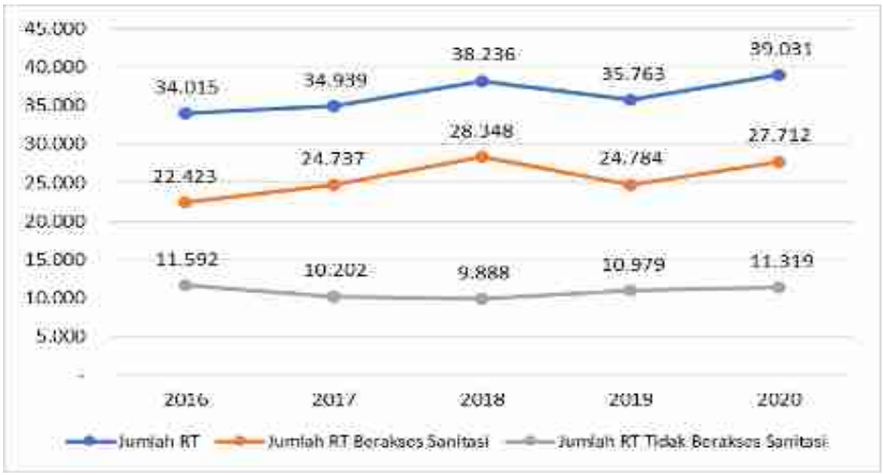
Perumahan, Permukiman, Air Minum Dan Sanitasi (PPAS) Dalam RPJMN 2020-2024 dan SDGs 2030, yang mencantumkan pengelolaan sanitasi permukiman di daerah merupakan prioritas nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.60.
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Majene
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi (Unit)	22.423	24.737	28.348	24.784	27.712
2	Jumlah Rumah Tinggal (Unit)	34.015	34.939	38.236	35.763	39.031
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	65,92	70,80	74,14	69,30	71,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Gambar 2.31.
Grafik Rumah Tinggal Berakses Sanitasi
Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020

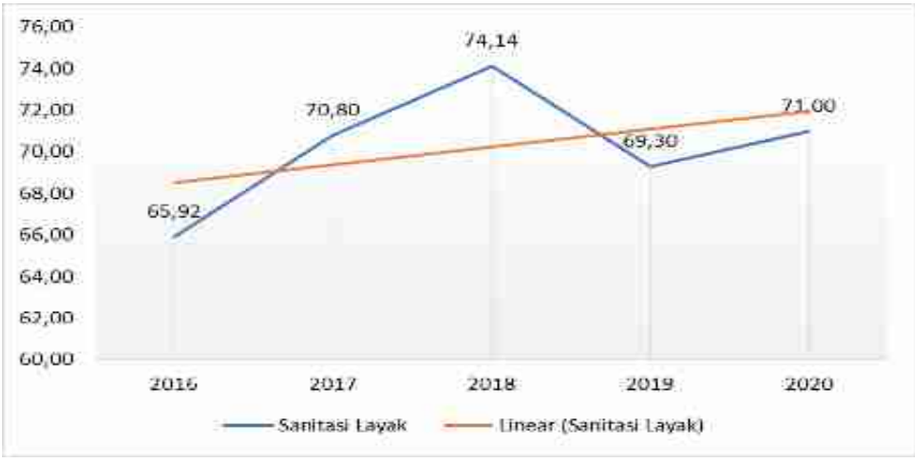


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

3. Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Layak

Sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development goals*/SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal sanitasi yang layak. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa akses penduduk terhadap sanitai yang layak di Kabupaten Majene dalam kurung waktu 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) meningkat, ini dilihat dari trend linear data yang disajikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut.

Gambar 2.32.
Grafik Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Layak
Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Berdasarkan gambar diatas, memperlihatkan bahwa pada tahun 2016 akses penduduk terhadap sanitai yang layak sebesar 65,92% atau sebanyak 114.969 jiwa, tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 70,80% atau sebanyak 123.480 jiwa dan kembali meningkat pada tahun 2018 sebesar 74,14% atau sebesar 129.305 jiwa. tahun 2019 mengalami penurunan akses penduduk terhadap sanitasi layak yang mencapai 69,30 atau sebanyak 120.864 jiwa dan kembali mengalami kenaikan jumlah akses di tahun 2020 sebesar 71,00% atau sebanyak 123.829 jiwa. Melihat kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Majene mampu meningkatkan jaminan ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pengelolaan sanitas serta Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi.

4. Panjang Jalan Memiliki Drainase/Saluran Pembuangan Air

Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air sejalan dengan panjang jalan keseluruhan yang ada di Kabupaten Majene. Panjang jalan yang memiliki drainase mengalami trend yang cukup baik dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini terlihat di tahun 2016 Panjang jalan yang memiliki drainase sebesar 19,99% meningkat di tahun 2017 sebesar 20,56%. Pada tahun 2018 kembali meningkat diangka 20,93% dan terus meningkat hingga tahun 2019 dan 2020 yang masing-masing sebesar 21,35%. Hal ini ditandai

dengan trend peningkatan dan pembangunan saluran drainase yang ada dilingkungan-lingkungan masyarakat dari tahun 2016 hingga tahun 2019 dan pada tahun 2020 tidak terlihat peningkatan akibat kurangnya pembangunan di tahun tersebut yang diakibatkan oleh alokasi anggaran pembangunan dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Untuk lebih jelasnya panjang jalan memiliki drainase/ saluran pembuangan air dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.61.
Panjang Jalan Memiliki Drainase/Saluran Pembuangan Air
Kab. Majene Tahun 2016–2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang seluruh drainase (Km)	124,17	127,70	130,03	132,65	132,65
2	Panjang jalan yang memiliki drainase (%)	19,99	20,56	20,93	21,35	21,35
3	Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	621,2	621,2	621,2	621,2	621,2
4	Panjang jalan yang memiliki drainase (minimal 1,5 m)	0,75	0,75	0,74	0,75	0,75

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

5. Drainase Dalam Kondisi Baik

Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi genangan dan kelebihan air adalah membuat drainase. Pemerintah Kabupaten Majene selalu mengupayakan drainase dalam kondisi baik, hal ini ditandai dengan adanya trend peningkatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020). Pada tahun 2016 dan 2017 panjang drainase dalam kondisi baik adalah 88,86% dan meningkat di tahun 2017 sepanjang 89,07% sehingga pada tahun 2018 kembali meningkat dan bertambah menjadi 91,14% dengan panjang drainase keseluruhan sepanjang 130,03 Km. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat berada di angka 91,47% dengan panjang drainase 132,65 Km. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.33.
Grafik Drainase Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut memperlihatkan bahwa adanya kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi saluran drainase setiap tahunnya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkecuali ditahun 2020, dimana alokasi anggaran sebagian dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Untuk mengetahui pertambahan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62.

Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kab. Majene Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang seluruh drainase (Km)	124,17	127,70	130,03	132,65	132,65
2	Panjang drainase kondisi baik (%)	88,46	89,07	91,14	91,47	91,47

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

6. Luas Irigasi dalam Kondisi Baik

Seyogianya kondisi irigasi harus dalam kondisi baik agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghambat irigasi berfungsi secara baik. Upaya terus dilakukan sehingga selama 5 tahun terakhir adanya trend peningkatan persentase jumlah irigasi dalam kondisi baik. Pada tahun 2016 persentase panjang irigasi dalam kondisi baik berada pada kisaran 82,00%, sedang 7,78%, rusak 4,17% dan rusak berat sebesar

6,05% kemudian meningkat masing-masing 83,69% pada tahun 2017 dan 89,21% di tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik kembali meningkat di angka 89,90%, sedang 3,79%, rusak 1,01% dan rusak berat sebesar 5,30%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.63.
Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik Kabupaten Majene
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Seluruh Irigasi (m)	156.989	172.008	172.938	177.946	177.946
2	Panjang Irigasi dalam kondisi baik (%)	82,00	83,69	89,21	89,90	89,90
3	Panjang Irigasi dalam kondisi Sedang (%)	7,78	7,04	4,30	3,79	3,79
4	Panjang Irigasi dalam kondisi Rusak (%)	4,17	3,77	1,04	1,01	1,01
5	Panjang Irigasi dalam kondisi Rusak Berat (%)	6,05	5,48	5,45	5,30	5,30

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

7. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak

Untuk konsumsi air minum, syarat-syaratnya adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak mengandung logam berat maupun sedang dan ringan. Persentase penduduk yang memiliki akses yang layak di Kabupaten Majene pada tahun 2020 untuk non perpipaan sebesar 71,41% dan perpipaan sebesar 28,66% menurun dibandingkan satu tahun sebelumnya. Target akses penduduk terhadap air minum berkualitas sebesar 100%. Dari 71,41% penduduk yang memiliki akses air minum yang layak non perpipaan, sebanyak 27,21 % menggunakan sumur bor dengan pompa dan 44,20% didapat dari mata air yang terlindungi sedangkan perpipaan bersumber dari PDAM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut;

Tabel 2.64.
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Majene
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penduduk berakses air minum (Non Perpipaan)	80,2	82,1	79,4	74,55	71,41
2	Persentase Penduduk berakses air minum (Perpipaan)	24,8	27,4	24,8	29,80	28,66

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

Gambar 2.34.
Grafik Penduduk Berakses Air Minum
Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Air bersih adalah kebutuhan utama untuk setiap manusia dalam beraktifitas terutama dalam kebutuhan rumah tangga, baik itu untuk minum, mencuci dan sebagainya. Namun kualitas air menjadi hal yang harus diperhatikan, karena berhubungan dengan kesehatan. Pada wilayah Kabupaten Majene persentase Jumlah Rumah tangga Pengguna air bersih mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 bergerak pada kisaran 27.280 rumah tangga pengguna air bersih non perpipaan dan 8.436 rumah tangga pengguna air bersih perpipaan. Meningkat pada tahun 2017 sebanyak 28.685 rumah tangga perpipaan dan 9.573 rumah tangga perpipaan. Pada tahun 2018 data yang

diperoleh kembali meningkat sebanyak 30.359 rumah tangga non perpiaan dan 9.483 rumah tangga perpipaan, sedangkan tahun 2019 jumlah rumah tangga non perpipaan menurun yaitu sebanyak 26.661 rumah tangga dan meningkat di sector perpipaan menjadi 10.657 rumah tangga. Pada tahun 2020 rumah tangga pengguna air bersih non perpipaan sebanyak 27.872 rumah tangga dan air bersih perpipaan sebanyak 11.186 rumah tangga. Untuk lebih jelsnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.65.
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Majene
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga (Unit)	34.015	34.939	38.236	35.763	39.031
2	Jumlah Rumah Tangga berakses air bersih (Non Perpipaan)	27.280	28.685	30.359	26.661	27.872
3	Jumlah Rumah Tangga berakses air bersih (Perpipaan)	8.436	9.573	9.483	10.657	11.186

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Majene Tahun 2021 dan Sumber Data Diolah Tahun 2021

2. Rumah Tangga Bersanitasi Layak

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, persentase rumah tinggal bersanitasi cenderung berfluktuasi. Hal ini ditandai dengan akses sanitasi sebesar 65,92% atau sebanyak 22.423 rumah tangga dari tahun 2016 dan bergerak meingkat pada kisaran 70,80% atau sebanyak 24.737 rumah tangga di tahun 2017. Pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar 74,14% atau sebesar 28.348 rumah tangga dan mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 69,30% atau sebanyak 24.784 rumah tangga yang disebabkan oleh banyaknya sarana sanitasi yang mengalami kerusakan akibat usia sarana yang sudah lama dan jenis sarana yang sudah tidak layak pakai. Pada tahun 2020 rumah tangga yang bersanitasi layak kembali meningkat sebanyak 71,00% atau sebesar 27.712 rumah tangga yang disebabkan oleh adanya beberapa program yang membenahi sarana sanitasi yang tidak layak menjadi layak pakai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66.
Rumah Tangga Bersanitasi Layak
Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi (Unit)	22.423	24.737	28.348	24.784	27.712
2	Jumlah Rumah Tinggal (Unit)	34.015	34.939	38.236	35.763	39.031
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	65,92	70,80	74,14	69,30	71,00

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Majene Tahun 2020 dan Sumber Data Diolah Tahun 2020

3. Lingkungan Permukiman Kumuh

Seluruh luas wilayah Kabupaten Majene terbagi menjadi beberapa kawasan penggunaan lahan, diantaranya adalah lingkungan permukiman. Lingkungan permukiman masih terbagi atas beberapa kawasan salah satunya adalah kawasan permukiman kumuh. Pada wialayah Kabupaten Majene kawasan lingkungan permukiman kumuh mengalami trend penurunan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Penanganan masalah kawasan kumuh di Kabupaten Majene dikoordinasikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bekerjasama dengan Tim Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Tabel 2.67.
Lingkungan Permukiman Kumuh Kab. Majene
Tahun 2017 – 2020

No	Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jumlah Rumah Tinggal (Unit)	34.015	34.939	38.236	35.763	39.031
2	Persentase Rumah Layak Huni RLH (%)	*	75%	75%	54,18	62,13
3	Persentasi Rumah Tidak Layak Huni RTLH (%)	*	*	*	45,82	37,87
4	Persentasi Jumlah Backlog (%)	*	*	*	7,53	3,02
5	Luas Lingkungan pemukiman kumuh Kab. Majene (Ha)	21,41	21,41	17,00	5,65	176,59

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Majene Tahun 2021 dan Sumber Data Diolah Bapeda Tahun 2021
*Keterangan : * Data Belum Tersedia.*

Pada tahun 2016-2017 lingkungan permukiman kumuh pada Kawasan Perkotaan Kabupaten Majene Majene (Kec. Banggae dan Banggae Timur) sebesar 21,41 Ha dari total luas wilayah perkotaan Majene. Pada tahun 2018 mengalami penurunan luas kawasan kumuh

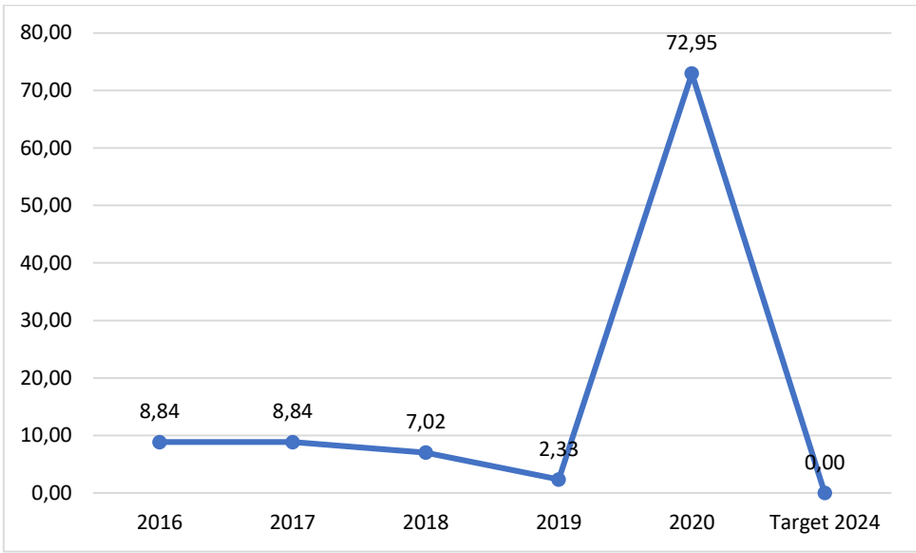
diperkotaan sebesar 4,49 Ha atau menjadi 17 Ha luas kawasan kumuh perkotaan dan kembali mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 11,35 Ha atau menjadi 5,65 Ha luas kawasan kumuh di Perkotaan Majene. Pada tahun 2020, melalui Badan Perencanaan Daerah dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang bekerjasama dengan Tim KOTAKU Majene melakukan Deliniasi Kawasan Kumuh untuk seluruh wilayah Kabupaten Majene, sehingga luas kawasan kumuh di Kabupaten Majene pada Tahun 2020 mengalami penambahan kawasan dengan total luas kawasan kumuh keseluruhan sebesar 176,59 Ha yang terdiri dari 15 (lima belas) kawasan di 5 (lima) kecamatan yang meliputi :

a. Kecamatan Banggae, terdapat 6 kawasan yang terdiri atas 16 lingkungan dengan total luasan 90,62 Ha,
b. Kecamatan Banggae Timur, terdapat 11 lingkungan dengan total luasan 31,87 Ha,
c. Kecamatan Pamboang, terdapat 8 lingkungan/dusun dengan total luasan 30,10 Ha
d. Kecamatan Sendana, terdapat 3 lingkungan dengan total luasan 16,00 Ha
e. Kecamatan Malunda, terdapat 2 lingkungan dengan total luasan 8,00 Ha.

Capaian pelaksaan penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Majene dari tahun 2016-2020 menunjukkan angka penurunan yang cukup baik, ini dilihat dari data pada tahun 2016-2017 luasa kawasan kumuh sebesar 8,84%, mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 1,82% atau berada di angka 7,02%. Pada tahun 2019 kembali menunjukkan penurunan yang cukup baik sebesar 4,69% atau berada di angka 2,33%, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penambahan luasan kawasan kumuh sebesar 70,62% atau berada diangka 72,95%. Berdasarkan target RPJMN tahun 2020-2024 bahwa luas kawasan kumuh hingga akhir tahun 2024 sebesar 0% melalui program pembangunan nasional '*Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG'S)*, yang mana merupakan penyempurnaan

dari Tujuan MDG'S (*Millenium Development Goals*) yang lebih komprehensif. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.35.
Persentase Luas Kawasan Kumuh
Kabupaten Majene Tahun 2016–2020



Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Majene Tahun 2021 dan Sumber Data Diolah Bapeda Tahun 2021
*Keterangan : * Data Belum Tersedia.*

Sedangkan presentase Rumah Layak Huni (RLH) Kabupaten Majene dari tahun 2017-2020 berfaviasi, ini dilihat dari tahun 2017-2018 presentase rumah layak huni Kabupaten Majene sebesar 75% dan mengalami penurunan di tahun 2019 atau mencapai 54,18% rumah layak huni dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan atau mencapai 62,13% rumah layak huni di Kabupaten Majene sesuai dengan total jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang dimutakhirkan pada tahun 2020-2021 di kabupaten/kota. Sedangkan rumah tidak layak huni di tahun 2019 emncapai 45,82% dan menurun di tahun 2020 menjadi 37,87%. Sementara pada kondisi jumlah backlog di Kabupaten Majene dalam 2 tahun terakhir (2019-2020) menunjukkan bahwa terjadi pengurangan jumlah backlog, dimana di tahun 2019 sebesar 7,53% menurun di tahun 2020 menjadi 3,02%.

4. Perkembangan Infrastruktur Perumahan

Dalam rangka mendukung ketersediaan pembiayaan infrastruktur untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur bidang perumahan, pemerintah Kabupaten Majene memandang perlu adanya suatu perkembangan infrastruktur di bidang perumahan. Perkembangan Infrastruktur Perumahan di Kab. Majene Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68.
Perkembangan Infrastruktur Perumahan di Kab. Majene
Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Prosentase Sarana dan Prasarana Umum	*	25%	75%	80%	95%
2	Prosentase Lampu Penerangan Jalan Umum yang terbangun	*	45%	60%	75%	85%
3	Prosentase Sarana dan Prasarana Pemakaman	*	40%	50%	65%	80%

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Majene Tahun 2021 dan Sumber Data Diolah Tahun 2021
*Keterangan : * Data Belum Tersedia.*

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 data belum tersedia sedangkan pada tahun 2017 prosentase sarana dan prasarana umum sebesar 25% dan meningkat di tahun 2018 dan 2019 sebesar 75% dan 80%, hingga tahun 2020 sebesar 95%. Untuk Prosentase Lampu Penerangan Jalan Umum yang terbangun di tahun 2017 sebesar 45% dan mengalami peningkatan di tahun 2018 dan 2019 sebesar 60% dan 75% serta pada tahun 2020 sebesar 85%.

Sedangkan Prosentase Sarana dan Prasarana Pemakaman ditahun 2017 sebesar 40% dan mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 10% atau menjadi 50% kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 15% atau berada di angka 65% dan pada tahun 2020 kembali meningkat di angka 80%, ini disebabkan karena makin kurangnya lahan pemakaman yang ada di Kabupaten Majene khususnya di kawasan perkotaan (Kecamatan Banggae dan Banggae Timur) sehingga kedepan perlu adanya suatu lokasi baru atau pengembangan kawasan pemakaman untuk bisa di manfaatkan seluruh lapisan masyarakat.

2.3.1.5. Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Hasil kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tidak dapat digambarkan secara umum karena kurangnya ketersediaan data. Persentase penegakan Perda dari tahun 2011 hingga 2020 berada diangka 100%. Sedangkan rasio Personil Satpol PP terhadap 10.000 jumlah penduduk pada tahun 2020 berada diangka 2,41. Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majene memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3).

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3 di Kabupaten Majene, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, PKL, dan Perda lainnya. Pada tahun 2020, dari pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) sejumlah 1.350, keseluruhannya telah dapat diselesaikan. Sehingga tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah 100% dari 1.350 obyek yang ditangani.

Selain anggota Satpol PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Rasio Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Majene pada tahun 2020, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 72 personil Linmas dengan jumlah keseluruhan Linmas di Kabupaten Majene sebanyak 1.260 personil yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan. Dengan melihat gambaran tersebut maka kedepan perlu adanya penambahan Linmas guna memelihara ketenteraman dan ketertiban yang ada di Kabupaten Majene.

Sementara cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Majene dalam kurung waktu 3 tahun terakhir (2018-2020) sebesar 100% dan tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajmen kebakaran yang ada di Kabupaten Majene berada dikisaran 60-75%, ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana mobil pemadam kebakaran serta tidak berfungsinya secara maksimal mobil tersebut diakibatkan oleh usia kendaraan yang sudah tua serta keberadaan kendaraan tersebut hanya terdapat di pusat kota dan secara kondisi geografis dari Pusat Kota Majene kewilayah kecamatan yang cukup jauh sehingga jangkauan mobil pemadam kebakaran memerlukan waktu yang cukup jika bergerak kewilayah-wilayah kecamatan di luar Kota Majene. Jumlah Damkar hingga tahun 2020 sebanyak 4 unit dengan kondisi baik dan 6 unit dengan kondisi rusak berat.

2.3.1.6. Urusan Sosial

1. Sarana Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Secara umum, menurut data yang tersedia sarana sosial di Kab. Majene dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) mengalami peningkatan. Data tahun 2016 sebesar 12 unit sarana social sampai pada tahun 2018. Kemudian jumlah ini bertambah 1 unit di tahun 2019 menjadi 13 unit sarana social yang ada di Kabupaten Majene hingga tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69.
Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi Kab. Majene Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	12	12	12	13	13

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Majene Tahun 2021

2. Bantuan Sosial

Urusan sosial masih terfokus pada kesiapan bantuan bencana alam, penanggulangan permasalahan kemiskinan serta peningkatan taraf hidup penyandang cacat, anak terlantar, eks TKI dan lanjut usia. Pelaksanaan pembangunan diarahkan kepada : (1) peningkatan kemandirian usaha masyarakat yang masuk kategori kurang mampu, (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, (3) memperkuat kelembagaan usaha masyarakat. Secara umum, menurut data yang tersedia penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kab. Majene dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Data tahun 2016-2018 Jumlah Penyandang Cacat fisik dan mental, serta lanjut Usia potensial yang telah menerima jaminan social sebanyak 157 orang kemudian bertambah di tahun 2019 dan 2020 yang masing-masing sebanyak 158 orang dan 160 orang. Sementara jumlah PMKS di Kabupaten Majene pada tahun 2018 hingga 2019 sebanyak 26 PMKS dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 17 PMKS. Beberapa indikator capaian urusan sosial periode tahun 2018-2020 digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.70.
PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kab. Majene
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyandang Cacat fisik dan mental, serta lanjut Usia potensial yang telah menerima jaminan social (Orang)	157	157	157	158	160
2	Jumlah PMKS	26	26	26	26	17

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Majene Tahun 2021

Hal tersebut tidak lepas dari upaya pengentasan PMKS dilakukan melalui pemulangan ke daerah asal dan pelatihan PMKS usia produktif. Namun demikian, adanya jenis PMKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanan, pembinaan mental maupun pelayanan mental di UPTD terkait. Penanganan PMKS oleh Pemerintah Kabupaten Majene perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PMKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penangan PMKS. Tidak ada hambatan dalam verifikasi dan validasi PMKS, akan tetapi memang terdapat tantangan terkait dinamika kondisi sosial di masyarakat yang menyebabkan perubahan pada masing-masing kategori PMKS.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Pelaksanaan program kerja urusan tenaga kerja sebagian besar masih terfokus pada peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan pada kegiatan on the job training dan pelatihan kerja berbasis kompetensi PBK. Tingkat partisipasi angkatan kerja Majene menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 TPAK berada diangka 70,40%. Angka ini menunjukkan bahwa diantara 100 orang penduduk usia kerja terdapat sekitar 70 orang yang merupakan Angkatan kerja, Ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di tahun 2020 sebesar 4,26%, Selain itu juga tingkat kesempatan kerja pada tahun 2020 meningkat menjadi 94,93%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71.
Indikator Capaian Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan
Kab. Majene Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,91	70,48	70,48	74,09	70,40
2	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	64,91	61,60	67,01	70,67	94,93
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,27	4,94	4,62	3,43	4,26

Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Tahun 2021

Jadi dapat dimaknai bahwa tren negatif TPAK merupakan investasi angkatan kerja dalam rangka *re-training* untuk semakin meningkatkan kualitas SDM angkatan kerja di Kabupaten Majene. Selain itu, patut diperhatikan pula bahwa dalam periode 2016–2020 angka TPT bertambah menjadi sebesar 4,26% disbanding tahun 2019 yang berada di angka 3,43% dan TKK mengalami peningkatan di kisaran 14% dari tahun sebelumnya, ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam membuka kesempatan yang luas untuk bekerja di Kabupaten Majene. Sementara itu kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Majene pada tahun 2016-2020 dan data kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72.
Kondisi Urusan Ketenagakerjaan Kab. Majene Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk usia kerja	115.585	115.221	116.188	112.002	123.414
2	Angkatan kerja	75.021	75.258	82.986	82.986	84.085
3	Bekerja	71.069	71.543	79.147	79.147	80.506
4	Pengangguran/pencari kerja	3.952	3.715	3.839	3.839	3.579
5	Pengangguran terbuka/terdaftar	193	689	254	294	234

Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Tahun 2021
*Keterangan : * Data Belum Tersedia.*

Sedangkan kegiatan pembinaan ketenagakerjaan di Kabupaten Majene tahun 2020, berupa On The Job Training (OJT) dengan jumlah peserta sebanyak 106 orang yang dilaksanakan oleh BLK Kabupaten Majene, berikutnya Pelatihan Kerja Berbasis kompetensi dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang/jurusan dan terdapat 6 jurusan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan melalui BLK/KLK/MTU Majene serta

Pelatihan Ketrampilan Kerja Pembinaan Latihan dan Penyuluhan dengan jumlah peserta sebanyak 96 orang yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang ada di Kabupaten Majene maupun dari luar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73.
Data Kegiatan Pembinaan Ketenagakerjaan
Kabupaten Majene Tahun 2020

No	Kegiatan	Jumlah Peserta	Ket.
1	On The Job Training (OJT)	106 Orang	BLK Majene
2	Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi	6 Jurusan (16 Orang/Jurusan)	BLK/KLK/MTU Majene
3	Pelatihan Ketrampilan Kerja Pembinaan Latihan dan Penyuluhan	96 Orang	Lembaga Pelatihan

Sumber : Data Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Tahun 2021

2.3.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri atas Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Partisipasi angkatan kerja perempuan, Meningkatnya peran kelembagaan PUG dalam proses perencanaan dan penganggaran, Meningkatnya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO serta tercapainya Kabupaten Majene Layak Anak, Meningkatnya pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara umum, menurut data yang tersedia persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kab. Majene pada tahun 2020 sebesar 25%. Sedangkan, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kab. Majene dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan, dimana data tahun 2016 dan 2017 sebesar 53.47% dan jumlah ini mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 45,63% dan tahun 2019 dan 2020 masing-masing berada diangka 42,21%. Indicator lainnya yaitu peran kelembagaan PUG dalam proses perencanaan dan penganggaran hingga tahun 2020, sebesar 96%. Kemudian pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO serta tercapainya Kabupaten Majene Layak Anak tahun 2020 sebesar 75%. Untuk Meningkatnya pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dari tahun 2018-2020 sebesar 100% dan indicator terakhir adalah

Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2016 sebesar 100% dan mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 95,64% dan 75%. Pada tahun 2019-2020 kembali mengalami peningkatan masing-masing sebesar 80% dan 85%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74.
Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Kabupaten Majene 2016 – 2020

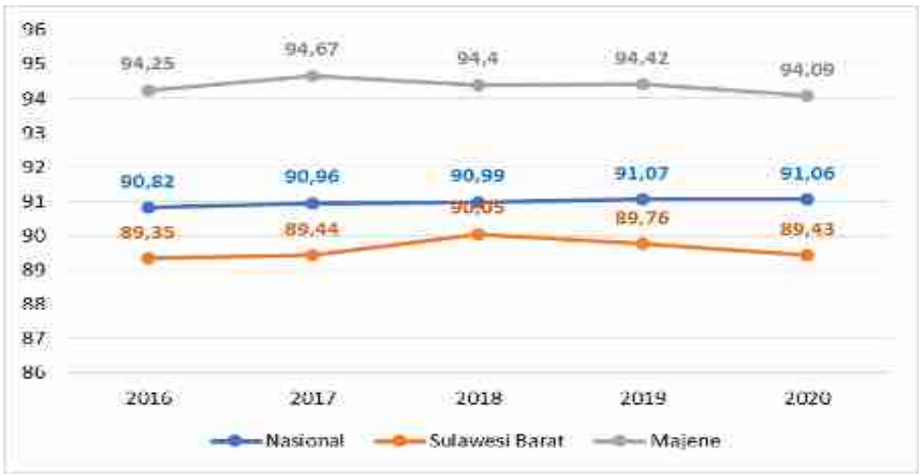
No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	7,8%	7,9%	27,46%	25%	25%
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	53,47%	53,47%	45,63%	42,21%	42,21%
3	Meningkatnya peran kelembagaan PUG dalam proses perencanaan dan penganggaran	100%	93,14%	108,33%	95%	96%
4	Meningkatnya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO serta tercapainya Kabupaten Majene Layak Anak	100%	51,30%	69,05%	50%	75%
5	Meningkatnya pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	95,12%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100%	95,64%	75%	80%	85%

Sumber Data : DPP & PA Tahun 2021

Indikator lain yang juga merupakan indicator capaian pelaksanaan kegiatan yaitu terkait Meningkatnya peran pelembagaan PUG dalam proses perencanaan dan penganggaran, Meningkatnya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan TPPO serta tercapainya Kabupaten Majene Layak Anak, Meningkatnya pelayananbagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan Kabupaten Layak Anak maka pada tahun 2019-2020 ini Kabupaten Majene memperoleh Penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang diberikan kepada Bupati Majene sebagai Inisiator Kabupaten Majene Menuju Kabupaten layak Anak dan Sebagai Penunjang Provinsi Sulawesi Barat Menuju Provinsi Layak Anak.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Majene dalam bidang pengarustamaan gender, dimana berfokus pada bagaimana mencapai kesetaraan gender dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Hal ini terkait dengan tujuan dari MDGs yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Ukuran dalam IPG adalah sama dengan IPM yang menunjukan dua indikator dampak dalam pembangunan ini memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama.

Gambar 2.36.
Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Majene 2016 – 2020

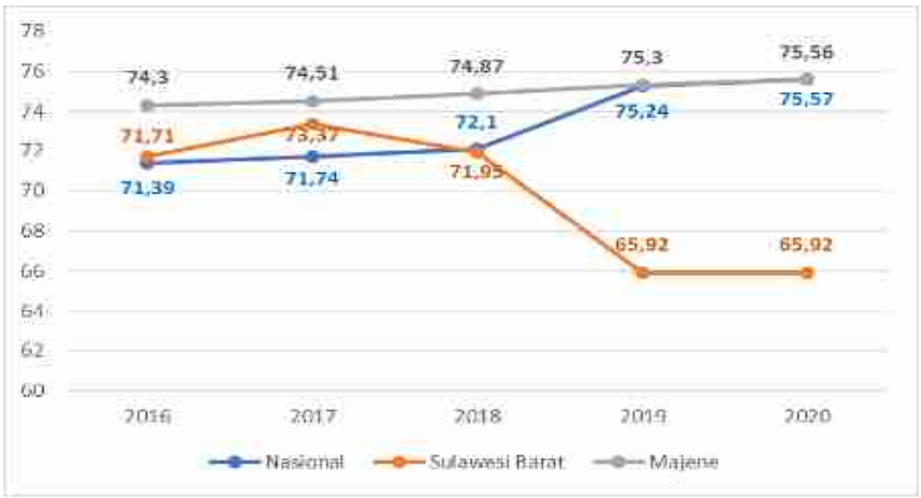


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Berdasarkan grafik capaian IPG Kabupaten Majene Tahun 2016-2020, menunjukkan lebih tinggi dibandingkan capaian tingkat Provinsi Sulawesi Barat maupun Nasional.

Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Lebih jelasnya capaian IDG Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 dapat dilihat apda grafik berikut.

Gambar 2.37.
Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Majene 2016 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Capaian IDG Kabupaten Majene pada tingkat provinsi sangat baik karena berada di atas capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sulawesi Barat, namun jika dibandingkan dengan rata-rata nasional pada tahun 2016-2019 masih berada diatas rata-rata nasional, kecuali pada tahun 2020 IDG nasional diatas dari Kabupaten Majene dengan selisih angka yang cukup sedikit. IDG. Kabupaten Majene pada tahun 2016 sebesar 74,30 mengalami peningkatan ditahun 2017 sebesar 74,51 dan kembali naik pada tahun 2018 sebesar 74,87. Pada tahun 2019-2020 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Majene berada di angka 75,30 dan 75,56.

2.3.2.3. Urusan Pangan

Ketersediaan pangan lumayan besar untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk Kabupaten Majene. Pangan yang dibutuhkan bukan hanya berasal dari sumber daya alam Kabupaten Majene, karena komoditi yang selalu tersedia yaitu kacang hijau dan ubi kayu, sementara untuk komoditi lain banyak didatangkan juga dari daerah tetangga seperti: Polewali Mandar, Mamuju, Pinrang, Sidrap dan dari daerah lain. Oleh karena itu dibutuhkan lagi peran pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan tersebut dengan program – program baru yang pro kepada rakyat. Untuk lebih jelasnya Indikator Sasaran Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Majene Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75.
Indikator Sasaran Ketersediaan Pangan Utama
Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Menurunnya daerah rawan pangan	*	*	3 Desa	1 Desa	2 Desa
2	Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan	*	*	2 Kali	1 Kali	1 Kali
3	Penyediaan pangan utama	*	*	6.273 Ton	12.964 Ton	9.540 Ton
4	Jumlah KWT yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan pekarangan	*	*	6 KWT	6 KWT	6 KWT
5	Percepatan keragaman, keamanan pangan yang berbasis pangan lokal	*	*	1 Keg.	1 Keg	1 Keg
6	Indeks kecukupan pangan (PPH konsumsi)	*	*	83,8	71,9	86,59

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Majene Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel diatas memperlihatkan bahwa daerah rawan pangan di Kabupaten Majene bertambah menjadi 2 desa pada tahun 2020, dimana pada tahun 2019 hanya terdapat 1 desa. Sementara penyediaan pangan utama di tahun 2018 sebanyak 6.273 ton dan mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 12.964 ton serta kembali mengalami kekurangan pangan ditahun 2020 menjadi 9.540 ton. Jumlah KWT yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan pekarangan dari tahun 2018-2020 adalah sebanyak 6 KWT, sementara indeks kecukupan pangan (PPH konsumsi) di tahun 2018 sebanyak 83,3%, mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 71,9% dan kembali meningkat ditahun 2020 menjadi 86,59%. Sementara data Indikator Sasaran Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Majene Tahun 2016-2017 belum tersedia.

2.3.2.4. Urusan Pertanahan

Pelaksanaan program kerja urusan pertanahan sebagian besar masih terfokus untuk mengidentifikasi dan mensertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Majene guna memastikan kepastian hukum tanah tersebut. Selain itu, program kerja urusan pertanahan juga bertujuan untuk menyediakan tanah/lahan, baik untuk kebutuhan umum ataupun untuk kebutuhan pelayanan publik/pemerintahan. Tujuan lain dari penyelenggaraan urusan pertanahan adalah memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang terjadi ditengah masyarakat melalui fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

Tabel 2.76.
Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas lahan bersertifikat	1.188.296,55	*	*	446.706,00	534.887,00
2.	Luas lahan yang seharusnya bersertifikat	2.084.197,80	*	*	5.257.012,00	5.257.012,00
3.	Prosentase total luas lahan bersertifikat	57,01%	83,96%	84.00%	8.50%	10.17%

Sumber : Data Dinas PKPP Kabupaten Majene Tahun 2021
*Keterangan : * Data Belum Tersedia*

Adapun kasus penyelesaian pertanahan di Kabupaten Majene dibagi menjadi 2 indikator utama yaitu penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesian ijin lokasi. Jumlah kasus tanah negara yang terdaftar di tahun 2018 sebanyak 8 kasus dan diselesaikan sebanyak 8 kasus dan hingga tahun 2020 terdapat 2 kasus tanah negara dan terselesaikan. Sementara jumlah ijin lokasi pada tahun 2020 sebanyak 1 lokasi dan penyelesaian izin lokasi hingga tahun 2020 mencapai 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.77.
Penyelesaian Kasus Pertanahan Kab. MajeneTahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kasus tanah Negara	5	8	8	6	6
2.	Jumlah Kasus Tanah Negara yang terdaftar	6	8	8	2	2
3.	Penyelesaikan Kasus Tanah Negara	4	8	8	2	2
4.	Jumlah Ijin Lokasi	1	1	1	1	1
5.	Permohonan Ijin Lokasi	1	1	1	1	1
6.	Penyelesaian Izin Lokasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Data Dinas PKPP Kabupaten Majene Tahun 2021

2.3.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

1. Timbulan, Pengurangan dan Penanganan Sampah

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia, karena didalam beraktifitas manusia selalu menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari. Berikut Jumlah volume sampah dan produksi sampah yang dihasilkan pada kurun waktu Tahun 2016 hingga 2020 sebagai berikut.

Tabel 2.78.
Jumlah Timbulan, Pengurangan dan Penanganan Sampah
Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	2016		2017		2018		2019		2020	
		Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%
1.	Jumlah Timbunan Sampah	24.685	-	24.685	-	25.006	-	24.294	-	24.684	-
2.	Jumlah Pengurangan Sampah	408,07	1,65	408,07	1,65	901,55	3,61	488,40	2,01	660,93	2,68
3.	Jumlah Penanganan Sampah	584,00	2,73	584,00	2,73	657,00	2,63	15.414	63,45	15.778	63,92

Sumber : Neraca Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Majene dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar 24.685 ton/tahun pada tahun 2016-2017, mengalami peningkatan ditahun 2018 menjadi 25.006 ton/tahun dan kembali menurun pada tahun 2019-2020 yang masing-masing sebesar 24.294 ton/tahun dan 24.684 ton/tahun. Sedangkan jumlah pengurangan sampah pada tahun 2016-2017 sebesar 408,07 ton/tahun atau sebesar 1,65%, meningkat di tahun 2018 sebesar 901,55 ton/tahun atau 3,61% serta kembali menurun di tahun 2019 sebesar 488,40 ton/tahun atau 2,01% dan pada tahun 2020 mencapai 660,93 ton/tahun atau sebesar 2,68%.

Timbulan sampah yang ada serta pengurangan sampah, tidak semua bisa tertangani oleh pemerintah setempat hanya berkisar 2,73% pada tahun 2016-2018. Berbeda pada tahun 2019 dan 2020, dimana jumlah penanganan sampah sebesar 15.414 atau 63,45% dan 15.778 atau sebesar 63.92%. Ini menunjukkan bahwa pada periode 2019-

2020, Tempat Pembuangan Akhir sudah mulai beroperasi di Kota Majene dan hanya menyisahkan sekitar 37% sampah yang belum mampu ditangani oleh pemerintah setempat.

Hal inilah yang menimbulkan sampah selalu nampak disudut-sudut jalan atau di tempat pembuangan sampah sementara yang terdapat dipinggir-pinggir jalan. Pemerintah Kabupaten Majene kedepan harus memikirkan pelayanan persampahan yang lebih baik lagi. Mengingat jumlah penduduk Kabupaten Majene akan bertambah yang dibarengi dengan pola konsumsi yang meningkat. Armada kebersihan bersama dengan petugas kebersihan yang dimiliki Pemerintah Daerah saat ini belum mampu menjangkau hingga pelosok daerah. Perlu ada penambahan armada baik roda empat maupun roda tiga untuk mewujudkan Kabupaten Majene yang bersih, sehat dan sejuk sehingga supremasi hukum di bidang lingkungan hidup yaitu penghargaan ADIPURA bisa diraih.

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kebersihan, pelayanan retribusi persampahan, pelayanan ijin lingkungan hingga pengaduan dari masyarakat se Kabupaten Majene terkait Lingkungan Hidup, yakni dari 75% di tahun 2019 naik menjadi 85% di tahun 2020. Sementara itu, tercapainya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 68,00% ditahun 2020 dan capaian sebesar 73,95% meningkat dari capaian di tahun sebelumnya yaitu 66,87% di tahun 2019. Target ini dapat dicapai melalui Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan dan juga ditunjang oleh Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dengan kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan.

Beberapa prestasi kembali diraih di tahun 2020 ini terkait dengan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, yaitu Penghargaan Nirwasita Tantra Tingkat Propinsi Sulawesi Barat Sebagai Penyusun Dokumen DIKPLHD Terbaik Pertama Se-Prop. Sulbar serta Pemberian Penghargaan Sebagai Sekolah Adiwiyata Propinsi untuk SDN 26 Pakkola, SDN 43 Buttu Samang, dan SMPN 5 Tande.

2. Jumlah Pencemaran Status Mutu Air

Jumlah pencemaran status mutu air di Kabupaten Majene pada tahun 2016-2020 tergolong tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, ini terlihat bahwa di tahun 2016 jumlah kawasan permukiman atau industry sebanyak 6 kawasan hingga di tahun 2020. Begitupun jumlah sumber mata air di Kabupaten Majene dari tahun 2016-2020 sebanyak 12 mata air, sedangkan persentase pencemaran status mutu air di Kabupaten Majene hingga tahun 2020 masi berada di angka 50%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.79.
Pencemaran Status Mutu Air Tahun Kab. Majene 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kawasan Permukiman atau Industri	6	6	6	6	6
2.	Sumber Mata Air	12	12	12	12	12
3.	Prosentase Pencemaran Status Mutu Air	50	50	50	50	50

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021

3. Penegakan Perda Hukum Lingkungan Hidup

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kasus lingkungan yang ada di Kabupaten Majene mulai tahun 2016 hingga tahun 2020 sebanyak 17 kasus dan dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah setempat. Melihat data tersebut, bahwa persentase penegakan hukum lingkungan mencapai 100% dimana hingga tahun 2020 jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan oleh pemerintah daerah sebanyak 4 kasus. Jumlah Penegakan Hukum Lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80.
Jumlah Penegakan Hukum Lingkungan
Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kasus Lingkungan yang Diselesaikan Pemda	2	3	4	4	4
2.	Jumlah Kasus Lingkungan yang Ada	2	3	4	4	4
3.	Prosentase Penegakan Hukum Lingkungan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021

4. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk

Jumlah TPS dan Jumlah Daya Tampung TPS yang ada di Kabupaten Majene berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Jumlah TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang bersifat sementara pada tahun 2016 berjumlah 20 unit hingga tahun 2018 dengan daya tamping sebanyak 120 m^3 dan berkurang menjadi 12 unit hingga tahun 2020 dengan daya tampung sebesar 72 m^3. Hal ini disebabkan telah beroperasinya Tempat Pembuangan Akhir yang ada di Kota Majene. Sementara itu, Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah penduduk pada tahun 2016-2018 sebesar 1:0,72 dan mengalami penurunan hingga tahun 2020 dengan rasio 1:0,41. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk harus dibarengi dengan jumlah penambahan sarana dan prasarana persampahan yang ada sehingga keberadaan TPA yang sudah beroperasi mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, selain itu perlu mengoptimalkan beberapa TPS3R yang sudah ada di Kabupaten Majene, mengingat perkembangan jumlah penduduk setiap tahunya semakin meningkat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81.
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Kab. Majene Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah TPS (unit)	20	20	20	12	12
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (m^3)	120	120	120	72	72
3.	Jumlah Penduduk	166.397	169.072	171.272	173.884	174.407
4.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah penduduk	1 : 0,72	1 : 0,71	1:0,70	1:0,41	1:0,41

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021

2.3.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil

1. Kepemilikan KTP

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan KTP, KK, Akte lahir dan Akte Nikah. Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82.
Indikator Kepemilikan KTP Kab. Majene Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk yang memiliki KTP	102.742	114.741	136.155	142.330	150.834
2	Jumlah penduduk wajib KTP (>17 Tahun atau pernah/sudah menikah)	107.731	111.415	116.731	118.825	120.456
3	Persentase Kepemilikan KTP (%)	86,30	89,04	79,50	81,85	86,48
4.	Jumlah Penduduk memiliki akte kelahiran	18.963	29.237	49.466	64.557	73.923
5.	Jumlah Penduduk	166.397	169.072	171.272	173.884	174.407
6.	Prosentase kepemilikan akte Kelahiran (%)	11,40	21,50	28,88	37,13	42,39

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Tahun 2021

Pada wilayah Kabupaten Majene tren kepemilikan KTP mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 jumlah kepemilikan berada pada kisaran 86,30% dan meningkat menjadi 89,04% ditahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 9,54% atau berada diangka 79,50% dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 81,85% dan 86,48% di tahun 2020. Sementara itu, jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana tahun 2016 persentase kepemilikan sebesar 11,40% dan meningkat di tahun 2017 sebesar 21,50%. Pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 28,88% dan hingga tahun 2019 dan 2020 persentase kepemilikan akte kelahiran masing-masing sebesar 37,13% dan 42,39%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83.
Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majene Tahun 2016 - 2020

No.	Jenis Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran & Akta Kematian	KK= 93% KTP= 90% Akte= 40%	KK= 95% KTP= 95% Akte= 70%	KK= 98% KTP= 98% Akte= 68%	KK=99% KTP=99% Akte=79%	KK=99% KTP=99% Akte=87%
2	Presentase tingkat kesesuaian data kependudukan	65%	65%	65%	65%	75%
3	Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	50%	50%	55%	75%	80%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Tahun 2021

Untuk indicator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kab. Majene terlihat bahwa Presentase tingkat kesesuaian data kependudukan setiap tahunnya mengalami penurunan, ini disebabkan oleh rendahnya kepemilikan KTP di tingkat masyarakat dan masih banyak KTP elektronik yang belum terbit. Solusi yang dilakukan adalah menerbitkan Surat Keterangan Domisili sambil menunggu pencetakan blangko KTP-el untuk masyarakat.

Dalam tempo 5 tahun terakhir (2016-2020), Presentase tingkat kesesuaian data kependudukan tahun 2016-2019 sebesar 65% dan tingkat kesesuaian bertambah menjadi 75% pada tahun 2020. Sementara Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, ini dilihat dari data di tahun 2016-2017 sebesar 50% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 55%, hingga tahun 2019 dan 2020 indeks kepuasan masyarakat mencapai 75% dan 80%.

2. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Pemutahiran data jumlah penduduk menjadi salah satu upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah, Salah satu upaya yang dilakukan adalah penetapan KTP Nasional berbasis NIK dan ketersediaan database kependudukan. Pemerintah Kabupaten Majene telah melakukan hal tersebut, sebagaimana penerapan KTP Nasional berbasis NIK dari tahun 2016-2020 dan sudah tersedianya database kependudukan di Kabupaten Majene, sebagaimana yang terlihat dari data 2016 hingga tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84.
Indikator Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majene Tahun 2021

2.3.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa

1. Jumlah PKK Aktif

Berdasarkan tabel dibawah menunjukkan bahwa lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang aktif tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (tahun 2016-2020) yaitu sebesar 91 lembaga. Pada tahun 2016-2020 keterlibatan PKK tergolong tinggi yaitu sebesar 100 %. Hal ini merupakan perubahan yang luar biasa, karena PKK menjadi tonggak utama bagi kesejahteraan masyarakat dalam skala kecil yaitu keluarga dan kondisi tersebut tidak lepas dari peran ketua PKK bersama kepala daerah beserta jajarannya untuk terus membangun masyarakat melalui lembaga PKK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85.
Jumlah PKK Aktif Kab. Majene Tahun 2016-2018

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PKK Aktif	91	91	91	91	91
2.	Jumlah PKK	91	91	91	91	91
3.	Prosentase PKK Aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

2. Jumlah Posyandu Aktif

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa posyandu yang terbentuk pada tahun 2016 sebanyak 323, kelompok dan ini mengalami penurunan sebesar 2 kelompok dibandingkan tahun sebelumnya dan hingga tahun 2020 jumlah posyandu yang aktif sebanyak 326 kelompok. Pada tahun 2016-2017 presentase posyandu yang aktif sebesar 51,39% dan mengalami penurunan di tahun 2018-2019 sebesar 2,16% atau sebesar 49,23% serta kembali mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 11,5% atau berada di angka 37,73%. Hal ini menunjukkan bahwa perlu pendampingan dan pembinaan lebih dari pihak terkait seperti Lembaga PKK, SKPD terkait seperti Dinas Kesehatan dan OPD teknis lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.86.
Jumlah Posyandu Aktif Kab. Majene Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Posyandu Aktif	323	321	325	325	326
2.	Jumlah Posyandu	166	166	160	160	123
3.	Prosentase Posyandu Aktif	51,39	51,39	49,23	49,23	37,73

Sumber : Dinas Kesehatan & RSUD Kab. Majene Tahun 2021

2.3.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Secara umum, Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Diketahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Berdasarkan grafik diatas memperlihatkan bahwa tingkat penurunan TFR Kabupaten Majene dalam kurung waktu 5 tahun terakhir cukup memuaskan. Berdasarkan gambar grafik di atas maka dapat diketahui bahwa Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Majene pada periode 2016-2020 mengalami tren penurunan.

Gambar 2.38.
Grafik Total Fertility Rate (TFR) Kab. Majene
Tahun 2016–2020



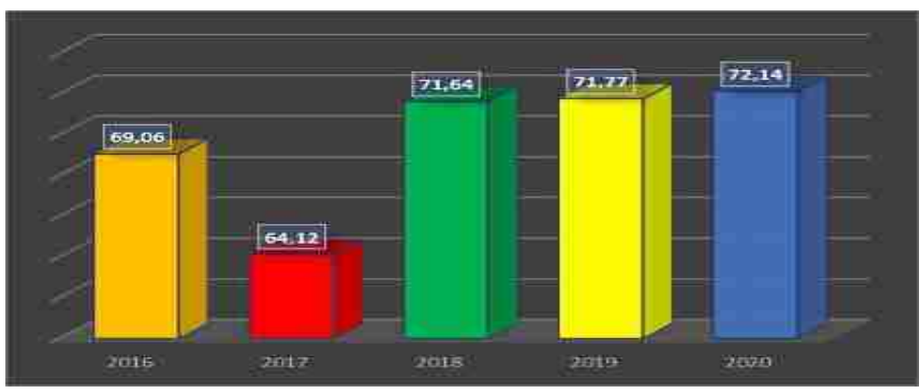
Sumber : Data Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Tahun 2021

Pada tahun 2016 menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh Wanita yang dalam masa reproduksinya sebanyak 2,82 atau 3 anak sedangkan tahun 2017 berada di angka 2,78 atau 3 anak, tahun 2018 berada di angka 2,73 atau sebanyak 3 anak dan kembali turun di tahun 2019-2020 yang masing-masing berada diangka 2,68 dan 2,64 atau sebanyak 3 anak.

Sementara itu Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif di Kabupaten Majene juga mengalami peningkatan di 3 tahun terakhir, dimana di tahun 2016 berada di angka 69,06% mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 4,96% atau berada pada angka 64,10% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 7,54% atau berada diangka 71,64% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2019 dan 2020 yang masing-masing berada diangka 71,77% dan 72,14%.

Terjadinya peningkatan tersebut berdampak pada meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hingga tahun 2020 yang berada di angka 89,17%, dimana ditahun 2016-2017 sebesar 80% dan megalami peningkatan pada tahun 2018-2019 sebesar 5% atau berada di angka 85%. Untuk lebih jelasnya Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif di Kabupaten Majene dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.39.
Contraseptive Prevalence Rate (CPR)
Kab. Majene Tahun 2016–2020



Sumber : Data Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Tahun 2021

Untuk Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Kelompok UPPKS yang aktif juga mengitu trend peningkatan setiap tahunnya, dimana di tahun 2016 berada di angka 60% dan meningkat sebesar 2% di tahun 2017 menjadi 62% dan di tahun 2018 sebesar 82,66% dan mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 menjadi 76,38%. Sedangkan pada Jumlah PIK Remaja aktif ditahun 2016 sebanyak 30 kelompok dan meningkat hingga tahun 2018 sebanyak 67 kelompok dan kembali mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 sebesar 59 kelompok. Untuk lebih jelasnya dapat diliat pada tabel berikut;

Tabel 2.87.
Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Majene Tahun 2016– 2020

No.	Jenis Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Tingkat penurunan TFR (%)	2,80	2,76	2,72	2,68	2,64
2	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (%)	69,06	64,12	71,64	71,77	72,14
3	IKM (%)	80	80	85	85	89,17
4	Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Kelompok UPPKS yang aktif (%)	60	62	82,66	76,38	76,38
5	Jumlah PIK Remaja aktif meningkat	30 Klp	61 Klp	67 Klp	59 Klp	59 Klp

Sumber : Data Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Tahun 2021

2.3.2.9. Urusan Perhubungan

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Untuk lebih jelasnya indicator perhubungan dan capaian pelaksanaan program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88.
Indikator Perhubungan (Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis) Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelabuhan Laut	3	3	3	3	3
2	Jumlah Pelabuhan Udara	-	-	-	-	-
3	Jumlah Terminal Bis	2	2	2	2	2
4	Persentase Layanan angkutan darat	53,9	60,30	63,20	63,20	70,93

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2021

Tabel 2.89.
Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No.	Indikator sasaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase angkutan umum yang laik jalan (%)	70	75	80	91,76	90
2	Persentase penurunan kecelakaan dan pelanggaran angkutan umum di jalan (Skor 1-5)	5	5	5	4	4
3	Persentase Jumlah Perijinan (Ijin Trayek, KIR) (%)	65	70	75	80	85
4	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana serta Fasilitas perhubungan (%)	68	70	72	75	78
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	0	68	75	82	86

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2021

Berdasarkan penjabaran tabel diatas, menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Majene dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masih bertahan dengan 2 (dua) unit terminal dengan persentase layanan angkutan darat dari tahun ketahun meningkat, dimana pada tahun 2016 persentase yang laik jalan sebesar 70% dan meningkat sebesar 5% di tahun 2017 atau sebesar 75%, kemudian kembali meningkat di tahun 2018 dan 2019 yang masing-masing berada diangka 80% dan 91,76%, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 1,76% atau berada di angka 90%. Sedangkan jumlah pelabuhan yang ada di Kabupaten Majene dari tahun 2016-2020 juga masih bertahan sebanyak 3 (dua) pelabuhan yaitu Pelabuhan Majene yang terletak di Kel. Banggae, Pelabuhan Passarang yang terletak di Kel. Totoli yang masing-masing terletak di Kecamatan Banggae dan Pelabuhan Palipi yang terletak di Kecamatan Sendana.

Kedua pelabuhan tersebut melayani penyebrangan antara pulau Sulawesi ke Kalimantan (Majene-Batu Licin) dengan system Toll Laut yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, kedua pelabuhan tersebut yaitu Pelabuhan Passarang yang berada di Kecamatan Banggae dan Pelabuhan Palipi yang berada di Kecamatan Sendana. Satu pelabuhan lainnya masih berada dalam wilayah Kecamatan Banggae atau Pelabuhan Banggae dengan fungsi sebagai pelabuhan local yang nanti akan diserah terimakan dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten.

2.3.2.10. Urusan Komunikasi dan Informasi

Arah kebijakan pembangunan dimaksudkan untuk Peningkatan, pemantapan, penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah serta meningkatkan profesionalisme birokrasi, Peningkatan kualitas Komunikasi dan Informasi dalam rangka memantapkan pembangunan perdesaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kota serta Peningkatan ekonomi Masyarakat melalui Komunikasi Informasi kerakyatan yang berdaya saing.

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Komunikasi Dan Informatika antara lain Belum optimalnya peralatan siar dan operasional penyiar dengan solusi yang dilakukan adalah dengan mengadakan peralatan pendukung operasional penyiaran, Ekspose kegiatan Pemerintah Kabupaten Majene masih belum maksimal sehingga diharapkan lebih sering melakukan ekspose kegiatan Pemkab Majene di media-media massa ataupun elektronik. Berikutnya Masih kurangnya keterampilan dalam mengelola website sehingga dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan ataupun sosialisasi serta belum tersedianya data statistik sektoral yang terkait dengan gambaran umum kondisi daerah kabupaten dengan solusi yang ditempuh adalah melakukan identifikasi dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan seluruh OPD terkait ketersediaan data internal OPD sebagai bahan dalam menyusun data sektor kabupaten. Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016-2030 terkait urusan Komunikasi dan Informasi dalam mendukung capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Majene, sebagai berikut :

Tabel 2.90.
Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi
Tahun 2016-2020 Kab. Majene

No.	Jenis Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa - Tercapanya Komunikasi dan Informasi	Jumlah Operator Telepon Seluler: 5 Provider	Jumlah Operator Telepon Seluler: 5 Provider	Jumlah Operator Telepon Seluler: 5 Provider	Jumlah Operator Telepon Seluler: 5 Provider	Jumlah Operator Telepon Seluler: 5 Provider

No.	Jenis Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
2.	Program Kerjasama dan Media Massa	Persentase terlayaninya hari – hari besar 100 % • Sarana PLIK 8 Buah 14 • Bimbingan KIM Kelompok8 Kec	Persentase terlayaninya hari – hari besar 100 % • Sarana PLIK 8 Buah 14 • Bimbingan KIM Kelompok8 Kec	Persentase terlayaninya hari – hari besar 100 % • Sarana PLIK 8 Buah 14 • Bimbingan KIM Kelompok8 Kec	Persentase terlayaninya hari – hari besar 100 % • Sarana PLIK 8 Buah 14 • Bimbingan KIM Kelompok8 Kec	Persentase terlayaninya hari – hari besar 100 % • Sarana PLIK 8 Buah 14 • Bimbingan KIM Kelompok8 Kec
3	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband (%)	50	69	69	69	80,29
4	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (%)	46,53	45,40	55,51	58,13	62,62

Sumber: Data Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021

Adapun Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband pada tahun 2016 sebesar 50% dan mengalami peningkatan di tahun 2017-2019 sebesar 19% atau berada diangka 69% sedangkan pada tahun 2020 berada diangka 80,29%. Sedangkan jumlah proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam memperlihatkan adanya peningkatan disetiap tahunnya, dimana individu yang menguasai/memiliki telepon genggam pada tahun 2016 sebesar 46,53%, menurun di tahun 2017 sebesar 45,40% dan mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 55,51%, kemudian hingga tahun 2019-2020 mencapai 58,13% dan 62,62%.

2.3.2.11. Urusan Koperasi & Usaha Kecil Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya.Secara makro koperasi diperlukan sebagai lembaga bagi kebutuhan agregasi ekonomi kecil dalam proses pengumpulan maupun distribusi. Koperasi di Kabupaten Majene masih akan tetap mempunyai posisi unik dalam tarikan kepentingan kabupaten, korporasi dan kelompok tanpa kecuali, hingga kemampuan masyarakat mampu berpartisipasi sesuai prinsip koperasi sudah mereka miliki karena kemampuan individu ekonomi para anggota. Untuk lebih jelasnya terkait Presentase Koperasi Aktif Kab. Majene Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91.
Presentase Koperasi Aktif Kab. Majene Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Koperasi yang dikelola dengan baik	114	83	85	98	98
2.	Jumlah Koperasi Aktif	114	98	102	109	109
3.	Persentase Koperasi Aktif (%)	100	84,70	83,33	89,91	89,91
4.	Jumlah Wirausaha baru yang tercipta	-	200	225	250	250

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & PerindustrianTahun 2021

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian Kab. Majene, memperlihatkan bahwa jumlah koperasi tahun 2016 sebanyak 114 koperasi yang aktif sebanyak 114 koperasi yang dikelola dengan baik atau sebesar 100% kemudian mengalami penurunan ditahun 2017 sebanyak 98 koperasi dan dikelola dengan baik sebanyak 83 koperasi atau sebesar 84,70% serta pada tahun 2018 jumlah koperasi kembali menurun menjadi 102 koperasi dan dikelola dengan baik sebanyak 85% dengan prosentasi keaktifan sebesar 83,33%. Pada tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami kenaikan yang masing-masing sebanyak 109 koperasi dan 98 koperasi yang dikelola dengan baik atau sebesar 89,91%. Sementara jumlah wirausaha baru di tahun 2017 sebanyak 200 dan meningkat di tahun 2019 dan 2020 sebanyak 250 wirausaha.

2. Jumlah Usaha Mikro Kecil

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Secara umum jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Majene mengalami tren peningktan, begitupn pada jumlah seluruh UKM. Berbanding lurus dengan jumlah usaha mikro dan kecil serta UKM, persentase jumlah usaha mikro kecil terhadap jumlah UKM juga mengalami tren peningkatan meskipun perubahannya terbilang kecil. Untuk lebih jelasnya jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92.
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Majene
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	1.349	5276	5326	5426	5750
2.	Jumlah Seluruh UKM	1.361	5276	5326	5426	5750
3.	Prosentase Usaha Mikro dan kecil (%)	99,11	100	100	100	100
4.	Jumlah UKM yg meningkat usahanya	-	-	50	100	324

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian Tahun 2021

Pada tahun 2016 persentasenya berada pada kisaran 99,11 % kemudian tumbuh sebesar 0,89% sampai pada tahun 2020 dengan jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 5.750 usaha. Sementara jumlah UKM yang meningkat usahanya sebanyak 50 UKM di tahun 2018 dan mengalami kenaikan sebesar 50% di tahun 2019 atau sebanyak 100 UKM dan tahun 2020 kembali meningkat sebanyak 324 UKM.

2.3.2.12. Urusan Penanaman Modal

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi diperlukan peningkatan penanaman modal atau investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kegiatan penanaman modal atau tingkat investasi yang tinggi, akan mampu meningkatkan produktivitas, kapasitas dan kualitas produksi sehngga akselerasi pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi. Sekaitan dengan hal tersebut maka Kabupaten Majene membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) pada tahun 2015, dimana sebelumnya urusan penanaman modal ditangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Sejarah pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara di bidang penanaman modal dan PTSP sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 40

Tahun 2015 tanggal 28 Agustus tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun indicator kinerja kegiatan urusan penanaman modal, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93.
Indikator Kinerja Kegiatan Urusan Penanaman Modal
Tahun Anggaran 2016-2020

No	Jenis Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jumlah investasi penanaman modal asing (PMA)	*	1	2	3	3
2	Jumlah investasi penanaman modal dalam negeri	*	20	30	30	30
3	Prosentase penerapan pelayanan satu pintu	*	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Prosentase penyelesaian izin tepat waktu	*	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Prosentase penyelesaian aduan masyarakat	*	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Data Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab, Majene Tahun 2021
*Keterangan : * Data belum tersedia*

Capaian pelaksanaan program ini adalah Jumlah investasi penanaman modal asing (PMA), Jumlah investasi penanaman modal dalam negeri, Prosentase penerapan pelayanan satu pintu, Prosentase penyelesaian izin tepat waktu, dan Prosentase penyelesaian aduan masyarakat. Jumlah PMA selama kurung waktu 5 tahun 2016-2020 sebanyak 3 PMA, dimana di tahun 2017 sebanyak 1 PMA, 2018 sebanyak 2 PMA dan 2020 sebanyak 3 PMA dengan jumlah investasi penanaman modal hingga 2020 sebanyak 30 investor. Sementara persentase penerapan pelayanan, penyelesaian izin dan penyelesaian aduan masyarakat berada di angka 100% sampai tahun 2020.

2.3.2.13. Urusan Kepemudaan & Olahraga

1. Jumlah Organisasi & Kegiatan Kepemudaan & Olahraga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan di Kab. Majene didukung oleh beberapa program pemerintah daerah dengan target organisasi pemuda dan organisasi olahraga. Beberapa prestasi juga telah dicapai, diantaranya Juara umum pada pelaksanaan Pekan Olahraga III Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 dengan perolehan medali 91 medali emas, 72 medali perak dan 68 medali perunggu, Juara

I UNHAS CUP IX 2017/Perorangan Catur Cepat 15 Menit Tingkat Indonesia Timur yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin dan Juara II UNHAS CUP IX 2017/Perorangan Catur Cepat 90 Menit Tingkat Indonesia Timur yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin. Perkembangan jumlah organisasi kepemudaan & olahraga serta jumlah kegiatannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.94.
Indikator Pemuda Olahraga (Jumlah Organisasi Pemuda)
Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah organisasi pemuda	100	100	105	110	110
2	Jumlah organisasi olahraga	21	21	21	25	25
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	5	5	6	7	7
4	Jumlah kegiatan olahraga	5	7	7	8	8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Tahun 2021

2. Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)

Pada indikator gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) jumlah gelanggang/ balai remaja yang terdapat di Kabupaten Majene pada tahun 2016 terdapat 3 (tiga) gelanggang/balai yang kemudian terjadi penambahan 1 unit di tahun 2020 sehingga menjadi 4 unit gelanggang/balai yang apabila di bandingkan dengan jumlah penduduk maka pada tahun 2016 dihasilkan angka 0,018 per 1000 jumlah penduduk dan kemudian pada tahun selanjutnya terjadi peningkatan menjadi 0,023 di tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.95.
Indikator Pemuda Olahraga (Gelanggang/Balai Remaja
(Selain Milik Swasta) di Kab. Majene Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten	3	3	3	3	4
2	Jumlah Penduduk	166.397	169.072	171.272	173.884	174.407
3	Rasio Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0,018	0,018	0,018	0,017	0,023

Sumber : Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Tahun 2021

3. Lapangan Olahraga

Jumlah lapangan olahraga yang terdapat di Kabupaten Majene pada tahun 2016 berjumlah 98 unit, yang kemudian hingga tahun 2020 hanya bertambah lapangan olahraga di area Sport Center Kab. Majene dan Gedung Olahraga yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kab. Majene. Pada indikator tidak terjadi kenaikan jumlah lapangan olah raga per 1000 penduduk dimana tahun 2016 sejumlah 0,589 per 1000 jumlah penduduk dan hingga tahun 2020 sejumlah 0,579 per 1000 jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya Indikator Pemuda Olahraga (Lapangan Olahraga) Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.96.
Indikator Pemuda Olahraga (Lapangan Olahraga)
Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lapangan olahraga di kabupaten	98	98	100	100	101
2	Jumlah penduduk	166.397	169.072	171.272	173.884	174.407
3	Rasio Lapangan olahraga	0,589	0,580	0,584	0,575	0,579

Sumber : Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Tahun 2021

2.3.2.14. Urusan Statistik

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS menangani urusan statistik dasar dan statistik khusus sedangkan statistik sektoral menjadi tanggung jawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri. Dalam pelaksanaan urusan statistik, program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah yang dilaksanakan oleh Bapeda dan ke depannya pasca penataan kelembagaan sebagai bentuk penerapan dari PP 18 Perangkat Daerah akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian & Statistik.

Capaian indicator urusan statistic dari tahun 2016-2020 adalah tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, ketersediaan Kabupaten Majene Dalam Angka yang diterbitkan setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene beserta buku PDRB kabupaten. Adapun produk statistik selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.97.
Capaian Indikator Ketersediaan Kabupaten Majene Dalam Angka
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya SIstem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik 2021

2.3.2.15. Urusan Persandian

Urusan persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Sampai dengan saat ini kinerjanya dapat diukur dengan peningkatan jumlah system informasi di perangkat daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi. Rasio layanan persandian dari tahun 2016 hingga 2020 sebesar 100%, dimana system informasi yang di perangkat daerah sudah mampu terhubung dengan perangkat daerah yang lain sesuai jalur koordinasi masing-masing. Rasio pelayanan persandian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98.
Rasio Pelayanan Persandian Kab. Majene Tahun 2015 - 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Pelayanan Persandian	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik 2021

2.3.2.16. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya secara rutin di Kab. Majene serta pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan upaya pemerintah Kab. Majene untuk mengajak masyarakatnya mengenal dan melestarikan kesenian dan kebudayaan khususnya kebudayaan asli Majene.

Pada tahun 2016 jumlah pelaksanaan event kegiatan kebudayaan sebanyak 8 kegiatan dan meningkat di tahun 2019 menjadi 10 kegiatan kebudayaan. Berbeda di tahun 2020 hanya menyisahkan 3 kegiatan

budaya, selebihnya pelaksanaan event, kegiatan/pertunjukan budaya ditiadakan yang disebabkan oleh mulai merebaknya Virus Civid-19 di Kabupaten Majene. Sementara jumlah sanggar seni dan gedung kesenian dari tahun 2016 sebanyak 26 unit dan 1 unit dan mengalami peningkatan di tahun 2020 yang masing-masing sebanyak 37 unit dan 3 unit. Sementara untuk jumlah museum dan pusat kebudayaan/taman budaya dari tahun 2016-2020 hanya terdapat 1 unit. Sementara jumlah benda cagar budaya dan bangunan cagar budaya tahun 2016 masing-masing sebanyak 1.396 unit dan 91 unit. Adapun perkembangan indikator kebudayaan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.99.
Indikator Kebudayaan (Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya)
Kab. Majene Tahun 2016 – 2020

No.	Jenis Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jumlah pelaksanaan event, kegiatan/ pertunjukan budaya	8	9	10	10	3
2	Jumlah Sanggar Kesenian	26	30	36	37	37
3	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	3	3	3
4	Jumlah Museum	1	1	1	1	1
5	Jumlah Pusat Kebudayaan/ Taman Budaya	1	1	1	1	1
6	Jumlah Benda Cagar Budaya	1.396	1.396	1.396	1.420	1.420
7	Jumlah Bangunan Cagar Budaya	91	91	91	91	91

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021

2.3.2.17. Urusan Perpustakaan

Untuk membangun layanan yang berbasis inklusi sosial, maka peran perpustakaan harus memiliki suatu informasi dan teknologi untuk membantu memberikan informasi orang di wilayah kabupaten, kecamatan maupun di wilayah pedasaan yang kurang gemar dalam membaca buku. Lebih jelasnya terkait indikator urusan perpustakaan di Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.100.
Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Majene
Tahun 2016 – 2020

Indikator Kinerja	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah koleksi buku Umum di Perpustakaan Daerah	*	13.000 eks /3.151 judul	14.405 eks /5.391 judul	22.291 eks	22.291 eks
Jumlah koleksi buku khusus di perpustakaan daerah	*	375 eks	530 eks	530 eks	530 eks

Indikator Kinerja	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah buku yang terpinjam	*	40 eks	160 eks	19.908 eks	8.547 eks
Jumlah pengunjung ke Perpustakaan Daerah	*	24.000 orang	17.000 orang	18.602 orang	8.547 eks
Persentase sekolah yang memiliki perpustakaan	*	92%	91%	91%	91%
Jumlah Anggota Perpustakaan	*	7.500 org	8.500 org	1.057 orang	1.057 orang
Jumlah Pembinaan Perpustakaan Desa/Kecamatan	*	45 kali	46 kali	46 kali	8 kali
Persentase Perpustakaan Kecamatan	*	75%	87,50%	87,50%	87,50%
Persentase Perpustakaan Desa	*	80,64 % Desa	84,94% Desa	84,94% Desa	84,94% Desa
Persentase Desa/Kelurahan yang terlayani perpustakaan keliling	*	87,75%	88,70%	88,70%	88,70%
Jumlah mobil layanan perpustakaan keliling	*	2	2	2	2

Sumber :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021
*Keterangan : * Data belum tersedia.*

Secara umum, Jumlah koleksi buku Umum di Perpustakaan Daerah di tahun 2017 terdapat 13.000 eks/3.151 judul dan meningkat di tahun 2018 yang berjumlah 14.405 eks/5.391 judul buku, kemudian pada tahun 2019-2020 kembali mengalami peningkatan koleksi yang berjumlah 22.291 eks. Selain itu, juga terdapat koleksi buku khusus yang juga mengalami peningkatan, dimana di tahun 2017 terdapat 375 eks koleksi buku dan bertambah hingga tahun 2018-2020 menjadi 530 eks buku khusus. Dari data di atas terdapat beberapa indicator yang tidak terjadi peningkatan antara lain pada ketersediaan koleksi buku perpustakaan, jumlah buku yang dipinjam dan jumlah anggota perpustakaan yang bertambah. Sementara, Jumlah Pembinaan Perpustakaan Desa/Kecamatan yang pada tahun 2020 hanya difokuskan di 8 kecamatan, dengan tingkat persentase perpustakaan kecamatan sebesar 87,50% dan persentase perpustakaan desa sebesar 84,94%. Sedangkan Persentase Desa/Kelurahan yang terlayani perpustakaan keliling sebesar 88,70% dengan jumlah kendaraan layanan perpustakaan keliling sebanyak 2 unit.

Beberapa prestasi tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Barat telah berhasil diraih, antara lain Juara II Lomba Perpustakaan Sekolah yang diwakili oleh MAN Majene, Juara II Lomba Bercerita Tk SD/MI Sederajat yang berhasil diraih oleh salah satu siswa dari SD Negeri No. 3 Tinambung Pamboang Majene dan Juara III Lomba Perpustakaan yang diraih oleh Desa Tinambung Pamboang.

2.3.2.18. Urusan Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT. Urusan kearsipan ditangani oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam urusan perpustakaan dan arsip yang menjadi tanggung jawabya dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah. Untuk lebih jelasnya terkait indicator kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101.
Indikator Kearsipan Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020

Indikator Kinerja	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pengelola Arsip yang terlatih	*	4 org	4 org	4 org	4 org
Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai standar Nasional	*	68,75%	78,12%	78,12%	78,12%
Jumlah arsip daerah yang dikelola	*	4750 arsip	4750 arsip	5.250 arsip	5.250 arsip
Tersedianya depo arsip yang memadai	*	1	1	1	1

Sumber :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021
*Keterangan : * Data belum tersedia.*

Secara umum, menurut data yang tersedia jumlah pengelolaan arsip yang terlatih di Kab. Majene dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan, dimana di tahun 2017 sampai 2020 hanya berjumlah 4 orang. Sementara itu, Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai standar Nasional pada tahun 2017 sebesar 68,75% dan meningkat menjadi 78,12% sampai tahun 2020. Untuk jumlah arsip daerah yang dikelola di tahun 2017 berjumlah 4750 arsip dan tidak mengalami penambahan hingga tahun 2018, jumlah arsip daerah yang dikelola meningkat di tahun 2019-2010 berjumlah 5.250 arsip. Begitupun depo arsip yang memadai yang hanya terdapat 1 unit di Kabupaten Majene sejak tahun 2017 sampai 2020. Urusan perpustakaan merupakan satu naungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

3.3.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan

Wilayah Kabupaten Majene memiliki panjang pantai berkisar 125 km yang membentang di seluruh kecamatan. Hal ini menjadi cerminan bahwa wilayah Kabupaten Majene memiliki potensi besar pada sektor perikanannya, apatah lagi wilayah laut Kabupaten Majene merupakan laut dalam yang menjadi surga bagi para *predator* (ikan). Hal ini di tandai dengan produksi perikanan Kabupaten Majene yang sebagian besar mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya jenis komoditi, jumlah produksi sentra sentra produksinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.102.
Jumlah Produksi Beberapa Komoditas Unggulan Perikanan di Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Komoditi	Jumlah Produksi (Ton)					Lokasi Pengembangan/Penangkpan Kecamatan
		2016	2017	2018	2019	2020	
Perikanan Tangkap							
1	Ikan Tuna	802,4	912,9	1.194,2	573	911,5	8 Kecamatan
2	Cakalang	517,5	670,5	533,05	604,7	615,9	8 Kecamatan
3	Tongkol	1.415	1.604,8	1.118,9	1,554.8	1.211,4	8 Kecamatan
4	Layang	556	105	381,8	212.7	213,5	Banggae, Banggae Timur, Sendana, Tubo Sendana, Malunda
5	Ikan Terbang	536	591	562,53	3,625.5	644,8	Banggae, Pamboang, Sendana, Tammeroddo Sendana, Tubo Sendana, Malunda, Ulumanda
6	Kakap Merah	186,00	219,2	164,02	409.3	437,7	8 Kecamatan
7	Campuran	667,00	3.176,0	3.513,13	3,625.5	3.795,2	8 Kecamatan
Perikanan Budidaya							
1	Udang Windu	22	21,3	20,43	21.68	21,1	Banggae Timur, Pamboang dan Malunda
2	Ikan Bandeng	480,61	483,23	368,11	401.92	400,4	Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tubo Sendana, Ulumanda dan Malunda
3	Ikan Mas	12,30	11,37	11,34	12.34	*	8 Kecamatan
4	Ikan Nila	48,70	49,13	41,56	46.56	*	8 Kecamatan
5	Ikan Lele	49	52,77	62,12	82.12	*	8 Kecamatan
6	Udang Vanname	230	236,02	167,21	125.45	383,6	Banggae Timur, Pamboang, Tubo Sendana, Malunda dan Ulumanda
7	Udang Putih	8	8,12	7,34	6.36	*	8 Kecamatan
8	Mujair	*	*	11,49	11.76	*	8 Kecamatan
9	Lainnya	*	*	*	*	178,6	8 Kecamatan

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Majene, 2021
*Keterangan : * Data Belum Tersedia*

Berdasarkan tabel diatas terkait komoditas unggulan untuk perikanan tangkap adalah ikan campuran dan ikan tongkol berada pada urutan pertama dan kedua. Pada tahun 2019 jumlah produksi ikan campuran sebesar 3.625,5 ton mengalami peningkatan ditahun 2020 sebesar 3.795,2 ton, sedangkan ikan tongkol mengalami penurunan produksi pada tahun 2020 sebesar 1.211,4 ton bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1.554,8 ton.

Sedangkan komoditas unggulan untuk perikanan budidaya, tidak terlalu mengalami peningkatan jumlah produksi dari tahun 2019-2020 diantaranya adalah udang windu, ikan bandeng, ikan mas, ikan nila, ikan lele, dan mujair serta hanya terdapat dua komoditas yang mengalami penurunan produksi yaitu udang windu dan ikan bandeng yang sebelumnya di tahun 2019 sebesar 21,68 ton dan 401,92 ton menurung ditahun 2020 sebesar 21,1 ton dan 400,4 ton.

2. Indikator Kinerja Sektor Perikanan

Tidak dapat dipungkiri bahwa ikan menjadi konsumsi sebagian besar penduduk di wilayah kabupaten Majene. Konsumsi ikan bagi masyarakat dapat menjadikan tubuh sehat kuat dan cerdas karena memiliki gizi yang tinggi, sumber protein yang baik, sumber mineral, penyedia lemak baik bagi tubuh dan sumber vitamin. Capaian kinerja terkait urusan kelautan dan perikanan dalam periode 4 tahun terakhir (2017-2020) memperlihatkan bahwa jumlah produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu tersebut terus meningkat, dimana pada tahun 2017 jumlah produksi perikanan tangkap mencapai 7.279,80 ton dan meningkat di tahun 2018 sampai 2020 yang masing-masing mencapai 7.361,8 ton, 7.461,8 ton dan 7.830 ton.

Sedangkan jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2017 sebesar 861,94 ton dan mengalami penurunan jumlah produksi di tahun 2018 menjadi 689,60 ton. Pada tahun 2019 dan 2020 jumlah produksi kembali meningkat menjadi 789,60 ton dan 983,7 ton. Selain dari capaian indikator jumlah produksi tersebut indicator untuk konsumsi ikan mengalami penurunan dari tahun 2017-2019, dimana

pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 43,60 kg/orang/pertahun dan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 41,60 kg/orang/ pertahun dan pada tahun 2020 kembali mengalami peninhgkatan menjadi 42,11 kg/orang/pertahun.

Tabel 2.103.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2017 – 2020

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	7.279,80	7.361,8	7,461.8	7.830
2	Jumlah Produksi Perikanan budidaya Ton	861,94	689,60	789.60	983,7
3	Konsumsi Ikan (Kg/Orang/pertahun)	43,60	43,60	41.60	42,11

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

3.3.3.2. Urusan Pariwisata

Kepariwisataan merupakan kegaiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan yang khas, baik pemandangan indah, peninggalan sejarah maupun lingkungan yang khas. Biasanya keadaan seperti ini akan menarik minat pengunjung untuk datang menikmatinya. Untuk lebih jelasnya indicator pariwisata Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.104.
Indikator Pariwisata 2017-2020 Kabupaten Majene

No	Indikator Kinerja	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Pengembangan Destinasi Wisata	1	1	2	3
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	53.111	121.967	148.571	110.766
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	101	146	159	7
4	Jumlah Kelompok sadar wisata yang terbentuk/terbina.	18	20	21	21
5	Jumlah event kepariwisataan yang dilaksanakan	3 Event	3 Event	3 Event	5 Event

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021

Kabupaten Majene selama 4 (empat) tahun terakhir (2017-2020) dikunjungi wisatawan sebanyak 434.828 orang yang terbagi kedalam wisata domestic sebanyak 434.415 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 413 orang. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan terlihat dari tahun 2017-2019, dimana pada tahun 2017 junlah wisatawan domestic sebanyak 53.111 dan wisatwan mancanegara sebanyak 101

orang, mengalami peningkatan di tahun 2018 dan 2019, dimana jumlah domestic sebanyak 121.967 orang dan 148.571 orang sedangkan wisatwan mancanegara sebanyak 146 orang dan 159 orang. Berbeda pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisata mengalami penurunan yang cukup drastic, dimana jumlah wisatawan domestic sebanyak 110.766 orang dan wisatawan mancanegara hanya 7 orang. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2020, disebabkan oleh mulai merebaknya Virus Covid-19 yang mulai menyebar di Kabupaten Majene sehingga sangat berpengaruh terhadap kunjungan ke obyek-obyek pariwisata yang ada.

Sementara keikutsertaan Kabupaten Majene pada event kepariwisataan hingga tahun 2020 sebanyak 5 event. Sementara pengembangan destinasi wisata yang ada di kabupaten majene mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017-2018 hanya terdapat 1 destinasi wisata yang akan dikembangkan sehingga pada tahun 2019 terdapat penambahan 1 destinasi wisata yang akan dikembangkan dan tahun 2020 terdapat 3 destinasi wisata yang dikembangkan. Selain dengan pengembangan destinasi wisata tersebut juga didukung oleh kelompok sadar wisata yang terbentuk dimana di tahun 2017 terdapat 18 kelompok dan meningkat menjadi 20 kelompok di tahun 2018 serta 21 kelompok di tahun 2019 dan 2020.

3.3.3.3. Urusan Pertanian

1. Produktifitas Tanaman Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal

Swasembada pangan menjadi program pembangunan pertanian yang strategis karena memiliki dampak luas. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, mutu bahan pangan yang baik, serta nilai gizi yang tinggi memiliki dampak luas pada perekonomian dan mutu sumber daya manusia. Berdasarkan tabel dibawah, secara umum rata-rata produktivitas tanaman padi sawah mengalami fluktuasi, baik dalam luas lahan panen maupun jumlah produksinya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana pada tahun 2016 produktivitasnya 10.943 ton dan pada tahun 2017 Mengalami peningkatan sebesar 12.281 ton, kemudian kembali menurun pada tahun 2018 sebesar 10.277 ton kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun

2019 sebesar 15.035 ton dan kembali menurun di tahun 2020 sebesar 13.118 ton. Produktifitas Tanaman Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal lainnya di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.105.
Produktivitas dan Luas Lahan Tanaman Padi dan Bahan Pangan Pokok Lokal Lainnya Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)					Luas Lahan (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ubi Kayu	5.816	5.398	5.056	5.339	7.712	334	310	288	223	305
2.	Ubu Jalar	840	1.004	945	960	1.876	70	87	80	94	167
3.	Jagung	4.299	7.313	11.740	14.904	35.004	1.630	1.152	1.812	4.861	3.952
4.	Kacang Hijau	72	58	53	79	180	75	59	54	78	187
5.	Kacang Tanah				70	110				65	108
6.	Padi Ladang	9.366	9.831	12.561	15.672	15.254	2.660	2.792	3.579	14.556	4.701
7.	Padi Sawah	10.943	12.281	10.277	14.011	13.118	2.201	2.442	2.049	2.379	2.199
8.	Kedelai	*	*	335	987	90	*	*	837	2.677	251

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Majene, 2021
*Keterangan : * Data Belum Tersedia*

Sama halnya dengan tanaman ubi kayu pada tahun 2016 jumlah produksi sebesar 5.816 ton mengalami penurunan jumlah produksi pada tahun 2017 sebesar 5.398 ton. Kemudian pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 5.056 ton per hektar dan pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan produksi yang masing-masing sebesar 5.339 ton dan 7.712 ton. Untuk jenis ubi jalar pada tahun 2016 jumlah produksinya sebesar 840 ton dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 1.004 ton perhektar.

Penurunan produksi terjadi di tahun 2018 menjadi 945 ton, dan kembali mengalami peningkatan produktivitas pada tahun 2019-2020 yang masing-masing sebesar 960 ton dan 1.876 ton. Adapun seperti tanaman kacang hijau juga mengalami penurunan produktivitas sama halnya dengan komoditas bahan pangan lainnya, pada tahun 2016 jumlah produksi sebesar 72 ton dan menurun di tahun 2017 menjadi 58 ton per hektar, kembali mengalami penurunan di tahun 2018 dengan jumlah produksi hanya sebesar 53 ton. Pada tahun 2019-2020 jumlah produksi kembali meningkat sebesar 79 ton di tahun 2019 dan 180 ton pada tahun 2020.

Berbeda dengan komoditas-komoditas bahan pangan lokal di atas, tanaman padi ladang dan jagung justru mengalami peningkatan, di mana untuk jagung pada tahun 2016 produktivitasnya sebesar 4.299 ton, meningkat di tahun 2017 yang mencapai 7.313 ton dan kembali meningkat sebesar 11.740 ton per hektar di tahun 2018 dan 14.904 ton pada tahun 2019. Peningkatan produksi terbesar terjadi di tahun 2020 yang mampu memproduksi sebesar 35.004 ton per hektar. Sementara untuk padi ladang di tahun 2016 sebesar 9.366 ton, meningkat menjadi 9.831 ton di tahun 2017, dan kembali meningkat di tahun 2018 dan 2019 yang masing-masing sebesar 12.561 ton dan 15.672 ton, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 dengan jumlah produksi mencapai 15.254 ton per hektar.

2. Produktifitas Tanaman Perkebunan

Produktivitas tanaman perkebunan adalah suatu nilai yang menunjukkan rata-rata hasil produksi per komoditi per satuan luas tanaman perkebunan (karet; kelapa; kelapa sawit; kopi; teh; tebu; cengkeh; tembakau; dll) pada periode satu tahun laporan. Secara umum rata-rata produktivitas tanaman perkebunan mengalami fluktuasi di beberapa sektor komoditas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) di Kabupaten Majene, dimana perkebunan Kakao pada tahun 2016-2017 dengan jumlah produksi sebesar 7.428 ton per hektar, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menjadi 8.128 ton per hektar. Kelapa dalam dengan jumlah produksinya pada tahun 2016-2017 sebesar 7.903 ton per hektar dan mengalami peningkatan pada tahun 2018-2019 sebesar 8.167 ton per hektar, namun pada tahun 2020 jumlah produksinya mengalami penurunan di angka 8.113 ton per hektar.

Untuk kelapa hibrida jumlah produksinya pada tahun 2016 sebesar 526,3 ton per hektar, meningkat di tahun 2017 sebesar 537 ton per hektar dan mengalami penurunan produksi di tahun 2018-2019 sebesar 526 ton per hektar serta kembali menurun di tahun 2020 sebesar 510 ton per hektar. Kemudian kemiri dengan jumlah produksinya pada tahun 2016 sebesar 2.630,8 ton per hektar dan tidak mengalami peningkatan pada tahun 2017-2019 dengan jumlah produksi sebesar 2.630 ton per hektar, mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 2.655 ton per hektar.

Tabel. 2.106.
Produktivitas Tanaman Perkebunan Di Kabupaten Majene
Tahun 2016-2020

No	Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)					Luas Lahan (Ha)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kakao	7.428	7.428	8.128	8.128	8.128	8.198,5	13.168	13.171	11.159	13.759
2.	Kelapa Dalam	7.903	7.903	8.167	8.167	8.113	6.501,0	8.273	8.273	8.273	8.318
3.	Kelapa Hybrida	526,3	537	526	526	510	652,43	757	757	757	717
4.	Kemiri	2.630,8	2.630,75	2.630	2.630	2.655	2.631	2.369	2.369	2.369	2.369
5.	Cengkeh	327,5	328	418	517	470	652	865,0	857	857	1.174
6.	Kopi Robusta	173,5	216	174	176	177	607	607	607	707	707
7	Kopi Arabika	42	60	60	42	42	387,5	388	388	369	369
8	Pala	5,4	5	5	5	5	49,0	49	49	49	87
9	Lada	4,8	5	5	5	5	17,5	18	18	18	19
10	Jambu Mete	60,9	61	61	36	36	456,5	304,0	267	267	267
11	Kapok	7,9	8	8	8	8	80,0	53,0	80	80	79
12	Vanili	1,5	2	2	1,5	0,75	29,5	8,0	20	20	20
13	Aren	14,8	15	15	15	15	117,4	66,0	116	117	117
14	Sagu	12,7	13	13	15	15	89,2	39	89	89	36
15	Nilam	9	9	9	60	60	17,5	10,0	18	18	18

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Majene, 2021

Cengkeh, komoditas ini selalu mengalami peningkatan produktifitas dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2016-2019) dan hanya terjadi penurunan produksi di tahun 2020, dimana pada tahun 2016 dengan jumlah produksi sebesar 327,5 ton per hektar, meningkat di tahun 2017 dengan jumlah produksi sebesar 328 ton per hektar, kemudian naik menjadi 418 ton di tahun 2018, mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2019 sebesar 517 ton per hektar, dan di tahun 2020 terjadi penurunan produksi sebesar 470 ton per hektar. Kemudian kopi arabika jumlah produksinya nya sebesar 42 ton per hektar di tahun 2016, meningkat menjadi 60 ton per hektar di tahun 2017-2018 dan kembali berada pada jumlah produksi sebesar 42 ton per hektar pada tahun 2019-2020.

Kopi robusta sebesar 173,5 ton per hektar di tahun 2016, meningkat di tahun 2017 sebesar 216 ton per hektar dan terjadi penurunan jumlah produksi hingga tahun 2020 yang masing-masing berada di angka 174 ton per hektar di tahun 2018, 176 ton per hektar di tahun 2019 dan 177 ton per hektar di tahun 2020. Sementara

komuditas lainnya berupa pala, lada, jambu mete, kapok, vanili, aren, sagu dan nilam tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dari tahun 2016-2020, ini dilihat dari data perkembangan jumlah produksi masing-masing jenis disetiap tahunnya.

3. Sektor Peternakan

Secara umum indicator pada komoditi peternakan di Kabupaten Majene terdiri atas sapi, kerbau, kuda, kambing, itik, itik manila, ayam buras, ayam potong, dana yam petelur. Secara umum indikator pada komoditi peternakan di Kabupaten Majene mengalami tren peningkatan selama 5 tahun terakhir (2016-2020) berdasarkan pada penyajian tabel sebagai berikut.

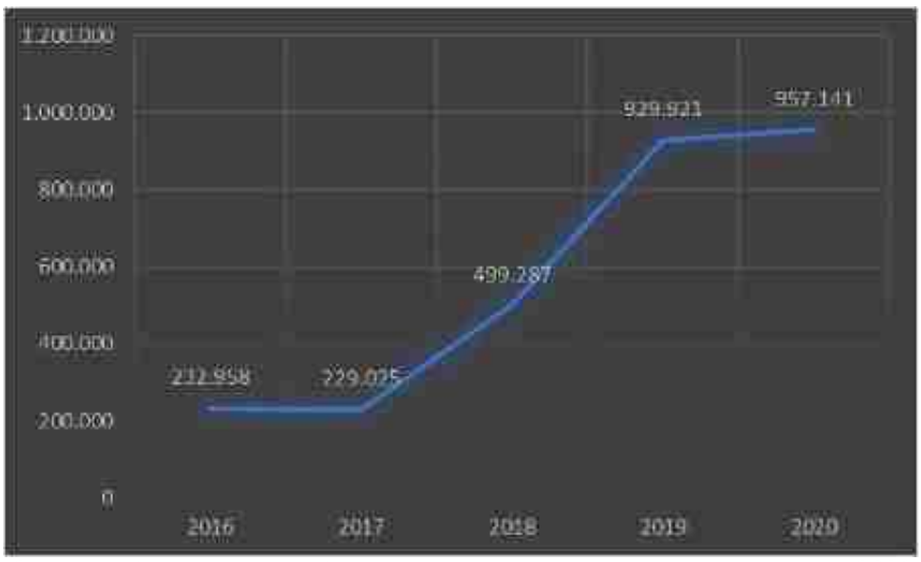
Tabel. 2.107.
Jumlah Produksi Komoditi Peternakan
Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Komoditas	Jumlah Produksi (Ekor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sapi	17.022	17.731	17.753	18.144	18.508
2.	Kerbau	156	232	168	172	175
3.	Kuda	193	185	189	193	197
4.	Kambing	67.234	68.199	69.222	70.953	72.513
5.	Itik	13.337	13.738	14.040	14.433	14.751
6.	Itik Manila	2.346	2.563	2.619	2.685	2.744
7.	Ayam Buras	74.555	76.270	77.948	191.105	194.927
8.	Ayam Potong	56.350	43.507	292.467	596.614	608.546
9.	Ayam Petelur	1.765	6.600	24.881	35.622	44.780

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Majene, 2021

Tren populasi pada semua jenis hewan ternak mengalami penurunan jumlah produksi, dimana jumlah produksi ternak di tahun 2016 sebesar 232.958 ekor dan berkurang di tahun 2017 sebanyak 3.933 ekor atau sebesar 229.025 ekor. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah produksi ternak sebesar 270.262 ekor atau sebesar 499.287 ekor, tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup besar dimana jumlah populasi ternak bertambah 430.634 ekor atau sebanyak 929.921 ekor serta di tahun 2020 bertambah sebanyak 27.220 ekor atau sebesar 957.141 ekor.

Gambar 2.40.
Grafik Perkembangan Jumlah Produksi Peternakan
Kab. Majene Tahun 2016–2020



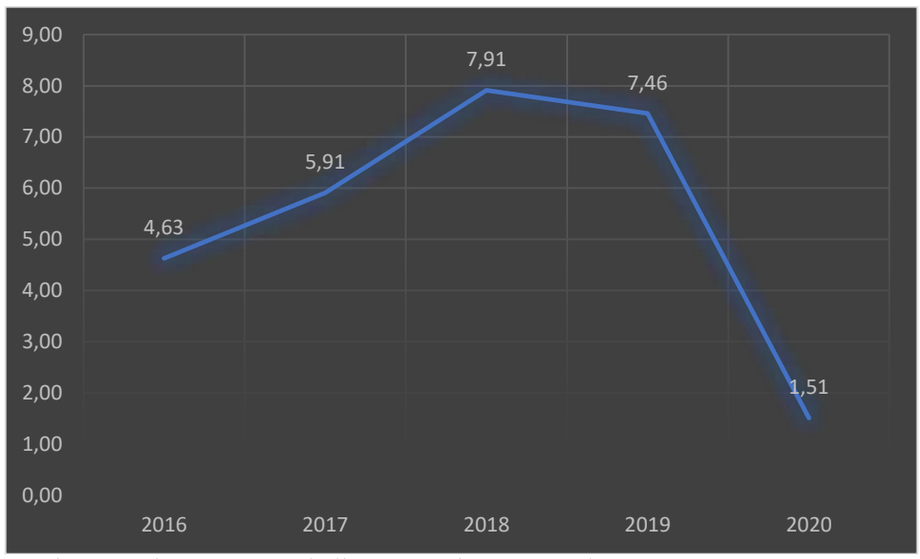
Sumber : *Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Majene, 2021*

Selama periode 2016–2020 ternak yang populasinya terbanyak setiap tahunnya dibandingkan ternak lainnya yaitu kambing dan ayam potong dana ayam buras. Populasi ternak kambing sebanyak 72.513 ekor, ayam potong/ayam pedaging sebanyak 608.546 ekor ayam buras sebanyak 194.927 ekor di tahun 2020. Sedangkan, jenis ternak yang populasinya paling sedikit setiap tahunnya yaitu kerbau dengan jumlah populasi hanya 175 ekor di tahun 2020, disusul jenis ternak kuda yang populasinya sebesar 197 ekor.

4. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub-kategori, disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009. Berikut uraian perkembangan di setiap lapangan usaha periode 2016-2020 di Kabupaten Majene.

Gambar 2.41.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab. Majene Tahun 2016-2020



Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene, 2021*

Kategori ini mencakup Sub-kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, Sub-kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sub-kategori Perikanan. Sub-kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Perkebunan Semusim, Tanaman Hortikultura Tahunan, Perkebunan Tahunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Majene tahun 2020 secara nominal mencapai 1,89 triliun rupiah atau sekitar 37,94 persen. Kategori dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Majene ini cenderung stabil dalam lima tahun terakhir. Adapun pertumbuhannya, cenderung naik selama 2016-2020. Pada kondisi pandemi Covid-19 tahun 2020, kategori ini pun mampu menyumbang secara konsisten. Di dalam kategori ini sendiri, sub-kategori perikanan Majene yang menyumbang kontribusi terbesar yakni 20,82 persen kemudian disusul oleh tanaman pangan sebesar 16,95 persen. Namun, pada tahun 2020 angka pertumbuhan kategori tetap menurun seperti kategori lain pada umumnya. Pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan di kategori

ini turun sebanyak 5,95 persen menyisakan hanya 1,51 persen. Angka laju pertumbuhan tertinggi selama 2016-2020 sebesar 7,91 persen terjadi pada tahun 2018. Sepanjang tahun 2018, terjadi peningkatan hasil produksi terutama pada sub kategori tanaman pangan dan perikanan.

3.3.3.4. Urusan Kehutanan

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis adalah upaya memperbaiki kawasan hutan yang rusak. Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8114/KEMENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 terkait kawasan hutan Kabupaten Majene seluas 52,758 Ha atau 58,05% dari luas keseluruhan Kabupaten Majene yang terbagi kedalam Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 45,173 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 7.570 Ha, dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 15 Ha.

Untuk capaian di urusan kehutanan dalam 4 tahun terakhir di Kabupaten Majene tidak ada pelaksanaan program kegiatan terkait urusan kehutanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, selain itu kewenangan urusan kehutanan sejak tahun 2017 dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015 telah dilakukan dengan capain berturut-turut 34 % pada tahun 2013, 39 % pada tahun 2014 dan 31 % pada tahun 2015 sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 39,69%. Upaya yang dilakukan dalam menurunkan angka kerusakan kawasan hutan telah terbukti, dimana setiap tahun angkanya mengalami penurunan yakni 28,02 tahun 2013, 24,08 tahun 2014 dan 23,9 tahun 2015 dan turun lagi pada tahun 2016 yang menyentuh angka 23,79.

Selain itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait alokasi kawasan hutan untuk penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) pada tahun 2018-2019 sesuai dengan persetujuan pola penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor 602.01/5595/SET tanggal 28 Desember 2018 tentang Rekomendasi

Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Kabupaten Majene dan berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananan Nomor S.512/Menlhk/Setjen/Pla.0/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Persetujuan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH), dimana perubahan kawasan hutan seluas 300,32 ha dengan rincian perubahan batas kawasan hutan seluas 113,65 Ha dan perhutanan social seluas 186,67 ha.

Arahan lokasi kawasan hutan untuk penyediaan TORA berdasarkan kriteria non eksisting/non inventarisasi dan verifikasi berupa alokasi tora dari 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang tidak produktif, program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru sedangkan eksisting/ inventarisasi dan verifikasi PPTKH berupa permukiman penduduk, permukiman tranmigrasi beserta fasos dan fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat dan pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat.

Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan tata batas TORA hasil inventarisasi Kabupaten Majene berada di Kecamatan Malunda seluas 47,88 Ha yang terbagi kedalam 4 desa, Kecamatan Ulumanda seluas 25,67 Ha yang terbagi kedalam 5 desa, Kecamatan Tubo Sendana seluas 24,89 Ha yang terbagi kedalam 2 desa, Kecamatan Tammerodo Sendana seluas 9,59 Ha yang terbagi kedalam 3 desa, Kecamatan Sendana seluas 0,77 ha hanya terdapat 1 desa, dan Kecamatan Pamboang seluas 9,21 Ha yang terbagi kedalam 3 desa.

3.3.3.5. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Areal pertambangan memang menjanjikan untuk dikelolah, namun untuk mengelolah itu ada beberapa yang harus memperhatikan, termasuk didalamnya adalah ijin pertambangan. Menurut data 3 (tiga) tahun terakhir, masih banyak pertambangan yang ilegal, dimana masing-masing pada tahun 2013 hanya 40% penambang liar yang ditertibkan, pada tahun 2014 ditertibkan 5,57 % dan pada tahun 2015 kembali ditertibkan 20,23 %. Sementara itu, Berbeda halnya pada Sektor Petanian, Sektor

Pertambangan Justru mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 bergerak dari 2,21 % dan menjadi 2,74 pada tahun 2014. Sedangkan untuk tahun 2016 data yang diterima angka sama pada tahun 2015.

Sama halnya di sector kehutanan, sector energy dan sumber daya mineral dalam 2 tahun terakhir di Kabupaten Majene tidak ada pelaksanaan program kegiatan teknis terkait urusan energy dan sumber daya mineral yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, selain itu kewenangan urusan energy dan sumber daya mineral sejak tahun 2017 dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Akan tetapi Pelaksanaan Program Kerja urusan Energi dan Sumber Daya pada tahun 2017 dan 2018 terkait dengan program pengelolaan potensi energi dan sumber daya mineral melalui kegiatan pengelolaan informasi geologi dan potensi panas bumi. Di Tahun 2017 capaian pelaksanaan program/kegiatan urusan energi dan sumber daya mineral terhadap pelaksanaan program terlihat pada beberapa kegiatan yang mengarah pada pembinaan dan pengawasan bidang usaha kelistrikan di Kab. Majene. Dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan di tahun 2017 tersisa 6 desa yang belum terjangkau aliran listrik baik melalui jaringan PLN, maupun pembangkit listrik lokal.

Secara keseluruhan kontribusi di sector energy dan sumber daya mineral terhadap PDRB sebesar 2,60% pada tahun 2016 atau sebesar Rp. 77.674,43, mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 2,61% atau sebesar Rp. 83.129,97 dan ditahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 2,66% atau sebesar Rp. 89.717,42 dan tidak mengalami peningkatan di tahun 2019 atau sebesar 2,66% atau sebesar Rp. 95.009,26. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 2,57%.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha berdasarkan Kategori Pertambangan dan Penggalian yang dirinci menjadi 4 sub-kategori, antara lain: sub-kategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi, sub-kategori Pertambangan Batubara dan Lignit, sub lapangan usaha Pertambangan Bijih Logam, dan sub-kategori Pertambangan dan Penggalian lainnya. Di Majene hanya ada sub-kategori yang terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat diliat pada gambar berikut.

Gambar 2.42.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Pertambanhan dan Penggalian
Kab. Majene Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene, 2021

Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap pembentukan PDRB Majene relatif rendah selama 5 (lima) tahun terakhir. Kontribusinya hanya sebesar 105,06 milyar rupiah atau sekitar 2,76 persen dari total pada tahun 2016 dan menurun menjadi 128.17 milyar rupiah atau sekitar 2,57 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan Kategori ini melambat pada tahun 2019, dan terus menjadi negatif pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukan tidak adanya pertumbuhan produksi Pertambahangan dan Penggalian. Di Kabupaten Majene, kategori ini sendiri hanya berasal dari pertambangan dan penggalian lainnya seperti penambangan batu kali untuk keperluan konstruksi. Penurunan produks di tahun 2020 terjadi karena kurangnya permintaan di masa pandemic global yaitu Covid-19.

3.3.3.6. Urusan Perdagangan

Untuk menggambarkan aspek pelayanan urusan pemerintahan pada urusan perdagangan, maka dapat ditunjukan oleh indicator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB. Sektor perdagangan merupakan sektor strategis yang menjadi salah satu penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Majene. Sektor Perdagangan sangat erat kaitannya dengan sektor Pertanian dan sektor Industri yang beperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor, berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam distribusi barang dagangan. Kategori ini juga mencakup perbaikan mobil dan sepeda motor. Capaian kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.43.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan
Kab. Majene Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene, 2021

Selama 4 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 11 persen. Pada tahun 2020, kontribusi kategori ini menurun di 547,04 miliar rupiah atau sekitar 10,95 persen. Namun, angka ini masih menjadikan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi kontributor terbesar kedua setelah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Secara umum, pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berfluktuasi selama periode 2016-2019. Berada pada kisaran nilai 6 persen sampai dengan 5,3 persen. Namun, pada 2020, laju pertumbuhan kategori ini bernilai negatif. Hal ini menunjukan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya produksi di kategori ini secara drastis.

Tabel. 2.108.
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya
Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana (Unit)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasar/Market	26	26	26	27	27
2.	Toko/Store	17	17	17	17	17
3.	Kios	*	*	*	*	*
4.	Warung/Rumah Makan	116	116	116	73	73
Jumlah		**159**	**159**	**159**	**117**	**117**

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene, 2021
*Keterangan : * Data Belum Tersedia.*

Selain itu jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya di Kabupaten Majene tahun 2016-2020, yang dirilis oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Majene dalam data Majene Dalam Angka Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, memperlihatkan bahwa dari tahun 2016-2018 jumlah sarana perdagangan jenis Pasar/Market sebanyak 26 unit dan terjadi penambahan di tahun 2019-2020 sebanyak 1 unit atau mencapai 27 unit. Sedangkan jenis Toko/Store dari tahun 2017-2020 sebanyak 17 unit. Jenis sarana berupa warung/rumah makan dari tahun 2016-218 sebanyak 116 unit dan mengalami penurunan jumlah sarana di tahun 2019-2020 menjadi 73 unit. Untuk jenis sarana perdagangan berupa Kios data belum tersedia.

3.3.3.7. Urusan Perindustrian

Secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dari 190,58 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 261,47 miliar rupiah atau sekitar 5,24 persen terhadap PDRB Majene pada tahun 2020. Kontribusinya bertambah sebesar 0.23 persen selama tahun terakhir. Sedangkan laju pertumbuhan sub-kategori ini cenderung melambat dengan kontraksi sepanjang periode. Pertumbuhan Industri Pengolahan yang sempat melesat sebesar 9,82 persen di tahun 2017 kembali melambat dengan pertumbuhan yang hanya mencapai 5,91 persen di tahun 2019. Kondisi pandemic covid-19 di tahun 2020 memperparah keadaan Industri Pengolahan sehingga hanya mampu tumbuh sebesar 1,65 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa Industri pengolahan di Majene yang harus terpaksa berhenti sementara selama masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.44.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perindustrian
Kab. Majene Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene, 2021

3.3.3.8. Urusan Transmigrasi

Pembangunan penempatan di kawasan transmigrasi di Kabupaten Majene. Sejak program tersebut hadir, salah satu daerah yang menjadi lokus kegiatan yang berada di Dusun Kolehalang Kecamatan Ulumanda. Pada tahun 2011 dan 2013 sebanyak 250 KK di tempatkan diwilayah tersebut. Lalu di tahun 2018 ini kembali di usulkan menjadi 300 KK sesuai dengan daya tampung di SP2 Tama'jannang. Dalam perjalanannya, saat itu pemerintah baru mampu merealisasikan sebanyak 25 KK. Namun Berkat dukungan kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), infrastruktur yang di bangun oleh SPI telah rampung 100%.

Untuk mendukung kawasan SP2 Tama'jannang maka Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana, dalam hal melakukan kegiatan peningkatan jalan poros pengubung Tandeallo-Ulumanda serta pembangunan jembatan Sungai Maitti di Kecamatan Ulumanda di tahun 2018 dan direncakanan hingga tahun 2019-2020. Pembangunan Infrastruktur merupakan hal yang vital, bukan hanya menjadi sarana penunjang aktifitas sosial masyarakat tapi juga mendukung kegiatan perekonomian masyarakat setempat.

2.3.4. Fokus Layanan Urusan Pendukung Pemerintahan

2.3.4.1. Sekretariat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan merupakan fungsi pendukung pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah menyelenggarakan kewenangan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, kerjasama, pembinaan administrasi, organisasi dan tatalakasana serta menyusun kebijkan dan mengkoordinsikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Majene terdiri atas 12 Bagian. Pencapaian indicator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel. 2.109.
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya (%)	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	60	65	75	75	75
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai)	3,40	3,45	3,47	3,50	3,51
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) (Nilai)	CC	CC	B	B	B
Persentase Belanja Pegawai (%)	48,21	39,86	39,86	40,13	42,73

Sumber : Realisasi pada RPJMD Perubahan Kabupaten Majene 2016-2021, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2016-2020 dan BPS Kabupaten Majene 2017-2021.

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa terdapat 5 (lima) indicator kinerja Sekretariat Daerah. Pertama, Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dari tahun 2016-2020 mencapai 100%. Kedua, Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan pada tahun 2016-2018 dimana pada tahun 2016 sebesar 60%, meningkat pada tahun 2017-2018 yang masing-masing berada diangka 65% dan 75%. Sedangkan pada tahun 2019-2020 Indeks Kepuasan Masyarakat masih berada diangka 75%.

Ketiga, Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan yang sangat baik, dimana pada tahun 2016 berada diangka 3,40 (sangat tinggi), kemudian meningkat di tahun 2017 sebesar 0,05 atau berada diangka 3,45 (sangat tinggi). Tahun 2018 dan 2019 kembali meningkat diangka 3,47 dan 3,50 dengan kategori masih (sangat tinggi) dan pada tahun 2020 berada diangka 3,51 dengan kategori sangat tinggi). Keempat, sedangkan pada Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) menunjukkan trend yang baik, dimana pada tahun 2016-2017 dengan predikat CC meningkat pada tahun 2018-2020 dengan predikat B. Kelima, Persentase Belanja Pegawai secara keseluruhan di Pemerintahan Kabupaten Majene dari tahun 2016-2020 berada diangka 40,13% pada tahun 2019 dan merupakan persentase terendah dan 48,21% ditahun 2016 yang merupakan persentase belanja pegawai tertinggi selama kurung waktu lima tahun terakhir.

Seluruh program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Urusan Pemerintahan terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendukung Urusan Pemerintahan antara lain:

1. Meningkatnya persentase pemenuhan pelayanan kedinasan KDH/WKDH melalui output Kegiatan Optimalisasi Hubungan antar KDH dengan masyarakat, Kunjungan kerja pejabat negara/ departement/Lembaga pemerintah non departement/luar negeri, Koordinasi antar pejabat pemerintah daerah dengan Bupati, Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah dan Hubungan kerja dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
2. Meningkatnya persentase pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja melalui output kegiatan penyusunan laporan inventarisasi temuan pengawasan, nilai temuan pengawasan yang dikembalikan kedaerah, laporan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, Laporan data tindak lanjut pengawasan keuangan daerah, laporan EKKPD, jumlah kebijakan kepala daerah yang tertata, jumlah kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan, jumlah kegiatan kedisiplinan ASN yang dilaksanakan dan jumlah kegiatan Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) yang teridentfikasi.

3. Meningkatnya persentase produk hukum yang harmonis melalui output kegiatan penyusunan produk perundang-undangan, dokumentasi produk hukum, pengkajian Perda, JDIH Kab.Majene, dokumentasi produk hukum penyuluhan hukum, pelaksanaan asistensi ranperda penyusunan produk hukum, implementasi HAM, peningkatan desa/kelurahan sadar hukum, penyusunan Peraturan Daerah dan terlaksananya pendampingan penyusunan produk hukum daerah;
4. Meningkatnya persentase wilayah bebas sengketa melalui output kegiatan penataan batas wilayah, inventarisasi nama-nama rupa bumi dan koordinasi penelusuruan batas wilayah administrasi pemerintahan
5. Meningkatnya cakupan penyebarluasan informasi pembangunan daerah Sosialisasi aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan E-MONEV online, monitoring evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran Tepra, sosialisasi peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, peningkatan kapasitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), whorshop aplikasi LPSE dan penyusunan standar satuan harga;
6. Meningkatnya persentase pegawai dengan kelengkapan berkas melalui output kegiatan sosialisasi aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan E-MONEV online, monitoring evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran Tepra, sosialisasi peraturan perundangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Secara Electronik (LPSE), workshop aplikasi LPSE dan penyusunan standar tsatuan harga.
7. Meningkatnya kapasitas bagi penyusunan LPPD Bupati Majene dan nilai SAKIP Majene melalui output kegiatan bimtek penyusunan LPPD Bupati Mejene.
8. Meningkatnya persentase pemenuhan kebutuhan pembinaan keagamaan melalui output kegiatan safari Ramadhan, pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji, pembinaan TPA dan Imam mesjid, penyerahan bantuan sarana peribadatan, orientasi mubaligh dan mubalighga Qur'an, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Kab dan Propinsi, pembinaan tilawatil Qur'an, penyelenggaraan hari besarislam, pelatihan memandikan jenasah, pawai takbir hari besar agama Islam

dan pelaksnaan musabaqah tilawatil Quran, terwujudnya pemahaman dan kesadaran produk hukum daerah dilingkungan aparatur pemerintah dan masyarakat;

9. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat melalui output kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan, penyusunan data perusahaan kontraktor daerah, laporan kegiatan perusahaan kontraktor daerah, pembuatan Mou kerjasama antar daerah dan antar Lembaga, monitoring evaluasi dan pengendalian kerjasama antar lembaga, koordinasi antar daerah perihal kerjasama antar daerah dan pihak ketiga, peningkatan layanan ULP, Workhop ULP, monitoring dan evaluasi RUP, pembuatan MOU kerjasama antar badan hukum dan personalia, monitoring Evaluasi kerjasama antar badan hukum dan personalia, koordinasi kerjasama dengan badan hukum dan personalia dan penanganan sanggahan banding proses pengadaan barang/jasa
10. Meningkatnya persentase OPD yang diberikan pembinaan kelembagaan dengan output kegiatan revisi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, pengelolaan administrasi kelembagaan pemantauan mekanisme pelayanan publik pada OPD, koordinasi penyusunan Anjab Kab. Majene, koordinasi penataan pegawai tidak tetap daerah/pegawai kontrak daerah.
11. Meningkatnya persentase informasi daerah yang disebarkan melalui media massa melalui output kegiatan persentase layanan keprotokoleran, jumlah jam siaran radio dan penyiar, Persentase layanan kehumasan, jumlah media penyebarluasan informasi pembangunan daerah, pengelolaan website, jumlah tabloid yang diterbitkan, akses informasi secara cepat melalui internet dan layanan informasi publik.

2.3.4.2. Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan yang telah diberi mandate oleh rakyat dalam urusan pemerintahan. DPRD merupakan mitra Kepala Daerah yang berkedudukan sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya DPRD di bantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas

membantu Kepala Daerah menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dengan fungsi mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD.

Dalam rangka mendukung funsi DPRD, yaitu fungsi pengawasan, fungsi pembentukan peraturan daerah dan fungsi anggaran, secretariat dewan memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen, yaitu:

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Majene tentang Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Majene;
2. Integrasi Program kerja DPRD dengan RPJMD dan RKPD melalui kegiatan reses dan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
3. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Dewan yang telah diintegrasikan dengan program-program DPRD.

Pencapaian indicator kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Majene sepanjang tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.110.
Indikator Kinerja Sekretariat Dewan
Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (%)	100	100	100	100	100
Presentase Raperda yang Disetujui Bersama (%)	100	100	100	100	100
Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusunnya dan terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD maupun RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Realisasi pada RPJMD Perubahan Kabupaten Majene 2016-2021 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2016-2020.

Pada urusan Sekretariat Dewan ada 4 (empat) indikator yaitu Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten, Presentase Raperda yang Disetujui Bersama, Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-

alat kelengkapan DPRD Kabupaten, serta tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD).

Berdasarkan penjabaran pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa dari data 5 (lima) tahun terakhir atau pada periode 2016-2020, persentase Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Presentase Raperda yang Disetujui Bersama mencapai angka 100%. Sedangkan Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten serta Tersusunnya dan terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD maupun RKPD, kedua indicator tersebut tersebut telah tersedia atau ada.

Seluruh program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan melalui urusan pemerintahan Sekretariat Dewan terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendukung pemerintahan. Adapun kinerja pelaksanaan urusan antara lain:

1. Meningkatnya persentase kerjasama antar daerah yang berlangsung secara kontinyu dengan output kegiatan dokumen perjanjian kerjasama, dan kerjasama jaringan daerah; dan
2. Meningkatnya persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan output kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama, rapat-rapat alat kelengkapan dewan, rapat-rapat paripurna, Kegiatan reses, kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dan sosialisasi peraturan perundang undangan, kunjungan kerjapimpinan dan anggota DPRD keluar daerah dan pembahasan rancangan peraturan daerah.

2.3.5. Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan

2.3.5.1. Urusan Perencanaan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran Rencana Strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja OPD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Majene telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 tahun 2012. Sedangkan di tahun 2016, disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2016 dan dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD pada tahun 2019 dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019.

Selain itu, untuk mendukung dokumen perencanaan yang bersifat kewilayahan dan keruangan di Kabupaten Majene, telah disusun dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2011-2031 yang ditetapkan sebagai peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2012, sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan

daerah, Pemerintah Kabupaten Majene telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.111.
Indikator Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Jenis Dokumen Perencanaan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu penyusunannya (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Majene, 2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Persentase capaian keberhasilan pada urusan perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.112.
Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan
Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Jenis Dokumen Perencanaan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Kesesuaian Program RPJMD dengan RKPD (%)	79,00	79,00	92,86	89,27	89,27
2	Persentase Usulan Musrenbang yang Terakomodir dalam APBD (%)	N/A	N/A	38,17	44,08	52,82

Sumber : Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Majene, 2021

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari tingkat capaian keberhasilan program dan rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa Persentase Kesesuaian Program RPJMD dengan RKPD pada tahun 2016-2017 sebesar 79,00% kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar 92,27%. Sedangkan pada tahun 2019 hingga 2020 persentase capaian menurun diangka 89,27%. Untuk Persentase Usulan Musrenbang yang Terakomodir dalam APBD dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 mencapai 38,17% kemudian meningkat ditahun 2019 sebesar 44,08% dan kembali meningkat ditahun 2020 diangka 52,82%.

2.3.5.2. Urusan Keuangan

Kondisi keuangan di Kabupaten Majene secara umum dalam kategori yang baik dimana secara konsisten dari tahun 2016-2020 mendapatkan opini WTP terhadap laporan keuangan oleh BPK. Selain itu persentase Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari tahun 2016 hingga 2020 meskipun dinamis, terlihat mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu menjadi -0,41% dari tahun-tahun sebelumnya yang masih di atas 0%. Menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Majene mengalami deficit di tahun 2020 sehingga menunjukkan kemampuan pendapatan membiayai belanja turun dengan artian bahwa tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Majene mengalami defisit sebesar -0,41%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pendapatan membiayai belanja turun dibandingkan rasio tahun sebelumnya sebesar 1,61%. Kemudian alokasi belanja wajib untuk bidang pendidikan dan kesehatan juga diketahui sesuai dengan kriteria minimal, kecuali disektor kesehatan pada tahun 2017-2018 masih dibawah standar minimal belanja penganggaran. Detail gambaran keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel. 2.113.
Indikator Keuangan Kab. Majene Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan (Penilaian)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SiLPA terhadap APBD (%)	0,46	0,22	3,57	1,61	-0,41
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	29,43	30,39	31,90	29,68	31,02
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	13,62	6,28	7,48	15,88	19,66
5	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja tidak langsung (%)	40,25	47,42	45,71	46,38	37,25
		59,75	52,58	54,29	53,62	62,75
6	Bagi hasil Kabupaten dan Desa (%)	0,07	0,10	0,13	0,14	0,10
7	Penetapan APBD (Penilaian)	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene, 2021 dan Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Barat, 2021

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengingat perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Barat) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan. Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Seluruh program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan melalui urusan Keuangan terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan dijabarkan dalam kinerka pelaksanaan urusan Keuangan secara umum yaitu:

1. Meningkatnya nilai Opini BPK melalui kegiatan;
   - Penyusunan Analisa Standar Belanja
   - Penyusunan rancangan peraturan daerah Tentang APBD
   - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
   - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
   - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
   - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
   - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
   - Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
   - Peningkatan manajemen aset /barang daerah
   - Penatausahaan kas daerah
   - Pengelolaan administrasi keuangan daerah
   - Penyusunan PPAS
   - Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
   - Rekonsiliasi SP2D
   - Rekonsiliasi SPJ
   - Bimtek Pengurus Pengelolaan BMD terhadap Pengurus Barang Se Kab.Majene
   - Pengamanan aset daerah

- Sensus Barang Milik daerah
- Rekonsiliasi dan pemuktahiran data aset
- Peningkatan dan pemeliharaan sistem informasi manajemen BMD (SIMDA BMD)
- Penatausahaan PPKD
- Pengelolaan Gaji Se - Kabupaten
- Asistensi Laporan Keuangan SKPD
- Pelatihan Akuntansi Berbasis Akrual bagi PPK SKPD di Balai Diklat BPK Makassar
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Se-Kabupaten
- Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Se-Kabupaten
- Penyusunan Bahan Kebijakan, Pedoman/Petunjuk Teknis dan Perencanaan Belanja Tidak Langsung
- Penyusunan Bahan Kebijakan, Pedoman/PetunjukTeknis dan Perencanaan Pendapatan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pendapatan
- Rekonsiliasi Sumber-Sumber PAD
- Penyusunan Pelaporan Realisasi Pendapatan Akhir Tahun

2. Meningkatnya Persentase desa yang dibina melalui kegiatan
   - FGD Keuangan Desa
3. Meningkatnya Nilai SAKIP Pemda Kab. Majene melalui kegiatan:
   - Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)
4. Meningkatnya Persentase peningkatan pencapaian pendapatan daerah melalui kegiatan:
   - Peningkatan Kinerja Manajemen Pendapatan Daerah
   - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
5. Meningkatnya Capaian penerimaan PBB melalui kegiatan:
   - Pengelolaan Dokumen SPPT dan DHKP PBB
   - Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelola PBB
   - Penataan Ulang Peta Blok PBB
6. Meningkatnya Persentase Peningkatan Potensi PAD melalui kegiatan :
   - Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

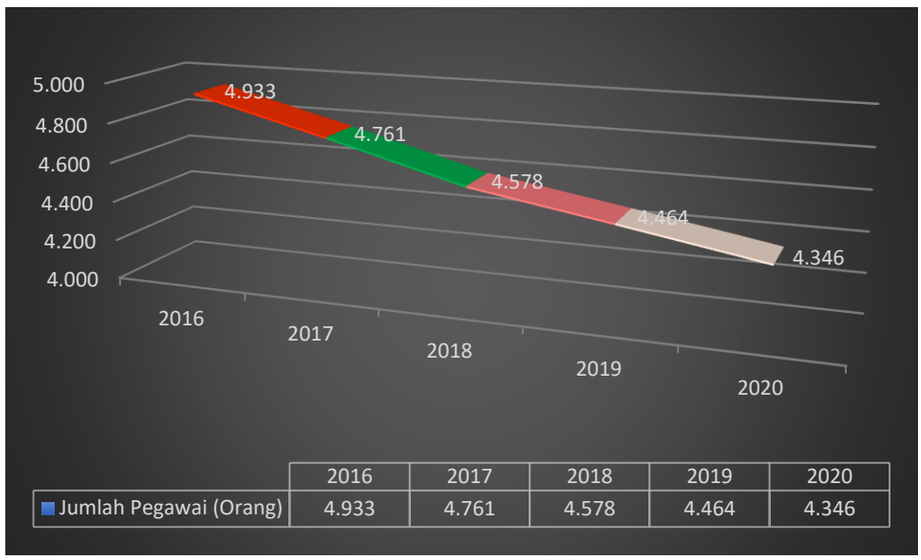
7. Meningkatnya Persentase peningkatan realisasi PAD (Pajak Hiburan, Hotel, Restoran, dan Retribusi Pertokoan dan Mess Pemda melalui kegiatan:
   - Pendataan Wajib Pajak Restoran
   - Penagihan dan Pengawasan Pajak Restoran
   - Pelaporan Pajak Restoran
   - Pendataan Wajib Pajak Hotel dan Retribusi Mess Pemda
   - Pelaporan Pajak Hotel dan Retribusi Mess Pemda
   - Pendataan Wajib Pajak Hiburan dan Retribusi Pertokoan
   - Penagihan dan Pengawasan Pajak Hiburan dan Retribusi Pertokoan
   - Pelaporan Pajak Hiburan dan Retribusi Pertokoan
   - Penagihan dan Pengawasan Pajak Hotel dan Retribusi Mess Pemda
8. Meningkatnya Persentase peningkatan realisasi PAD (PBB dan Sarang Burung Walet) melaui kegiatan:
   - Pengelolaan Verifikasi Data BPHTB
   - Pendataan Objek dan Subjek Pajak Sarang Burung Walet
   - Pemantauan Hasil Produksi Sarang Burung Walet
9. Meningkatnya Persentase peningkatan realisasi PAD (Pajak Reklame, Penerangan jalan, Tambang galian C) melalui kegiatan:
   - Pendataan dan Pemantauan produksi mineral bukan logam dan batuan
   - Penilaian dan Penetapan Pajak Tambang Galian C
   - Penagihan dan Pengawasan Pajak Tambang Galian C
   - Pelaporan Ralisasi Penerimaan Pajak Tambang Galian C
   - Observasi dan pendataan Tempat Pemasangan reklame
   - Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
   - Penilaian dan Pentapan Retribusi Pasar
   - Pengawasan Pemungutan Retribusi Pasar
   - Pelaporan Penerimaan Retribusi Pasar
   - Peningkatan Pengelolaan Pasar
   - Penyusunan target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
   - Pengembangan Potensi PAD
   - Penilaian dan Pentapan Pajak Penerangan Jalan
   - Pelaporan Hasil Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

- Penilaian dan Penetapan Pajak Reklame
- Penagihan dan Pengawasan Objek Pajak reklame
- Pelaporan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
- Inventarisasi Objek dan Subjek Retribusi Pasar
- Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Pasar

2.3.5.3. Urusan Kepegawaian

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah kepegawaian Kabupaten Majene dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis kepegawaian. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BKPSDM Kabupaten Majene diatur dalam Peraturan Bupati Majene Tahun 2019, sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, dipimpin oleh kepala badan, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan kepala bidang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut.

Gambar 2.45.
Perkembangan Jumlah Pegawai Kab. Majene Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pegawai (Orang)	4.933	4.761	4.578	4.464	4.346

Sumber : BKPSDM Kabupaten Majene Tahun 2021 dan BPS Kabupaten Majene Tahun 2021

Gambaran kepegawaian di Kab. Majene, memperlihatkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 sebanyak 4.933

orang, menurun di tahun 2017 menjadi 4.761 orang dan kembali menurun di tahun 2018 sebanyak 4.578 orang. Hingga tahun 2019-2020 jumlah ASN sebanyak 4.464 orang dan 4.346 orang.

Tabel. 2.114.
Kondisi Jumlah Pegawai di Kabupaten Majene Tahun 2016–2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pegawai (Orang)	4.933	4.761	4.578	4.464	4.346
2	Pendidikan Terakhir					
	SD/Sederajat	31	21	18	14	13
	SMP/Sederajat	104	48	31	28	28
	SMU/Sederajat	1.313	1.157	798	710	625
	Diploma I	28	20	330	264	219
	Diploma II	535	412			
	Diploma III	336	369	359	335	316
	Strata I	2.443	2.580	3.042	3.266	3.145
	Strata II	143	154			
	Strata III	-	-			
3	Golongan Kepangkatan					
	Golingan I	133	56	40	34	33
	Golingan II	1.208	986	809	731	695
	Golingan III	2.542	2.703	2.673	2.819	2.778
	Golingan IV	1.070	1.016	1.056	1.033	958
4	Jabatan Struktural					
	Eselon II	35	34	36	37	32
	Eselon III	155	146	157	115	131
	Eselon IV	540	559	598	524	514
	Eselon V	9	-	7	-	4
5	Fungsional Tertentu	-	-	-	2.289	2.232
6	Fungsional Umum	-	-	-	1.486	1.433

Sumber : BKPSDM Kabupaten Majene Tahun 2021 dan BPS Kabupaten Majene Tahun 2021.

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai berdasarkan pendidikan terkahir hingga tahun 2020 dengan uraian SD/Sederajat sebanyak 13 orang, SMP/Sederajat sebanyak 28 orang, SMA/Sederajat sebanyak 625 orang, Diploma I dan II sebanyak 219 orang, Diploma III sebanyak 316 orang dan Strata I, II dan III sebanyak 3.145 orang. Untuk jenjang golongan kepangkatan, Golongan I sebanyak 33 orang, Golongan II sebanyak 695 orang, Golongan III sebanyak 2.778 orang dan Golongan IV sebanyak 958 orang. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan yaitu jabatan Eselon II sebanyak 32 orang, Eselon III sebanyak 131 orang, Eselon IV sebanyak 514 orang, Eselon V sebanyak 4 orang dan Fungsional Tertentu sebanyak 2.232 orang serta Fungsional Umum sebanyak 1.433 orang.

2.3.5.4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Dari beberapa indikator urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2016 berada diangka 2,04% sedangkan dari 2017 sampai 2020 data belum tersedia. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural berada di 79,5% pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 31,6% dan 31,4%. Pada tahun 2019-2020 Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural kembali mengalami kenaikan di angka 36,49%. Untuk jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah pada 2016 berjumlah 35 orang dan 34 pada tahun 2017 sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 36 orang, tahun 2019 sebanyak 34 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 32 orang. Sedangkan jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah pada tahun 2016 jumlahnya 155 orang dan tahun 2017 jumlahnya 146 dan meningkat ditahun 2018 sebanyak 157 orang. Sedangkan periode tahun 2019-2020, jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah sebanyak 133 orang dan 131 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.115.
Indikator Kepegawaian 2016 – 2020 Kab. Majene

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	2,04	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural (%)	79,5	31,6	31,4	36.49	36.49
3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	35	34	36	34	32
4	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	155	146	157	133	131

Sumber : BKPSDM Kabupaten Majene Tahun 2021 dan BPS Kabupaten Majene Tahun 2021.

Seluruh program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan melalui urusan Kepegawaian terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan manajemen ASN. Adapun kinerja pelaksanaan urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan secara umumya adalah:

1. Meningkatnya persentase pejabat struktural yang telah lulus diklatpim melalui kegiatan Pendidikan penjenjangan struktural
2. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah
3. Meningkatnya persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu melalui kegiatan Seleksi penerimaan calon PNS, pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah, pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, pengelolaan kenaikan pangkat PNS, penyelesaian Proses SK 80% ke 100%, pelaksanaan proses mutase pensiun, penyelesaian proses permintaan Karpeg, penyelesaian proses kartu taspen, pemberkasan CPNS, pembuatan DUK kabupaten, pemberian penghargaan satya lencana karya satya, penyelenggaraan penyumpahan PNS dan pelaksanaan mutasi pelantikan.
4. Meningkatnya persentase posisi jabatan tinggi pratama yang diisi melalui proses lelang jabatan melalui kegiatan lelang jabatan pimpinan tinggi pratama.

2.3.5.5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan atau Libang adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Litbang memegang peranan penting dan menjadi indikator kemajuan dari suatu organisasi. Ada 4 (empat) indikator utama pada urusan penelitian dan pengembangan yaitu persentase implementasi rencana kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Dari smua indikator tersebut pada tahun 2016 sampai 2020 angkanya berada di 100%.

Kabupaten Majene, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan mencakup berbagai macam program yang memiliki ciri adanya unsur peningkatan dan berorientasi ke masa depan. Peningkatan yang dimaksud bukan hanya dari sisi perangkat keras saja tetapi terutama sekali yang bersifat peningkatan kemampuan, pemberdayaan, dan pembinaan bagi

sumber daya manusia. Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Untuk lebih jelasnya Indicator Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel. 2.116.
Indikator Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100	100	100	100	100
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	100	100	100	100	100

Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Majene, 2021

Pemerintah Kabupaten Majene senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah, masyarakat, swasta, dan seluruh *stakeholders* untuk bersama-sama mengembangkan kreativitas dan inovasi serta lebih memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Inovasi sebagai cara untuk menerapkan Iptek yang telah ada disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan diupayakan selalu menjadi *mindset* semua elemen, sedangkan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Dalam melaksanakan pengembangan Inovasi Daerah. Pemerintah Kabupaten Majene menjalin kerjasama dengan daerah lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset dan masyarakat dengan mengacu pada kondisi kultural/budaya Mandar agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah system inovasi daerah yang saling terkait dan berkelanjutan.

Kerjasama dengan pemerintah lain diluar provinsi maupun didalam Provinsi Sulawesi Barat diantaranya Pemerintah Kota Bandung terkait kerjasama dibidang aplikasi terkait Pengembangan dan Implementasi *Smart City* Kota Bandung di Kab. Majene dengan hasil yang dicapai terjalin kerjasama alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terkait Pelayanan Tera dan Tera Ulang untuk Kerjasama di bidang Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan hasil yang dicapai terselenggaranya pelayanan tera atau tera ulang dan pengawasan metrologi legal, Mengatasi kekosongan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang dan menjamin kepastian hukum dalam hal kebenaran pengukuran.

Sedangkan dengan pemerintah pusat melalui Dirjen Sumber Daya air dan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Gubernur Sulbar dan Bupati Polewali Mandar dalam hal Pelaksanaan kegiatan pembangunan, fasilitasi perpindahan dan penempatan serta pengembangan satuan permukiman Ulumanda SP2 Tamajarrang di kawasan transmigrasi Ulumanda seta kerjasama Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional (SPAM Regional) untuk daerah Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu, kerjasama dengan pihak perbankan diantaranya BRI Cabang Majene, BNI Cabang Majene, Bank BPD Sulselbar Cabang Majene, pihak perguruan tinggi diantaranya STIE Nobel, Unibos, BDI Makassar, STIE Yapman Majene, UNHAS, UNSULBAR, UIN, LAN Makassar. Untuk kerjasama antar instansi vertical diantaranya BPS Kab. Majene, BAPPENAS, Kejari Majene, BPJS Majene dan KSP Pundi Neka Solusi. Kerjasama tersebut terkait dibidang keuangan, pendidikan, infrastruktur, perekonomian, penelitian, hukum, kesehatan dan pengembangan SDM.

2.3.5.6. Urusan Pengelolaan Perbatasan

Urusan pengelolaan perbatasan dilaksanakan oleh Sub Bagian Administrasi Kewilayahan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah. Sub bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas pokok membantu kepala bagian Tata Pemerintahan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Administrasi

Kewilayahan. Sedangkan Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, adminstrasi kewilayahan dan otonomi daerah.

Terkait capaian pelaksanaan kegiatan dari tahun 2016-2020 adalah Kegiatan Pembinaan Batas Wilayah dalam Program Penataan Daerah Otonomi Baru tentang Penataan Batas Wilayah Desa/Kelurahan se Kabupaten Majene pada tahun 2017-2018. Sedangkan Penataan Tapal Batas Wilayah antar kabupaten di Sulawesi Barat, diantaranya dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terkait Batas Kelurahan Tande Timur dengan Desa Tandung dan Batas Desa Coci dengan Desa Kalumammang yang diselesaikan pada tahun 2019 sesuai Permendagri Nomor 73 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa kepada Pemerintah Sulawesi Barat. Sedangkan Penataan Tapal Batas Wilayah antara Kabupaten Majene (Desa Bambangan Kecamatan Malunda) dengan Kabupaten Mamuju (Kecamatan Tappalang) masih sementara dalam proses yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bangda mulai dari tahun 2018-2021.

2.3.6. Fokus Layanan Urusan Pengawasan Pemerintahan

2.3.6.1. Inspektorat Daerah

Salah satu unsur pemerintahan adalah unsur pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Unsur ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar. Kebijakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Majene merupakan salah satu bentuk dan tekad untuk mendukung cita-cita reformasi yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Kebijakan tersebut diambil oleh manajemen (instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di bidang pengawasan) dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya.

Reformasi birokrasi baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sasaran pelaksanaan program kerja urusan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan persentase aparatur pengawasan yang ditingkatkan kompetensinya serta meningkatnya persentase objek pengawasan yang dimonitoring dan dievaluasi yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Kinerja rutin pengawasan
2. Pengawasan prioritas nasional
3. Pengawawalan reformasi birokrasi
4. Penegakan integritas
5. Peningkatan kapabilitas APIP.

Inspektorat Kabupaten Majene sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan.

Auditor adalah pelaksana pengawasan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Manfaat pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor tidak hanya berupa banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga berupa efektivitas tindak lanjut oleh auditor. Pengawasan internal akan menjadi sia-sia tanpa tindakan perbaikan dalam penyelesaian tindak lanjut sehingga tujuan pengawasan tidak tercapai, yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Tabel. 2.117.
Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Majene
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase tindak lanjut temuan	95,93	100	100	100	100
2	Jumlah pelanggaran pegawai negeri sipil	-	-	-	7	13
3	Persentase pelanggaran pegawai (%)	0	0	0	0,16	0,30
4	Jumlah temuan BPK	31	32	12	8	3

Sumber Data : Inspektorat Kab. Majene, 2021

Pada urusan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, ada 3 indikator utama yaitu persentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai dan juga jumlah temuan BPK. Pada tahun 2016, persentase tindak lanjut temuan berada di angka 95,93% dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2017 hingga 2020. Sementara julah temuan BPK dari tahun 2016 sebanyak 31 temuan dan 32 temuan pada tahun 2017, menurun pada tahun 2018 dan 2019 sebanyak 12 temuan dan 8 temuan. Hingga tahun 2020 jumlah temuan sebanyak 3 temuan antara lain pengelolaan penerimaan klaim Dana BPJS Kesehatan belum memadai, pengelolaan Piutang PBB-P2 belum memadai, serta pengelolaan aset tetap belum tertib dan permasalahan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Majene melalui Inspektorat Daerah.

Indicator lain pada urusan pengawasan yaitu jumlah pelanggaran pegawai negeri sipil dan Persentase pelanggaran pegawai, dimana pada tahun 2016-2018 tidak adanya pelanggaran pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Majene. Berbeda pada tahun 2019, jumlah pelanggaran pegawai negeri sipil sebanyak 7 orang dengan Persentase pelanggaran pegawai sebesar 0,16% dan meningkat pada tahun 2020 sebanyak 13 orang dengan Persentase pelanggaran pegawai sebesar 0,30%. Pelanggaran pegawai negeri sipil tersebut sudah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pemecatan sebagai pegawai negeri sipil.

2.3.7. Unsur Kewilayahan

Unsur kewilayahan merupakan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka membantu Kepala daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, dalam wilayah kecamatan sesuai sebagian kewenangan yang dilimpahkan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi, meliputi:

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
6. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
7. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa/ Kelurahan;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas;
9. Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan melalui urusan kewilayahan antara lain:

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dengan output kegiatan Musrenbang Desa/Kel & Kecamatan dan Musrenbang Desa/Kel & Kecamatan,
2. Meningkatnya persentase pemenuhan kebutuhan pembinaan Keagamaan, pelaksanaan MTQ Kabupaten dan Provinsi, safari

Ramadhan, pelaksanaan STQ, peningkatan mutu dan kualitas SDM yang religious melalui syiar agama dalam agama dan dakwah, safari ramadhan dan pembinaan tilawatil Qur'an;

3. Meningkatnya persentase masyarakat yang terlayani koordinasi pemerintahan dan sosial kemasyarakatan kecamatan Malunda dengan output kegiatan koordinasi pemerintahan dan sosial kemasyarakatan kecamatan Banggae, koordinasi pemerintahan dan sosial kemasyarakatan kecamatan Pamboang, koordinasi pemerintahan dan sosial kemasyarakatan kecamatan Sendana, koordinasi pemerintahan dan sosial kemasyarakatan kecamatan Tammerodo Sendana, koordinasi pemerintahan dan sosial kemasyarakatan kecamatan Tubo Sendana, koordinasi pemerintahan dan sosial kemasyarakatan kecamatan Tubo Sendana dan koordinasi pemerintahan dan sosial kemasyarakatan kecamatan Ulumanda;
4. Meningkatnya persentase sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dengan kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan & kebudayaan, pengelolaan kegiatan pembangunan usaha mikro, kecil & menengah, pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, pengelolaan kegiatan ketentraman dan ketertiban, pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, pendidikan dan kebudayaan, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman,

pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan transfor, pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, pengadaan pembangunan transportasi dan pengadaan pembangunan sarana kesehatan; dan

5. Meningkatnya persentase kapasitas masyarakat kelurahan dengan output kegiatan pengelolakegiatan lembaga kemasyarakatan, pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan dan pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Kecamatan yang ada di Kabupaten Majene sebanyak 8 (delapan) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammeroddo Sendana, Tubo Sendana, Malunda dan Ulumanda. Adapun yang menjadi indicator kinerja di kecamatan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dikecamatan dengan hasil capaian tahun 2016 sebesar 60 dan meningkat 5 poin di tahun 2017 menjadi 65, sedangkan pada tahun 2018-2020 Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 75 poin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.118.
Indeks Kepuasan Masyarakat Se Kecamatan
Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

Kecamatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Banggae	60	65	75	75	75
Banggae Timur					
Pamboang					
Sendana					
Tammerodo Sendana					
Tubo Sendana					
Malunda					
Ulumanda					

Sumber : Realisasi pada RPJMD Perubahan Kabupaten Majene 2016-2021, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2016-2020.

2.3.8. Unsur Pemerintahan Umum

2.3.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pembinaan politik daerah di Kabupaten Majene juga dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya pendidikan politik dan berorganisasi bagi masyarakat agar masyarakat sadar dan ikut

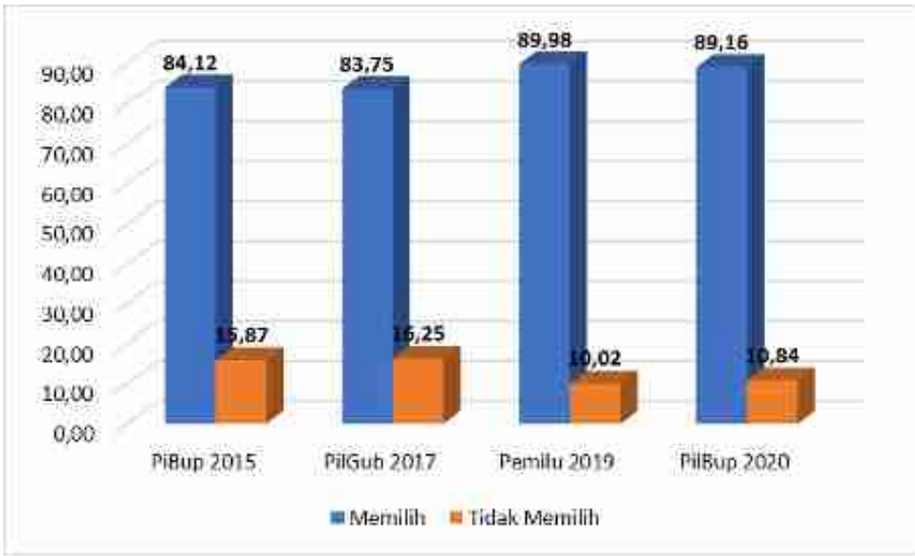
berpartisipasi dalam kegiatan politik di Kabupaten Majene. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan meningkatnya partisipasi politik serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel. 2.119.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada
DI Kabupaten Majene Tahun 2015, 2017 dan 2020

No	Indikator	PilBup 2015	PilGub 2017	Pemilu 2019	PilBup 2020
1	Daftar Pemilih Tetap (DPT) (jiwa)	107.464	109.614	110.884	113.230
2	Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih (Jiwa)	90.404	91.800	99.772	100.960
3	Jumlah Tidak Memilih dan Tidak Menggunakan Hak Pilih (jiwa)	17.055	17.814	11.112	12.270

Sumber : Situs KPU Majene, www.kpu.go.id, 2021

Gambar 2.46.
Persentase Jumlah Pemilih dan Tidak Memilih
Pilkada Di Kab. Majene Tahun 2015, 2017 dan 2020



Sumber : Situs KPU Majene, www.kpu.go.id, 2021

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemilihan Umum di Kabupaten Majene pada tahun 2015 mencapai 84,12% atau sebanyak 90.404 jiwa dari 107.464 jiwa daftar pemilih tetap sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 17.055 jiwa atau 15,87%. Pada tahun 2017 pemilihan gubernur di Kabupaten Majene dengan tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 83,75% atau sebesar 91.800 jiwa dari 109.614 jiwa daftar pemilih tetap sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih meningkat dari pilkada sebelumnya sebanyak 17.814 jiwa atau 16,25%.

Pada pelaksanaan Pemilihan Umum di tahun 2019, mencapai 89,98% atau sebanyak 99.772 jiwa dari 110.884 jiwa daftar pemilih tetap sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 11.112 jiwa atau 10,02%. Untuk tahun 2020 partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Majene mencapai 89,16% atau sebesar 100.960 jiwa dari 113.230 jiwa daftar pemilih tetap, meningkat sebanyak 5,41% dibandingkan partisipasi pada tahun 2017, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 10,84% atau sebanyak 12.270 jiwa, menurun dari pilkada sebelumnya sebesar 5,41%.

Berdasarkan gambaran partisipasi masyakat dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum di Kabupaten Majene, maka angka partisipasi tersebut melebihi dari target nasional, yaitu 77,55% maupun target Provinsi Sulawesi Barat sebesar 77,66%. Melihat gambaran masih adanya masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemilu maupun pelaksanaan pilkada di Kabupaten Majene, perlu upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama generasi muda sebagai pemilih pemula. Kegiatan pembinaan politik salah satunya adalah sosialisasi politik bagi pemilih pemula, forum komunikasi generasi pemuda, dan sosialisasi pemilih pemula. Pembinaan politik generasi muda dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, TOT, bimtek, dan monitoring dan evaluasi yang melibatkan dan mengikutsertakan KPU, Kemenag, Dispora dan Kesbangpollinmas itu sendiri.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kemampuan daya beli menjelaskan seberapa besar jumlah barang dan jasa yang mampu dibeli oleh masyarakat dengan sejumlah uang yang dimiliki untuk kegiatan konsumsi. Agar dapat dibandingkan baik antar waktu maupun antar wilayah maka kemampuan daya beli diukur dari sejumlah komoditi tertentu oleh masyarakat. Setiap orang mempunyai kemampuan untuk membeli barang dan jasa berbeda-beda tergantung dari pendapatan dan kebutuhannya. Semakin tinggi

kemampuan daya beli seseorang, semakin banyak ragam barang dan jasa yang mampu dibeli. Tingkat daya beli penduduk Kabupaten Majene digambarkan melalui pendekatan pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan.

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Majene akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2016-2020 tidak terlepas dari dua factor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal lebih dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Majene digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, rata-rata pengeluaran per Kapita sebulan menurut kelompok komoditas (rupiah) di Kabupaten Majene tahun 2016-2020 sebagai berikut.

Tabel. 2.120.
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Tahun	Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita				Total	
		Makanan	Persen	Non Makanan	Persen		
1	2016	357.453	52,85	318.922	47,15	676.375	100
2	2017	363.799	51,99	335.922	48,01	699.721	100
3	2018	423.265	53,69	365.124	46,31	788.389	100
4	2019	439.781	54,13	372.730	45,87	812.511	100
5	2020	436.271	51,38	412.847	48,62	849.116	100

Sumber : BPS Kab. Majene, 2021

Dalam kurun waktu 2016–2020 konsumsi rumah tangga per kapita mengalami peningkatan, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2016-2020 cukup meningkat kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan akibat dari munculnya Pandemik Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak yang sangat signifikan pada sendi-sendi perekonomian nasional bahkan di Kabupaten Majene.

Titik tertinggi Konsumsi Rumah Tangga (makanan) Per Kapita terjadi pada tahun 2019 yaitu 54,13 persen dan titik terendah justru terjadi pada tahun 2020 yaitu 51,38 persen. Pada tahun 2016, secara umum setiap rumah tangga di Majene menghabiskan rata-rata dana sekitar Rp. 676.375 sebulan untuk membiayai baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi Rp. 699.721 pada tahun 2017, Rp. 788.389 tahun 2018, Rp. 812.511 tahun 2019 dan Rp. 849.116 pada tahun 2020.

Rata-rata konsumsi per-kapita menunjukan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita pada periode 2016-2020 berada pada kisaran 2 sampai 4 persen. Kondisi ini menunjukan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Majene meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Pola proporsi konsumsi di atas menunjukkan tarik menarik kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Dengan demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Berdasarkan gambar dibawah, Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Makanan (Rupiah) menunjukkan bahwa Kabupaten Majene berada di peringkat keempat dari

Kabupaten Polewali Mandar, Pasangkayu, dan Mamasa. Sedangkan Non Makanan Kabupaten Majene berada pada posisi pengeluaran keduaa dari Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju. Perbandingan antara pengeluaran pada tingkat Provinsi Sulawesi Barat memperlihatkan bahwa Kabupaten Majene lebih rendah dari pada Provinsi Sulawesi Barat baik sector makanan maupun non makanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.47.
Persentase Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) Kabupaten Di Sulawesi Barat Tahun 2020



Sumber : BPS Kab. Majene, 2021

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Tujuan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam setiap tahapan pembangunan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi tujuan utama. Sebagai Negara agraris dengan jumlah penduduk besar dan proporsi rumah tangga yang bekerja di pertanian dominan, maka perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. Salah satu alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan saat ini adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP dihitung dari rasio harga yang diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Konsep ini secara sederhana menggambarkan daya beli pendapatan petani. Namun konsep penghitungan NTP yang didasarkan kepada kuantitas yang tetap (indeks Laspeyres) belum sepenuhnya merupakan indikator kesejahteraan petani. Kenaikan harga produk yang diterima petani tidak identik dengan peningkatan pendapatan petani.

Kenaikan harga yang diterima petani justru mengindikasikan kelangkaan suplai/produksi pertanian. Konsep pengukuran NTP juga tidak mengakomodasikan perkembangan produktivitas, kemajuan teknologi dan pembangunan. Dalam kaitan sebagai indikator kesejahteraan petani, penyempurnaan penghitungan NTP perlu dilakukan melalui pendekatan nilai yaitu dengan memasukkan unsur kuantitas sehingga NTP merupakan rasio antara nilai pendapatan terhadap nilai pengeluaran. Cara paling sederhana adalah dihitungnya Indeks Produksi Pertanian dan Indeks Konsumsi Rumah tangga petani dalam penghitungan NTP. Penyempurnaan lain adalah menyempurnakan cakupan petani sesuai definisi pertanian dalam perhitungan NTP. Nilai tukar petani yang disajikan merupakan nilai tukar petani skala Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi patokan bagi kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

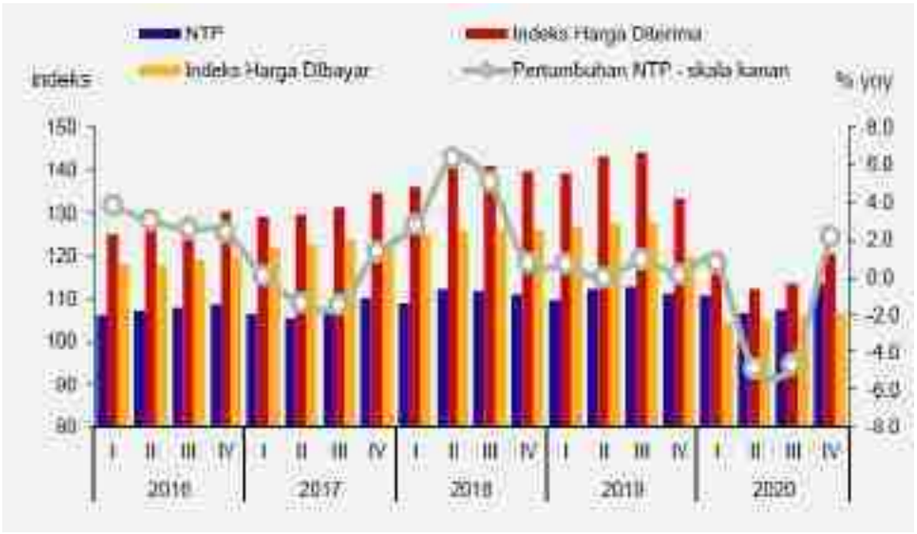
Tabel. 2.121.
Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Barat
Pada Triwulan IV Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	NILAI TUKAR PETANI (NTP)	110,90	111.03	113,39
2	Indeks Harga Diterima	139,62	133,16	120,41
3	Indeks Harga Dibayar	125,90	119,50	106,19

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat pada Triwulan IV Tahun 2020. Indeks harga diterima petani yang tumbuh positif pada level 113,39 jika dibandingkan pada triwulan III 2020 berada pada level 107,25. Hal ini dipengaruhi akibat membaiknya indeks harga diterima petani yang mencapai level 120,1 dan di saat bersamaan indeks harga dibayar petani tidak jauh berubah dengan periode triwulan III 2020 yaitu pada level 106,19. Nilai tukar petani di Provinsi Sulawesi Barat pada Triwulan IV Tahun 2018 mencapai 110,90 yang terbagi kedalam Indeks Harga Diterima sebesar 139,62 dan Indeks Harga Dibayar sebesar 125,90. Mengalami peningkatan NTP pada tahun 2019 sebesar 111,03 dengan Indeks Harga Diterima 133,16 dan Indeks Harga Dibaya sebesar 119,50. Kembali mengalami peningkatan di tahun 2020 dengan NTP sebesar 113,39, dengan Indeks Harga Diterima sebesar 120,41 dan Indeks Harga Dibayar sebesar 106,19. Peningkatan indeks Nilai Tukar Petani cukup mampu mengindikasikan peningkatan kesejateraan petani di Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan.

Gambar 2.48.
Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Barat
Pada Triwulan IV Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2021

2.4.1.3. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Di dalam kehidupan seharihari tentu setiap masyarakat ataupun rumah tangga melakukan konsumsi. Konsumsi yang dilakukannya tersebut pasti dengan jumlah yang berbeda-beda karena bergantung dengan kemampuan pendapatan yang diperoleh beserta tingkat kebutuhan dan keinginan mereka. Pengaruh perbedaan faktor perilaku (gaya hidup konsumtif), ekonomi (pendapatan), lingkungan sosial (umur kepala rumah tangga, pendidikan, jumlah anggota rumah tangga dan adat istiadat), dan faktor non pangan tersebut terjadi juga di Kabupaten Majene. Oleh karena itu pengeluaran Komsumsi Non Pangan Perkapita menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung daya saing Kabupaten Majene itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.122.
Persentase Pengeluaran Komsumsi Non Pangan Perkapita
Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	49,00	47,00	49.49	46.11	46.63
2	Aneka komoditas dan jasa	28,00	20,00	27.52	20.91	22.35
3	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	7,00	7,00	7.13	6.86	7.23
4	Komoditas tahan lama	7,00	15,00	7.27	15.48	8.20
5	Pajak, pungutan, dan asuransi	7,00	6,00	7,00	7.50	10.45
6	Keperluan pesta dan upacara/ kenduri	2,00	5,00	1.58	3.31	5.13
Total		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Kab. Majene, 2021

Persentase Pengeluaran Komsumsi Non Pangan Perkapita Kabupaten Majene pada Tahun 2016-2020 terlihat fluktuatif disetiap tahunnya, dimana pengeluaran terbesar berada pada item komsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 49,00 persen pada tahun 2016, menurun di tahun 2020 yang hanya mencapai 46,63 persen. Pengeluaran terbesar kedua berada pada aneka komoditas dan jasa, dimana pada tahun 2016 sebesar 28,00 persen dan di tahun 2020 sebesar 22,35 persen. Sedangkan komsumsi terendah berada pada keperluan pesta dan upacara/kenduri, dimana pada tahun 2016 hanya mencapai 2,00 persen dan meningkat di tahun 2020 yang mencapai 5,13.

2.4.1.4. Produktivitas Total Daerah

Pengukuran produktivitas sebagai salah satu aspek daya saing diseluruh kabupaten wajib dilakukan agar dapat diketahui pencapaian produktivitas sebagai muara dari keseluruhan proses pembangunan di setiap daerah. Kewajiban mengukur produktivitas akan menjadi prioritas dan indikator pembangunan bagi investor untuk memutuskan investasi di berbagai bidang sesuai dengan peluang produktivitas. Produktifitas total daerah didapatkan dari Nilai Tambah Sektor ke-i dibagi dengan Jumlah Angkatan Kerja pada tahun yang sama. Peningkatan produktivitas dalam pembangunan ekonomi perlu dilakukan, mengingat harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika pekerja dilengkapi dengan kemampuan, keahlian, dan kompetensi untuk bekerja.

Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan melihat produktivitas daerah per sektor yang ada dalam PDRB menurut lapangan usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.123.
Produktifitas Total Daerah Berdasarkan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB ADHB Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)	3.801,0	4.190,4	4.612,7	4.974,9	4.993,7
2	PDRB ADHK Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)	2.992,3	3.180,6	3.373,4	3.576,1	3.326,8
3	Angkatan Kerja (Ribu Orang)	75	75	83	83	84
4	Produktifitas Total Daerah Berdasarkan PDRB ADHB	51	56	56	60	59
5	Produktifitas Total Daerah Berdasarkan PDRB ADHK	40	42	41	43	42

Sumber : BPS Kab. Majene dan Data Diolah, 2021

Produktifitas Total Daerah Berdasarkan PDRB ADHB pada periode 2016-2019, memperlihatkan bahwa nilai tertinggi berada di tahun 2019 dengan nilai produktifitas sebesar 60 dan terendah berada pada tahun 2016 sebesar 51, sedangkan tahun 2020 produktifitas total daerah berdasarkan PDRB ADHB sebesar 59. Untuk Produktifitas Total Daerah Berdasarkan PDRB ADHK pada tahun 2016-2020, menunjukkan angka yang fluktuatif dengan nilai tertinggi berada pada tahun 2019 dan terendah berada pada tahun 2016 dengan nilai 40.

2.4.1.5. Kemajuan dan Kemandirian Desa

Selain status desa perdesaan dan perkotaan, ada status desa berdasarkan perkembangan kemajuan desa, mengingat desa Kabupaten Majene memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi luas wilayah, kondisi ekonomi, politik, sosial budaya, dan faktor lainnya. Hal ini penting karena pembangunan perdesaan merupakan salah satu amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86, yang salah satu ayatnya menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembanguan kawasan perdesaan".

Ada dua kriteria dalam penentuan status desa, yaitu berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM), yang merupakan hasil analisis dari basis data yang sama yaitu hasil pendataan

Potensi Desa (Podes) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2014. Indeks Desa Membangun (IDM) dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Desa Maju (Desa Pra Sembada) adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Sedangkan Desa Mandiri Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Status desa diklasifikasi berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dengan ambang batas berikut ini:

1. Desa Sangat Tertinggal : IDM ≤ 0,4907
2. Desa Tertinggal : 0,4907 < IDM ≤ 0,5989
3. Desa Berkembang : 0,5989 < IDM ≤ 0,7072
4. Desa Maju : 0,7072 < IDM ≤ 0,8155
5. Desa Mandiri : IDM > 0,8155

Berdasarkan Berita Acara Penetapan Status Desa pada tahun 2021 yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Badan Perencanaan Daerah dan Koordinator Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Majene dengan hasil penetapan status desa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Status Perkembangan Desa IDM tahun 2021 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 2.124.
Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun (IDM)
Di Kabupaten Majene Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM
1	Banggae Timur	1. Buttu Baruga	0,6971	0,45	0,6667	0,6046	Berkembang
2	Banggae	2. Pamboborang	0,7371	0,5333	0,6667	0,6457	Berkembang
		3. Palipi Soreang	0,7943	0,65	0,6667	0,7037	Berkembang
3	Pamboang	4. Adolang	0,7029	0,35	0,8	0,6176	Berkembang
		5. Bababulo	0,6743	0,6167	0,6667	0,6525	Berkembang
		6. Bonde	0,7771	0,45	0,8667	0,6979	Berkembang
		7. Betteng	0,5943	0,45	0,6	0,5481	Tertinggal
		8. Simbang	0,7543	0,5333	0,6667	0,6514	Berkembang
		9. Bonde Utara	0,7714	0,5667	0,5333	0,6238	Berkembang
		10. Bababulo Utara	0,8514	0,55	0,6667	0,6894	Berkembang

No	Kecamatan	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM
		11. Buttu Pamboang	0,6914	0,5333	0,6667	0,6305	Berkembang
		12. Banua Adolang	0,5943	0,25	0,5333	0,4592	Sangat Tertinggal
		13. Adolang Dhua	0,7086	0,5167	0,6	0,6084	Berkembang
		14. Tinambung	0,7543	0,7167	0,5333	0,6681	Berkembang
		15. Pesuloang	0,7429	0,5333	0,8	0,6921	Berkembang
		16. Balombong	0,8	0,6167	0,6667	0,6944	Berkembang
4	Sendana	17. Totolisi Sendana	0,7086	0,6167	0,5333	0,6195	Berkembang
		18. Tallubanua	0,6743	0,35	0,6667	0,5637	Tertinggal
		19. Lalatedzong	0,7257	0,5167	0,8667	0,703	Berkembang
		20. Binanga	0,64	0,5667	0,6667	0,6244	Berkembang
		21. Puttada	0,7657	0,5333	0,6667	0,6552	Berkembang
		22. Paminggalan	0,6971	0,3333	0,4	0,4768	Sangat Tertinggal
		23. Leppangan	0,5943	0,3	0,6667	0,5203	Tertinggal
		24. Pundau	0,7029	0,35	0,6	0,551	Tertinggal
		25. Sendana	0,5943	0,5833	0,6667	0,6148	Berkembang
		26. Banua Sendana	0,6286	0,5167	0,8667	0,6707	Berkembang
		27. Tallubanua Utara	0,6457	0,5667	0,4667	0,5597	Tertinggal
		28. Limboro Rambu-Rambu	0,6686	0,5167	0,8	0,6617	Berkembang
		29. Limbua	0,6571	0,6	0,6667	0,6413	Berkembang
		30. Bukit Samang	0,7657	0,5667	0,4667	0,5997	Berkembang
5	Tammerodo Sendana	31. Seppong	0,7771	0,3667	0,8	0,6479	Berkembang
		32. Tammerodo	0,72	0,5832	0,6667	0,6567	Berkembang
		33. Ulidang	0,8343	0,6	0,6	0,6781	Berkembang
		34. Tallambalao	0,6914	0,3167	0,5333	0,5138	Tertinggal
		35. Tammerodo Utara	0,72	0,6667	0,6	0,6622	Berkembang
		36. Manyamba	0,7429	0,4667	0,6667	0,6254	Berkembang
		37. Awo	0,6457	0,35	0,6667	0,5541	Tertinggal
6	Tubo Sendana	38. Onang	0,5886	0,6333	0,5	0,6073	Berkembang
		39. Tubo	0,7029	0,65	0,6667	0,6732	Berkembang
		40. Onang Utara	0,7714	0,6667	0,6	0,6794	Berkembang
		41. Tubo Selatan	0,7429	0,5667	0,6	0,6365	Berkembang
		42. Bonde-Bonde	0,7714	0,5333	0,9333	0,746	Maju
		43. Tubo Tengah	0,7029	0,6	0,6667	0,6565	Berkembang
		44. Tubo Poang	0,7029	0,65	0,6667	0,6732	Berkembang
7	Malunda	45. Bambangan	0,7029	0,4	0,5333	0,5454	Tertinggal
		46. Lombang	0,6171	0,45	0,6	0,5557	Tertinggal
		47. Lombong	0,7829	0,6333	0,6	0,6721	Berkembang
		48. Mekkatta	0,7371	0,4333	0,8667	0,679	Berkembang
		49. Maliaya	0,6286	0,6	0,8	0,6762	Berkembang
		50. Lombang Timur	0,5771	0,4333	0,5333	0,5146	Tertinggal
		51. Salutahongan	0,5943	0,35	0,6	0,5148	Tertinggal
		52. Lombong Timur	0,64	0,7333	0,8	0,7244	Maju
		53. Mekkatta Selatan	0,72	0,5167	0,6667	0,6344	Berkembang
		54. Kayuangin	0,7657	0,3833	0,4667	0,5386	Tertinggal
8	Ulumanda	55. Kabiraan	0,7086	0,4167	0,8	0,6417	Berkembang
		56. Sambabo	0,7257	0,3	0,6	0,5419	Tertinggal
		57. Tandeallo	0,6286	0,4333	0,5333	0,5317	Tertinggal
		58. Ulumanda	0,6057	0,3667	0,4667	0,4797	Sangat Tertinggal
		59. Salutambung	0,6914	0,5	0,6667	0,6194	Berkembang
		60. Popenga	0,6114	0,3167	0,5333	0,4871	Sangat Tertinggal
		61. Sulai	0,6457	0,25	0,5333	0,4763	Sangat Tertinggal
		62. Panggalo	0,5771	0,3167	0,5333	0,4757	Sangat Tertinggal

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Berdasarkan tabel diatas, analisis status desa di Kabupaten Majene menurut Indeks Desa Membangun, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak ada satupun desa di Kabupaten Majene yang mendapat predikat "**Desa Mandiri**";

2. Terdapat 2 desa dengan status "**Desa Maju**" yaitu Desa Bonde-Bonde Kecamatan Tubo Sendana dan Desa Lombong Timur Kecamatan Malunda;
3. Terdapat 6 desa dengan status "**Desa Sangat Tertinggal**" dan 14 desa dengan status "**Desa Tertinggal**", sisanya 40 desa dengan status "**Desa Berkembang**";
4. Menurut rangking IDM, tiga desa dengan skor tertinggi adalah Desa Desa Bonde-Bonde Kecamatan Tubo Sendana, Desa Lombong Timur Kecamatan Malunda dan diurutan ketiga ditempati dua desa yang mendapatkan angka yang sama yaitu Desa Palipi Soreang Kecamatan Banggae dan Desa Lalatedzong Kecamatan Sendana.

2.4.1.6. Neraca Perdagangan (*Trace Balance*)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar wilayah (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai "**Ekspor Neto**", apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus,dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

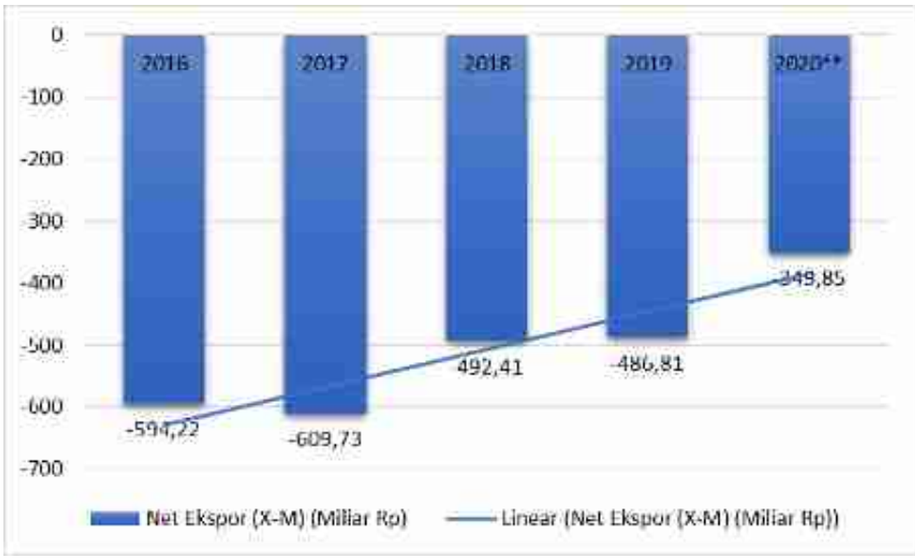
Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya, sebagaimana tertuang pada tabel dan gambar berikut.

Tabel. 2.125.
Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020**
1	Net Ekspor (X-M) (*Miliar Rp*)	-594,22	-609,73	-492,41	-486,81	-349,85
2	Rasio Ekspor terhadap Impor	0,77	0,81	0,82	0,86	0,77

Sumber : BPS Kab. Majene dan Data Diolah, 2021
*** : Angka Sangat Sementara*

Gambar 2.49.
Nilai Net Ekspor (X-M) Dalam (Miliar Rupiah)
Kabupaten Majene 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Majene dan Data Diolah, 2021
*** : Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan pada tabel dan gambar diatas, memperlihatkan bahwa selama periode 2016-2020, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Majene dengan luar negeri dan antar Kabupaten, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Majene berada dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih kecil dari impor menyebabkan adanya aliran devisa keluar. Rasio ekspor terhadap impor cenderung stagnan selama 2016-2020 dan tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Rasio ekspor terhadap impor masih dalam kisaran nilai 0,7 – 0,8. Pada awal periode, rasio ekspor terhadap impor berada pada angka 0,77, kemudian mengalami kenaikan dari tahun ke tahun menjadi 0,81 pada tahun 2017, 0,82 pada tahun 2018 dan 0,86 pada tahun 2019. Pada akhir periode, rasio ekspor terhadap impor menurun kembali menjadi sebesar 0,77.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Statistik Jalan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah bagaimana kondisi infrastruktur termasuk didalamnya adalah jalan. Panjang jalan di Kabupaten Majene hingga tahun 2020 adalah 621,20 Km yang dibagi kedalam 4 kondisi jalan yaitu kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Panjang jalan dalam kondisi baik setiap tahunya masih fluktuatif, dimana tahun 2016 kondisi jalan baik sepanjang 442,22 km dan kondisi tersebut menurun di tahun 2017 menjadi 246,15 km sampai pada tahun 2019 menjadi 236,04 km dan tahun 2020 meningkat menjadi 275,26 km. Sementara kondisi jalan sedang, rusak dan rusak berat memperlihatkan makin membaik, ini disebabkan karena adanya kegiatan rehabilitasi kondisi jalan di setiap tahunnya.

Secara umum kondisi jalan di Kabupaten Majene terus membaik, ini ditandai dengan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 5 (lima) tahun terakhir mengalami tren peningkatan pada tahun 2018-2020, dimana ditahun 2016 sebesar 71,19% dan mengalami penurunan yang cukup tinggi di tahun 2017 sebesar 39,60% diakibatkan oleh data panjang jalan berubah dari OPD teknis sehingga pada tahun 2018 hingga 2020 data panjang jalan dalam kondisi baik menunjukkan trend baik dimana tahun 2018 menjadi 36,70%, tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 38,00% dan tahun 2020 menjadi sepanjang 44,31%.

Tabel. 2.126.
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (Km)
Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Jenis Permukaan Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aspal / Paved	261,4	250,41	248,24	227,535	215,602
2	Kerikil / Gravel	168,30	253,98	259,31	78,577	109,097
3	Tanah / Soil	0,00	17,37	17,37	95,933	64,969
4	Lainnya / Others	191,5	99,44	96,28	219,152	231,529
Jumlah/Total		**621,20**	**621,20**	**621,20**	**621,20**	**621,20**

Sumber : BPS Kab. Majene dan Data Diolah, 2021

Sementara panjang jalan menurut jenis permukaan yang ada di Kabupaten Majene, menunjukkan bahwa jenis permukaan jalan aspal terpanjang berada pada tahun 2016 sepanjang 261,4 km dan terendah

berada di tahun 2020 dengan panjang 215,602 km. Jenis permukaan jalan terpanjang berupa kerikil berada pada tahun 2018 dengan panjang jalan 259,31 km dan terendah berada di tahun 2020 dengan panjang 109,097 km, sedangkan jenis permukaan berupa tanah berada pada tahun 2019 dengan panjang 95,933 km dan terendah berada pada tahun 2017-2018 dengan panjang kondisi jalan sebesar 17,37 km.

2.4.2.2. Ketaatan Terhadap RTRW

Penataan ruang Kabupaten Majene bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan berbasis sektor Pertanian serta didukung oleh sektor perikanan, kelautan, kehutanan, pertambangan, dan pemanfaatan potensi alam lainnya. Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukannya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene adalah pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan daerah baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Dengan demikian, arahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene lebih lanjut perlu dilakukan ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah.

Penyusunan indikasi ketataatan ini pada hakekatnya adalah penyusunan sistem prioritas pelaksanaan pembangunan yang mengatur dan mengelompokkan sektor/subsektor pembangunan. Penyusunan ini dilakukan karena pembangunan yang direncanakan pada dasarnya tidak mungkin dapat dilakukan secara bersamaan, dan perlu dilakukan pentahapan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala dan tingkat kepentingan/urgensi dari program/sub program maupun sektor/ subsektor yang harus diprioritaskan.

Rencana sistem kegiatan pembangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu tahapan pembangunan program pengembangan pemanfaatan ruang (pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis) dan tahapan pembangunan program pengembangan struktur tata ruang (pengembangan sistem kota-kota, sistem transportasi, sarana dan prasarana wilayah). Secara detail hasil pemanfaatan ruang Kabupaten Majene tahun 2016-2020, disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 2.127.
Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Target Ketaatan Terhadap RTRW	100	100	100	100	100
2	Realisasi Ketaatan Terhadap RTRW	100	100	100	100	100

Sumber : Bapeda Kab. Majene dan LPPD Kab. Majene Tahun 2021

Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene pada periode tahun 2016-2020 mencapai angka 100 persen, dimana setiap tahunnya pemerintah daerah telah menargetkan pada ketaatan terhadap RTRW sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Majene dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan setiap tahunnya tetap berpedoman pada rencana tata ruang yang termuat dalam RTRW.

2.4.2.3. Luas Wilayah Produktif

Wilayah produktif Kabupaten Majene meliputi wilayah pertanian, wilayah perkebunan dan wilayah kehutanan (hutan rakyat), luasan wilayah produktif akan mengalami pergeseran setiap tahunnya mengingat perubahan peruntukan lahan khususnya perkembangan pemukiman atau perumahan yang sangat cepat.

Tabel. 2.128.
Persentase Luas Wilayah Produktif Terhadap Luas Wilayah Budidaya
Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Ha)	44.039	44.039	44.039	44.039	44.039
2	Luas Wilayah Produktif (Ha)	39.085	39.085	39.085	39.085	39.085
3	Persentase Luas Wilayah Produktif (%)	88,75	88,75	88,75	88,75	88,75
4	Rasio (2/1)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

Sumber : RTRW Kab. Majene Tahun 2021

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2012–2032, luas wilayah produktif di Kabupaten Majene dalam kurung waktu 2016-2020 tidak mengalami perubahan dengan luas 39.085 Ha, yang terdiri dari wilayah pertanian, perkebunan, dan wilayah kehutanan (hutan rakyat). Persentase luas wilayah produktif sebesar 88,75 persen dengan tingkat rasio mencapai 0,89.

2.4.2.4. Wilayah Banjir dan Genangan

Banjir dan genangan yang terjadi di Kota Majene disebabkan oleh belum tertatanya dengan baik saluran-saluran drainase yang ada dan belum merupakan satu kesatuan sistem jaringan serta saluran drainase yang ada belum sampai ke pembuangan akhir. Hal lain disebabkan oleh karena saluran drainase yang ada pada umumnya belum melalui suatu mekanisme perencanaan teknis dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara saluran-saluran yang ada, serta penyebab lain adalah luapan air dari sungai yang mengalir di Kota Majene dan akibat gelombang pasang yang terjadi.

Penyebab banjir perkotaan yang terjadi selama ini di Kota Majene disebabkan oleh tindakan manusia dan oleh alam, yang termasuk sebab-sebab banjir akibat tindakan manusia sebagai berikut :

1. Perubahan tata guna lahan;
2. Pembuangan sampah;
3. Kawasan kumuh di sepanjang sungai dan drainase;
4. Perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat;
5. Tidak berfungsinya sistem drainase lahan;

Sedangkan yang diakibatkan oleh alam sebagai berikut:

1. Erosi dan sedimentasi;
2. Curah hujan;
3. Pengaruh fisiografi/geofisik sungai;
4. Kapasitas sungai dan drainase yang tidak memadai;
5. Pengaruh air pasang;
6. Penurunan tanah dan rob;
7. Drainase lahan;
8. Kerusakan bangunan pengendali banjir;

Banjir perkotaan yang selama ini terjadi di Kota Majene pada khusunya dan Kabupaten Majene pada umumnya diakibatkan luapan air dari Sungai serta tidak berfungsi dengan optimalnya jaringan drainase yang ada serta pengaruh air pasang. Sedangkan secara umum genangan yang terjadi adalah diakibatkan oleh pengaruh pasang surut dan luapan Sungai. Hal ini disebabkan oleh kondisi topografi Kabupaten Majene yang relatif

datar pada lokasi yang berdekatan dengan pantai. Lokasi banjir, genangan, luas *chathment area* dan tinggi air rata-rata yang terdapat di Kota Majene (Kecamatan Banggae dan Banggae Timur), dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.129.
Lokasi Banjir, Genangan, dan Chatsment Area Di Kota Majene

No.	Kelurahan	Banjir (Ha)	Genangan (Ha)	Tinggi Air Rata-Rata (M)
1	Banggae	2.28	1.14	0.50
2	Labuang	4.00	1.80	0.50
3	Pangaliali	2.98	0.74	0.50
4	Baru	4.95	0.99	0.50
5	Totoli	3.30	0.66	0.50
6	Baurung	1.43	0.29	0.50

Sumber : Master Plan Drainase Kab. Majene, 2021

Kerugian yang ditimbulkan oleh banjir selama ini di Kota Majene pada umumnya berakibat pada kerugian terhadap kepemilikan pribadi (rumah tangga), kerugian financial ekonomi, gangguan sosial dan terjadi kerugian milik pemerintah, gangguan di bidang transportasi, serta gangguan/kerugian pada daerah pemukiman.

- Gangguan terhadap kepemilikan pribadi (rumah tangga), meliputi; perabot rumah tangga mengalami kerusakan, dinding rumah yang berasal dari papan mudah hancur, dan material bangunan yang dipergunakan cepat rusak.
- Kerugian financial ekonomi, meliputi; pembelian perabot rumah tangga untuk mengganti yang rusak dan mengeluarkan biaya pemeliharaan serta pemugaran rumah.
- Gangguan di bidang transportasi, meliputi; macetmya ruas-ruas jalan tertentu yang mengalami banjir, aktivitas masyarakat mengalami gangguan, dan kerusakan badan jalan yang mengalami kebanjiran.
- Gangguan sosial dan terjadi kerugian milik pemerintah, meliputi; terjangkitnya wabah penyakit akibat dari banjir berupa kolera, demam berdarah dan muntaber serta kerugian milik pemerintah berupa kerusakan barang-barang inventaris serta arsip atau dokumen-dokumen penting.

- Gangguan/kerugian pada daerah pemukiman, meliputi; jalan di sekitar pemukiman becek, aktivitas sehari-hari masyarakat dalam pemukiman mengalami gangguan serta kerugian harta benda.

2.4.2.5. Luas Wilayah Kekeringan (Lahan Kritis)

Masalah kekeringan sering menjadi perbincangan yang tiada habisnya dan menjadi masalah yang cukup penting untuk dikoordinasikan bersama, karena terkait dengan upaya penangangan, pencegahan dan penanggulangannya. Masalah kekeringan yang belum bisa terselesaikan dari waktu ke waktu terus menjadi masalah berkepanjangan yang tidak terselesaikan, bahkan terus berulang dan semakin menyebar ke daerah-daerah yang tadinya tidak berpotensi terjadi kekeringan berubah menjadi suatu lahan yang kritis bagi tanaman.

Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro, dan retensi karbon. Berdasarkan kondisi vegetasinya, kondisi lahan dapat diklasifikasikan sebagai: sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis dan kondisi normal.

Demikian halnya di beberapa wilayah di Kabupaten Majene tidaklah terlepas pula dari masalah kekeringan/lahan kritis yang terjadi. Lahan kritis dibeberapa wilayah terjadi yang diakibatkan oleh datangnya musim kemarau. Walaupun belum berpengaruh terhadap produksi pangan di Kabupaten Majene, akan tetapi perlu terus diwaspadai luas wilayah kekeringan yang terjadi, sehingga bisa dipantau terus dan tidak berpengaruh terhadap akibat yang ditimbulkan, seperti kelaparan, turunnya produksi pertanian, berkurangnya mata pencaharian dan sebagainya. Sistem pemantauan dan peramalan produksi pangan, seperti luas tanam dan luas panen, estimasi produksi dan penyebarannya, kekeringan atau banjir, merupakan hal yang penting dalam menentukan kebijakan pengadaan pangan.

Oleh karena itu, sistem informasi pertanian perlu didukung oleh data yang mampu menyajikan data spasial yang objektif, tepat waktu, dan berkesinambungan, seperti citra satelit. Terkait Luas Lahan Kritis di Luar dan di Dalam Kawasan Hutan Kabupaten Majene Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.130.
Luas Lahan Kritis di Luar dan di Dalam Kawasan Hutan
Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No.	Lahan Kritis	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lahan Kritis di Dalam Kawasan Hutan (Ha)	16.238	16.238	16.238	16.238	16.238
2	Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (Ha)	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872
Jumlah		**20.110**	**20.110**	**20.110**	**20.110**	**20.110**

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, 2021

Daerah yang peluang terjadinya kekeringan cukup tinggi karena curah hujan rendah dan sumber air tanah terbatas, atau daerah yang mempunyai faktor fisik lahan/tanah yang dapat mempercepat timbulnya kekeringan dikategorikan sebagai wilayah rawan kekeringan. Lahan kritis di Kabupaten Majene dari tahun 2016-2020 seluas 20.110 Ha, yang terbagi menjadi kawasan dalam hutan seluas 16.238 Ha dan lahan kritis di luar kawasan hutan seluas 3.872 Ha. Lokasi lahan kritis tersebut tersebar di 6 kecamatan, seperti Kecamatan Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammeroddo Sendana, Tubo Sendana, dan Kecamatan Malunda.

2.4.2.6. Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Majene dilakukan dengan mempertimbangkan rencana struktur ruang (hirarki dan sistem pusat pelayanan) wilayah kabupaten yang meliputi rencana sistem pusat-pusat permukiman dan rencana sistem prasarana wilayah Kabupaten Majene. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka di wilayah Kabupaten Majene ditetapkan setiap kecamatan akan dikembangkan minimal satu pusat kawasan sebagai pusat pelayanan (dijadikan sebagai kawasan perkotaan walaupun belum memenuhi kriteria sebagai kawasan perkotaan).

Agar interkoneksitas antar pusat kegiatan, serta pelayanan prasarana wilayah efisien dan efektif maka perlu diwujudkan sistem interkoneksitas antar kawasan perkotaan dan perdesaan yang berdaya guna besar. Sistem perkotaan Kabupaten Majene dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2012-2032, diperoleh data mengenai luas wilayah perkotaan untuk seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Majene sampai tahun 2020, sebesar 11,07 persen atau seluas 104,93 km^2 sedangkan wilayah perdesaan sebesar 88,93 persen atau seluas 842,90 km^2 dari seluruh total luas wilayah Kabupaten Majene yang seluas 947,84 km^2. Sedangkan pusat Perkotaan Kabupaten Majene berada di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur diluar dari wilayah desa pada kecamatan terssebut.

2.4.2.7. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut UU Pokok Perbankan nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri atas: Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, atau Bank Pegawai. Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI nomor 10 tahun 1998, jenis perbankan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsi menjadi Bank Umum, sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbungan desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai denan UU No. 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Tabel. 2.131.
Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank
Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Bank Umum Konvensional**	**13**	**14**	**14**	**13**	**11**
1.1	Bank Persero	10	10	10	10	10
1.2	Bank Pembangunan Daerah	1	2	2	2	-
1.3	Bank Swasta	2	2	2	1	1
1.4	Bank Asing	-	-	-	-	-
2	**Bank Umum Syariah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : BPS Kab. Majene, 2021

Jumlah Bank dan cabangnya adalah jumlah kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas. Semakin banyak jumlah kantor disuatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut mempunyai potensi ekonomi yang lebih tinggi. Jumlah kantor bank di Kabupaten Majene dalam lima tahun terakhir berkurang kecuali tahun 2017-2018.

Jumlah kantor bank tahun 2016 sebanyak 13 kantor yang terdiri atas bank persero sebanyak 10 kantor, bank pembangunan daerah sebanyak 1 kantor dan bank swasta sebanyak 2 kantor, tahun 2017-2018 jumlah kantor bank naik menjadi 14 kantor dengan rincian bank persero sebanyak 10 kantor, bank pembangunan daerah sebanyak 2 kantor dan bank swasta sebanyak 2 kantor. Sementara tahun 2019 kembali turun menjadi 13 kantor dengan rincian bank persero sebanyak 10 kantor, bank pembangunan daerah sebanyak 2 kantor dan bank swasta sebanyak 1 kantor dan hingga tahun 2020 kembali turun menjadi 11 kantor yang disebabkan oleh bank pembangunan daerah sudah tidak beroperasi. Untuk jenis bank asing dan bank umum syariah belum terdapat di Kabupaten Majene dari tahun 2016-2020.

Perbankan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana secara umum akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya kegiatan perekonomian masyarakat yang membutuhkan jasa ini. Pada tahun 2019 posisi nilai kredit perbankan mengalami peningkatan sebesar 9,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 nilai kredit perbankan mencapai 1.259.706 juta rupiah dari 1.152.613 juta rupiah pada tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat diliat pada tabel berikut;

Tabel. 2.132.
Posisi Pinjaman (Rupiah dan Valuta Asing) yang diberikan Bank Umum dan BPR (juta rupiah) Kabupaten MajeneTahun 2016 – 2020

Posisi Pinjaman	2016	2017	2018	2019	2020
Modal Kerja	568 723	262 375	297 914	341 862	410 867
Investasi	156 766	57 034	51 318	60 617	59 657
Konsumsi	1 047 664	729 956	803 382	857 228	835 334
Total	**1 773 153**	**1 049 366**	**1 152 613**	**1 259 706**	**1 305 857**

Sumber: Website Bank Indonesia http://www.bi.go.id/Bank Indonesia website at http://www.bi.go.id

Dari tahun ke tahun pinjaman paling banyak dilakukan oleh konsumen untuk kegiatan konsumsi yakni mencapai 68 persen atau setara dengan 857.228 juta rupiah. Sedangkan pinjaman untuk modal kerja dan investasi hanya bernilai sebesar 27 persen dan 4,8 persen dari total seluruh pinjaman pada tahun 2019. Meski demikian angka proporsi ini naik dari kondisi sebelumnya yang hanya mencpai 25,85 persen dan 4,45 persen saja. Sedangkan pada tahun 2020 total pinjaman Kabupaten Majene berada di angka 1.305.857 juta rupiah.

Tabel. 2.133.
Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diberikan Bank Umum dan BPR menurut Skala Usaha Di Kabupaten Majene (juta Rp) Tahun 2016 - 2020

Posisi Kredit Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Mikro	329 211	189 400	227 946	247 625	220 356
Kecil	350 965	90 065	965 050	12 837	139 356
Menengah	24 190	15 075	16 853	20 590	55 015
Total	**704 366**	**294 539**	**1 209 831**	**391 053**	**414 726**

Sumber: Website Bank Indonesia http://www.bi.go.id/Bank Indonesia website at http://www.bi.go.id

Pada tahun 2019, posisi kredit tertinggi berasal dari usaha mikro dengan posisi kredit sebesar 63,3 persen atau setara dengan 247.625 juta rupiah. Posisi kredit tertinggi kedua diduduki oleh usaha kecil sebesar 5,26

persen atau 96.505 juta rupiah, sedangkan usaha menengah ada pada posisi terakhir dengan nilai kredit hanya sebesar 3,28 persen atau 16.835 juta rupiah. Jumlah ini menurun drastis jika dibandingkan dengan nilai pinjaman yang diberikan bank umum dan BPR pda tahun 2018 sejumlah 1.209.831 juta rupiah. Hal ini disebabkan oleh turunnya jumlah pinjaman pada kelompok usaha kecil dari 965.050 juta rupiah, menjadi hanya 12.837 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 total kredit usaha di Kabupaten Majene berada diangka 414.726 juta rupiah.

2.4.2.8. Jumlah Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Hiburan

Ketersediaan restoran/rumah makan pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Sedangkan banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Sedangkan penginapan/hotel termasuk dalam kategori jasa akomodasi yang merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Majene.

Selama 5 (lima) tahun terakhir perkembangan jumlah restoran dan rumah makan di Kabupaten Majene tampak berkurang di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan prospek penanaman investasi dan perkembangan ekonomi di Majene terus menurun di setiap tahunnya. Pada tahun 2016-2018 jumlah rumah makan/restoran sebanyak 151 unit, dan terlihat menurun di tahun 2019-2020 menjadi 73 unit. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.134.
Jumlah Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Hiburan
Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Makan/Restoran	151	151	151	73	73
2	Hotel	12	12	14	15	17
3	Hiburan	7	7	6	6	4

Sumber : BPS Kab. Majene, 2021

Sementara di sektor jasa hotel tercatat di setiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana jumlah hotel di tahun 2016-2017 sebanyak 12 unit, mengalami peningkatan di tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebanyak 14 unit dan 15 unit. Di tahun 2020 kembali mengalami penambahan

sebanyak 2 unit atau menjadi 17 unit. Untuk jasa hiburan perkembangan setiap tahunnya juga tampak berkurang, ini terlihat dari data tahun 2016-2017 sebanyak 7 unit, dan berkurang periode tahun 2018-2019 menjadi 6 unit serta di tahun 2020 menjadi 4 unit. Ini menunjukkan bahwa penanaman investasi di Kabupaten Majene terus menurun di setiap tahunnya.

2.4.2.9. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Ketersediaan air bersih di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat *urgent* karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut. Oleh sebab itu, air yang diperlukan rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu mencakup fisik, kimia dan bakteriologis. Penggunaan air yang tidak bersih dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, antara lain: penyakit *cholera, typhus*, disentri dan penyakit kulit. Untuk lebih jelsnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.135.
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga (Unit)	34.015	34.939	38.236	35.763	39.031
2	Jumlah Rumah Tangga berakses air bersih (Non Perpipaan)	27.280	28.685	30.359	26.661	27.872
3	Jumlah Rumah Tangga berakses air bersih (Perpipaan)	8.436	9.573	9.483	10.657	11.186

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Majene Tahun 2021 dan Sumber Data Diolah Tahun 2021

Pada wilayah Kabupaten Majene persentase Jumlah Rumah tangga Pengguna air bersih mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 bergerak pada kisaran 27.280 rumah tangga pengguna air bersih non perpipaan dan 8.436 rumah tangga pengguna air bersih perpipaan. Meningkat pada tahun 2017 sebanyak 28.685 rumah tangga perpipaan dan 9.573 rumah tangga perpipaan. Pada tahun 2018 data yang diperoleh kembali meningkat sebanyak 30.359 rumah tangga non perpiaan dan 9.483 rumah tangga perpipaan, sedangkan tahun 2019 jumlah rumah

tangga non perpipaan menurun yaitu sebanyak 26.661 rumah tangga dan meningkat di sector perpipaan menjadi 10.657 rumah tangga. Pada tahun 2020 rumah tangga pengguna air bersih non perpipaan sebanyak 27.872 rumah tangga dan air bersih perpipaan sebanyak 11.186 rumah tangga.

2.4.2.10. Komunikasi dan Informasi

1. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Ketersediaan daya listrik di Kabupaten Majene tergolong tinggi karena Kabupaten Majene tercatat sebagai pemakai daya listrik yang disuplai dari Kabupaten Mamuju dan Pinrang. Sebagai upaya yang berkesinambungan akan kebutuhan listrik, maka sangatlah diperlukan ketersediaan listrik yang memadai, serta dalam upaya pemenuhan kebutuhan listrik dari tahun ketahun.

Berdasarkan Ketersediaan daya listrik di Kabupaten Majene, Kapasitas Produksi Terima/Beli di Kabupaten Majene Tahun 2020 adalah sebesar 71.191 kWh, Sedangkan Energi Terdistribusi di Kabupaten Majene 2020 adalah sebesar 71.123 dan pada Rasio ketersediaan listrik di Kabupaten Majene adalah sebesar 99,90% maka angka tersebut menunjukkan bahwa hampir 100% kebutuhan listrik sudah dikomsumsi/dinikmati oleh sebagai pihak, baik rumahtangga, swasta, perusahaan, instansi, lembaga, perusahaan lainnya. Lebih jelasnya ketersediaan daya listrik di Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.136.
Rasio Ketersediaan Daya Listrik
Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Terima/Beli (kWh)	62.003	63.041	65.935	71.191	71.191
2	Energi Terdistribusi (kWh)	56.907	59.053	60.963	71.132	71.123
3	Rasio Ketersediaan (%)	91,78	93,67	92,46	99,92	99,90

Sumber : PLN Rayon Majene, 2021

2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Ketersediaan energi listrik menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung aktivitas rumah tangga, baik untuk keperluan penerangan maupun mengakses berbagai kebutuhan lain.

Semakin berkembangnya sektor kelistrikan akan sangat memberikan pengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene. Pada empat tahun terakhir (2016–2020) persentase rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik PLN terus meningkat walaupun peningkatannya kecil. Hingga tahun 2020 hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Majene (96,8 persen) bisa menikmati listrik, rumah tangga yang belum menggunakan listrik tinggal sekitar 3,2 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.137.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Listrik PL	90,17	84,98	91,30	95,87	96,8
2	Listrik Non PLN	6,90	8,85	8,70	4,13	2,55
3	Bukan Listrik	2,93	NA	0,00	0,00	0,65
Jumlah		100	NA	100	100	100

Sumber : BPS Kab. Majene, 2021

3. Persentase Penduduk Pengguna HP/Telepon

Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang ada pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa handphone (HP) dan telepon rumah biasa.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga berkembang sangat pesat, termasuk teknologi komunikasi. Pada awalnya telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara (percakapan). Kemajuan teknologi komunikasi telah mampu meningkatkan fungsi telepon, dari hanya sekedar menyampaikan pesan suara, juga dapat menyampaikan pesan tulisan maupun gambar. Kemajuan alat komunikasi telepon yang tidak menggunakan kabel (wireless) yang sering kita sebut sebagai handphone (telepon selular), sangat pesat pertumbuhannya. Selain bentuk dan ukurannya yang semakin kecil dan efektif, handphone juga ada yang disertai dengan fungsi tambahan sebagai penyimpanan data, kamera digital, dsb. Pada era teknologi saat ini, pertumbuhan pengguna telepon selular lebih pesat dibandingkan pengguna telepon kabel.

Tabel. 2.138.
Persentase Penduduk Pengguna HP/Telepon
Di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

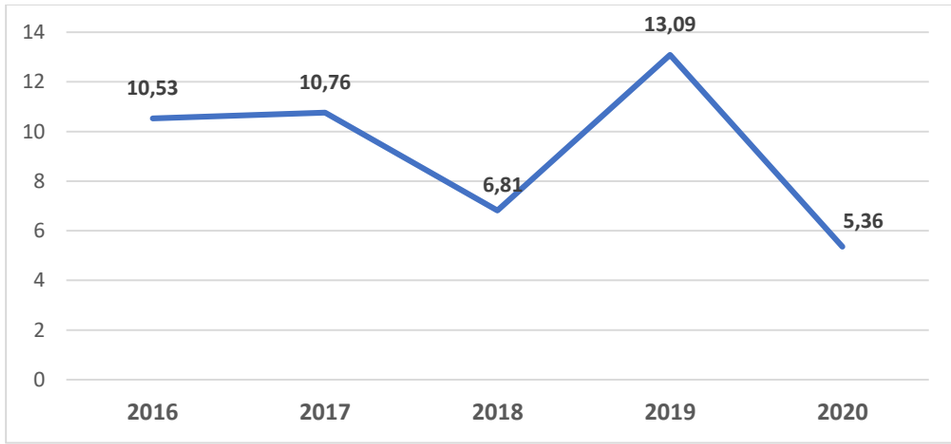
No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop /Notebook, Tablet)	46,53	66,76	72,14	72,44	80,29
1.1	Laki-Laki	49,97	67,58	72,54	73,43	81,10
1.2	Perempuan	43,29	65,98	71,77	71,51	74,24

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Majene, BPS 2021

4. Penyediaan Komunikasi

Dari sektor komunikasi, Kabupaten Majene memiliki 3 lokasi Kantor Pos Pembantu dan 4 Lembaga Penyiaran. Berdasarkan data pada tahun 2016 banyaknya sambungan induk telepon di Kabupaten Majene sebesar 936 SST, sedangkan sambungan speedy sebanyak 715 sambungan. Pada tahun berikutnya banyaknya sambungan induk telepon meningkat menjadi 728 SST dan sambungan speedy menjadi 780 INET. Jumlah sambungan induk telepon serta sambungan speedy juga kian meningkat di tahun 2018, dengan jumlah masing-masing 892 SST dan 1088 INET. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut.

Gambar 2.50.
Laju Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi Menurut lapangan Usaha Kabupaten Majene (Persen), 2016 - 2020



Sumber : BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Tercatat laju pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi bertumbuh sangat cepat pada tahun 2019 mencapai 13,09 persen. Dimana, pada tahun sebelumnya sempat melambat di tingkat 6,81



persen dan memiliki rata-rata laju pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya sebesar 10 persen sedangkan pada tahun 2020 berada diangka 5,36 persen. Nilai PDRB sektor ini mencapai 218,9 miliar rupiah dan berkontribusi terhadap PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Majene sebanyak 5,49 persen.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan. Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti angka kriminalitas, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Salah satu indikator yang dapat mendukung iklim investasi suatu daerah adalah angka kriminalitas. Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat berpengaruh terhadap yang mendukung terhadap iklim investasi yang kondusif. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Pemerintah Kabupaten Majene menunjukkan perhatian yang cukup besar. Karena meskipun masyarakat Kabupaten Majene adalah masyarakat mono etnis dengan mayoritas penduduk beretnis mandar dan mayoritas penduduknya juga beragama Islam namun bukan tidak mungkin dapat terjadi konflik yang mengarah kepada disintegrasi.

Jumlah tindak pidana di Kabupaten Majene menurut kepolisian sektor pada tahun 2018 berada pada angka 346, dimana angka ini naik dari tahun sebelumnya 2017 yang berada pada 283. Dan pada tahun 2019 kembali menurun diangka 265 Kasus sedangkan pada tahun 2020 juga menurun di angka 257. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.139.
Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Majene
Menurut Kepolisian Sektor Tahun 2016 - 2020

Kepolisan Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
Polsek Banggae	27	23	32	21	26
Polsek Pamboang	16	16	28	23	12
Polsek Sendana	46	46	57	34	24
Polsek Malunda	32	29	35	19	5
Polres Majene	201	169	194	168	190
Jumlah/Total	**323**	**283**	**346**	**265**	**257**

Sumber : Kepolisian Resort Majene, 2021

Angka kriminalitas yang rendah tentu tidak dapat diwujudkan tanpa peran penegak hukum yang baik, Secara umum persentase penyelesaian tindak pidana dimajene juga mengikuti tren jumlah tindak pidana yang terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.140.
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana
Menurut Kepolisian Sektor, Tahun 2016 - 2020

Kepolisan Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
Polsek Banggae	81,29	82,00	81,32	81,16	73,07
Polsek Pamboang	89,00	87,00	80,11	81,54	58,33
Polsek Sendana	81,00	82,11	79,30	77,00	83,33
Polsek Malunda	74.00	70,00	81,00	82,31	80,00
Polres Majene	70,27	71,37	74,58	72,22	63,68

Sumber : Kepolisian Resort Majene, 2021

Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

Tabel. 2.141.
Angka Kriminalitas Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No.	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
1	Terhadap Ketertiban	-	2	2	-	1
2	Pembakaran	-	1	1	-	-
3	Mata Uang	-	1	1	-	1
4	Pembunuhan	2	2	2	1	2
5	Penganiyayaan	2	3	3	2	12
6	Pencurian	15	16	16	23	9
7	Penggelapan	1	1	1	-	1
8	Perampokan	2	1	1	1	-
9	Narkotika	23	54	54	38	59
10	Pembalakan Liar	-	1	1		-
11	Penadahan	1	1	1	1	1
12	Penipuan	-	8	8	6	3
13	Kesusilaan	1	2	2	1	1
14	Perlindungan Anak	9	6	6	9	5
15	Korupsi	2	8	8	5	11
16	Lalu Lintas	1	1	1	7	2
17	Lain-Lain	7	41	41	-	12

Sumber : Kepolisian Resort Majene, 2021

Tercatat selama kurun waktu tahun 2016 sampai 2020 kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kabupaten Majene terjalin secara serasi dan seimbang. Gangguan yang terjadi di Kab. Majene pada periode tersebut dapat dikaterogikan menjadi 2 jenis, yakni:

1. Demonstrasi oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat seputar isu sosial terjadi di Kab. Majene.
2. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh beberapa oknum baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah yang meresahkan masyarakat;

2.4.3.2. Proses dan Kemudahan Perijinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi,sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Majene terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk.

Perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kepastian sistem dan prosedur perijinan yang meliputi persyaratan, waktu dan biaya serta transparansi dan akuntabilitas proses perijinan merupakan komponen penting dalam pelayanan perijinan. Pelayanan perijinan yang berbasis digital terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi pemohon, meningkatkan efisiensi dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan. Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam bidang pelayanan perizinan tersebut, maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene, serta Peraturan Bupati Majene Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Majene.

Dari kesepakatan rangkaian rapat koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, maka diterbitkanlah Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang memberi tanggung jawab kepada DPMPTSP untuk menerima limpahan kewenangan melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan, yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Majene.

Dalam perkembangannya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*online single submission-OSS*). Sistem ini memungkinkan investor dan calon investor mengurus izin usaha secara online tanpa dibatasi waktu dan tempat,

disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga UKM. Selain itu DPMPTSP pada tahun 2020 kembali menerapkan Sistem Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk publik atau yang dikenal dengan istilah (*SiCantik Cloud*) diluar dari perijinan system OSS.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut maka jenis pelayanan perizinan yang dikelola oleh DPMPTSP Kabupaten Majene tahun 2020-2021 dipilah menjadi pelayanan perizinan dengan OSS dan pelayanan perizinan non OSS dengan aplikasi SiCantik Cloud, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.142.

Pelayanan Perizinan OSS dan Non OSS (SiCantik Cloud) Kabupaten Majene Tahun 2020-2021

No.	Nama Perizinan	Jumlah Perizinan Per Juli 2021	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Lama Pengurusan (Hari Kerja)	Biaya Resmi Pengurusan
Perizinan Usaha OSS					
1	Izin Usaha Mikro Kecil	104	5	2-3	Tidak Dipungut Biaya
2	Izin Usaha Jasa Konstruksi	12	7	5	Tidak Dipungut Biaya
3	Surat Izin Usaha Perdagangan	7	5-12	3-5	Tidak Dipungut Biaya
4	Izin Lokasi	4	8-10	5	Tidak Dipungut Biaya
5	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	1	5-13	5	Tidak Dipungut Biaya
6	Izin Lingkungan				
	a. SPPL	137	5	5	Tidak Dipungut Biaya
	b. UKL	-	10	10	Tidak Dipungut Biaya
	c. AMDAL	-	12	12	Tidak Dipungut Biaya
Perizinan Tertentu Non OSS (Aplikasi SiCantik Cloud)					
1	Izin Mendirikan Bangunan	141	5	3	Rp. 3.000-12.500/M²
2	Izin Praktek Dokter Umum	23	9	10	Tidak Dipungut Biaya
3	Izin Praktek Dokter Spesialis	4	9	10	Tidak Dipungut Biaya
4	Izin Praktek Dokter Gigi	5	9	10	Tidak Dipungut Biaya
5	Izin Kerja Perawat	10	9	10	Tidak Dipungut Biaya
6	Izin Kerja Bidan	10	9	10	Tidak Dipungut Biaya
7	Izin Praktek Bidan Mandiri	3	9	10	Tidak Dipungut Biaya
8	Izin Tenaga Kefarmasian	4	8	10	Tidak Dipungut Biaya
9	Izin Praktek Apoteker	11	10	10	Tidak Dipungut Biaya
10	Izin Praktek Trapis Gigi dan Mulut	4	9	10	Tidak Dipungut Biaya
11	Izin Pengobatan Tradisional	-	10	10	Tidak Dipungut Biaya
12	Izin Kerja Fisioterapi	-	9	10	Tidak Dipungut Biaya
Non Perizinan Non OSS (Aplikasi SiCantik Cloud)					
1	Izin Operasional Pendidikan	2	3	1-2	Tidak Dipungut Biaya
2	Izin Penelitian	258	3	1-2	Tidak Dipungut Biaya
3	Rek. Surat Izin Penangkapan Ikan	24	9	5	Tidak Dipungut Biaya
4	Rek. Surat Izin Usaha Perikanan	8	5-12	5	Tidak Dipungut Biaya
5	Izin Permintaan Sumbangan	4	3	1-2	Tidak Dipungut Biaya
6	Rek. Alih Fungsi Lahan	4	5	5	Tidak Dipungut Biaya
7	Izin Penutupan Lahan	-	5	5	Tidak Dipungut Biaya

No.	Nama Perizinan	Jumlah Perizinan Per Juli 2021	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Lama Pengurusan (Hari Kerja)	Biaya Resmi Pengurusan
8	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	1	5	5	Tidak Dipungut Biaya
9	Rek Izin Pertambangan	-	10	10	Tidak Dipungut Biaya
10	Izin Reklame	1	5	3	Tidak Dipungut Biaya

Sumber : DPMPTSP Kab. Majene, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui waktu yang diperlukan untuk pengurusan perizinan dari masing-masing sektor, serta pungutan biaya untuk pengurusan izin tersebut (hampir semuanya tanpa biaya kecuali Ijin Mendirikan Bangunan dengan penghitungan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2010 beserta Perubahannya). Jenis perizinan usaha OSS sebanyak 8 jenis izin, Perizinan Tertentu Non OSS (Aplikasi SiCantik Cloud) sebanyak 12 jenis izin, dan Non Perizinan Non OSS (Aplikasi SiCantik Cloud) sebanyak 10 jenis izin.

2.4.3.3. Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah

Salah satu perubahan mendasar dari perubahan paradigma dengan adanya reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan lebih besar dalam bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal, yang bermuara pada terciptanya dinamika serta corak pembangunan baru di daerah. Salah satu aspek penting kebijakan di bidang keuangan daerah adalah kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan daerah. Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya, yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam melakukan pungutan terhadap pos-pos pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan berprinsip pada pelayanan yang optimal serta tsidak memberatkan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan daerah dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara konsep, PAD adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada

masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian kabupaten dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat. Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi sektor swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta.

Sumber-sumber PAD diantaranya adalah hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Komponen PAD tersebut secara penuh harus dapat dikelola daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah agar dalam upaya penggalian sumber pendapatannya pemerintah tidak mendistorsi perekonomian. Otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih baik, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan gambaran langkah konkret pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Disamping itu, pemerintah daerah masih perlu melakukan penanganan gejolak ekonomi dan politik yang masih terjadi beberapa tahun terakhir. Pemerintah dituntut menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian yang lesu agar dapat kembali ke posisi sebelum krisis.

Tabel tentang jumlah pajak yang diberlakukan di Kabupaten Majene yang informasi datanya diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene. Sedangkan untuk data nilai retribusi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene.

Pada tahun 2016 nilai pajak dan retribusi mengalami peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi lagi di tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 6.763.363.698 di sektor pajak dan Rp. 13.489.680.956,38 di sector retribusi. Sementara pada tahun 2018 nilai pajak dan retribusi mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 7.666.911.975 untuk pajak dan Rp. 16.456.080.037,15 untuk retribusi daerah. Tahun 2019 pajak daerah mencapai Rp. 8.820.240.469,29 serta

sektor retribusi yang mengalami penurunan yang cukup drastic yang hanya mencapai Rp. 7.639.365.669,65 dan kembali menurun di tahun 2020 yang hanya mencapai Rp. 8.212.013.786,14 untuk pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp. 5.777.284.745,95.

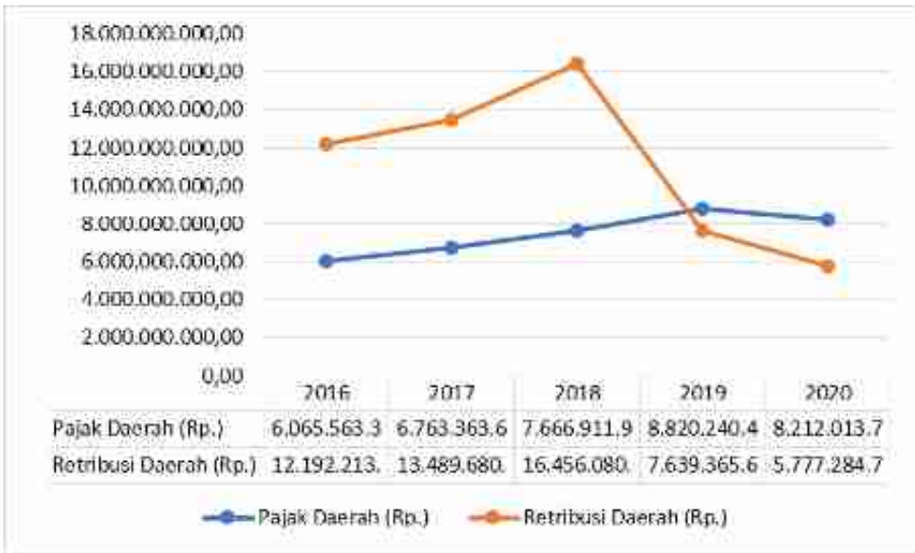
Nilai Pajak dan retribusi dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan walaupun kenaikannya fluktuatif dimungkinkan karena semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Majene terhadap kewajiban pajak yang harus dibayarkan serta semakin tinggi pula tingkat kepercayaannya terhadap pemerintah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel. 2.143.
Realisasi Pendapatan Menurut Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Pajak Daerah (Rp.)	Retribusi Daerah (Rp.)
1	2016	6.065.563.301,50	12.192.213.718,75
2	2017	6.763.363.698,00	13.489.680.956,38
3	2018	7.666.911.975,00	16.456.080.037,15
4	2019	8.820.240.469,29	7.639.365.669,65
5	2020	8.212.013.786,14	5.777.284.745,95
Jumlah		**37.528.093.229,93**	**55.554.625.127,88**

Sumber : BKAD dan Bapenda Kab. Majene, 2021

Gambar 2.51.
Grafik Realisasi Pendapatan Menurut Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016-2020



Sumber : *BKAD dan Bapenda Kab. Majene, 2021*

2.4.3.4. Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Usaha

Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta ketenagakerjaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.144.
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha
Di Kabupaten Majene Hingga Tahun 2020

No.	Jenis Peraturan Daerah
1	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar
3	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
5	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6	Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
7	Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek
8	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2011-2031
9	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
10	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
11	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
12	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi
13	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
14	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan
15	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung
16	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
17	Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kabupaten Majene
18	Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2017 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
19	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten Majene Tahun 2020-2040

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Majene, 2021

Berdasarkan gambaran pada tabel diatas, menunjukkan bahwa dari tahun 2008-2020, terdapat 19 Perda yang dapat memberikan kemudahan dalam mengadakan investasi di Kabupaten Majene. Perda yang mengatur tentang penanaman modal akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor. Perda tersebut, diharapkan menciptakan iklim kondusif untuk pengembangan investasi dan penciptaan.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Pendidikan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja agar dapat lebih produktif. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena pendidikan baik formal maupun non formal seseorang diharapkan memiliki kemampuan untuk lebih memahami dalam mengadaptasi perubahan-perubahan di lingkungan kerja dengan lebih cepat. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan baik formal maupun non formal akan berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas kerja seorang karyawan dari segi kuantitas. Karyawan yang tingkat pendidikannya tinggi akan mempunyai ketrampilan dalam pelaksanaan kerja sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kerja.

Tabel. 2.145.
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Di Kabupaten Majene Tahun 2020

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			% Bekerja terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	% Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja				
1	SD	34.005	1.492	35.497	95,80	16.273	51.770	68,57
2	SMP	12.090	235	12.325	98,09	11.989	24.314	50,69
3	SMA	18.787	1.423	20.210	92,92	8.527	28.737	70,33
4	PT	15.624	429	16.053	97,33	2.540	18.593	86,34
Jumlah		**80.506**	**3.579**	**84.085**	**95,74**	**39.329**	**123.414**	**68,13**

Sumber : BPS Kab. Majene, 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan menganggur) dengan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK Kabupaten Majene tahun 2020 sebesar 68,13 persen lebih besar dari tahun 2019 yang sebesar 67,16 persen. Angka ini menunjukkan bahwa diantara 100 orang penduduk usia kerja terdapat sekitar 68 sampai dengan 69 orang yang aktif secara ekonomi. Sedangkan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu adalah tingkatan Sekolah Dasar, dimana jumlah yang bekerja sebesar 34.005 jiwa, pengangguran sebesar 1.492 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebesar 35.497 jiwa atau sebesar 95,80 persen yang bekerja terhadap angkatan kerja dengan jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 16.273 orang. Sedangkan yang terendah berada pada jenjang SMP, dimana jumlah yang bekerja sebesar 12.090 jiwa, pengangguran sebesar 235 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebesar 12.325 jiwa atau sebesar 98,09 persen yang bekerja terhadap angkatan kerja dengan jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 11.989 orang.

2.4.4.2. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada

pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial.

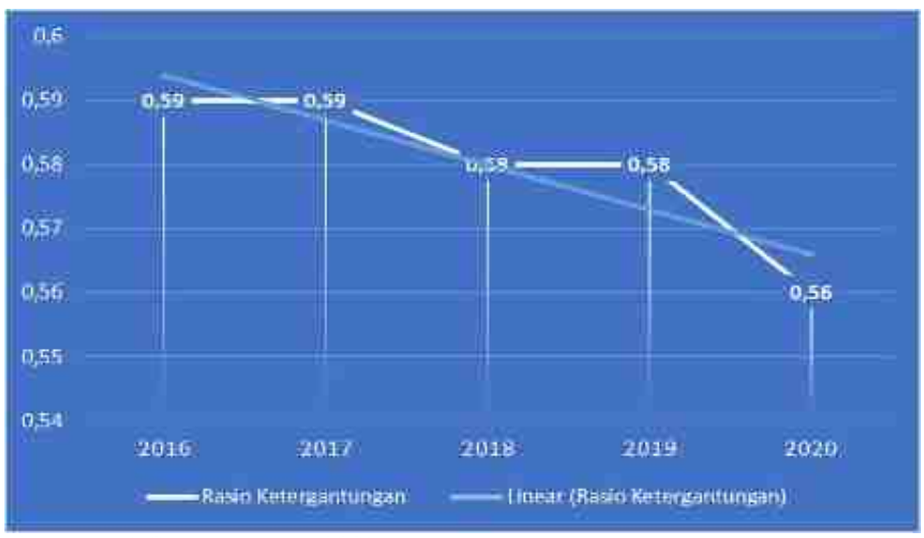
Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif. Untuk lebih jelasnya rasio ketergantungan di Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.146.
Rasio Ketergantungan Kab. Majene Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	53.536	54.188	54.541	55.059	53.951
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	7.842	8.350	8.539	8.773	8.827
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1+2)	61.378	62.538	63.080	63.832	62.778
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	104.364	106.534	108.192	110.052	111.629
5	Rasio Ketergantungan (3/4)	0,59	0,59	0,58	0,58	0,56

Sumber : BPS Kab. Majene, 2021

Gambar 2.52.
Rasio Ketergantungan Kab. Majene Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Majene, 2021

Rasio ketergantungan atau *Dependency Ratio* (DR) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pada tahun 2020, angka DR untuk Kabupaten Majene sebesar 0,56 atau sebesar 56 persen yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 56 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, angka DR menunjukkan penurunan, yang berarti bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dari Tabel dan gambar diatas dapat menunjukkan bahwa angka DR laki-laki lebih rendah dibandingkan angka DR perempuan, yang berarti bahwa beban tanggungan penduduk perempuan usia produktif lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

2.5. Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD periode tahun 2016-2021. Evaluasi capaian kinerja RPJMD pada tahun 2016-2021 ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja daerah Kabupaten Majene yang terbagi atas Aspek Kesejahteraan Masayarakat, Aspek pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Pada evaluasi tersebut status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam evaluasi hasil RPJMD terdiri dari 3 kategori yaitu tercapai, tidak tercapai dan terampaui. Rekapitulasi capaian kinerja daerah Kabupaten Majene tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.147.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Terhadap Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Pertumbuhan PDRB,	5,73	6,02	6,29	6,06	6,06	-1,38	6,69	<
2	Laju inflasi	3,48	2,49	4,37	3,67	2,88	2,88	2,68	=
3	PDRB per kapita,	15,46	21,25	22,84	19,47	19,47	19,47	19,03	=
4	Persentese Penduduk diatas garis kemiskinan	15,57	14,89	13,94	13,79	13,72	13,73	12,87	<
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM),	64,40	64,80	65,33	66,01	66,59	66,91	66,25	=
6	Angka rata-rata lama sekolah,	7,74	7,81	8,14	8,25	8,25	8,56	8,60	<
7	Angka harapan lama sekolah,	13,52	13,54	13,57	13,58	13,60	13,61	14,61	<
8	Angka usia harapan hidup,	60,51	60,75	60,64	60,79	61,30	61,56	61,57	<
9	Persentase balita gizi buruk	0,9	1,17	2,41	4,74	26,4	23,4	3,2	>
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,73	64,91	70,48	70,48	74,09	70,40	72,98	<
11	Tingkat pengangguran terbuka	5,51	5,27	4,94	4,62	3,43	4,25	3,01	>
12	Indeks Kepuasan Masyarakat,	0	0	0	0	75	75	85	<
13	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
14	Predikat SAKIP Pemda Kab. Majene	C	C	CC	B	B	B	B	=
15	Nilai LPPD Pemda Kab. Majene	3,39	3,41	3,43	3,5	3,51	3,51	3,53	<

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
16	Konstribusi sektor industri terhadap PDRB	5,07	5,01	5,18	5,05	5,18	5,18	5,5	<
17	Rasio Ruang Terbuka Hijau	11%	32,27%	35,12%	35,12%	38%	38%	27%	>
18	Indeks Kualitas Lingkungan	65,62	68,78	64,54	74,47	79,89%	79,89	65,88%	>
19	Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan sawah	55,56%	59,64%	52,72%	65,80%	72,25%	72,25	68,57%	=
20	Persentase jalan produksi perikanan dalam kondisi baik	70%	82,12%	71,67%	54,46%	67,90%	67,91	76,67%	<
21	Persentase usulan musrenbang yang terakomodir dalam APBD	32,23%	38%	20,98%	38,17%	52,82%	52,82	44,08%	>
22	Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD	70,93%	78,82%	92,86%	92,86%	89,27%	89,27	86,98%	=

Sumber : Bapeda Kab. Majene, 2021

Tabel 2.148.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Terhadap Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita,	9,138	9,441	9,559	9,904	10,029	10,056	9,225	=
2	Presentase desa berstatus swasembada terhadap total desa, (I*ndeks Desa Membangun)*	0,581	0,526	0,542	0,577	0,598	0,598	0,661	=
3	Angka kriminalitas	280	323	283	346	265	257	200	>

Sumber : Bapeda Kab. Majene, 2021

Tabel 2.149.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Terhadap Aspek Pelayanan Umum K abupaten Majene Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	**Layanan urusan Wajib Dasar, meliputi:**								
	a. Pendidikan, meliputi:								
	a.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),	55%	83%	82%	50%	44%	59%	64%	<
	a.2. Angka partisipasi kasar,								
	▪ SD	109,36	101,8	106,52	113,45	107,950	103,910	115,42	<
	▪ SMP	77,54	77,16	93,96	84,16	92,940	84,250	93,42	<
	▪ SMA/SMK	87,8	89,32	75,03	76,07	107,35	82,70	91,14	<
	a.4. Angka Partisipasi Murni,								
	▪ SD	99,61	96,16	94,98	96,43	97,00	96,86	98,21	<
	▪ SMP	68,12	71,1	73,6	75,8	71,00	71,81	81,6	<
	▪ SMA/SMK	61,77	54,03	54,72	56,35	56,00	56,06	69,25	<
	a.5. Angka partisipasi sekolah,								
	▪ SD	112,42	96,16	96,55	96,43	87,130	96,860	101,03	<
	▪ SMP	97,38	90,26	91,63	93,14	60,420	92,720	97,54	<

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
	▪ SMA/SMK	70,92	65,24	71,69	76,18	tidak ada data	tidak ada data	80,89	<
	a.6. Angka Putus Sekolah:								
	▪ SD	0,51	1,94	0,28	0,18	0,15	0,33	0,14	<
	▪ SMP	0,13	0,97	0,16	0,50	0,66	0,22	0,35	=
	▪ SMA/SMK	0,70	7,85	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	0,08	<
	a.7. Angka Kelulusan:								
	▪ SD	100	100	100	100	100	100	100	=
	▪ SMP	98,54	98,80	98,80	99,06	94,480	100	99,32	=
	▪ SMA/SMK	98,90	99,27	99,27	99,32	100	tidak ada data	99,64	=
	a.8. Angka Melanjutkan (AM),								
	▪ SD & SMP	78,81	98,80	99,10	95,98	89,89	72,650	100	<
	▪ SMA/SMK	109,87	89,70	90,90	122,96	123,84	125,49	94,50	>
	a.9. Fasilitas pendidikan								
	▪ SD	62,00	63,43	64,93	66,73	171	171	70,33	<
	▪ SMP	65,41	68,71	73,81	78,41	37	37	88,11	<
	▪ SMA/SMK	78,80	79,20	79,71	80,22	tidak ada data	tidak ada data	81,24	<
	a.12.Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar,	0,029	0,033	0,040	0,040	tidak ada data	tidak ada data	0,040	<



NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
	a.13.Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah,	0,033	0,036	0,040	0,040	tidak ada data	0,08	0,040	<
	a.20.Persentase sekolah berakreditasi minimal "B"	47%	50%	55%	60%	59.90%	59.90%	70%	<
	a.21.Persentase pemenuhan kebutuhan guru	68%	72%	76%	80%	78.64%	78.64%	88%	<
	b. Kesehatan, meliputi:								
	b.1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup,	15,5	18,3	13,3	12,8	3,40	12,23	8,29	<
	b.2 Angka kelangsungan hidup bayi	0,98	0,98	0,98	0,98	0,87	0,87	0,966	<
	b.3. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup,	18,6	18,33	17,7	13,9	12,50	0,54	15,8	<
	b.5. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup,	143,1	225,6	136,1	271,9	267,70	163,10	129,45	<
	b.9. Rasio dokter per satuan penduduk:	16,76	11,8	16,82	11,42	23,21	23,21	47,83	<
	b.10 Rasio tenaga medis per satuan penduduk	256,31	286,7	tidak ada data	tidak ada data	361,27	361,27	275,41	<
	b.11 Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani	89,9	80,21	92,70	101,1	90,60	94,70	88	=
	b.12.Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan,	75,64	78,50	80,00	85,00	-	-	88,00	<
	b.13.Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI),	64,63	57,53	80,85	56,10	56,10	51,20	79,3	<

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
	b.14.Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan:	100	100	100	100	100	100	100	=
	b.19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	84,34	88,51	90,32	96,50	406	492	100	<
	b.24 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	126	15	32	57	57	100	<
	b.26 Angka kejadian malaria	47,00	22,00	41,00	21,30	159,00	104,00	19,30	<
	b.27.Tingkat kematian akibat malaria,	0	0	0	0	0	0	0	-
	b.34 Cakupan kunjungan bayi	100	100	92,43	100	96,47	99,50	100	<
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	71,2	71,80	72,75	72,80	72,75	70,50	76,8	<
	Cakupan Pelayanan Anak Balita	82,5	79,10	80,00	79,52	80,10	73,95	87,00	<
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	82,14	82,14	82,14	82,14	100	100	86,40	>
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat	100	100	100	100	100	100	100	=
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100	100	100	=
	Cakupan Desa /Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi < 24 Jam	100	100	100	100	100	100	100	=

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Cakupan Neotanus dengan Komplikasi yang ditangani	42,7	49,00	50,53	55,5	tidak ada data	tidak ada data	70	<
	Cakupan Pelayanan Nifas	79,2	83	85	88	tidak ada data	tidak ada data	92	<
	Cakupan Fasilitas Kesehatan								
	· Puskesmas Pembantu	41	0,55	0,56	0,56	0,52	0,63	41,5	<
	· Puskesmas	138	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	=
	· Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,62	0,62	0,59	0,58	0,58	0,58	0,55	=
	· Rasio Pos Yandu Per Satuan Balita	1,7	*10,39*	*10,37*	*9,62*	*9,46*	*6,25*	*6,25*	=
	C. Pekerjaan umum dan penataan ruang. meliputi:								
	c.1. Pekerjaan Umum, meliputi:								
	c.1.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik,	71,93	33,49%	36,20%	38,55%	39,26%	44,31%	81,00%	<
	C.1.7. Persentase Rumah tinggal bersanitasi	65,55%	74,00%	78,11%	87,50%	93,78%	93,79%	100%	<
	C.1.9 Persentase drainase dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat	121,73	88,46%	89,07%	91,14%	91,47%	91,47%	136,03	<
	C.1.11 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	79,26%	82,00%	83,69%	74,50%	89,90%	89,90%	82,00%	>
	c.1.14.a. Persentase penduduk berakses air minum (Non perpipaan)	82,10%	82,10%	79.04%	74.55%	74.55%	71.41%	88,92%	<

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
	c.1.14.b. Persentase penduduk berakses air minum (perpipaan)	27,40%	27,40%	24,80%	29,80%	29,80%	28,66%	34,48%	<
	C.2. Penataan Ruang, meliputi:								
	c.2.3 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan,	0,0278	0,0278	0,0278	0,0278	tidak ada data	tidak ada data	0,0278	<
	d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, meliputi:								
	d.6. Persentase lingkungan pemukiman kumuh	8,80%	4,07%	3,00%	1,00%	tidak ada data	tidak ada data	0,00%	<
	- Persentase rumah tangga pengguna air bersih	17,64%	74,00%	78,11%	87,50%	93,78%	93,79%	46,46%	<
	- Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	65,55%	74,16%	82,78%	91,39%	tidak ada data	tidak ada data	100,00%	<
	e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, meliputi:								
	e.1. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	44	44	44	44	tidak ada data	tidak ada data	44	=
	e.2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Keindahan)	100	100	100	100	tidak ada data	tidak ada data	100	=

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
	e.3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota,	100	100	100	100	tidak ada data	tidak ada data	100	=
	e.4. tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	15-30	15-30	15-30	15-30	tidak ada data	tidak ada data	15-30	=
	e.5. Persentase Penegakan PERDA.	100	100	100	100	tidak ada data	tidak ada data	100	=
	- Rasio Personil Satpol PP terhadap 10.000 Penduduk		2,95	4,00	6,00	tidak ada data	tidak ada data	6,00	=
	f. Sosial, meliputi:								
	f.1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial,	61,54	61,54	62,00	63,00	0,000	0,000	65,00	<
	f.9. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah rnenerima jaminan sosial,	61,54	61,54	61,64	62,00	tidak ada data	tidak ada data	66,00	<
	Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi:								
2	a. Tenaga kerja, meliputi:								
	a.3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan,	67,01	64,91	61,60	67,01	70,67	0,00	93,80	<

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
	a.4. Keselamatan dan perlindungan,	100	100	100	100	100	100	100	=
	- Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,73	64,91	70,48	70,48	74,09	70,40	74,31	<
	- Tingkat Pengangguran terbuka	5,51	5,27	4,94	4,62	3,43	4,26	2,89	<
	b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meliputi:								
	b.1. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	7,80%	7,90%	7,90%	25%	25%	25%	22%	>
	b.6. Partisipasi angkatan kerja perempuan	87,06	53,47%	45,63%	42,21%	42,21%	42,21%	91,53%	<
	C. Pangan, meliputi:								
	c.1. Ketersediaan pangan utama (ketersediaan pangan)	85,29	59,90	63,52	73,08	61,56	101,58	75,62	>
	d. Pertanahan, meliputi:								
	d.1. Persentase luas lahan bersertifikat:	57,01%	57,01%	83,96%	84%	8,50%	10,17%	88%	<
	d.2. Penyelesaian kasus tanah Negara, dan	83,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
	e. Lingkungan hidup, meliputi:								
	e.2. Kabupaten/Kota, meliputi:								
	e.2.21. Persentase jumlah sampah yang tertangani,	75,48	76,07	79,65	80,70	80,70	80,70	86,21	<



NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- Penyelesaian Izin Lokasi	100	100	100	100	100	100	100	=
	- Prosentase Pencemaran Status Mutu Air	50	50	50	50	50	50	50	=
	- Prosentase Pengawasan Pelaksanaan Amdal	100	*100*	100	100	100	100	100	=
	- Prosentase penegakan hukum	100	*100*	100	100	100	100	100	=
	- Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk								
	f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,meliputi:								
	f.1. rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk,	84,68	86,30	89,04	91,78	81,85	86,48	97,26	<
	f.2. Rasio bayi berkte lahir (kepemilikan akta kelahiran /1000 penduduk)	41,70	156,70	160,00	180,00	180,00	180,00	220,00	<
	g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,meliputi:								
	g.6. Persentase PKK aktif,	100	100	100	100	100	100	100	=
	h. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera, meliputi:								
	h.9. Rasio Akseptor KB	58,26	59,43	60,26	61,45	71,77	72,14	63,5	>
	- Persentase Posyandu aktif	45,6	51,39	51,39	49,23	49,23	37,73	100	<
	- Cakupan peserta KB aktif	14,588	69,060	15,288	15,537	76,380	76,380	16,034	>



NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
	i. Perhubungan, meliputi:								
	i.5. Persentase layanan angkutan darat	51	53,90%	60,30%	63,20%	63,20%	70,93%	69,40%	=
	j. Komunikasi dan informatika, meliputi:								
	K. Koperasi, usaha kecil dan menengah, meliputi								
	k.1. Persentase koperasi aktif,	78,26	100	84,70	83,33	89,91	89,91	100	<
	k.4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil.	99,11	100	100	100	100	100	100	=
	L. Penanaman modal, meliputi:								
	Realisasi Penanamanan Modal Dalam Negeri	118,75	172,35	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	=
	M. Kepemudaan dan olahraga, meliputi:								
	m.1. Persentase organisasi pemuda yang aktif, (Jumlah dalam RPJMD)	100	100	105	110	110	110	120	<
	Jumlah Organisasi Pemuda	100	100	105	110	110	110	120	<
	Jumlah Organisasi Olahraga	21	*21*	21	25	25	25	32	<
	Jumlah Organisasi Kepemudaan	5	*5*	5	6	7	7	8	<
	Jumlah Kegiatan Olahraga	5	*7*	7	8	8	8	10	<



NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Rasio Gelanggang / Balai Remaja	0,0018	0,0018	0,0030	0,0029	0,0017	0,0023	0,0040	<
	Rasio Lapangan Olahraga	0,06	*0,059*	0,065	0,058	0,057	0,057	0,077	<
	O. Persandian, meliputi:								
	Rasio pelayanan persandian		100	100	100	100	100	100	=
	P. Kebudayaan, meliputi:								
	p.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya,	10	8	9	10	10	10	10	=
	p.2. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan,	1,396	1,396	1,396	1,396	1,420	1,420	19	>
	- Sarana penyelenggaraan sebi dan buadaya	3	3	3	3	3	3	1,396	>
	- Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	91	91	91	91	91	91	3	>
	- Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	6,52	7,02	7,52	8,02	8,52	9,02	91	<
	Q. Perpustakaan, meliputi:								
	R. Kearsipan, rneliputi:								

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
	r.1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, dan	81,1	82	68,75	78,12	78,12	78,12	89	<
	r.2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan.	1	1	2	2	3	4	3	=
	Layanan Urusan Pilihan, meliputi:								
3	A. Pariwisata, meliputi:								
	a.1. Kunjungan wisata	34581	28761	40975	121967	148571	110766	128506	<
	- Konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,92%	0,29%	0,36%	0,52%	0,69%	0,72%	0,80%	<
	B. Pertanian, meliputi:								
	Produktifitas Tanaman Padi Sawah	8,932	19,57	19,88	19,94	tidak ada data	tidak ada data	16,90	=
	Produktifitas Tanaman Padi Ladang	7,95	*9,366*	9,831	10,2	tidak ada data	tidak ada data	11,2	<
	Produktifitas Tanaman Ubi Kayu	5,053	*5,816*	5,398	5,056	tidak ada data	tidak ada data	5,995	<
	Produktifitas Tanaman Ubi Jalar	562	*840*	1,004	944	tidak ada data	tidak ada data	1,215	<
	Produktifitas Tanaman jagung	1,381	*7,98*	7,313	11,74	tidak ada data	tidak ada data	15	<
	Produktifitas Tanaman Kacang Hijau	99	*73*	58	53	tidak ada data	tidak ada data	85	<

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Kontribusi Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB	1,61	*1,67*	1,71	1,75	tidak ada data	tidak ada data	1,85	<
	Kontribusi Sektor Tanaman Holtikultura Terhadap PDRB	3,35	*2,94*	3,26	3,32	tidak ada data	tidak ada data	4,01	<
	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	9,67	*9,04*	9,51	9,66	tidak ada data	tidak ada data	10,18	<
	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	1,67	*1,62*	1,68	1,71	tidak ada data	tidak ada data	1,78	<
	Kontribusi Sektor Jasa Pertanian dan Peternakan Terhadap PDRB	0,44	*0,42*	0,46	0,51	tidak ada data	tidak ada data	0,6	<
	Produktifitas Ternak Sapi	16519	*17022*	17371	17753	18144	18508	18264	=
	Produktifitas Ternak Kerbau	224	*156*	232	459	172	175	610	<
	Produktifitas Ternak Kuda	219	*193*	185	190	193	197	214	<
	Produktifitas Ternak Kambing	64234	*66251*	68199	69222	70953	72513	75036	<
	Produktifitas Ternak Ayam Kampung	74016	*74555*	76270	77945	191105	194927	80660	>
	Produktifitas Ternak Ayam Potong	69,205	*56350*	57646	292467	96614	608546	62896	>
	Produktifitas Ternak Itik	5276	*13337*	13738	14404	14433	14751	15168	<
	Rehabilitasi hutan dan lahan kering	31,39	*39,69*	44,19	49,19	tidak ada data	tidak ada data	59,39	<
	Kerusakan Kawasan hutan	23,9	*23,79*	22,89	22,19	tidak ada data	tidak ada data	20,19	=



NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Kontribusi Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB	0,19	*0,18*	0,17	0,23	tidak ada data	tidak ada data	0,28	<
	C. Kehutanan, meliputi:								
	D. Energi dan sumber daya mineral, meliputi:								
	E. Perdagangan, meliputi:								
	Konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,16	11,24	11,68	11,21	11,03	10,95	12,44	<
	F. Perindustrian, meliputi								
	KontribusI sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	5,07	*5,01*	5,18	5,08	5,06	5,24	5,67	<
	Pertumbuhan Industri	8,6	*12,6*	15,6	6,83	5,91	1,65	26,6	<
	G. Transmigrasi, meliputi								
	Jumlah Transmigran Swakarsa	0	0	0	0	0	0	0	-
	Jumlah Transmigran	842	1078	1158	1243	1243	1243	1438	<
	Persentase Transmigran Swakarsa	0	0	0	0	0	0	0	-

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
	H. Kelautan dan perikanan, meliputi:								
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	1166,8	4679,9	7279,8	7361,8	7461,8	7830	8148,8	<
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	411	835	861,94	689,6	789,6	983,7	1506,6	<
	Jumlah pendapatan rata-rata perikanan tangkap	2000000	2000000	2150000	2280000	tidak ada data	tidak ada data	2420000	<
	Jumlah pendapatan rata-rata pembudidaya	1500000	1500000	1550000	1630000	tidak ada data	tidak ada data	1850000	<
	Jumlah retribusi usaha perikanan	28000000	29000000	29800000	29800000	tidak ada data	tidak ada data	31100000	<
	Jumlah kelompok nelayan dan pembudidaya ikan	458	512	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	<
	Jumlah penanganan kasus illegal fishing	10	31	35	38	tidak ada data	tidak ada data	15	<
	Jumlah Komsumsi Ikan	40	41,5	43,6	43,6	41,6	42,11	125	<
	Penunjang urusan, meliputi:								
4	a. Perencanaan pembangunan, meliputi:								
	a.1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
	a.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA,	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
	a.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA,	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
	a.4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA,	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
	b. Keuangan, meliputi:								
	b.1. Opini BPK terhadap laporan keuangan,	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
	b.3. Persentase SILPA terhadap APBD,	0,65	0,46	0,22	3,57	1,61	0,30	0,50	<
	b.5. Persentase belanja pendidikan (20%),	33,28	29,48	30,39	31,90	29,68	30,54	30,80	<
	b.6. Persentase belanja kesehatan (10%):	9,79	13,62	6,28	7,48	15,88	18,43	10	>
	b.8. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa, dan	0,13	0,07	0,10	0,13	0,14	0,18	10	<
	b.9. Penetapan APBD.	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	=
	c. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, meliputi:								
	c.4. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah,	34	36	35	35	40	35	35	=
	c.5. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah, dan	139	165	165	165	157	157	157	=



NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
	d. Penelitian dan pengembangan, meliputi:								
	d.1. Persentase implementasi rencana kelitbangan,	100	100	100	100	100	100	100	=
	d.2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan,	100	100	100	100	100	100	100	=
	d.3. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SiDa, dan	100	100	100	100	100	100	100	=
	d.4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Penerapan SIDa.	100	100	100	100	100	100	100	=
	e. Pengawasan, meliputi:								
	e.1. Persentase tindak lanjut temuan,	49,93	95,93	100	100	100	100	100	=
	e.2. Persentase pelanggaran pegawai: dan	0	0	0	0	0	0	0	=
	e.3. Jumlah temuan BPK.	781	31	32	12	8	0,000	0	<
	f. Sekretariat dewan, meliputi:								
	f.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=

NO	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2016-2020					Standar (2020)	Interpretasi : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>).
			2016	2017	2018	2019	2020		
	f.2. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
	f.3. Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=

Sumber : Bapeda Kab. Majene, 2021

2.6. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Haltersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dari pemerintah daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan tugas wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sedangkan urusan untuk pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bermakna bahwa didalam urusan pemerintahan wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut adalah:

1) Pendidikan;
2) Kesehatan;
3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5) Ketentraman ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat;
6) Sosial.

2.6.1. Urusan Pendidikan

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 dapat digambarkan sebagai berikut;

1. **Indikator 1**

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil. Berdasarkan hasil isian SPM, terdapat minimal 1 SD dalam jarak 3 KM dan 1 SMP dalam jarak 6 KM, sehingga terpenuhi 100%.

2. **Indikator 2**

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 37 orang.Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis. Berdasarkan hasil isian SPM, terdapat 171 SD dan 37 SMP yang memenuhi sehingga capaian SD sebesar 98,08 % dan SMP sebesar 98,86%.

3. **Indikator 3**

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal 1 (satu) set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. Berdasarkan hasil isian SPM, terdapat 21 SMP yang memenuhi sehingga capaian SMP sebesar 56,79%.

4. **Indikator 4**

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 155 SD dan 35 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 90,64 % dan SMP sebesar 94,59 %.

5. **Indikator 5**

Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 168 SD yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 98,25 %.

6. Indikator 6

Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 20 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SMP sebesar 54,05 %.

7. Indikator 7

Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 168 SD yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 98,25 %.

8. Indikator 8

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D- IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 32 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SMP sebesar 86,49 %.

9. Indikator 9

Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 29 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SMP sebesar 78,38 %.

10. Indikator 10

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 166 SD yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 97,08%.

11. Indikator 11

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 37 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SMP sebesar 100%.

12. Indikator 12

Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 16 pengawas SD dan 7 Pengawas SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 100%.

13. Indikator 13

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat SD 1 dan SMP 1 yang memenuhi sehingga capaian SPM SD dan SMP sebesar100%.

14. Indikator14

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 142 SD dan 37 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 82,96 % dan SMP sebesar 100%.

15. Indikator 15

Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS dan Pkn dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap perserta didik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 115 SD yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 67,14 %.

16. Indikator 16

Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 27 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SMP sebesar 72,97%.

17. Indikator 17

Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 91 SD yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 53,22 %.

18. Indikator 18

Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 137 SD dan 24 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 80,12 % SMP sebesar 64,86 %.

19. Indikator 19

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 149 SD dan 34 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 87,13 %.dan SMP sebesar 91,89%.

20. Indikator 20

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :

Kelas 1-2 : 18 Jam per minggu

Kelas 3 : 24 Jam per minggu

Kelas 4-6 : 27 Jam per minggu

Kelas 7-9 : 27 Jam per minggu

Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 171 SD dan 37 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 100 % dan SMP sebesar 100%.

21. Indikator 21

Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 171 SD dan 37 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 100 % dan SMP sebesar100 %.

22. Indikator 22

Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 170 SD dan 36 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 99,42 % dan SMP sebesar 97,30 %

23. Indikator 23

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 161 SD dan 36 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 94,35 % dan SMP sebesar 97,50%.

24. Indikator 24

Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali setiap semester. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 138 SD dan 33 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 80,70 % dan SMP sebesar 89,93%.

25. Indikator 25

Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil belajar. Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 171 SD dan 37 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 100 % dan SMP sebesar 100%.

26. Indikator 26

Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir (US/UN). Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 149 SDdan 35 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 87,13 % dan SMP sebesar 94,59 %.

27. Indikator 27

Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Berdasarkan hasil isian SPM terdapat 171 SD dan 37 SMP yang memenuhi sehingga capaian SPM SD sebesar 100 % dan SMP sebesar 100 %.

2.6.2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan DaerahKabupaten/Kota terdiri atas:

- Pelayanan kesehatan ibu hamil
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Pelayanan kesehatan balita
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- Pelayanan kesehatan orang dengan TB
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Adapun realisasi pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Majene Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.150.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan
Kabupaten Majene Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian Tahun 2020
1.	**Pelayanan kesehatan ibu hamil**	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	**70.5**
2.	**Pelayanan kesehatan ibu bersalin**	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	**69.7**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian Tahun 2020
3	**Pelayanan kesehatan bayi baru lahir**	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	**99.5**
4	**Pelayanan kesehatan balita**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	**55.8**
5	**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	**58,0**
6	**Pelayanan kesehatan pada usia produktif**	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan Layanan kesehatan	**53,.2**
7	**Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	**36.9**
8	**Pelayanan kesehatan penderita hipertensi**	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan Layanan kesehatan	**62.9**
9	**Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus**	Jumlah Warga Negara penderita *diabetes militus* yang mendapatkan layanan kesehatan	**80.1**
10	**Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat**	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	**90.9**
11	**Pelayanan kesehatan orang denganTB**	Jumlah Warga Negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan	**98.6**
12	**Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV**	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	**45,8**

Sumber : Bapeda Kab. Majene, 2021

2.6.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan tahun 2016-2021, Pemerintah Daerah telah menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Jika mengacu pada Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar PelayananMinimal Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang ada 9 jenis pelayanan dasar yang harus dipedomani oleh Dinas PUPR Kab. Majene. Namun untuk saat ini jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Tabel 2.151.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Keterangan
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari – hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	69.32 %	Membidangi Bidang Cipta Karya
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100 %	70,2 %	Membidangi Bidang Cipta Karya

Sumber : Bapeda Kab. Majene, 2021

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 capaian SPM untuk jenis pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari - hari yaitu 69,32 %. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,73 % dimana pada tahun sebelumnya capaiannya hanya 70,05 %. Hal ini disebabkan karena adanya adanya refocusing anggaran akibat adanya pandemi covid 19 sehingga kegiatan DAK Infrastruktur air minum tidak terlaksana. Sama halnya dengan jenis pelayanan pengolahan air limbah domestik, capaiannya mengalami peningkatan sebesar 0,53 % dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun sebelumnya capaiannya hanya 69,67 % sedangkan tahun 2020 sebesar70,2 % hal in disebabkan karena faktor alokasi anggaran, dimana pada tahun 2020 kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) kembali dianggarkaan.

2.6.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan Kualitatif dibidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercamtum dalam peraturan terbaru yakni jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan minimal bidang perumahan rakyat terdiri dari Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dikabupaten serta Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.152.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majene Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Penilaian SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : Bapeda Kab. Majene, 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Indikator SPM untuk OPD Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk tahun 2020, hanya melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni pada kawasan kumuh,sejauh ini belum pada kawasan terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota. OPD Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk tahun 2019-2020 telah melaksanakan pendataan RTLH di delapan (8) Kecamatan yakni Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammerodo Sendana, Tubo Sendana, Ulumanda dan Malunda.

2.6.5. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Majene adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene dan Peraturan Bupati Majene Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Adapun jenis urusan wajib pelayanan dasar SPM adalah Program pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Mayarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.153.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majene Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Keterangan
1	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	95 %	Membidangi Bidang Trantibun

Sumber : Bapeda Kab. Majene, 2021

2.6.6. Urusan Sosial

Kebijakan umum pembangunan daerah Tahun 2016 - 2021 menggambarkan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan tahun 2016-2021, Pemerintah Daerah telah menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial ada 5 jenis pelayanan dasar yang harus dipedomani oleh Dinas Sosial, yaitu :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
2. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti;

3. Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar luar panti;
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial Khusus gelandangan dan pengemis diluar panti:
5. Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Namun untuk saat ini jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Majene mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah Pelaksanaan Program/kegiatan Bidang Sosial, Penyediaan sarana dan Prasarana Sosial dan Penanggulangan Korban Bencana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.154.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial
Kabupaten Majene Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Keterangan
1	Pemberian bantuan Sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS sala Kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	70.05 %	Membidangi Bidang Pemberdayaan Sosial
2	Penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan luar panti	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100 %	69,67 %	Membidangi Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial
3	Bantuan Sosial bagi korban bencana skala kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	71,68%	Membidangi Bidang Perlindungan dan jaminan sosial

Sumber : Bapeda Kab. Majene, 2021

2.7. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pelaksanaan TPB di tingkat daerah ditentukan oleh tingkat capaian pelaksanaan indikator TPB terhadap target yang telah ditentukan baik target daerah maupun target nasional yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (TPB). Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dan 169 target untuk pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya pencapaian 319 indikator tersebut dilaksanakan berdasarkan pembagian kewenangan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain wewenang, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah kekhususan indikator, kondisi geografis dan ketentuan indikator RPJMD.

Penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB di masa depan dan capaian indikator TPB setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan dengan mengelompokkan indikator TPB berdasarkan katagori analisis data yang terbagi atas 4 (empat) kategori yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB)
3. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB)
4. Indikator TPB yang belum memiliki data (TAD)

Hasil pengumpulan data capaian masing-masing indikator TPB Kabupaten Majene, kemudian dilakukan pengelompokkan indikator. Adapun capaian dan hasil pengelompokkan indikator di Kabupaten Majene pada KLHS Perubahan RPJMD 2016-2021 dan KLHS RPJMD 2021-2026 secara umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.155.
Capaian Indikator TPB Kabupaten Majene

No	Kriteria	2016-2021		2021-2026	
		Jumlah Indikator	%	Jumlah Indikator	%
1	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)	61	27.73	75	34.09
2	Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB)	66	30.00	74	33.64
3	Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB)	8	3.64	7	3.18
4	Indikator TPB yang tidak memiliki data (TAD)	85	38.64	64	29.09
Total indikator kewenangan kabupaten		**220**	**100,00**	**220**	**100,00**

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

Indikator TPB TAD pada capaian 2021-2026 sebanyak 64 indikator sebagaimana tabel diatas terbagi atas TAD belum memiliki data sebanyak 59 indikator dan TAD tidak relevan dengan wilayah kajian sebanyak 5 indikator. Persandingan pada tabel 34 diatas didasarkan atas total 220 indikator kewenangan kabupaten secara umum. Dari 220 indikator kewenangan kabupaten secara umum tersebut terdapat 5 indikator yang tidak relevan dengan Kabupaten Majene, dalam artian indikator ini tidak terdapat di Kabupaten Majene. Adapun indikator tersebut adalah indikator 6.3.2.(a) Kualitas air danau, indikator 9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol, indikator 11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP), indikator 11.3.1.(b) Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dan indikator 11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.

Berdasarkan pengurangan dengan 5 indikator TAD yang tidak relevan dengan wilayah kajian tersebut, sehingga hanya terdapat 215 Indikator TPB yang akan dikaji dalam pencapaian tujuan TPB di Kabupaten Majene dalam KLHS RPJMD Kabupaten Majene 2021-2026 ini. Kelompok TAD yang akan dibahas pada pembahasan-pembahasan berikutnya adalah TAD yang relevan dengan wilayah kajian yaitu TAD belum memiliki data. Indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Majene sebanyak 2015 indikator tersebut diperlihatkan pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.156.
Capaian Indikator TPB KLHS RPJMD Kabupaten Majene 2021-2026

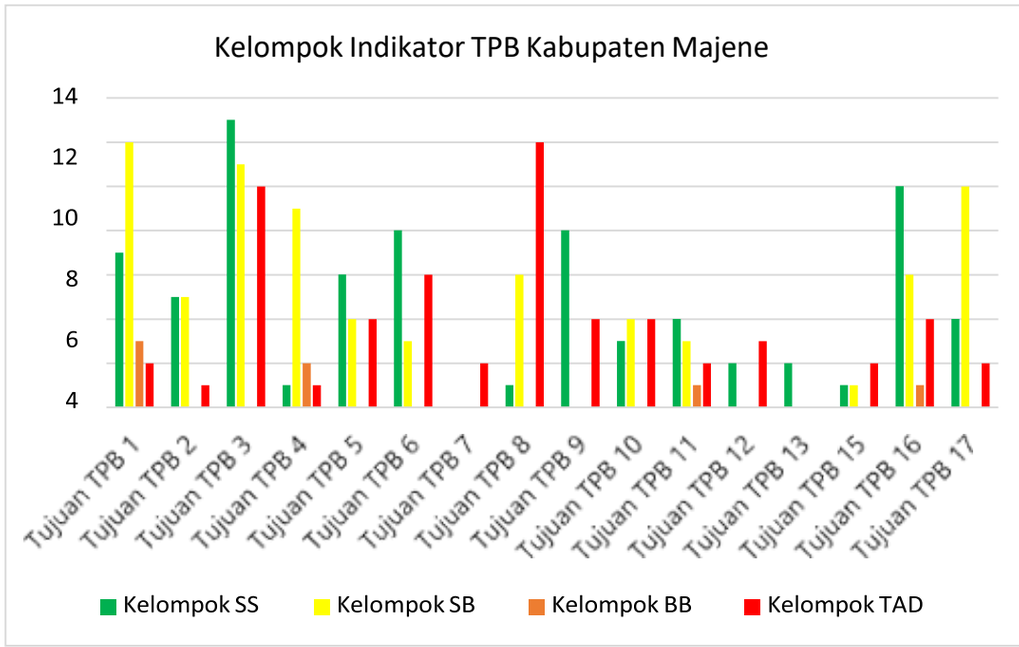
No	Kriteria	2021-2026	
		Jumlah Indikator	%
1	Indikator TPB yang sudah dilaksanakandan sudah mencapai target (SS)	75	**34.88**
2	Indikator TPB yang sudah dilaksanakandan belum mencapai target (SB)	74	**34.42**
3	Indikator TPB yang belum dilaksanakandan belum mencapai target (BB)	7	**3.26**
4	Indikator TPB yang tidak memiliki data(TAD)	59	**27.44**
	Total Indikator Kewenangan Kabupaten Majene	**215**	**100,00**

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

Kabupaten Majene telah melaksanakan indikator TPB sampai tahun 2021 sebanyak 149 indikator atau 69,30% dari total 215 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Majene yaitu kelompok indikator yang masuk dalam Kelompok SS dan SB. Sementara untuk indikator yang belum dilaksanakan yaitu Kelompok BB dan TAD belum memiliki data adalah sebanyak 66 indikator atau 30,70%.

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat perbandingan secara umum capaian indikator pada KLHS Perubahan RPJMD 2016-2021 dengan capaian indikator KLHS RPJMD 2021-2026. Tabel tersebut memperlihatkan indikator TPB yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majene mengalami peningkatan sebesar 10% dari jumlah indikator yang dilaksanakan sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Majene telah berkomitmen untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam rencana pembangunan daerah.

Gambar 2.53.
Kelompok Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Majene 2021-2026



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

Secara rinci indikator TPB yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan pada KLHS RPJMD Kabupaten Majene 2021-2026, dari 215 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Majene sebagai berikut.

Tabel 2.157.
Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan pada Setiap Tujuan TPB di Kabupaten Majene

No. TPB	Tujuan TPB	Indikator SS	Indikator SB	Total Indikator TPB
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	7	12	24
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan PertanianBerkelanjutan	5	5	11
3	Menjamin Kehidupan yang Sehatdan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	13	11	34
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yangInklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	1	9	13
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	6	4	14

No. TPB	Tujuan TPB	Indikator SS	Indikator SB	Total Indikator TPB
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasiyang Berkelanjutan	8	3	17
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua			2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerjayang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	1	6	19
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan IndustriInklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	8		12
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	3	4	11
11	Menjadikan Kota dan PermukimanInklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	4	3	10
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	2		5
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2		2
14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumberdaya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	-	-	-
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	1	1	4
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	10	6	21
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	4	10	16
Total		**75**	**74**	**215**

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

Selanjutnya, Indikator-Indikator TAD belum memiliki data dan Indikator BB yang belum dilaksanakan di Kabupaten Majene pada KLHS RPJMD 2021-2026, dari 215 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Majene diperlihatkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.158.
Jumlah Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan pada Setiap Tujuan TPB di Kabupaten Majene

No. TPB	Tujuan TPB	IndikatorBB	Indikator TAD	Total Indikator TPB
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	3	2	24
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik,serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan		1	11
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat danMeningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia		10	34
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yangInklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	2	1	13
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan		4	14
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan		6	17
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan danModern untuk Semua		2	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomiyang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif danMenyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua		12	19
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan IndustriInklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi		4	12
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara		4	11
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh danBerkelanjutan	1	2	10
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan		3	5
13	Mengambil Tindakan Cepat untukMengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya			2
14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan SumberdayaKelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	-	-	-
15	Melindungi, Merestorasi & Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati		2	4

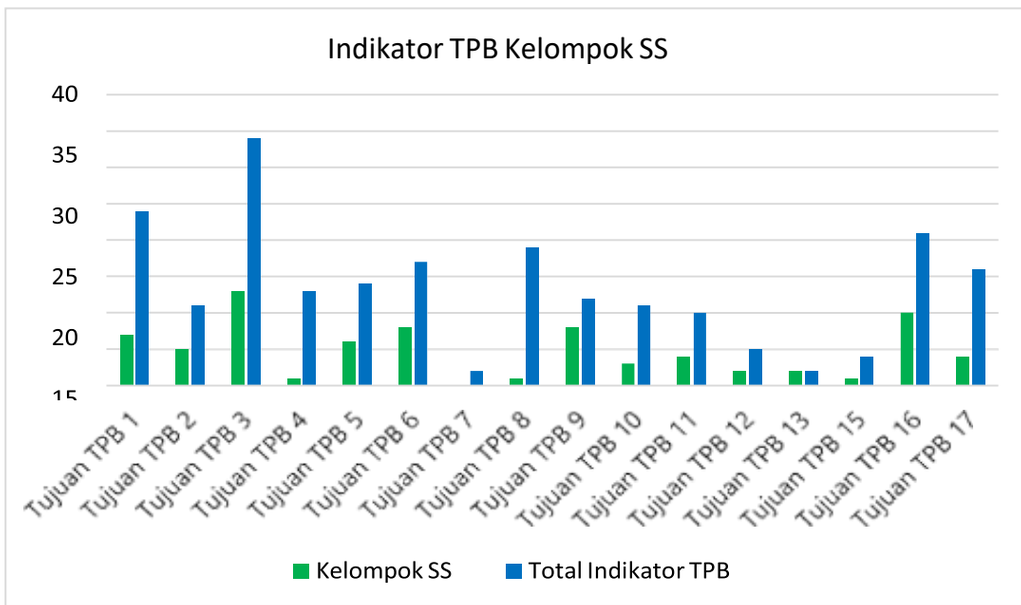
No. TPB	Tujuan TPB	IndikatorBB	Indikator TAD	Total Indikator TPB
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusifdan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	1	4	21
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan		2	16
Total		7	59	215

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

2.7.1. Indikator TPB Terlaksana dan Mencapai Target (SS)

Kabupaten Majene telah melaksanakan indikator dalam kelompok SS sebanyak 75 indikator atau sekitar 34,88% dari total 215 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Majene yang tersebar pada 15 tujuan. Jika dilihat secara umum sebagaimana Tabel 34, Kelompok indikator ini mengalami peningkatan sebesar 6,36% dari 61 indikator pada KLHS Perubahan RPJMD 2016-2021 menjadi 75 indikator pada KLHS RPJMD 2021-2026.

Gambar 2.54.
Indikator TPB Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target di Kabupaten Majene



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

Tabel 2.159.

Sebaran Indikator TPB pada Kelompok Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target di Kabupaten Majene Tahun 2021

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	Kesehatan	54.80	58.93	88.57	101.00	102.14
1	Mengakhiri Kemiskinan dalamSegala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	Sosial	14.84	15.64	16.65	17.12	18.9
1	Mengakhiri Kemiskinan dalamSegala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	Sosial			9267	9239	
1	Mengakhiri Kemiskinan dalamSegala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	Kesehatan	81.13	76.12	79.18	86.88	79.69
1	Mengakhiri Kemiskinan dalamSegala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaanmetode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	Kesehatan	72.80	77.89	83.19	89.34	87.36
1	Mengakhiri Kemiskinan dalamSegala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengankepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	29.33		84.89	79.35	91.77

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Mengakhiri Kemiskinan dalamSegala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Ketenteraman ,Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	40	133	62	50	32
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan danGizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Sosial	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangansedang atau berat,berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	Pangan		12.20		8.54	
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan danGizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Sosial	2.2.1*	Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	Kesehatan	46.00	43.80	40.40	40.22	34.30
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan danGizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Sosial	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	Kesehatan			37.78	25.06	27.00
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan danGizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Sosial	2.2.2.(a)	Prevalensi anemiapada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	Kesehatan	63.61	36.44	43.58	36.55	20.95

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan danGizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Sosial	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	Kesehatan	59.12	46.57	76.74	82.57	76.42
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.1.1*	Angka KematianIbu (AKI).	Menurun menjadi 306	Kesehatan	8	5	4	11	6
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.2.1*	Angka KematianBalita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	Kesehatan	22,56	15,25	13,87	17,28	12,77
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiranhidup.	Menurun	Kesehatan	13.54	9.80	8.43	13.87	9.78
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.2.2.(a)	Angka KematianBayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	Kesehatan	18	13	13	17	12

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	Kesehatan	0.004	0.002	0	0.011	0
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.3.3*	Kejadian Malariaper 1000 orang.	Menurun	Kesehatan	22	41	139	159	104
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.3.5*	Jumlah orang yangmemerlukan intervensi terhadappenyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	Kesehatan	51	42	57	47	24
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanandarah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	Kesehatan	3.34	7.19	8.16	18.63	8.37
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatanJiwa.	Meningkat menjadi 280	Kesehatan	11	11	11	11	11
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi(CPR) semua cara pada Pasangan UsiaSubur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	Kesehatan	62.04	64.1	66		

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.8.2.(a)	Cakupan JaminanKesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal95%	Kesehatan	54.80	58.93	88.57	101.00	102.14
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan SeluruhPenduduk Semua Usia	Sosial	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin diPuskesmas.	Meningkat	Kesehatan	100	100	100	100	100
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	Kesehatan	28.67	31.35	35.34	38.20	41.38
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merataserta MeningkatkanKesempatan BelajarSepanjang Hayat untuk Semua	Sosial	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yangbersertifikat pendidik.	Meningkat	Pendidikan	50.77		40.18	83.85	86.89
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Sosial	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anakperempuan.	Menurun menjadi kurangdari 20,48%	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	1	1	5		

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Sosial	5.2.2.(a)	Persentase korbankekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak		100%	100%	100%	100%
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Sosial	5.5.1*	Proporsi kursi yangdiduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	20	20	20	20	20
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Sosial	5.5.2*	Proporsi perempuan yangberada di posisi managerial.	Meningkat	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	15	19%	28%	28%	38%
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Sosial	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yangmembuat keputusan sendiriterkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	60.67	58.03	61.43		
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Sosial	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memili ki telepon genggam.	Meningkat	Komunikasi & Informatika		66.3%	66.5%	66.7%	
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.1.1.(a)	Persentase rumahtangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minumlayak.	Meningkat menjadi 100%	Pekerjaa nUmum & Penataan Ruang	105	109.5	103.68	104.35	100.07

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakanSanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000(skala nasional)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	24	31	51		
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	24	31	51		
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1	1	1		
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1	1	1		
6	Menjamin Ketersediaanserta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber airbaku.	Meningkat	Lingkungan Hidup	70%	70%	70%	80%	80%
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasimasyarakat dalam pengelolaan daerahtangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	10%	10%	20%	30%	30%

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.5.1.(g)	Kegiatan penataankelembagaan sumber daya air.	ada	Lingkungan Hidup	ada	ada	ada	ada	
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomiyang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yangProduktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jeniskelamin dan kelompok umur.	Menurun	Tenaga Kerja	5.73	4.51	3.51	3.01	2.29
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan IndustriInklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Ekonomi	9.1.2.(b)	Jumlah dermagapenyeberangan.	Meningkat	Perhubungan	5	5	5	5	5
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan IndustriInklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Ekonomi	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhanstrategis.	24 pelabuhan (skala nasional)	Perhubungan	1	1	1	1	1
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan	Ekonomi	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur	Meningkat	Perindustrian	5.01	5.17	-		
	Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi			terhadap PDB danper kapita.							

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan IndustriInklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Ekonomi	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhanPDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Perindustrian	-0.0118343 2	0.031936128	-		
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan IndustriInklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Ekonomi	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	Tenaga Kerja	-	0.0867	-		
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan IndustriInklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Ekonomi	9.c.1*	Proporsi pendudukyang terlayani mobile broadband.	Meningkat	Komunikasi & Informatika		85.5%	85.5%	85.6%	
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan IndustriInklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Ekonomi	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memili ki telepon genggam	Meningkat	Komunikasi & Informatika		66.3%	66.5%	66.7%	
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan IndustriInklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Ekonomi	9.c.1.(b)	Proporsi individuyang menggunakan internet	Meningkat	Komunikasi & Informatika		85.5%	85.5%	85.6%	
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Ekonomi	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	Sosial	0.33	0.32	-		

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
10	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara	Ekonomi	10.1.1.(c)	Jumlah desatertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	62	62	19		
10	Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara	Ekonomi	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerahtertinggal.	Meningkat	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	5.58	6.85			
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif,Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Lingkungan	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman				0.18	0.28
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif,Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Lingkungan	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Ketenteraman ,Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	40	133	62	50	32
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif,Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Lingkungan	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijaudi kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ada	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	32.27	35.12	35.12		

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif,Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Lingkungan	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	Ketenteraman ,Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	0	0	0	1	1
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Lingkungan	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola danproporsi limbah B3yang diolah sesuai Peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 jutaton (skala nasional)	Lingkungan Hidup	0,001	0,01	0,015	0,02	0,03
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Lingkungan	12.5.1.(a)	Jumlah timbulansampah yang didaur ulang.	20 ton per hari(skala nasional)	Lingkungan Hidup		24,685	25,006	24,294	24,684
13	Mengambil TindakanCepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Lingkungan	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	Ketenteraman ,Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	0	0	0	1	1
13	Mengambil TindakanCepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Lingkungan	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Ketenteraman ,Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	40	133	62	50	30

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Lingkungan	15.1.1.(a)	Proporsi tutupanhutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	Kehutanan	72%	75%	80%	82%	83%
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, danInklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan padasatu tahun terakhir.	Menurun	Ketenteraman ,Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	1				
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, danInklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	Statistik					98.28

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, danInklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaranyang disetujui.	Meningkat	Keuangan	89.54%	96.59%	97.65%	98.06%	99.07%
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, danInklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LaporanKeuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Le mbaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%,Kota: 65%	Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, danInklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah(Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Le mbaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota:50%	Keuangan	40.94	50.19	60.5	62.23	62.79

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, danInklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah(Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota:80%	Balitbang Daerah	80	80	80		
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, danInklusif di SemuaTingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak		20%	20%	20%	20%
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, danInklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak		19%	28%	28%	38%

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, danInklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya	Meningkat	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	83.76			87.19	
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil	29.33		84.89	79.35	91.77
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi	17.8.1*	Proporsi individuyang menggunakan internet.	Meningkat	Komunikasi & Informatika		85.5%	85.5%	85.6%	

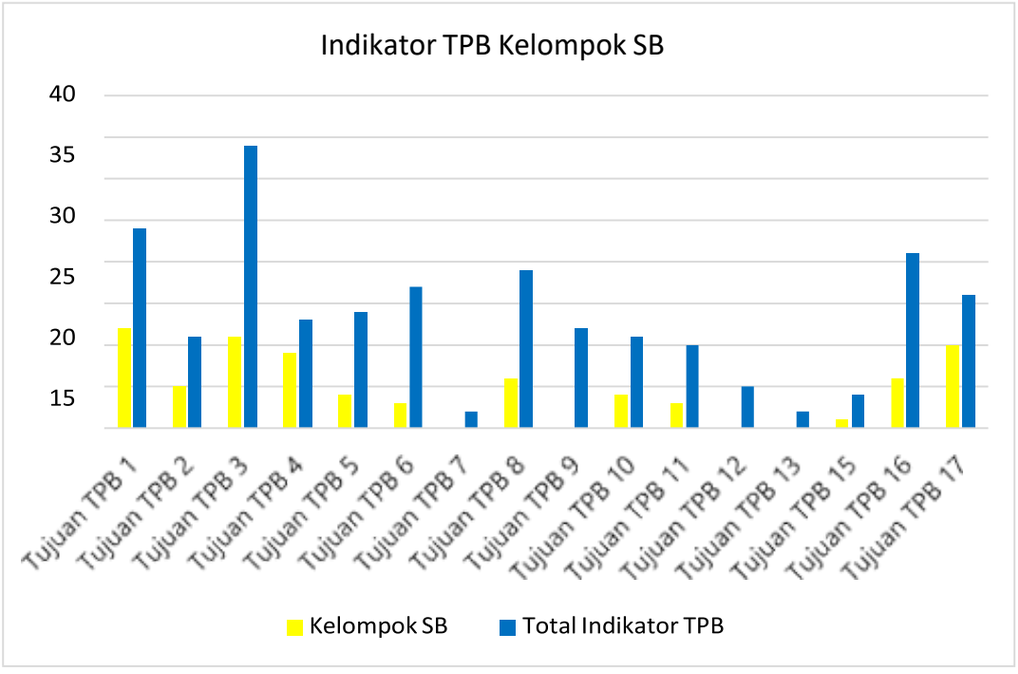
Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

2.7.2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB)

Kabupaten Majene telah melaksanakan indikator dalam kelompok SB sebanyak 74 indikator atau sekitar 34,42% dari total 215 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Majene yang tersebar pada 12 tujuan. Adapun tujuan TPB yang tidak termasuk dalam kelompok ini adalah tujuan TPB 7 “Energi Bersih dan Terjangkau”, tujuan TPB 9 “Industri, Inovasi dan Infrastruktur”, tujuan TPB 12 “Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab”, dan tujuan TPB 13 “Penanganan Perubahan Iklim”. Jika dilihat secara umum sebagaimana Tabel 34, Kelompok indikator ini mengalami peningkatan sebesar 3,64% dari 66 indikator pada KLHS Perubahan RPJMD 2016-2021 menjadi 74 indikator pada KLHS RPJMD 2021-2026.

Secara rinci indikator kelompok SB di Kabupaten Majene yang sudah dilaksanakan dalam setiap tujuan TPB diuraikan pada gambar dan Tabel berikut.

Gambar 2.55.
Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Di Kabupaten Majene



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

Tabel 2.160.
Sebaran Indikator TPB pada Kelompok Indikator Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target di Kabupaten Majene Tahun 2021

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Mengakhiri Kemiskinandalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidupdi bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamindan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	14.89	13.94	13.79	13.72	13.73
1	Mengakhiri Kemiskinandalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	83.59	60.56	78.01	85.79	69.69
1	Mengakhiri Kemiskinandalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%		70.99	75.47	79.95	84.43
1	Mengakhiri Kemiskinandalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanansanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	65,92	70,80	74,14	69,30	71,00
1	Mengakhiri Kemiskinandalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	93.13	100.2	101.44	87.13	87.13
1	Mengakhiri Kemiskinandalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	75.88	78.62	81.37	60.38	60.42
1	Mengakhiri Kemiskinandalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskindan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	97.07	93.83	97.07		
1	Mengakhiri Kemiskinandalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	30	30	30	30	30



No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasarkorban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	40	133	62		
1	Mengakhiri Kemiskinandalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korbanbencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	40	133	62		
1	Mengakhiri Kemiskinandalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomilangsung akibat bencana.	Menurun	543,000,000	1,408,945,000	1,456,800,000		
1	Mengakhiri Kemiskinandalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok(pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	63.25	57.7	58.77		
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik,serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Sosial	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence ofUndernourishment).	Menurun	25.40	28.10	36.40	27.70	
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik,serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Sosial	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	3.29	7.01	15.39	26.39	17.74
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik,serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Sosial	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak padausia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun		2.36	6.3	10	6.3

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik,serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Sosial	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan54,5 kg/kapita/tahun	16.49	18.78	18.55	18.26	
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik,serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Sosial	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagijumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat		89,899,826			
3	Menjamin Kehidupan yangSehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	89.57	98.46	91.02	87.09	80.30
3	Menjamin Kehidupan yangSehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	83.59	60.56	78.01	85.79	69.69
3	Menjamin Kehidupan yangSehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yangmencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	81.13	76.12	79.18	86.88	79.69

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
3	Menjamin Kehidupan yangSehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	276	299	286	472	386
3	Menjamin Kehidupan yangSehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolosdalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 35.			2		
3	Menjamin Kehidupan yangSehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	6.59	6.25			
3	Menjamin Kehidupan yangSehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun					1.32
3	Menjamin Kehidupan yangSehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencanadan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	56.23	56.71	53.19		
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	5.8	5.87			
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	2.8	2.76	2.72	2.68	2.64

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun					3.53
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Sosial	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	45.45	53.76	75	45.88	61.02
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Sosial	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	40.74	25		48.64	48.64
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Sosial	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	109.36	101.08	102.91	113.45	103.91
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Sosial	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	77.54	104.41	84.16	92.94	84.25
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Sosial	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	7.74	7.81	8.14		

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Sosial	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%		83.16	81.6	50.37	61.35
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Sosial	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	83.63%	84.29%	89.4%	74.01%	73.78%
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Sosial	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%		95.5	95.7	95.8	95.2
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Sosial	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat			97.01	98.95	98.03
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Sosial	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16		2	2	5	1
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Sosial	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	6	12	8		

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Sosial	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun		1	2		
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Sosial	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	223	236	172		
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	73.69	73.69	73.69		
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%		70.99	75.47	79.95	84.43
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	65.92	70.80	74.14	69.3	71
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	4.43	4.61	4.7	4.42	-2.78

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	11.31	24.78	26.93	28.61	28.31
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	0.01%	0.01%			
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)		101	146	159	7
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat		53,111	122,080	148,571	98,266

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat		148,180,000.00	344,835,000.00	342,155,000.00	332,320,000.00
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Ekonomi	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	14.89	13.94	13.79	13.72	13.73
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Ekonomi	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional)			19		
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Ekonomi	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa			2		
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Ekonomi	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Menurun menjadi 14%			79.42		
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Lingkungan	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%			216.08	216.08	216.08
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Lingkungan	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	543,000,000	1,408,945,000	1,456,800,000		

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Lingkungan	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	70,18	76,07	74,52	74,84	
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Lingkungan	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	34%	39%		39,69%	39,79%
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	1.18	1.18			
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	98.82	98.82			

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	15	12	30		
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%			21.01		
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatk menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%			28.5		

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%		83.26	80.52		
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	21.06%	21.92%	18.92%	19.59%	1.85%
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	0.16%	0.16%	0.17%	0.18%	0.16%
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	0.76%	0.86%	0.86%	0.90%	0.89%
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	1.2%	2.2%	3.9%	6.6%	10.5%

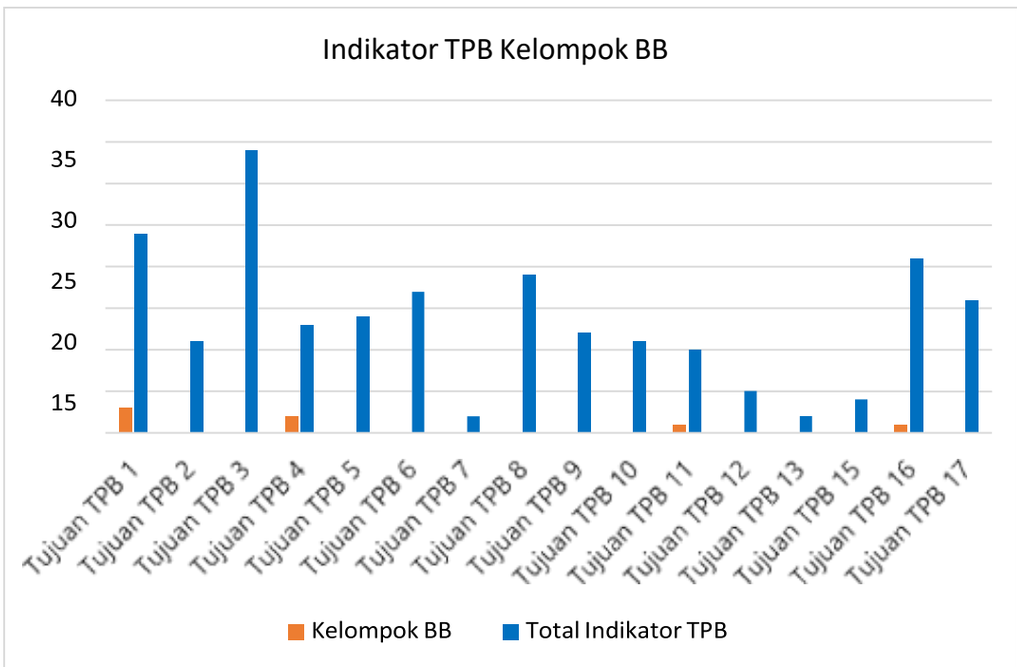
No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	1.2%	2.2%	3.9%	6.6%	10.5%
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat				100	95.31
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat				90.91	61.29
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	1	13	7	1	
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	14.37	14.37	14.37		
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	7,028	6,277	5,397	10,460	9,656

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

2.7.3. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (BB)

Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target memperlihatkan sebaran Kelompok BB di Kabupaten Majene sebanyak 7 indikator atau sekitar 3,26% dari total 215 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Majene yang tersebar pada 4 tujuan. Adapun tujuan dalam kelompok ini adalah tujuan TPB 1 "Tanpa Kemiskinan" dengan 3 indikator, tujuan TPB 4 "Pendidikan Berkualitas" dengan 2 indikator, tujuan TPB 11 "Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan" dengan 1 indikator, dan tujuan TPB 16 "Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian" dengan 1 indikator. Jika dilihat secara umum sebagaimana Tabel 34, Kelompok indikator ini mengalami penurunan hanya sebesar 0,46% dari 8 indikator pada KLHS Perubahan RPJMD 2016-2021 menjadi 7 indikator pada KLHS RPJMD 2021-2026. Secara rinci indikator kelompok BB di Kabupaten Majene yang belum dilaksanakan dalam setiap tujuan TPB diuraikan pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 2.56.
Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Di Kabupaten Majene



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

Tabel 2.161.
Sebaran Indikator TPB pada Kelompok Indikator Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target di Kabupaten Majene Tahun 2021

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yangmendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/Madrasah AmanBencana)	Meningkat menjadi 450	Sosial	0	0	0	0	0
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana padapusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	0	0	0	0	0
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	0	0	0	0	0
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan KesempatanBelajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Sosial	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b)tingkat akhir SD/kelas 6, (c)tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	Pendidikan	0	0	0	0	0

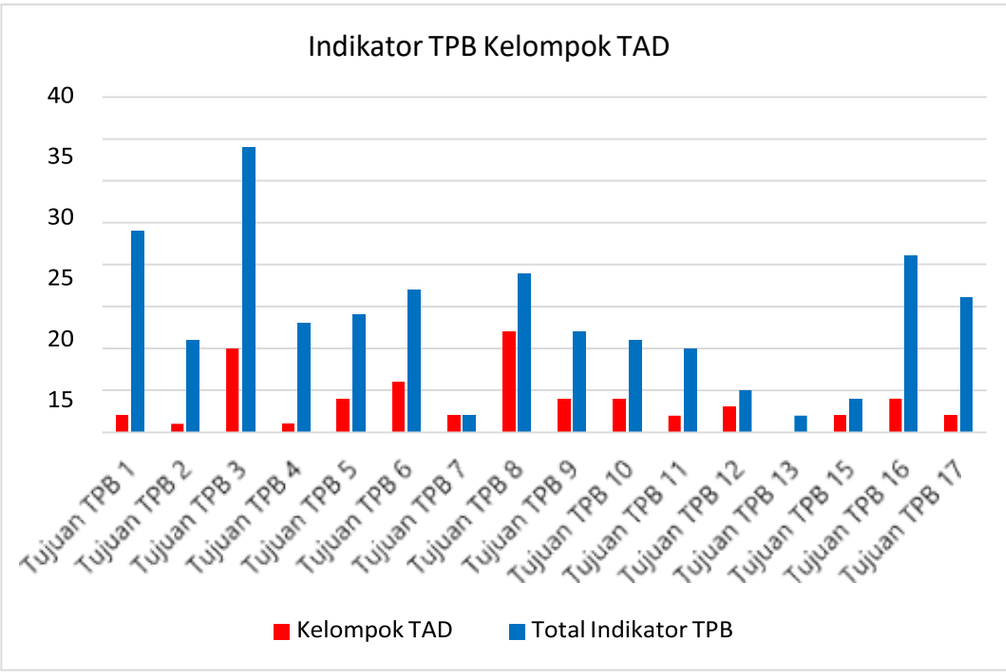
No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Sosial	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat	Pendidikan	0	0	0	0	0
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Lingkungan	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	0	0	0	0	0
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	Komunikasi & Informatika	0	0	0	0	0

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

2.7.4. Indikator TPB yang Belum Memiliki Data (TAD)

Indikator TPB yang Belum Memiliki Data (TAD) memperlihatkan sebaran Kelompok TAD di Kabupaten Majene sebanyak 59 indikator atau sekitar 27,44% dari total 215 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Majene yang tersebar pada 15 tujuan. Indikator dalam kelompok TAD ini adalah indikator belum memiliki data yang relevan dengan Kabupaten Majene, dimana indikator tersebut tidak teridentifikasi pada saat proses pengumpulan data. Jika dilihat secara umum sebagaimana Tabel 34, Kelompok indikator ini mengalami penurunan sebesar 9,55% dari 85 indikator pada KLHS Perubahan RPJMD 2016-2021 menjadi 64 indikator pada KLHS RPJMD 2021-2026. Secara rinci indikator kelompok TAD belum memiliki data di Kabupaten Majene yang belum dilaksanakan dalam setiap tujuan TPB diuraikan pada gambar dan Tabel berikut.

Gambar 2.57.
Indikator TPB yang Belum Belum Memiliki Data
Di Kabupaten Majene



Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

Tabel 2.162.
Sebaran Indikator TPB pada Kelompok Indikator Belum Memiliki Data di Kabupaten Majene Tahun 2021

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Mengakhiri Kemiskinandalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program JaminanSosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	Sosial	-	-	-	-	-
1	Mengakhiri Kemiskinandalam Segala Bentuk Dimanapun	Sosial	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan olehpemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	Sosial	-	-	-	-	-
2	Menghilangkan Kelaparan,Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik,serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Sosial	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kaloriminimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	Pangan	-	-	-	-	-
3	Menjamin Kehidupan yangSehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300	Kesehatan	-	-	-	-	-
3	Menjamin Kehidupan yangSehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yangmelakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	Kesehatan	-	-	-	-	-
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi	Kesehatan	-	-	-	-	-
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	Kesehatan	-	-	-	-	-



No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	Kesehatan	-	-	-	-	-
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	Kesehatan	-	-	-	-	-
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38	Kesehatan	-	-	-	-	-
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	Kesehatan	-	-	-	-	-
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	Kesehatan	-	-	-	-	-
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Sosial	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	Kesehatan	-	-	-	-	-
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Sosial	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	Tenaga Kerja	-	-	-	-	-



No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Sosial	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	-	-	-	-	-
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Sosial	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	-	-	-	-	-
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Sosial	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	Kesehatan	-	-	-	-	-
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Sosial	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	Kesehatan	-	-	-	-	-
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	-	-	-	-	-
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	-	-	-	-	-
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	-	-	-	-	-

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Lingkungan	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Ekonomi	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	10-16%	Energi & Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Ekonomi	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	Energi & Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	Tenaga Kerja	-	-	-	-	-

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	0.51	Tenaga Kerja	-	-	-	-	-
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	Tenaga Kerja	-	-	-	-	-
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah	-	-	-	-	-
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	Tenaga Kerja	-	-	-	-	-
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	Tenaga Kerja	-	-	-	-	-

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	Tenaga Kerja	-	-	-	-	-
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	Pariwisata	-	-	-	-	-
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	Tenaga Kerja	-	-	-	-	-
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	Penanaman Modal	-	-	-	-	-
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)	Penanaman Modal	-	-	-	-	-



No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Ekonomi	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah	-	-	-	-	-
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Ekonomi	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Bertambah 3.258 km	Perhubungan	-	-	-	-	-
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Ekonomi	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	Perindustrian	-	-	-	-	-
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Ekonomi	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	Perindustrian	-	-	-	-	-
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Ekonomi	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	Pendidikan	-	-	-	-	-

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Ekonomi	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun	Sosial	-	-	-	-	-
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Ekonomi	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87	Sosial	-	-	-	-	-
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Ekonomi	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Ekonomi	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	Sosial	-	-	-	-	-
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Lingkungan	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	-	-	-	-	-
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Lingkungan	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	ada	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	-	-	-	-	-

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Lingkungan	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Lingkungan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Lingkungan	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Lingkungan	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	ada	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Lingkungan	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-

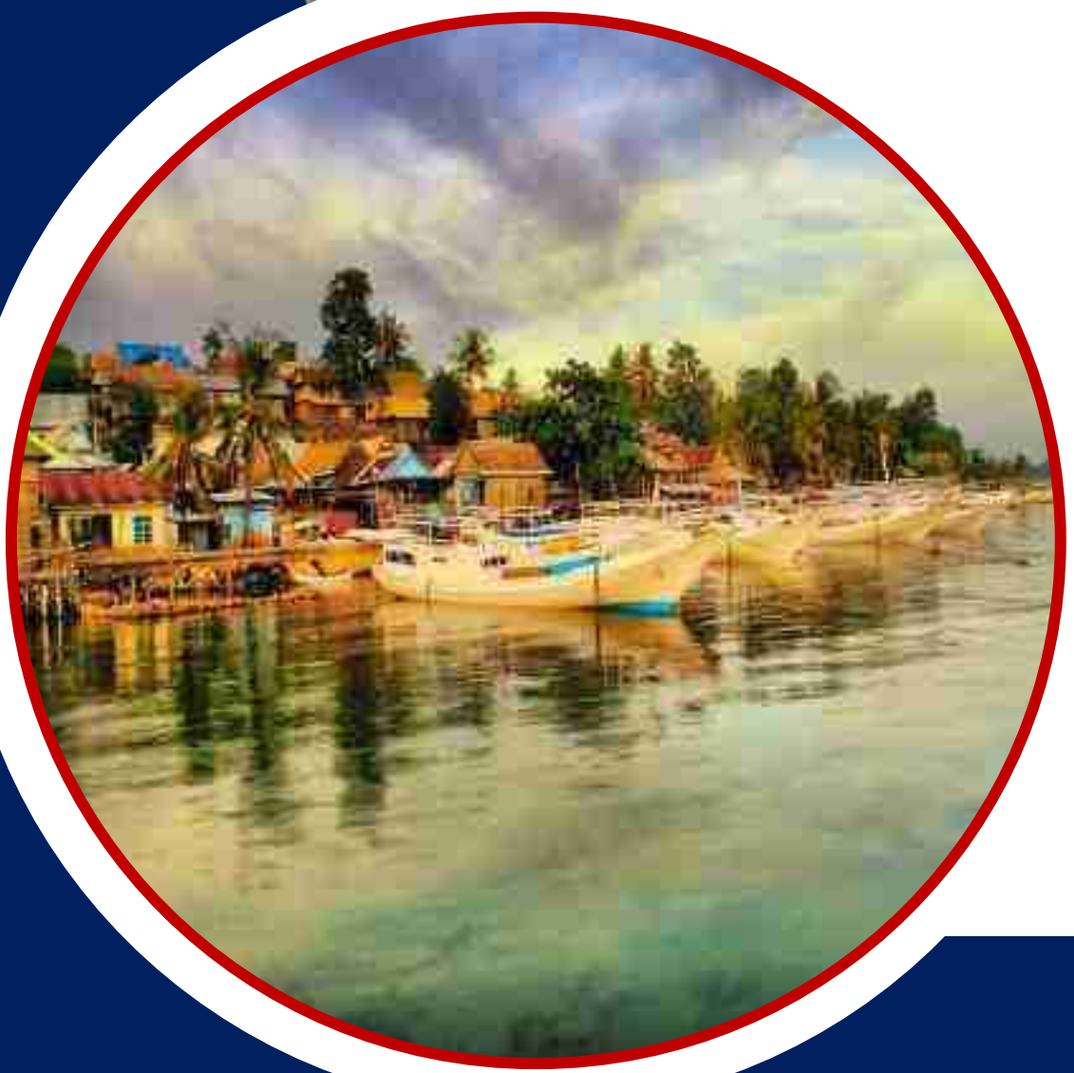
No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	-
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	-	-	-	-	-
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	-	-	-	-	-
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Hukum & Tata Kelola	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	-

No. TPB	Tujuan TPB	Pilar	No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Jenis Urusan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	Keuangan	-	-	-	-	-
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Ekonomi	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	Keuangan	-	-	-	-	-

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Majene, 2021

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Majene masih menghadapi tantangan dalam hal pencapaian indikator TPB. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional masih sekitar 75 indikator atau 34,88% dari total 215 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Majene.





BAB III

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah merupakan suatu aspek penting untuk dapat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Capaian kinerja keuangan pada periode tersebut menjadi data dasar atau baseline data yang dibutuhkan untuk memprediksi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan pada periode selanjutnya. Dengan menganalisis gambaran pengelolaan keuangan daerah akan menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa mendatang. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Analisis keuangan daerah pada bab ini akan menguraikan beberapa aspek berkaitan dengan pengelolaan keuangan keuangan daerah meliputi : kinerja keuangan masa lalu, Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan Kerangka Pendanaan.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di

daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Perkembangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja di Kabupaten Majene berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban APBD dari sisi pendapatan daerah mengalami perkembangan yang fluktuatif, dimana realisasi pendapatan pada tahun 2016 mencapai 800,53 Milyar rupiah, angka ini meningkat pada tahun 2017 yaitu sebesar 918,55 Milyar rupiah, pada tahun 2018 menurun menjadi 872,67 Milyar rupiah. Pada tahun 2019 kembali meningkat dengan realisasi sebesar 974,78 Milyar rupiah, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai realisasi sebesar 922,94 Milyar rupiah.

Sama halnya dengan pendapatan daerah, maka realisasi belanja daerah juga tumbuh secara fluktuatif. Pada tahun 2016 realisasi belanja daerah mencapai 800,66 Milyar rupiah, meningkat pada tahun 2017 dengan total realisasi sebesar 888,14 Milyar rupiah, pada tahun 2018 sedikit menurun dengan total realisasi sebesar 887,68 Milyar rupiah, kembali meningkat pada tahun 2019 dengan total realisasi sebesar 976,81 Milyar rupiah dan pada tahun 2020 berdasarkan angka realisasi setelah audit BPK menunjukkan adanya penurunan dengan capaian realisasi sebesar 927,18 Milyar rupiah.

Dari sisi pembiayaan juga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Realisasi pembiayaan pada tahun 2016 sebesar 2,11 Milyar rupiah, angka ini kemudian menurun pada tahun 2017 dengan nilai sebesar 742,16 Juta rupiah, pada tahun 2018 meningkat menjadi 30,65 Milyar rupiah, pada tahun 2019 menurun dengan realisasi sebesar 17,18 Milyar rupiah, dan pada tahun 2020 juga menurun dengan nilai realisasi sebesar 11,97 Milyar rupiah.

Untuk lebih jelasnya perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Majene kurun waktu tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Rata-Rata Pertum-buhan (%)
1	Pendapatan	800.529,89	918.545,08	872.674,39	974.783,67	922.935,35	4,03
2	Belanja	800.660,71	888.136,21	887.677,79	976.805,11	927.184,74	3,96
3	Pembiayaan	2.105,78	742,16	30.651,35	17.183,07	11.967,91	972,74

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah & Badan Pendapatan Daerah

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah berdasarkan struktur APBD Kabupaten Majene terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan bersumber dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian otonomi khusus, bantuan keuangan dan dana desa.

Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Majene tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Kabupaten Majene

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Rata-Rata Pertum-buhan (%)
1	**PENDAPATAN**						
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**50.615,85**	**83.238,11**	**89.315,94**	**65.545,40**	**77.635,56**	**15,90**
1.1.1	**Pajak daerah**	**6.065,56**	**6.763,36**	**7.666,91**	**8.820,21**	**8.213,52**	**8,26**
	Pajak Hotel	48,86	50,37	86,13	159,80	162,98	40,41

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Rata-Rata Pertum-buhan (%)
	Pajak Restoran	156,12	248,71	318,69	996,02	823,05	70,65
	Pajak Hiburan	27,48	39,58	32,34	63,49	54,17	26,85
	Pajak Reklame	203,06	196,10	128,76	195,53	186,45	2,36
	Pajak Penerangan Jalan	3.048,22	3.823,09	4.187,26	4.443,05	4.381,03	9,91
	Pajak Pengambilan Bahan Galian C / Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.274,53	999,80	0,00	893,97	382,59	(44,69)
	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	7,63	15,51	22,75	15,73	29,78
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	939,95	877,65	848,72	724,35	564,51	(11,66)
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	367,35	520,45	829,10	1.321,24	1.643,01	46,17
	Pajak Lingkungan	0,00	0,00	1.220,41	0,00	0,00	
1.1.2	**Retribusi daerah**	**12.192,21**	**13.489,68**	**16.480,58**	**7.859,31**	**5.736,84**	**(11,63)**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.512,38	10.143,81	12.165,56	2.866,06	2.392,69	(16,60)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	140,82	188,41	202,50	375,15	373,41	31,52
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	69,19	18,73	286,46	277,57	120,73	324,28
	Retribusi Pelayanan Pasar	1.125,86	1.054,84	1.163,05	1.219,64	899,55	(4,36)
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	33,67	6,74	42,26	33,48	0,00	81,55
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,88	1,73	2,20	3,10	54,82
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	129,38	123,80	242,02	45,59
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	360,55	769,09	863,31	973,65	443,92	20,98
	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	46,97	40,60	125,03	119,65	100,11	43,44
	Retribusi Terminal	146,11	147,72	197,58	189,57	46,73	(11,14)
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	69,48	97,49	226,32	259,06	257,68	46,60
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	22,75	47,23	2,06	0,00	0,00	(29,35)
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	157,45	190,38	399,65	402,36	350,75	29,67
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15,00	15,00	17,50	20,00	21,00	8,99
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	330,78	570,97	581,74	987,53	481,26	23,25
	Retribusi Izin Gangguan	122,70	192,59	65,63	0,00	0,00	(36,32)
	Retribusi Izin Trayek	10,30	5,20	10,85	9,60	3,90	(2,94)
	Retribusi Izin Perikanan	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)
1.1.3	**Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan**	**3.127,34**	**3.345,80**	**2.686,43**	**2.969,20**	**2.920,15**	**(0,96)**
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.127,34	3.345,80	2.686,43	2.969,20	2.920,15	(0,96)
1.1.4	**Lain-lain PAD yang sah**	**29.230,72**	**59.639,27**	**62.482,02**	**45.896,68**	**60.765,05**	**28,66**
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	201,84	1.194,17	563,69	19,88	205,44	319,00
	Hasil Penjualan Aset Lainnya	10,77	9,15	121,90	0,00	0,00	372,39

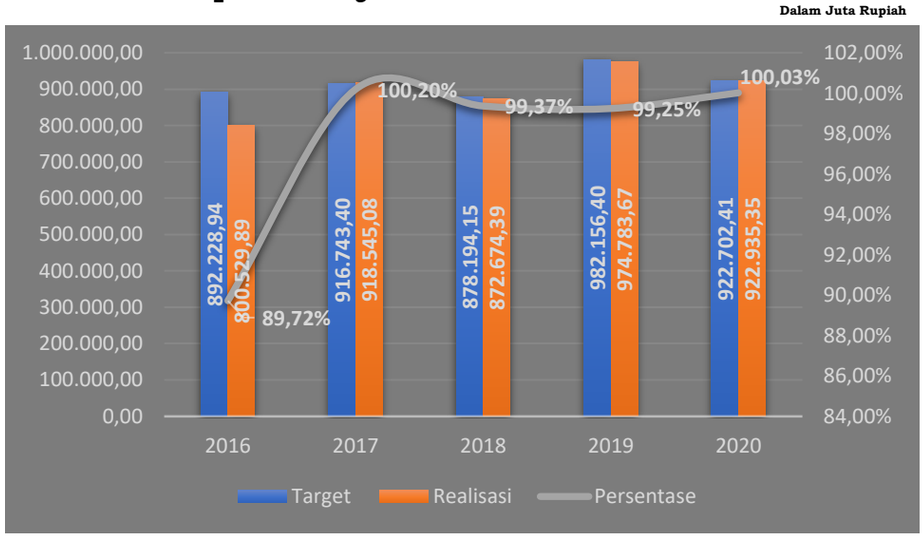
No	Uraian	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Rata-Rata Pertum-buhan (%)
	Penerimaan Jasa Giro	1.591,96	1.700,53	1.630,15	2.169,72	1.745,70	4,06
	Pendapatan Bunga	0,00	0,00	2.104,99	538,48	577,42	(33,59)
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	1.021,83	1.029,75	0,77
	Pendapatan Denda Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
	Pendapatan dari Pengembalian	1.790,90	459,73	1.796,63	238,11	192,14	27,61
	Pendapatan dari Angsuran /Cicilan Penjualan	0,00	6,20	8,90	0,00	0,00	(28,29)
	Pendapatan BLUD	25.635,25	0,00	31.258,65	33.628,51	48.167,32	(16,39)
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	27.215,35	24.997,12	0,05	7,35	5.005,98
	Pendapatan Dana BOS SADIK Negeri	0,00	29.054,14	0,00	0,00	0,00	(100,00)
1.2	**Dana Perimbangan**	**690.086,96**	**732.543,94**	**668.828,39**	**754.023,51**	**712.863,32**	**1,18**
1.2.1	**Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak**	**15.378,35**	**12.552,00**	**8.829,97**	**7.121,31**	**7.701,80**	**(14,81)**
	Bagi Hasil Pajak	14.836,26	12.019,84	8.121,89	6.525,66	6.895,92	(16,35)
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	542,09	532,16	708,08	595,65	805,88	12,66
1.2.2	**Dana alokasi umum**	**518.259,52**	**509.399,91**	**512.162,49**	**536.729,86**	**492.454,28**	**(1,15)**
	Dana alokasi umum	518.259,52	509.399,91	512.162,49	536.729,86	492.454,28	(1,15)
1.2.3	**Dana alokasi khusus**	**156.449,09**	**210.592,03**	**147.835,93**	**210.172,34**	**212.707,24**	**12,04**
	Dana alokasi khusus	156.449,09	210.592,03	147.835,93	210.172,34	212.707,24	**12,04**
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**59.827,09**	**102.763,02**	**114.530,06**	**155.214,76**	**132.436,47**	**26,02**
1.3.1	**Hibah**	**3.152,02**	**22.189,54**	**2.704,00**	**32.343,24**	**33.777,47**	**404,18**
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	3.152,02	22.189,54	2.704,00	32.343,24	33.777,47	404,18
1.3.3	**Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya ***)**	**14.786,39**	**17.156,60**	**17.191,62**	**19.508,52**	**20.181,78**	**8,29**
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.786,39	17.156,60	17.191,62	19.508,52	20.181,78	8,29
1.3.4	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**704,79**	**7.500,00**	**34.250,00**	**34.070,97**	**11.289,25**	**313,36**
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	704,79	7.500,00	34.250,00	34.070,97	11.289,25	313,36
1.3.5	**Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya**	**1.276,00**	**5.400,00**	**7.000,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**66,06**
	Pendapatan Bantuan Keuangan	1.276,00	5.400,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	66,06
1.3.5	**Pendapatan Dana Desa**	**39.907,89**	**50.431,06**	**53.384,44**	**64.292,02**	**65.187,97**	**13,51**
	Dana Desa	39.907,89	50.431,06	53.384,44	64.292,02	65.187,97	13,51
1.3.6	**Pendapatan Lainnya**	**0,00**	**85,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Pendapatan Lainnya	0,00	85,82	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah Pendapatan	**800.529,89**	**918.545,08**	**872.674,39**	**974.783,67**	**922.935,35**	**4,03**

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah & Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dalam kurun waktu 5 tahun tersebut adalah 4,03%. Realisasi tertinggi pada pendapatan asli daerah dari tahun 2016-2021 bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rata-rata pertumbuhan 28,66%. Pada dana perimbangan realisasi terbesar bersumber dari dana alokasi umum dan juga merupakan sumber pendapatan terbesar dari semua sumber pendapatan. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah sumber penerimaan terbesar adalah dana desa dengan rata-rata pertumbuhan 13,51%.

Jika dibandingkan dengan target, maka pada tahun 2017 dan 2020 realisasi pendapatan daerah melampaui target, sedangkan pada tahun 2016, 2018 dan 2019 realisasi pendapatan daerah di bawah 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 3. 1
Gambaran Target dan Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020



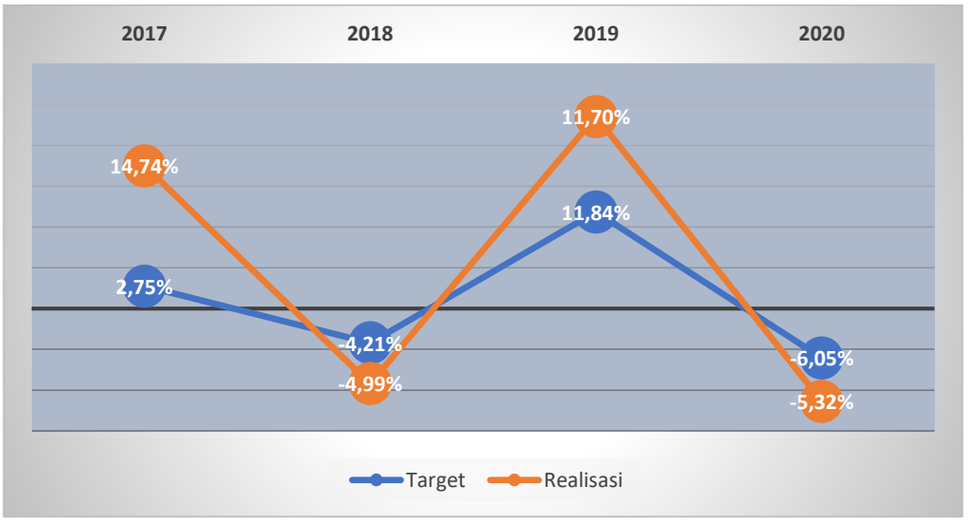
Untuk tahun 2017 pelampauan realisasi pendapatan bersumber dari realisasi penerimaan retribusi daerah 109,01%, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan dana alokasi umum yang masing-masing terealisasi 100%. serta Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat diasumsikan sebesar 5,02 Milyar rupiah namun

realisasi dari penerimaan dana hibah tersebut mencapai angka 22,19 Milyar rupiah. Peningkatan ini bersumber dari Program Nasional yang memiliki Sumber pendanaan dari Dana Hibah yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Majene.

Sedangkan pada tahun 2020 realisasi pendapatan yang melampaui target adalah penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang terealisasi 107,45%, dana alokasi khusus yang mencapai realisasi 100,59% dan Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang mencapai realisasi 147,43% dari target.

Berikut adalah gambaran laju pertumbuhan target dan realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Majene Tahun 2016-2020 :

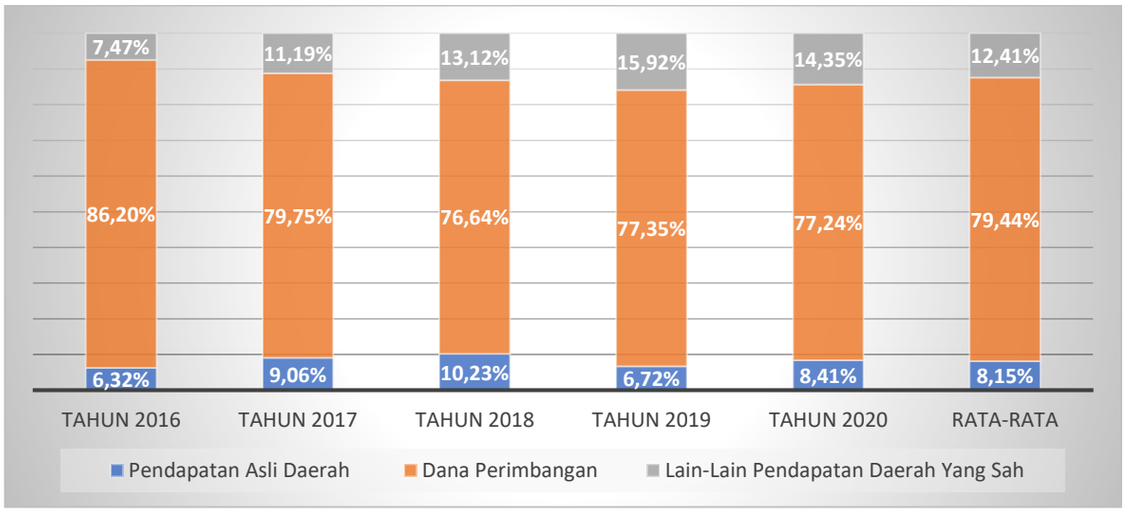
Gambar 3. 2
Grafik Laju Pertumbuhan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020



Dari diagram di atas terlihat bahwa antara target dan realisasi pendapatan mengalami trend laju pertumbuhan yang sama setiap tahun, dimana pada tahun 2017 target pendapatan meningkat 2,75% sedangkan realisasi pendapatan juga meningkat 14,74% dari realisasi tahun 2016. Pada tahun 2018 target pendapatan turun 4,21% dan realisasi pendapatan juga turun 4,99% dari tahun 2017. Pada tahun 2019 target dan realisasi pendapatan meningkat yaitu 11,84% untuk target pendapatan dan 11,70% untuk realisasi pendapatan. Sedangkan pada tahun 2020 target dan realisasi pendapatan kembali menurun dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 6,05% dan 5,32%.

Struktur pendapatan daerah di Kabupaten Majene sampai saat ini masih sangat tergantung pada dana perimbangan terutama dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Hal ini dapat terlihat dari komposisi masing-masing kelompok pendapatan daerah pada grafik di bawah ini :

Gambar 3. 3
Komposisi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020



Dari grafik di atas terlihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun 2006 – 2020 jika dirata-ratakan maka proporsi pendapatan asli daerah hanya sebesar 8,15%, dana perimbangan 79,44% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 12,41%.

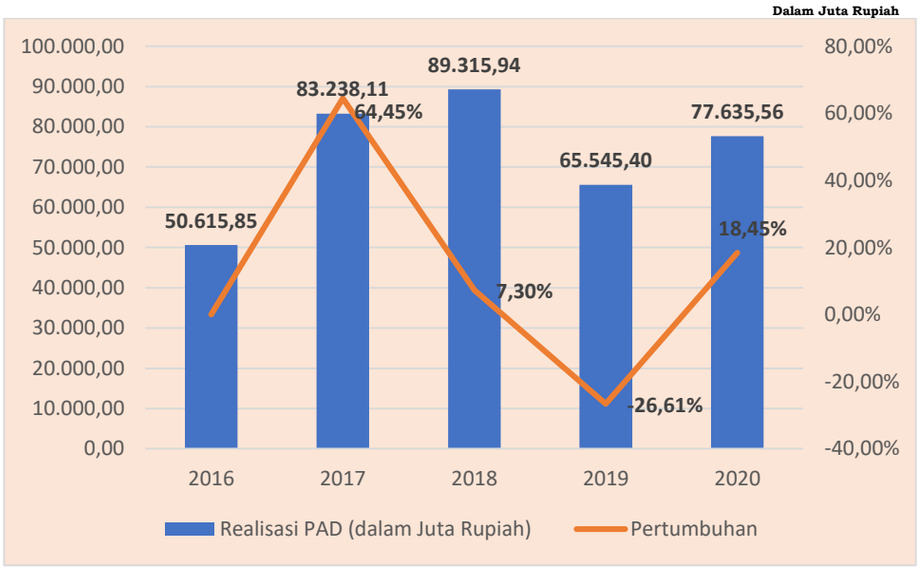
Berikut adalah gambaran realisasi dari masing-masing komponen pendapatan daerah di Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020.

- **Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu komponen utama pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana dalam kurun waktu tahun 2016 - 2018 realisasi PAD di Kabupaten Majene meningkat dengan persentase kenaikan sebesar 64,45% di tahun 2017 dan 7,30% di tahun 2018. Namun pada tahun 2019 PAD Kabupaten Majene mengalami penurunan cukup tajam yaitu sebesar 26,61%, dan pada tahun 2020 PAD Kabupaten Majene kembali meningkat dengan persentase kenaikan sebesar 18,45% dengan rata-rata pertumbuhan PAD tahun 2016 – 2020 adalah sebesar 15,90%.

Untuk lebih jelasnya gambaran realisasi dan persentase pertumbuhan PAD setiap tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 3. 4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhannya
Tahun 2016 – 2020



Berdasarkan tabel 3.2 dan grafik di atas realisasi PAD di Kabupaten Majene pada tahun 2019 menurun, dan beberapa penyebab menurunnya realisasi penerimaan PAD tersebut antara lain adalah :

a. Penerimaan retribusi pelayanan Kesehatan di tahun 2019 yang menurun 76,44% dibandingkan dengan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di tahun 2018. Penurunan target ini disebabkan karena adanya perubahan jenis penerimaan pendapatan untuk dana Kapitasi JKN Puskesmas yang pada Perubahan APBD Tahun 2019 termasuk dalam penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
b. Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum juga menurun sebesar 3,10% dari Tahun 2018
c. Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menurun 20,78% dari Tahun 2018
d. Terdapat dua jenis retribusi daerah yang sejak tahun 2019 tidak lagi menjadi sumber penerimaan retribusi daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Izin Gangguan.

Pada tahun 2018 penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD berupa deviden atas penyertaan modal pada Bank Sulselbar juga menurun 19,71% dari realisasi tahun 2017. Realisasi deviden ini berdasarkan hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) oleh semua pemegang saham pada PT Bank Sulselbar, dimana nilai deviden didasarkan pada jumlah modal yang disertakan.

- **Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan yang diterima daerah berperan penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah. Setiap jenis dana perimbangan mempunyai peran masing-masing. Dana bagi hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) berperan sebagai pemerataan fiscal antar daerah (*fiscal equalization*) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berperan sebagai dana yang didasari oleh adanya kebijakan khusus untuk membiayai pelaksanaan program prioritas nasional di daerah. Pemanfaatan dana perimbangan diserahkan kepada daerah, sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat secara efektif dan efisien menggunakan dana ini untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Di Kabupaten Majene Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat bergantung pada penerimaan dari dana perimbangan terutama dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sumber - sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan komponen dari pendapatan asli daerah, belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa sampai saat ini dalam hal keuangan daerah Kabupaten Majene belum menunjukkan kemandirian. Kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan oleh Derajat Desentralisasi Fiskal melalui perbandingan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah APBD di Kabupaten Majene masih rendah dengan pertumbuhan yang fluktuatif, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 3
Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Majene
Tahun 2016-2020

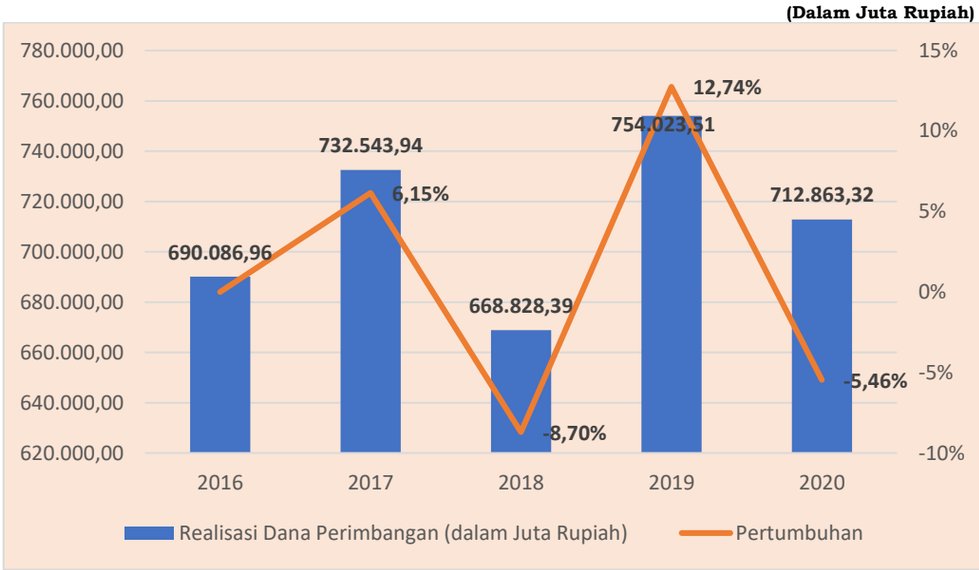
Tahun	Total Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)
2016	872.674.394.613,72	89.315.943.000,47	10,23
2017	918.545.076.665,88	83.238.112.411,80	9,06
2018	872.674.394.613,72	89.315.943.000,47	10,23
2019	974.783.672.815,17	65.545.400.637,78	6,72
2020	922.935.347.401,86	77.635.559.065,86	8,41
Rata-Rata			**8,93**

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah & Badan Pendapatan Daerah

Dengan adanya desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah harus bisa menggunakan segala potensi yang ada di daerah secara optimal seperti : Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Saya Alam (SDA), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan sebagainya yang diharapkan dapat meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan daerah lainnya, agar nantinya mampu menjadikan Kabupaten Majene mandiri secara nyata dan bertanggung jawab atau mengurangi ketergantungannya terhadap sumber-sumber daerah lain dan juga dari pemerintah pusat.

Rata-rata pertumbuhan realisasi dana perimbangan di Kabupaten Majene kurun waktu tahun 2016 – 2020 adalah 1,18% dengan trend pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2017 penerimaan dana perimbangan meningkat 6,15%, tahun 2018 menurun 8,70%, kembali meningkat 12,74% di tahun 2019 dan tahun 2020 kembali menurun 5,46% seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 3. 5
Realisasi Dana Perimbangan dan Pertumbuhannya
Tahun 2016 – 2020



Berdasarkan tabel 3.2 dan grafik di atas penerimaan dana perimbangan pada tahun 2018 dan tahun 2020 mengalami penurunan. Menurunnya penerimaan dana perimbangan pada tahun 2018 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Penurunan penerimaan Dana Alokasi Khusus, dimana pada tahun 2017 Dana Alokasi Khusus yang diterima mencapai 210,59 Milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2018 hanya sebesar 147,84 Milyar rupiah. Beberapa sumber alokasi DAK khususnya DAK fisik mengalami penurunan antara lain DAK Bidang Infrastruktur Jalan yang turun 68,11% dan DAK Bidang Kesehatan yang juga menurun signifikan yaitu sekitar 68,57%. Penurunan penerimaan DAK ini diakibatkan kurangnya koordinasi pengelola DAK dengan Kementerian PPN/Bappenas yang pada saat itu mulai menerapkan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA).
b. Realiasi dana bagi hasil pajak juga menurun dari 32,43% dari realisasi tahun 2017. Nilai realisasi tersebut merupakan hasil perhitungan bagi hasil pajak dari provinsi didasarkan realisasi pajak yang dipungut provinsi atas setiap kabupaten, dan penetapan besaran bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten berdasarkan SK Gubernur dan menjadi kewenangan provinsi

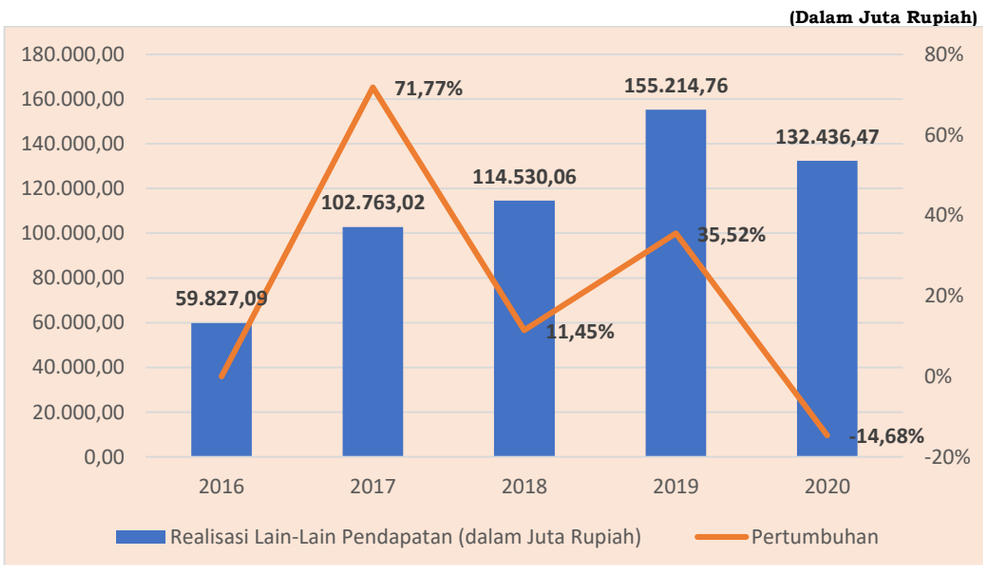
Pada tahun 2020 penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) menurun 8,25% dibandingkan dengan tahun 2019 yang merupakan akibat dari adanya kejadian luar biasa yang melanda hampir semua negara termasuk Indonesia yaitu *pandemic covid-19*. Berkurangnya nilai DAU ini mengakibatkan semua perangkat daerah wajib melakukan *Refocusing*/Realokasi Anggaran untuk penanganan Covid-19.

- **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Komponen pendapatan ketiga dalam struktur APBD adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen pendapatan ini pada tahun 2016 – 2020 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 26,02% dan merupakan nilai rata-rata pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan dua komponen pendapatan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa sumber-sumber penerimaan lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan yang cukup signifikan mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Namun pada tahun 2020 menurun 14,68%.

Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 3. 6
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
dan Pertumbuhannya Tahun 2016 – 2020



Berdasarkan data pada tabel 3.2 dan grafik di atas maka menurunnya realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2020 diakibatkan oleh berkurangnya penerimaan Dana penyesuaian dan otonomi khusus berupa Dana Insentif Daerah (DID) yang nilainya ditetapkan berdasarkan surat keputusan dari pemerintah pusat.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah berdasarkan struktur APBD terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara umum belanja daerah Kabupaten Majene Tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 belanja daerah mengalami penurunan yang diakibatkan oleh adanya *refocusing* belanja dalam rangka penanganan pandemi *COVID*-19. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan realisasi belanja daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 4
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2016 s/d Tahun 2020
Kabupaten Majene

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Rata-Rata Pertum-buhan (%)
2	**BELANJA**						
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**478.360,09**	**466.969,96**	**481.941,36**	**523.802,17**	**568.895,77**	**4,53**
2.1.1	Belanja Pegawai	385.997,16	354.047,44	353.862,77	392.059,27	387.322,94	0,31
	Belanja Gaji dan Tunjangan	311.973,56	276.977,71	281.390,12	290.670,87	353.206,74	3,80
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	72.971,91	74.683,36	69.598,10	98.500,23	31.349,65	(7,78)
	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	930,00	1.537,40	2.371,00	2.290,00	2.250,00	28,59
	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	121,69	848,98	503,55	381,74	385,07	133,41
	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	216,43	131,48	
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	21,00	21,10	
2.1.4	Belanja Hibah	4.111,90	891,60	3.257,40	7.554,70	39.119,00	184,19
	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	1.675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Hibah Dana BOP PAUD Masyarakat/ Swasta	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.935,58	6.432,60	5.070,00	3.125,00	0,00	18,20
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	552,83	931,65	1.119,85	1.413,51	941,93	20,40
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	85.366,64	104.578,14	118.308,64	119.323,76	114.380,96	8,09



No	Uraian	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Rata-Rata Pertum-buhan (%)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	395,98	88,53	322,70	304,93	27.109,84	2.243,00
	Belanja Tak Terduga	395,98	88,53	322,70	304,93	27.109,84	2.243,00
2.2	**Belanja Langsung**	**322.300,63**	**421.166,25**	**405.736,43**	**453.002,94**	**358.288,97**	**4,44**
1.2.1	**Belanja Pegawai**	**39.692,97**	**43.689,17**	**57.109,86**	**3.370,25**	**1.364,31**	**(28,21)**
	Honorarium PNS	14.711,07	14.533,24	16.900,74	0,00	0,00	(28,31)
	Honorarium Non PNS	8.821,50	12.573,23	15.370,38	0,00	0,00	(11,74)
	Belanja Uang Lembur	2.459,39	2.543,98	3.302,11	3.370,25	1.364,31	(6,05)
	Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	508,64	668,82	0,00	0,00	(34,25)
	Belanja Pegawai BLUD	13.701,01	13.530,07	20.867,81	0,00	0,00	(15,67)
1.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	**133.223,16**	**178.853,53**	**188.617,47**	**268.512,51**	**221.806,91**	**16,17**
	Belanja Bahan Pakai Habis	5.244,71	9.843,64	10.713,57	11.571,55	9.482,78	21,62
	Belanja Bahan/Material	8.345,87	9.534,32	14.041,07	12.125,54	9.091,13	5,71
	Belanja Jasa Kantor	15.769,89	21.299,91	26.410,97	28.404,98	18.883,68	8,27
	Belanja Premi Asuransi	256,97	4.990,97	6.956,73	12.762,40	10.443,60	486,72
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.341,69	5.847,04	5.582,58	5.924,48	4.103,65	(9,23)
	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.771,19	4.848,22	6.309,07	6.363,96	3.484,53	3,58
	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir	288,24	676,38	476,99	745,42	204,01	22,21
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24,90	280,20	65,64	62,46	33,26	224,28
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45,10	386,32	472,24	396,37	84,28	171,00
	Belanja Makanan dan Minuman	6.020,13	11.422,17	15.970,34	14.359,46	8.823,16	20,23
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	734,29	260,73	247,42	349,88	324,34	(8,87)
	Belanja Pakaian Kerja	209,58	83,80	130,58	836,93	952,06	137,63
	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	626,44	608,71	991,10	1.296,59	508,71	7,51
	Belanja Perjalanan Dinas	24.804,60	21.690,22	27.194,27	31.176,10	18.227,51	(3,52)
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	585,80	633,20	485,00	605,00	490,00	(2,39)
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	11.317,02	7.878,71	6.903,56	14.739,72	1.948,16	(4,01)
	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Pemeliharaan	2.590,48	4.120,13	4.381,30	5.200,60	6.856,98	28,98
	Belanja Jasa Konsultansi	10.046,77	27.181,87	13.083,14	15.719,06	9.832,76	25,35
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.501,43	31.408,37	29.425,11	42.978,91	35.286,46	18,76
	Belanja Barang Yang Akan Dijual kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	250,92	40,00	0,00	0,00	19,06	(61,35)
	Honorarium PNS	522,10	2.040,93	3.706,29	27.849,87	42.773,31	269,38
	Honorarium Non PNS	1.630,98	0,00	379,38	18.657,57	19.780,32	1.180,98
	Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	508,64	0,00	0,00	0,00	
	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	209,50	143,75	265,28	1.595,25	2.847,46	158,25

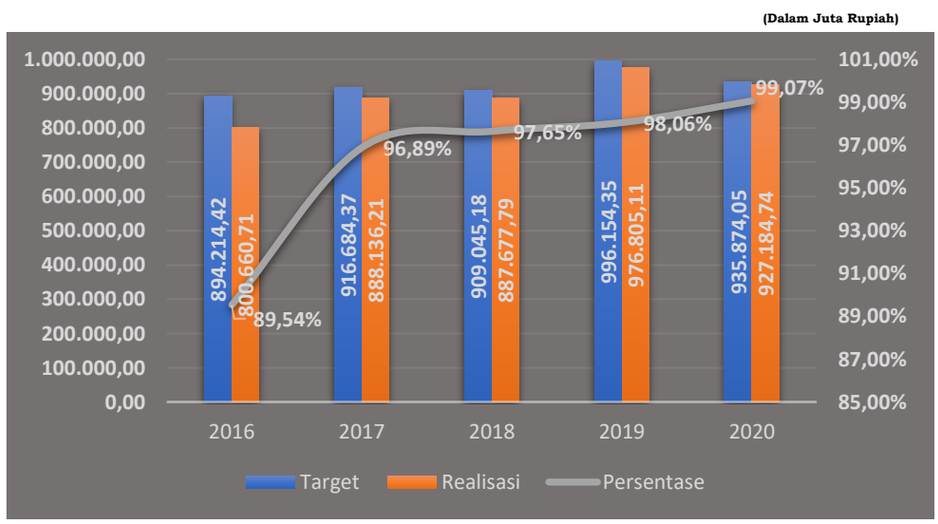
No	Uraian	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Rata-Rata Pertum-buhan (%)
	Belanja Barang Dana BOS	0,00	251,81	10,34	0,00	0,00	(97,95)
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	13.084,55	12.873,53	14.415,51	14.790,42	17.325,70	7,53
1.2.3	**Belanja Modal**	**149.384,50**	**198.623,55**	**160.009,10**	**181.120,18**	**135.117,75**	**0,33**
	Belanja Modal Tanah	8.514,66	10.399,32	14.372,08	11.977,65	0,00	(14,08)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.646,14	42.909,43	16.893,33	40.002,45	46.705,70	50,19
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.259,53	41.997,93	46.974,63	64.331,65	64.222,38	23,04
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	90.833,51	100.909,02	79.380,57	61.142,19	22.255,97	(24,20)
	Aset Tetap Lainnya	130,67	2.407,85	2.388,50	3.666,25	1.933,71	437,04
	Jumlah Belanja	**800.660,71**	**888.136,21**	**887.677,79**	**976.805,11**	**927.184,74**	**3,96**

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah & Badan Pendapatan Daerah

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah kurun waktu tahun 2016 – 2021 adalah sekitar 3,96%. Setiap tahun realisasi anggaran terbesar pada belanja tidak langsung bersumber dari belanja pegawai dengan rata-rata pertumbuhan 0,31%. Dari belanja langsung realisasi anggaran terbesar pada tahun 2016-2017 bersumber dari belanja modal, sedangkan pada 2018-2020 bersumber dari belanja barang dan jasa.

Untuk perbandingan target dan realisasi belanja tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

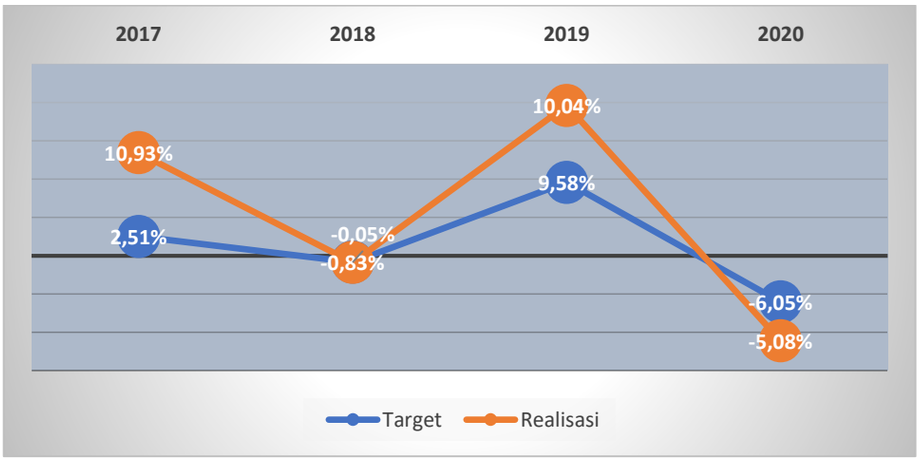
Gambar 3. 7
Gambaran Target dan Realisasi Belanja Daerah di Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020



Dari gambar di atas terlihat bahwa realisasi belanja daerah terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 realisasi belanja menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan belanja ini merupakan dampak dari adanya kejadian luar biasa (KLB) Pandemi Covid-19 sejak bulan April 2020 dan mengakibatkan pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk mengurangi transferan DAU ke daerah. Hal ini menuntut daerah untuk melakukan penyesuaian pemanfaatan anggaran atau melakukan *refocusing* anggaran sehingga berimbas terhadap penurunan anggaran belanja program kegiatan, sumber dan penggunaan pembiayaan selama pelaksanaan APBD Kabupaten Majene Tahun 2020.

Laju pertumbuhan dari target dan realisasi belanja tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

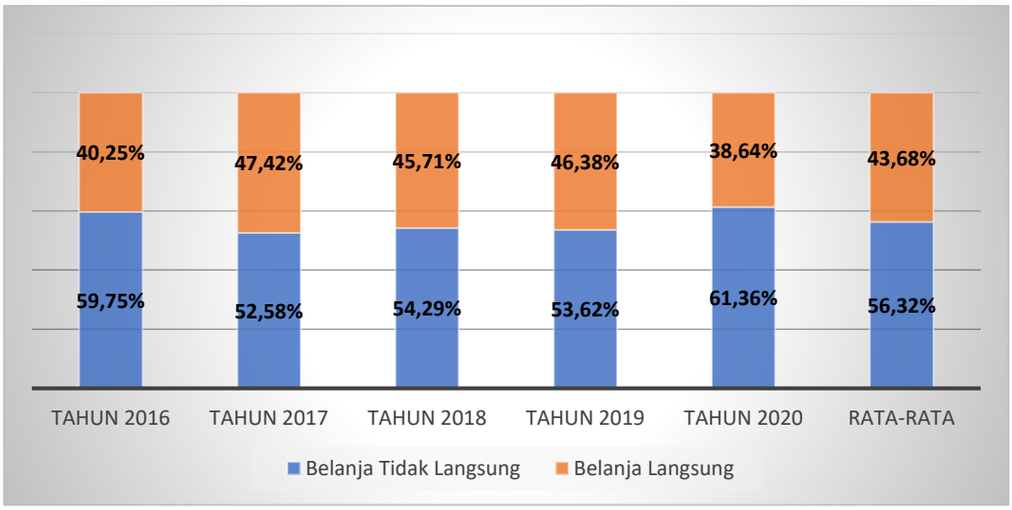
Gambar 3. 8
Grafik Laju Pertumbuhan Target dan Realisasi Belanja Daerah di Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020



Dari diagram di atas terlihat bahwa pada tahun 2017 target belanja meningkat 2,51% dan realisasi belanja juga meningkat 10,93% dari tahun 2016. Pada tahun 2018 target belanja turun 0,83% begitupun realisasi belanja juga turun 0,05% dari tahun 2017. Pada tahun 2019 target dan realisasi belanja meningkat masing-masing sebesar 9,58% dan 10,04%. Dan pada tahun 2020 kembali menurun 6,05% untuk target belanja dan 5,08% untuk realisasi belanja.

Komposisi belanja daerah di Kabupaten Majene kurun waktu tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3. 9
Komposisi Belanja Daerah Tahun 2016 – 2020



Dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020, berdasarkan gambar di atas alokasi belanja daerah pada belanja tidak langsung masih sangat besar, yang bila dirata-ratakan maka proporsi belanja tidak langsung mencapai 56,32%, sedangkan untuk belanja langsung 43,68%. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya kapasitas fiskal daerah untuk mendukung lebih banyak pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraaan masyarakat. APBD Kabupaten Majene lebih banyak terserap pada belanja pegawai khususnya gaji dan tunjangan, sehingga anggaran yang tersedia untuk belanja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat masih kurang optimal.

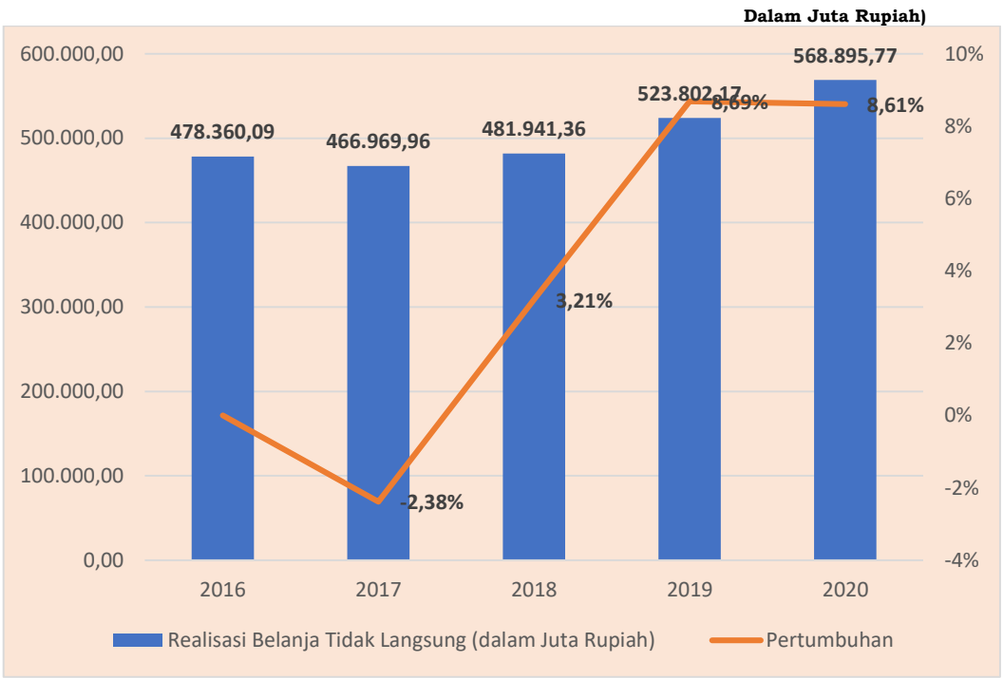
Perkembangan Realisasi dan pertumbuhan dari belanja tidak langsung dan belanja langsung kurun waktu tahun 2016 – 2020 dijabarkan sebagai berikut :

- **Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengalokasian Belanja tidak langsung adalah untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil , belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Berikut gambaran realisasi dan pertumbuhan belanja tidak langsung di Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020

Gambar 3. 10
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Pertumbuhannya
Tahun 2016 – 2020



Berdasarkan tabel 3.4 dan grafik di atas, maka secara totalan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 belanja tidak langsung cenderung meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan 4,53%. Belanja pegawai pada belanja tidak langsung menurun setiap tahun kecuali pada tahun 2019 yang naik 10,79% dari tahun sebelumnya. Komponen belanja gaji dan tunjangan merupakan anggaran belanja yang paling besar dari belanja pegawai dan setiap tahun meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 3,8%. Peningkatan tersebut bersumber selain untuk kenaikan pangkat pegawai, dan gaji berkala juga bersumber dari adanya penerimaan CPNS daerah Kabupaten Majene.

Pada belanja bunga hanya terdapat realisasi pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang merupakan pembayaran bunga atas jasa giro rekening Dana BOS yang ada pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga.

Untuk belanja hibah menunjukkan adanya peningkatan di tahun 2018 dan sampai tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 39.119.000.000,00 atau naik signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Belanja hibah yang lebih besar pada tahun 2020 ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Majene memberikan hibah kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Majene terkait dengan agenda PILKADA serentak Tahun 2020. Berbanding terbalik dengan belanja hibah, belanja sosial menunjukkan adanya penurunan setiap tahun dan pada tahun 2020 belanja sosial yang dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000 tidak terealisasi.

Belanja bagi hasil yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam kurun waktu tahun 2016 – 2019 menunjukkan adanya peningkatan, namun pada tahun 2020 menurun 33,36% yang disebabkan karena menurunnya penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan dasar perhitungan untuk pemberian belanja bagi hasil. Belanja bantuan keuangan juga meningkat setiap tahun kecuali pada tahun 2020 yang menurun 4,14% dari tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga pada tahun 2020 sangat meningkat yang mana belanja tidak terduga pada tahun tersebut sebagian besar dialokasikan untuk penanganan virus corona, pemberian Dana STIMULAN UMKM Dampak Covid 19 dan Pemberian Dana Bansos BLT kepada Masyarakat akibat dampak Virus Corona

Pada tahun 2017 terjadi penurunan belanja tidak langsung sekitar 2,38% yang diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain :

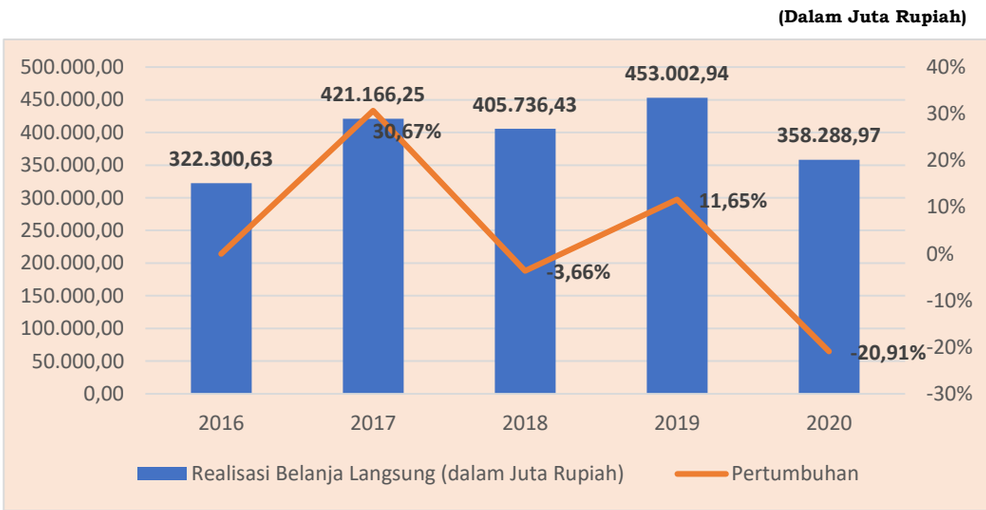
a. Realisasi belanja pegawai yang turun 8,28% dari realisasi tahun 2016.
b. Belanja hibah turun 78,32% dari realisasi anggaran tahun 2016. Menurunnya belanja hibah ini diakibatkan karena pada tahun 2017 untuk Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang pada

tahun 2016 mencapai realisasi 1,68 Milyar tidak dialokasikan dalam APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2017. Disamping itu Belanja Hibah Dana BOP PAUD Masyarakat/Swasta juga mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada tahun 2016.

- **Belanja Langsung**

Belanja langsung yang merupakan merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Realisasi dan pertumbuhan belanja langsung di Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020 tergambar pada grafik di bawah ini :

Gambar 3. 11
Grafik Realisasi Belanja Langsung dan Pertumbuhannya
Tahun 2016 – 2020



Berdasarkan tabel 3.4 dan grafik di atas terlihat bahwa belanja langsung mengalami pertumbuhan realisasi yang fluktuatif. Pada tahun 2017 realisasi belanja langsung meningkat 30,67%, menurun 3,66% di tahun 2018, meningkat 11,65% di tahun 2019 dan kembali menurun 20,91% di tahun 2020. Menurunnya realisasi belanja langsung di tahun 2018 selain karena belanja modal yang ditargetkan sebesar 163,03 Milyar tidak terealisasi 100% atau hanya sebesar 160,01 Milyar, juga diakibatkan realisasi belanja modal yang

menurun 19,44% dari realisasi belanja modal tahun 2017. Belanja modal pada tahun 2017 dianggarkan sebesar 204,67 milyar dengan realisasi sebesar 198,43 Milyar. Jadi dari segi target dan realisasi belanja modal pada tahun 2018 menurun jika dibandingkan dengan belanja modal pada tahun 2017.

Pada tabel 3.4 Juga terlihat rata-rata pertumbuhan belanja pegawai minus 28,21%, Penurunan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2019 untuk memberikan tambahan penghasilan bagi PNS lingkup Pemkab Kabupaten Majene dengan tidak mengganggarkan lagi belanja honorarium pada belanja langsung dan penganggaran tambahan penghasilan tersebut dialokasikan pada belanja pegawai belanja tidak langsung.

Pada belanja pegawai komponen belanja terbesar terdapat pada honorarium dan belanja pegawai BLUD. Namun pada tahun 2019 seiring dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Majene yang menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada belanja tidak langsung, maka belanja honorarium tidak lagi dianggarkan. Sedangkan belanja pegawai BLUD dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

Pada belanja barang dan jasa komponen belanja terbesar setiap tahunnya terdapat pada belanja perjalanan dinas, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat adanya refocusing anggaran. Alokasi anggaran terbesar kedua terdapat pada belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dengan pertumbuhan yang fluktuatif. Belanja jasa kantor merupakan komponen belanja terbesar ketiga yang meningkat setiap tahun, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Pada belanja modal komponen belanja terbesar setiap tahunnya adalah belanja modal jalan irigasi dan jaringan, namun pada tahun 2019 dan 2020 komponen belanja modal terbesar adalah belanja modal gedung dan bangunan

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Realisasi pembiayaan daerah di Kabupaten Majene pada tahun - tahun tersebut juga menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 5

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun 2016 s/d Tahun 2020
Kabupaten Majene

(Dalam Juta Rupiah)

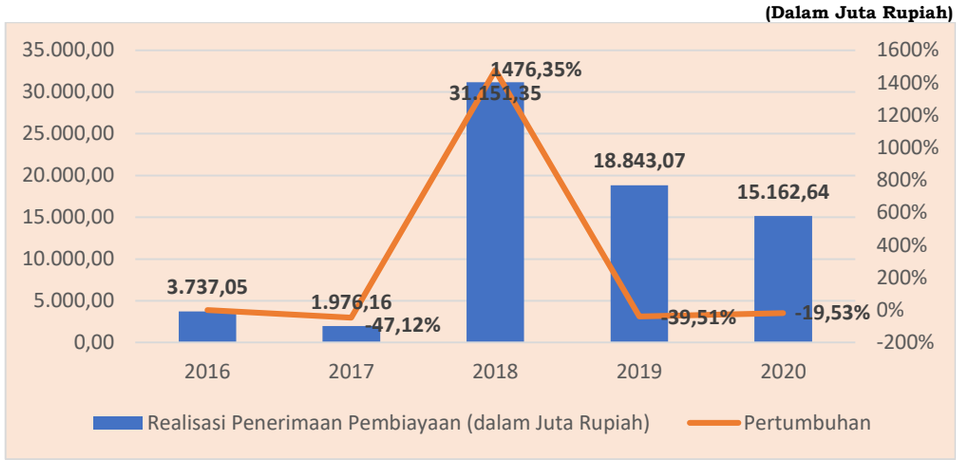
No	Uraian	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Rata-Rata Pertum-buhan (%)
3	**PEMBIAYAAN**	**2.105,78**	**742,16**	**30.651,35**	**17.183,07**	**11.967,91**	**972,74**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**						
3.1.1	Penggunaan SILPA	3.706,04	1.974,96	31.150,65	15.647,95	15.161,64	344,42
3.1.2	Penerimaan Kembali Piutang	31,01	1,20				
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya			0,70	0,40	1,00	53,57
	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri				3.194,72		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**3.737,05**	**1.976,16**	**31.151,35**	**18.843,07**	**15.162,64**	**342,55**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**						
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.631,26	1.234,00	500,00	1.660,00	0,00	12,04
3.2.2	Pembayaran pokok utang					3.194,72	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**1.631,26**	**1.234,00**	**500,00**	**1.660,00**	**3.194,72**	**60,15**
	Pembiayaan Netto	**2.105,78**	**742,16**	**30.651,35**	**17.183,07**	**11.967,91**	**972,74**

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel di atas, Rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah dalam kurun waktu 5 tahun tersebut adalah 972,74%.

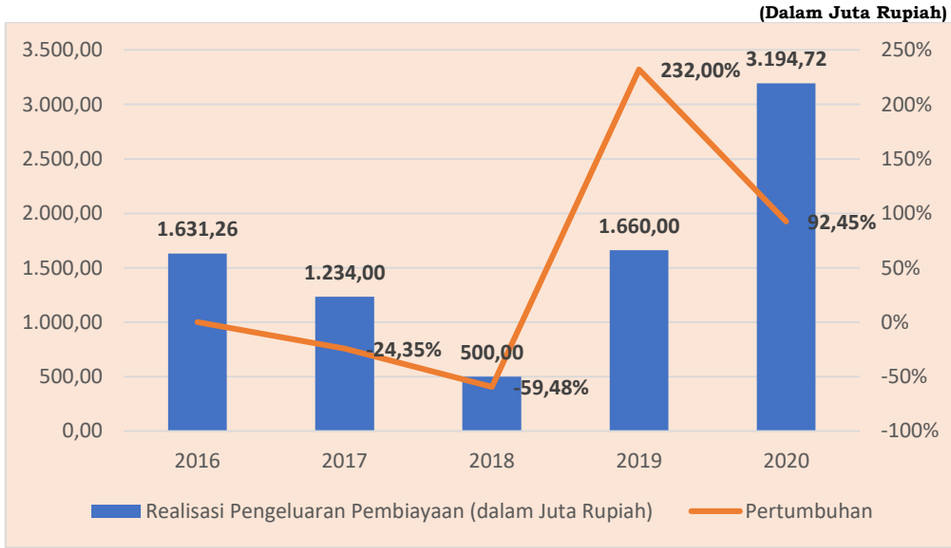
Berikut adalah gambaran realisasi dan laju pertumbuhan dari komponen pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Gambar 3. 12
Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pertumbuhannya Tahun 2016 – 2020



Gambar 3.13

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dan Pertumbuhannya Tahun 2016 – 2020



Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun 2016 – 2020 yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) tahun 2016 – 2020 seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 6
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
Tahun 2016 s/d Tahun 2020
Kabupaten Majene

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
Pendapatan Daerah	800.529,89	918.545,08	872.674,39	974.783,67	922.935,35
Belanja Daerah	800.660,71	888.136,21	887.677,79	976.805,11	927.184,74
Surplus / (Defisit)	**-130,82**	**30.408,86**	**-15.003,40**	**-2.021,43**	**-4.249,39**
Penerimaan Pembiayaan	3.737,05	1.976,16	31.151,35	18.843,07	15.162,64
Pengeluaran Pembiayaan	1.631,26	1.234,00	500,00	1.660,00	3.194,72
Pembiayaan Netto	**2.105,78**	**742,16**	**30.651,35**	**17.183,07**	**11.967,91**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	**1.974,96**	**31.151,03**	**15.647,95**	**15.161,64**	**7.718,53**

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) diakibatkan oleh masih adanya sisa kas yang tidak terserap baik pada kas daerah, kas bendahara penerimaan, kas bendahara pengeluaran, dan kas bendahara lainnya (BLUD, FKTP, BOS). Ini menunjukkan bahwa masih terdapat belanja daerah yang tidak terealisasi. Secara rinci penyebab terjadinya SILPA tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rincian SILPA Tahun 2016 s/d Tahun 2020
Kabupaten Majene

(Dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)
1	Kas di kas daerah	1.277,73	21.751,91	8.797,68	4.419,48	112,89
2	Kas di kas bendahara penerimaan		128,70	483,70	643,00	67,88
3	Kas di kas bendahara pengeluaran	303,67	353,75	73,42	4,37	0,00
4	Kas di bendahara BLUD	393,56	1.697,33	2.499,00	4.161,79	4.931,12
5	Kas di bendahara FKTP		792,54	1.315,31	2.052,87	665,40
6	Kas di bendahara BOS		6.426,79	2.478,85	2.880,13	1.941,24
7	Kas setara kas				1.000,00	
	Jumlah	**1.974,96**	**31.151,03**	**15.647,95**	**15.161,64**	**7.718,53**

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca daerah memuat data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang Aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), Kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan Ekuitas suatu pemerintah daerah.

- Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter.

  Pada tahun 2016 nilai total aset daerah Kabupaten Majene mencapai 1,48 Trilyun rupiah terus meningkat setiap tahun hingga mencapai nilai total aset daerah sebesar 1,58 Trilyun rupiah pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,02%
- Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya membutuhkan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

  Nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2016 – 2018 menunjukkan adanya penurunan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 95,86 Milyar rupiah, tahun 2017 tercatat 31,24 Milyar rupiah dan pada tahun 2018 menurun secara signifikan hingga jumlah kewajiban hanya sebesar 6,26 Milyar rupiah. Namun pada

tahun 2019 nilai kewajiban kembali meningkat dengan nilai sebesar 14.39 Milyar rupiah. Tahun 2020 kewajiban juga meningkat dengan nilai 15,64 Milyar dan rata-rata pertumbuhan nilai kewajiban dari tahun 2016 hingga 2020 adalah 0,02%

- Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah.

  Nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2016-2020 menunjukkan tren yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,03%. Pada tahun 2016 tercatat nilai ekuitas sebesar 1,38 Trilyun rupiah, dan terus meningkat hingga mencapai nilai ekuitas sebesar 1,58 Trilyun rupiah pada tahun 2020.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 8
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Majene

Dalam Juta Rupiah

URAIAN	SALDO TAHUN 2016	SALDO TAHUN 2017	SALDO TAHUN 2018	SALDO TAHUN 2019	SALDO TAHUN 2020	RATA-RATA PERTUM-BUHAN %
ASET						
ASET LANCAR						
KAS	**5.865,05**	**31.168,54**	**15.784,51**	**15.369,51**	**7.718,53**	**0,82**
Kas di Kas Daerah	1.277,73	21.751,91	8.797,68	4.419,48	112,89	3,49
Kas di Bendahara Penerimaan	483,72	128,70	483,70	643,00	67,88	0,36
Kas di Bendahara Pengeluaran	306,18	371,26	105,54	8,77	0,00	(0,61)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	149,69					(1,00)
Kas di Bendahara BOS / APBN	3.254,17	6.426,79	2.500,32	2.895,28	1.941,24	0,05
Kas di BLUD	393,56	1.697,33	2.499,00	4.350,11	4.931,12	1,16
Kas di Bendahara FKTP	0,00	792,54	1.398,27	2.052,87	665,40	0,19
Setara Kas				1.000,00		
INVESTASI JANGKA PENDEK						
PIUTANG	**6.323,96**	**8.622,74**	**5.427,44**	**10.773,27**	**1.810,42**	**0,04**
Piutang Pajak	2.991,11	3.801,41	4.084,58	4.650,16	5.191,84	0,15
Penyisihan Piutang Pajak	-866,90	-1.697,15	-2.107,06	-2.996,37	-3.841,30	0,48
Piutang Pajak Netto	*2.124,22*	*2.104,25*	*1.977,53*	*1.653,79*	*1.350,53*	(0,10)
Piutang Retribusi	824,43	874,83	1.167,41	506,69	*555,57*	(0,02)
Penyisihan Piutang Retribusi	-824,43	-174,84	-108,01	-71,66	-95,68	(0,29)



URAIAN	SALDO TAHUN 2016	SALDO TAHUN 2017	SALDO TAHUN 2018	SALDO TAHUN 2019	SALDO TAHUN 2020	RATA-RATA PERTUM-BUHAN %
Piutang Retribusi Netto	*0,00*	*699,98*	*1.059,40*	*435,03*	*459,89*	(0,00)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	72,08	65,89	57,00	57,00	57,00	(0,06)
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-72,08	-65,89	-57,00	-57,00	-57,00	(0,11)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah				196,30		
Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah				0,00		
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Netto				*196,30*		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	14,25	11,75	4,55	4,25	35,78	1,64
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-0,07	-1,18	-0,45	-2,13	-35,78	8,60
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	*14,18*	*10,58*	*4,09*	*2,13*	*0,00*	*(0,59)*
Piutang Lain-Lain	474,39	474,38	490,35	487,38	487,38	0,01
Penyisihan Piutang Lain-Lain	-474,39	-474,38	-474,46	-480,88	-487,38	0,01
Piutang Lain-Lain Netto	*0,00*	*0,00*	*15,89*	*6,50*	*0,00*	#DIV/0!
Piutang Jampersal dan Jamkesmas / BLUD	6.660,67	6.188,22	2.382,45	8.522,14		0,22
Penyisihan Piutang Jampersal dan Jamkesmas	-2.475,10	-380,29	-11,91	-42,61		(0,06)
Piutang Jampersal dan Jamkesmas Netto	*4.185,56*	5.807,92	2.370,53	8.479,53	*0,00*	*0,34*
BEBAN DIBAYAR DIMUKA	**119,44**	**75,16**	**0,00**	**26,20**	**0,00**	**(0,69)**
PERSEDIAAN	**11.183,43**	**19.089,94**	**7.160,35**	**6.083,14**	**7.299,21**	**0,03**
Jumlah Aset Lancar	**23.491,88**	**58.956,37**	**28.372,30**	**32.252,13**	**16.828,15**	**0,16**
INVESTASI JANGKA PANJANG	**12.077,12**	**13.095,84**	**13.595,84**	**12.063,68**	**10.056,82**	**(0,04)**
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Investasi Dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Investasi dalam Dana Bergulir	2.961,47	2.960,27	2.959,57	2.959,57	2.958,17	0%
- Dana Bergulir diragukan tertagih	-2.961,47	-2.960,27	-2.959,57	-2.959,57	-2.958,17	0%
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Netto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Investasi Permanen	**12.077,12**	**13.095,84**	**13.595,84**	**12.063,68**	**10.056,82**	**(0,039)**
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Saham	7.300,00	7.800,00	13.595,84	12.063,68	10.056,82	13%
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Aset Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PDAM	4.444,91	5.263,82	0,00	0,00	0,00	-41%
- PERUSDA : Aneka Usaha	332,22	32,02	0,00	0,00	0,00	-95%
Jumlah Investasi Permanen	**12.077,12**	**13.095,84**	**13.595,84**	**12.063,68**	**10.056,82**	**(0,04)**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	***12.077,12***	***13.095,84***	***13.595,84***	***12.063,68***	***10.056,82***	***(0,039)***



URAIAN	SALDO TAHUN 2016	SALDO TAHUN 2017	SALDO TAHUN 2018	SALDO TAHUN 2019	SALDO TAHUN 2020	RATA-RATA PERTUM-BUHAN %
ASET TETAP	**1.421.413,27**	**1.440.782,83**	**1.511.759,02**	**1.537.854,15**	**1.548.927,64**	**0,02**
Tanah	446.018,49	434.455,29	448.752,17	456.488,29	454.109,82	0%
Peralatan dan Mesin	235.481,90	218.939,30	235.878,36	281.607,10	318.260,41	8%
Gedung dan Bangunan	524.943,30	504.091,25	549.057,76	610.581,84	626.724,21	5%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	671.163,57	771.426,79	846.401,75	909.981,39	938.795,45	9%
Aset Tetap Lainnya	14.129,71	17.229,54	17.998,73	12.806,54	12.765,04	-1%
Konstruksi Dalam Pengerjaan.	8.491,17	11.488,46	12.351,17	10.485,37	47.695,40	96%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-478.814,87	-516.847,81	-598.680,91	-744.096,38	-849.422,69	16%
Jumlah Aset tetap	**1.421.413,27**	**1.440.782,83**	**1.511.759,02**	**1.537.854,15**	**1.548.927,64**	**0,02**
DANA CADANGAN	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Dana Cadangan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tagihan Penjualan Angsuran Netto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Tuntutan Ganti Rugi	14,21	14,21	0,00	0,00	0,00	
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tuntutan Ganti Rugi Netto	*14,21*	*14,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	12,06	303,45	303,45	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aset Tak Berwujud	1.543,44	1.546,44	2.181,54	2.469,88	4.160,86	0,31
Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	-1.247,99	-1.403,16	-1.622,41	-1.965,30	16%
Aset Tak Berwujud Netto	*1.543,44*	*298,45*	*778,38*	*847,47*	*2.195,56*	0,62
Aset Lain-lain.	22.301,40	29.578,14	28.422,08	30.003,25	33.727,63	0,12
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.	0,00	0,00	-9.207,94	-26.422,76	-29.265,26	0,99
Aset Lain-lain.Netto	*22.301,40*	*29.578,14*	*19.214,14*	*3.580,48*	*4.462,37*	-0,28
Jumlah Aset Lainnya	**23.859,06**	**29.890,80**	**20.004,59**	**4.731,40**	**6.961,37**	**-0,09**
JUMLAH ASET	**1.480.841,33**	**1.542.725,84**	**1.573.731,74**	**1.586.901,36**	**1.582.773,99**	**0,02**
KEWAJIBAN	**95.867,48**	**31.240,58**	**6.257,67**	**14.394,19**	**15.637,66**	**(0,02)**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**95.867,48**	**31.240,58**	**6.257,67**	**14.394,19**	**15.637,66**	**(0,02)**
- Utang Pihak Ketiga	80.352,54				0,00	
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga	2,51	17,89	136,56	207,87	0,00	3,07
- Utang Bunga						
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						
- Pendapatan Diterima Di Muka	95,20	131,50	232,86	111,19	71,50	0,07
- Utang Beban	12.922,68	25.138,94	4.117,61	9.778,51	12.812,86	0,45

URAIAN	SALDO TAHUN 2016	SALDO TAHUN 2017	SALDO TAHUN 2018	SALDO TAHUN 2019	SALDO TAHUN 2020	RATA-RATA PERTUM-BUHAN %
- Utang Jangka Pendek Lainnya	2.494,54	5.952,25	1.770,63	4.296,62	2.753,31	0,44
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**95.867,48**	**31.240,58**	**6.257,67**	**14.394,19**	**15.637,66**	**(0,02)**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
- Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**95.867,48**	**31.240,58**	**6.257,67**	**14.394,19**	**15.637,66**	**(0,02)**
EKUITAS	**1.384.973,85**	**1.511.485,26**	**1.567.474,07**	**1.572.507,17**	**1.567.136,32**	0,03
EKUITAS	1.384.973,85	1.511.485,26	1.567.474,07	1.572.507,17	1.567.136,32	0,03
JUMLAH EKUITAS	**1.384.973,85**	**1.511.485,26**	**1.567.474,07**	**1.572.507,17**	**1.567.136,32**	**0,03**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.480.841,33**	**1.542.725,84**	**1.573.731,74**	**1.586.901,36**	**1.582.773,99**	**0,02**

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah & Badan Pendapatan Daerah

Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Tabel berikut merupakan hasil Analisis neraca daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 – 2020 yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas.

Tabel 3. 9
Pertumbuhan Rasio Keuangan
Kabupaten Majene

Dalam Juta Rupiah

Rasio	Rumus	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	23.491,88	58.956,37	28.372,30	32.252,13	16.828,15
	Kewajiban Jangka Pendek	95.867,48	31.240,58	6.257,67	14.394,19	15.637,66
	Rasio Lancar	0,245	1,887	4,534	2,241	1,076
	Aset Lancar - Persediaan	12.308,45	39.866,43	21.211,95	26.168,99	9.528,95
	Kewajiban Jangka Pendek	95.867,48	31.240,58	6.257,67	14.394,19	15.637,66
	Rasio Cepat	0,128	1,276	3,390	1,818	0,609
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	95.867,48	31.240,58	6.257,67	14.394,19	15.637,66
	Total Aset	1.480.841,33	1.542.725,84	1.573.731,74	1.586.901,36	1.582.773,99
	Rasio Total Hutang (%)	6,47	2,03	0,40	0,91	0,99
	Total Hutang	95.867,48	31.240,58	6.257,67	14.394,19	15.637,66
	Total Ekuitas	1.384.973,85	1.511.485,26	1.567.474,07	1.572.507,17	1.567.136,32
	Rasio Hutang/ Modal (%)	6,92	2,07	0,40	0,92	1,00

Sumber Data : Diolah

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan di Kabupaten Majene dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara Pemerintah Kabupaten Majene dan DPRD Kabupaten Majene. Pengelolaan Pendapatan dilaksanakan dengan lebih meningkatkan PAD agar dapat meningkatkan kemandirian daerah serta tetap melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan juga dengan provinsi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Majene antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi.
3. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan PERDA, mengubah tarif khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
4. Melakukan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak dan retribusi untuk dapat melaksanakan kewajibannya.
5. Meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan dan menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak.
6. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh Daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
7. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Daerah.
8. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan Retribusi melalui pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki
9. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama

Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah

10. Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan juga dengan provinsi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
11. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah

Untuk pengelolaan belanja daerah diarahkan pada penyelarasan sasaran program dan kegiatan yang sesuai dengan urusan dan kewenangan, sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber anggaran serta diarahkan pada pencapaian efektifitas pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah melalui pengalokasian belanja berdasarkan beban kerja masing-masing perangkat daerah. Kebijakan pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Majene antara lain adalah :

1. Berperan serta dalam pelaksanaan program/kegiatan strategis yang mendukung agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah
2. Penyusunan program dan kegiatan urusan wajib pelayanan dasar dilakukan dengan memperhatikan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang tersebut di atas disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan untuk mendukung prioritas nasional
3. Penyusunan program dan kegiatan urusan non wajib pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang disusun untuk dapat mendukung prioritas nasional
4. Penyelarasan sasaran program yang sesuai dengan urusan dan kewenangan terkait secara tepat kegiatan dan tepat anggaran, sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber anggaran serta diarahkan pada pencapaian efektifitas pelaksanaan



tugas dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah melalui pengalokasian belanja berdasarkan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah.

5. Proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar lebih diutamakan
6. Mengedepankan efesiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis, yang berpihak kepada belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Majene
7. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
8. Belanja Pegawai pada belanja tidak langsung disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan THR serta memperhitungkan acress gaji. Selain itu, alokasi anggaran untuk belanja tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berupa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) diberikan berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
9. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
11. Belanja tidak terduga digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan dana darurat seperti penanganan bencana alam.

Sedangkan kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kabupaten Majene dianggarkan dengan memperhatikan selisih antara pendapatan dan belanja. Jika mengalami defisit maka jumlah pembiayaan netto (penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan) harus dapat menutup defisit tersebut. Sebaliknya, apabila mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

A. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Dalam tiga tahun terakhir realisasi belanja daerah di Kabupaten Majene jika ditinjau dari proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja menunjukkan adanya peningkatan. Belanja pegawai pada belanja tidak langsung dan belanja langsung merupakan jenis belanja yang proporsi realisasinya cukup tinggi dibandingkan jenis belanja lainnya dan menunjukan adanya peningkatan setiap tahun. Dan jika dibandingkan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung, proporsi realisasi yang lebih tinggi terlihat pada kelompok belanja tidak langsung yang pada tahun 2018 – 2020 mencapai rata-rata sebesar 99,24%, sedangkan belanja langsung mencapai rata-rata sebesar 95,44%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 10
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Majene

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Rata-Rata
		(%)	(%)	(%)	(%)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**98,53%**	**99,09%**	**100,07%**	**99,23%**
1	Belanja Pegawai	98,44%	98,79%	100,63%	99,29%
2	Belanja Hibah	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%
3	Belanja Bantuan Sosial	100,00%	100,00%	0,00%	66,67%
4	Belanja Bagi Hasil	65,14%	93,15%	66,46%	74,92%
5	Belanja Bantuan Keuangan	99,24%	100,00%	99,99%	99,74%
6	Belanja Tidak Terduga	80,68%	121,97%	95,02%	99,22%

No.	Uraian	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Rata-Rata (%)
B	**Belanja Langsung**	**96,63%**	**96,89%**	**97,53%**	**97,01%**
1	Belanja Pegawai	91,89%	95,45%	96,29%	94,54%
2	Belanja Barang Dan Jasa	96,86%	96,31%	99,57%	97,58%
3	Belanja Modal	98,15%	97,79%	94,35%	96,76%
	Total Belanja	**97,65%**	**98,06%**	**99,07%**	**98,26%**

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majene (Data diolah)

B. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Majene terdiri dari Belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan, belanja penerimaan lainnya pimpinan & anggota DPRD serta Operasional KDH/WKDH, belanja pemungutan pajak daerah, belanja honorarium PNS, belanja uang lembur, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja premi asuransi Kesehatan, belanja makanan dan minuman pegawai, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas, dan belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan kantor).

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2018 – 2020 ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 11
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Majene Tahun 2018 - 2020

No.		Uraian	2018	2019	2020
A.		**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**353.862.770.791,00**	**391.842.844.475,00**	**387.191.468.013,00**
1		Belanja Gaji dan Tunjangan	281.390.124.667,00	290.670.871.621,00	289.930.024.606,00
2		Belanja Tambahan Penghasilan	69.598.099.128,00	8.500.230.554,00	94.626.370.937,00
3		Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	2.370.999.996,00	2.290.000.000,00	2.250.000.000,00
4		Belanja Pemungutan Pajak Daerah	503.547.000,00	381.742.300,00	385.072.470,00
B		**BELANJA LANGSUNG**	**99.550.885.989,00**	**149.247.276.539,00**	**115.799.246.168,98**

No.	Uraian	2018	2019	2020
1	Belanja Honorarium PNS	20.607.030.536,00	30.585.421.114,00	42.773.309.708,00
2	Belanja Uang Lembur	3.302.109.000,00	3.370.249.750,00	1.364.306.000,00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	485.000.000,00	605.000.000,00	490.000.000,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.903.556.431,00	14.739.724.363,00	1.948.162.716,00
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	6.956.728.930,00	12.762.404.810,00	10.443.597.923,00
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	15.970.340.091,00	14.359.455.110,00	8.866.286.255,00
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	247.424.636,00	349.875.000,00	281.215.818,00
8	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	991.095.988,00	1.296.592.206,00	508.711.000,00
9	Belanja Perjalanan Dinas	27.194.270.191,00	31.176.102.431,00	18.226.961.281,00
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas			550.000,00
11	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	16.893.330.186,00	40.002.451.755,00	30.896.145.467,98
	TOTAL	**453.413.656.780,00**	**541.090.121.014,00**	**502.990.714.181,98**

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majene (Data diolah)

Dari tabel di atas terlihat pada tahun 2020 terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada belanja gaji dan tunjangan. Hal ini diakibatkan adanya pengalihan belanja tambahan penghasilan untuk guru yang tahun-tahun sebelumnya dianggarkan pada belanja tambahan penghasilan PNS, namun pada tahun 2020 merupakan bagian dari belanja gaji dan tunjangan.

Total realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tersebut di atas kemudian dibandingkan terhadap total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) untuk mengetahui berapa proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Persentase proporsi ini dapat menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan.

Tabel 3. 12
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Majene

No.	Uraian	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp.)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2018	453.413.656.780,00	888.177.794.369,59	51,05
2	Tahun Anggaran 2019	541.090.121.014,00	978.465.107.702,01	55,30
3	Tahun Anggaran 2020	502.990.714.181,98	930.379.458.882,33	54,06

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majene (Data diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dalam tiga tahun terakhir masih di atas 50%, namun diharapkan pada tahun-tahun berikutnya proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tersebut akan semakin efisien agar belanja yang bersifat pelayanan kepada masyarakat porsinya semakin meningkat, termasuk belanja modal harus menjadi prioritas belanja daerah, karena berkaitan langsung dengan investasi pemerintah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat investasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah.

C. Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Tabel 3. 13
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Majene

No.	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Rata-rata Pertum-buhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**284.880.977.632**	**294.374.380.744**	**352.625.966.621**	**1,45%**
1	Belanja Gaji & Tunjangan	281.390.124.667	290.670.871.621	289.930.024.606	1,52
2	Belanja Penerimaan Anggota & Pimpinan DPRD Serta Operasional KDH/WKDH	2.370.999.996	2.290.000.000	2.250.000.000	-2,58
3	Belanja Bagi Hasil	1.119.852.969	1.413.509.123	941.925.420	-3,57
B	**Pembiayaan Pengeluaran**	**-**	**-**	**3.194.722.600**	**-**
1	Pembayaran pokok utang	-	-	3.194.722.600	-
TOTAL (A+B)		**284.880.977.632**	**294.374.380.744**	**352.625.966.621**	**6,65**

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majene (Data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dan dengan memperhatikan target tahun 2021 maka belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama tahun 2022 – 2026 untuk belanja gaji dan tunjangan diperkirakan akan tumbuh 2,5% setiap tahun, Belanja Penerimaan Anggota & Pimpinan DPRD Serta Operasional KDH/WKDH naik 1,5% setiap tahun dan Belanja Bagi Hasil akan naik sekitar 5,71% setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 14
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Majene Tahun 2021-2026

(Dalam Juta Rupiah)

No.	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp.)	Tingkat Pertum buhan (%)	Proyeksi				
				Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2026 (Rp.)
A	**Belanja Pegawai**							
1	Belanja Gaji & Tunjangan	284.659,61	2,50%	316.680,55	324.597,56	332.712,50	341.030,31	349.556,07
2	Belanja Penerimaan Anggota & Pimpinan DPRD Serta Operasional KDH/WKDH	7.941,57	1,50%	8.822,35	8.954,69	9.089,01	9.225,34	9.363,72
3	Belanja Bagi Hasil	2.566,27	5,71%	2.144,04	2.147,34	2.273,06	2.398,79	2.524,51
B	**Pembiayaan Pengeluaran**							
1	Pembayaran pokok utang							
TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA		**295.167,45**		**327.646,94**	**335.699,59**	**344.074,57**	**352.654,45**	**361.444,31**

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan daerah. Jika realisasi pendapatan daerah lebih kecil, maka terjadi defisit yang ditutup oleh pembiayaan penerimaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah maka akan terjadi surplus.

Dengan analisis pembiayaan dapat diketahui gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dalam tiga tahun terakhir realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Majene lebih kecil dari realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah sehingga terjadi defisit. Defisit riil anggaran tersebut di atas kemudian ditutup dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Pada akhir tahun berkenan masih terdapat sisa lebih pembiayaan yang menjadi SiLPA pada tahun berikutnya dan dimanfaatkan untuk membiayai penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Namun penerimaan pembiayaan dari SiLPA baru dapat direalisasikan pada perubahan anggaran setiap tahunnya setelah adanya pengesahan DPRD tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD

Angka defisit dan penutup defisit riil anggaran di Kabupaten Majene dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15
Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Majene

No	Uraian	Tahun 2018 Rp.	Tahun 2019 Rp.	Tahun 2020 Rp.
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	872.674.394.613,72	974.783.672.815,17	922.935.347.401,86
	Dikurangi realisasi :			
2.	Belanja Daerah	887.677.794.369,59	976.805.107.702,01	927.184.736.282,33
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	500.000.000,00	1.660.000.000,00	3.194.722.600,00
A.	**Defisit Riil**	**(15.503.399.755,87)**	**(3.681.434.886,84)**	**(7.444.111.480,47)**
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:			
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	31.150.648.872,60	15.647.949.116,73	15.161.636.829,89
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	700.000	3.195.122.600	1.000.000
B.	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**31.151.348.873**	**18.843.071.717**	**15.162.636.830**
A-B	**Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan**	**15.647.949.117**	**15.161.636.830**	**7.718.525.349**

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majene

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui gambaran komposisi penutup defisit riil seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.16
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Majene

No	Uraian	Proporsi dari total Defisit Riil		
		Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)
	Defisit Riil	**(15.503.399.755,87)**	**(3.681.434.886,84)**	**(7.444.111.480,47)**
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100	100	100
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0

Dari tabel di atas terlihat bahwa defisit rill pada tahun 2018 sampai dengan 2020 dapat ditutupi oleh realisasi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, bahkan masih terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Perhitungan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam lima tahun yang akan datang tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang selama ini menjadi dasar dalam penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah, antara lain :

- Kondisi dan perkembangan ekonomi makro baik secara nasional maupun di Kabupaten Majene sendiri;
- Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM;
- Potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah;
- Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk peningkatan PAD;
- Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun-tahun sebelumnya;
- Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja gaji dan tunjangan pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- Proporsi anggaran belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar lebih diutamakan
- Mengedepankan efesiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis, yang berpihak kepada belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Majene
- Penerimaan SiLPA pada pembiayaan daerah diproyeksikan nol setiap tahun karena SiLPA baru dapat diasumsikan pada penyusunan perubahan APBD

Selain asumsi-asumsi tersebut di atas, proyeksi anggaran pendapatan dan belanja dihitung dengan memperhatikan persentase rata-rata pertumbuhan realisasi kurun waktu tahun 2016 – 2020

dan rencana tahun 2021 sebagai data tahun dasar dan juga menggunakan regresi linear pada beberapa item pendapatan dan belanja daerah.

Tabel berikut adalah target APBD Tahun 2021 yang telah ditetapkan dan hasil proyeksi untuk tahun 2022 – 2026 :

Tabel 3.17
Target Tahun 2021 dan Proyeksi Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 s/d Tahun 2026
Kabupaten Majene

Dalam Juta Rupiah

Uraian	Target Tahun 2021 (Rp.)	Proyeksi					Rata-Rata Pertum-buhan (%)
		Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2026 (Rp.)	
PENDAPATAN DAERAH							
Pendapatan Asli Daerah	**80.884,59**	**90.965,97**	**126.513,44**	**143.162,49**	**163.799,45**	**179.280,83**	**19,03**
Pajak daerah	12.753,44	15.184,76	15.662,54	16.330,61	18.016,63	19.512,98	6,51
Retribusi daerah	9.570,50	10.467,52	14.007,52	14.531,49	14.905,46	15.719,43	11,40
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.969,20	2.969,20	31.589,68	43.389,52	56.309,32	64.823,22	261,54
Lain-lain PAD yang sah	55.591,45	62.344,49	65.253,71	68.910,87	74.568,03	79.225,20	6,18
Pendapatan Transfer	**777.821,11**	**766.173,67**	**887.454,60**	**923.488,12**	**958.810,37**	**987.936,95**	**6,69**
Transfer Pemerintah Pusat	**756.261,11**	**746.163,67**	**855.303,87**	**889.791,98**	**923.568,83**	**951.150,01**	**6,36**
Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	10.396,77	8.831,91	12.476,12	13.515,80	14.555,47	15.075,31	15,21
Dana alokasi umum	486.320,12	486.476,38	543.407,75	562.427,03	578.266,55	592.723,22	5,13
Dana alokasi khusus	168.763,66	192.968,84	196.828,22	207.977,26	220.455,90	230.854,76	4,60
Dana Insentif Daerah	24.920,51	2.301,73	34.070,97	35.980,68	39.001,86	39.781,90	349,06
Dana Desa	65.860,06	55.584,82	68.520,81	69.891,22	71.289,05	72.714,83	7,32
Transfer Antar Daerah	**21.560,00**	**20.010,00**	**32.150,73**	**33.696,14**	**36.741,54**	**36.786,94**	**18,66**
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya ***)	20.010,00	20.010,00	24.650,73	26.196,14	28.241,54	29.286,94	10,24
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.550,00	0,00	7.500,00	7.500,00	8.500,00	7.500,00	0,52
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**55.277,72**	**3.000,00**	**50.283,86**	**54.994,17**	**61.231,54**	**69.038,24**	**402,40**
Hibah	25.473,00	3.000,00	19.479,14	23.189,45	28.986,82	36.233,52	154,59
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	29.804,72	0,00	30.804,72	31.804,72	32.244,72	32.804,72	2,12
Jumlah Pendapatan	**913.983,43**	**860.139,65**	**1.064.251,91**	**1.121.644,78**	**1.185.341,36**	**1.236.256,02**	**9,77**
BELANJA DAERAH							
Belanja Operasi	**694.504,34**	**679.607,05**	**781.187,07**	**812.541,32**	**853.790,32**	**882.138,07**	**6,84**
Belanja Pegawai	400.235,89	443.474,23	460.624,36	479.249,33	498.561,31	518.139,76	3,97

Uraian	Target Tahun 2021 (Rp.)	Proyeksi					Rata-Rata Pertum-buhan (%)
		Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2026 (Rp.)	
Belanja Barang dan Jasa	285.322,01	199.778,53	282.387,83	294.306,83	313.636,84	321.271,49	13,64
Belanja Hibah	8.887,64	36.297,89	37.604,89	38.356,98	40.891,26	41.885,83	3,66
Belanja Bantuan Sosial	58,80	56,40	570,00	628,17	700,91	841,00	238,10
Belanja Modal	**101.671,22**	**72.782,91**	**150.018,57**	**160.664,05**	**173.325,56**	**187.106,39**	**32,26**
Belanja Modal Tanah	3.815,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	37,50
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.952,04	12.955,74	27.014,82	27.537,76	28.233,90	29.153,91	29,06
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.356,69	22.741,44	33.034,87	36.544,27	42.515,91	48.329,79	21,48
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.036,77	31.795,33	79.356,77	80.921,30	86.872,35	93.833,20	41,73
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	510,72	290,40	612,11	660,72	703,41	789,48	34,35
Belanja Tidak Terduga	**3.350,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**9.350,00**	**10.700,00**	**59,50**
Belanja Tidak Terduga	3.350,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	9.350,00	10.700,00	59,50
Belanja Transfer	**117.813,40**	**107.259,68**	**124.384,80**	**134.449,41**	**141.885,48**	**149.321,56**	**8,71**
Belanja Bagi Hasil	2.566,27	2.144,04	2.147,34	2.273,06	2.398,79	2.524,51	4,20
Belanja Bantuan Keuangan	115.247,13	105.115,64	122.237,46	132.176,34	139.486,69	146.797,04	8,80
Jumlah Belanja	**917.338,95**	**861.649,65**	**1.058.261,91**	**1.114.654,78**	**1.178.351,36**	**1.229.266,02**	**9,55**
Total Surplus/(Defisit)	**(3.355,53)**	**(1.510,00)**	**5.990,00**	**6.990,00**	**6.990,00**	**6.990,00**	**(120,00)**
PEMBIAYAAN							
Penerimaan Pembiayaan	**7.728,53**	**5.010,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**(24,95)**
Penggunaan SILPA	7.718,53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**7.728,53**	**5.010,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	
Pengeluaran Pembiayaan	**4.373,00**	**3.500,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**22,02**
Penyertaan Modal Daerah	4.373,00	3.500,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	22,02
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**4.373,00**	**3.500,00**	**6.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	
Pembiayaan Netto	**3.355,53**	**1.510,00**	**-5.990,00**	**-6.990,00**	**-6.990,00**	**-6.990,00**	**(120,00)**

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majene, Data diolah

Tabel di atas menunjukkan target Tahun 2021 berdasarkan perubahan APBD TA. 2021, rancangan APBD Pokok TA. 2022 dan angka proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 – 2026 yang telah disesuaikan dengan struktur anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan Daerah di Kabupaten Majene diperkirakan tumbuh dengan rata-rata 9,77% per tahun, dimana pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 913,98 Milyar rupiah dan pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 1,24 Trilyun rupiah dengan asumsi bahwa pada tahun 2022 merupakan awal pemulihan dari dampak pandemic *Covid*-19 sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene akan kembali tumbuh positif yang tentunya akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan pendapatan.

1. Pendapatan Asli Daerah

   Pendapatan asli daerah diperkirakan tumbuh rata-rata 19,03% per tahun, dimana pada tahun 2021 ditargetkan dapat mencapai 80,88 Milyar rupiah, pada tahun 2022 diasumsikan sebesar 90,97 Milyar rupiah dan terus meningkat hingga pada tahun 2026 diperkirakan akan mencapai angka 179,28 Milyar rupiah.

   a. Pajak daerah, berdasarkan rata-rata pertumbuhan pajak daerah tahun 2016 – 2020 dan target tahun 2021 maka pajak daerah di Kabupaten Majene pada tahun 2022 – 2026 diprediksi meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,51%. Pertumbuhan pajak daerah yang meningkat ini didasari oleh perkiraan akan terjadinya kondisi kenormalan dari pandemi Covid-19 pada tahun 2022, dimana Perekonomian daerah akan kembali tumbuh sehingga sumber penerimaan pajak daerah, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan lain-lain dapat kembali memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

      Target Pajak daerah pada tahun 2021 adalah sebesar 12,75 Milyar rupiah, tahun 2022 diprediksi meningkat menjadi 15,18 Milyar rupiah dan pada tahun 2026 diperkirakan dapat mencapai 19,51 Milyar rupiah.

   b. Retribusi daerah, berdasarkan realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Majene tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun 2022 – 2026 rata-rata pertumbuhan retribusi daerah diperkirakan sebesar 11,40% per tahun.

Pada tahun 2021 target retribusi daerah adalah sebesar 9,57 Milyar rupiah, diprediksi naik pada tahun 2022 menjadi 10,47 Milyar rupiah dan pada tahun 2026 mencapai sebesar 15,72 Milyar rupiah.

c. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, diperkirakan tumbuh signifikan mulai tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan 261,54% per tahun, dengan asumsi bahwa mulai tahun 2023 terdapat sumber penerimaan bagi hasil dari pengelolaan blok migas Pulau Lerek-Lerekan, sehingga pada tahun 2026 diperkirakan dapat mencapai 64,82 Milyar rupiah.

d. Lain-lain PAD yang sah, diperkirakan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,18% per tahun yang dihitung berdasarkan realisasi pada tahun 2016 – 2020 dan target tahun 2021. Pendapatan BLUD dan pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP merupakan sumber penerimaan yang cukup dominan dari pendapatan ini dan diperkirakan akan terus meningkat sehingga pada tahun 2021 lain-lain PAD yang sah ditargetkan 55,59 Milyar rupiah, pada tahun 2022 diproyeksi sebesar 60,59 Milyar rupiah dan pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 79,22 Milyar rupiah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah diperkirakan akan tumbuh dengan rata-rata 6,69% per tahun, dimana pada tahun 2021 sebesar 777,82 Milyar rupiah, pada tahun 2022 diasumsikan turun menjadi sebesar 766,17 Milyar rupiah. Pada tahun-tahun berikutnya diasumsikan akan meningkat terus hingga pada tahun 2026 diperkirakan mencapai angka 987,94 Milyar rupiah.

a. Transfer Pemerintah Pusat

- Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak, pada tahun 2022 – 2026 diperkirakan akan tumbuh sebesar 15,21% per tahun, dimana pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 10,39 Milyar rupiah, pada tahun 2022 ditargetkan 8,83 Milyar rupiah dan pada tahun 2026 diperkirakan dapat mencapai angka 15,075 Milyar rupiah

- Dana Alokasi Umum (DAU), diestimasi berdasarkan pertumbuhan realisasi beberapa tahun belakangan, target DAU yang pada tahun 2021 sebesar 486,32 Milyar rupiah dan pada tahun 2022 hanya naik sekitar 0,03% menjadi 486,47 Milyar rupiah. Berdasarkan hal tersebut target DAU pada tahun 2023 adalah sebesar 543,41 dan terus meningkat hingga pada tahun 2026 penerimaan DAU dari pusat ditargetkan sebesar 592,72 Milyar rupiah.
- Dana Alokasi Khusus (DAK), pada tahun 2022 – 2026 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 4,60% per tahun meski pada tahun 2016 – 2021 rata-rata pertumbuhan sebesar 12,04% namun pada tahun 2021 DAK yang diterima Kabupaten Majene berkurang dari 212,71 Milyar rupiah pada tahun 2020 menjadi hanya sebesar 168,76 Milyar rupiah. Berdasarkan hal tersebut penerimaan DAK pada tahun 2022 ditargetkan 192,97 Milyar rupiah dan diasumsikan meningkat terus hingga pada tahun 2026 diperkirakan 230,85 Milyar rupiah.
- Dana Insentif Daerah (DID), pada tahun 2021 terdapat realisasi DID sebesar 24,92 Milyar rupiah, namun pada tahun 2022 target DID menurun menjadi 2,3 Milyar rupiah. Namun untuk tahun 2023-2026 DID Kabupaten Majene diproyeksi akan meningkat dibandingkan kembali pada tahun 2023 sebesar 34,07 milyar rupiah terus meningkat hingga pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 39,78 Milyar
- Dana Desa, berdasarkan rancangan APBD pada tahun 2022 alokasi dana desa turun sekitar 15,60% dibandingkan tahun 2021. Namun pada tahun 2023 diperkirakan akan meningkat kembali menjadi 68,52 Milyar rupiah dan pada tahun 2026 diperkirakan dapat mencapai 72,71 Milyar rupiah.

b. Transfer Antar Daerah

- Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diasumsi melalui perhitungan regresi linear. Berdasarkan data realisasi tahun-tahun sebelumnya penerimaan pendapatan ini terus meningkat sehingga pada tahun 2021 dalam Perubahan APBD Kabupaten Majene ditargetkan sebesar 20,01 Milyar rupiah, untuk tahun

2022 diproyeksi sama dengan tahun 2021 dan pada tahun 2026 diperkirakan sebesar 29,29 Milyar rupiah dengan rata-rata pertumbuhan 10,24% per tahun.

- Bantuan Keuangan Dari Provinsi, dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 Kabupaten Majene mendapatkan bantuan keuangan dari provinsi dengan dengan pertumbuhan yang fluktuatif. Angka tertinggi Pada tahun 2018 yaitu sebesar 7 Milyar rupiah. berdasarkan hal tersebut diharapkan pada tahun 2023-2026 Kabupaten Majene kembali akan menerima bantuan keuangan sebesar 7,5 milyar rupiah per tahun

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

   Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan rancangan APBD Kab. Majene TA. 2022 mengalami penurunan target yaitu dari angka 55,28 milyar rupiah pada tahun 2021 menjadi 3 milyar rupiah. Untuk Tahun 2023 diharapkan akan kembali meningkat dengan asumsi sebesar 49,28 Milyar rupiah terus meningkat hingga pada tahun 2026 diperkirakan mencapai angka 69,04 Milyar rupiah.

Belanja Daerah di Kabupaten Majene pada tahun 2022 – 2026 diperkirakan akan tumbuh 9,55% per tahun, dimana pada tahun 2021 belanja daerah berdasarkan perubahan APBD ditargetkan sebesar 917,34 Milyar rupiah dan tahun 2022 belanja daerah diproyeksikan menurun menjadi 861,65 Milyar rupiah. Untuk tahun 2023 belanja daerah diproyeksikan kembali meningkat dengan target sebesar 1,05 Trilyun rupiah meningkat terus hingga pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 1,23 Trilyun rupiah.

1. Belanja Operasi

   Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan perubahan APBD pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 694,50 Milyar rupiah. Pada tahun 2022 belanja operasi ditargetkan turun menjadi 679,61 Milyar rupiah yang diakibatkan adanya penurunan dana transfer dari pusat. Sedangkan pada tahun 2023-2026 diasumsi akan kembali meningkat sekitar 6,84% per tahun, dimana pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 781,19 Milyar rupiah hingga pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp. 882,14 Milyar rupiah.

a. Belanja Pegawai, pada tahun 2022 – 2026 diperkirakan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata per tahun sekitar 3,97%, dimana pada tahun 2021 belanja pegawai dalam Perubahan APBD Kab. Majene ditargetkan sebesar 400,24 Milyar rupiah, tahun 2022 diproyeksi meningkat menjadi sebesar 443,47 Milyar rupiah dan pada tahun 2026 diproyeksi akan mencapai 518,14 Milyar rupiah. Kenaikan ini berdasarkan pada asumsi acress gaji dan tunjangan sebesar 2,5% dan tambahan tunjangan penghasilan bagi PNS yang diasumsi akan meningkat pada tahun 2022.
b. Belanja Barang dan Jasa, dengan menggunakan perhitungan regresi linear berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, maka belanja barang dan jasa pada tahun 2022 – 2026 diproyeksi tumbuh dengan rata-rata 13,64% per tahun. Dalam APBD Kab. Majene Tahun 2021 ditargetkan sebesar 285,32 Milyar rupiah, pada tahun 2022 diasumsikan turun menjadi 199,78 Milyar rupiah dan pada tahun 2023 kembali diasumsikan meningkat dengan target sebesar 282,39 Milyar rupiah dan pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 321,27 Milyar rupiah.
c. Belanja Hibah, meskipun pada tahun 2021 dalam Perubahan APBD Kab. Majene ditargetkan sebesar Rp. 8,89 Milyar rupiah namun pada tahun 2022 diperkirakan meningkat dengan target sebesar 36,29 milyar terus meningkat hingga pada tahun 2026 diasumsikan dapat mencapai 41,88 Milyar rupiah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,66% per tahun.
d. Belanja Bantuan Sosial, pada tahun 2022 – 2026 juga diproyeksi meningkat setiap tahun, dimana pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 58,8 Juta rupiah namun menurun pada tahun 2022 menjadi 56,40 Juta rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya ditargetkan terus meningkat hingga pada tahun 2026 belanja bantuan sosial diasumsikan sebesar 841 Juta rupiah

2. Belanja Modal

Berdasarkan target belanja pada tahun 2021 yang termuat dalam Perubahan APBD Kabupaten Majene target belanja modal adalah sebesar 101,67 Milyar rupiah, dan target tahun 2022 dalam rancangan APBD Kab. Majene diasumsikan turun menjadi 72,78 Milyar rupiah. untuk tahun 2023-2026 diasumsikan akan kembali meningkat hingga pada tahun 2026 ditargetkan akan mencapai 187,11 Milyar rupiah. Peningkatan ini dihitung berdasarkan nilai realisasi belanja modal pada tahun 2016 – 2021 yang terealisasi di angka 130,79 Milyar rupiah – 198,62 Milyar rupiah. Asumsi belanja modal menurun pada tahun 2021 karena turunnya target DAK fisik yang diterima, namun pada tahun 2022 penerimaan DAK ini diprediksi dapat kembali meningkat.

a. Belanja Modal Tanah, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 3,8 Milyar rupiah, dan pada tahun 2022 – 2026 diasumsikan meningkat dengan target setiap tahun sebesar 10 Milyar rupiah sampai dengan 15 Milyar rupiah
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, pada tahun 2021 sebesar 30,95 Milyar rupiah, diasumsikan akan turun pada tahun 2022 menjadi 12,96 Milyar rupiah. Untuk tahun 2023-2026 diproyeksikan akan kembali meningkat hingga target tahun 2026 mencapai 29,15 Milyar rupiah.
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, pada tahun 2021 sebesar 19,36 Milyar rupiah, diasumsikan akan meningkat pada tahun 2022 menjadi 22,74 Milyar rupiah dan pada tahun-tahun berikutnya diproyeksikan meningkat sekitar 21,48% per tahun sehingga target tahun 2026 mencapai 48,33 Milyar rupiah.
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, tahun 2021 ditargetkan sebesar 47,04 Milyar rupiah, menurun pada tahun 2022 menjadi 31,79 Milyar rupiah. Pada tahun 2023 ditargetkan akan meningkat kembali hingga pada tahun 2026 target belanja modal jalan, jaringan dan irigasi mencapai 93,83 Milyar rupiah

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dari target belanja tahun 2021 sebesar 510,72 Juta rupiah dan target tahun 2022 yang menurun dengan target sebesar 290,4 Juta rupiah, maka di tahun 2023 diproyeksi akan kembali meningkat hingga pada tahun 2026 diasumsi sebesar 789,48 Juta rupiah.

3. Belanja Tidak Terduga

   Berdasarkan target belanja tidak terduga pada tahun-tahun sebelumnya maka pada tahun 2022 diasumsikan 2 Milyar rupiah dan tahun 2023 – 2026 diasumsikan meningkat setiap tahun dengan asumsi pada tahun 2026 mencapai angka 10,7 Milyar rupiah

4. Belanja Transfer

   Belanja transfer yang merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa pada tahun 2022 – 2026 diasumsikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,71%. Pada tahun 2022 diasumsikan sebesar 107,01 Milyar rupiah meningkat terus hingga pada tahun 2026 diasumsikan dapat mencapai angka 149,32 Milyar rupiah.

   a. Belanja Bagi Hasil, pada tahun Perubahan APBD TA. 2021 ditargetkan sebesar Rp. 2,57 Milyar rupiah, dan berdasarkan perhitungan regresi linear maka pada tahun 2022 belanja bagi hasil diasumsikan sebesar 2,14 Milyar rupiah. Pada tahun-tahun berikutnya diasumsikan terus meningkat hingga pada tahun 2026 dapat mencapai 2,52 Milyar rupiah

   b. Belanja Bantuan Keuangan, diperkirakan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,85% pertahun selama periode tahun 2022-2026. Pada tahun 2021 belanja bantuan keuangan mencapai 115,25 Milyar rupiah dan pada tahun 2026 ditargetkan dapat mencapai 146,79 Milyar rupiah.

Untuk target pembiayaan daerah di Kabupaten Majene tahun 2022 – 2026 diasumsikan nilainya tidak jauh bergeser dari target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada APBD pokok tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Perubahan APBD TA. 2021Angka SiLPA tahun 2023-2026 pada penerimaan pembiayaan diasumsikan nol, sedangkan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah diasumsikan sama dengan target tahun 2021 yaitu sebesar 10 Juta rupiah. Pada pengeluaran pembiayaan terdapat penyertaan modal daerah yang pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 4,37 Milyar rupiah, tahun 2022 sebesar 3,5 Milyar rupiah meningkat terus hingga pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 7 Milyar rupiah.

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun kedepan. Dari total pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang dikurangi dengan total belanja Wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas.

Tabel 3. 18
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Majene

Dalam Juta Rupiah

No.	Uraian	Target Tahun 2021 (Rp.) (Data Tahun Dasar)	Proyeksi				
			Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2026 (Rp.)
1	Pendapatan	913.983,43	860.139,65	1.064.251,91	1.121.644,78	1.185.341,36	1.236.256,02
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	7.718,53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total penerimaan	**921.711,95**	**865.149,65**	**1.064.261,91**	**1.121.654,78**	**1.185.351,36**	**1.236.266,02**
	Dikurangi:						

No.	Uraian	Target Tahun 2021 (Rp.) (Data Tahun Dasar)	Proyeksi				
			Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2026 (Rp.)
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	295.167,45	327.650,24	335.699,59	344.074,57	352.654,45	361.444,31
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**626.544,50**	**537.499,41**	**728.562,32**	**777.580,20**	**832.696,91**	**874.821,71**

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majene, Data diolah

Hasil dari perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut di atas kemudian menjadi dasar untuk menentukan kebijakan alokasi anggaran pelaksanaan program - program yang akan direncanakan dalam 5 tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam RPJMD. Kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok prioritas, yaitu :

- Prioritas I, Merupakan program prioritas pembangunan daerah pemenuhan mandat dari pemerintah pusat (mandatory) seperti pemenuhan anggaran sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemenuhan SPM dan sektor lainnya yang ditentukan
- Prioritas II, Merupakan Program unggulan untuk pencapaian visi misi kepala daerah dan program prioritas perangkat daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan, pelayanan terhadap masyarakat serta penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.
- Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja lainnya seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, serta belanja tidak terduga.

Tabel 3. 19
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Majene

Dalam Juta Rupiah

No	Uraian	Target Tahun 2021 (Rp.)	Proyeksi				
			Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2026 (Rp.)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	626.544,50	537.499,41	728.562,32	777.580,20	832.696,91	874.821,71
2	Prioritas I (40%)	250.617,80	214.999,76	291.424,93	311.032,08	333.078,76	349.928,68
3	Prioritas II (35%)	219.290,57	188.124,79	254.996,81	272.153,07	291.443,92	306.187,60
4	Prioritas III (25%)	156.636,12	134.374,85	182.140,58	194.395,05	208.174,23	218.705,43

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majene, Data diolah





BAB IV



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu strategis Daerah merupakan bagian penting dan sangat menetukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Daerah baik jangka panjang, menengah dan pendek. Identifikasi permasalahan pembangunan Daerah yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan efektifitas kinerja pembangunan serta dapat menentukan arah kebijakan dan Langkah strategis yang dapat di ambil oleh pimpinan Daerah. Sedangkan Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah suatu daerah. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan Isu-Isu Strategis adalah telahaan terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih, hal tersebut dilakukan agar rumusan Isu strategis yang dihasilkan dapat selaras dengan cita-cita dan harapan Masyarakat kepada Kepala Daerah terpilih. Selain dari Isu strategis internal ada juga dari eksternal seperti Isu strategis regional, Nasional maupun internasional yang merupakan unsur penting dan menjadi perhatian dalam merumuskan suatu Isu Strategis pembangunan jangka menengah Daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Majene

Dalam Dokumen RPJMD Permasalahan pembangunan Kabupaten Majene dikategorikan menjadi 3 bagian, yakni masalah pokok, masalah dan akar masalah yang mana ke 3 bagian tersebut memiliki hubungan kausalitas ke bawah. Adapun penjabaran permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Majene adalah sebagai berikut :

a. Kualitas Sumber Daya Manusia masih kurang berdaya saing pada tingkat regional maupun nasional

Kualitas SDM yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per tahun 2020 berada pada angka 67,18 poin. Angka ini masih berada dibawah nilai IPM Nasional yang berada di angka 72,95 poin, Nilai IPM yang masih rendah ini menunjukkan bahwa aspek pelayanan umum seperti pelayanan Pendidikan, kesehatan serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene masih belum optimal.

Belum optimalnya aspek pelayanan umum di sektor Pendidikan salah satunya dipicu dari penurunan target angka harapan lama sekolah selama dua tahun terakhir. Angka harapan lama sekolah pada tahun 2019 terealisasi sebesar 93,09% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 91,04% sehingga selisih penurunan angka harapan lama sekolah selama dua tahun terakhir sebesar 2,5%.

Penurunan angka harapan lama sekolah selama dua tahun terakhir 2019 - 2020 terjadi dikarenakan angka melanjutkan sekolah tingkat SD-SMP mengalami penurunan sebesar 17% sedangkan tingkat SMA/SMK stagnan dengan persentase 133%.

Pada aspek pelayanan umum sektor kesehatan terutama pada angka usia harapan hidup selama dua tahun terakhir juga menagalami penurunan persentase dari target angka yang telah ditentukan namun angka penurunannya tergolong kecil yaitu hanya sebesar 0,04%, pada tahun 2019 angka usia harapan hidup terealisasi sebesar 99,56% dan pada tahun 2020 sebesar 99,52%.

Penurunan angka usia harapan hidup salah satunya dipicu dari tidak terpenuhinya target rasio dokter per satuan penduduk di tahun 2019 dan ditahun 2020, selama dua tahun terakhir rasio dokter per satuan penduduk juga mengalami dengan persentase penurunan sebesar 6%, dimana pada tahun 2019 sebesar 55% dan 49% di tahun 2020.

Selain dari permasalahan pada indikator komposit IPM sebagaimana dijabarkan di atas, pengarusutamaan gender belum berjalan optimal hingga potensi SDM di Kabupaten Majene belum dapat diberdayagunakan secara maksimal dan Mulai tergusurnya kebudayaan dan kearifan lokal di masyarakat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang maju dan berbudaya.

b. Angka kemiskinan masih terbilang tinggi yang menggambarkan bahwa masih banyak warga Majene yang hidup di bawah standar nasional

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene pada tahun 2020 berada pada angka 13,72%. Angka tersebut masih kurang dari target nasional untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit (<10%). Sehingga penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Majene menjadi hal yang sangat mendasar untuk segera diatasi.

Masih tinggunya angka kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa hal. Dari segi perekonomian daerah secara umum, perekonomian masih didominasi oleh sektor primer, sehingga mobilitas sosial juga masih cenderung lambat hingga banyak masyarakat yang sulit lepas dari kemiskinan. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh Kabupaten Majene baik dari segi eksploitasi maupun peningkatan nilai tambah juga turut berkontribusi terhadap rendahnya pendapatan masyarakat. Selain itu, minimnya investasi di Kabupaten Majene menyebabkan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia.

Masih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak terbantu baik secara sosial kemasyarakatan maupun oleh bantuan pemerintah turut berkontribusi pada kemiskinan generasional. Akhirnya, belum maksimalnya pembangunan di perdesaan sementara mayoritas masyarakat miskin di Kabupaten Majene berada di perdesaan mengakibatkan lambatnya penanganan kemiskinan di Kab. Majene.

c. Belum maksimalnya pelayanan kepada masyarakat akibat tata kelola dan birokrasi pemerintahan yang belum optimal

Pelayanan publik di Kabupaten Majene yang masih sering dikeluhkan oleh masyarakat tergambar pada survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada 6 instansi publik yang dilaksanakan oleh Balitbangda Kabupaten Majene pada tahun 2019 hanya menghasilkan capaian 72,21. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlayanan publik di Kabupaten Majene masih memiliki ruang yang luas untuk ditingkatkan dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, capaian PemKabupaten Majene pada penilaian tata kelola pemerintahan oleh pemerintah pusat juga belum menunjukkan hasil yang maksimal, karena meski Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dapat dipertahankan pada opini WTP selama 5 tahun berturut-turut, namun penilaian lain seperti SAKIP (predikat B), LPPD (nilai 3,43), Reformasi Birokrasi (predikat C) dan lain sebagainya masih perlu kerja keras untuk ditingkatkan capaiannya dengan harapan dengan hasil penilaian yang baik, maka pemerintahan di Kabupaten Majene dapat lebih akuntabel dan terkelola dengan baik dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pelayanan kepada masyarakat pada berbagai instansi dan fasilitas pelayanan publik masih kurang efektif dan efisien yang berakibat pada menurunnya kualitas pelayanan. Selain itu, sinkronisasi akuntabilitas keuangan dan perencanaan berikut kinerja masih belum memadai sehingga masih pembangunan daerah yang terencana dengan baik belum bisa dilaksanakan secara optimal. Reformasi Birokasi yang belum berjalan secara optimal juga turut berkontribusi pada masih kurangnya kualitas pelayanan publik. Hal tersebut sulit untuk segera ditangani karena kompetensi dan kesejahteraan aparat yang masih belum optimal berimbas pada kurangnya produktivitas dan motivasi kerja pegawai. Akhirnya, minimnya inovasi daerah yang dapat dijalankan secara berkesinambungan dan berdaya ungkit tinggi di masyarakat memperlambat peningkatan kualitas pelayanan publik.

d. Pembangunan infrastruktur masih cenderung lambat hingga menyulitkan akses ke kawasan-kawasan strategis dan potensial

Masalah infrastruktur masih menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi kabupaten Majene dan berpeluang untuk menciptakan kantong kantong kemiskinan yang baru ketika itu tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah, sehingga perlu ditingkatkan secara optimal baik sisi kuantitas maupun kualitasnya, masalah belum memadainya infrasturktur akan sangat terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber- sumber ekonomi, dan kelancaran investasi di daerah.. Pembangunan infrastruktur (khususnya jalan dan jembatan) di daerah-daerah terisolir/terpencil perlu dilaksanakan guna membuka akses transportasi dan arus ekonomi antar desa.

Persentase jalan dalam kondisi baik pada angka 44,31% menunjukkan bahwa aksesibilitas transportasi dalam daerah utamanya dari dan ke kawasan strategis masih tidak memadai. Hal itu tentunya berpengaruh pada kegiatan perekonomian masyarakat. Sementara untuk infrastruktur di kawasan permukiman dengan rumah tinggal bersanitasi sebesar 93,79% dan rumah tangga dengan akses air bersih sebesar 88,92% menggambarkan kondisi infrastruktur perumahan yang sudah cukup memadai untuk kehidupan sehari-hari masyarakat meski masih ada beberapa kawasan yang kesulitan dalam mendapatkan akses air bersih.

Kondisi sebagaimana dijabarkan sebelumnya umumnya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur tidak optimal karena masih terpusat pada beberapa titik sementara banyak kawasan potensial dan strategis lainnya dengan tingkat aksesibilitas yang rendah. Selain itu, belum efektifnya sarana prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebabkan arus logistik dalam daerah seringkali terhambat. Akhirnya masih belum optimalnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup baik dari segi kebersihan kota maupun konservasi SDA mengurangi tingkat kenyamanan hidup masyarakat.

Tabel 4.1

Permasalahan Daerah Berdasarkan Capaian Indikator RPJMD dan Aspek Pelayanan Umum

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
A	**Indikator RPJMD Periode 2016 – 2021**		
1	Pertumbuhan PDRB	Pertumbuhan PDRB Kab. Majene (-1,38%) jauh di bawah target (6,69%)	- Pandemi COVID-19 menghambat jalannya perekonomian - Postur PDRB masih didominasi oleh sektor primer yang meski lebih tahan terhadap disrupsi COVID-19 namun tidak menghasilkan pertumbuhan perekonomian yang sehat
2	Laju inflasi	Inflasi Kab. Majene (2,88) tidak mencapai target (2,68)	- Transaksi perdagangan di daerah masih didominasi oleh komoditi impor (luar daerah dan luar negeri)
3	PDRB per kapita,	Capaian Kab. Majene (Rp. 28,3 Juta) berada jauh di bawah capaian nasional (Rp. 56,9 Juta)	- Tingkat pertumbuhan penduduk masih terlalu tinggi relatif terhadap pertumbuhan perekonomian - Nilai produksi sektor sekunder masih rendah
4	Persentese Penduduk diatas garis kemiskinan	Capaian Kab. Majene (13,73%) masih di bawah target (12,87%)	- basis data kemiskinan belum Optimal, sehingga penanganan kemiskinan belum efektif atau tepat sasaran

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
			- Minimnya akses dan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu mengangkat standar hidup masyarakat
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM),	Capaian Kab. Majene (66,91) melampaui target (66,25)	- Rendahnya indikator komposit sektor kesehatan menghambat peningkatan IPM yang lebih tinggi
6	Angka rata-rata lama sekolah	Capaian Kab. Majene (8,56) hampir mencapai target (8,60)	- Masih tingginya Angka Putus Sekolah (APK) utamanya pasca pendidikan dasar
7	Angka harapan lama sekolah	Capaian Kab. Majene (13,61) tidak mencapai target (14,61)	- Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan utamanya di daerah perdesaan
8	Angka usia harapan hidup	Capaian Kab. Majene (61,56) hampir mencapai target (61,57)	- Masih tingginya AKI dan AKB akibat belum optimalnya pelayanan KIA - Masih timpangnya kualitas pelayanan kesehatan antar wilayah dalam daerah
9	Persentase balita gizi buruk	Capaian Kab. Majene (23,4) berada di bawah capaian nasional (17,7) dan berkontribusi terhadap tingginya prevalensi stunting di Kab. Majene (34,26)	- Sistem surveilanz gizi yang belum berjalan secara optimal - Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan gizi buruk pada balita

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Capaian Kab. Majene (70,40) masih berada di bawah capaian nasional (72,98)	- Masih rendahnya daya saing dan kompetensi tenaga kerja
11	Tingkat pengangguran terbuka	Capaian Kab. Majene (3,51) melampaui target (3,53)	- Meski sudah melampaui target, namun tenaga kerja masih didominasi di sektor musiman dan berkompensasi rendah
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Capaian Kab. Majene (75) tidak mencapai target (85)	- Kualitas pelayanan publik belum maksimal utamanya waktu tunggu pelayanan - Belum semua pelayanan publik memiliki SOP yang jelas dan diimplementasikan dengan baik
13	Opini BPK	Kab. Majene telah meraih opini WTP sejak tahun 2015	---
14	Predikat SAKIP Pemda Kab. Majene	Kab. Majene telah meningkatkan capaiannya dari predikat C pada 2015 hingga menjadi B sejak 2019	- Kompetensi penyusun dokumen SAKIP yang masih timpang - Minimnya implementasi rekomendasi SAKIP dalam tata kelola pemerintahan
15	Nilai LPPD Pemda Kab. Majene	Capaian Kab. Majene (3,51) tidak mencapai target (3,53)	- Capaian tiap indikator LPPD belum maksimal - Kualitas dokumen pelaporan belum maksimal

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
16	Konstribusi sektor industri terhadap PDRB	Capaian Kab. Majene (5,18) tidak mencapai target (5,5)	- Sentra industri yang telah dibangun tidak beroperasi secara optimal - Masih kurangnya kompetensi pelaku usaha dan tenaga kerja di sektor industri
17	Rasio Ruang Terbuka Hijau	Capaian Kab. Majene (38%) telah melampaui target (27%)	---
18	Indeks Kualitas Lingkungan	Capaian Kab. Majene (79,89) telah melampaui target	----
19	Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan sawah	Capaian Kab. Majene (72,25) telah melampaui target (68,57)	---
20	Persentase jalan produksi perikanan dalam kondisi baik	Capaian Kab. Majene (67,91) tidak mencapai target (76,67)	- Pembangunan di sektor perikanan masih terfokus pada pembukaan lahan
21	Persentase usulan musrenbang yang terakomodir dalam RKPD	Capaian Kab. Majene (52,82) melampaui target (44,08)	---
22	Persentase kesesuaian program RPJMD dengan RKPD	Capaian Kab. Majene (89,27) melampaui target (86,98)	---

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
B	**Aspek Pelayanan Umum**		
1	**Pendidikan**		
-	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Capaian Kab. Majene (59) tidak mencapai target (64)	- Mayoritas PAUD dikelola oleh swasta sehingga dukungan yang bisa diberikan oleh Pemkab terbatas - Pemahaman akan pentingnya pendidikan usia dini masih kurang
-	Angka partisipasi kasar SD	Capaian Kab. Majene (103,910) tidak mencapai target (115,42)	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesetaraan Paket A bagi yang membutuhkan masih kurang
-	Angka partisipasi kasar SMP	Capaian Kab. Majene (84,250) tidak mencapai target (93,42)	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesetaraan Paket B bagi yang membutuhkan masih kurang
-	Angka partisipasi murni SD	Capaian Kab. Majene (96,86) hampir memenuhi target (98,21)	- Kesulitan akses terhadap fasilitas pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil
-	Angka partisipasi murni SMP	Capaian Kab. Majene (71,81) tidak mencapai target (81,6)	- Kurangnya kesadaran masyarakat utamanya di daerah perdesaan akan pentingnya penuntasan wajib belajar 9 tahun

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Angka Partisipasi Sekolah (SD)	Capaian Kab. Majene (96,860) tidak mencapai target (101,03)	- Kesulitan akses terhadap fasilitas pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil
-	Angka Partisipasi Sekolah (SMP)	Capaian Kab. Majene (92,720) tidak mencapai target (97,54)	- Kurangnya kesadaran masyarakat utamanya di daerah perdesaan akan pentingnya penuntasan wajib belajar 9 tahun
-	Angka Putus Sekolah (SD)	Capaian Kab. Majene (0,33) tidak mencapai target (0,14)	- Belum optimalnya pendataan dan analisis penyebab anak putus sekolah - Bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat miskin masih kurang
-	Sngks Putus Sekolah (SMP)	Capaian Kab. Majene (0,22) melampui target (0,35)	- Belum optimalnya pendataan dan analisis penyebab anak putus sekolah - Bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat miskin masih kurang
-	Angka Kelulusan SD	Capaian Kab. Majene (100) memenuhi target (100)	---
-	Angka Kelulusan SMP	Capaian Kab. Majene (100) melampui target (99,32)	---

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Angka Melanjutkan (AM) SD & SMP	Capaian Kab. Majene (72,650) tidak mencapai target (100)	- Masih tinngginya angka putus sekolah, utamanya dari SD ke SMP
-	Fasilitas Pendidikan SD	Capaian Kab. Majene (71,23) melampui target (70,33)	---
-	Fasilitas Pendidikan SMP	Capaian Kab. Majene (89,28) melampui target (88,11)	---
-	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Data capaian belum tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Capaian Kab. Majene (0,08) melampui target (0,04)	
-	Persentase sekolah berakreditasi minimal “B”	Capaian Kab. Majene (59,90%) tidak mencapai target (70%)	- Kurangnya kapasitas manajerial pengelola sekolah
-	Persentase pemenuhan kebutuhan guru	Capaian Kab. Majene (78,64%) tidak mencapai target (88%)	- Minimnya guru non-PNS yang terangkat menjadi PNS Minimnya tenaga pendidik yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil
2	**Kesehatan**		
-	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Capaian Kab. Majene (12,23) tidak mencapai target (8,29)	- Masih tingginya persalinan di luar faskes
-	Angka kelangsungan hidup bayi	Capaian Kab. Majene (0,87) tidak mencapai target (0,966)	- Kinerja posyandu belum maksimal untuk ibu baru melahirkan dan bayinya

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Capaian Kab. Majene (0,54) melampui target (15,8)	- Belum maksimalnya pelayanan Kesehatan Ibu & Anak (KIA)
-	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Capaian Kab. Majene (163,10) tidak mencapai target (129,45)	- Belum maksimalnya pelayanan Kesehatan Ibu & Anak (KIA)
-	Rasio dokter per satuan penduduk	Capaian Kab. Majene (23,21) tidak mencapai target (47,83)	- Belum meratanya sebaran dokter utamanya di daerah terpencil - Masih kurangnya tenaga dokter spesialis
-	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Capaian Kab. Majene (361,27) melampui target (275,41)	---
-	Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani	Capaian Kab. Majene (94,70) melampui target (88,0)	---
-	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Data capaian tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Capaian Kab. Majene (51,20) tidak mencapai target (79,3)	- Belum optimalnya kinerja posyandu dalam surveilans imunisasi - Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya imunisasi
-	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Capaian Kab. Majene (100) memenuhi target (100)	---

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Capaian Kab. Majene (100) memenuhi target (100)	---
-	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Capaian Kab. Majene (57) tidak mencapai target (100)	- Kebersihan lingkungan untuk pengentasan nyamuk DBD masih kurang - Pemahaman masyarakat terkait pencegahan DBD masih kurang
-	Angka kejadian malaria	Capaian Kab. Majene (10,4) melampui target (19,30)	- Kebersihan lingkungan untuk pengentasan nyamuk malaria masih kurang - Pemahaman masyarakat terkait pencegahan DBD masih kurang
-	Tingkat kematian akibat malaria	Capaian Kab. Majene (0) memenuhi target (0)	
-	Cakupan kunjungan bayi	Capaian Kab. Majene (99,50) hampir memenuhi target (100)	- Keterbatasan waktu pelayanan mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan
-	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Capaian Kab. Majene (70,50) tidak mencapai target (76,8)	- Masih kurangnya pemahaman ibu hamil akan pentingnya kunjungan K4 - Waktu tunggu pelayanan berkontribusi terhadap keenganan ibu hamil untuk datang ke faskes

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Capaian Kab. Majene (73,95) tidak mencapai target (87)	- Waktu tunggu pelayanan berkontribusi terhadap keenganan ibu balita untuk datang ke faskes - Keterbatasan waktu pelayanan mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan
-	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	Capaian Kab. Majene (100) melampui target (86,40)	---
-	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat	Capaian Kab. Majene (100) memenuhi target (100)	---
-	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Capaian Kab. Majene (100) memenuhi target (100)	---
-	Cakupan Desa /Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemologi < 24 Jam	Capaian Kab. Majene (100) memenuhi target (100)	---
-	Cakupan Neotanus dengan Komplikasi yang ditangani	Data Capaian Tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Cakupan Pelayanan Nifas	Data Capaian Tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Cakupan Fasilitas Kesehatan :		
	· Puskesmas Pembantu	Capaian Kab. Majene (0,63) tidak mencapai target (41,5)	- Unit pustu yang dibangun masih tidak mencukupi kebutuhan masyarakat
	· Puskesmas	Capaian Kab. Majene (1,38) memenuhi target (1,38)	---
	· Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Capaian Kab. Majene (0,58) melampaui target (0,55)	---
	· Rasio Pos Yandu Per Satuan Balita	Capaian Kab. Majene (6,25) memenuhi target (6,25)	---
3	**Pekerjaan umum dan penataan ruang. meliputi:**		
-	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik,	Capaian Kab. Majene (44,31) tidak mencapai target (81,00)	- Rendahnya kinerja perbikan jaringan jalan - Kontur geografis wilayah Kab. Majene menyulitkan perbaikan jalan dalam tempo standar
-	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	Capaian Kab. Majene (93,79%) tidak mencapai target (100%)	- Masih rendahnya pemahaman PHBS di masyarakat

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
			- Masih rendahnya cakupan layanan sanitasi rumah tangga
-	Persentase drainase dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat	Capaian Kab. Majene (91,47%) tidak mencapai target (100)	- Dukungan pemerintah terhadap perbaikan drainase utamanya di area perumahan swasta masih kurang
-	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Capaian Kab. Majene (89,90%) melampui target (82,00%)	---
-	Persentase penduduk berakses air minum (Non perpipaan)	Capaian Kab. Majene (71,41%) tidak mencapai target (88,92%)	- Terbatasnya kapasitas sumber mata air di wilayah Kab. Majene
-	Persentase penduduk berakses air minum (perpipaan)	Capaian Kab. Majene (28,66%) tidak mencapai target (34,48%)	- Keterbatasan sumber daya di PDAM Kab. Majene mengurangi cakupan layanan yang dapat diberikan
4	**Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, meliputi:**		
-	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Data Capaian Tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Capaian Kab. Majene (93,79%) melampaui target (46,46%)	---

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Capaian Kab. Majene (93,79%) tidak mencapai target (100%)	- Masih rendahnya pemahaman PHBS di masyarakat - Masih rendahnya cakupan layanan sanitasi rumah tangga
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, meliputi:**		
-	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Data Capaian Tahun 2020 tidak tersedia	- Belum optimalnya perangkat daerah dalam menyajikan data teknis
-	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Keindahan)	Data Capaian Tahun 2020 tidak tersedia	- Belum optimalnya perangkat daerah dalam menyajikan data teknis
-	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota,	Data Capaian Tahun 2020 tidak tersedia	- Belum optimalnya perangkat daerah dalam menyajikan data teknis
-	tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Data Capaian Tahun 2020 tidak tersedia	- Belum optimalnya perangkat daerah dalam menyajikan data teknis

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Persentase Penegakan PERDA.	Data Capaian Tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Rasio Personil Satpol PP terhadap 10.000 Penduduk	Data Capaian Tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
6	Sosial, meliputi:		
-	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial,	Capaian Kab. Majene (0) tidak mencapai target (65)	- Sumber daya untuk bantuan sosial teralih untuk Pandemi COVID-19
-	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Data Capaian Tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
B.	**Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi:**		
1	**Tenaga kerja, meliputi:**		
-	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan,	Capaian Kab. Majene (0) tidak mencapai target (93,80)	- Ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia - Masih minimnya kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dalam hal penempatan tenaga kerja
-	Keselamatan dan perlindungan,	Capaian Kab. Majene (100) memenuhi target (100)	---
-	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Capaian Kab. Majene (70,40) masih berada di bawah capaian nasional (72,98)	- Masih rendahnya daya saing dan kompetensi tenaga kerja
-	Tingkat Pengangguran terbuka	Capaian Kab. Majene (3,51) melampaui target (3,53)	- Meski sudah melampaui target, namun tenaga kerja masih didominasi di sektor musiman dan berkompensasi rendah

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
2	**Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meliputi:**		
-	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Capaian Kab. Majene (25%) melampui target (22%)	---
-	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Capaian Kab. Majene (42,21%) tidak mencapai target (91,53%)	- Masih rendahnya partisipasi perempuan di dunia kerja - Keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia untuk perempuan
3	**Pangan, meliputi:**		
-	Ketersediaan pangan utama (ketersediaan pangan)	Capaian Kab. Majene (101,58%) melampui target (91,53%)	---
4	**Pertanahan, meliputi:**		
-	Persentase luas lahan bersertifikat	Capaian Kab. Majene (10,17%) tidak mencapai target (88%)	- Belum terintegrasinya penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam RTRWK menignkatkan ketidakpastian dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Penyelesaian kasus tanah Negara, dan	Capaian Kab. Majene (100%) memenuhi target (100%)	
5	**Lingkungan hidup, meliputi:**		
-	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Capaian Kab. Majene (80,70) tidak mencapai target (86,21)	- Sarana dan prasarana penanganan sampah belum memadai - Biaya operasional sarpras penanganan sampah belum optimal
-	Penyelesaian Izin Lokasi	Capaian Kab. Majene (100) memenuhi target (100)	---
-	Prosentase Pencemaran Status Mutu Air	Capaian Kab. Majene (50) memenuhi target (50)	---
-	Prosentase Pengawasan Pelaksanaan Amdal	Capaian Kab. Majene (100) memenuhi target (100)	---
-	Prosentase penegakan hukum	Capaian Kab. Majene (100) memenuhi target (100)	---
-	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	Data Capaian tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi:**		
-	rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk,	Capaian Kab. Majene (86,48) tidak mencapai target (97,26)	- Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
-	rasio bayi berkte lahir (kepemilikan akta kelahiran /1000 penduduk)	Capaian Kab. Majene (180) tidak mencapai target (220)	- Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi:**		
-	Persentase PKK aktif,	Capaian Kab. Majene (100) memenuhi target (100)	---
8	**Keluarga berencana dan keluarga sejahtera, meliputi:**		
-	Rasio Akseptor KB	Capaian Kab. Majene (72,14) melampui target (63,5)	---

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Persentase Posyandu aktif	Capaian Kab. Majene (37,73) tidak mencapai target (100)	- Biaya operasional untuk posyandu masih belum memadai
-	Cakupan peserta KB aktif	Capaian Kab. Majene (76,380) melampui target (16,034)	---
9	**Perhubungan, meliputi:**		
-	Persentase layanan angkutan darat	Capaian Kab. Majene (70,93%) melampui target (69,40%)	---
10	**Komunikasi dan informatika, meliputi:**	Data belum tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
11	**Koperasi, usaha kecil dan menengah, meliputi**		
-	Persentase koperasi aktif,	Capaian Kab. Majene (89,91) tidak mencapai target (100)	---
-	Persentase Usaha Mikro dan Kecil.	Capaian Kab. Majene (0) tidak mencapai target (100)	---

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
12	**Penanaman modal, meliputi:**		
-	Realisasi Penanamanan Modal Dalam Negeri	Data belum tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
13	**Kepemudaan dan olahraga, meliputi:**		
-	Persentase organisasi pemuda yang aktif, (Jumlah dalam RPJMD)	Capaian Kab. Majene (110) tidak mencapai target (120)	- Belum maksimalnya dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan pemuda
-	Jumlah Organisasi Pemuda	Capaian Kab. Majene (110) tidak mencapai target (120)	- Belum maksimalnya dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan pemuda
-	Jumlah Organisasi Olahraga	Capaian Kab. Majene (25) tidak mencapai target (32)	- Belum optimalnya koordinasi dengan KONI terkait pemberdayaan organisasi olahraga
-	Jumlah Organisasi Kepemudaan	Capaian Kab. Majene (7) tidak mencapai target (8)	- Belum maksimalnya dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan pemuda
-	Jumlah Kegiatan Olahraga	Capaian Kab. Majene (8) tidak mencapai target (10)	- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana keolahragaan
-	Rasio Gelanggang / Balai Remaja	Capaian Kab. Majene (0,0023) tidak mencapai target (0,0040)	- Belum maksimalnya dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan pemuda
-	Rasio Lapangan Olahraga	Capaian Kab. Majene (0,057) tidak mencapai target (0,077)	- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana keolahragaan

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
14	**Persandian, meliputi:**		
-	Rasio pelayanan persandian	Capaian Kab. Majene (100) memenuhi target (100)	---
15	**Kebudayaan, meliputi:**		
-	Penyelenggaraan festival seni dan budaya,	Capaian Kab. Majene (10) memenuhi target (10)	---
-	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan,	Capaian Kab. Majene (1,420) melampui target (19)	---
-	Sarana penyelenggaraan seni dan buadaya	Capaian Kab. Majene (3) tidak mencapai target (1,396)	- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan kegiatan seni budaya
-	Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Capaian Kab. Majene (91) melampaui target (3)	
-	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Capaian Kab. Majene (902) melampaui (91)	---

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
16	**Perpustakaan, meliputi:**	Data belum tersedia	
17	**Kearsipan, meliputi:**		
-	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Capaian Kab. Majene (78,12) tidak mencapai target (89)	- Masih rendahnya pemahaman ASN dalam pengelolaan arsip secara baku
-	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Capaian Kab. Majene (4) melampaui target (3)	---
C.	**Layanan Urusan Pilihan, meliputi:**		
1	**Pariwisata, meliputi:**		
-	Kunjungan wisata	Capaian Kab. Majene (110.766) tidak mencapai target (128.506)	- Masih kurangnya efektivitas pemasaran wisata - Tingkat kenyamanan objek wisata masih kurang
-	Konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Capaian Kab. Majene (0,72%) tidak mencapai target (0,80%)	- Pengelolaan objek wisata dan kegiatan seni budaya belum maksimal
2	**Pertanian, meliputi:**		
-	Produktifitas Tanaman Padi Sawah	Data capaian tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Produktifitas Tanaman Padi Ladang	Data capaian tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Produktifitas Tanaman Ubi Kayu	Data capaian tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Produktifitas Tanaman Ubi Jalar	Data capaian tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Produktifitas Tanaman jagung	Data capaian tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Produktifitas Tanaman Kacang Hijau	Data capaian tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Kontribusi Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB	Data capaian tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Kontribusi Sektor Tanaman Holtikultura Terhadap PDRB	Data capaian tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Data capaian tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Data capaian tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Kontribusi Sektor Jasa Pertanian dan Peternakan Terhadap PDRB	Data capaian tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Produktifitas Ternak Sapi	Capaian Kab. Majene (18.508) melampaui target (18.264)	---
-	Produktifitas Ternak Kerbau	Capaian Kab. Majene (175) tidak mencapai target (610)	- Populasi kerbau bukan komoditi utama di Kab. Majene hingga jumlahnya sedikit
-	Produktifitas Ternak Kuda	Capaian Kab. Majene (197) tidak mencapai target (214)	- Populasi kuda bukan komoditi utama di Kab. Majene hingga jumlahnya sedikit
-	Produktifitas Ternak Kambing	Capaian Kab. Majene (72.513) tidak mencapai target (75036)	- Kapasitas peternak belum masih rendah dalam pemanfaatan teknologi - Sentra peternakan kambing yang telah dibangun masih kesulitan dalam penyediaan pakan ternak
-	Produktifitas Ternak Ayam Kampung	Capaian Kab. Majene (194.927) melampaui target (80.660)	---
-	Produktifitas Ternak Ayam Potong	Capaian Kab. Majene (608.546) melampaui target (62.896)	---
-	Produktifitas Ternak Itik	Capaian Kab. Majene (14.751) tidak mencapai target (15.168)	- Itik bukan komoditi utama di Kab. Majene hingga jumlahnya sedikit
-	Rehabilitasi hutan dan lahan kering	Data capaian tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Kerusakan Kawasan hutan	Data capaian tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Kontribusi Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB	Data capaian tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
3	**Kehutanan, meliputi:**	-	
4	**Energi dan sumber daya mineral, meliputi:**	-	
5	**Perdagangan, meliputi:**		
-	Konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Capaian Kab. Majene (10,95) tidak mencapai target (12,44)	- Perekonomian Kab. Majene masih didominasi oleh sektor primer yang diperdagangkan tanpa peningkatan nilai tambah
6	**Perindustrian, meliputi**		
-	Kontribusi sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Capaian Kab. Majene (5,24) hampir memenuhi target (5,67)	- Sentra industri yang telah dibangun tidak beroperasi secara optimal - Masih kurangnya kompetensi pelaku usaha dan tenaga kerja di sektor industri

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Pertumbuhan Industri	Capaian Kab. Majene (1,65) tidak mencapai target (26,6)	- Sentra industri yang telah dibangun tidak beroperasi secara optimal - Masih kurangnya kompetensi pelaku usaha dan tenaga kerja di sektor industri
7	**Transmigrasi, meliputi**		
-	Jumlah Transmigran Swakarsa	-	
-	Jumlah Transmigran	Capaian Kab. Majene (1243) tidak mencapai target (1438)	- Masih kurangnya wilayah yang dikembangkan untuk menjadi kawasan transmigrasi
-	Persentase Transmigran Swakarsa	-	
8	**Kelautan dan perikanan, meliputi:**		
-	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Capaian Kab. Majene (7.830,00) tidak mencapai target (8.148,80)	- Masih maraknya perdagangan perikanan tangkap di laut luar batas wilayah daerah - Belum maksimalnya pemanfaatan tekonologi perikanan tangkap oleh nelayan
-	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Capaian Kab. Majene (983,70) tidak mencapai target (1507)	- Masih rendahnya kapasitas pembudidaya - Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasaran perikanan budidaya

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Jumlah pendapatan rata-rata perikanan tangkap	Data tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Jumlah pendapatan rata-rata pembudidaya	Data tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Jumlah retribusi usaha perikanan	Data tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Jumlah kelompok nelayan dan pembudidaya ikan	Data tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Jumlah penanganan kasus illegal fishing	Data tahun 2020 tidak tersedia	- Kemampuan pendataaan oleh pemkab masih kurang
-	Jumlah Komsumsi Ikan	Capaian Kab. Majene (42,11) tidak mencapai target (125)	- Belum optimalnya hasil kampanye GEMARIKAN
D.	**Penunjang urusan, meliputi:**		
1	**Perencanaan pembangunan, meliputi:**		
-	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tersedia	---

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA,	Tersedia	---
-	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA,	Tersedia	---
-	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA,	Tersedia	---
2	**Keuangan, meliputi:**		
-	Opini BPK terhadap laporan keuangan,	Kab. Majene telah meraih opini WTP sejak tahun 2015	
-	Persentase SILPA terhadap APBD,	Capaian Kab. Majene (0,30) tidak mencapai target (0,50)	- Masih belum optimalnya pengelolaan surplus keuangan daerah
-	Persentase belanja pendidikan (20%),	Capaian Kab. Majene (30,54) melampaui target (20,00)	---
-	Persentase belanja kesehatan (10%)	Capaian Kab. Majene (18,43) melampaui target (10)	---

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa, dan	Capaian Kab. Majene (0,18) tidak mencapai target (1,25)	- Masih belum optimalnya kontribusi Desa terhadap APBD Kabupaten
-	Penetapan APBD.	Tepat waktu	---
3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, meliputi:**		
-	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah,	Capaian Kab. Majene (35) memenuhi target (35)	---
-	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah, dan	Capaian Kab. Majene (157) memenuhi target (157)	---
4	**Penelitian dan pengembangan, meliputi:**		
-	Persentase implementasi rencana kelitbangan,	Capaian Kab. Majene (100) memenuhi target (100)	---
-	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan,	Capaian Kab. Majene (100) memenuhi target (100)	---

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SiDa, dan	Capaian Kab. Majene (100) memenuhi target (100)	---
-	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Penerapan SIDa.	Capaian Kab. Majene (100) memenuhi target (100)	---
5	**Pengawasan, meliputi:**		
-	Persentase tindak lanjut temuan,	Capaian Kab. Majene (100) memenuhi target (100)	---
-	Persentase pelanggaran pegawai: dan	-	---
-	Jumlah temuan BPK.	-	---
6	**Sekretariat dewan, meliputi:**		
-	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Tersedia	

No	IKU / IKK	Tafsiran Capaian	Permasalahan
-	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Tersedia	
-	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dekumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Tersedia	

4.2. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isustrategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumberdaya tak terbaharui yang merupakan bahan bakar untuk energi. Sebagai daerah yang telah dan didorong untuk menjadi Isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Majene antara lain: pencapaian

tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/MDGs), kondisi prekonomian global yang berpengaruh keperekonomian nasional dan daerah, mitigasi perubahan iklim global (*Global Warning*/*Climate Change*), revolusi industry 4.0, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat serta kesenjangan global dalam pembangunan manusia (*Global Inequality Human Development*).

1. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Develoment Goals* (SDGs)

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni *Millenium Development Goals* (MDGs). Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *Millenium Development Goals* (MDGs) memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut antara lain:

a. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
b. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
c. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
d. Menurunkan angka kematian anak;
e. Meningkatkan kesehatan ibu;
f. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
g. Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
h. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Gambar 4.1

Transformasi MDGs Menjadi SDGs



Sumber : Kementerian PPN / Bappenas

Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional. Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, Amerika Serikat. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs).



Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui plat form agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
c. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
d. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
f. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
g. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
h. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
i. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
j. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
k. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
l. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;

n. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumberdaya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
o. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggusuran, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
p. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Majene, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah.

2. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu

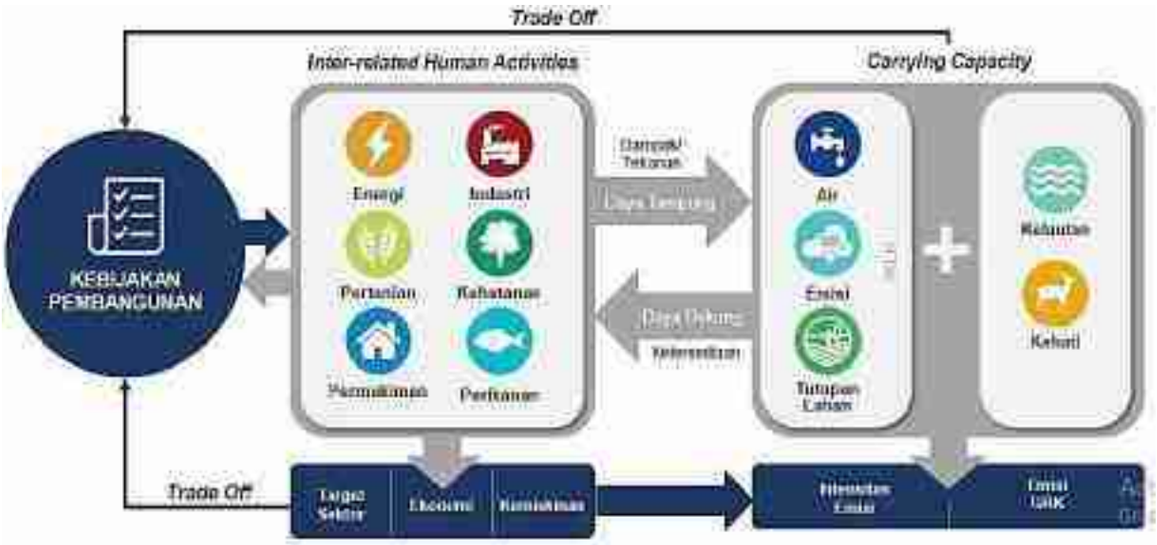
menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Konferensi Tingkat Tinggi Aksi Iklim (*climate action*) oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 2019 telah berhasil menyepakati road map untuk pijakan aksi bersama. Roadmap ini berfungsi sebagai pedoman dalam mendorong negara-negara dan stakeholders lainnya untuk berbuat lebih banyak sejak roadmap disepakati. Kesadaran global akan aksi iklim ini lahir dari kenyataan bahwa tanpa akselerasi upaya perbaikan kondisi lingkungan secara bersama sama maka dunia berisiko tidak mampu menghindari perubahan iklim yang tak terkendali dengan konsekuensi bencana bagi manusia dan semua sistem alam yang menopang keberlanjutan hidup umat manusia.

Informasi terbaru menyatakan bahwa iklim saat ini berpotensi menyebabkan suhu akan naik lebih dari 3 derajat di abad ini, hal tersebut merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu akselerasi dalam perbaikan lingkungan adalah suatu hal yang wajib dilakukan secara global. Meskipun upaya pengurangan emisi global telah mulai dilakukan sejak satu dekade terakhir tetapi hasil yang diharapkan masih belum optimal. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh PBB, Masih terjadi kesenjangan emisi yang signifikan antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dicapai. Bila ingin mencapai target 2030 maka mulai saat ini perlu mengurangi emisi sebesar 7,6% setiap tahun selama 10 tahun kedepan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat (unfoundation.org, 2020).

Gambar 4.2

Pembangunan Rendah Karbon Indonesia Sebagai Platform Baru Pembangunan Nasional



Sumber : Kementerian PPN / Bappenas

Sesuai roadmap terbaru yang telah disepakati oleh PBB, maka sangat diharapkan mulai tahun 2020 secara global harus mulai terjadi proses dekarbonisasi dimana salah satu sumber utama dari emisi karbon berasal dari aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan tantangan utama dalam aksi iklim ini, mengingat selalu ada trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Perlindungan terhadap ekosistem merupakan salah satu alternatif upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh semua negara, serta upaya untuk lebih beradaptasi untuk masa depan terkait pola hidup rendah emisi.

Berdasarkan roadmap tersebut semua negara diharapkan mengurangi lebih banyak emisi berdasarkan Perjanjian Paris. Semua negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam aksi ini, dan terutama negara ekonomi terkemuka yang tergabung dalam G20 (Group of Twenty). Indonesia yang tergabung dalam negara-negara G20 dipastikan akan menjadi bagian dari negara negara utama yang diharapkan berperan lebih aktif dalam aksi iklim ini.

Gambar 4.3
Proses kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)
RPJMN 2020- 2024 dan Pembangunan Rendah Karbon



Sumber : Kementerian PPN / Bappenas

Terkait hal tersebut maka Kabupaten Majene harus mengambil peran yang penting dalam menjalankan aksi iklim tersebut. Hal ini perlu dilakukan, mengingat Kabupaten Majene adalah diarahkan sebagai wilayah pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak menutup kemungkinan kedepan akan mengalami perkembangan yang cukup pesat di sector pendidikan. Seperti yang telah disebut sebelumnya bahwa pengurangan emisi karbon sebagian besar terkait dengan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu upaya Kabupaten Majene dalam ikut aktif menyukseskan aksi pelaksanaan aksi iklim bagi Indonesia perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun perencanaan pembangunan kedepan.

3. Revolusi Industri 4.0

Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat menimbulkan perubahan-perubahan drastris dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat global. Perubahan itu utamanya tampak pada aspek ekonomi masyarakat dimana industri yang dahulu masih berkutat pada pemanfaatan mesin dan tenaga manusia, kini telah beralih fokus pada pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan efisiensi kegiatan-kegiatan produksi. Hal tersebut dikenal sebagai Revolusi Industri 4.0 sebagai konsekuensi logis dari revolusi-revolusi industri sebelumnya yang terjadi akibat pemanfaatan teknologi revolusioner tertentu pada masanya.

Revolusi industri 4.0 memiliki empat prinsip yang memungkinkan setiap perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan skenario industri 4.0, diantaranya adalah:

a. **Interoperabilitas (kesesuaian);** kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk terhubung dan saling berkomunikasi satu sama lain melalui media internet untuk segalanya (IoT) atau internet untuk khalayak (IoT);
b. **Transparansi Informasi;** kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor;
c. **Bantuan Teknis;** pertama kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia mengumpulkan data dan membuat visualisasi agar dapat membuat keputusan yang bijak. Kedua, kemampuan sistem siber-fisik untuk membantu manusia melakukan berbagai tugas yang berat, tidak menyenangkan, atau tidak aman bagi manusia;
d. **Keputusan Mandiri;** kemampuan sistem siber-fisik untuk membuat keputusan dan melakukan tugas semandiri mungkin.

Revolusi industri 4.0 akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya, industri akan semakin kompak dan efisien. Namun ada pula risiko yang mungkin muncul, misalnya berkurangnya Sumber Daya Manusia karena digantikan oleh mesin atau robot. Dunia saat ini memang tengah mencermati revolusi industri 4.0 ini secara saksama. Berjuta peluang ada di situ, tapi di sisi lain terdapat berjuta tantangan yang harus dihadapi.

Perubahan itu sangat dramatis dan terjadi pada kecepatan eksponensial. Perubahan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan di banding era revolusi industri sebelumnya. Pada revolusi Industri 1.0, tumbuhnya mekanisasi dan energi berbasis uap dan air menjadi penanda. Tenaga manusia dan hewan

digantikan oleh kemunculan mesin. Mesin uap pada abad ke-18 adalah salah satu pencapaian tertinggi. Revolusi 1.0 ini bisa meningkatkan perekonomian yang luar biasa. Sepanjang dua abad setelah revolusi industri pendapatan perkapita negara-negara di dunia meningkat enam kali lipat.

Revolusi Industri 2.0 perubahannya ditandai dengan berkembangnya energi listrik dan motor penggerak. Manufaktur dan produksi massal terjadi. Pesawat telepon, mobil, dan pesawat terbang menjadi contoh pencapaian tertinggi. Perubahan cukup cepat terjadi pada revolusi Industri 3.0. Ditandai dengan tumbuhnya industri berbasis elektronika, teknologi informasi, serta otomatisasi. Teknologi digital dan internet mulai dikenal pada akhir era ini. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya Internet *of/for Things*, kehadirannya begitu cepat.

Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Munculnya transportasi dengan sistem ride-sharing seperti Go-jek, Uber, dan Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan meluncurkan program Making Indonesia 4.0 yang merupakan peta jalan (roadmap) terintegrasi dan kampanye untuk mengimplementasikan strategi menghadapi era revolusi industri ke-4 (Industry 4.0). Roadmap tersebut akan diluncurkan pada 4 April 2018.

Gambar 4.4

10 Strategi Prioritas Nasional terhadap Revolusi Industri 4.0



Sumber : Kementerian Perindustrian

Sebagai langkah awal dalam menjalankan Making Indonesia 4.0, terdapat lima industri yang menjadi fokus implementasi industri 4.0 di Indonesia, yaitu:

a. Makanan dan minuman
b. Tekstil
c. Otomotif
d. Elektronik
e. Kimia

Lima industri ini merupakan tulang punggung, dan diharapkan membawa pengaruh yang besar dalam hal daya saing dan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia menuju 10 besar ekonomi dunia di 2030. Kelima sektor inilah yang akan menjadi contoh bagi penerapan industri 4.0, penciptaan lapangan kerja baru dan investasi baru berbasis teknologi.

Industri 4.0 di Indonesia akan menarik investasi luar negeri maupun domestik di Indonesia, karena industri di Indonesia lebih produktif dan sanggup bersaing dengan negara-negara lain, serta berusaha semakin baik yang disertai dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam mengadopsi teknologi. Revolusi mental juga harus dijalankan, mulai dari mengubah mindset negatif dan ketakutan terhadap industri 4.0 yang akan mengurangi lapangan pekerjaan atau paradigma bahwa teknologi itu sulit.

Kita harus berusaha untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan belajar, ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan era industri 4.0, sehingga kita akan mempunyai daya saing yang lebih kuat. Kita tentu berharap industri 4.0 tetap dalam kendali. Harus tercipta kesadaran bersama baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, bahwa perubahan besar dalam industri 4.0 adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari.

Dengan segala potensi yang ada kita harus menjadi pelaku aktif yang mendapat manfaat atas perubahan besar itu. Tantangan kedepan adalah meningkatkan skill tenaga kerja di Indonesia, mengingat 70% angkatan kerja adalah lulusan SMP. Pendidikan sekolah vokasi menjadi suatu keharusan agar tenaga kerja bisa langsung terserap ke industri. Selain itu Pemerintah perlu meningkatkan porsi belanja riset baik melalui skema APBN atau memberikan insentif bagi Perguruan Tinggi dan perusahaan swasta. Saat ini porsi belanja riset Indonesia hanya 0,3% dari PDB di tahun 2016, sementara Malaysia 1,1% dan China sudah 2%. Belanja riset termasuk pendirian techno park di berbagai daerah sebagai pusat sekaligus pembelajaran bagi calon-calon wirausahawan di era revolusi industri 4.0.

Harapannya tingkat inovasi Indonesia yang saat ini berada diperingkat 87 dunia bisa terus meningkat sehingga lebih kompetitif di era transisi teknologi saat ini. Kesimpulannya revolusi industri 4.0 bukanlah suatu kejadian yang menakutkan, justru peluang makin luas terbuka bagi anak bangsa untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

4. Dampak Covid-19 dan Kebijakan Normal Baru (New Normal)

Pandemi COVID-19 telah menyebar ke hampir semua negara di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun demikian waktu penyebaran dan lama pandemi, tingkat gangguan, serta kemampuan negara-negara didunia untuk meresponsnya sangat bervariasi. Negara yang lebih besar dan maju umumnya memiliki sumberdaya dan infrastruktur yang lebih lengkap untuk menghadapi pandemi sehingga memberikan kemampuan recovery yang lebih cepat.

Namun bagi negara-negara sedang berkembang, termasuk negara berkembang ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) memulai pandemi dengan fasilitas infrastruktur kesehatan yang kurang memadai dan hal ini menambah tingkat resiko serta dampaknya terhadap bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Survei yang dilakukan kepada 100 eksekutif ASEAN menunjukkan bahwa 40 persen responden mempercayai bahwa akan ada serangan kedua virus covid19 yang berdampak pada pertumbuhan jangka panjang yang lambat serta pemulihan ekonomi dunia yang terjadi perlahan. Pada skenario ini intervensi ekonomi dipercayaakan efektif dalam menopang konsumsi utama tetapi kemungkinan serangan kedua virus covid19 akan mengarah ke lockdown putaran kedua (McKinsey 2020). Lockdown putaran kedua ini yang dipercayaakan memperburuk kondisi ekonomi global serta memperlambat upaya pemulihan ekonomi secara global.

Berdasarkan prediksi berdasarkan skenario tersebut diatas, maka tingkat pertumbuhan ekonomi global akan menjadi minus 11,1% dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Q4 2019. Beberapa negara berkembang ASEAN diprediksi akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Misalkan, Thailand (-13%), Malaysia (-13,5%), dan Filipina (-13,6%). Sementara itu, perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami

penurunan sebesar minus 10,3%, sedikit lebih bagus dibanding rata-rata penurunan ekonomi global. Pada akhir 2020 semua negara ini diprediksi akan mengalami pertumbuhan PDB tahunan yang lebih rendah dibandingkan dengan krisis keuangan global 2008, yaitu minus 11,5% hingga minus 5,3% untuktahun 2020 dibandingkan dengan minus 2,2% pada 2008 dan menjadi 4,5% pada tahun 2009 (McKinsey 2020 & OECD 2010). Dari sisi perdagangan dunia negara-negara di Asia juga terdampak sangat parah. Perdagangan Intra-Asia diperkirakan turun 13% dari 2019 hingga 2020. Sedangkan perdagangan dari Asia ke Barat turun sekitar 20%.

Pada hampir semua negara, upaya menangani pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Sejumlah besar intervensi kesehatan masyarakat telah diterapkan. Pada banyak negara, diberlakukan sistem perawatan kesehatan seperti dalam kondisi perang, seperti untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur, persediaan, dan pekerja terlatih. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pasokan medis yang sangat dibutuhkan. Perang melawan COVID-19 adalah hal yang harus dimenangkan terlebih dahulu saat ini jika kita ingin merencanakan arah yang tepat secara ekonomi dan sosial menuju kondisi normal baru. Kondisi normal baru adalah realitas baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah tercapai kondisi normal baru maka dipastikan akan terjadi restrukturisasi dramatis terhadap tatanan ekonomi dan sosial.

Keberlangsungan bisnis dan keselamatan karyawan merupakan tantangan utama saat ini. Metode work from home atau pekerjaan jarak jauh menjadi metode utama dimasa ini. Hampir semua lini bisnis mengalami perlambatan dalam aktivitas mereka. Dalam dunia pendidikan Institusi pendidikan beralih kesistem belajar online sebagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun ruang kelas fisik ditutup. Pada sisi lain, dunia usaha dan pemerintah dipaksa untuk memenuhi permintaan di area kritis yang mencakup makanan, persediaan

rumah tangga, dan barang medis. Pandemi covid19 telah berdampak sangat serius terhadap perekonomian dengan memunculkan krisis ekonomi dan sistem keuangan yang tidak terduga sebelumnya. Di sisi moneter Bank sentral diseluruh dunia menghadapi tantangan likuiditas dan solvabilitas bagi hampir semua sektor industri yang ada di negara masing-masing. Hal ini menjadi fokus bank sentral dan pemerintahan hampir diseluruh dunia agar sistem keuangan masing- masing negara tetap berfungsi dengan baik. Guncangan terhadap mata pencaharian atau ketenagakerjaan sebagai akibat besarnya tenaga kerja yang di PHK bisa menjadi yang terbesar dalam hampir satu abad (McKinsey Global Institute, 2020).

Menghadapi tantangan tersebut, ketahanan merupakan kebutuhan vital. Masalah jangka pendek pengelolaan kas untuk likuiditas dan solvabilitas jelas merupakan hal yang terpenting. Tetapi segera setelah itu, bisnis perlu bertindak berdasarkan rencana ketahanan yang lebih luas karena guncangan mulai meningkatkan struktur industri yang sudah mapan, mengatur ulang posisi kompetitif selamanya. Sebagian besar penduduk akan mengalami ketidakpastian dan tekanan keuangan pribadi. Pimpinan sektor publik, swasta, dan sosial perlu membuat keputusan "melalui siklus" yang sulit yang menyeimbangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial, mengingat kohesi sosial sudah berada di bawah tekanan berat dari populisme dan tantangan lain yang ada sebelum virus corona.

Ketika memasuki era normal baru maka tantangan pertama adalah mengembalikan bisnis keoperasional setelah penghentian atau penurunan drastis dalam operasi mereka, dan ini tidak mudah. Penglaman dari negara- negara yang telah recovery dan memasuki normal baru lebih awal, seperti China, menunjukkan bahwa banyak rantai pasokan input (supply chain) yang belum sepenuhnya siap melayani kebutuhan industri. Selain itu perlu waktu bagi pekerja dan karyawan untuk mencapai tingkat produktivitas tenaga kerja sebelumnya.

Pada konteks ini peran pemerintah pada masing-masing negara sangat penting untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Bagi negara berkembang seperti Indonesia permasalahan terkait upaya recovery pada dunia usaha menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Selain keterbatasan sumberdaya dan dana bagi intervensi juga besarnya ketergantungan impor terhadap barang modal dan bahan baku industri. Kondisi dimana masih banyak rantai pasokan (suplly chain) dari pihak luar negri yang belum recovery sepenuhnya tentu perlu dipikirkan dengan baik cara mengatasinya agar industri dalam negeri bisa segera berangsur-angsur beroperasi dengan normal dan penyerapan tenaga kerja kembali normal.

Meskipun demikian, negara-negara di Asia Tenggara masih memiliki beberapa potensi bagi percepatan recovery ekonomi mereka. Menurut study yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute (2020), setidaknya terdapat lima sektor yang sangat berpotensi, yaitu; (1) Sebagai pusat manufaktur; (2) Infrastruktur hijau; (3) investasi dalam sektor digital; (4) Pelatihan ulang bakat, dan (5) Industri makanan bernilai tinggi. Potensi ini bila mampu dimanfaatkan dengan baik, maka tidak hanya dapat mempercepat pemulihan ekonomi di negara-negara ini tetapi juga meletakkan dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan bagi negara-negara berkembang di ASEAN setelah era normal baru.

4.2.2. Isu Strategi Nasional

Isu Kebijakan Nasional yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Daerah adalah memperhatikan Visi, Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, dimana Visi tersebut adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai visi tersebut ada 9 misi yang di kenal dengan nawacita kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia**

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. **Pembangunan Infrastruktur**

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses kekawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. **Penyederhanaan Regulasi**

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk menjabarkan Visi, Misi dan arahan Presiden Republik Indonesia di butuhkan 7 agenda Pembangunan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertmbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Traspormasi pelayanan Publik.

4.2.3. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Barat

Isu Strategis Provinsi Sulawesi Barat yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi tahun 2017 -2022 dengan Visi Sulbar Maju dan Malaqbi. Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan 5 misi sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern, dan Terpercaya;

3. Membangun dan Menguatkan Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis;
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi;
5. Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan;

Adapun Isu Strategis Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan;
2. Kualitas Lingkungan Hidup untuk mendukung Sulbar "*go clean and green*"
3. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis;
4. Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
6. Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat;
7. Indeks Gini Ratio;
8. Disparitas Wilayah;
9. Penanggulangan Kemiskinan;
10. Pengangguran dan ketenagakerjaan;
11. Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
12. Ketahanan Pangan;
13. Tata Nilai dan Kebudayaan Daerah;
14. Pengembangan Industri;
15. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
16. Kualitas demokrasi;
17. Keamanan dan ketertiban daerah;
18. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
19. Ketahanan Energi. (energi baru terbarukan);
20. Pengembangan Kawasan Perdesaan;
21. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah;
22. Keadilan dan kesetaraan Gender.





BAB V



BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Bab ini berisikan Visi dan Misi Kabupaten Majene Tahun 2021-2024 beserta penjelasannya. Visi dan misi ini merupakan perwujudan dari Visi dan Misi pasangan H. Andi Achmad Syukri Tammalele, S.E.MM – Arismunandar, S.STP.MM sebagai pasangan terpilih pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020. RPJMD Kabupaten Majene tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran narasi politis dan operasionalisasi janji politik Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang dimuat dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang kemudian akan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Majene Tahun 2021-2026, yaitu:

Majene Unggul, Mandiri dan Religius

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

Majene Unggul :

Bermakna bahwa Menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Majene Mandiri :

Bermakna bahwa Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri.

Majene Religius :

Bermakna bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten Majene yang mengamalkan nilai-nilai agama yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa, budaya dan kearifan lokal yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.

Dengan demikian visi Kabupaten Majene yang Unggul, Mandiri dan Religius bermakna layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya. Kemudian memfasilitasi kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang berbasis pada kemandirian yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut akan mendorong terwujudnya masyarakat religius sebagai perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat yang aman, tenteram dan nyaman".

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Awalnya misi atau janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat tahapan Pemilihan Kepala Daerah disusun berdasarkan pada akronim inisial nama pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni AST-ARIS, dengan rumusan sebagai berikut:



Aman	Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum dan ketentraman serta melestarikan budaya masyarakat yang malaqbi'.
Sejahtera	Mewujudkan Pembangunan Manusia yang berkualitas dan sejahtera dengan pertumbuhan ekonomi yang progresif dengan memaksimalkan sumber daya daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan investasi yang bertumpu pada potensi lokal dan regional, ramah lingkungan dan berkesinambungan
Terarah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien melalui peningkatan mutu birokrasi dengan menerapkan e-government yang holistik dan terintegrasi disegala sektor pelayanan publik.
Agromarine	Mengoptimalkan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya potensi lokal di darat dan laut, meliputi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, perhubungan, pertambangan dan pariwisata.
Responsif	Mengakselerasi perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui layanan yang aspiratif, cepat tanggap, bermutu dan menjangkau semua lapisan masyarakat.
Inovatif	Mendorong pengembangan UMKM, industri kreatif dan sektor jasa berbasis teknologi informasi.
Sustainable	Mengembangkan infrastruktur publik berbasis Perencanaan wilayah yang berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial.

Penjelasan 7 Misi diatas merupakan penjabaran dari janji politis yang disampaikan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih kepada masyarakat Kabupaten Majene pada saat mengikuti tahapan Pilkada yang lalu. Dalam rangka penyempurnaan rangkaian redaksi misi diatas, maka dilakukan proses transformasi menjadi bahasa misi dan *adaptable* terhadap kaidah-kaidah perencanaan yang harus patuh pada regulasi dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan nasional.



Upaya Transformasi misi pada akronim AST-ARIS menjadi bahasa teknokratis, ditempuh dengan sangat hati-hati, cermat dan seksama, agar seluruh misi politik yang dijanjikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dipastikan terakomodir didalam dokumen RPJMD periode 2021 - 2026. Proses transformasi dimaksud merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) untuk menemukan standar-standar dalam menentukan indicator-indikator yang dapat diukur.

Setelah mengalami transformasi dan penyesuaian bahasa Misi, maka misi sebagai panduan langkah taktis untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Majene Periode 2021 -2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang Unggul dan Kompetitif
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel
3. Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis.

Untuk memperjelas uraian diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Keterkaitan Pokok Visi, Misi dan Penjelasan Misi
RPJMD Kab Majene 2021-2026

Pokok Visi	Misi RPJMD	Penjelasan Misi
Unggul	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif	• Mewujudkan Pembangunan Manusia yang berkualitas melalui peningkatan kualitas dan tata kelola pendidikan, layanan kesehatan, ketahanan dan keamanan pangan; • Meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat lokal melalui konsep pendampingan dan pemberdayaan yang berbasis potensi local • Menumbuhkan iklim investasi melalui peningkatan aksesibilitas investasi dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel	• Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem pemerintahan yang baik serta Sumber daya aparatur yang berkualitas • Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang berbasis IT • Penerapan *Good Governance* yang direpresentasikan melalui penerapan kabupaten cerdas (*smart regency)* untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal
Mandiri	Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	• Menggali potensi keunggulan kompetitif dan komparatif sumber daya alam daerah • Meningkatkan kemampuan keuangan dan kemandirian daerah melalui pengembangan potensi (intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi) dan sumber daya alam unggulan daerah • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM, Industri Kreatif dan sektor jasa berbasi teknologi informasi • Meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi UMKM berbasis komunitas • Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dengan memperhatikan konsep perencanaan kewilayahan, berkesinambungan dan berorientasi *environmental ethics* yang berkeadilan social

Pokok Visi	Misi RPJMD	Penjelasan Misi
Religius	Mewujudkan masyarakat majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan agamis	Mewujudkan Kehidupan masyarakat Kabupaten Majene yang demokratis, Aman dan kondusif melalui penguatan nilai-nilai agama yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa, nilai budaya dan kearfian lokal mandar yang malaqbiq.

Kemudian untuk mencapai kualitas perencanaan yang baik, patuh pada kaidah perencanaan harus memiliki benang merah pada semua tingkatan perencanaan mulai dari Dokumen Perencanaan Nasional (RPJMN) dan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat, maka RPJMD Kabupaten Majene harus terkoneksi langsung dengan dua dokumen tersebut. Sehingga keselarasan perencanaan dan keterpaduan dalam penyusunan program kerja mengarah pada cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Keselarasan hubungan antara Visi dan Misi RPJPD Kab. Majene 2005-2025 dengan Visi dan Misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2

Keselarasan Misi Pada Visi dan Misi RPJPD Kab. Majene 2005-2025 dengan Visi dan Misi RPJMD

Visi RPJMD 2021-2026	Visi RPJPD 2005-2025	RPJMD 2021 – 2026	RPJPD 2005 – 2025	
Majene **Unggul, Mandiri dan Religius**	Kabupaten Majene Sebagai **Pusat Pendidikan Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Menuju Tatanan Masyarakat Madani**	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif	1.	Mewujudkan Kabupaten Majene sebagai Pusat Pelayanan Pendidikan melalui penyediaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan
Pokok Visi Majene **Unggul** Menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi,	Pokok Visi Majene Sebagai **Pusat Pendidikan** penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Majene diharapkan memiliki standar yang berkualitas di wilayah Sulawesi Barat, dikembangkan dengan sistem kebijakan		2.	Mewujudkan penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan masyarakat



Visi RPJMD 2021-2026	Visi RPJPD 2005-2025	RPJMD 2021 – 2026	RPJPD 2005 – 2025	
peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	pendidkan yang unggul melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta terciptanya iklim pendidikan yang kondusif			
Pokok Visi Majene **Mandiri** Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri	Pokok Visi **Pemenuhan TPB** dalam proses pembangunan Kabupaten Majene Pembangunan berkelanjutan dalam pokok visi ini diartikan sebagai kondisi pelaksanaan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dimasa sekarang dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam dimasa yang akan datang		3.	Mewujudkan peningkatan pengamalan nilai-nilai budaya dan keagaman serta pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pembangunan
Pokok Visi **Majene Religius** Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan	Pokok Visi **Masyarakat Madani** Masyarakat yg menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yg ditopang oleh penguasaan iman, ilmu pengetahuan dan teknologi yg berperadaban		4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
			5,	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
			6.	Mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat
			7.	Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas
			8.	Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan potensi sumber daya alam secara optimal



Visi RPJMD 2021-2026	Visi RPJPD 2005-2025	RPJMD 2021 – 2026	RPJPD 2005 – 2025	
global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri		Misi 2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel	3.	Mewujudkan peningkatan pengamalan nilai-nilai budaya dan keagaman serta pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pembangunan
			4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
			5.	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
		Misi 3: Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	2.	Mewujudkan penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan masyarakat
			3.	Mewujudkan peningkatan pengamalan nilai-nilai budaya dan keagaman serta pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pembangunan
			5.	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
			6.	Mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat
			8.	Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan potensi sumber daya alam secara optimal
			9.	Mewujudkan kelestarian sumberdaya alam melalui konsep pembangunan berkelanjutan

Visi RPJMD 2021-2026	Visi RPJPD 2005-2025	RPJMD 2021 – 2026	RPJPD 2005 – 2025	
		Misi 4: Mewujudkan masyarakat majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan agamis	2.	Mewujudkan penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan masyarakat
			3.	Mewujudkan peningkatan pengamalan nilai-nilai budaya dan keagaman serta pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pembangunan

Demikian pula dengan keterkaitan antara Dokumen RPJMD harus terkoneksi langsung dengan dokumen perencanaan nasional sebagai wujud kesatuan pandang dan misi untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 5.3

Keselarasan Misi Pada RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJMN Tahun 2019 – 2024

Visi RPJMD 2021-2026	Visi RPJMN 2019-2024	Misi RPJMD 2021 – 2026	Misi RPJMN 2019 - 2024
Majene **Unggul, Mandiri dan Religius**	Terwujudnya Indonesia **Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) majene yang unggul dan kompetitif	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
Pokok Visi Majene **Unggul** Menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Pokok Visi **Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat**	Misi 2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Visi RPJMD 2021-2026	Visi RPJMN 2019-2024	Misi RPJMD 2021 – 2026	Misi RPJMN 2019 - 2024
			9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
Pokok Visi Majene **Mandiri** Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri	Pokok Visi **Terwujudnya Indonesia Maju yang Mandiri**	Misi 3: Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
Pokok Visi **Majene Religius** Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri	Pokok Visi **Terwujudnya Indonesia Maju yang Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong**	Misi 4: Mewujudkan masyarakat majene yang berbudaya, berkearifan local dan agamis	5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga

Terakhir akan disajikan keterkaitan dan keselarasan antara RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, hal ini menjadi salah satu prasyarat mutlak dalam perencanaan daerah sebagai bagian dari region Sulawesi Barat, dalam rangka melahirkan perencanaan yang terkoneksi langsung, selaras dengan harapan melahirkan keterpaduan dan harmoni dalam proses-proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majene maupun dalam Wilayah Pemerintahan Sulawesi Barat secara luas.



Tabel 5.4

Keselarasan Misi Pada RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJMD Sulawesi Barat 2017 – 2022

VISI RPJMD 2021-2026	VISI RPJMD SULBAR 2017-2022	MISI RPJMD 2021 – 2026	MISI RPJMD SULBAR 2017 - 2022
Majene **Unggul, Mandiri dan Religius**	Sulawesi Barat **Maju dan Malaqbi**	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) majene yang unggul dan kompetitif	1. Membangun sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian dan berbudaya
Pokok Visi Majene **Unggul** Menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Pokok Visi **Sulawesi Barat Maju** Komitmen untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat yang sejajar dengan provinsi lainnya yang didukung oleh konektivitas wilayah dan daya saing yang tinggi serta berorientasi pada lingkungan.	Misi 2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel	2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi
Pokok Visi Majene **Mandiri** Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri		Misi 3: Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	3. Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi 5. Mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan

VISI RPJMD 2021-2026	VISI RPJMD SULBAR 2017-2022	MISI RPJMD 2021 – 2026	MISI RPJMD SULBAR 2017 - 2022
Pokok Visi **Majene Religius** Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri	Pokok Visi **Sulawesi Barat Malaqbiq** Komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan kearifan lokal dengan	Misi 4: Mewujudkan masyarakat majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan agamis	1. Membangun sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian dan berbudaya

5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting



sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021–2026 dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Tabel 5.5

Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Indikator sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
Majene Unggul	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif**	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pelayanan pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rata-rata Lama Sekolah
					Harapan Lama Sekolah
			Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan		Angka Harapan Hidup
					Prevalensi Stunting
			Terwujudnya Pembangunan Daerah yang responsive terhadap gender dan pemenuhan hak anak		Indeks Pembangunan Gender
					Indeks Perlindungan Anak
			Meningkatnya standar hidup masyarakat yang merata hingga perdesaan		Persentase penduduk miskin
					Tingkat Pengangguran Terbuka
					Gini Ratio
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bermutu dan berbasis Teknologi informasi	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin Predikat SAKIP
					Opini BPK
					Nilai LPPD
			Meningkatnya kualitas dan Ketepatan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat



Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
			Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah		Tingkat maturitas SPBE
			Terciptanya upaya Pembangunan Daerah yang inovatif di semua sector		Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasi berkesinambungan
Majene Mandiri	**Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan**	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis Pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi pengelolaan SDA dalam perekonomian daerah	Pendapatan Perkapita	Pertumbuhan Ekonomi
					Laju Inflasi (yoy)
			Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan permukiman masyarakat		Indeks Infrastruktur Wilayah
			Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Majene Religius	**Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan agamis**	Meningkatkan kesalihan sosial masyarakat	Meningkatnya kepedulian sosial, lingkungan dan bernegara	Indeks Kesalihan Sosial	Angka Kriminalitas

Tabel 5.6

Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : "MAJENE UNGGUL, MANDIRI DAN RELIGIUS"

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	66,91	67,51	68,03	68,53	69,05	69,56	70,07
			Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas pelayanan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,65	8,86	9,04	9,21	9,39	9,56	9,73
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,61	13,99	14,13	14,26	14,40	14,54	14,68
			Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	61,56	61,79	62,01	62,23	62,45	62,67	62,89
				Prevalensi Stunting	%	34,26	30,28	27,27	23,08	17,99	16,00	13,00
			Terwujudnya Pembangunan Daerah yang responsive gender dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	94,70	94,72	94,80	95,1	95,65	96,70	96,75
				Indeks Perlindungan Anak	Nilai	66,89	67,51	68,25	70,5	71,3	72,6	75,5
			Meningkatnya standar hidup masyarakat yang merata hingga perdesaan	Persentase Penduduk Miskin	%	13,73	13,18	12,41	12,00	11,58	11,17	10,76
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,26	4,36	4,15	3,7	3,2	2,82	2,52
				Gini Ratio	Poin	0,361	0,351	0,343	0,336	0,329	0,321	0,314

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bermutu dan berbasis Teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	poin	33 (C)	50 (CC)	61 (B)	65 (B)	68 (B)	71(BB)	72 (BB)
			Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Poin Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	BB	BB	BB	A
				Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai LPPD	Nilai	3,51	3,53	3,55	3,57	3,58	3,60	3,61
			Meningkatnya Kualitas dan ketepatan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	75 (Baik)	78 (Baik)	80 (Baik)	82 (Baik)	85 (baik)	86 (baik)	88 (Baik)
			Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah	Tingkat maturitas SPBE	Poin (predikat)	1,0 (kurang)	2,0 (cukup)	2,5 (Baik)	2,7 (Baik)	2,8 (Baik)	3,0 (Baik)	3,1 (Sangat Baik)
			Terciptanya upaya pembangunan daerah yang inovatif pada segala sektor	Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasikan berkesinambungan	%	20	40	55	70	80	90	100
3	Mewujudkan Kemandirian Perekonomian Berbasis Potensi Sumbetr Daya Alam (SDA) dan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan lingkungan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis Pembangunan berkelanjutan		Pendapatan Perkapita	Rp	26,93 (Juta)	27,22 (Juta)	27,92 (Juta)	28,62 (Juta)	29,33 (Juta)	30,03 (Juta)	30,73 (Juta)
			Meningkatnya kontribusi pengelolaan SDA dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,38	4.73	6.16	6.25	6.37	6.46	6.55
				Laju Inflasi (yoy)	Poin	1,78	2,39	2,24	2,09	1,94	1,79	1,62



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan permukiman masyarakat	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	67,01	67,83	71,60	73,20	76,45	78,15	80,05
			Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	68,56	69,51	69,96	70,41	70,86	71	71,20
4	Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis	Meningkatkan kesalihan sosial masyarakat		Indeks Kesalihan Sosial	%	-	-	65	70	75	78	80
			Meningkatnya kepedulian sosial, lingkungan dan bernegara	Angka Kriminalitas	Jumlah	257	240	230	220	200	190	180





BAB VI

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen serta pemanfaatan teknologi informasi.

6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berpikir strategis dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pembangunan daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, dan strategi harus dikendalikan dan dievaluasi *(learning process)*. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD yang dianalisis berdasarkan Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada Bab sebelumnya yang diurai secara rinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1 Strategi Pembangunan Daerah berdasarkan Rumusan Tujuan dan Sasaran

Visi: Majene Unggul, Mandiri dan Religius			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif	1.1. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat	1.1.1. Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas layanan pendidikan	1.1.1.1. Penyelenggaraan manajemen pendidikan yang terjangkau berkualitas, adil dan merata
		1.1.2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	1.1.2.1 Peningkatan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan dan Pengendalian Mortalitas dan Fertilitas Masyarakat
		1.1.3. Terwujudnya Pembangunan Daerah yang responsive gender dan pemenuhan hak anak	1.1.3.1. Peningkatan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan hak anak dalam segala bentuk kekerasan
		1.1.4. Meningkatnya standar hidup masyarakat yang merata hingga perdesaan	1.1.4.1. Penguatan Pemberdayaan Masyarakat pelaku ekonomi secara berkesinambungan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel	2.1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bermutu dan berbasis Teknologi informasi	2.1.1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	2.1.1.1. Pengembangan sistem pemerintahan yang integratif melalui Institusionalisasi reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan
		2.1.2. Meningkatnya kualitas dan ketepatan pelayanan publik	2.1.2.1. Peningkatan akses masyarakat dalam layanan publik melalui penciptaan layanan yang optimal di segala bidang

Visi: Majene Unggul, Mandiri dan Religius			
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
		2.1.3. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah	2.1.3.1. Peningkatan Implementasi E-Government dalam Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah
		2.1.4. Terciptanya upaya Pembangunan Daerah yang inovatif di semua sektor	2.1.4.1. Penguatan Inovasi dalam perumusan Kebijakan Pembangunan daerah
3. Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	3.1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis Pembangunan berkelanjutan	3.1.1. Meningkatnya kontribusi pengelolaan SDA dalam perekonomian daerah	3.1.1.1. Optimalisasi produktivitas dan nilai tambah produktifitas Potensi SDA dalam Perekonomian daerah
		3.1.2. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan Pemukiman Masyarakat	3.1.2.1. Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan Infrastruktur Pelayanan dasar
		3.1.3 Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	3.1.3.1. Peningkatan kualitas lingkungan Hidup
4. Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan agamis	4.1. Meningkatkan kesalihan sosial masyarakat	4.1.1. Meningkatnya kepedulian sosial, lingkungan dan bernegara	4.1.1.1. Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila serta budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan Masyarakat

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah merupakan suatu bentuk konkret dari upaya pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan panduan dan acuan kepada pemerintah daerah agar dalam menentukan dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berjalan lebih optimal. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya bahwa Visi yang telah ditetapkan oleh pasangan kepala daerah terpilih adalah Majene Unggul, Mandiri dan Religius. Pencapaian Visi tersebut kemudian dilakukan melalui upaya – upaya sistematis dan terstruktur melalui Misi Pembangunan daerah. Dalam rangka pelaksanaan yang lebih operasional dan spesifik dalam upaya merealisasikan Misi Pembangunan daerah tersebut tentu diperlukan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang akan dijabarkan setiap tahun dalam masa periode kepemimpinan Kepala daerah. Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan

merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi. Adapun Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Majene terjabarkan sebagai berikut:



Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Majene

VISI: MAJENE UNGGUL, MANDIRI DAN RELIGIUS							
NO	**Misi/Tujuan/ Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif							
1.1	**Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**						
1.1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas layanan pendidikan	Menyelenggarakan manajemen pendidikan yang terjangkau berkualitas, adil dan merata	a.Meningkatkan Kualitas pendidikan dalam konteks manajemen, tata kelola, dan aksesbilitas pendidikan	a.Meningkatkan Kualitas pendidikan dalam konteks manajemen, tata kelola, dan aksesbilitas pendidikan	a.Meningkatkan Kualitas pendidikan dalam konteks manajemen, tata kelola, dan aksesbilitas pendidikan	a.Meningkatkan Kualitas pendidikan dalam konteks manajemen, tata kelola, dan aksesbilitas pendidikan	a.Meningkatkan Kualitas pendidikan dalam konteks manajemen, tata kelola, dan aksesbilitas pendidikan
			b. Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kependidikan baik secara formal maupun informal	b. Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kependidikan baik secara formal maupun informal	b. Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kependidikan baik secara formal maupun informal	b. Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kependidikan baik secara formal maupun informal	b. Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kependidikan baik secara formal maupun informal
			c. Meningkatkan Kesadaran dan minat baca masyarakat	c. Meningkatkan Kesadaran dan minat baca masyarakat	c. Meningkatkan Kesadaran dan minat baca masyarakat	c. Meningkatkan Kesadaran dan minat baca masyarakat	c. Meningkatkan Kesadaran dan minat baca masyarakat

VISI: MAJENE UNGGUL, MANDIRI DAN RELIGIUS							
NO	**Misi/Tujuan/ Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1.1.2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan dan Pengendalian Mortalitas dan Fertilitas Masyarakat	a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang kualitas layanan kesehatan	a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang kualitas layanan kesehatan	a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang kualitas layanan kesehatan	a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang kualitas layanan kesehatan	a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang kualitas layanan kesehatan
			b. Menjamin Proses pelayananan kesehatan yang berkualitas dan terstandarisasi	b. Menjamin Proses pelayananan kesehatan yang berkualitas dan terstandarisasi	b. Menjamin Proses pelayananan kesehatan yang berkualitas dan terstandarisasi	b. Menjamin Proses pelayananan kesehatan yang berkualitas dan terstandarisasi	b. Menjamin Proses pelayananan kesehatan yang berkualitas dan terstandarisasi
			c. Meningkatkan bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan Meningkatkan Upaya dalam pengendalian fertilitas dan mortalitas penduduk	c. Meningkatkan bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan Meningkatkan Upaya dalam pengendalian fertilitas dan mortalitas penduduk	c. Meningkatkan bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan Meningkatkan Upaya dalam pengendalian fertilitas dan mortalitas penduduk	c. Meningkatkan bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan Meningkatkan Upaya dalam pengendalian fertilitas dan mortalitas penduduk	c. Meningkatkan bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan Meningkatkan Upaya dalam pengendalian fertilitas dan mortalitas penduduk

VISI: MAJENE UNGGUL, MANDIRI DAN RELIGIUS							
NO	**Misi/Tujuan/ Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1.1.3.	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang responsive gender dan pemenuhan hak anak	Meningkatkan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan hak anak dalam segala bentuk kekerasan	a.Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak	a.Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak	a.Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak	a.Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak	a.Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak
			Meningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan politik, sosial, ekonomi dan pembangunan	Meningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan politik, sosial, ekonomi dan pembangunan	Meningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan politik, sosial, ekonomi dan pembangunan	Meningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan politik, sosial, ekonomi dan pembangunan	Meningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan politik, sosial, ekonomi dan pembangunan
			Penguatan Penyelesaian dan Penanganan Kekerasan Terhadap perempuan, anak dan traficking	Penguatan Penyelesaian dan Penanganan Kekerasan Terhadap perempuan, anak dan traficking	Penguatan Penyelesaian dan Penanganan Kekerasan Terhadap perempuan, anak dan traficking	Penguatan Penyelesaian dan Penanganan Kekerasan Terhadap perempuan, anak dan traficking	Penguatan Penyelesaian dan Penanganan Kekerasan Terhadap perempuan, anak dan traficking

VISI: MAJENE UNGGUL, MANDIRI DAN RELIGIUS							
NO	**Misi/Tujuan/ Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1.1.4.	Meningkatnya standar hidup masyarakat yang merata hingga perdesaan	Penguatan Pemberdayaan Masyarakat pelaku ekonomi secara berkesinambungan	a. Memberikan fasilitas dan pendampingan khususnya pelaku UKM dan IKM	a. Memberikan fasilitas dan pendampingan khususnya pelaku UKM dan IKM	a. Memberikan fasilitas dan pendampingan khususnya pelaku UKM dan IKM	a. Memberikan fasilitas dan pendampingan khususnya pelaku UKM dan IKM	a. Memberikan fasilitas dan pendampingan khususnya pelaku UKM dan IKM
			b. Menjamin Perlindungan sosial ekonomi untuk masyarakat berpenghasilan rendah	b. Menjamin Perlindungan sosial ekonomi untuk masyarakat berpenghasilan rendah	b. Menjamin Perlindungan sosial ekonomi untuk masyarakat berpenghasilan rendah	b. Menjamin Perlindungan sosial ekonomi untuk masyarakat berpenghasilan rendah	b. Menjamin Perlindungan sosial ekonomi untuk masyarakat berpenghasilan rendah
			c. Integrasi Intervensi Kebijakan sosial ekonomi pemerintah daerah dan pemerintah desa	c. Integrasi Intervensi Kebijakan sosial ekonomi pemerintah daerah dan pemerintah desa	c. Integrasi Intervensi Kebijakan sosial ekonomi pemerintah daerah dan pemerintah desa	c. Integrasi Intervensi Kebijakan sosial ekonomi pemerintah daerah dan pemerintah desa	c. Integrasi Intervensi Kebijakan sosial ekonomi pemerintah daerah dan pemerintah desa

VISI: MAJENE UNGGUL, MANDIRI DAN RELIGIUS							
NO	Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel							
2.1	**Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bermutu dan berbasis Teknologi informasi**						
2.1.1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Pengembangan sistem pemerintahan yang integratif melalui Institusionalisasi reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan	a. Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan	a. Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan	a. Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan	a. Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan	a. Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan
			b.Mengimplementasikan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel	b.Mengimplementasikan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel	b.Mengimplementasikan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel	b.Mengimplementasikan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel	b.Mengimplementasikan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel
2.1.2	Meningkatnya kualitas dan ketepatan pelayanan publik	Peningkatan akses masyarakat dalam layanan publik melalui penciptaan layanan yang optimal di segala bidang	a. Menciptakan fasililitas untuk kemudahan akses layanan publik dengan memanfaatkan teknologi dan informasi	a. Menciptakan fasililitas untuk kemudahan akses layanan publik dengan memanfaatkan teknologi dan informasi	a. Menciptakan fasililitas untuk kemudahan akses layanan publik dengan memanfaatkan teknologi dan informasi	a. Menciptakan fasililitas untuk kemudahan akses layanan publik dengan memanfaatkan teknologi dan informasi	a. Menciptakan fasililitas untuk kemudahan akses layanan publik dengan memanfaatkan teknologi dan informasi

VISI: MAJENE UNGGUL, MANDIRI DAN RELIGIUS							
NO	Misi/Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
			b. Penguatan kolaborasi dan konvergensi fugsi kelembagaan perangkat daerah penyelenggara layanan publik	b. Penguatan kolaborasi dan konvergensi fugsi kelembagaan perangkat daerah penyelenggara layanan publik	b. Penguatan kolaborasi dan konvergensi fugsi kelembagaan perangkat daerah penyelenggara layanan publik	b. Penguatan kolaborasi dan konvergensi fugsi kelembagaan perangkat daerah penyelenggara layanan publik	b. Penguatan kolaborasi dan konvergensi fugsi kelembagaan perangkat daerah penyelenggara layanan publik
2.1.3	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah	Peningkatan Implementasi E-Government dalam Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah	a. Penguatan Kapabilitas Kelembagaan Perangkat daerah dalam implementasi SPBE	a. Penguatan Kapabilitas Kelembagaan Perangkat daerah dalam implementasi SPBE	a. Penguatan Kapabilitas Kelembagaan Perangkat daerah dalam implementasi SPBE	a. Penguatan Kapabilitas Kelembagaan Perangkat daerah dalam implementasi SPBE	a. Penguatan Kapabilitas Kelembagaan Perangkat daerah dalam implementasi SPBE
			b. Penyempurnaan Regulasi daerah dalam mendukung Implementasi SPBE	b. Penyempurnaan Regulasi daerah dalam mendukung Implementasi SPBE	b. Penyempurnaan Regulasi daerah dalam mendukung Implementasi SPBE	b. Penyempurnaan Regulasi daerah dalam mendukung Implementasi SPBE	b. Penyempurnaan Regulasi daerah dalam mendukung Implementasi SPBE
2.1.4	Terciptanya upaya Pembangunan Daerah yang inovatif di semua sektor	Penguatan Inovasi dalam perumusan Kebijakan Pembangunan daerah	a. Menguatkan Peran Kelitbangan dalam menyusun kajian inovasi Pembangunan Daerah	a. Menguatkan Peran Kelitbangan dalam menyusun kajian inovasi Pembangunan Daerah	a. Menguatkan Peran Kelitbangan dalam menyusun kajian inovasi Pembangunan Daerah	a. Menguatkan Peran Kelitbangan dalam menyusun kajian inovasi Pembangunan Daerah	a. Menguatkan Peran Kelitbangan dalam menyusun kajian inovasi Pembangunan Daerah

VISI: MAJENE UNGGUL, MANDIRI DAN RELIGIUS							
NO	**Misi/Tujuan/ Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
			b. Mengintegrasikan Hasil Kajian inovasi Pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah	b. Mengintegrasikan Hasil Kajian inovasi Pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah	b. Mengintegrasikan Hasil Kajian inovasi Pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah	b. Mengintegrasikan Hasil Kajian inovasi Pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah	b. Mengintegrasikan Hasil Kajian inovasi Pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah
Misi 3 : Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan							
3.1	Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis Pembangunan berkelanjutan						
3.1.1	Meningkatnya kontribusi pengelolaan SDA dalam perekonomian daerah	Optimalisasi produktivitas dan nilai tambah produktifitas Potensi SDA dalam Perekonomian daerah	a. Revitalisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.	a. Revitalisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.	a. Revitalisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.	a. Revitalisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.	a. Revitalisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.

VISI: MAJENE UNGGUL, MANDIRI DAN RELIGIUS							
NO	**Misi/Tujuan/ Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
			b. Peningkatan produktifitas perikanan dan nilai tambah produk perikanan melalui penguatan kapasitas nelayan yang berdaya saing	b. Peningkatan produktifitas perikanan dan nilai tambah produk perikanan melalui penguatan kapasitas nelayan yang berdaya saing	b. Peningkatan produktifitas perikanan dan nilai tambah produk perikanan melalui penguatan kapasitas nelayan yang berdaya saing	b. Peningkatan produktifitas perikanan dan nilai tambah produk perikanan melalui penguatan kapasitas nelayan yang berdaya saing	b. Peningkatan produktifitas perikanan dan nilai tambah produk perikanan melalui penguatan kapasitas nelayan yang berdaya saing
			c. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif	c. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif	c. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif	c. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif	c. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif

VISI: MAJENE UNGGUL, MANDIRI DAN RELIGIUS							
NO	**Misi/Tujuan/ Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
3.1.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan Pemukiman Masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan Infrastruktur Pelayanan dasar	a. Meningkatkan kualitas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sampai dengan pelosok	a. Meningkatkan kualitas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sampai dengan pelosok	a. Meningkatkan kualitas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sampai dengan pelosok	a. Meningkatkan kualitas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sampai dengan pelosok	a. Meningkatkan kualitas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sampai dengan pelosok
			b. Mengongoptimalkan sarana dan pasarana infrastruktur penunjang distribusi ekonomi	b. Mengongoptimalkan sarana dan pasarana infrastruktur penunjang distribusi ekonomi	b. Mengongoptimalkan sarana dan pasarana infrastruktur penunjang distribusi ekonomi	b. Mengongoptimalkan sarana dan pasarana infrastruktur penunjang distribusi ekonomi	b. Mengongoptimalkan sarana dan pasarana infrastruktur penunjang distribusi ekonomi
			c. Meningkatkan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	c. Meningkatkan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	c. Meningkatkan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	c. Meningkatkan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	c. Meningkatkan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

VISI: MAJENE UNGGUL, MANDIRI DAN RELIGIUS							
NO	**Misi/Tujuan/ Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
3.1.3	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan Hidup	a. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau termasuk pelestarian dan Rehabilitasi hutan Mangrove pada wilayah pesisir	a. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau termasuk pelestarian dan Rehabilitasi hutan Mangrove pada wilayah pesisir	a. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau termasuk pelestarian dan Rehabilitasi hutan Mangrove pada wilayah pesisir	a. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau termasuk pelestarian dan Rehabilitasi hutan Mangrove pada wilayah pesisir	a. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau termasuk pelestarian dan Rehabilitasi hutan Mangrove pada wilayah pesisir
			b. Penguatan Peran dan Kapasitas Masyarakat dalam optimalisasi Pelestarian lingkungan	b. Penguatan Peran dan Kapasitas Masyarakat dalam optimalisasi Pelestarian lingkungan	b. Penguatan Peran dan Kapasitas Masyarakat dalam optimalisasi Pelestarian lingkungan	b. Penguatan Peran dan Kapasitas Masyarakat dalam optimalisasi Pelestarian lingkungan	b. Penguatan Peran dan Kapasitas Masyarakat dalam optimalisasi Pelestarian lingkungan
Misi 4 : Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan agamis							
4.1	**Tujuan : Meningkatkan kesalihan sosial masyarakat**						

VISI: MAJENE UNGGUL, MANDIRI DAN RELIGIUS							
NO	**Misi/Tujuan/ Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**				
			2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
4.1.1	Meningkatnya kepedulian sosial, lingkungan dan bernegara	Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila serta budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan Masyarakat	a. Penguatan dan preservasi nilai Budaya dan kearifan lokal	a. Penguatan dan preservasi nilai Budaya dan kearifan lokal	a. Penguatan dan preservasi nilai Budaya dan kearifan lokal	a. Penguatan dan preservasi nilai Budaya dan kearifan lokal	a. Penguatan dan preservasi nilai Budaya dan kearifan lokal
			b. Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam pembangunan	b. Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam pembangunan	b. Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam pembangunan	b. Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam pembangunan	b. Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam pembangunan
			c. Penguatan penegakan peraturan daerah	c. Penguatan penegakan peraturan daerah	c. Penguatan penegakan peraturan daerah	c. Penguatan penegakan peraturan daerah	c. Penguatan penegakan peraturan daerah



6.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Fokus Pembangunan atau Prioritas Pembangunan daerah pada masa periode Kepemimpinan ini dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan kajian metodologis dengan melibatkan masyarakat umum yang dilaksanakan pada masa kampanye pemilihan kepala daerah yang lalu, sehingga menghasilkan konsensus tentang prgram apa yang dianggap penting dan wajib untuk diprioritaskan pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majene. Kesepakatan Program prioritas tersebut menjadi pijakan dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Majene pada periode kepemimpinan tahun 2021 – 2026 ini. Adapun program prioritas tersebut menggunakan terminologi dalam bahasa Mandar yaitu ***"Lima Pattuyu".*** Adapun konten dari program prioritas tersebut sebagai berikut:

1. **Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok**

   Pemenuhan Kebutuhan Primer masyarakat Kabupaten Majene menjadi salah satu prioritas utama yang wajib diperhatikan. Ketersediaan bahan pangan menjadi pilar penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan sehingga dibutuhkan intervensi Pemerintah daerah melalui kebijakan khusus secara terintergasi dan komprehensif untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang kemudian akan berimplikasi kepada terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat;

2. **Perluasan Lapangan Pekerjaan**

   Isu Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka masih menjadi salah satu persoalan utama di Kabupaten Majene. Berdasarkan data Indikator Makro Pembangunan Daerah, TPT Kabupaten Majene berada pada angka 4,26%. Salah satu penyebab utamanya adalah masih terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Temuan lainnya adalah Sebagian Angkatan kerja masih memiliki mindset bahwa pekerjaan hanya bertumpu pada pekerja kantoran sehingga hal tersebut menghambat kreatifitas dan inovasinya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. berdasarkan temuan tersebut, sehingga penyediaan lapangan pekerjaan dianggap menjadi salah satu program prioritas yang harus segera dilaksanakan.

3. **Pembangunan Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan**

   Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi salah satu hal yang vital dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah baik dari perspektif ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterbukaan akses melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur diharapkan dapat membuka jalur perekonomian sehingga dapat meningkatkan taraf pendapatan masyarakat pelaku ekonomi. Dalam hal tujuannya, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat maksimal dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Potensi permasalahan dalam pembangunan infrastruktur adalah penyesuaian terhadap *environmental ethics* atau pembangunan yang memperhatikan analisis dampak lingkungan sehingga dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan;

4. **Pembangunan Ekonomi yang bertumpu pada isu strategis dan potensi lokal**

   Pembangunan ekonomi dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi unggulan daerah menjadi salah satu program prioritas yang wajib dilaksanakan. Prinsip pengembangan ekonomi inklusif dengan konsep pemberdayaan yang dimulai identifikasi dan analisis terhadap potensi unggulan daerah yang secara berjenjang kemudian dilakukan proses intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi terhadap potensi daerah tersebut yang kemudian akan menjadi penyangga peningkatan taraf hidup dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh yang tentunya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene

5. **Percepatan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan**

   Peningkatan kualitas dan aksesibilitas Pendidikan diarahkan pada Kesetaraan terhadap pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan. Pendidikan adalah hak Warga Negara tanpa kecuali baik berupa pendidikan formal maupun non formal. Peningkatan Kualitas Pendidikan menjadi program wajib yang harus dilaksanakan baik secara konseptual pemerintahan maupun secara prosedural (mandatory) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Kualitas pendidikan di Kabupaten Majene yang tergambar dari indikator Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama

sekolah menunjukkan angka yang belum cukup baik. Sehingga diharapkan intervensi lebih lanjut dengan memaksimalkan sumber daya dan regulasi yang ada untuk meningkatkan kualitas, aksesibiltas, manajemen dan tata kelola pendidikan di Kabupaten Majene. Peningkatan Layanan Kesehatan juga menjadi prioritas wajib yang harus diintervensi. Percepatan proses layanan kesehatan yang memiliki standar operasional prosedur yang memenuhi standar pelayanan minimal, aksesbilitas masyarakat dalam menjangkau layanan kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dan Opimalisasi layanan kesehatan melalui fungsi fasilitas kesehatan (pustu, puskesmas dan RSUD) menjadi prioritas wajib untuk dibenahi oleh pemerintah daerah kedepan sehingga hak masyarakat akan pemenuhan kesehatan yang dijamin oleh Undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik, dan tepat sasaran.

Berdasarkan analisis terhadap konsep diatas, maka prioritas pembangunan daerah yang merupakan operasionalisasi strategi pembangunan daerah Kabupaten Majene tahun 2021 – 2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6.3

Prioritas Pembangunan Kabupaten Majene Periode Tahun 2021 – 2026

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tahun Pelaksanaan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Penguatan Reformasi Birokrasi, Inklusifitas Pelayanan Publik dan Supremasi hukum					
2	Peningkatan Kesejahteraan dan kualitas Sumber daya Manusia					
3	Peningkatan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak					
4	Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal					
5	Peningkatan Produktifitas hasil Pertanian					
6	Pengembangan Industrialisasi Agribisnis dan agroteknologi					
7	Peningkatan Produktifitas dan industrialisasi produk Perikanan					

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tahun Pelaksanaan				
		2022	2023	2024	2025	2026
8	Menciptakan kemudahan akses Lapangan Kerja					
9	Pengendalian Harga-harga Kebutuhan Pokok					
10	Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berwawasan Lingkungan					
11	Peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman					
12	Penguatan dan preservasi nilai Budaya dan kearifan lokal					
13	Penguatan Kelitbangan untuk kajian inovasi Pembangunan Daerah					

Pada implementasinya, Arah Kebijakan Pembangunan ini merupakan operasionalisasi Strategi Pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun maupun lebih dari satu tahun (multi-years) pada periode pembangunan daerah. Secara fungsi, Arah Kebijakan pembangunan ini juga dapat menjadi landasan dalam menentukan tema atau fokus pembangunan sehingga proses pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta ditunjang pertimbangan kemampuan atau kapasitas fiskal pemerintah daerah, penentuan arah kebijakan menempati posisi yang cukup krusial dalam rangka pencapaian tujuan dan misi pembangunan daerah.

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Majene dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun.

Tabel 6.4

TEMA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022 – 2026

TEMA PEMBANGUNAN DAERAH				
2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Pemulihan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Akselerasi Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi melalui penguatan ekonomi kerakyatan menuju Majene yang unggul dan Mandiri	Sinergitas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas yang berwawasan lingkungan dalam menciptakan pemerataan pembangunan	Akselerasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan potensi SDA dalam menunjang Kemandirian daerah	Pemantapan Kabupaten Majene yang Unggul, Mandiri dan Religius

Setiap pemerintah dihadapkan dengan keterbatasan anggaran sehingga perlu menentukan prioritas secara seksama. Secara garis besar, Kabupaten Majene ingin mencapai kemajuan yang dicerminkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana publik yang memadai serta kemajuan sektor ekonomi yang digambarkan dengan daya saing pelaku ekonomi serta perannya dalam mewujudkan ruang publik yang mencerminkan modernitas. Kesemua hal ini perlu sekiranya ditopang dengan adanya daya beli masyarakat yang memadai. Untuk itu upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat perlu didorong, dengan memperhatikan pula kesenjangan ekonomi yang ada saat ini sehingga perlu ada keberpihakan dan perhatian terhadap pemberdayaan lembaga ekonomi rakyat.

Pada tahun 2021 ini merupakan masa transisi kepemimpinan Kepala daerah, sehingga dalam ruang lingkup atau perspektif siklus atau tahapan perencanaan pembangunan daerah rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah telah ditetapkan pada tahapan perencanaan tahun 2020. Sehingga implementasi fokus pembangunan pada masa transisi tahun 2021 akan dilakukan penyesuaian terhadap misi pembangunan daerah pada periode kepemimpinan 2021 – 2026. dan sebagai masa transisi, fokus pembangunan akan diarahkan pada Implementasi tata kelola Pemerintahan yang efektif, adaptif dan responsif dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar kesejahteraan, ketenteraman dan ketertiban Masyarakat dengan mengimplementasikan dan mengoptimalkan program-program pembangunan daerah yang disesuaikan dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.

6.4. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan Strategi dan Arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, Program pembangunan Daerah merupakan program-program yang diharapkan mampu untuk mewadahi kegiatan yang merupakan prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati sebagai bagian pemenuhan kontrak politik. Adapun rumusan sinkronisasi Strategi, Arah kebijakan pembangunan dengan Program Pembangunan daerah diurai pada tabel berikut:

Tabel 6.5.

Operasionalisasi Strategi dan Arah Kebijakan dalam Program Pembangunan Daerah

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah (Kepmen 050-3708/2020	PD PENANGGUNG JAWAB
1.1.1.1. Menyelenggarakan manajemen pendidikan yang terjangkau berkualitas, adil dan merata	a. Meningkatkan Kualitas pendidikan dalam konteks manajemen, tata kelola, dan aksesbilitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	b. Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kependidikan baik secara formal maupun informal	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kpramukaan	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga
	c. Meningkatkan Kesadaran dan minat baca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah (Kepmen 050-3708/2020	PD PENANGGUNG JAWAB
		Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.1.2. Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan dan Pengendalian Mortalitas dan Fertilitas Masyarakat	a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang kualitas layanan kesehatan b. Menjamin Proses pelayananan kesehatan yang berkualitas dan terstandarisasi	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	c. Meningkatkan bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan Meningkatkan Upaya dalam pengendalian fertilitas dan mortalitas penduduk	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.1.3.1. Meningkatan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan hak anak dalam segala bentuk kekerasan	a. Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	b. Meningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan politik, sosial, ekonomi dan pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah (Kepmen 050-3708/2020	PD PENANGGUNG JAWAB
	c. Penguatan Penyelesaian dan Penanganan Kekerasan Terhadap perempuan, anak dan traficking	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.4.1. Penguatan Pemberdayaan Masyarakat pelaku ekonomi secara berkesinambungan	a. Memberikan fasilitas dan pendampingan khususnya pelaku UKM dan IKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	b. Menjamin Perlindungan sosial ekonomi untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
	c. Integrasi Intervensi Kebijakan sosial ekonomi pemerintah daerah dan pemerintah desa	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Peningkatan Kerja sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah (Kepmen 050-3708/2020	PD PENANGGUNG JAWAB
2.1.1.1. Pengembangan sistem pemerintahan yang integratif melalui Institusionalisasi reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan	a. Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Ortala Setda
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
	b. Mengimplementasikan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
2.2.1.1. Peningkatan akses masyarakat dalam layanan publik melalui penciptaan layanan yang optimal di segala bidang	a. Menciptakan fasililitas untuk kemudahan akses layanan publik dengan memanfaatkan teknologi dan informasi	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Informatika, statistik dan Persandian
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	b. Penguatan kolaborasi dan konvergensi fugsi kelembagaan perangkat daerah penyelenggara layanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah (Kepmen 050-3708/2020	PD PENANGGUNG JAWAB
		Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Informatika, statistik dan Persandian
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika, statistik dan Persandian
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Bangtim, banggae, pamboang, sendana, tubo
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Banggae, pamboang sendana
		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.3.1.1. Peningkatan Implementasi E-Government dalam Penyelenggaraan	a. Penguatan Kapabilitas Kelembagaan Perangkat daerah dalam implementasi SPBE	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Informatika, statistik dan Persandian



Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah (Kepmen 050-3708/2020	PD PENANGGUNG JAWAB
fungsi pemerintahan daerah		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	b. Penyempurnaan Regulasi daerah dalam mendukung Implementasi SPBE	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan Setda
2.4.1.1. Penguatan Inovasi dalam perumusan Kebijakan Pembangunan daerah	a. Menguatkan Peran Kelitbangan dalam menyusun kajian inovasi Pembangunan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan
	b. Mengintegrasikan Hasil Kajian inovasi Pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah		
3.1.1.1. Optimalisasi produktivitas dan nilai tambah produktifitas Potensi SDA dalam Perekonomian daerah	a. Revitalisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia Pertanian.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan



Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah (Kepmen 050-3708/2020	PD PENANGGUNG JAWAB
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
	b. Peningkatan produktifitas perikanan dan nilai tambah produk perikanan melalui penguatan kapasitas nelayan yang berdaya saing	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian



Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah (Kepmen 050-3708/2020	PD PENANGGUNG JAWAB
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.2.1.1. Peningakatan kapasitas dan kualitas sistem jaringan Infrastruktur Pelayanan dasar	a. Meningkatkan kualitas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sampai dengan pelosok	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	b. Mengongoptimalkan sarana dan pasarana infrastruktur penunjang distribusi ekonomi	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
	c. Meningkatkan kualitas Perumahan, Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah (Kepmen 050-3708/2020	PD PENANGGUNG JAWAB
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.3.1.1. Peningkatan kualitas lingkungan Hidup	a. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau termasuk pelestarian dan Rehabilitasi hutan Mangrove pada wilayah pesisir	Program Pengendalian, Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	b. Penguatan Peran dan Kapasitas Masyarakat dalam optimalisasi Pelestarian lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KENATI)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		"Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Pengaduan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan, Kawasan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah (Kepmen 050-3708/2020	PD PENANGGUNG JAWAB
			Permukiman dan Pertanahan
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.1.1.1. Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila serta budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	a. Penguatan dan preservasi nilai Budaya dan kearifan lokal	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra Setda
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan Sejarah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan serta budaya politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	b. Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam pembangunan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra Setda
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah (Kepmen 050-3708/2020	PD PENANGGUNG JAWAB
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	c. Penguatan penegakan peraturan daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SatPol Pamong Praja
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Bangtim, Banggae, Sendana, Tammerodo

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene periode 2021-2026. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Majene yang Unggul, Mandiri dan Religius sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang lalu, maka terdapat rumusan agenda dan janji politik yang diharapkan dapat merealisasikan visi tersebut. Adapun gambaran agenda dan janji politik tersebut disinkronisasikan dengan Visi dan Misi terjabarkan dalam tabel 6.6. Selanjutnya program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif yang dikelompokkan berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021 – 2026 tertuang dalam matriks I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Tabel 6.6.

Matriks Keterkaitan Visi, Misi dan Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati Majene

Visi	Misi	Janji Politik	Numenklatur Program Kepmen 050-3708/2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Majene Unggul	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif	Peningkatan Layanan Pendidikan yang merata dan menjangkau seluruh Lapisan Masyarakat Majene	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga
		Bantuan Pendidikan bagi masyarakat kurang mampu	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga
		Pengembangan Bakat Kepemudaan melalui pengembangan ekstrakurikuler olahraga dan lainnya di sekolah	Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga
			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga
		Peningkatan Minat Baca dalam upaya menekan angka buta huruf di Kab. Majene	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang adil dan merata khususnya masyarakat prasejahtera	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Mengoptimalkan Layanan Kesehatan Gratis pada masyarakat kurang mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan fasilitas yang mendukung fungsi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan

Visi	Misi	Janji Politik	Numenklatur Program Kepmen 050-3708/2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Meningkatkan Pendampingan kepada ibu hamil untuk menekan angka kematian ibu dan meminimalisisr kelahiran anak dengan resiko stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan Sarana dan prasarana kesehatan untuk menjamin pelayanan keseharan yang maksimal	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan akan
		Memberikan fasilitas keamanan dan kenyamanan terhadap potensi ancaman kekerasan terhadap anak dan perempuan	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan akan
			Program Perlindungan Perempuan	
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel	Penguatan Supremasi Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Hukum Sekretariat Daerah
		Meningkatkan Layanan Administrasi Kependudukan yang cepat, responsif dan tepat sasaran	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Pemantapan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Visi	Misi	Janji Politik	Numenklatur Program Kepmen 050-3708/2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Peningkatan Kesejahteraan Kepala Lingkungan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8 Kecamatan
		Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Penguatan SAKIP dan Pengejewantahan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapeda
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Peningkatan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Majene Mandiri	Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	Bantuan Modal, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana, Pupuk, Alat Tangkap, Bibit, dan pengembangan kawasan Pertanian	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Perdagangan UMKM dan Perindustrian
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	

Visi	Misi	Janji Politik	Numenklatur Program Kepmen 050-3708/2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Memperluas Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat Kabupaten Majene	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Perdagangan UMKM dan Perindustrian
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatan Fasilitas dan Kreatifitas Pemuda Millenial dalam Berwirausaha	Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Perdagangan UMKM dan Perindustrian
		Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas Infrastruktur dasar	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan PR

Visi	Misi	Janji Politik	Numenklatur Program Kepmen 050-3708/2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Meningkatkan Fungsi Irigasi di Kabupaten Majene	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum dan Kawasan Pemukiman **(Majene Terang)**	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		Peningkatan Kebersihan kota, Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup **(Majene Bersih)**	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KENATI)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Program Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Program Pengendalian, Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Bencana	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan PR
		Penanggulangan Banjir Untuk Mengurangi Kerugian Yang Dialami Setiap Musim Hujan Tiba.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Perumahan,Pemukiman dan Pertanahan / Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Visi	Misi	Janji Politik	Numenklatur Program Kepmen 050-3708/2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pengadaan Air Bersih Yang Layak Dan Aman, Terutama Bagi Wilayah - Wilayah Yang Selama Ini Mengalami Krisis Air Bersih.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Majene Religius	Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan agamis	Penyediaan Rumah Tahfiz Al-Quran	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		Pemantapan kerukunan antar umat beragama yang menjamin kebebasan beribadah untuk seluruh agama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan"	
		Memberikan Fasilitas dan Insentif Pada Tokoh Agama dan Imam Masjid	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
		Revitalisasi fasilitasi seni budaya dan warisan situs sejarah Mandar	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata





BAB VII



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini disajikan kerangka pendanaan pembangunan yang akan digunakan untuk pelaksanaan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Melalui penyajian kerangka program dan pagu indikatif yang disusun berdasarkan aspek-aspek pembangunan ini, diharapkan dapat menggambarkan arah pembangunan dan program apa saja yang direncanakan pada RPJMD untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan kewenangan urusan masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada Bab III sebelumnya, maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk tahun 2022 adalah sekitar 537,49 Milyar rupiah, tahun 2023 sebesar 728,56 Milyar rupiah, tahun 2024 sebesar 777,58 Milyar rupiah, tahun 2025 sebesar 832,69 Milyar rupiah dan tahun 2026 sebesar 874,82 Milyar rupiah. Angka kapasitas riil keuangan tersebut akan dialokasikan untuk pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah termasuk didalamnya program unggulan kepala daerah, program prioritas perangkat daerah yang akan direncanakan dalam 5 tahun mendatang. Program-program tersebut merupakan belanja yang akan dikelola perangkat daerah diluar belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama.

Selanjutnya kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1, dan indikasi seluruh rencana program disertai dengan kebutuhan pendanaan Kabupaten Majene tahun 2021-2026 dapat dilihat pada matriks II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

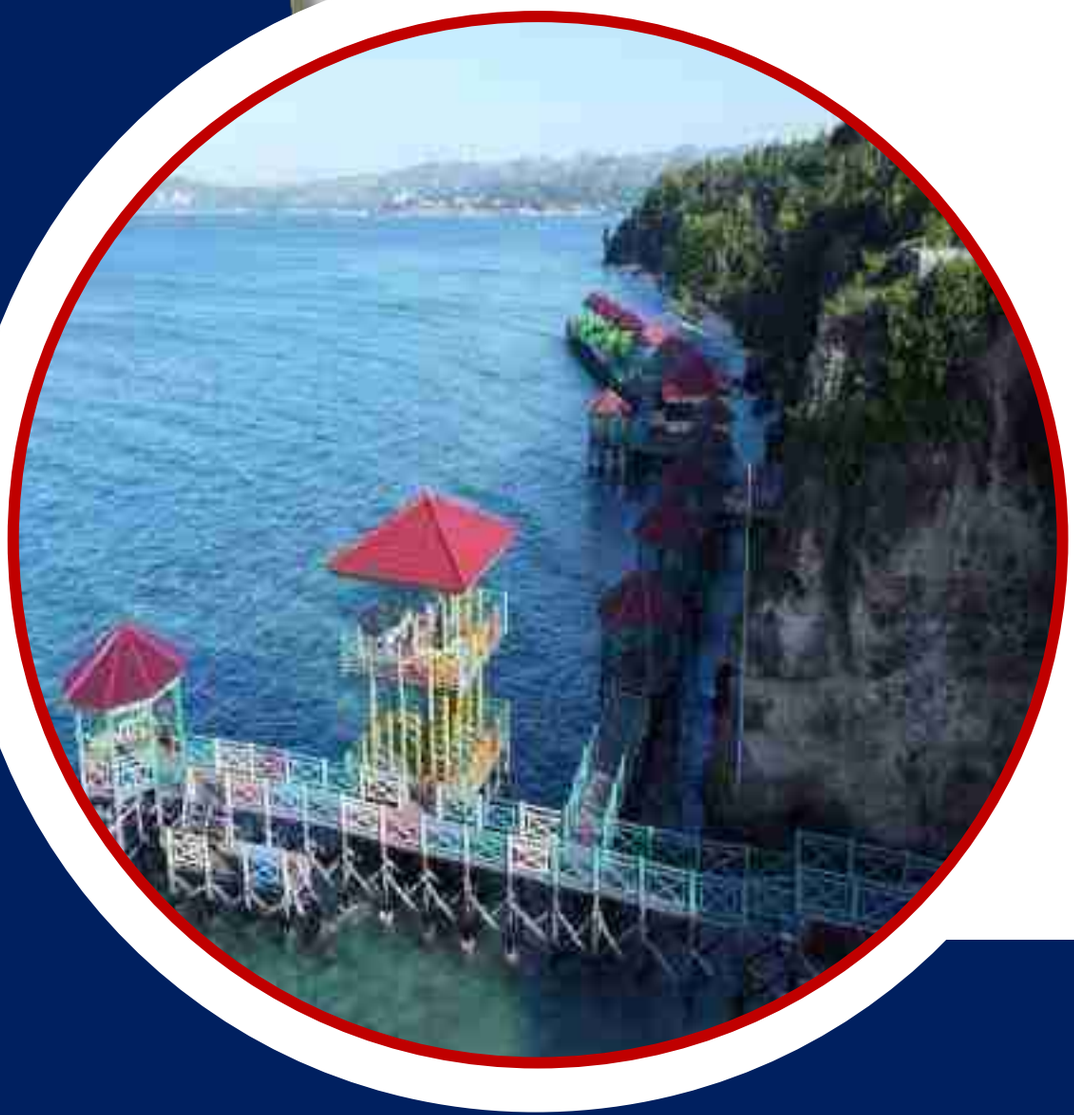
Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2021 - 2026
Kabupaten Majene

Uraian	Target Tahun 2021 (Rp.)	Proyeksi				
		Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)	Tahun 2025 (Rp.)	Tahun 2026 (Rp.)
BELANJA DAERAH						
Belanja Operasi	**694.504,34**	**679.607,05**	**778.558,54**	**812.541,32**	**853.790,32**	**882.138,07**
Belanja Pegawai	400.235,89	443.474,23	460.624,36	479.249,33	498.561,31	518.139,76
Belanja Barang dan Jasa	285.322,01	199.778,53	279.759,29	294.306,83	313.636,84	321.271,49
Belanja Hibah	8.887,64	36.297,89	37.604,89	38.356,98	40.891,26	41.885,83
Belanja Bantuan Sosial	58,80	56,40	570,00	628,17	700,91	841,00
Belanja Modal	101.671,22	72.782,91	150.018,57	160.664,05	173.325,56	187.106,39
Belanja Modal Tanah	3.815,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.952,04	12.955,74	27.014,82	27.537,76	28.233,90	29.153,91
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.356,69	22.741,44	33.034,87	36.544,27	42.515,91	48.329,79
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.036,77	31.795,33	79.356,77	80.921,30	86.872,35	93.833,20
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	510,72	290,40	612,11	660,72	703,41	789,48
Belanja Tidak Terduga	3.350,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	9.350,00	10.700,00
Belanja Tidak Terduga	3.350,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	9.350,00	10.700,00
Belanja Transfer	117.813,40	107.259,68	124.684,80	134.449,41	141.885,48	149.321,56
Belanja Bagi Hasil	2.566,27	2.144,04	2.147,34	2.273,06	2.398,79	2.524,51
Belanja Bantuan Keuangan	115.247,13	105.115,64	122.537,46	132.176,34	139.486,69	146.797,04
Jumlah Belanja	**917.338,95**	**861.649,65**	**1.058.261,91**	**1.114.654,78**	**1.178.351,36**	**1.229.266,02**

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majene, Data diolah





BAB VIII



BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator utama Bupati tersebut, merupakan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat outcomes yang dilaksanakan OPD. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja yang bersifat keluaran (*output*) yang dilaksanakan OPD.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve* (*SMART-C*).

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator kinerja terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Perumusan indikator kinerja utama Bupati yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan pdalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 - 2026 yang telah direncanakan, dimana tahun 2021 merupakan tahun dasar, tahun 2022 merupakan tahun pertama RPJMD dan tahun 2026 merupakan tahun ke lima RPJMD. Indikator-indikator kinerja tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini. Perhitungan indikator kinerja (terlampir) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Tabel 8.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Majene Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja Awal	Target Capaian Kinerja					
				Transisi	I	II	III	IV	V
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia)	Nilai	66.91	67.51	68.03	68.53	69.05	69.56	70.07
2	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	33 (C)	50 (CC)	61 (B)	65 (B)	68 (B)	71(BB)	72 (BB)
3	Pendapatan Perkapita	Rp	26,93 (Juta)	27,22 (Juta)	27,92 (Juta)	28,62 (Juta)	29,33 (Juta)	30,03 (Juta)	30,73 (Juta)
4	Indeks Kesalihan Sosial	%	-	-	65	70	75	78	80
5	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,65	8,86	9,04	9,21	9,39	9,56	9,73
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,61	13,99	14,13	14,26	14,4	14,54	14,68



No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja Awal	Target Capaian Kinerja					
				Transisi	I	II	III	IV	V
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	61,56	61,79	62,01	62,23	62,45	62,67	62,89
8	Prevalensi Stunting	%	34,26	30,28	27,27	23,08	17,99	16,00	13,00
9	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	94,70	94,72	94,80	95,1	95,65	96,70	96,75
10	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	66,89	67,51	68,25	70,5	71,3	72,6	75,5
11	Persentase Penduduk Miskin	%	13,73	13,18	12,41	12,00	11,58	11,17	10,76
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,26	4,36	4,15	3,7	3,2	2,82	2,52
13	Gini Ratio	Poin	0,361	0,351	0,343	0,336	0,329	0,321	0,314
14	Poin Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	BB	BB	BB	A
15	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Nilai LPPD	Nilai	3.51	3.53	3.55	3.57	3,58	3,60	3,61
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	75 (Baik)	78 (Baik)	80 (Baik)	82 (Baik)	85 (baik)	86 (baik)	88 (Baik)
18	Tingkat maturitas SPBE	Poin (predikat)	1,0 (kurang)	2,0 (cukup)	2,5 (Baik)	2,7 (Baik)	2,8 (Baik)	3,0 (Baik)	3,1 (Sangat Baik)
19	Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasikan berkesinambungan	%	20	40	55	70	80	90	100
20	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,38	4,73	6,16	6,25	6,37	6,46	6,55
21	Laju Inflasi (yoy)	Poin	1,78	2,39	2,24	2,09	1,94	1,79	1,62
22	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	67,01	67,83	71,60	73,20	76,45	78,15	80,05
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	68,56	69,51	69,96	70,41	70,86	71	71,20
24	Angka Kriminalitas	Jumlah	257	240	230	220	200	190	180



Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Majene Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia)	Nilai	66.91	67.51	68.03	68.53	69.05	69.56	70.07	70.07
2	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	33 (C)	50 (CC)	61 (B)	65 (B)	68 (B)	71(BB)	72 (BB)	72 (BB)
3	Pendapatan Perkapita	Rp	26,93 (Juta)	27,22 (Juta)	27,92 (Juta)	28,62 (Juta)	29,33 (Juta)	30,03 (Juta)	30,73 (Juta)	30,73 (Juta)
4	Indeks Kesalihan Sosial	%	-	-	65	70	75	78	80	80
5	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,65	8,86	9,04	9,21	9,39	9,56	9,73	9,73
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,61	13,99	14,13	14,26	14,4	14,54	14,68	14,68
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	61,56	61,79	62,01	62,23	62,45	62,67	62,89	62,89
8	Prevalensi Stunting	%	34,26	30,28	27,27	23,08	17,99	16,00	13,00	13,00
9	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	94,70	94,72	94,80	95,1	95,65	96,70	96,75	96,75
10	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	66,89	67,51	68,25	70,5	71,3	72,6	75,5	75,5
11	Persentase Penduduk Miskin	%	13,73	13,18	12,41	12,00	11,58	11,17	10,76	10,76
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,26	4,36	4,15	3,7	3,2	2,82	2,52	2,52
13	Gini Ratio	Poin	0,361	0,351	0,343	0,336	0,329	0,321	0,314	0,314
14	Poin Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	BB	BB	BB	A	A
15	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Nilai LPPD	Nilai	3.51	3.53	3.55	3.57	3,58	3,60	3,61	3,61



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	75 (Baik)	78 (Baik)	80 (Baik)	82 (Baik)	85 (baik)	86 (baik)	88 (Baik)	88 (Baik)
18	Tingkat maturitas SPBE	Poin (predikat)	1,0 (kurang)	2,0 (cukup)	2,5 (Baik)	2,7 (Baik)	2,8 (Baik)	3,0 (Baik)	3,1 (Sangat Baik)	3,1 (Sangat Baik)
19	Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasikan berkesinambungan	%	20	40	55	70	80	90	100	100
20	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,38	4,73	6,16	6,25	6,37	6,46	6,55	6,55
21	Laju Inflasi (yoy)	Poin	1,78	2,39	2,24	2,09	1,94	1,79	1,62	1,62
22	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	67,01	67,83	71,60	73,20	76,45	78,15	80,05	80,05
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	68,56	69,51	69,96	70,41	70,86	71	71,20	71,20
24	Angka Kriminalitas	%	257	240	230	220	200	190	180	180
Aspek Pelayanan Umum										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	Angka Partisipasi Kasar SD	%	103,91	104,31	104,61	104,91	105,61	105,91	106,41	106,41
2	Angka Partisipasi Kasar SMP	%	84,25	86,28	89,48	93,35	96,19	98,23	100,00	100,00
3	Angka Partisipasi Murni SD	%	96,86	97,00	98,00	98,50	99,00	99,50	100,00	100,00
4	Angka Partisipasi Murni SMP	%	92,72	94,00	96,23	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00
5	Angka Partisipasi Sekolah SD	%	96,86	97,00	98,00	98,50	99,00	99,50	100,00	100,00
6	Angka Partisipasi Sekolah SMP	%	92,72	94,00	96,23	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
7	Persentase sarpras Sekolah dalam kondisi baik	%	-	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
8	Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi B	%	70,00	73,00	75,00	80,00	85,00	87,00	90,00	90,00
9	Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi B	%	-	40,00	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
10	Persentase satuan pendidikan dan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	%	-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Guru PAUD, SD, SMP yang bersertifikasi	%	-	-	100,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
12	Persentase Izin yang diterbitkan	%	-	-	70	70	70	70	70	70
13	Persentase Bahasa dan Sastra yang di Kembangkan	%	-	-	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	-	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1	1
2	% Fasyankes yang memiliki dokumen manajemen mutu dan keselamatan pasien	%	-	5,00	18,18	36,00	55,00	73,00	100,00	100,00
3	Prevalensi Penyakit Menular dan	%	38,00	34,00	33,34	32,68	32,03	31,39	30,76	30,76
4	% Fasyankes yang terpenuhi kebutuhan ASPAK sesuai standar	%	-	18,18	36,36	54,55	72,73	90,91	100,00	100,00
5	Proporsi anggaran yang dialokasikan ke fasilitas pelayanan kesehatan	%	10,00	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00	42,00	42,00
6	Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standart	%	72,73	82,00	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	% Ketersediaan Apotek, Toko Obat, Alkes dan Optikal UMOT dan PIRT sesuai standar	%	47,00	71,00	81,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
8	Persentase Desa/ Kelurahan Sehat	%	20,00	35,00	40,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	Persentase Bangunan Perkuatan tebing (talud) dan Pengamanan Pantai (Tanggul) dalam Kondisi Baik	%	70,00	83,62	85,12	86,62	88,12	89,62	91,12	91,12
2	Persentase jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	90,00	91,94	93,14	94,35	95,55	96,75	97,95	97,95
3	Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM / jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten	%	71,41	69,87	68,86	67,85	66,84	65,82	64,81	64,81
4	Persentase Penduduk berakses air mimun (Non Perpipaan)	%	28,66	30,13	31,14	32,15	33,16	34,18	35,19	35,19
5	Persentase sarana Persampahan Regional	%	-	-	-	100	100	100	100	100
6	Persentasi Akses Sanitasi	%	70,00	71,00	73,26	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
7	Proporsi drainase kabupaten dalam kondisi baik	%	92,22	92,85	93,69	94,53	95,37	96,22	97,06	97,06
8	Persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase kondisi gedung pemerintah baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase desa dan Kelurahan yang diawasi atas perizinan bangunan gedung atau prasarana bangunan	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	%	49,27	54,33	54,83	55,33	55,83	56,33	56,83	56,83
12	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	94,63	94,63	95,50	96,50	97,50	98,50	99,50	99,50
13	Persentase tenaga terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase permohonan IUJK yang terlayani	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dan RDTR	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
16	Ketersediaan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten yang dapat diakses oleh masyarakat	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	persentase perbaikan rumah akibat bencana	%	-	50,00	55,00	60,00	75,00	80,00	90,00	90,00
2	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten	%	-	-	-	50,00	60,00	75,00	85,00	85,00
3	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	%	-	50,00	50,00	60,00	75,00	85,00	90,00	90,00
4	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten	%	-	55,00	55,00	60,00	75,00	85,00	90,00	90,00
5	Persentase kawasan permukiman di kabupaten yang ditangani	%	-	50,00	50,00	60,00	75,00	80,00	90,00	90,00
6	Persentase kondisi PSU dalam kondisi baik	%	-	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
7	Persentase Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	%	-	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
8	Persentase sertifikat yang di terbitkan	%	-	100,00	-	65,00	75,00	80,00	90,00	90,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rasio PPNS terhadap Jumlah Pegawai	%	-	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
4	Persentase PNS Satpol yang mengikuti Diklat/ Pendidikan	%	-	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
5	Persentase anggota linmas yang bersertifikasi	%	-	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
6	Persentase Peningkatan Pelayanan, Responsifitas dalam Penangani Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Peningkatan responsifitas dalam penanganan kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1	Persentase KAT yang ditangani	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase PMKS yang tertangani	%	17,00	25,00	40,00	60,00	70,00	75,00	80,00	80,00
4	Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh pelindungan dan Jaminan Sosial	%	78,00	84,00	88,00	93,00	95,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase kampung siaga yang terbentuk	%	-	10,00	17,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00
7	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	73,00	78,00	80,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
1	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tenaga kerja	Ada/ Tidak ada	-	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi	%	-	70,00	75,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	%	-	85,00	90,00	90,00	95,00	95,00	100,00	100,00
4	Persentase penempatan pencari kerja	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase konflik ketenagakerjaan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Persentase Lembaga PUG yang aktif	%	-	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	65,00	65,00
2	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	%	25,00	28,00	33,00	37,00	42,00	46,00	48,00	48,00
3	Persentase perangkat Daerah Yang responsif gender	%	-	50,00	58,00	65,00	72,00	77,00	80,00	80,00
4	Persentase pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Keluarga dan anak yang terlayani	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	%	-	25,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00
7	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan disajikan sesuai standar	%	-	32,00	40,00	45,00	50,00	60,00	70,00	70,00
8	Persentase Pemenuhan Hak Anak	%	-	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	90,00	90,00
9	Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak	%	-	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00	50,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
10	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang di tangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
1	Persetase lumbung pangan masyarakat yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	nilai	72,30	72,30	76,40	78,70	80,20	82,10	83,40	83,40
3	Persentase Kesediaan Pangan Utama	%	87,75	88,18	88,62	89,06	89,51	89,95	90,40	90,40
4	Persentase Desa Rawan Pangan	%	8,54	8,54	8,54	7,32	6,10	4,88	3,66	3,66
5	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
1	Persentase pengajuan izin lokasi yang disetujui	%	-	-	-	60,00	65,00	65,00	80,00	80,00
2	Persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi	%	-	50,00	50,00	65,00	75,00	80,00	95,00	95,00
3	Cakupan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	-	50,00	50,00	55,00	75,00	80,00	90,00	90,00
4	Persentase tanah milik Masyarakat yang terfasilitasi untuk mendapatkan sertifikat	%	-	55,00	60,00	65,00	85,00	90,00	100,00	100,00
5	Persentase pengelolaan tanah kosong yang dimanfaatkan	%	-	-	-	55,00	60,00	85,00	90,00	90,00
6	Persentase luas lahan yang bersertifikat	%	-	-	-	50,00	50,00	65,00	85,00	85,00
7	Ketersediaan dokumen rencana penggunaan tanah	%		-	-	50,00	65,00	75,00	90,00	90,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
1	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Indeks Kualitas Air	%	-	58,75	58,85	58,95	59,05	59,15	59,25	59,25
3	Indeks Kualitas Udara	%	29,81	84,31	84,41	84,51	84,61	84,71	84,81	84,81
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	29,14	60,61	62,31	64,02	65,72	67,42	69,12	69,12
5	Luas RTH yang tersedia	%	-	70,00	75,00	75,00	77,25	77,85	78,00	78,00
6	Persentase Perizinan Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin PPLH yang diterbitkan	%	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
8	Presentasi Data MHA yang tersedia	%	-	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
9	Persentase Masyarakat / Komunitas peduli Lingkungan Hidup yang mendapatkan Edukasi Lingkungan Hidup	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase pelatihan, pendidikan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Yang dilakasanakan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Klasifikasi Adipura	Peringkat	-	Kelas IV	Kelas IV	Kelas IV	Kelas IV	Kelas III	Kelas III	Kelas III
12	Persentase Aduan Lingkungan Hidup yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase Jumlah Sampah yang terkurangi melalui 3R	%	2,68	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
14	Persentase TP3SR di Desa dan Kelurahan	%	9,76	10,98	13,41	15,85	18,29	20,73	23,17	23,17
15	Persentase Cakupan area penanganan persampahan	%	63,45	63,45	63,80	64,20	64,55	64,75	64,95	64,95
16	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	%	65,12	65,12	65,55	65,80	66,11	66,35	66,50	66,50



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1	Persentase Kepemilikan KTP	%	86,48	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Kepemilikan KK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Kepemilikan KIA	%	10,00	15,00	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	45,00
4	Persentase Kepemilikan Akte	%	92,00	95,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki akte kelahiran	%	91,78	93,22	95,20	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Cakupan dokumen akta pengakuan anak dan pengesahan anak	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase OPD / lembaga pengguna yang memanfaatkan data (MOU) Kependudukan	%	-	10,00	20,00	35,00	50,00	55,00	60,00	60,00
8	Persentase ketersediaan database kependudukan	%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentasi jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	%	-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	-	100,00	100,00	100,00	88,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Jumlah Kerja Sama Desa	%	72,30		76,40	78,70	80,20	82,10	83,40	83,40
3	Cakupan pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	80,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase desa Berkembang; Mandiri; Maju	%	-	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	35,00
5	Persentasi BUMDesa yang aktif	%	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00
6	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang dibina	%	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	%	-	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1	TFR (Total Fertility Rate)	Nilai	2,68	2,60	2,58	2,56	2,54	2,52	2,50	2,50
2	Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR)	%	68,83	71,77	73,21	74,11	75,02	75,93	76,84	76,84
3	Presentase peserta KB aktif MKJP	%	28,96	29,13	30,00	32,00	37,00	42,00	48,00	48,00
4	Persentase Kampung KB	%	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	36,00	37,00	37,00
5	Unmetneed	%	9,49	10,51	10,17	9,82	9,47	9,12	9,00	9,00
6	Persentase PUS Kelompok Ketahanan Keluarga yang berKB	%	75,49	76,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	85,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
1	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	-	-	79,00	79,00	79,50	80,50	81,50	81,50
2	Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum	%	85,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
3	Cakupan Pengelolaan Pelayaran	%	-	100,00						100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Persentase PPID yang aktif	%	10,00	10,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi	%	50,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3	Jumlah sistem informasi yang sudah terintegrasi	SIM	-	-	-	2,00	4,00	6,00	6,00	6,00
4	Jumlah layanan yang sudah berbasis digital	Layanan	-	-	-	1	1	2	2	2
5	Indeks SPBE	Poin	-	2,00	2,5	2,7	2,8	3,0	3,1	3,1



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
6	Persentase perangkat daerah sudah tersambung jaringan internet	%	100,00	15,00	85,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
1	Persentase KSP Yang Difasilitasi Perizinannya	%		-	-	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2	Persentase koperasi yang aktif	%	55,00	21,10	21,10	21,10	36,70	36,70	36,70	36,70
3	Persentase KSP/USP Koperasi yang sesuai dengan kriteria penilaian	%	-	-	-	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50
4	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	-	-	-	0,92	0,92	0,92	0,92	10,13
5	Persentase Pengelola Koperasi Yang Bersertifikat	%	2,76	3,22	4,88	4,88	4,88	4,88	6,44	32.86
6	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	-	-	-	5,05	5,05	5,05	5,05	20,18
7	Persentase UMKM Yang Diberdayakan	%	6,67	9,33	19,47	5,43	5,43	5,43	7,10	52,20
8	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	%	3,33	-	-	4,33	4,33	4,33	6,00	20,00
9	Persentase Usaha Mikro Yang Melakukan Kemitraan	%	1,67	1,67	0,33	0,20	0,20	0,20	0,20	2,07
10	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	%	3,33	0,33	-	0,16	0,16	0,16	0,20	1,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
1	Dokumen Pengembagan iklim penanaman modal	Dok	-	2	2	2	2	2	2	2
2	Persentase kegiatan promosi penanaman modal	%	-	20,00	30	40	50	60	70	70,00
3	Jumlah Nilai Investasi	Milyar Rp	82,00	97,00	107,00	140,00	145,00	160,00	200,00	200,00
4	Dokumen Strategi Penanaman Modal	ada/ tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
5	Nilai IKM (Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan/Non Perizinan)	Point	-	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
6	Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM(Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	%	-	70,00	80,00	85,00	85,00	95,00	100,00	100,00
8	Persentase data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi	%	-	20,00	30,00	45,00	60,00	75,00	80,00	80,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
1	Cakupan Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	%	-	-	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	%	-	-	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%			100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
1	Persentase Data Statistik Sektoral yang terpenuhi	%	-	5,00	5,00	25,00	3O	35,00	40,00	40,00
2	Persentase OPD yang menyediakan Data Statistik Sektoral	%	-	5,00	5,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	%	-	5,00	5,00	40,00	55,00	55,00	75,00	75,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
1	Persentase event kesenian skala Nasional/regionla yang dilaksanakan	%	37,50	37,50	50,00	62,50	75,00	87,50	100,00	100,00
2	Persentase lembaga adat yang di bina	%	66,66	66,66	75,00	83,33	91,66	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Kelompok Kesenian yang dibina	%	6,00	8,00	10,00	13,00	16,00	20,00	25,00	25,00
4	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	45,45	45,45	54,55	63,64	72,73	81,82	90,91	90,91
5	Persentase Cagar Budaya yang di kelola secara terpadu	%	73,68	73,68	78,95	84,21	89,47	94,74	100,00	100,00
6	Persentase sarana dan prasarana museum dalam kondisi baik	%	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
1	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	-	20,00	25,00		35,00	40,00	50,00	50,00
2	Persentase Perpustakaan yang di bina	%	88,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase kelompok Literasi yang dibina	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentasi Naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (di-gitalisasi)/ terdaftar dalam wilayahnya	%	-	15,00	19,00	21,00	24,00	26,00	28,00	28,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	62,50	67,50	72,50	80,00	87,50	92,50	100,00	100,00
2	Persentase Arsip yang didokumentasikan (scan)	%	3,80	4,00	8,00	15,00	23,00	26,00	30,00	30,00
3	Persentase Penggunaan Arsip bersifat tertutup yang dikelola	%	-	-	-	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1	Presentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Presentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Presentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Presentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	110.773	112.988	115.248	117.553	119.904	122.302	124.748	124.748
2	Jumlah Objek Wisata Super prioritas yang dikembangkan	Objek	3	3	3	4	4	5	5	5
3	Persentase sarana dan Prasarana di Objek wisata prioritas dalam kondisi baik	%	60	60	65	70	72	75	80	80
4	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	0,45	0,47	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00	1,00
5	Persentase promosi pariwisata	%	-	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase ruang berekspresi pelaku ekonomi kreatif yang di bangun	%	37,5	37,50	50	62,50	75	87,5	100	100
7	Persentase peserta Pelatihan yang memahami Materi pelatihan	%	80	80,00	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00
8	Persentase SDM ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi (terlatih)	%	0	13,33	33,33	60,00	73,33	93,33	100,00	100,00
9	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi (Uji Kompetensi)	%	26,67	33,33	46,67	73,33	80,00	93,33	100,00	100,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
1	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
2	Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura	%	5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
3	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
4	Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan	%	5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
5	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi baik	%	75	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Ternak	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Hama Penyakit yang ditangani	%	-	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
8	Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani	%	-	60,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
9	Persentase Pemberian Rekomendasi Pada Kelompok Tani Berkelanjutan yang ditindaklanjuti	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Penyuluh yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase kelembagaan Petani yang di Bina	%	60	68,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
1	Persentase permohonan ijin usaha perdagangan yang memperoleh Rekomendasi	%	0	-	-	77,00	77,00	77,00	77,00	3,09
2	Persentase pasar Rakyat dalam kondisi Baik	%	45,45	50,00	54,55	59,09	63,64	68,18	86,36	86,36
3	Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Usaha Komoditi Ekspor Yang Mendapat Fasilitasi Pengembangan	%	0	-	-	40,00	40,00	40,00	60,00	60,00
5	Persentase UTTP yang bertanda Tera Sah	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
6	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	%	0	-	-	20,00	20,00	20,00	43,00	10,30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
1	Persentase Sentra Industri Aktif	%	33,33	33,33	33,33	66,67	66,67	100,00	100,00	100,00
2	Persentase IKM Yang Menempati Sentra Industri	%	33,33	33,33	33,33	66,67	66,67	100,00	100,00	100,00
3	Persentase IKM Yang Memiliki Rekomendasi Penerbitan Izin	%	8,33	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00
4	Persentase IKM Yang Terdaftar di SIINas	%	8,33	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Transmigrasi	Dokumen	ada	-	-	1	1	1	1	1
2	Persentase Transmigrasi Umum	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Kawasan Transmigrasi yang di kembangkan	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
SEKRETARIAT DAERAH										
1	Persentase Kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang di fasilitasi dan terdokumentasi dengan Baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentaae OPD dengan nilai IKM yang kategori Baik	%	-	70,00	75,00	80,00	80,00	90,00	100,00	100,00
3	Persentase tingkat Pemenuhan Data Indikator dalam dokumen LPPD	%	-	85,00	85,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Produk hukum yang ditetapkan/ diterbitkan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Fasilitasi layanan Kesra	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
6	Persentaae Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemantauan SDA	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SEKRETARIAT DPRD										
1	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang untuk anggota DPRD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD yang di fasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
PERENCANAAN										
1	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase dokumen evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tingkat capaiannya diatas 90%	%	82,00	38,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00
4	Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang tingkat capaiannya diatas 90%	%	85,00	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
5	Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tingkat capaiannya diatas 90%	%	78,00	36,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
KEUANGAN										
1	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SiLPA Terhadap APBD	%	1,64	1,60	1,50	1,40	1,30	1,20	1,00	1,00
3	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah daerah	%	99,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
5	Ketepatan waktu pengesahan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
6	Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	-	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
7	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	%	(19,56)	3,00	5,00	5,33	5,38	5,44	5,50	5,50
8	Persentase peningkatan Pendapatan	%	(5,32)	(1,50)	5,00	5,16	5,18	5,23	5,28	5,28
KEPEGAWAIAN										
1	Persentase data kepegawaian yang up to date	%	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	-	10	15,00	20,00	20,00	25,00	30,00	30,00
3	Indek kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	%	-	70	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
1	Persentase pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan Organisasi	%	-	10,00	10,00	15,00	16,00	17,00	19,00	19,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural	%	36,49	37,00	37,50	38,00	38,50	39,00	40,00	40,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
1	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Terdiseminasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
INSPEKTORAT DAERAH										
1	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklajuti	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah OPD yang dievaluasi SAKIPnya minimal B	OPD	11,00	11,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	20,00
4	Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) da-tau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)	OPD	-	1	4	6	9	12	15	15
UNSUR KEWILAYAHAN										
KECAMATAN										
1	Tingkat kepuasan terhadap layanan publik	nilai	75,00	75,00	75,00	80,00	80,00	85,00	90,00	90,00



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
2	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi	%	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
3	Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan	%	50,00	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	60,00
4	Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
5	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa dan melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu	%	50,00	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	60,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
1	Persentase Konflik Sara yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Serta Budaya Politik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penigkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aspek Daya Saing Daerah										
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	849.116	855.000	875.000	885.000	895.000	910.000	915.000	915.000
2	Nilai tukar petani	Poin	113,39	114,05	114,55	114,85	115,05	115,25	115,40	115,40
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	48,62	48,74	48,94	49,02	49,21	49,29	49,56	49,56

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					I	II	III	IV	V	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
4	Produktivitas total daerah Berdasarkan PDRB ADBH	Poin	59,4	60,1	60,3	60,6	60,9	61,3	61,5	61,5
5	Indeks Desa Membangun (Desa kategori "Maju")	Desa	2	3	4	5	6	7	8	8
6	Rasio Ekspor terhadap Impor	Rasio	0,77	0,73	0,71	0,69	0,67	0,65	0,63	0,63
7	Total Posisi Pinjaman yang diberikan Bank Umum dan BPR	Juta Rupiah	1 305 857	1 345 000	1 365 000	1 375 000	1 395 000	1 410 000	1 430 000	1 430 000
8	Jumlah Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diberikan Bank Umum dan BPR menurut Skala Usaha	Juta Rupiah	414 726	424 000	434 000	444 000	470 000	490 000	510 000	510 000
9	Rasio Ketersediaan Listrik	Rasio	99,90	99,91	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96	99,96
10	Angka kriminalitas yang tertangani	Kasus	257	240	230	220	200	190	180	180
11	Rasio ketergantungan	Rasio	0,56	0,54	0,53	0,52	0,51	0,5	0,49	0,49



Tabel 8.3

Target Dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Bidang Pendidikan										
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	100	100	100	100	100	100
Bidang Kesehatan										
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	70.5	100	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	69.7	100	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	99.5	100	100	100	100	100	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	55.8	100	100	100	100	100	100



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	58.0	100	100	100	100	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	53.2	100	100	100	100	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	36.9	100	100	100	100	100	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	62.9	100	100	100	100	100	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita *diabetes mellitus* yang mendapatkan layanan kesehatan	%	80.1	100	100	100	100	100	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	90.9	100	100	100	100	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan layanan kesehatan	%	98.6	100	100	100	100	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	45.8	100	100	100	100	100	100



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Bidang Pekerjaan Umum										
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	69.32	100	100	100	100	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	70.2	100	100	100	100	100	100
Bidang Perumahan Rakyat										
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	-	100	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kot a yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	-	100	100	100	100	100	100
Bidang Trantibumlinmas										
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	95	100	100	100	100	100	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	%	100	100	100	100	100	100	100



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
	terhadap bencana	pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana								
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
Bidang Sosial										
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	-	100	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	-	100	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	-	100	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	-	100	100	100	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap &	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang	%	-	100	100	100	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
	paska bencana bagi korban bencana kab/kota	memperoleh perlindungan dan jaminan social								

Tabel 8.4

Target Dan Pencapaian SDG's Kabupaten Majene

1 **Indikator 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan**

Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 70% Tercapai Tahun 2021 Dengan Upaya Tambahan

Target Proyeksi Tahun 2026: 76.06%

Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016	83.87%		
2017	60.56%		
2018	78.01%		
2019	85.79%		
2020	69.69%		
2021		74.64%	72.65%
2022		74.33%	73.33%
2023		74.02%	74.01%
2024		73.71%	74.70%
2025		73.39%	75.38%
2026		73.08%	76.06%
2027		72.77%	76.75%
2028		72.45%	77.43%
2029		72.14%	78.11%
2030		71.83%	78.80%

Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya kepemilikan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar

Rekomendasi:

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

2 **Indikator 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan**

Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 100% Tercapai Tahun 2024 Tanpa Upaya Tambahan (BAU)

Target Proyeksi Tahun 2026: 100%

Analisis DDDTLH: Jasa Lingkungan Penyediaan Air dan Jasa Lingkungan Pengaturan Air

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016			
2017	70.99%		
2018	75.47%		
2019	79.95%		
2020	84.43%		

	2021		88.91%	
	2022		93.39%	
	2023		97.87%	
	2024		100.00%	
	2025		100.00%	
	2026		100.00%	
	2027		100.00%	
	2028		100.00%	
	2029		100.00%	
	2030		100.00%	
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya kepemilikan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
	2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
3	**Indikator 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan**			
	Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat Menjadi 100% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 88.79%			
	Analisis DDDTLH: Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	65.92%		
	2017	70.80%		
	2018	74.14%		
	2019	69.30%		
	2020	71.00%		
	2021		72.83%	74.77%
	2022		73.70%	77.57%
	2023		74.56%	80.37%
	2024		75.43%	83.18%
	2025		76.29%	85.98%
	2026		77.16%	88.79%
	2027		78.03%	91.59%
	2028		78.89%	94.39%
	2029		79.76%	97.20%
	2030		80.62%	100.00%
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya kepemilikan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
	2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
	4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
4	**Indikator 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat**			
	Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 94,78% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 92.38%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			

	Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
	2016	93.13%		
	2017	100.20%		
	2018	101.44%		
	2019	87.13%		
	2020	87.13%		
	2021		86.29%	89.39%
	2022		83.78%	89.99%
	2023		81.27%	90.59%
	2024		78.76%	91.19%
	2025		76.26%	91.79%
	2026		73.75%	92.38%
	2027		71.24%	92.98%
	2028		68.74%	93.58%
	2029		66.23%	94.18%
	2030		63.72%	94.78%
	Isu Strategis TPB: Masih rendahnya akses terhadap pelayanan dasar			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
	3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
5	**Indikator 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat**			
	Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 82,2% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 73.92%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	75.88%		
	2017	78.62%		
	2018	81.37%		
	2019	60.38%		
	2020	60.42%		
	2021		56.59%	63.57%
	2022		51.67%	65.64%
	2023		46.75%	67.71%
	2024		41.84%	69.78%
	2025		36.92%	71.85%
	2026		32.01%	73.92%
	2027		27.09%	75.99%
	2028		22.17%	78.06%
	2029		17.26%	80.13%
	2030		12.34%	82.20%
	Isu Strategis TPB: Masih rendahnya akses terhadap pelayanan dasar			
	Rekomendasi: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
6	**Indikator 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial**			
	Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 151 ribu Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 90645			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	40		

	2017	133		
	2018	62		
	2019			
	2020			
	2021		122	15200
	2022		133	30289
	2023		144	45378
	2024		155	60467
	2025		166	75556
	2026		177	90645
	2027		188	105733
	2028		199	120822
	2029		210	135911
	2030		221	151000
	Isu Strategis TPB: Masih rendahnya ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan terhadap kejadian ekstrim terkait iklim			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
7	**Indikator 1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial**			
	Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 81,5 ribu Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 48945			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	40		
	2017	133		
	2018	62		
	2019			
	2020			
	2021		122	8250
	2022		133	16389
	2023		144	24528
	2024		155	32667
	2025		166	40806
	2026		177	48945
	2027		188	57083
	2028		199	65222
	2029		210	73361
	2030		221	81500
	Isu Strategis TPB: Masih rendahnya ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan terhadap kejadian ekstrim terkait iklim			
	Rekomendasi: PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
8	**Indikator 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita**			
	Tujuan TPB: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun menjadi 17% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 19.65%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	3.29%		
	2017	7.01%		

	2018	15.39%		
	2019	26.39%		
	2020	17.74%		
	2021		28.45%	22.96%
	2022		33.28%	22.30%
	2023		38.10%	21.63%
	2024		42.93%	20.97%
	2025		47.76%	20.31%
	2026		52.59%	19.65%
	2027		57.42%	18.99%
	2028		62.24%	18.32%
	2029		67.07%	17.66%
	2030		71.90%	17.00%
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya akses bagi semua orang terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun			
	Rekomendasi:			
	ROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
9	**Indikator 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe**			
	Tujuan TPB: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun Tercapai Tahun 2023 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 3.43%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016			
	2017	2.36%		
	2018	6.30%		
	2019	10.00%		
	2020	6.30%		
	2021		10.12%	7.71%
	2022		11.67%	6.85%
	2023		13.22%	6.00%
	2024		14.78%	5.14%
	2025		16.33%	4.28%
	2026		17.88%	3.43%
	2027		19.43%	2.57%
	2028		20.98%	1.71%
	2029		22.54%	0.86%
	2030		24.09%	0.00%
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya akses bagi semua orang terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun			
	Rekomendasi: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
10	**Indikator 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih**			
	Tujuan TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 95% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 90.32%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	89.57%		
	2017	98.46%		

	2018	91.02%		
	2019	87.09%		
	2020	80.30%		
	2021		80.32%	84.48%
	2022		77.33%	85.65%
	2023		74.34%	86.82%
	2024		71.35%	87.99%
	2025		68.36%	89.15%
	2026		65.37%	90.32%
	2027		62.38%	91.49%
	2028		59.39%	92.66%
	2029		56.40%	93.83%
	2030		53.41%	95.00%
	Isu Strategis TPB: Masih kurangnya upaya untuk mengurangi rasio angka kematian ibu			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
11	**Indikator 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan**			
	Tujuan TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 85% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 81.01%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	83.59%		
	2017	60.56%		
	2018	78.01%		
	2019	85.79%		
	2020	69.69%		
	2021		74.76%	76.01%
	2022		74.50%	77.01%
	2023		74.24%	78.01%
	2024		73.99%	79.01%
	2025		73.73%	80.01%
	2026		73.47%	81.01%
	2027		73.22%	82.00%
	2028		72.96%	83.00%
	2029		72.70%	84.00%
	2030		72.44%	85.00%
	Isu Strategis TPB: Masih adanya angka kematian ibu			
	Rekomendasi: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
12	**Indikator 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi**			
	Tujuan TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 95% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 89.87%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	81.13%		
	2017	76.12%		

	2018	79.18%		
	2019	86.88%		
	2020	79.69%		
	2021		82.96%	83.46%
	2022		83.75%	84.74%
	2023		84.54%	86.02%
	2024		85.33%	87.31%
	2025		86.12%	88.59%
	2026		86.90%	89.87%
	2027		87.69%	91.15%
	2028		88.48%	92.44%
	2029		89.27%	93.72%
	2030		90.06%	95.00%
	Isu Strategis TPB: Masih adanya kematian bayi baru lahir dan balita			
	Rekomendasi: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
13	**Indikator 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk**			
	Tujuan TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun menjadi 245 Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 338			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	276		
	2017	299		
	2018	286		
	2019	472		
	2020			
	2021		535	454
	2022		592	431
	2023		650	407
	2024		707	384
	2025		765	361
	2026		822	338
	2027		880	315
	2028		937	291
	2029		995	268
	2030		1052	245
	Isu Strategis TPB: Masih adanya penderita tuberculosis dan penyakit menular lainnya			
	Rekomendasi: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
14	**Indikator 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern**			
	Tujuan TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 23,5% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 16.56%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	5.80%		
	2017	5.87%		
	2018			
	2019			
	2020			

	2021		6.22%	7.89%
	2022		6.29%	9.62%
	2023		6.36%	11.36%
	2024		6.43%	13.09%
	2025		6.50%	14.83%
	2026		6.57%	16.56%
	2027		6.64%	18.30%
	2028		6.71%	20.03%
	2029		6.78%	21.77%
	2030		6.85%	23.50%
	Isu Strategis TPB: Masih kurangnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi			
	Rekomendasi:			
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
15	**Indikator 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat**			
	Tujuan TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 114,09% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 111.03%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	109.36%		
	2017	101.08%		
	2018	102.91%		
	2019	113.45%		
	2020	103.91%		
	2021		106.58%	107.20%
	2022		106.73%	107.97%
	2023		106.88%	108.73%
	2024		107.02%	109.50%
	2025		107.17%	110.26%
	2026		107.32%	111.03%
	2027		107.47%	111.79%
	2028		107.61%	112.56%
	2029		107.76%	113.32%
	2030		107.91%	114.09%
	Isu Strategis TPB: Masih rendahnya akses terhadap pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
	3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
16	**Indikator 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat**			
	Tujuan TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 106,94% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 99.78%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	77.54%		
	2017	104.41%		
	2018	84.16%		

	2019	92.94%		
	2020	84.25%		
	2021		89.24%	90.84%
	2022		89.44%	92.63%
	2023		89.63%	94.42%
	2024		89.83%	96.21%
	2025		90.03%	98.00%
	2026		90.22%	99.78%
	2027		90.42%	101.57%
	2028		90.61%	103.36%
	2029		90.80%	105.15%
	2030		91.00%	106.94%
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya penyelesaiaan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
	3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
17	**Indikator 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun**			
	Tujuan TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 8,8 tahun Tercapai Tahun 2022 Tanpa Upaya Tambahan (BAU)			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 9.70			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	7.74		
	2017	7.81		
	2018	8.14		
	2019			
	2020			
	2021		8.7	
	2022		8.9	
	2023		9.1	
	2024		9.3	
	2025		9.5	
	2026		9.7	
	2027		9.9	
	2028		10.1	
	2029		10.3	
	2030		10.5	
	Isu Strategis TPB: Masih rendahnya akses terhadap pendidikan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas			
	Rekomendasi:			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
18	**Indikator 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**			
	Tujuan TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 77,2% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 46.32%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016			

	2017	83.16%		
	2018	81.60%		
	2019	50.37%		
	2020	61.35%		
	2021		44.96%	52.68%
	2022		35.29%	50.73%
	2023		25.62%	48.78%
	2024		15.96%	46.84%
	2025		6.29%	44.89%
	2026		0.00%	46.32%
	2027		0.00%	54.04%
	2028		0.00%	61.76%
	2029		0.00%	69.48%
	2030		0.00%	77.20%
	Isu Strategis TPB: Masih rendahnya akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan dan pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
	3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
19	**Indikator 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi**			
	Tujuan TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat			
	Tercapai Tahun 2021 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 90.01%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	83.63%		
	2017	84.29%		
	2018	89.40%		
	2019	74.01%		
	2020	73.78%		
	2021		72.03%	77.52%
	2022		69.03%	80.02%
	2023		66.03%	82.52%
	2024		63.03%	85.02%
	2025		60.04%	87.51%
	2026		57.04%	90.01%
	2027		54.04%	92.51%
	2028		51.04%	95.01%
	2029		48.04%	97.50%
	2030		45.05%	100.00%
	Isu Strategis TPB: Masih adanya disparitas gender dalam pendidikan, dan belum terjaminnya akses yang sama untuk semua tingkat dan pelatihan kejuruan pendidikan			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
	3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			



20	**Indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun**
	Tujuan TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 96,1% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan
	Target Proyeksi Tahun 2026: 95.8%
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016			
2017	96.00%		
2018	96.00%		
2019	96.00%		
2020	95.20%		
2021		95.40%	95.50%
2022		95.30%	95.60%
2023		95.20%	95.60%
2024		95.10%	95.70%
2025		95.00%	95.80%
2026		95.00%	95.80%
2027		94.90%	95.90%
2028		94.80%	96.00%
2029		94.70%	96.00%
2030		94.60%	96.10%

	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu memiliki kemampuan literasi dan numerasi
	Rekomendasi:
	1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
	3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	4. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
21	**Indikator 4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun**
	Tujuan TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat Tercapai Tahun 2021 Tanpa Upaya Tambahan (BAU)
	Target Proyeksi Tahun 2026: 100%
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016			
2017			
2018	97.01%		
2019	98.95%		
2020	98.03%		
2021		99.02%	
2022		99.53%	
2023		100.00%	
2024		100.00%	
2025		100.00%	
2026		100.00%	
2027		100.00%	
2028		100.00%	
2029		100.00%	
2030		100.00%	

	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu memiliki kemampuan literasi dan numerasi
	Rekomendasi:
	1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
	3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	4. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
22	**Indikator 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan**
	Tujuan TPB: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 100% Tercapai Tahun 2024 Tanpa Upaya Tambahan (BAU)
	Target Proyeksi Tahun 2026: 100%
	Analisis DDDTLH: Jasa Lingkungan Penyediaan Air dan Jasa Lingkungan Pengaturan Air

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016			
2017	70.99%		
2018	75.47%		
2019	79.95%		
2020	84.43%		
2021		88.91%	
2022		93.39%	
2023		97.87%	
2024		100.00%	
2025		100.00%	
2026		100.00%	
2027		100.00%	
2028		100.00%	
2029		100.00%	
2030		100.00%	

	Isu Strategis TPB: Belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua
	Rekomendasi:
	1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
23	**Indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak**
	Tujuan TPB: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 100% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan
	Target Proyeksi Tahun 2026: 88.79%
	Analisis DDDTLH: Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016	65.92%		
2017	70.80%		
2018	74.14%		
2019	69.30%		
2020	71.00%		
2021		72.83%	74.77%
2022		73.70%	77.57%
2023		74.56%	80.37%
2024		75.43%	83.18%
2025		76.29%	85.98%
2026		77.16%	88.79%
2027		78.03%	91.59%

	2028		78.89%	94.39%
	2029		79.76%	97.20%
	2030		80.62%	100.00%
	Isu Strategis TPB: Belum tercapainya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
	2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
	4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
24	**Indikator 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah**			
	Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 39 daerah Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 35			
	Analisis DDDTLH: Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	30		
	2017	30		
	2018	30		
	2019	30		
	2020	30		
	2021		30	31
	2022		30	32
	2023		30	33
	2024		30	34
	2025		30	35
	2026		30	35
	2027		30	36
	2028		30	37
	2029		30	38
	2030		30	39
	Isu Strategis TPB: Masih rendahnya ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan terhadap kejadian ekstrim terkait iklim			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
	2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
25	**Indikator 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun**			
	Tujuan TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun menjadi 15,4%			
	Proyeksi capaian indikator ini tidak dapat diketahui karena baseline data yang tersedia hanya 1 (satu) tahun			
	Target Proyeksi Tahun 2026: -			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016			
	2017			
	2018			
	2019			
	2020	1.32%		
	2021			
	2022			
	2023			

	2024			
	2025			
	2026			
	2027			
	2028			
	2029			
	2030			
	Isu Strategis TPB: Masih adanya angka kematian dini akibat penyakit tidak menular			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
26	**Indikator 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern**			
	Tujuan TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 66% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 59.93%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	56.00%		
	2017	57.00%		
	2018	53.19%		
	2019			
	2020			
	2021		49.30%	52.34%
	2022		47.78%	53.85%
	2023		46.26%	55.37%
	2024		44.74%	56.89%
	2025		43.22%	58.41%
	2026		41.70%	59.93%
	2027		40.18%	61.45%
	2028		38.66%	62.96%
	2029		37.14%	64.48%
	2030		35.62%	66.00%
	Isu Strategis TPB: Masih kurangnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi			
	Rekomendasi:			
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
27	**Indikator 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau**			
	Tujuan TPB: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 118,6 m3/detik Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 100.64			
	Analisis DDDTLH: Jasa Lingkungan Penyediaan Air dan Jasa Lingkungan Pengaturan Air			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	73.69		
	2017	73.69		
	2018	73.69		
	2019			
	2020			
	2021		73.69	78.18
	2022		73.69	82.67
	2023		73.69	87.16

	2024		73.69	91.65
	2025		73.69	96.15
	2026		73.69	100.64
	2027		73.69	105.13
	2028		73.69	109.62
	2029		73.69	114.11
	2030		73.69	118.6
	Isu Strategis TPB: Belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
	2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
28	**Indikator 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)**			
	Tujuan TPB: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun menjadi 30% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 104.43%			
	Analisis DDDTLH: Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016			
	2017			
	2018	216.08%		
	2019	216.08%		
	2020	216.08%		
	2021		216.08%	197.47%
	2022		216.08%	178.86%
	2023		216.08%	160.26%
	2024		216.08%	141.65%
	2025		216.08%	123.04%
	2026		216.08%	104.43%
	2027		216.08%	85.82%
	2028		216.08%	67.22%
	2029		216.08%	48.61%
	2030		216.08%	30.00%
	Isu Strategis TPB: Masih adanya angka kematian dan jumlah orang terdampak yang disebabkan oleh bencana			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
	2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
29	**Indikator 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur**			
	Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun menjadi 7-8% Tercapai Tahun 2029 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 9.60%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	14.89%		
	2017	13.94%		
	2018	13.79%		
	2019	13.72%		
	2020	13.73%		
	2021		13.25%	12.86%
	2022		13.00%	12.20%

	2023		12.74%	11.55%
	2024		12.49%	10.90%
	2025		12.24%	10.25%
	2026		11.98%	9.60%
	2027		11.73%	8.95%
	2028		11.47%	8.30%
	2029		11.22%	7.65%
	2030		10.97%	7.00%
	Isu Strategis TPB: Masih adanya yang hidup dalam kemiskinan			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
30	**Indikator 1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN**			
	Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 100% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 98.40%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	97.07%		
	2017	93.83%		
	2018	97.07%		
	2019			
	2020			
	2021		95.99%	96.39%
	2022		95.99%	96.79%
	2023		95.99%	97.19%
	2024		95.99%	97.59%
	2025		95.99%	98.00%
	2026		95.99%	98.40%
	2027		95.99%	98.80%
	2028		95.99%	99.20%
	2029		95.99%	99.60%
	2030		95.99%	100.00%
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya kepemilikan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
31	**Indikator 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah**			
	Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat Tercapai Tahun 2022 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 81.27%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	63.25%		
	2017	57.70%		
	2018	58.77%		
	2019			
	2020			
	2021		50.95%	57.87%
	2022		48.71%	62.55%
	2023		46.47%	67.23%

	2024		44.23%	71.91%
	2025		41.99%	76.59%
	2026		39.75%	81.27%
	2027		37.51%	85.96%
	2028		35.27%	90.64%
	2029		33.03%	95.32%
	2030		30.79%	100.00%
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
32	**Indikator 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)**			
	Tujuan TPB: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun Tercapai Tahun 2022 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 13.28%			
	Analisis DDDTLH: Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	25.40%		
	2017	28.10%		
	2018	36.40%		
	2019	27.70%		
	2020			
	2021		34.72%	29.88%
	2022		36.24%	26.56%
	2023		37.76%	23.24%
	2024		39.28%	19.92%
	2025		40.80%	16.60%
	2026		42.32%	13.28%
	2027		43.84%	9.96%
	2028		45.36%	6.64%
	2029		46.88%	3.32%
	2030		48.40%	0.00%
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya akses bagi semua orang terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			
	2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
33	**Indikator 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan**			
	Tujuan TPB: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi skor PPH 92,5 Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 63.22%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	16.49%		
	2017	18.78%		
	2018	18.55%		
	2019	18.26%		
	2020			
	2021		19.80%	26.61%

	2022		20.31%	33.93%
	2023		20.81%	41.25%
	2024		21.32%	48.57%
	2025		21.83%	55.90%
	2026		22.34%	63.22%
	2027		22.85%	70.54%
	2028		23.35%	77.86%
	2029		23.86%	85.18%
	2030		24.37%	92.50%
	Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya akses bagi semua orang terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			
	2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
	3. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
34	**Indikator 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR)**			
	Tujuan TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun menjadi 2,28 Tercapai Tahun 2029 Tanpa Upaya Tambahan (BAU)			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 2.40			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	2.8		
	2017	2.76		
	2018	2.72		
	2019	2.68		
	2020	2.64		
	2021		2.6	
	2022		2.56	
	2023		2.52	
	2024		2.48	
	2025		2.44	
	2026		2.4	
	2027		2.36	
	2028		2.32	
	2029		2.28	
	2030		2.24	
	Isu Strategis TPB: Masih kurangnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
	2. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
35	**Indikator 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir**			
	Tujuan TPB: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun Tercapai Tahun 2024 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 5%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	6%		
	2017	12%		
	2018	8%		
	2019			

	2020			
	2021		13%	10%
	2022		14%	9%
	2023		15%	8%
	2024		16%	7%
	2025		17%	6%
	2026		18%	5%
	2027		19%	3%
	2028		20%	2%
	2029		21%	1%
	2030		22%	0%
	Isu Strategis TPB: Masih adanya kekerasan terhadap kaum perempuan			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
	2. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
36	**Indikator 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun**			
	Tujuan TPB: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun Tercapai Tahun 2021 Tanpa Upaya Tambahan (BAU)			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 0			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	223		
	2017	236		
	2018	172		
	2019			
	2020			
	2021		108	
	2022		83	
	2023		57	
	2024		32	
	2025		6	
	2026		0	
	2027		0	
	2028		0	
	2029		0	
	2030		0	
	Isu Strategis TPB: Masih adanya perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa			
	Rekomendasi: PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
37	**Indikator 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita**			
	Tujuan TPB: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat Tercapai Tahun 2021 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 31.82%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	4.43%		
	2017	4.61%		
	2018	4.70%		
	2019	4.42%		
	2020	-2.78%		
	2021		4.56%	9.10%
	2022		4.57%	13.64%

	2023		4.57%	18.19%
	2024		4.58%	22.73%
	2025		4.59%	27.28%
	2026		4.59%	31.82%
	2027		4.60%	36.37%
	2028		4.60%	40.91%
	2029		4.61%	45.46%
	2030		4.62%	50.00%
	Isu Strategis TPB: Belum dipertahankannya pertumbuhan ekonomi per kapita			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
	2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
38	**Indikator 8.1.1.(a) PDB per kapita**			
	Tujuan TPB: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat Tercapai Tahun 2021 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 72.62			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	11.31		
	2017	24.78		
	2018	26.93		
	2019	28.61		
	2020	28.31		
	2021		35.34	38.4
	2022		39.12	45.24
	2023		42.9	52.09
	2024		46.69	58.93
	2025		50.47	65.78
	2026		54.25	72.62
	2027		58.03	79.47
	2028		61.82	86.31
	2029		65.6	93.16
	2030		69.38	100
	Isu Strategis TPB: Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi per kapita			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
	2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
39	**Indikator 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun**			
	Tujuan TPB: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat Tercapai Tahun 2021 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 9.00%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	0.01%		
	2017	0.01%		
	2018			
	2019			
	2020			
	2021		0.01%	1.51%
	2022		0.01%	3.01%

	2023		0.01%	4.51%
	2024		0.01%	6.01%
	2025		0.01%	7.51%
	2026		0.01%	9.00%
	2027		0.01%	10.50%
	2028		0.01%	12.00%
	2029		0.01%	13.50%
	2030		0.01%	15.00%
	Isu Strategis TPB: Belum meningkatnya produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
	2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
40	**Indikator 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara**			
	Tujuan TPB: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat Tercapai Tahun 2021 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 60000			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	101		
	2017	146		
	2018	159		
	2019	7		
	2020		36	10036
	2021		9	20009
	2022		0	30000
	2023		0	40000
	2024		0	50000
	2025		0	60000
	2026		0	70000
	2027		0	80000
	2028		0	90000
	2029		0	100000
	2030			
	Isu Strategis TPB: Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
	2. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
41	**Indikator 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara**			
	Tujuan TPB: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat Tercapai Tahun 2021 Tanpa Upaya Tambahan (BAU)			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 226974			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016			
	2017	53111		
	2018	122080		
	2019	148571		
	2020	98266		
	2021		145996	

	2022		162192	
	2023		178387	
	2024		194583	
	2025		210778	
	2026		226974	
	2027		243170	
	2028		259365	
	2029		275561	
	2030		291756	
	Isu Strategis TPB: Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
	2. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
42	**Indikator 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata**			
	Tujuan TPB: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat Tercapai Tahun 2021 Tanpa Upaya Tambahan (BAU)			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 704177500			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016			
	2017	148180000		
	2018	344835000		
	2019	342155000		
	2020	332320000		
	2021		429307500	
	2022		484281500	
	2023		539255500	
	2024		594229500	
	2025		649203500	
	2026		704177500	
	2027		759151500	
	2028		814125500	
	2029		869099500	
	2030		924073500	
	Isu Strategis TPB: Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
	2. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	3. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
43	**Indikator 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur**			
	Tujuan TPB: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun menjadi 7-8% Tercapai Tahun 2029 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 9.60%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	14.89%		
	2017	13.94%		
	2018	13.79%		
	2019	13.72%		

	2020	13.73%		
	2021		13.25%	12.86%
	2022		13.00%	12.20%
	2023		12.74%	11.55%
	2024		12.49%	10.90%
	2025		12.24%	10.25%
	2026		11.98%	9.60%
	2027		11.73%	8.95%
	2028		11.47%	8.30%
	2029		11.22%	7.65%
	2030		10.97%	7.00%
	Isu Strategis TPB: Masih rendahnya angka pertumbuhan pendapatan penduduk			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
44	**Indikator 10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal**			
	Tujuan TPB: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun menjadi 14%			
	Proyeksi capaian indikator ini tidak dapat diketahui karena baseline data yang tersedia hanya 1 (satu) tahun			
	Target Proyeksi Tahun 2026: -			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016			
	2017			
	2018	79.42%		
	2019			
	2020			
	2021			
	2022			
	2023			
	2024			
	2025			
	2026			
	2027			
	2028			
	2029			
	2030			
	Isu Strategis TPB: Masih rendahnya angka pertumbuhan pendapatan penduduk			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
	2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
45	**Indikator 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani**			
	Tujuan TPB: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 80% Tercapai Tahun 2023 Tanpa Upaya Tambahan (BAU)			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 84.47%			
	Analisis DDDTLH: Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	70.18%		
	2017	76.07%		
	2018	74.52%		
	2019	74.84%		
	2020			

	2021		78.25%	
	2022		79.50%	
	2023		80.74%	
	2024		81.98%	
	2025		83.23%	
	2026		84.47%	
	2027		85.71%	
	2028		86.95%	
	2029		88.20%	
	2030		89.44%	
	Isu Strategis TPB: Belum berkurangnya dampak lingkungan perkotaan khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
	2. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
	3. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	4. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LH UNTUK MASYARAKAT			
46	**Indikator 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan**			
	Tujuan TPB: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun/Berkurang Tercapai Tahun 2021 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 16.23%			
	Analisis DDDTLH: Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara, Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim dan Jasa Lingkungan Pengaturan Air			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	34.00%		
	2017	39.00%		
	2018			
	2019	39.69%		
	2020	39.79%		
	2021		41.80%	36.52%
	2022		43.03%	32.46%
	2023		44.25%	28.40%
	2024		45.48%	24.34%
	2025		46.71%	20.29%
	2026		47.94%	16.23%
	2027		49.16%	12.17%
	2028		50.39%	8.11%
	2029		51.62%	4.06%
	2030		52.84%	0.00%
	Isu Strategis TPB: Masih berlangsungnya penggurunan lahan dan tanah kritis			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
	2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
47	**Indikator 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan**			
	Tujuan TPB: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun Tercapai Tahun 2025 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 26%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	15%		

	2017	12%		
	2018	30%		
	2019			
	2020			
	2021		49%	39%
	2022		56%	36%
	2023		64%	34%
	2024		71%	31%
	2025		79%	29%
	2026		86%	26%
	2027		94%	24%
	2028		100%	20%
	2029		100%	10%
	2030		100%	0%
	Isu Strategis TPB: Belum berakhirnya eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak			
	Rekomendasi:			
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK			
48	**Indikator 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah**			
	Tujuan TPB: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 77,4% Tercapai Tahun 2022 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 84.02%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	83.26%		
	2017	80.52%		
	2018			
	2019			
	2020		72.30%	76.54%
	2021		69.56%	78.03%
	2022		66.82%	79.53%
	2023		64.08%	81.02%
	2024		61.34%	82.52%
	2025		58.60%	84.02%
	2026		55.86%	85.51%
	2027		53.12%	87.01%
	2028		50.38%	88.50%
	2029		47.64%	90.00%
	2030			
	Isu Strategis TPB: Belum optimalnya upaya dalam memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
	2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
	3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
49	**Indikator 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya**			
	Tujuan TPB: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat Tercapai Tahun 2021 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 60.00%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			

	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	21.06%		
	2017	21.92%		
	2018	18.92%		
	2019	19.59%		
	2020	1.85%		
	2021		4.44%	14.44%
	2022		0.37%	20.37%
	2023		0.00%	30.00%
	2024		0.00%	40.00%
	2025		0.00%	50.00%
	2026		0.00%	60.00%
	2027		0.00%	70.00%
	2028		0.00%	80.00%
	2029		0.00%	90.00%
	2030		0.00%	100.00%
	Isu Strategis TPB: Belum kuatnya mobilisasi sumber daya domestik bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
	2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
50	**Indikator 17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan**			
	Tujuan TPB: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 71% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 46.4%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	1.20%		
	2017	2.20%		
	2018	3.90%		
	2019	6.60%		
	2020	10.50%		
	2021		11.80%	15.60%
	2022		14.10%	21.80%
	2023		16.40%	27.90%
	2024		18.70%	34.10%
	2025		21.00%	40.20%
	2026		23.30%	46.40%
	2027		25.60%	52.50%
	2028		27.90%	58.70%
	2029		30.20%	64.80%
	2030		32.50%	71.00%
	Isu Strategis TPB: Belum meningkatnya kerjasama terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan			
	Rekomendasi: PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
51	**Indikator 17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband**			
	Tujuan TPB: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 100% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 63.8%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			

	Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
	2016	1.20%		
	2017	2.20%		
	2018	3.90%		
	2019	6.60%		
	2020	10.50%		
	2021		11.80%	18.50%
	2022		14.10%	27.60%
	2023		16.40%	36.60%
	2024		18.70%	45.70%
	2025		21.00%	54.70%
	2026		23.30%	63.80%
	2027		25.60%	72.80%
	2028		27.90%	81.90%
	2029		30.20%	90.90%
	2030		32.50%	100.00%
	Isu Strategis TPB: Belum meningkatnya kerjasama terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
	2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
52	**Indikator 1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana**			
	Tujuan TPB: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun Tercapai Tahun 2025 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 1002779333			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	543000000		
	2017	1408945000		
	2018	1456800000		
	2019			
	2020			
	2021		2963848333	2256253500
	2022		3420748333	2005558667
	2023		3877648333	1754863833
	2024		4334548333	1504169000
	2025		4791448333	1253474167
	2026		5248348333	1002779333
	2027		5705248333	752084500
	2028		6162148333	501389667
	2029		6619048333	250694833
	2030		7075948333	0
	Isu Strategis TPB: Masih rendahnya ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan terhadap kejadian ekstrim terkait iklim			
	Rekomendasi:			
	1. PENANGGULANGAN BENCANA			
	2. PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
53	**Indikator 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)**			
	Tujuan TPB: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat			
	Proyeksi capaian indikator ini tidak dapat diketahui karena baseline data yang tersedia hanya 1 (satu) tahun			

	Target Proyeksi Tahun 2026: -
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016			
2017	8989826		
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

	Isu Strategis TPB: Belum meningkatnya produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, dan nelayan
	Rekomendasi:
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
54	**Indikator 3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)**
	Tujuan TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 35
	Proyeksi capaian indikator ini tidak dapat diketahui karena baseline data yang tersedia hanya 1 (satu) tahun
	Target Proyeksi Tahun 2026: -
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016			
2017			
2018	2		
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

	Isu Strategis TPB: Masih adanya daerah dengan eliminasi filariasis dan penyakit menular lainnya
	Rekomendasi:
	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
55	**Indikator 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun**
	Tujuan TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun menjadi 5,4% Tercapai Tahun 2021 Tanpa Upaya Tambahan (BAU)
	Target Proyeksi Tahun 2026: 3.19%
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016	7.00%		
2017	6.25%		
2018			
2019			
2020			
2021		4.89%	
2022		4.55%	
2023		4.21%	
2024		3.87%	
2025		3.53%	
2026		3.19%	
2027		2.85%	
2028		2.51%	
2029		2.17%	
2030		1.83%	

	Isu Strategis TPB: Belum berkurangnya angka kematian dini akibat penyakit tidak menular
	Rekomendasi:
	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
56	**Indikator 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun**
	Tujuan TPB: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun
	Proyeksi capaian indikator ini tidak dapat diketahui karena baseline data yang tersedia hanya 1 (satu) tahun
	Target Proyeksi Tahun 2026: -
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016			
2017			
2018			
2019			
2020	3.53%		
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

	Isu Strategis TPB: Belum kuatnya pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO
	Rekomendasi:
	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN



57 **Indikator 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B**

Tujuan TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 84,2% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan

Target Proyeksi Tahun 2026: 74.87%

Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016	45.45%		
2017	53.76%		
2018	75.00%		
2019	45.88%		
2020	61.02%		
2021		63.20%	63.21%
2022		65.53%	65.54%
2023		67.85%	67.87%
2024		70.18%	70.20%
2025		72.50%	72.54%
2026		74.83%	74.87%
2027		77.16%	77.20%
2028		79.48%	79.53%
2029		81.81%	81.87%
2030		84.13%	84.20%

Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya penyelesaiaan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas

Rekomendasi:

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

58 **Indikator 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B**

Tujuan TPB: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 81% Tercapai Tahun 2029 Tanpa Upaya Tambahan (BAU)

Target Proyeksi Tahun 2026: 72.31%

Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016	40.74%		
2017	25.00%		
2018			
2019	48.64%		
2020	48.64%		
2021		52.59%	
2022		56.53%	
2023		60.47%	
2024		64.42%	
2025		68.36%	
2026		72.31%	
2027		76.25%	
2028		80.20%	
2029		84.14%	
2030		88.08%	

Isu Strategis TPB: Belum terjaminnya penyelesaiaan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas

	Rekomendasi:
	1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
	3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
59	**Indikator 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan**
	Tujuan TPB: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Bertambah sebanyak 16 Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan
	Target Proyeksi Tahun 2026: 11
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016			
2017	2		
2018	2		
2019	5		
2020	1		
2021		3	4
2022		3	5
2023		3	7
2024		3	8
2025		3	9
2026		3	11
2027		3	12
2028		3	13
2029		3	15
2030		3	16

	Isu Strategis TPB: Masih adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan
	Rekomendasi: PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
60	**Indikator 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir**
	Tujuan TPB: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun Tercapai Tahun 2027 Dengan Upaya Tambahan
	Target Proyeksi Tahun 2026: 2%
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016			
2017	1%		
2018	2%		
2019			
2020			
2021		5%	4%
2022		6%	3%
2023		7%	3%
2024		8%	2%
2025		9%	2%
2026		10%	2%
2027		11%	1%
2028		12%	1%
2029		13%	0%
2030		14%	0%

	Isu Strategis TPB: Masih adanya kekerasan terhadap kaum perempuan
	Rekomendasi:
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN



61 **Indikator 10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan**

Tujuan TPB: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: 80 Kabupaten (skala nasional)

Proyeksi capaian indikator ini tidak dapat diketahui karena baseline data yang tersedia hanya 1 (satu) tahun

Target Proyeksi Tahun 2026: -

Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016			
2017			
2018	19		
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

Isu Strategis TPB: Masih rendahnya angka pertumbuhan pendapatan penduduk

Rekomendasi: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

62 **Indikator 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri**

Tujuan TPB: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat

Proyeksi capaian indikator ini tidak dapat diketahui karena baseline data yang tersedia hanya 1 (satu) tahun

Target Proyeksi Tahun 2026: -

Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016			
2017			
2018	2		
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

Isu Strategis TPB: Belum tercapai dan dipertahankannya pertumbuhan pendapatan penduduk

Rekomendasi:

1. PROGRAM PENATAAN DESA
2. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
3. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADA
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

63 **Indikator 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana**

Tujuan TPB: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun Tercapai Tahun 2025 Dengan Upaya Tambahan

Target Proyeksi Tahun 2026: 1002779333

Analisis DDDTLH: Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016	543000000		
2017	1408945000		
2018	1456800000		
2019			
2020			
2021		2963848333	2256253500
2022		3420748333	2005558667
2023		3877648333	1754863833
2024		4334548333	1504169000
2025		4791448333	1253474167
2026		5248348333	1002779333
2027		5705248333	752084500
2028		6162148333	501389667
2029		6619048333	250694833
2030		7075948333	0

Isu Strategis TPB: Masih adanya angka kematian dan jumlah orang terdampak yang disebabkan oleh bencana

Rekomendasi: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

64 **Indikator 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir**

Tujuan TPB: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Menurun Tercapai Tahun 2021 Dengan Upaya Tambahan

Target Proyeksi Tahun 2026: 0.47%

Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016	1.18%		
2017	1.18%		
2018			
2019			
2020			
2021		1.18%	1.06%
2022		1.18%	0.94%
2023		1.18%	0.83%
2024		1.18%	0.71%
2025		1.18%	0.59%
2026		1.18%	0.47%
2027		1.18%	0.35%
2028		1.18%	0.24%
2029		1.18%	0.12%
2030		1.18%	0.00%

Isu Strategis TPB: Masih adanya bentuk kekerasan dan terkait angka kematian

Rekomendasi:

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
2. PROGRAM PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

65 **Indikator 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya**

Tujuan TPB: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat Tercapai Tahun 2021 Dengan Upaya Tambahan

Target Proyeksi Tahun 2026: 99.53%

Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016	98.82%		
2017	98.82%		
2018			
2019			
2020			
2021		98.82%	98.94%
2022		98.82%	99.06%
2023		98.82%	99.17%
2024		98.82%	99.29%
2025		98.82%	99.41%
2026		98.82%	99.53%
2027		98.82%	99.65%
2028		98.82%	99.76%
2029		98.82%	99.88%
2030		98.82%	100.00%

Isu Strategis TPB: Masih adanya bentuk kekerasan dan terkait angka kematian

Rekomendasi: PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

66 **Indikator 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan**

Tujuan TPB: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 80%

Proyeksi capaian indikator ini tidak dapat diketahui karena baseline data yang tersedia hanya 1 (satu) tahun

Target Proyeksi Tahun 2026: -

Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016			
2017			
2018	21.01%		
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

Isu Strategis TPB: Belum berkembangnya lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat

Rekomendasi:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

	2. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
67	**Indikator 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)**
	Tujuan TPB: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat menjadi 45%
	Proyeksi capaian indikator ini tidak dapat diketahui karena baseline data yang tersedia hanya 1 (satu) tahun
	Target Proyeksi Tahun 2026: -
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016			
2017			
2018	28.50%		
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

	Isu Strategis TPB: Belum berkembangnya lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan
	Rekomendasi:
	1. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
68	**Indikator 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB**
	Tujuan TPB: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Tercapai diatas 12% Tercapai Tahun 2030 Dengan Upaya Tambahan
	Target Proyeksi Tahun 2026: 7.27%
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016	0.16%		
2017	0.16%		
2018	0.17%		
2019	0.18%		
2020	0.16%		
2021		0.17%	1.35%
2022		0.17%	2.54%
2023		0.18%	3.72%
2024		0.18%	4.90%
2025		0.18%	6.09%
2026		0.18%	7.27%
2027		0.18%	8.45%
2028		0.19%	9.63%
2029		0.19%	10.82%

	2030		0.19%	12.00%
	Isu Strategis TPB: Belum kuatnya mobilisasi sumber daya domestik bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
	2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
69	**Indikator 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik**			
	Tujuan TPB: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat Tercapai Tahun 2021 Tanpa Upaya Tambahan (BAU)			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 1.09%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	0.76%		
	2017	0.86%		
	2018	0.86%		
	2019	0.90%		
	2020	0.89%		
	2021		0.94%	
	2022		0.97%	
	2023		1.00%	
	2024		1.03%	
	2025		1.06%	
	2026		1.09%	
	2027		1.12%	
	2028		1.15%	
	2029		1.18%	
	2030		1.21%	
	Isu Strategis TPB: Belum kuatnya mobilisasi sumber daya domestik bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya			
	Rekomendasi:			
	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
	2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
70	**Indikator 17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik**			
	Tujuan TPB: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat Tercapai Tahun 2021 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 98.12%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016			
	2017			
	2018			
	2019	100.00%		
	2020	95.31%		
	2021		90.62%	95.78%
	2022		85.93%	96.25%
	2023		81.24%	96.72%
	2024		76.55%	97.19%
	2025		71.86%	97.65%
	2026		67.17%	98.12%
	2027		62.48%	98.59%
	2028		57.79%	99.06%

	2029		53.10%	99.53%
	2030		48.41%	100.00%
	Isu Strategis TPB: Masih belum optimalnya pengembangan kapasitas penyediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah			
	Rekomendasi: PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
71	**Indikator 17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama**			
	Tujuan TPB: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat Tercapai Tahun 2021 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 84.52%			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016			
	2017			
	2018			
	2019	90.91%		
	2020	61.29%		
	2021		31.67%	65.16%
	2022		2.05%	69.03%
	2023		0.00%	72.90%
	2024		0.00%	76.77%
	2025		0.00%	80.64%
	2026		0.00%	84.52%
	2027		0.00%	88.39%
	2028		0.00%	92.26%
	2029		0.00%	96.13%
	2030		0.00%	100.00%
	Isu Strategis TPB: Masih belum optimalnya pengembangan kapasitas penyediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah			
	Rekomendasi: PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
72	**Indikator 17.18.1.(c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)**			
	Tujuan TPB: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan			
	Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat Tercapai Tahun 2021 Dengan Upaya Tambahan			
	Target Proyeksi Tahun 2026: 18			
	Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH			
	Tahun	**Realisasi**	**Proyeksi (BAU)**	**Proyeksi dengan upaya Tambahan**
	2016	1		
	2017	13		
	2018	7		
	2019	1		
	2020			
	2021		3	6
	2022		3	9
	2023		2	11
	2024		2	14
	2025		1	16
	2026		0	18
	2027		0	21
	2028		0	24
	2029		0	27
	2030		0	30
	Isu Strategis TPB: Masih belum optimalnya pengembangan kapasitas penyediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah			



Rekomendasi: PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

73 **Indikator 17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target**

Tujuan TPB: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat Tercapai Tahun 2021 Dengan Upaya Tambahan

Target Proyeksi Tahun 2026: 65.75%

Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016	14.37%		
2017	14.37%		
2018	14.37%		
2019			
2020			
2021		14.37%	22.93%
2022		14.37%	31.50%
2023		14.37%	40.06%
2024		14.37%	48.62%
2025		14.37%	57.19%
2026		14.37%	65.75%
2027		14.37%	74.31%
2028		14.37%	82.87%
2029		14.37%	91.44%
2030		14.37%	100.00%

Isu Strategis TPB: Masih belum optimalnya pengembangan kapasitas penyediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah

Rekomendasi:

1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

74 **Indikator 17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website**

Tujuan TPB: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Target Perpres 59/2017 - Ringkasan: Meningkat Tercapai Tahun 2021 Tanpa Upaya Tambahan (BAU)

Target Proyeksi Tahun 2026: 15315

Analisis DDDTLH: Indikator tidak terkait D3TLH

Tahun	Realisasi	Proyeksi (BAU)	Proyeksi dengan upaya Tambahan
2016	7028		
2017	6277		
2018	5397		
2019	10460		
2020	9656		
2021		10595	
2022		11539	
2023		12483	
2024		13427	
2025		14371	
2026		15315	
2027		16259	
2028		17203	
2029		18147	
2030		19090	

Isu Strategis TPB: Belum adanya ukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang mendukung pengembangan kapasitas statistik

Rekomendasi: PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL





BAB IX

BAB IX
P E N U T U P

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Majene tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Majene serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi RPJMD Kabupaten Majene tahun 2021-2026 disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada akhir masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Majene periode 2021-2026. Pedoman Ini menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 berpedoman pada RKP, RPJPD, RPJMD Provinsi, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembagunan Daerah. RKPD tahun 2027 tersebut tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD berikutnya.

Seluruh program pada masa transisi diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum tercapai selama periode perencanaan sebelumnya (2021-2026) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kabupaten Maejen Tahun 2021 – 2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Bupati Majene berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
b. DPRD Kabupaten Majene bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Majene dalam pencapaian target kinerja Pembangunan Daerah.
c. DPRD Kabupaten Majene bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Majene dalam pencapaian target kinerja Pembangunan Daerah;
d. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene dan pemangku kepentingan berkewajiban melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
e. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene berkewajiban melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 hingga tahun 2026. Setiap Perangkat Daerah harus memastikan konsistensi antara RPJMD dengan Renstra dan Renja perangkat Daerah;
f. Dokumen RPJMD kabupaten Majene tahun 2021-2026 harus dijabarkan setiap tahun kedalam RKPD yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam KUA-PPAS dan RAPBD;
g. Penanggungjawab Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Majene tahun 2021-2026 adalah Bupati/Wakil Bupati. Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan RPJMD, BAPPEDA Kabupaten Majene berkewajiban untuk mengkoordinasikan penjabaran RPJMD kedalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah;
h. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Majene yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA;
i. RPJMD Kabupaten Majene tahun 2021-2026 harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin dan bertanggungjawab. RPJMD ini juga menjadi arahan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah untuk turut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.

Semoga rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Majene tahun 2021-2026 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga visi jangka menengah Kabupaten Majene yaitu: **"Unggul, Mandiri dan Religius"** dapat terwujud.

BUPATI MAJENE

H. A. ACHMAD SYUKRI, SE.MM

MATRIKS I

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF KABUPATEN MAJENE

MATRIKS I
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Majene

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
VISI: UNGGUL, MANDIRI DAN RELIGIUS																			
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif																			
Tujuan:																			
1.1.	**Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Nilai**	**66,91**	**67,51**	**194.546.922.366,04**	**68,03**	**162.028.086.112,00**	**68,53**	**216.310.481.278,49**	**69,05**	**220.066.611.186,97**	**69,56**	**226.201.464.067,82**	**70,07**	**235.522.568.247,56**	**70,07**	**1.254.676.133.258,88**	
Sasaran:																			
1.1.1.	**Meningkatnya aksesibilitas dan Layanan pendidikan**	**Rata-Rata Lama Sekolah**	**Tahun**	**8,65**	**8,86**	**49.132.627.335,00**	**9,04**	**40.596.577.440,00**	**9,21**	**58.168.700.000,00**	**9,39**	**58.288.700.000,00**	**9,56**	**58.878.700.000,00**	**9,73**	**64.752.681.482,00**	**9,73**	**329.817.986.257,00**	
		Harapan Lama Sekolah	**Tahun**	**13,61**	**13,99**		**14,13**		**14,26**		**14,40**		**14,54**		**14,68**		**14,68**		
Program																			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SD	%	103,91	104,31	4.855.636.757	104,61	3.300.000.000	104,91	6.227.244.000	105,61	6.227.244.000	105,91	6.227.244.000	106,41	6.750.444.000	106,41	33.587.812.757	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Angka Partisipasi Kasar SMP	%	84,25	86,28	3.972.793.710	89,48	2.700.000.000	93,35	4.151.496.000	96,19	4.151.496.000	98,23	4.151.496.000	100,00	4.500.296.000	100,00	23.627.577.710	
		Angka Partisipasi Murni SD	%	96,86	97,00	4.854.300.000	98,00	3.300.000.000	98,50	6.227.244.000	99,00	6.227.244.000	99,50	6.227.244.000	100,00	6.750.444.000	100,00	33.586.476.000	
		Angka Partisipasi Murni SMP	%	92,72	94,00	3.971.700.000	96,23	2.700.000.000	97,00	4.151.496.000	98,00	4.151.496.000	99,00	4.151.496.000	100,00	4.500.296.000	100,00	23.626.484.000	
		Angka Partisipasi Sekolah SD	%	96,86	97,00	4.854.300.000	98,00	3.300.000.000	98,50	6.227.244.000	99,00	6.227.244.000	99,50	6.227.244.000	100,00	6.750.444.000	100,00	33.586.476.000	
		Angka Partisipasi Sekolah SMP	%	92,72	94,00	3.971.700.000	96,23	2.700.000.000	97,00	4.151.496.000	98,00	4.151.496.000	99,00	4.151.496.000	100,00	4.500.296.000	100,00	23.626.484.000	

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase sarpras Sekolah dalam kondisi baik	%	-	60,00	10.000.000.000	65,00	8.029.084.827	70,00	10.378.740.000	80,00	10.378.740.000	90,00	10.378.740.000	100,00	11.250.740.000	100,00	60.416.044.827	
		Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi B	%	70,00	73,00	5.400.000.000	75,00	4.200.000.000	80,00	6.227.244.000	85,00	6.227.244.000	87,00	6.227.244.000	90,00	6.750.444.000	90,00	35.032.176.000	
		Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi B	%	-	40,00	3.600.000.000	50,00	2.800.000.000	60,00	4.151.496.000	65,00	4.151.496.000	70,00	4.151.496.000	75,00	4.500.296.000	75,00	23.354.784.000	
2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan dan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	%	-		107.709.018	100,00	41.093.600	100,00	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00	400.000.000	100,00	1.358.802.618	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PAUD, SD, SMP yang bersertifikasi	%	-	-	124.614.419	100,00	50.000.000	80,00	70.000.000	85,00	70.000.000	90,00	70.000.000	95,00	70.000.000	95,00	454.614.419	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Izin yang diterbitkan	%	-	-	0,00	70	0,00	70	100.000.000,00	70	100.000.000,00	70	100.000.000,00	70	100.000.000,00	70	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga
5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Bahasa dan Sastra yang di Kembangkan	%	-	-	0,00	100	0,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	340.000.000,00	100	1.090.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	%	-	-	1.616.223.348,00	100%	2.707.551.450,00	100%	1.520.000.000,00	100%	1.520.000.000,00	100%	1.520.000.000,00	100%	2.370.000.000,00	100%	11.253.774.798,00	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga
7	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	%	-	-	1.413.949.711,00	100%	4.531.289.400,00	100%	2.480.000.000,00	100%	2.490.000.000,00	100%	3.080.000.000,00	100%	3.080.000.000,00	100%	17.075.239.111,00	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga
8	Program Pengembangan Kapasitas Kpramukaan	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%			47.550.000,00	100%	50.000.000,00	100%	340.000.000,00	100%	450.000.000,00	100%	450.000.000,00	100%	450.000.000,00	100%	1.787.550.000,00	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
9	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	-	20,00	59.288.400,00	25,00	27.381.500,00		165.000.000,00	35,00	165.000.000,00	40,00	165.000.000,00	50,00	253.796.300,00	50,00	835.466.200,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Persentase Perpustakaan yang di bina	%	88,00	90,00	177.865.500,00	95,00	82.144.600,00	100,00	495.000.000,00	100,00	495.000.000,00	100,00	495.000.000,00	100,00	761.388.900,00	100,00	2.506.399.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Persentase kelompok Literasi yang dibina	%	-	100,00	59.288.559,00	100,00	27.381.583,00	100,00	165.000.000,00	100,00	165.000.000,00	100,00	165.000.000,00	100,00	253.796.282,00	100,00	835.466.424,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
10	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentasi Naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (di-gitalisasi)/ terdaftar dalam wilayahnya	%	-	15,00	14.758.235,00	19,00		21,00	55.000.000,00	24,00	55.000.000,00	26,00	55.000.000,00	28,00	55.000.000,00	28,00	234.758.235,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
11	Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	62,50	67,50	22.112.050,00	72,50	45.787.130,00	80,00	130.000.000,00	87,50	130.000.000,00	92,50	130.000.000,00	100,00	130.000.000,00	100,00	587.899.180,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
12	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang didokumentasikan (scan)	%	3,80	4,00	8.837.628,00	8,00	4.863.350,00	15,00	215.000.000,00	23,00	215.000.000,00	26,00	215.000.000,00	30,00	215.000.000,00	30,00	873.700.978,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
13	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Penggunaan Arsip bersifat tertutup yang dikelola							70,00	20.000.000,00	80,00	20.000.000,00	90,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	80.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sasaran:																			
1.1.2.	**Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan**	**Angka Harapan Hidup**	**Tahun**	**61,56**	**61,79**	**139.033.210.509,04**	**62,01**	**112.130.375.618,00**	**62,23**	**146.877.590.975,00**	**62,45**	**149.340.123.592,00**	**62,67**	**153.096.087.755,00**	**62,89**	**155.841.316.307,00**	**62,89**	**856.318.704.756,04**	
		Prevalensi Stunting	**%**	**34,26**	**30,28**		**27,27**		**23,08**		**17,99**		**16,00**		**13,00**		**13,00**		
Program																			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	-	0,50	2.803.267.178	0,60	1.041.359.779	0,70	1.459.610.449	0,80	1.422.723.389	0,90	1.408.810.182	1	1.363.381.645	1	9.499.152.622,00	Dinas Kesehatan

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		% Fasyankes yang memiliki dokumen manajemen mutu dan keselamatan pasien	%	-	5,00	5.614.117.533	18,18	7.187.161.138	36,00	6.750.727.033	55,00	6.860.405.622	73,00	7.001.086.965	100,00	7.110.200.477	100,00	40.523.698.768,00	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Penyakit Menular dan	%	38,00	34,00	4.386.838.439	33,34	1.455.928.553	32,68	3.644.302.853	32,03	3.682.530.794	31,39	3.659.231.361	30,76	3.483.155.514	30,76	20.311.987.514,00	Dinas Kesehatan
		% Fasyankes yang terpenuhi kebutuhan ASPAK sesuai standar	%	-	18,18	33.762.552.020	36,36	14.766.980.992	54,55	32.157.785.492	72,73	32.132.054.102	90,91	32.587.452.921	100,00	32.673.916.378	100,00	178.080.741.905,00	Dinas Kesehatan
		Proporsi anggaran yang dialokasikan ke fasilitas pelayanan kesehatan	%	10,00	37,00	86.586.381.166	38,00	81.369.268.686	39,00	91.610.618.107	40,00	94.033.246.997	41,00	96.858.479.034	42,00	99.448.240.348	42,00	549.906.234.338,04	Dinas Kesehatan
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standart	%	72,73	82,00	897.894.133,00	91,00	856.750.000,00	100,00	2.547.980.170,00	100,00	2.483.587.993,00	100,00	2.459.300.295,00	100,00	2.379.997.622,00	100,00	11.625.510.213,00	Dinas Kesehatan

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	% Ketersediaan Apotek, Toko Obat, Alkes dan Optikal UMOT dan PIRT sesuai standar	%	47,00	71,00	170.709.840	81,00	263.320.000	85,00	1.019.192.068	90,00	993.435.199	95,00	983.720.120	100,00	951.999.049	100,00	4.382.376.276,00	Dinas Kesehatan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/ Kelurahan Sehat	%	20,00	35,00	261.313.000,00	40,00	287.528.270,00	50,00	1.528.788.103,00	55,00	1.490.152.796,00	60,00	1.475.580.177,00	65,00	1.427.998.574,00	65,00	6.471.360.920,00	Dinas Kesehatan
5	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	Nilai	2,68	2,60	27.999.606,00	2,58	55.400.000,00	2,56	426.120.000,00	2,54	463.620.000,00	2,52	431.620.000,00	2,50	528.620.000,00	2,50	1.933.379.606,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR)	%	68,83	71,77	4.123.930.912,00	73,21	3.140.167.500,00	74,11	1.551.371.700,00	75,02	1.551.371.700,00	75,93	1.573.371.700,00	76,84	1.675.571.700,00	76,84	13.615.785.212,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Presentase peserta KB aktif MKJP	%	28,96	29,13	162.000.000,00	30,00	570.800.000,00	32,00	924.300.000,00	37,00	970.200.000,00	42,00	1.316.800.000,00	48,00	1.407.600.000,00	48,00	5.351.700.000,00	

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Kampung KB	%	31,00	32,00	10.000.000,00	33,00	59.745.800,00	34,00	699.750.000,00	35,00	699.750.000,00	36,00	699.750.000,00	37,00	699.750.000,00	37,00	2.868.745.800,00	
		Unmetneed	%	9,49	10,51	25.135.952,00	10,17	149.761.100,00	9,82	745.615.000,00	9,47	745.615.000,00	9,12	817.455.000,00	9,00	867.455.000,00	9,00	3.351.037.052,00	
7	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase PUS Kelompok Ketahanan Keluarga yang berKB	%	75,49	76,00	201.070.730,00	77,00	926.203.800,00	79,00	1.811.430.000,00	81,00	1.811.430.000,00	83,00	1.823.430.000,00	85,00	1.823.430.000,00	85,00	8.396.994.530,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sasaran:																			
1.1.3.	**Terwujudnya Pembangunan Daerah yang responsive gender dan pemenuhan hak anak**	**Indeks Pembangunan Gender**	**Nilai**	**94,7**	**94,72**	**2.431.402.508,00**	**95**	**2.645.914.612,00**	**95,1**	**3.407.219.345,00**	**95,65**	**3.690.878.968,00**	**96,7**	**3.951.393.461,00**	**96,75**	**4.302.671.706,00**	**96,75**	**20.429.480.600,00**	
		Indeks Perlindungan Anak	**Nilai**	**66,89**	**67,51**		**68,25**		**70,50**		**71,3**		**72,6**		**75,5**		**75,5**		

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program																			
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga PUG yang aktif	%	-	35,00	378.220.686,00	40,00	1.043.072.294,00	45,00	1.110.000.000,00	50,00	1.110.000.000,00	55,00	1.110.000.000,00	65,00	1.220.000.000,00	65,00	5.971.292.980,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	%	25,00	28,00	397.966.400,00	33,00	248.729.000,00	37,00	349.745.800,00	42,00	349.745.800,00	46,00	350.000.000,00	48,00	450.000.000,00	48,00	2.146.187.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase perangkat Daerah Yang responsif gender	%	-	50,00	281.595.411,00	58,00	74.390.450,00	65,00	274.390.450,00	72,00	299.745.800,00	77,00	300.000.000,00	80,00	400.000.000,00	80,00	1.630.122.111,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	100,00	100,00	245.987.857,00	100,00	604.551.012,00	100,00	577.044.000,00	100,00	627.044.000,00	100,00	712.286.723,00	100,00	753.564.968,00	100,00	3.520.478.560,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga dan anak yang terlayani	%	75,00	80,00	198.983.200,00	85,00	220.699.744,00	90,00	203.576.924,00	95,00	203.576.924,00	100,00	203.576.924,00	100,00	203.576.924,00	100,00	1.233.990.640,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	%	-	25,00	0,00	35,00	0,00	40,00	0,00	45,00	50.000.000,00	50,00	50.000.000,00	55,00	50.000.000,00	55,00	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan disajikan sesuai standar	%	-	32,00	54.788.238,00	40,00	21.342.572,00	45,00	70.000.000,00	50,00	70.000.000,00	60,00	70.000.000,00	70,00	70.000.000,00	70,00	356.130.810,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	%	-	50,00	14.331.492,00	60,00	34.786.630,00	70,00	65.865.061,00	80,00	125.415.061,00	85,00	140.628.431,00	90,00	140.628.431,00	90,00	521.655.106,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak	%	-	20,00	47.925.424,00	25,00	306.597.110,00	30,00	306.597.110,00	35,00	306.597.110,00	40,00	306.597.110,00	50,00	306.597.110,00	50,00	1.580.910.974,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang di tangani	%	100,00	100,00	811.603.800,00	100,00	91.745.800,00	100,00	450.000.000,00	100,00	548.754.273,00	100,00	708.304.273,00	100,00	708.304.273,00	100,00	3.318.712.419,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran:																			
1.1.4	**Meningkatnya standar hidup masyarakat yang merata hingga perdesaan**	**Persentase Penduduk Miskin**	**%**	**13,73**	**13,18**	**3.949.682.014,00**	**12,41**	**6.655.218.442,00**	**12,00**	**7.856.970.958,49**	**11,58**	**8.746.908.626,97**	**11,17**	**10.275.282.851,82**	**10,76**	**10.625.898.752,56**	**10,76**	**48.109.961.645,84**	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	**%**	**4,26**	**4,36**		**4,15**		**3,70**		**3,20**		**2,82**		**2,52**		**2,52**		
		Gini Ratio	**Poin**	**0,361**	**0,351**		**0,343**		**0,336**		**0,329**		**0,321**		**0,314**		**0,314**		
Program																			
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tenaga kerja	Ada/ Tidak ada	-	-	0,00	ada	0,00	ada	150.000.000,00	ada	150.000.000,00	ada	150.000.000,00	ada	150.000.000,00	ada	600.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi	%	-	70,00	311.906.260,60	75,00	574.695.550,00	80,00	248.750.000,00	90,00	270.312.500,00	100,00	462.505.625,00	100,00	446.232.930,00	100,00	2.314.402.865,60	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	%	-	85,00	255.196.031,40	90,00	470.205.450,00	90,00	213.749.999,49	95,00	225.312.499,97	95,00	415.255.626,82	100,00	396.620.434,06	100,00	1.976.340.041,74	
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan pencari kerja	%	-	100,00	25.011.159,00	100,00	49.992.500,00	100,00	250.000.000,00	100,00	285.000.000,00	100,00	290.000.000,00	100,00	295.000.000,00	100,00	1.195.003.659,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	Program Hubungan Industrial	Persentase konflik ketenagakerjaan yang ditangani	%	100,00	100,00	77.951.062,00	100,00	38.168.098,00	100,00	52.500.000,00	100,00	55.125.000,00	100,00	57.881.250,00	100,00	60.775.312,50	100,00	342.400.722,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM Yang Diberdayakan	%	6,67	9,33	1.082.286.599,00	19,47	2.878.329.601,00	5,43	654.745.800,00	5,43	654.745.800,00	5,43	654.745.800,00	7,10	654.745.800,00	52,20	6.579.599.400,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	%	3,33	-	0,00	-	0,00	4,33	650.000.000,00	4,33	650.000.000,00	4,33	650.000.000,00	6,00	900.000.000,00	20,00	2.850.000.000,00	
		Persentase Usaha Mikro Yang Melakukan Kemitraan	%	1,67	1,67	248.729.000,00	0,33	62.925.800,00	0,20	30.000.000,00	0,20	30.000.000,00	0,20	30.000.000,00	0,20	30.000.000,00	2,07	431.654.800,00	
6	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	-	-	0,00	-	0,00	0,92	99.491.600,00	0,92	99.491.600,00	0,92	99.491.600,00	0,92	99.491.600,00	10,13	397.966.400,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Pengelola Koperasi Yang Bersertifikat	%	2,76	3,22	348.474.304,00	4,88	529.076.749,00	4,88	529.076.749,00	4,88	529.076.749,00	4,88	529.076.749,00	6,44	700.000.000,00	32.86	3.164.781.300,00	
7	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	-	-	0,00	-	0,00	5,05	129.745.800,00	5,05	280.000.000,00	5,05	280.000.000,00	5,05	130.000.000,00	20,18	819.745.800,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
8	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase KAT yang ditangani	%	-	100,00	68.070.800,00	100,00	164.442.400,00	100,00	198.933.704,00	100,00	198.933.704,00	100,00	257.199.705,00	100,00	257.199.705,00	100,00	1.144.780.018,00	Dinas Sosial
9	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang dibina	%	4,00	4,00	140.751.260,00	4,00	85.590.777,00	4,00	309.082.152,00	4,00	698.213.195,00	4,00	675.159.375,00	4,00	692.038.360,00	4,00	2.600.835.119,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	%	-	50,00	140.751.260,00	60,00	85.590.777,00	70,00	309.082.152,00	75,00	571.265.345,00	80,00	552.403.125,00	85,00	566.213.203,00	85,00	2.225.305.862,00	

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
10	Program Penataan Desa	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	-		0,00	100,00	27.686.065,00	100,00	127.868.065,00	88,00	128.564.770,00	100,00	452.000.000,00	100,00	463.300.000,00	100,00	1.199.418.900,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
11	Program Peningkatan Kerja sama Desa	Persentase Jumlah Kerja Sama Desa	%	72,30		0,00	76,40	25.138.023,00	78,70	25.766.470,00	80,20	400.000.000,00	82,10	400.000.000,00	83,40	410.000.000,00	83,40	1.260.904.493,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
12	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	8,54	80,00	221.628.085,80	90,00	289.047.963,60	100,00	902.511.570	100,00	660.000.000,00	100,00	875.478.612	100,00	897.365.578	100,00	3.846.031.809	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase desa Berkembang; Mandiri; Maju	%	-	10,00	100.740.039,00	15,00	131.385.438,00	20,00	789.697.620	25,00	577.500.000,00	30,00	766.043.786	35,00	673.024.183,00	35,00	3.038.391.066	
		Persentasi BUMDesa yang aktif	%	10,00	15,00	80.592.031,20	20,00	105.108.350,40	25,00	564.069.730	30,00	412.500.000,00	35,00	547.174.134,00	40,00	673.024.183,00	40,00	2.382.468.429	

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
13	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Cakupan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100,00	100,00	3.625.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	68.625.000,00	Dinas Sosial
14	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	17,00	25,00	39.564.948,00	40,00	112.022.500,00	60,00	271.680.000,00	70,00	271.680.000,00	75,00	271.680.000,00	80,00	271.680.000,00	80,00	1.238.307.448,00	Dinas Sosial
15	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	75,00	80,00	384.991.103,00	85,00	313.335.625,00	90,00	400.072.369,50	100,00	400.072.369,50	100,00	500.072.369,50	100,00	500.072.369,50	100,00	2.498.616.206,00	Dinas Sosial
		Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh pelindungan dan Jaminan Sosial	%	78,00	84,00	384.991.103,00	88,00	313.335.625,00	93,00	400.072.369,50	95,00	400.072.369,50	100,00	500.072.369,50	100,00	500.072.369,50	100,00	2.498.616.206,00	
16	Program Penanganan Bencana	Persentase kampung siaga yang terbentuk	%	-	10,00	10.240.000,00	17,00	149.641.600,00	25,00	200.000.000,00	30,00	448.967.917,00	35,00	448.967.917,00	40,00	448.967.917,00	40,00	1.706.785.351,00	Dinas Sosial

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	73,00	78,00	0,00	80,00	220.800.800,00	85,00	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00	100,00	135.000.000,00	100,00	135.000.000,00	100,00	640.800.800,00	
17	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100,00	100,00	24.181.968,00	100,00	23.698.750,00	100,00	260.074.808,00	100,00	260.074.808,00	100,00	260.074.808,00	100,00	260.074.808,00	100,00	1.088.179.950,00	Dinas Sosial
Misi 2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel																			
Tujuan:																			
2.1.	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**poin**	**33 (C)**	**50 (CC)**	**625.614.552.025,13**	**61 (B)**	**579.470.757.445,00**	**65 (B)**	**719.322.157.535,78**	**68 (B)**	**759.048.743.175,87**	**71(BB)**	**804.964.367.965,07**	**72 (BB)**	**835.708.397.865,08**	**72 (BB)**	**4.324.095.534.749,93**	
Sasaran:																			
2.1.1.	**Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah**	**Poin Predikat SAKIP**	**Predikat**	**B**	**B**	**604.527.599.105,02**	**B**	**571.216.755.830,00**	**BB**	**699.659.680.738,78**	**BB**	**736.296.883.440,57**	**BB**	**779.408.132.354,07**	**A**	**808.514.714.928,08**	**A**	**4.199.623.766.396,52**	
		Opini BPK	**Predikat**	**WTP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		
		Nilai LPPD	**Nilai**	**3,51**	**3,53**		**3,55**		**3,57**		**3,58**		**3,60**		**3,61**		**3,61**		

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program																			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	452.056.386.734,65	100,00	429.077.855.794,00	100,00	527.411.058.984,20	100,00	549.331.110.755,57	100,00	578.780.603.283,23	100,00	597.133.069.433,08		3.133.790.084.984,73	Seluruh OPD
		Persentase Kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang di fasilitasi dan terdokumentasi dengan Baik	%	100,00	100,00	1.252.128.943,00	100,00	1.339.994.779,00	100,00	1.339.994.779,00	100,00	1.339.994.779,00	100,00	1.339.994.779,00	100,00	1.339.994.779,00	100,00	7.952.102.838,00	Sekretariat Daerah
		Persentaae OPD dengan nilai IKM yang kategori Baik	%	-	70,00	208.473.903,30	75,00	405.953.312,00	80,00	405.953.312,00	80,00	405.953.312,00	90,00	405.953.312,00	100,00	405.953.312,00	100,00	2.238.240.463,30	Sekretariat Daerah
		Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang untuk anggota DPRD	%	100,00	100,00	9.438.629.896,73	100,00	9.130.493.704,00	100,00	10.016.698.397,00	100,00	10.166.698.397,00	100,00	10.167.098.397,00	100,00	10.417.098.397,00	100,00	59.336.717.188,73	Sekretariat DPRD
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase tingkat Pemenuhan Data Indikator dalam dokumen LPPD	%	-	85,00	263.921.333,00	85,00	365.000.316,00	90,00	365.000.316,00	90,00	365.000.316,00	100,00	365.000.316,00	100,00	445.000.731,00	100,00	2.168.923.328,00	Sekretariat Daerah

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Produk hukum yang ditetapkan/ diterbitkan	%	-	100,00	370.815.951,56	100,00	399.997.436,00	100,00	399.997.436,00	100,00	399.997.436,00	100,00	399.997.436,00	100,00	399.997.436,00	100,00	2.370.803.131,56	
		Persentase Fasilitasi layanan Kesra	%	-	100,00	2.679.902.352,00	100,00	5.212.868.403,00	100,00	5.212.868.403,00	100,00	5.212.868.403,00	100,00	5.212.868.403,00	100,00	5.291.812.678,00	100,00	28.823.188.642,00	
		Persentaae Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	-	100,00	160.000.042,25	100,00	174.999.954,00	100,00	174.999.954,00	100,00	174.999.954,00	100,00	174.999.954,00	100,00	291.920.974,00	100,00	1.151.920.832,25	
3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD yang di fasilitasi	%	100,00	100,00	6.631.243.439,93	100,00	7.494.511.586,00	100,00	8.666.500.000,00	100,00	8.966.500.000,00	100,00	9.986.500.000,00	100,00	10.530.000.000,00	100,00	52.275.255.025,93	Sekretariat DPRD
4	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi	%	100,00	100,00	931.642.907,00	100,00	283.496.190,00	100,00	1.285.000.000,00	100,00	1.350.000.000,00	100,00	1.875.000.000,00	100,00	1.319.250.000,00	100,00	7.044.389.097,00	Badan Perencanaan Daerah

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase dokumen evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi	%	100,00	100,00	142.359.100,00	100,00	52.829.630,00	100,00	375.000.000,00	100,00	375.000.000,00	100,00	435.000.000,00	100,00	455.000.000,00	100,00	1.835.188.730,00	Badan Perencanaan Daerah
5	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tingkat capaiannya diatas 90%	%	85,00	38,00	684.129.269,70	40,00	343.799.733,00	45,00	1.000.000.000,00	50,00	1.030.000.000,00	55,00	1.135.000.000,00	60,00	1.160.000.000,00	60,00	5.352.929.002,70	Badan Perencanaan Daerah
		Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang tingkat capaiannya diatas 90%	%	85,00	70,00	370.103.896,08	70,00	200.000.375,00	75,00	770.000.000,00	80,00	790.000.000,00	85,00	910.000.000,00	90,00	950.000.000,00	90,00	3.990.104.271,08	Badan Perencanaan Daerah
		Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tingkat capaiannya diatas 90%	%	80,00	36,00	231.613.597,00	40,00	199.999.795,00	45,00	740.000.000,00	50,00	760.000.000,00	55,00	855.000.000,00	60,00	935.000.000,00	60,00	3.721.613.392,00	Badan Perencanaan Daerah
6	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklajuti	%	100,00	100,00	2.416.308.575,00	100,00	472.950.000,00	100,00	947.176.125,00	100,00	994.534.930,00	100,00	1.044.261.677,81	100,00	1.099.474.761,70	100,00	6.974.706.069,51	Inspektorat Daerah

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00		100,00	472.950.000,00	100,00	947.176.125,00	100,00	994.534.930,00	100,00	1.044.261.677,81	100,00	1.099.474.761,70	100,00	4.558.397.494,51	Inspektorat Daerah
		Jumlah OPD yang dievaluasi SAKIPnya minimal B	OPD	11	11		12	472.950.000,00	14	947.176.125,00	16	994.534.930,00	18	1.044.261.677,82	20	1.099.474.761,60	20	4.558.397.494,42	Inspektorat Daerah
7	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) da-tau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)	OPD	-	1	467.325.000,00	4	328.750.000,00	6	921.920.681,58	9	968.016.719,00	12	1.016.417.551,40	15	1.067.238.429,00	15	4.769.668.380,98	Inspektorat Daerah
8	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK		WTP	WTP	74.855.294.426,33	WTP	67.226.863.806,60	WTP	79.906.383.970,80	WTP	87.281.691.888,60	WTP	93.346.294.093,20	WTP	98.826.336.829,80	WTP	501.442.865.015,33	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase SiLPA Terhadap APBD	%	1,64	1,60	12.475.882.404,39	1,50	11.204.477.301,10	1,40	13.317.730.661,80	1,30	14.546.948.648,10	1,20	15.557.715.682,20	1,00	16.471.056.138,30	1,00	83.573.810.835,89	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah daerah	%	99,07	100,00	12.475.882.404,39	100,00	11.204.477.301,10	100,00	13.317.730.661,80	100,00	14.546.948.648,10	100,00	15.557.715.682,20	100,00	16.471.056.138,30	100,00	83.573.810.835,89	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	12.475.882.404,39	Tepat Waktu	11.204.477.301,10	Tepat Waktu	13.317.730.661,80	Tepat Waktu	14.546.948.648,10	Tepat Waktu	15.557.715.682,20	Tepat Waktu	16.471.056.138,30	Tepat Waktu	83.573.810.835,89	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Ketepatan waktu pengesahan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	12.475.882.404,39	Tepat Waktu	11.204.477.301,10	Tepat Waktu	13.317.730.661,80	Tepat Waktu	14.546.948.648,10	Tepat Waktu	15.557.715.682,20	Tepat Waktu	16.471.056.138,30	Tepat Waktu	83.573.810.835,89	Badan Keuangan dan Aset Daerah
9	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	-	50,00	507.859.246,94	60,00	319.851.000,00	70,00	585.547.499,00	80,00	1.111.682.526,00	90,00	1.148.615.721,00	100,00	688.504.339,00	100,00	4.362.060.331,94	Badan Keuangan dan Aset Daerah
10	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	%	(19,56)	3,00	253.569.625,50	5,00	549.374.406,00	5,33	708.161.992,00	5,38	763.424.639,00	5,44	910.510.526,00	5,50	1.003.384.229,00	5,50	4.188.425.417,50	Badan Pendapatan Daerah

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase peningkatan Pendapatan	%	(5,32)	(1,50)	253.569.625,50	5,00	549.374.406,00	5,16	708.161.992,00	5,18	763.424.639,00	5,23	910.510.526,00	5,28	1.003.384.229,00	5,28	4.188.425.417,50	Badan Pendapatan Daerah
11	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan Organisasi	%	-	10,00	0,00	10,00	0,00	15,00	180.000.000,00	16,00	180.000.000,00	17,00	180.000.000,00	19,00	180.000.000,00	19,00	720.000.000,00	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural	%	36,49	37,00	448.791.622,00	37,50	1.323.982.000,00	38,00	2.373.982.000,00	38,50	3.389.120.294,00	39,00	4.489.120.294,00	40,00	5.489.120.294,00	40,00	17.514.116.504,00	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sasaran:																			
2.1.2	**Meningkatnya Kualitas dan ketepatan pelayanan publik**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Poin**	**75 (Baik)**	**78 (Baik)**	**19.929.850.936,11**	**80 (Baik)**	**5.767.552.732,00**	**82 (Baik)**	**16.174.851.500,00**	**85 (Baik)**	**19.019.244.232,30**	**86 (Baik)**	**20.516.410.403,00**	**88 (Baik)**	**21.500.655.212,00**	**88 (Baik)**	**102.908.565.015,41**	

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program																			
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Banggae Timur	nilai	75,00	75,00	3.396.368,00	75,00	2.387.400,00	80,00	10.500.000,00	80,00	13.000.000,00	85,00	14.900.000,00	90,00	18.000.000,00	90,00	62.183.768,00	Kecamatan Banggae Timur
		Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Banggae	nilai	75,00	75,00	38.951.502,00	75,00	16.500.000,00	80,00	20.164.000,00	80,00	22.180.400,00	85,00	24.398.440,00	90,00	27.398.440,00	90,00	149.592.782,00	Kecamatan Banggae
		Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Pamboang	nilai	75,00	75,00	14.700.000,00	75,00	21.255.000,00	80,00	60.000.000,00	80,00	60.000.000,00	85,00	60.000.000,00	90,00	65.000.000,00	90,00	280.955.000,00	Kecamatan Pamboang
		Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Sendana	nilai	75,00	75,00	14.184.123,00	75,00	10.457.178,00	80,00	22.000.000,00	80,00	22.000.000,00	85,00	22.000.000,00	90,00	22.000.000,00	90,00	112.641.301,00	Kecamatan Sendana
		Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Tammerodo Sendana	nilai	75,00	75,00	0,00	75,00	7.600.000,00	80,00	24.950.000,00	80,00	24.950.000,00	85,00	24.950.000,00	90,00	24.950.000,00	90,00	107.400.000,00	Kecamatan Tammerodo Sendana
		Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Tubo Sendana	nilai	75,00	75,00	13.326.765,00	75,00	11.730.000,00	80,00	54.950.000,00	80,00	54.950.000,00	85,00	54.950.000,00	90,00	54.950.000,00	90,00	244.856.765,00	Kecamatan Tubo Sendana

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Ulumanda	nilai	75,00	75,00	0,00	75,00	13.965.000,00	80,00	25.000.000,00	80,00	29.650.000,00	85,00	29.650.000,00	90,00	29.650.000,00	90,00	127.915.000,00	Kecamatan Ulumanda
2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP	%	86,48	90,00	251.224.681,00	100,00	280.000.000,00	100,00	680.738.193,00	100,00	701.775.105,00	100,00	858.001.610,00	100,00	958.001.610,00	100,00	3.729.741.199,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Kepemilikan KK	%	100,00	100,00	100.000.000,00	100,00	125.500.000,00	100,00	280.000.000,00	100,00	283.000.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00	310.000.000,00	100,00	1.398.500.000,00	
		Persentase Kepemilikan KIA	%	10,00	15,00	80.000.000,00	20,00	85.500.000,00	30,00	150.000.000,00	35,00	165.000.000,00	40,00	175.000.000,00	45,00	150.000.000,00	45,00	805.500.000,00	
3	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentasi jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	%	-		100.000.000,00	100,00	97.034.053,00	100,00	262.500.000,00	100,00	275.625.000,00	100,00	389.406.250,00	100,00	381.998.390,00	100,00	1.506.563.693,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte	%	92,00	95,00	50.813.880,00	98,00	50.000.000,00	100,00	250.000.000,00	100,00	262.500.000,00	100,00	278.250.000,00	100,00	285.000.000,00	100,00	1.176.563.880,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki akte kelahiran	%	91,78	93,22	80.000.000,00	95,20	85.000.000,00	97,00	150.000.000,00	100,00	160.000.000,00	100,00	180.000.000,00	100,00	180.000.000,00	100,00	835.000.000,00	
		Cakupan dokumen akta pengakuan anak dan pengesahan anak	%	-	100,00	65.000.000,00	100,00	75.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	165.000.000,00	100,00	180.000.000,00	100,00	185.000.000,00	100,00	820.000.000,00	
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD / lembaga pengguna yang memanfaatkan data (MOU) Kependudukan	%	-	10,00	81.352.026,00	20,00	51.549.686,00	35,00	150.000.000,00	50,00	262.500.000,00	55,00	278.250.000,00	60,00	285.000.000,00	60,00	1.108.651.712,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase ketersediaan database kependudukan	%	90,00	100,00	65.000.000,00	100,00	70.000.000,00	100,00	250.000.000,00	100,00	139.000.000,00	100,00	168.327.630,00	100,00	183.052.645,00	100,00	875.380.275,00	

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
6	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase PPID yang aktif	%	10,00	10,00	300.000.000,00	50,00	380.450.600,00	100,00	420.000.000,00	100,00	325.000.000,00	100,00	280.000.000,00	100,00	330.000.000,00	100,00	2.035.450.600,00	Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi	%	50,00	70,00	928.790.195,00	80,00	669.899.925,00	80,00	1.200.000.000,00	80,00	1.290.000.000,00	80,00	1.290.000.000,00	80,00	1.300.000.000,00	80,00	6.678.690.120,00	
7	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Peningkatan responsifitas dalam penanganan kebakaran	%	100,00	100,00	57.745.800,00	100,00	30.100.000,00	100,00	750.000.000,00	100,00	800.000.000,00	100,00	800.000.000,00	100,00	750.000.000,00	100,00	3.187.845.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan, Responsifitas dalam Penangani Bencana	%	100,00	100,00	14.684.940.600,00	100,00	1.063.686.078,00	100,00	5.384.664.759,00	100,00	7.821.283.120,00	100,00	8.614.365.704,00	100,00	9.357.919.094,00	100,00	46.926.859.355,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai IKM (Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan/Non Perizinan)	Point	-	75,00	32.705.846,00	80,00	18.785.078,00	80,00	110.000.000,00	85,00	110.000.000,00	85,00	110.000.000,00	85,00	155.000.000,00	85,00	536.490.924,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	%	-	100,00	32.590.115,00	100,00	26.006.634,00	100,00	140.000.000,00	100,00	140.000.000,00	100,00	140.000.000,00	100,00	180.000.000,00	100,00	658.596.749,00	
10	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM(Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	%	-	70,00	153.694.592,00	80,00	157.736.002,00	85,00	169.448.288,00	85,00	177.920.702,00	95,00	265.000.000,00	100,00	330.000.000,00	100,00	1.253.799.584,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dokumen Pengembagan iklim penanaman modal	Dok	-	2,00	27.263.734,00	2,00	12.362.836,00	2,00	250.000.000,00	2,00	250.000.000,00	2,00	420.000.000,00	2,00	405.000.000,00	2,00	1.364.626.570,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Program Kepegawaian Daerah	Persentase data kepegawaian yang up to date	%	100	100	1.071.520.121,12	100,00	757.552.661,00	100,00	1.384.864.262,00	100,00	1.384.864.262,00	100,00	1.441.145.636,00	100,00	1.515.756.766,00	100,00	7.555.703.708,12	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	-	10	429.130.000,00	15,00	361.700.000,00	20,00	920.500.000,00	20,00	920.500.000,00	25,00	930.500.000,00	30,00	920.500.000,00	30,00	4.482.830.000,00	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Indek kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	%	-	70	169.538.486,99	75,00	76.905.350,00	80,00	461.009.000,00	85,00	461.009.000,00	90,00	467.009.000,00	100,00	467.009.000,00	100,00	2.102.479.836,99	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Banggae Timur	%	98,00	98,00	351.871.670,00	98,00	381.108.385,00	98,00	587.000.000,00	98,00	623.000.000,00	98,00	669.242.294,00	98,00	702.500.000,00	98,00	3.314.722.349,00	Kecamatan Banggae Timur
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Banggae	%	98,00	98,00	218.519.595,00	98,00	332766736	98,00	443431789	98,00	448424510,3	98,00	453916503	98,00	455216503	98,00	2.352.275.636,30	Kecamatan Banggae
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Pamboang	%	98,00	98,00	137.750.000,00	98,00	92.052.976,00	98,00	115.600.000,00	98,00	115.600.000,00	98,00	115.600.000,00	98,00	115.600.000,00	98,00	692.202.976,00	Kecamatan Pamboang
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Sendana	%	98,00	98,00	137.671.671,00	98,00	144.025.210,00	98,00	257.000.000,00	98,00	437.000.000,00	98,00	437.000.000,00	98,00	437.000.000,00	98,00	1.849.696.881,00	Kecamatan Sendana

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Tammerodo Sendana	%	98,00	98,00	25.800.000,00	98,00	0,00	98,00	25.000.000,00	98,00	25.000.000,00	98,00	25.000.000,00	98,00	25.000.000,00	98,00	125.800.000,00	Kecamatan Tammerodo Sendana
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Tubo Sendana	%	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	85.000.000,00	98,00	85.000.000,00	98,00	85.000.000,00	98,00	85.000.000,00	98,00	340.000.000,00	Kecamatan Tubo Sendana
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Ulumanda	%	98,00	98,00	14.994.720,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	14.994.720,00	Kecamatan Ulumanda
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Malunda	%	98,00	98,00	111.332.799,00	98,00	187.086.944,00	98,00	559.531.209,00	98,00	590.707.133,00	98,00	631.776.836,00	98,00	506.882.264,00	98,00	2.587.317.185,00	Kecamatan Malunda
14	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti Kecamatan Banggae Timur	%	98,00	98,00	0,00	98,00	6.000.000,00	98,00	37.000.000,00	98,00	17.500.000,00	98,00	19.500.000,00	98,00	21.500.000,00	98,00	101.500.000,00	Kecamatan Banggae Timur
		Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti Kecamatan Banggae	%	98,00	98,00	0,00	98,00	5.000.000,00	98,00	50000000	98,00	50605000	98,00	51270500	98,00	52270500	98,00	209.146.000,00	Kecamatan Banggae

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti Kecamatan Pamboang	%	98,00	98,00	8.000.000,00	98,00	16.000.000,00	98,00	55.000.000,00	98,00	58.000.000,00	98,00	60.000.000,00	98,00	60.000.000,00	98,00	257.000.000,00	Kecamatan Pamboang
		Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti Kecamatan Sendana	%	98,00	98,00	18.500.000,00	98,00	30.124.000,00	98,00	90.000.000,00	98,00	100.000.000,00	98,00	90.000.000,00	98,00	105.000.000,00	98,00	433.624.000,00	Kecamatan Sendana
		Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti Kecamatan Tubo Sendana	%	98,00	98,00	10.000.000,00	98,00	10.000.000,00	98,00	50.000.000,00	98,00	50.000.000,00	98,00	50.000.000,00	98,00	50.000.000,00	98,00	220.000.000,00	Kecamatan Tubo Sendana
15	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa dan melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu Kecamatan Banggae Timur	%	-	50,00	1.785.678,00	52,00	0,00	54,00	14.000.000,00	56,00	15.700.000,00	58,00	5.500.000,00	60,00	6.500.000,00	60,00	43.485.678,00	Kecamatan Banggae Timur
		Persentase desa menetapkan Peraturan Desa dan melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu Kecamatan Pamboang	%	-	50,00	0,00	52,00	4.725.000,00	54,00	5.000.000,00	56,00	6.000.000,00	58,00	6.500.000,00	60,00	7.000.000,00	60,00	29.225.000,00	Kecamatan Pamboang
		Persentase desa menetapkan Peraturan Desa dan melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu Kecamatan Sendana			50,00	47.755.968,00	52,00	0,00	54,00	70.000.000,00	56,00	75.000.000,00	58,00	20.000.000,00	60,00	0,00	60,00	212.755.968,00	Kecamatan Sendana

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran:																			
2.1.3	**Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah**	**Tingkat maturitas SPBE**	**Poin (predikat)**	**1,0 (kurang)**	**2,0 (cukup)**	**429.214.687,00**	**2,5 (Baik)**	**1.238.748.362,00**	**2,7 (Baik)**	**2.052.000.000,00**	**2,8 (Baik)**	**2.167.000.000,00**	**3,0 (Baik)**	**3.185.000.000,00**	**3,1 (Sangat Baik)**	**3.645.000.000,00**	**3,1 (Sangat Baik)**	**12.683.521.787,00**	
Program																			
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang terpenuhi	%	-	5,00	17.441.262,00	5,00	3.890.900,00	25,00	40.000.000,00	3O	52.000.000,00	35,00	65.000.000,00	40,00	130.000.000,00	40,00	290.890.900,00	Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian
		Persentase OPD yang menyediakan Data Statistik Sektoral	%	-	5,00	16.000.000,00	5,00	3.890.900,00	25,00	40.000.000,00	30,00	50.000.000,00	35,00	50.000.000,00	40,00	120.000.000,00	40,00	263.890.900,00	
2	Program Aplikasi Informatika	Jumlah sistem informasi yang sudah terintegrasi	SIM	-	-	0,00	-	0,00	2,00	100.000.000,00	4,00	195.000.000,00	6,00	270.000.000,00	6,00	325.000.000,00	6,00	890.000.000,00	Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian
		Jumlah layanan yang sudah berbasis digital	Layanan	-	-	0,00	-	54.498.925,00	1	150.000.000,00	1	130.000.000,00	2	135.000.000,00	2	200.000.000,00	2	669.498.925,00	

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Indeks SPBE	Poin	-	2,00	299.928.079,00	2,50	932.456.934,00	2,70	990.000.000,00	2,80	1.380.000.000,00	3,00	1.870.000.000,00	3,10	1.970.000.000,00	3,10	7.442.385.013,00	
		Persentase perangkat daerah sudah tersambung jaringan internet	%	100,00	15,00	75.000.000,00	85,00	230.499.900,00	90,00	530.000.000,00	100,00	130.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	2.165.499.900,00	
3.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	%	-	5,00	13.695.658,00	5,00	5.996.733,00	40,00	52.000.000,00	55,00	80.000.000,00	55,00	70.000.000,00	75,00	150.000.000,00	75,00	371.692.391,00	Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian
4.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi	%	-	20,00	7.149.688,00	30,00	7.514.070,00	45,00	150.000.000,00	60,00	150.000.000,00	75,00	125.000.000,00	80,00	150.000.000,00	80,00	589.663.758,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran:																			
2.1.4.	**Terciptanya upaya pembangunan daerah yang inovatif pada segala sektor**	**Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasikan berkesinambungan**	**%**	**20**	**40**	**727.887.297,00**	**55,00**	**1.247.700.521,00**	**70**	**1.435.625.297,00**	**80**	**1.565.615.503,00**	**90**	**1.854.825.208,00**	**100**	**2.048.027.725,00**	**100**	**8.879.681.551,00**	
Program																			
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	363.943.648,50	100,00	623.850.260,50	100,00	717.812.648,50	100,00	782.807.751,50	100,00	927.412.604,00	100,00	1.024.013.862,50	100,00	4.439.840.775,50	Badan Penelitian dan Pengembangan
		Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Terdiseminasi	%	100,00	100,00	363.943.648,50	100,00	623.850.260,50	100,00	717.812.648,50	100,00	782.807.751,50	100,00	927.412.604,00	100,00	1.024.013.862,50	100,00	4.439.840.775,50	Badan Penelitian dan Pengembangan
Misi 3: Mewujudkan Kemandirian Perekonomian Berbasis Potensi Sumbetr Daya Alam (SDA) dan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan lingkungan																			
Tujuan:																			
3.1.	**Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis Pembangunan berkelanjutan**	**Pendapatan Perkapita**	**Rp (Juta)**	**26,93**	**27,22**	**93.888.877.118,25**	**27,92**	**115.954.359.279,00**	**28,62**	**116.251.800.516,73**	**29,33**	**128.105.092.565,76**	**30,03**	**138.754.189.104,67**	**30,73**	**149.166.596.128,36**	**30,73**	**741.950.306.166,77**	

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran:																			
3.1.1.	**Meningkatnya kontribusi Pengelolaan SDA dalam Perekonomian Daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**-1,38**	**4,73**	**17.214.495.254,54**	**6,16**	**33.619.073.082,00**	**6,25**	**31.436.207.692,00**	**6,37**	**32.511.435.536,00**	**6,46**	**36.326.435.782,56**	**6,55**	**39.325.166.905,00**	**6,55**	**190.607.205.706,10**	
		Laju Inflasi (yoy)	**%**	**1,78**	**2,39**		**2,24**		**2,09**		**1,94**		**1,79**		**1,62**			**1,62**		
Program																			
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	5,00	5,00	281.017.938,25	5,00	539.425.857,25	5,00	2.209.251.838,50	5,00	2.297.621.912,25	5,00	2.463.050.689,75	5,00	2.660.094.745,00	25,00	10.450.462.981,00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura	%	5,00	5,00	200.727.098,75	5,00	385.304.183,75	5,00	1.578.037.027,50	5,00	1.641.158.508,75	5,00	1.759.321.921,25	5,00	1.900.067.675,00	25,00	7.464.616.415,00	
		Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	5,00	5,00	160.581.679,00	5,00	308.243.347,00	5,00	1.262.429.622,00	5,00	1.312.926.807,00	5,00	1.407.457.537,00	5,00	1.520.054.140,00	25,00	5.971.693.132,00	

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan	%	5,00	5,00	160.581.679,00	5,00	308.243.347,00	5,00	1.262.429.622,00	5,00	1.312.926.807,00	5,00	1.407.457.537,00	5,00	1.520.054.140,00	25,00	5.971.693.132,00	
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi baik	%	75,00	75,00	5.262.204.986,00	75,00	14.130.670.217,00	75,00	4.746.472.144,00	75,00	4.936.331.028,00	75,00	5.291.746.864,00	75,00	5.715.086.612,00	75,00	40.082.511.851,00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Presentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	%	#######	100,00	4.789.648.916,70	100,00	7.762.097.100,00	100,00	7.477.822.620,00	100,00	7.517.250.207,00	100,00	7.635.518.543,00	100,00	8.234.092.976,00	100,00	43.416.430.362,70	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Presentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	%	#######	100,00	599.084.111,00	100,00	1.735.001.300,00	100,00	1.856.251.365,00	100,00	1.749.063.933,00	100,00	1.836.517.130,00	100,00	1.928.342.986,00	100,00	9.704.260.825,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Presentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%	-	100,00	0,00	100,00	12.158.800,00	100,00	12.766.740,00	100,00	13.405.077,00	100,00	14.075.331,00	100,00	14.779.098,00	100,00	241.576.500,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Presentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%	46,09	100,00	263.097.430,00	100,00	1.145.524.400,00	100,00	1.202.800.620,00	100,00	1.262.940.651,00	100,00	1.326.087.684,00	100,00	1.472.392.068,00	100,00	6.672.842.853,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	110.773	######	79.206.886,50	######	117.748.362,50	117.553	316.180.160,00	119.904	319.665.572,40	122.302	353.845.920,00	124.748	357.693.990,00	124.748	1.544.340.891,40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah Objek Wisata Super prioritas yang dikembangkan	Objek	3	3	158.413.773,00	3	235.496.725,00	4	869.495.440,00	4	879.080.324,10	5	973.076.280,00	5	983.658.472,50	5	4.099.221.014,60	
		Persentase sarana dan Prasarana di Objek wisata prioritas dalam kondisi baik	%	60	60	47.524.131,90	65	70.649.017,50	70	237.135.120,00	72	239.749.179,30	75	265.384.440,00	80	268.270.492,50	80	1.128.712.381,20	
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	0,45	0,47	31.682.754,60	0,50	47.099.345,00	0,60	158.090.080,00	0,70	159.832.786,20	0,80	176.922.960,00	1,00	178.846.995,00	1,00	752.474.920,80	

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi pariwisata	%	-	100,00	246.277.198,00	100,00	181.899.523,00	100,00	381.288.340,00	100,00	392.726.952,00	100,00	439.265.100,00	100,00	451.893.971,00	100,00	2.093.351.084,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase ruang berekspresi pelaku ekonomi kreatif yang di bangun	%	37,50	37,50	49.745.800,00	50,00	198.983.200,00	62,50	242.759.504,00	75,00	250.042.289,00	87,50	279.672.300,00	100,00	287.712.879,00	100,00	1.308.915.972,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peserta Pelatihan yang memahami Materi pelatihan	%	80,00	80,00	730.273.763,50	80,00	497.584.841,00	85,00	409.036.562,50	85,00	436.307.659,50	90,00	497.094.859,00	90,00	527.197.826,50	90,00	3.097.495.512,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase SDM ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi (terlatih)	%	-	13,33	438.164.258,10	33,33	298.550.904,60	60,00	245.421.937,50	73,33	261.784.595,70	93,33	298.256.915,40	100,00	316.318.695,90	100,00	1.858.497.307,20	
		Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi (Uji Kompetensi)	%	26,67	33,33	292.109.505,40	46,67	199.033.936,40	73,33	163.614.625,00	80,00	174.523.063,80	93,33	198.837.943,60	100,00	210.879.130,60	100,00	1.238.998.204,80	

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	%	3,33	0,33	49.745.800,00	-	0,00	0,16	600.000.000,00	0,16	600.000.000,00	0,16	600.000.000,00	0,20	800.000.000,00	1,01	2.649.745.800,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
12	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase KSP Yang Difasilitasi Perizinannya	%		-	0,00	-	0,00	25,00	10.000.000,00	25,00	10.000.000,00	25,00	10.000.000,00	25,00	10.000.000,00	25,00	40.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
13	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif	%	55,00	21,10	22.780.858,00	21,10	22.349.350,00	21,10	44.698.700,00	36,70	80.000.000,00	36,70	80.000.000,00	36,70	80.000.000,00	36,70	329.828.908,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
14	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang sesuai dengan kriteria penilaian	%	-	-	0,00	-	0,00	57,50	62.349.350,00	57,50	62.349.350,00	57,50	62.349.350,00	57,50	62.349.350,00	57,50	249.397.400,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
15	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase permohonan ijin usaha perdagangan yang memperoleh Rekomendasi	%	-	-	0,00	-	0,00	77,00	18.431.600,00	77,00	18.431.600,00	77,00	18.431.600,00	77,00	18.431.600,00	3,09	73.726.400,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
16	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar Rakyat dalam kondisi Baik	%	45,45	50,00	333.724.271,00	54,55	558.565.049,00	59,09	393.724.270,00	63,64	543.724.271,00	68,18	643.724.271,00	86,36	643.724.271,00	86,36	3.117.186.403,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
17	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah	%	100,00	100,00	63.601.102,00	100,00	108.386.050,00	100,00	97.182.212,00	100,00	220.786.850,00	100,00	255.786.850,00	100,00	255.786.850,00	100,00	1.001.529.914,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
18	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Usaha Komoditi Ekspor Yang Mendapat Fasilitasi Pengembangan	%	-	-	0,00	-	60.000.000,00	40,00	161.000.000,00	40,00	195.000.000,00	40,00	195.000.000,00	60,00	255.000.000,00	60,00	866.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
19	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP yang bertanda Tera Sah	%	100,00	100,00	53.542.035,00	100,00	24.751.575,00	100,00	56.542.035,00	100,00	56.542.035,00	100,00	113.000.000,00	100,00	113.000.000,00	100,00	417.377.680,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
20	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	%	-	-	0,00	-	0,00	20,00	65.000.000,00	20,00	65.000.000,00	20,00	195.000.000,00	43,00	230.000.000,00	10,30	555.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
21	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Sentra Industri Aktif	%	33,33	33,33	0,00	33,33	0,00	66,67	23.000.000,00	66,67	23.000.000,00	100,00	113.000.000,00	100,00	113.000.000,00	100,00	272.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase IKM Yang Menempati Sentra Industri	%	33,33	33,33	65.222.337,00	33,33	382.981.751,00	66,67	392.981.751,00	66,67	392.981.751,00	100,00	1.289.815.352,00	100,00	1.289.815.352,00	100,00	3.813.798.294,00	
22	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM Yang Memiliki Rekomendasi Penerbitan Izin	%	8,33	16,67	0,00	33,33	0,00	50,00	10.000.000,00	66,67	10.000.000,00	83,33	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	40.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
23	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM Yang Terdaftar di SIINas	%	8,33	16,67	0,00	33,33	0,00	50,00	11.545.300,00	66,67	11.545.300,00	83,33	11.545.300,00	100,00	11.545.300,00	100,00	46.181.200,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
24	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian	%	-	100,00	160.075.952,00	100,00	399.988.293,00	100,00	399.988.293,00	100,00	399.988.293,00	100,00	399.988.293,00	100,00	402.488.622,00	100,00	2.162.517.746,00	Sekretariat Daerah
		Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan	%	-	100,00	159.981.853,84	100,00	468.999.940,00	100,00	468.999.940,00	100,00	468.999.940,00	100,00	468.999.940,00	100,00	529.003.271,00	100,00	2.564.984.884,84	
		persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	%	-	100,00	357.073.759,00	100,00	299.998.153,00	100,00	299.998.153,00	100,00	299.998.153,00	100,00	299.998.153,00	100,00	358.950.485,00	100,00	1.916.016.856,00	
		Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemantauan SDA	%	-	100,00	120.106.052,00	100,00	264.534.720,00	100,00	264.534.720,00	100,00	264.534.720,00	100,00	264.534.720,00	100,00	264.534.720,00	100,00	1.442.779.652,00	
25	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kegiatan promosi penanaman modal	%	-	20,00	1.000.000,00	30	10.271.240,00	40	30.000.000,00	50	30.000.000,00	60	50.000.000,00	70	50.000.000,00	70,00	171.271.240,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah Nilai Investasi	Milyar Rp	82,00	97,00	1.016.745,00	107,00	50.000.000,00	140,00	70.000.000,00	145,00	70.000.000,00	160,00	100.000.000,00	200,00	100.000.000,00	200,00	391.016.745,00	
		Dokumen Strategi Penanaman Modal	ada/ tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0,00	ada	50.000.000,00	ada	150.000.000,00	ada	150.000.000,00	ada	250.000.000,00	ada	250.000.000,00	ada	850.000.000,00	
26	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persetase lumbung pangan masyarakat yang aktif	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50.000.000,00	100,00	51.000.000,00	100,00	551.012.500,00	100,00	600.000.000,00	100,00	1.252.012.500,00	Dinas Ketahanan Pangan
27	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	nilai	72,30	72,30	509.838.195,00	76,40	239.999.185,00	78,70	365.000.000,00	80,20	363.450.000,00	82,10	432.261.057,56	83,40	528.000.000,00	83,40	2.438.548.437,56	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Kesediaan Pangan Utama	%	87,75	88,18	153.110.106,00	88,62	109.853.425,00	89,06	285.000.000,00	89,51	304.500.000,00	89,95	318.500.000,00	90,40	481.000.000,00	90,40	1.651.963.531,00	

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
28	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rawan Pangan	%	8,54	8,54	57.668.427,00	8,54	30.085.068,00	7,32	165.000.000,00	6,10	165.000.000,00	4,88	187.009.375,00	3,66	205.000.000,00	3,66	809.762.870,00	Dinas Ketahanan Pangan
29	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	1kali	100%	50.574.752,00	100%	109.821.722,00	100%	200.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	224.500.000,00	100%	260.000.000,00	100%	1.054.896.474,00	Dinas Ketahanan Pangan
30	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Ternak	%	100,00	100,00	75.105.251,00	100,00	89.196.816,00	100,00	267.500.000,00	100,00	278.200.000,00	100,00	298.230.400,00	100,00	322.088.832,00	100,00	1.330.321.299,00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
31	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Hama Penyakit yang ditangani	%	-	80,00	312.479.894,65	80,00	750.522.204,85	80,00	698.196.400,00	80,00	726.124.256,00	80,00	778.405.202,30	80,00	840.677.618,55	80,00	4.106.405.576,35	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani	%	-	60,00	255.665.368,35	60,00	614.063.622,15	65,00	571.251.600,00	70,00	594.101.664,00	75,00	636.876.983,70	80,00	687.827.142,45	80,00	3.359.786.380,65	

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
32	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Pemberian Rekomendasi Pada Kelompok Tani Berkelanjutan yang ditindaklanjuti	%	-	100,00	33.947.566,00	100,00	14.464.000,00	100,00	53.500.000,00	100,00	55.640.000,00	100,00	59.646.080,00	100,00	64.417.766,00	100,00	281.615.412,00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
33	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	-	100,00	89.830.191,55	100,00	359.026.501,90	100,00	147.125.000,00	100,00	153.010.000,00	100,00	164.026.720,00	100,00	177.148.857,60	100,00	1.090.167.271,05	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
		Persentase kelembagaan Petani yang di Bina	%	60,00	68,00	73.497.429,45	75,00	293.748.956,10	80,00	120.375.000,00	85,00	125.190.000,00	90,00	134.203.680,00	100,00	144.939.974,40	100,00	891.955.039,95	
34	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	-	-	409.300.039,00	79,00	128.551.053,00	79,00	230.000.000,00	79,50	280.000.000,00	80,50	462.000.000,00	81,50	609.000.000,00	81,50	2.118.851.092,00	Dinas Perhubungan
		Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum	%	85,00	85,00	4.244.000,00	86,00	5.200.000,00	87,00	22.000.000,00	88,00	75.000.000,00	89,00	25.000.000,00	90,00	10.000.000,00	90,00	141.444.000,00	
35	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan Pengelolaan Pelayaran	%	-	100,00	11.021.360,00											100,00	11.021.360,00	Dinas Perhubungan

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran:																			
3.1.2	**Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar**	**Indeks Infrastruktur Wilayah**	**%**	**67,01**	**67,83**	**67.412.763.858,71**	**71,60**	**71.141.762.950,00**	**73,20**	**74.345.238.120,79**	**76,45**	**84.376.466.305,62**	**78,15**	**90.076.766.261,76**	**80,05**	**96.408.099.972,49**	**80,05**	**483.761.097.469,37**	
Program																			
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	%	49,27	54,33	18.926.095.200,00	54,83	30.889.188.000,00	55,33	20.330.956.892,50	55,83	21.734.934.568,78	56,33	25.489.853.658,01	56,83	27.593.186.814,01	56,83	144.964.215.133,30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	94,63	94,63	500.000.000,00	95,50	450.000.000,00	96,50	1.000.000.000,00	97,50	1.450.000.000,00	98,50	2.150.000.000,00	99,50	2.650.000.000,00	99,50	8.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Bangunan Perkuatan tebing (talud) dan Pengamanan Pantai (Tanggul) dalam Kondisi Baik	%	70,00	83,62	5.922.640.000,00	85,12	10.080.000.000,00	86,62	5.389.896.250,00	88,12	7.330.000.000,00	89,62	5.742.144.365,63	91,12	5.982.401.583,91	91,12	40.447.082.199,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	90,00	91,94	4.171.195.000,00	93,14	4.974.193.200,00	94,35	5.095.616.960,84	95,55	5.791.566.062,50	96,75	5.463.000.000,00	97,95	5.783.000.000,00	97,95	31.278.571.223,34	
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM / jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten	%	71,41	69,87	14.189.248.000,00	68,86	7.467.809.000,00	67,85	15.206.960.400,00	66,84	16.669.548.841,00	65,82	16.883.026.283,05	64,81	17.487.177.597,20	64,81	87.903.770.121,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Penduduk berakses air mimun (Non Perpipaan)	%	28,66	30,13	0,00	31,14	0,00	32,15	187.848.020,00	33,16	400.000.000,00	34,18	250.000.000,00	35,19	350.000.000,00	35,19	1.187.848.020,00	
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sarana Persampahan Regional	%	-	-	0,00	-	0,00	100	200.000.000,00	100	250.000.000,00	100	400.000.000,00	100	450.000.000,00	100	1.300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentasi Akses Sanitasi	%	70,00	71,00	10.991.155.300,00	73,26	5.981.169.500,00	75,00	12.258.019.740,25	80,00	12.818.420.727,25	85,00	13.459.341.763,62	90,00	13.926.879.092,71	90,00	69.434.986.123,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Proporsi drainase kabupaten dalam kondisi baik	%	92,22	92,85	250.000.000,00	93,69	2.045.000.000,00	94,53	1.012.500.000,00	95,37	2.075.625.000,00	96,22	2.139.406.250,00	97,06	2.300.000.000,00	97,06	9.822.531.250,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Program Pengembangan Permukiman	Persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh	%	100,00	100,00	600.000.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	140.000.000,00	100,00	140.000.000,00	100,00	1.260.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	%	-	-	0,00	-	0,00	100,00	17.500.000,00	100,00	20.125.000,00	100,00	52.881.250,00	100,00	55.775.312,50	100,00	146.281.562,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase permohonan IUJK yang terlayani	%	-	100,00	4.013.706,00	100,00	5.944.640,00	100,00	35.000.000,00	100,00	35.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	279.958.346,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase kondisi gedung pemerintah baik	%	100,00	100,00	1.752.450.000,00	100,00	1.405.000.000,00	100,00	1.103.079.635,35	100,00	1.398.833.385,35	100,00	1.266.874.822,85	100,00	1.299.411.669,43	100,00	8.225.649.512,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dan RDTR	%	100,00	100,00	0,00	100,00	268.509.164,00	100,00	180.500.000,00	100,00	163.625.000,00	100,00	570.406.250,00	100,00	479.770.625,00	100,00	1.662.811.039,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Ketersediaan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten yang dapat diakses oleh masyarakat	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	130.649.161,00	Ada	55.767.139,00	Ada	232.000.000,00	Ada	212.000.000,00	Ada	969.000.000,00	Ada	877.000.000,00	Ada	2.476.416.300,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kondisi PSU dalam kondisi baik	%	-	80,00	2.199.819.191,00	80,00	1.709.992.702,00	80,00	2.841.440.840,87	80,00	3.390.299.676,76	80,00	3.126.439.553,02	80,00	3.441.286.531,02	80,00	16.709.278.494,67	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	%	-					80,00	60.000.000,00	80,00	30.000.000,00	80,00	39.142.065,60	80,00	188.525.000,00	80,00	317.667.065,60	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
12	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase sertifikat yang diterbitkan	%	-	100,00		-		65,00	200.000.000,00	75,00	200.000.000,00	80,00	200.000.000,00	90,00	200.000.000,00	90,00	800.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
13	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten	%	-	55,00	73.056.165,00	55,00	30.999.773,00	60,00	160.000.000,00	75,00	215.000.000,00	85,00	270.000.000,00	90,00	355.000.000,00	90,00	1.104.055.938,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase kawasan permukiman di kabupaten yang ditangani	%	-	50,00	7.641.269.837,71	50,00	5.265.021.732,00	60,00	7.063.919.380,98	75,00	7.499.999.999,98	80,00	7.874.999.999,98	90,00	8.672.410.746,71	90,00	44.017.621.697,36	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
14	Program Pengembangan Perumahan	persentase perbaikan rumah akibat bencana	%	-	50,00	31.167.298,00	55,00	99.999.050,00	60,00	135.000.000,00	75,00	146.488.044,00	80,00	175.000.000,00	90,00	460.000.000,00	90,00	1.047.654.392,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten	%	-				0,00	50,00	980.000.000,00	60,00	1.885.000.000,00	75,00	2.685.000.000,00	85,00	2.795.000.000,00	85,00	8.345.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	%	-	50,00		50,00	17.999.050,00	60,00	15.000.000,00	75,00	15.000.000,00	85,00	20.000.000,00	90,00	50.000.000,00	90,00	117.999.050,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
15	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigrasi Umum	%	-	100,00	30.005.000,00	100,00	95.170.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	105.000.000,00	100,00	110.250.000,00	100,00	121.275.000,00	100,00	561.700.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Transmigrasi	Dokumen	ada		0,00		0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang di kembangkan	%	-		0,00		0,00	100,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	450.000.000,00	100,00	1.650.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sasaran:																			
3.1.3	**Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Poin**	**68,56**	**69,51**	**9.261.618.005,00**	**69,96**	**11.193.523.247,00**	**70,41**	**10.470.354.703,94**	**70,86**	**11.217.190.724,14**	**71,00**	**12.350.987.060,35**	**71,20**	**13.433.329.250,87**	**71,20**	**67.582.002.991,30**	
Program																			
1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang terkurangi melalui 3R	%	2,68	22,00	1.057.697.187,00	22,00	25.535.000,00	22,00	85.000.000,00	22,00	235.000.000,00	22,00	235.000.000,00	22,00	235.000.000,00	22,00	1.873.232.187,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase TP3SR di Desa dan Kelurahan	%	9,76	10,98		13,41	384.220.000,00	15,85	100.000.000,00	18,29	150.000.000,00	20,73	100.000.000,00	23,17	100.000.000,00	23,17	834.220.000,00	
		Persentase Cakupan area penanganan persampahan	%	63,45	63,45		63,80	789.615.000,00	64,20	10.000.000,00	64,55	25.000.000,00	64,75	75.000.000,00	64,95	75.000.000,00	64,95	974.615.000,00	
		Persentase Jumlah sampah yang tertangani	%	65,12	65,12		65,55	1.331.823.191,00	65,80	1.052.500.000,00	66,11	1.412.500.000,00	66,35	1.917.500.000,00	66,50	2.100.000.000,00	66,50	7.814.323.191,00	
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	%	-	58,75	1.000.000.000,00	58,85	1.359.523.000,00	58,95	400.000.000,00	59,05	450.000.000,00	59,15	450.000.000,00	59,25	450.000.000,00	59,25	4.109.523.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Indeks Kualitas Udara	%	29,81	84,31	175.000.000,00	84,41	210.155.450,00	84,51	58.393.000,00	84,61	75.000.000,00	84,71	75.000.000,00	84,81	67.500.000,00	84,81	661.048.450,00	

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	29,14	60,61	493.211.520,00	62,31	1.728.892.000,00	64,02	1.500.000.000,00	65,72	1.500.000.000,00	67,42	1.500.000.000,00	69,12	1.643.628.000,00	69,12	8.365.731.520,00	
3	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase desa dan Kelurahan yang diawasi atas perizinan bangunan gedung atau prasarana bangunan	%	N/A	0,00	0,00	-	0,00	100,00	611.500.000,00	100,00	594.575.000,00	100,00	729.303.750,00	100,00	773.061.975,00	100	2.708.440.725,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KENATI)	Luas RTH yang tersedia	%	-	70,00	34.189.892,00	75,00	125.764.450,00	75,00	113.164.000,00	77,25	143.164.000,00	77,85	248.164.000,00	78,00	228.849.000,00	78,00	893.295.342,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Perizinan Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan	%	100,00	100,00	11.525.643,00	100,00	11.044.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	45.000.000,00	100,00	45.000.000,00	100,00	162.569.643,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin PPLH yang diterbitkan	%	-	90,00	11.331.788,00	90,00	14.097.050,00	90,00	30.000.000,00	90,00	30.000.000,00	90,00	35.000.000,00	90,00	40.000.000,00	90,00	160.428.838,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7	Program Pengaduan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Presentasi Data MHA yang tersedia	%	-	25,00		25,00		25,00		25,00	20.000.000,00	25,00	20.000.000,00	25,00	20.000.000,00	25,00	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat / Komunitas peduli Lingkungan Hidup yang mendapatkan Edukasi Lingkungan Hidup	%	-	100,00		100,00		100,00	50.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	75.000.000,00	100,00	70.000.000,00	100,00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Persentase pelatihan, pendidikan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Yang dilakasanakan	%	-	100,00		100,00		100,00	15.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00		
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Klasifikasi Adipura	Pering-kat	-	Kelas IV	61.032.789,00	Kelas IV	61.462.463,00	Kelas IV	65.000.000,00	Kelas IV	80.000.000,00	Kelas III	90.000.000,00	Kelas III	90.000.000,00	Kelas III	447.495.252,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Aduan Lingkungan Hidup yang ditangani	%	100,00	100,00	16.695.404,00	100,00	16.723.542,00	100,00	20.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	128.418.946,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
11	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	177.093.404,00	100,00	40.600.576,00	100,00	240.600.000,00	100,00	40.600.000,00	100,00	40.600.000,00	100,00	440.600.000,00	100,00	980.093.980,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
12	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase pengajuan izin lokasi yang disetujui	%	-	-	0,00	-	0,00	60,00	52.500.000,00	65,00	55.125.000,00	65,00	57.881.250,00	80,00	60.775.312,50	80,00	226.281.562,50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
13	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi	%	-	50,00	13.682.830,00	50,00	36.068.275,00	65,00	52.500.000,00	75,00	55.125.000,00	80,00	57.881.250,00	95,00	60.775.312,50	95,00	276.032.667,50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
14	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Cakupan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	-	50,00	5.999.331.234,00	50,00	5.028.999.500,00	55,00	5.616.197.703,94	75,00	5.897.007.589,14	80,00	6.191.857.968,60	90,00	6.501.450.867,03	90,00	35.234.844.862,71	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tanah milik Masyarakat yang terfasilitasi untuk mendapatkan sertifikat	%	-	55,00	210.826.314,00	60,00	28.999.750,00	65,00	84.000.000,00	85,00	74.094.135,00	90,00	77.798.841,75	100,00	81.688.783,84	100,00	557.407.824,59	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
16	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase pengelolaan tanah kosong yang dimanfaatkan	%	-	-	0,00	-	0,00	55,00	105.000.000,00	60,00	80.000.000,00	85,00	100.000.000,00	90,00	100.000.000,00	90,00	385.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
17	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase luas lahan yang bersertifikat	%	-	-	0,00	-	0,00	50,00	84.000.000,00	50,00	80.000.000,00	65,00	80.000.000,00	85,00	100.000.000,00	85,00	344.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
18	Program Penatagunaan Tanah	Ketersediaan dokumen rencana penggunaan tanah	%		-	0,00	-	0,00	50,00	105.000.000,00	65,00	80.000.000,00	75,00	100.000.000,00	90,00	100.000.000,00	90,00	385.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Misi 4: Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis																			
Tujuan:																			
4.1.	**Meningkatkan kesalihan sosial masyarakat**	**Indeks Kesalihan Sosial**	**%**	**-**	**-**	**3.288.599.412,00**	**65**	**4.196.442.378,00**	**70**	**6.377.466.986,00**	**75**	**7.434.329.879,40**	**78**	**8.431.335.235,00**	**80**	**8.668.455.232,00**	**80**	**38.396.629.122,40**	
Sasaran:																			
4.1.1.	**Meningkatnya kepedulian sosial, lingkungan dan bernegara**	**Angka Kriminalitas**	**Jumlah**	**257**	**240**	**3.288.599.412,00**	**230**	**4.196.442.378,00**	**220**	**6.377.466.986,00**	**200**	**7.434.329.879,40**	**190**	**8.431.335.235,00**	**180**	**8.668.455.232,00**	**180**	**38.396.629.122,40**	

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program:																			
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Konflik Sara yang ditangani	%	100,00	100,00	110.210.149,00	100,00	250.165.500,00	100,00	490.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	530.000.000,00	100,00	480.000.000,00	100,00	2.460.375.649,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penigkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	100,00	100,00	92.108.301,00	100,00	153.128.600,00	100,00	300.000.000,00	100,00	425.000.000,00	100,00	900.000.000,00	100,00	900.000.000,00	100,00	2.770.236.901,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100,00	100,00	118.584.306,00	100,00	248.729.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	1.667.313.306,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	100,00	100,00		100,00	87.892.500,00	100,00	470.000.000,00	100,00	670.000.000,00	100,00	725.136.035,00	100,00	755.136.035,00	100,00	2.708.164.570,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00		100,00	46.876.000,00	100,00	450.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	555.000.000,00	100,00	565.000.000,00	100,00	2.116.876.000,00	

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rasio PPNS terhadap Jumlah Pegawai	%	-	55,00		60,00	43.946.250,00	65,00	335.000.000,00	70,00	350.000.000,00	75,00	375.000.000,00	80,00	375.000.000,00	80,00	1.478.946.250,00	
		Persentase PNS Satpol yang mengikuti Diklat/ Pendidikan	%	-	55,00		60,00	76.173.500,00	65,00	370.000.000,00	70,00	400.000.000,00	75,00	455.000.000,00	80,00	455.000.000,00	80,00	1.756.173.500,00	
		Persentase anggota linmas yang bersertifikasi	%	-	55,00		60,00	38.086.750,00	65,00	285.000.000,00	70,00	366.391.459,00	75,00	480.000.000,00	80,00	488.839.818,00	80,00	1.658.318.027,00	
5	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	%	100,00	100,00	949.084.308,00	100,00	1.085.129.416,00	100,00	620.000.000,00	100,00	980.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	4.634.213.724,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan serta budaya politik	Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Serta Budaya Politik	%	100,00	100,00	33.215.093,00	100,00	326.392.190,00	100,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	1.509.607.283,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase event kesenian skala Nasional/regionla yang dilaksanakan	%	37,50	37,50	634.344.320,00	50,00	555.375.424,00	62,50	765.149.917,60	75,00	788.104.416,00	87,50	881.494.800,00	100,00	906.837.776,00	100,00	4.531.306.653,60	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase lembaga adat yang di bina	%	66,66	66,66	158.586.080,00	75,00	138.843.856,00	83,33	191.287.479,40	91,66	197.026.104,00	100,00	220.373.700,00	100,00	226.709.444,00	100,00	1.132.826.663,40	
8	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kelompok Kesenian yang dibina	%	6,00	8,00	149.237.400,00	10,00	0,00	13,00	182.069.628,00	16,00	187.531.717,00	20,00	209.754.200,00	25,00	215.784.633,00	25,00	944.377.578,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	45,45	45,45	69.796.423,00	54,55	7.025.422,00	63,64	85.151.636,00	72,73	87.706.185,00	81,82	98.099.300,00	90,91	100.919.655,00	90,91	448.698.621,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang di kelola secara terpadu	%	73,68	73,68	282.233.886,00	78,95	395.304.908,00	84,21	482.271.988,00	89,47	496.740.147,00	94,74	555.604.600,00	100,00	571.578.232,00	100,00	2.783.733.761,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO.	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase sarana dan prasarana museum dalam kondisi baik	%	10,00	20,00	628.059.146,00	30,00	712.143.762,00	40,00	868.815.390,00	50,00	894.879.851,00	60,00	1.000.923.100,00	70,00	1.029.699.639,00	70,00	5.134.520.888,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Banggae Timur	%	-	50,00	41.650.000,00	52,00	28.729.300,00	54,00	25.000.000,00	56,00	61.000.000,00	58,00	65.000.000,00	60,00	68.000.000,00	60,00	289.379.300,00	Kecamatan Banggae Timur
		Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Banggae	%	-		0,00	52,00	0	54,00	76720947	56,00	43950000,4	58,00	43949500	60,00	43950000	60,00	208.570.447,40	Kecamatan Banggae
		Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Sendana	%	-	50,00	12.240.000,00	52,00	0,00	54,00	16.000.000,00	56,00	16.000.000,00	58,00	16.000.000,00	60,00	16.000.000,00	60,00	76.240.000,00	Kecamatan Sendana
		Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Tammerodo Sendana	%	-	50,00	9.250.000,00		2.500.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		86.750.000,00	Kecamatan Tammerodo Sendana

MATRIKS II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF KABUPATEN MAJENE

MATRIKS II
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**																		
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	227.549.059.482	100,00	219.153.051.754	100,00	253.925.378.726	100,00	264.755.096.481	100,00	278.730.426.524	100,00	281.759.529.790	100,00	1.525.872.542.757	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SD	%	103,91	104,31	4.855.636.757	104,61	3.300.000.000	104,91	6.227.244.000	105,61	6.227.244.000	105,91	6.227.244.000	106,41	6.750.444.000	106,41	33.587.812.757	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga
				Angka Partisipasi Kasar SMP	%	84,25	86,28	3.972.793.710	89,48	2.700.000.000	93,35	4.151.496.000	96,19	4.151.496.000	98,23	4.151.496.000	100,00	4.500.296.000	100,00	23.627.577.710	
				Angka Partisipasi Murni SD	%	96,86	97,00	4.854.300.000	98,00	3.300.000.000	98,50	6.227.244.000	99,00	6.227.244.000	99,50	6.227.244.000	100,00	6.750.444.000	100,00	33.586.476.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Angka Partisipasi Murni SMP	%	92,72	94,00	3.971.700.000	96,23	2.700.000.000	97,00	4.151.496.000	98,00	4.151.496.000	99,00	4.151.496.000	100,00	4.500.296.000	100,00	23.626.484.000	
		Angka Partisipasi Sekolah SD	%	96,86	97,00	4.854.300.000	98,00	3.300.000.000	98,50	6.227.244.000	99,00	6.227.244.000	99,50	6.227.244.000	100,00	6.750.444.000	100,00	33.586.476.000	
		Angka Partisipasi Sekolah SMP	%	92,72	94,00	3.971.700.000	96,23	2.700.000.000	97,00	4.151.496.000	98,00	4.151.496.000	99,00	4.151.496.000	100,00	4.500.296.000	100,00	23.626.484.000	
		Persentase sarpras Sekolah dalam kondisi baik	%	-	60,00	10.000.000.000	65,00	8.029.084.827	70,00	10.378.740.000	80,00	10.378.740.000	90,00	10.378.740.000	100,00	11.250.740.000	100,00	60.416.044.827	
		Persentase satuan pendidikan SD terakreditasi B	%	70,00	73,00	5.400.000.000	75,00	4.200.000.000	80,00	6.227.244.000	85,00	6.227.244.000	87,00	6.227.244.000	90,00	6.750.444.000	90,00	35.032.176.000	
		Persentase satuan pendidikan SMP terakreditasi B	%	-	40,00	3.600.000.000	50,00	2.800.000.000	60,00	4.151.496.000	65,00	4.151.496.000	70,00	4.151.496.000	75,00	4.500.296.000	75,00	23.354.784.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan dan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	%	-		107.709.018	100,00	41.093.600	100,00	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00	400.000.000	100,00	1.358.802.618	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga
1	01	04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PAUD, SD, SMP yang bersertifikasi	%	-	-	124.614.419	100,00	50.000.000	80,00	70.000.000	85,00	70.000.000	90,00	70.000.000	95,00	70.000.000	95,00	454.614.419	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga
1	01	04	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Izin yang diterbitkan	%	-	-	0,00	70	0,00	70	100.000.000,00	70	100.000.000,00	70	100.000.000,00	70	100.000.000,00	70	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga
1	01	05	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Bahasa dan Sastra yang di Kembangkan	%	-	-	0,00	100	0,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	340.000.000,00	100	1.090.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																		
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	40.248.844.610	100,00	33.884.483.998	100,00	46.244.147.898	100,00	48.539.094.086	100,00	50.952.686.752	100,00	53.482.116.998	100,00	273.351.374.342	Dinas Kesehatan
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	-	0,50	2.803.267.178	0,60	1.041.359.779	0,70	1.459.610.449	0,80	1.422.723.389	0,90	1.408.810.182	1	1.363.381.645	1	9.499.152.622,00	Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				% Fasyankes yang memiliki dokumen manajemen mutu dan keselamatan pasien	%	-	5,00	5.614.117.533	18,18	7.187.161.138	36,00	6.750.727.033	55,00	6.860.405.622	73,00	7.001.086.965	100,00	7.110.200.477	100,00	40.523.698.768,00	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Penyakit Menular dan	%	38,00	34,00	4.386.838.439	33,34	1.455.928.553	32,68	3.644.302.853	32,03	3.682.530.794	31,39	3.659.231.361	30,76	3.483.155.514	30,76	20.311.987.514,00	Dinas Kesehatan
				% Fasyankes yang terpenuhi kebutuhan ASPAK sesuai standar	%	-	18,18	33.762.552.020	36,36	14.766.980.992	54,55	32.157.785.492	72,73	32.132.054.102	90,91	32.587.452.921	100,00	32.673.916.378	100,00	178.080.741.905,00	Dinas Kesehatan
				Proporsi anggaran yang dialokasikan ke fasilitas pelayanan kesehatan	%	10,00	37,00	86.586.381.166	38,00	81.369.268.686	39,00	91.610.618.107	40,00	94.033.246.997	41,00	96.858.479.034	42,00	99.448.240.348	42,00	549.906.234.338,04	Dinas Kesehatan
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standart	%	72,73	82,00	897.894.133,00	91,00	856.750.000,00	100,00	2.547.980.170,00	100,00	2.483.587.993,00	100,00	2.459.300.295,00	100,00	2.379.997.622,00	100,00	11.625.510.213,00	Dinas Kesehatan
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	% Ketersediaan Apotek, Toko Obat, Alkes dan Optikal UMOT dan PIRT sesuai standar	%	47,00	71,00	170.709.840	81,00	263.320.000	85,00	1.019.192.068	90,00	993.435.199	95,00	983.720.120	100,00	951.999.049	100,00	4.382.376.276,00	Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/ Kelurahan Sehat	%	20,00	35,00	261.313.000,00	40,00	287.528.270,00	50,00	1.528.788.103,00	55,00	1.490.152.796,00	60,00	1.475.580.177,00	65,00	1.427.998.574,00	65,00	6.471.360.920,00	Dinas Kesehatan
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																		
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	5.632.852.350,00	100,00	5.820.376.280,00	100,00	7.540.429.867,06	100,00	7.982.039.191,12	100,00	7.949.169.346,84	100,00	8.383.435.539,24	100,00	43.308.302.574,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Bangunan Perkuatan tebing (talud) dan Pengamanan Pantai (Tanggul) dalam Kondisi Baik	%	70,00	83,62	5.922.640.000,00	85,12	10.080.000.000,00	86,62	5.389.896.250,00	88,12	7.330.000.000,00	89,62	5.742.144.365,63	91,12	5.982.401.583,91	91,12	40.447.082.199,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	90,00	91,94	4.171.195.000,00	93,14	4.974.193.200,00	94,35	5.095.616.960,84	95,55	5.791.566.062,50	96,75	5.463.000.000,00	97,95	5.783.000.000,00	97,95	31.278.571.223,34	
1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM / jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten	%	71,41	69,87	14.189.248.000,00	68,86	7.467.809.000,00	67,85	15.206.960.400,00	66,84	16.669.548.841,00	65,82	16.883.026.283,05	64,81	17.487.177.597,20	64,81	87.903.770.121,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Penduduk berakses air mimun (Non Perpipaan)	%	28,66	30,13	0,00	31,14	0,00	32,15	187.848.020,00	33,16	400.000.000,00	34,18	250.000.000,00	35,19	350.000.000,00	35,19	1.187.848.020,00	
1	03	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sarana Persampahan Regional	%	-	-	0,00	-	0,00	100	200.000.000,00	100	250.000.000,00	100	400.000.000,00	100	450.000.000,00	100	1.300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentasi Akses Sanitasi	%	70,00	71,00	10.991.155.300,00	73,26	5.981.169.500,00	75,00	12.258.019.740,25	80,00	12.818.420.727,25	85,00	13.459.341.763,62	90,00	13.926.879.092,71	90,00	69.434.986.123,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Proporsi drainase kabupaten dalam kondisi baik	%	92,22	92,85	250.000.000,00	93,69	2.045.000.000,00	94,53	1.012.500.000,00	95,37	2.075.625.000,00	96,22	2.139.406.250,00	97,06	2.300.000.000,00	97,06	9.822.531.250,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh	%	100,00	100,00	600.000.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	100,00	140.000.000,00	100,00	140.000.000,00	100,00	1.260.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase kondisi gedung pemerintah baik	%	100,00	100,00	1.752.450.000,00	100,00	1.405.000.000,00	100,00	1.103.079.635,35	100,00	1.398.833.385,35	100,00	1.266.874.822,85	100,00	1.299.411.669,43	100,00	8.225.649.512,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	03	09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase desa dan Kelurahan yang diawasi atas perizinan bangunan gedung atau prasarana bangunan	%	-	-	0,00	-	0,00	100,00	611.500.000,00	100,00	594.575.000,00	100,00	729.303.750,00	100,00	773.061.975,00	100,00	2.708.440.725,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	%	49,27	54,33	18.926.095.200,00	54,83	30.889.188.000,00	55,33	20.330.956.892,50	55,83	21.734.934.568,78	56,33	25.489.853.658,01	56,83	27.593.186.814,01	56,83	144.964.215.133,30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	94,63	94,63	500.000.000,00	95,50	450.000.000,00	96,50	1.000.000.000,00	97,50	1.450.000.000,00	98,50	2.150.000.000,00	99,50	2.650.000.000,00	99,50	8.200.000.000,00	
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	%	-	-	0,00	-	0,00	100,00	17.500.000,00	100,00	20.125.000,00	100,00	52.881.250,00	100,00	55.775.312,50	100,00	146.281.562,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase permohonan IUJK yang terlayani	%	-	100,00	4.013.706,00	100,00	5.944.640,00	100,00	35.000.000,00	100,00	35.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	279.958.346,00	
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dan RDTR	%	100,00	100,00	0,00	100,00	268.509.164,00	100,00	180.500.000,00	100,00	163.625.000,00	100,00	570.406.250,00	100,00	579.770.625,00	100,00	1.762.811.039,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Ketersediaan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten yang dapat diakses oleh masyarakat	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	130.649.161,00	Ada	55.767.139,00	Ada	232.000.000,00	Ada	212.000.000,00	Ada	969.000.000,00	Ada	977.000.000,00	Ada	2.576.416.300,00	
1	**04**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																		
1	04	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	3.796.953.281,00	100,00	3.449.485.921,00	100,00	4.581.112.369,21	100,00	4.810.167.988,12	100,00	5.050.671.387,05	100,00	5.303.210.206,40	100,00	26.991.601.152,78	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	persentase perbaikan rumah akibat bencana	%	-	50,00	31.167.298,00	55,00	99.999.050,00	60,00	135.000.000,00	75,00	146.488.044,00	80,00	175.000.000,00	90,00	460.000.000,00	90,00	1.047.654.392,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten	%	-				0,00	50,00	980.000.000,00	60,00	1.885.000.000,00	75,00	2.685.000.000,00	85,00	2.795.000.000,00	85,00	8.345.000.000,00	
				Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	%	-	50,00		50,00	17.999.050,00	60,00	15.000.000,00	75,00	15.000.000,00	85,00	20.000.000,00	90,00	50.000.000,00	90,00	117.999.050,00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten	%	-	55,00	73.056.165,00	55,00	30.999.773,00	60,00	160.000.000,00	75,00	215.000.000,00	85,00	270.000.000,00	90,00	355.000.000,00	90,00	1.104.055.938,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Persentase kawasan permukiman di kabupaten yang ditangani	%	-	50,00	7.641.269.837,71	50,00	5.265.021.732,00	60,00	7.063.919.380,98	75,00	7.499.999.999,98	80,00	7.874.999.999,98	90,00	8.672.410.746,71	90,00	44.017.621.697,36	
1	04	04	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kondisi PSU dalam kondisi baik	%	-	80,00	2.199.819.191,00	80,00	1.709.992.702,00	80,00	2.841.440.840,87	80,00	3.390.299.676,76	80,00	3.126.439.553,02	80,00	3.441.286.531,02	80,00	16.709.278.494,67	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Persentase Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	%	-					80,00	60.000.000,00	80,00	30.000.000,00	80,00	39.142.065,60	80,00	188.525.000,00	80,00	317.667.065,60	
1	04	05	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase sertifikat yang di terbitkan	%	-	100,00		-		65,00	200.000.000,00	75,00	200.000.000,00	80,00	200.000.000,00	90,00	200.000.000,00	90,00	800.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	**05**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																		
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	4.314.167.938,00	100,00	4.520.220.620,00	100,00	5.393.262.149,00	100,00	5.893.262.149,00	100,00	6.898.262.149,00	100,00	7.798.262.149,00	100,00	34.817.437.154,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	-	100,00	5.069.807.384,20	100,00	6.457.797.680,00	100,00	8.156.700.000,00	100,00	8.356.700.000,00	100,00	8.456.700.000,00	100,00	8.656.700.000,00	100,00	45.154.405.064,20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	%	100,00	100,00		100,00	87.892.500,00	100,00	470.000.000,00	100,00	670.000.000,00	100,00	725.136.035,00	100,00	755.136.035,00	100,00	2.708.164.570,00	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00		100,00	46.876.000,00	100,00	450.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	555.000.000,00	100,00	565.000.000,00	100,00	2.116.876.000,00	
				Rasio PPNS terhadap Jumlah Pegawai	%	-	55,00		60,00	43.946.250,00	65,00	335.000.000,00	70,00	350.000.000,00	75,00	375.000.000,00	80,00	375.000.000,00	80,00	1.478.946.250,00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase PNS Satpol yang mengikuti Diklat/ Pendidikan	%	-	55,00		60,00	76.173.500,00	65,00	370.000.000,00	70,00	400.000.000,00	75,00	455.000.000,00	80,00	455.000.000,00	80,00	1.756.173.500,00	
				Persentase anggota linmas yang bersertifikasi	%	-	55,00		60,00	38.086.750,00	65,00	285.000.000,00	70,00	366.391.459,00	75,00	480.000.000,00	80,00	488.839.818,00	80,00	1.658.318.027,00	
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan, Responsifitas dalam Penangani Bencana	%	100,00	100,00	14.684.940.600,00	100,00	1.063.686.078,00	100,00	5.384.664.759,00	100,00	7.821.283.120,00	100,00	8.614.365.704,00	100,00	9.357.919.094,00	100,00	46.926.859.355,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Peningkatan responsifitas dalam penanganan kebakaran	%	100,00	100,00	57.745.800,00	100,00	30.100.000,00	100,00	750.000.000,00	100,00	800.000.000,00	100,00	800.000.000,00	100,00	750.000.000,00	100,00	3.187.845.800,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**06**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**																		
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	2.084.934.383,00	100,00	2.228.928.444,00	100,00	3.158.525.096,00	100,00	3.158.525.096,00	100,00	3.258.525.096,00	100,00	3.574.702.723,00	100,00	17.464.140.838,00	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase KAT yang ditangani	%	-	100,00	68.070.800,00	100,00	164.442.400,00	100,00	198.933.704,00	100,00	198.933.704,00	100,00	257.199.705,00	100,00	257.199.705,00	100,00	1.144.780.018,00	Dinas Sosial
1	06	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Cakupan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100,00	100,00	3.625.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	68.625.000,00	Dinas Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	%	17,00	25,00	39.564.948,00	40,00	112.022.500,00	60,00	271.680.000,00	70,00	271.680.000,00	75,00	271.680.000,00	80,00	271.680.000,00	80,00	1.238.307.448,00	Dinas Sosial
1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	75,00	80,00	384.991.103,00	85,00	313.335.625,00	90,00	400.072.369,50	100,00	400.072.369,50	100,00	500.072.369,50	100,00	500.072.369,50	100,00	2.498.616.206,00	Dinas Sosial
				Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memperoleh pelindungan dan Jaminan Sosial	%	78,00	84,00	384.991.103,00	88,00	313.335.625,00	93,00	400.072.369,50	95,00	400.072.369,50	100,00	500.072.369,50	100,00	500.072.369,50	100,00	2.498.616.206,00	
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase kampung siaga yang terbentuk	%	-	10,00	10.240.000,00	17,00	149.641.600,00	25,00	200.000.000,00	30,00	448.967.917,00	35,00	448.967.917,00	40,00	448.967.917,00	40,00	1.706.785.351,00	Dinas Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	73,00	78,00	0,00	80,00	220.800.800,00	85,00	75.000.000,00	100,00	75.000.000,00	100,00	135.000.000,00	100,00	135.000.000,00	100,00	640.800.800,00	
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100,00	100,00	24.181.968,00	100,00	23.698.750,00	100,00	260.074.808,00	100,00	260.074.808,00	100,00	260.074.808,00	100,00	260.074.808,00	100,00	1.088.179.950,00	Dinas Sosial
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
2	**07**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**																		
2	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	3.226.576.655,00	100,00	3.075.753.433,00	100,00	4.496.523.850,51	100,00	4.721.350.043,03	100,00	4.957.417.545,18	100,00	5.205.288.422,44	100,00	25.682.909.949,16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tenaga kerja	Ada/ Tidak ada	-	-	0,00	ada	0,00	ada	150.000.000,00	ada	150.000.000,00	ada	150.000.000,00	ada	150.000.000,00	ada	600.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi	%	-	70,00	311.906.260,60	75,00	574.695.550,00	80,00	248.750.000,00	90,00	270.312.500,00	100,00	462.505.625,00	100,00	446.232.930,00	100,00	2.314.402.865,60	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	%	-	85,00	255.196.031,40	90,00	470.205.450,00	90,00	213.749.999,49	95,00	225.312.499,97	95,00	415.255.626,82	100,00	396.620.434,06	100,00	1.976.340.041,74	
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan pencari kerja	%	-	100,00	25.011.159,00	100,00	49.992.500,00	100,00	250.000.000,00	100,00	285.000.000,00	100,00	290.000.000,00	100,00	295.000.000,00	100,00	1.195.003.659,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase konflik ketenagakerjaan yang ditangani	%	100,00	100,00	77.951.062,00	100,00	38.168.098,00	100,00	52.500.000,00	100,00	55.125.000,00	100,00	57.881.250,00	100,00	60.775.312,50	100,00	342.400.722,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**08**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																		
2	08	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	2.115.107.966,00	100,00	1.962.131.594,00	100,00	2.265.973.129,00	100,00	2.265.973.129,00	100,00	2.482.006.704,00	100,00	2.645.400.580,00	100,00	13.736.593.102,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga PUG yang aktif	%	-	35,00	378.220.686,00	40,00	1.043.072.294,00	45,00	1.110.000.000,00	50,00	1.110.000.000,00	55,00	1.110.000.000,00	65,00	1.220.000.000,00	65,00	5.971.292.980,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	%	25,00	28,00	397.966.400,00	33,00	248.729.000,00	37,00	349.745.800,00	42,00	349.745.800,00	46,00	350.000.000,00	48,00	450.000.000,00	48,00	2.146.187.000,00	
				Persentase perangkat Daerah Yang responsif gender	%	-	50,00	281.595.411,00	58,00	74.390.450,00	65,00	274.390.450,00	72,00	299.745.800,00	77,00	300.000.000,00	80,00	400.000.000,00	80,00	1.630.122.111,00	
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan	%	100,00	100,00	245.987.857,00	100,00	604.551.012,00	100,00	577.044.000,00	100,00	627.044.000,00	100,00	712.286.723,00	100,00	753.564.968,00	100,00	3.520.478.560,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga dan anak yang terlayani	%	75,00	80,00	198.983.200,00	85,00	220.699.744,00	90,00	203.576.924,00	95,00	203.576.924,00	100,00	203.576.924,00	100,00	203.576.924,00	100,00	1.233.990.640,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	%	-	25,00	0,00	35,00	0,00	40,00	0,00	45,00	50.000.000,00	50,00	50.000.000,00	55,00	50.000.000,00	55,00	150.000.000,00	
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan disajikan sesuai standar	%	-	32,00	54.788.238,00	40,00	21.342.572,00	45,00	70.000.000,00	50,00	70.000.000,00	60,00	70.000.000,00	70,00	70.000.000,00	70,00	356.130.810,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	%	-	50,00	14.331.492,00	60,00	34.786.630,00	70,00	65.865.061,00	80,00	125.415.061,00	85,00	140.628.431,00	90,00	140.628.431,00	90,00	521.655.106,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak	%	-	20,00	47.925.424,00	25,00	306.597.110,00	30,00	306.597.110,00	35,00	306.597.110,00	40,00	306.597.110,00	50,00	306.597.110,00	50,00	1.580.910.974,00	
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang di tangani	%	100,00	100,00	811.603.800,00	100,00	91.745.800,00	100,00	450.000.000,00	100,00	548.754.273,00	100,00	708.304.273,00	100,00	708.304.273,00	100,00	3.318.712.419,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**09**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																		
2	09	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	1.958.437.624,00	100,00	1.932.910.711,00	100,00	2.879.392.709,00	100,00	3.047.662.344,00	100,00	2.759.658.298,00	100,00	3.006.776.637,00	100,00	15.584.838.323,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persetase lumbung pangan masyarakat yang aktif	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50.000.000,00	100,00	51.000.000,00	100,00	551.012.500,00	100,00	600.000.000,00	100,00	1.252.012.500,00	Dinas Ketahanan Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	nilai	72,30	72,30	509.838.195,00	76,40	239.999.185,00	78,70	365.000.000,00	80,20	363.450.000,00	82,10	432.261.057,56	83,40	528.000.000,00	83,40	2.438.548.437,56	Dinas Ketahanan Pangan
				Persentase Kesediaan Pangan Utama	%	87,75	88,18	153.110.106,00	88,62	109.853.425,00	89,06	285.000.000,00	89,51	304.500.000,00	89,95	318.500.000,00	90,40	481.000.000,00	90,40	1.651.963.531,00	
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rawan Pangan	%	8,54	8,54	57.668.427,00	8,54	30.085.068,00	7,32	165.000.000,00	6,10	165.000.000,00	4,88	187.009.375,00	3,66	205.000.000,00	3,66	809.762.870,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	1kali	100%	50.574.752,00	100%	109.821.722,00	100%	200.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	224.500.000,00	100%	260.000.000,00	100%	1.054.896.474,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**																		
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase pengajuan izin lokasi yang disetujui	%	-	-	0,00	-	0,00	60,00	52.500.000,00	65,00	55.125.000,00	65,00	57.881.250,00	80,00	60.775.312,50	80,00	226.281.562,50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi	%	-	50,00	13.682.830,00	50,00	36.068.275,00	65,00	52.500.000,00	75,00	55.125.000,00	80,00	57.881.250,00	95,00	60.775.312,50	95,00	276.032.667,50	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Cakupan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	-	50,00	5.999.331.234,00	50,00	5.028.999.500,00	55,00	5.616.197.703,94	75,00	5.897.007.589,14	80,00	6.191.857.968,60	90,00	6.501.450.867,03	90,00	35.234.844.862,71	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tanah milik Masyarakat yang terfasilitasi untuk mendapatkan sertifikat	%	-	55,00	210.826.314,00	60,00	28.999.750,00	65,00	84.000.000,00	85,00	74.094.135,00	90,00	77.798.841,75	100,00	81.688.783,84	100,00	557.407.824,59	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase pengelolaan tanah kosong yang dimanfaatkan	%	-	-	0,00	-	0,00	55,00	105.000.000,00	60,00	80.000.000,00	85,00	100.000.000,00	90,00	100.000.000,00	90,00	385.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase luas lahan yang bersertifikat	%	-	-	0,00	-	0,00	50,00	84.000.000,00	50,00	80.000.000,00	65,00	80.000.000,00	85,00	100.000.000,00	85,00	344.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Ketersediaan dokumen rencana penggunaan tanah	%		-	0,00	-	0,00	50,00	105.000.000,00	65,00	80.000.000,00	75,00	100.000.000,00	90,00	100.000.000,00	90,00	385.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																		
2	11	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	-	100,00	5.172.428.328,00	100,00	4.845.807.406,00		6.334.722.629,00	100,00	6.398.778.407,00	100,00	6.813.782.548,00	100,00	6.938.372.912,00	100,00	36.503.892.230,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	177.093.404,00	100,00	40.600.576,00	100,00	240.600.000,00	100,00	40.600.000,00	100,00	40.600.000,00	100,00	440.600.000,00	100,00	980.093.980,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran Da-tau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	%	-	58,75	1.000.000.000,00	58,85	1.359.523.000,00	58,95	400.000.000,00	59,05	450.000.000,00	59,15	450.000.000,00	59,25	450.000.000,00	59,25	4.109.523.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
				Indeks Kualitas Udara	%	29,81	84,31	175.000.000,00	84,41	210.155.450,00	84,51	58.393.000,00	84,61	75.000.000,00	84,71	75.000.000,00	84,81	67.500.000,00	84,81	661.048.450,00	
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	29,14	60,61	493.211.520,00	62,31	1.728.892.000,00	64,02	1.500.000.000,00	65,72	1.500.000.000,00	67,42	1.500.000.000,00	69,12	1.643.628.000,00	69,12	8.365.731.520,00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas RTH yang tersedia	%	-	70,00	34.189.892,00	75,00	125.764.450,00	75,00	113.164.000,00	77,25	143.164.000,00	77,85	248.164.000,00	78,00	228.849.000,00	78,00	893.295.342,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Perizinan Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan	%	100,00	100,00	11.525.643,00	100,00	11.044.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	45.000.000,00	100,00	45.000.000,00	100,00	162.569.643,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin PPLH yang diterbitkan	%	-	90,00	11.331.788,00	90,00	14.097.050,00	90,00	30.000.000,00	90,00	30.000.000,00	90,00	35.000.000,00	90,00	40.000.000,00	90,00	160.428.838,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	07	Program Pengaduan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Presentasi Data MHA yang tersedia	%	-	25,00		25,00		25,00		25,00	20.000.000,00	25,00	20.000.000,00	25,00	20.000.000,00	25,00	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat / Komunitas peduli Lingkungan Hidup yang mendapatkan Edukasi Lingkungan Hidup	%	-	100,00		100,00		100,00	50.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	75.000.000,00	100,00	70.000.000,00	100,00	255.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
				Persentase pelatihan, pendidikan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Yang dilakasanakan	%	-	100,00		100,00		100,00	15.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	90.000.000,00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Klasifikasi Adipura	Peringkat	-	Kelas IV	61.032.789,00	Kelas IV	61.462.463,00	Kelas IV	65.000.000,00	Kelas IV	80.000.000,00	Kelas III	90.000.000,00	Kelas III	90.000.000,00	Kelas III	447.495.252,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Aduan Lingkungan Hidup yang ditangani	%	100,00	100,00	16.695.404,00	100,00	16.723.542,00	100,00	20.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	100,00	128.418.946,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang terkurangi melalui 3R	%	2,68	22,00	1.057.697.187,00	22,00	25.535.000,00	22,00	85.000.000,00	22,00	235.000.000,00	22,00	235.000.000,00	22,00	235.000.000,00	22,00	1.873.232.187,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
				Persentase TP3SR di Desa dan Kelurahan	%	9,76	10,98		13,41	384.220.000,00	15,85	100.000.000,00	18,29	150.000.000,00	20,73	100.000.000,00	23,17	100.000.000,00	23,17	834.220.000,00	
				Persentase Cakupan area penanganan persampahan	%	63,45	63,45		63,80	789.615.000,00	64,20	10.000.000,00	64,55	25.000.000,00	64,75	75.000.000,00	64,95	75.000.000,00	64,95	974.615.000,00	
				Persentase Jumlah sampah yang tertangani	%	65,12	65,12		65,55	1.331.823.191,00	65,80	1.052.500.000,00	66,11	1.412.500.000,00	66,35	1.917.500.000,00	66,50	2.100.000.000,00	66,50	7.814.323.191,00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	**12**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																		
2	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	3.336.876.897,00	100,00	3.098.454.472,00	100,00	3.358.603.695,00	100,00	3.551.533.877,00	100,00	3.874.610.570,00	100,00	4.298.341.100,00	100,00	21.518.420.611,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP	%	86,48	90,00	251.224.681,00	100,00	280.000.000,00	100,00	680.738.193,00	100,00	701.775.105,00	100,00	858.001.610,00	100,00	958.001.610,00	100,00	3.729.741.199,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase Kepemilikan KK	%	100,00	100,00	100.000.000,00	100,00	125.500.000,00	100,00	280.000.000,00	100,00	283.000.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00	310.000.000,00	100,00	1.398.500.000,00	
				Persentase Kepemilikan KIA	%	10,00	15,00	80.000.000,00	20,00	85.500.000,00	30,00	150.000.000,00	35,00	165.000.000,00	40,00	175.000.000,00	45,00	150.000.000,00	45,00	805.500.000,00	
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte	%	92,00	95,00	50.813.880,00	98,00	50.000.000,00	100,00	250.000.000,00	100,00	262.500.000,00	100,00	278.250.000,00	100,00	285.000.000,00	100,00	1.176.563.880,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki akte kelahiran	%	91,78	93,22	80.000.000,00	95,20	85.000.000,00	97,00	150.000.000,00	100,00	160.000.000,00	100,00	180.000.000,00	100,00	180.000.000,00	100,00	835.000.000,00	
				Cakupan dokumen akta pengakuan anak dan pengesahan anak	%	-	100,00	65.000.000,00	100,00	75.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	165.000.000,00	100,00	180.000.000,00	100,00	185.000.000,00	100,00	820.000.000,00	
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD / lembaga pengguna yang memanfaatkan data (MOU) Kependudukan	%	-	10,00	81.352.026,00	20,00	51.549.686,00	35,00	150.000.000,00	50,00	262.500.000,00	55,00	278.250.000,00	60,00	285.000.000,00	60,00	1.108.651.712,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase ketersediaan database kependudukan	%	90,00	100,00	65.000.000,00	100,00	70.000.000,00	100,00	250.000.000,00	100,00	139.000.000,00	100,00	168.327.630,00	100,00	183.052.645,00	100,00	875.380.275,00	
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentasi jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	%	-		100.000.000,00	100,00	97.034.053,00	100,00	262.500.000,00	100,00	275.625.000,00	100,00	389.406.250,00	100,00	381.998.390,00	100,00	1.506.563.693,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	**13**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																		
2	13	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	2.750.150.154,00	100,00	2.399.369.748,00	100,00	2.505.975.369,00	100,00	2.584.074.600,00	100,00	2.648.676.465,00	100,00	3.095.324.937,00	100,00	15.983.571.273,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	-		0,00	100,00	27.686.065,00	100,00	127.868.065,00	88,00	128.564.770,00	100,00	452.000.000,00	100,00	463.300.000,00	100,00	1.199.418.900,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	03	Program Peningkatan Kerja sama Desa	Persentase Jumlah Kerja Sama Desa	%	72,30		0,00	76,40	25.138.023,00	78,70	25.766.470,00	80,20	400.000.000,00	82,10	400.000.000,00	83,40	410.000.000,00	83,40	1.260.904.493,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan pemerintahan desa yang tertib administrasi	%	8,54	80,00	221.628.085,80	90,00	289.047.963,60	100,00	902.511.570	100,00	660.000.000,00	100,00	875.478.612	100,00	897.365.578	100,00	3.846.031.809	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase desa Berkembang; Mandiri; Maju	%	-	10,00	100.740.039,00	15,00	131.385.438,00	20,00	789.697.620	25,00	577.500.000,00	30,00	766.043.786	35,00	673.024.183,00	35,00	3.038.391.066	
				Persentasi BUMDesa yang aktif	%	10,00	15,00	80.592.031,20	20,00	105.108.350,40	25,00	564.069.730	30,00	412.500.000,00	35,00	547.174.134,00	40,00	673.024.183,00	40,00	2.382.468.429	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang dibina	%	4,00	4,00	140.751.260,00	4,00	85.590.777,00	4,00	309.082.152,00	4,00	698.213.195,00	4,00	675.159.375,00	4,00	692.038.360,00	4,00	2.600.835.119,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	%	-	50,00	140.751.260,00	60,00	85.590.777,00	70,00	309.082.152,00	75,00	571.265.345,00	80,00	552.403.125,00	85,00	566.213.203,00	85,00	2.600.835.122,03	
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																		
2	14	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	3.835.456.240,00	100,00	3.961.064.560,00	100,00	4.344.893.747,00	100,00	4.524.167.769,00	100,00	5.180.343.116,00	100,00	5.787.764.809,00	100,00	27.633.690.241,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	Nilai	2,68	2,60	27.999.606,00	2,58	55.400.000,00	2,56	426.120.000,00	2,54	463.620.000,00	2,52	431.620.000,00	2,50	528.620.000,00	2,50	1.933.379.606,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR)	%	68,83	71,77	4.123.930.912,00	73,21	3.140.167.500,00	74,11	1.551.371.700,00	75,02	1.551.371.700,00	75,93	1.573.371.700,00	76,84	1.675.571.700,00	76,84	13.615.785.212,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Presentase peserta KB aktif MKJP	%	28,96	29,13	162.000.000,00	30,00	570.800.000,00	32,00	924.300.000,00	37,00	970.200.000,00	42,00	1.316.800.000,00	48,00	1.407.600.000,00	48,00	5.351.700.000,00	
				Persentase Kampung KB	%	31,00	32,00	10.000.000,00	33,00	59.745.800,00	34,00	699.750.000,00	35,00	699.750.000,00	36,00	699.750.000,00	37,00	699.750.000,00	37,00	2.868.745.800,00	
				Unmetneed	%	9,49	10,51	25.135.952,00	10,17	149.761.100,00	9,82	745.615.000,00	9,47	745.615.000,00	9,12	817.455.000,00	9,00	867.455.000,00	9,00	3.351.037.052,00	
2	14	04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase PUS Kelompok Ketahanan Keluarga yang berKB	%	75,49	76,00	201.070.730,00	77,00	926.203.800,00	79,00	1.811.430.000,00	81,00	1.811.430.000,00	83,00	1.823.430.000,00	85,00	1.823.430.000,00	85,00	8.396.994.530,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																		
2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	4.009.336.799,77	100,00	3.652.839.965,00	100,00	4.931.621.830,00	100,00	4.951.302.921,00	100,00	5.456.059.170,00	100,00	5.799.504.000,00	100,00	28.800.664.685,77	Dinas Perhubungan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	-	-	409.300.039,00	79,00	128.551.053,00	79,00	230.000.000,00	79,50	280.000.000,00	80,50	462.000.000,00	81,50	609.000.000,00	81,50	2.118.851.092,00	Dinas Perhubungan
				Persentase Kepemilikan KIR angkutan Umum	%	85,00	85,00	4.244.000,00	86,00	5.200.000,00	87,00	22.000.000,00	88,00	75.000.000,00	89,00	25.000.000,00	90,00	10.000.000,00	90,00	141.444.000,00	
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan Pengelolaan Pelayaran	%	-	100,00	11.021.360,00											100,00	11.021.360,00	Dinas Perhubungan
2	16		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																		
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	80,00	100,00	2.275.972.876,13	100,00	2.297.979.132,00	100,00	2.548.916.028,00	100,00	2.863.880.150,00	100,00	2.840.262.170,00	100,00	2.942.883.145,00	100,00	15.769.893.501,13	Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase PPID yang aktif	%	10,00	10,00	300.000.000,00	50,00	380.450.600,00	100,00	420.000.000,00	100,00	325.000.000,00	100,00	280.000.000,00	100,00	330.000.000,00	100,00	2.035.450.600,00	Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintegrasi	%	50,00	70,00	928.790.195,00	80,00	669.899.925,00	80,00	1.200.000.000,00	80,00	1.290.000.000,00	80,00	1.290.000.000,00	80,00	1.300.000.000,00	80,00	6.678.690.120,00	
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Jumlah sistem informasi yang sudah terintegrasi	SIM	-	-	0,00	-	0,00	2,00	100.000.000,00	4,00	195.000.000,00	6,00	270.000.000,00	6,00	325.000.000,00	6,00	890.000.000,00	Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian
				Jumlah layanan yang sudah berbasis digital	Layanan	-	-	0,00	-	54.498.925,00	1	150.000.000,00	1	130.000.000,00	2	135.000.000,00	2	200.000.000,00	2	669.498.925,00	
				Indeks SPBE	Poin	-	2,00	299.928.079,00	2,50	932.456.934,00	2,70	990.000.000,00	2,80	1.380.000.000,00	3,00	1.870.000.000,00	3,80	1.970.000.000,00	3,10	7.442.385.013,00	
				Persentase perangkat daerah sudah tersambung jaringan internet	%	100,00	15,00	75.000.000,00	85,00	230.499.900,00	90,00	530.000.000,00	100,00	130.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	2.165.499.900,00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	**17**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**																		
2	17	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	2.981.140.641,75	100,00	3.573.882.650,00	100,00	4.359.279.949,00	100,00	4.454.035.469,00	100,00	4.493.750.519,00	100,00	4.754.604.657,00	100,00	24.616.693.885,75	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase KSP Yang Difasilitasi Perizinannya	%		-	0,00	-	0,00	25,00	10.000.000,00	25,00	10.000.000,00	25,00	10.000.000,00	25,00	10.000.000,00	25,00	40.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif	%	55,00	21,10	22.780.858,00	21,10	22.349.350,00	21,10	44.698.700,00	36,70	80.000.000,00	36,70	80.000.000,00	36,70	80.000.000,00	36,70	329.828.908,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang sesuai dengan kriteria penilaian	%	-	-	0,00	-	0,00	57,50	62.349.350,00	57,50	62.349.350,00	57,50	62.349.350,00	57,50	62.349.350,00	57,50	249.397.400,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	-	-	0,00	-	0,00	0,92	99.491.600,00	0,92	99.491.600,00	0,92	99.491.600,00	0,92	99.491.600,00	10,13	397.966.400,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
				Persentase Pengelola Koperasi Yang Bersertifikat	%	2,76	3,22	348.474.304,00	4,88	529.076.749,00	4,88	529.076.749,00	4,88	529.076.749,00	4,88	529.076.749,00	6,44	700.000.000,00	32.86	3.164.781.300,00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	17	06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	-	-	0,00	-	0,00	5,05	129.745.800,00	5,05	280.000.000,00	5,05	280.000.000,00	5,05	130.000.000,00	20,18	819.745.800,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM Yang Diberdayakan	%	6,67	9,33	1.082.286.599,00	19,47	2.878.329.601,00	5,43	654.745.800,00	5,43	654.745.800,00	5,43	654.745.800,00	7,10	654.745.800,00	52,20	6.579.599.400,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
				Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	%	3,33	-	0,00	-	0,00	4,33	650.000.000,00	4,33	650.000.000,00	4,33	650.000.000,00	6,00	900.000.000,00	20,00	2.850.000.000,00	
				Persentase Usaha Mikro Yang Melakukan Kemitraan	%	1,67	1,67	248.729.000,00	0,33	62.925.800,00	0,20	30.000.000,00	0,20	30.000.000,00	0,20	30.000.000,00	0,20	30.000.000,00	2,07	431.654.800,00	
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	%	3,33	0,33	49.745.800,00	-	0,00	0,16	600.000.000,00	0,16	600.000.000,00	0,16	600.000.000,00	0,20	800.000.000,00	1,01	2.649.745.800,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**																		
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	2.842.014.428,00	100,00	3.168.807.128,00	100,00	3.715.346.422,00	100,00	3.901.113.744,00	100,00	4.514.841.335,00	100,00	4.952.325.468,00	100,00	23.094.448.525,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dokumen Pengembagan iklim penanaman modal	Dok	-	2,00	27.263.734,00	2,00	12.362.836,00	2,00	250.000.000,00	2,00	250.000.000,00	2,00	420.000.000,00	2,00	405.000.000,00	2,00	1.364.626.570,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kegiatan promosi penanaman modal	%	-	20,00	1.000.000,00	30	10.271.240,00	40	30.000.000,00	50	30.000.000,00	60	50.000.000,00	70	50.000.000,00	70,00	171.271.240,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah Nilai Investasi	Milyar Rp	82,00	97,00	1.016.745,00	107,00	50.000.000,00	140,00	70.000.000,00	145,00	70.000.000,00	160,00	100.000.000,00	200,00	100.000.000,00	200,00	391.016.745,00	
				Dokumen Strategi Penanaman Modal	ada/ tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0,00	ada	50.000.000,00	ada	150.000.000,00	ada	150.000.000,00	ada	250.000.000,00	ada	250.000.000,00	ada	850.000.000,00	
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai IKM (Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan/Non Perizinan)	Point	-	75,00	32.705.846,00	80,00	18.785.078,00	80,00	110.000.000,00	85,00	110.000.000,00	85,00	110.000.000,00	85,00	155.000.000,00	85,00	536.490.924,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	%	-	100,00	32.590.115,00	100,00	26.006.634,00	100,00	140.000.000,00	100,00	140.000.000,00	100,00	140.000.000,00	100,00	180.000.000,00	100,00	658.596.749,00	
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM(Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	%	-	70,00	153.694.592,00	80,00	157.736.002,00	85,00	169.448.288,00	85,00	177.920.702,00	95,00	265.000.000,00	100,00	330.000.000,00	100,00	1.253.799.584,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi	%	-	20,00	7.149.688,00	30,00	7.514.070,00	45,00	150.000.000,00	60,00	150.000.000,00	75,00	125.000.000,00	80,00	150.000.000,00	80,00	589.663.758,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**19**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																		
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	%	-	-	1.616.223.348,00	100%	2.707.551.450,00	100%	1.520.000.000,00	100%	1.520.000.000,00	100%	1.520.000.000,00	100%	2.370.000.000,00	100%	11.253.774.798,00	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	%	-	-	1.413.949.711,00	100%	4.531.289.400,00	100%	2.480.000.000,00	100%	2.490.000.000,00	100%	3.080.000.000,00	100%	3.080.000.000,00	100%	17.075.239.111,00	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kpramukaan	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%			47.550.000,00	100%	50.000.000,00	100%	340.000.000,00	100%	450.000.000,00	100%	450.000.000,00	100%	450.000.000,00	100%	1.787.550.000,00	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga
2	**20**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																		
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang terpenuhi	%	-	5,00	17.441.262,00	5,00	3.890.900,00	25,00	40.000.000,00	3O	52.000.000,00	35,00	65.000.000,00	40,00	130.000.000,00	40,00	290.890.900,00	Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian
				Persentase OPD yang menyediakan Data Statistik Sektoral	%	-	5,00	16.000.000,00	5,00	3.890.900,00	25,00	40.000.000,00	30,00	50.000.000,00	35,00	50.000.000,00	40,00	120.000.000,00	40,00	263.890.900,00	
2	**21**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**																		
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	%	-	5,00	13.695.658,00	5,00	5.996.733,00	40,00	52.000.000,00	55,00	80.000.000,00	55,00	70.000.000,00	75,00	150.000.000,00	75,00	357.996.733,00	Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	22		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	5.097.946.391,80	100,00	5.009.340.134,00	100,00	7.133.274.597,00	100,00	7.347.272.835,00	100,00	8.217.924.100,00	100,00	8.454.189.416,00	100,00	41.259.947.473,80	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase event kesenian skala Nasional/regionla yang dilaksanakan	%	37,50	37,50	634.344.320,00	50,00	555.375.424,00	62,50	765.149.917,60	75,00	788.104.416,00	87,50	881.494.800,00	100,00	906.837.776,00	100,00	4.531.306.653,60	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Persentase lembaga adat yang di bina	%	66,66	66,66	158.586.080,00	75,00	138.843.856,00	83,33	191.287.479,40	91,66	197.026.104,00	100,00	220.373.700,00	100,00	226.709.444,00	100,00	1.132.826.663,40	
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kelompok Kesenian yang dibina	%	6,00	8,00	149.237.400,00	10,00	0,00	13,00	182.069.628,00	16,00	187.531.717,00	20,00	209.754.200,00	25,00	215.784.633,00	25,00	944.377.578,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	45,45	45,45	69.796.423,00	54,55	7.025.422,00	63,64	85.151.636,00	72,73	87.706.185,00	81,82	98.099.300,00	90,91	100.919.655,00	90,91	448.698.621,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang di kelola secara terpadu	%	73,68	73,68	282.233.886,00	78,95	395.304.908,00	84,21	482.271.988,00	89,47	496.740.147,00	94,74	555.604.600,00	100,00	571.578.232,00	100,00	2.783.733.761,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase sarana dan prasarana museum dalam kondisi baik	%	10,00	20,00	628.059.146,00	30,00	712.143.762,00	40,00	868.815.390,00	50,00	894.879.851,00	60,00	1.000.923.100,00	70,00	1.029.699.639,00	70,00	5.134.520.888,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	**23**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**																		
2	23	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	2.882.658.310,00	100,00	5.419.028.613,00	100,00	5.096.881.496,00	100,00	5.413.975.571,00	100,00	6.079.873.128,00	100,00	6.221.881.496,00	100,00	31.114.298.614,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	-	20,00	59.288.400,00	25,00	27.381.500,00		165.000.000,00	35,00	165.000.000,00	40,00	165.000.000,00	50,00	253.796.300,00	50,00	835.466.200,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Persentase Perpustakaan yang di bina	%	88,00	90,00	177.865.500,00	95,00	82.144.600,00	100,00	495.000.000,00	100,00	495.000.000,00	100,00	495.000.000,00	100,00	761.388.900,00	100,00	2.506.399.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
				Persentase kelompok Literasi yang dibina	%	-	100,00	59.288.559,00	100,00	27.381.583,00	100,00	165.000.000,00	100,00	165.000.000,00	100,00	165.000.000,00	100,00	253.796.282,00	100,00	835.466.424,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentasi Naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (di-gitalisasi)/ terdaftar dalam wilayahnya	%	-	15,00	14.758.235,00	19,00		21,00	55.000.000,00	24,00	55.000.000,00	26,00	55.000.000,00	28,00	55.000.000,00	28,00	234.758.235,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	**24**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																		
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	62,50	67,50	22.112.050,00	72,50	45.787.130,00	80,00	130.000.000,00	87,50	130.000.000,00	92,50	130.000.000,00	100,00	130.000.000,00	100,00	587.899.180,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang didokumentasikan (scan)	%	3,80	4,00	8.837.628,00	8,00	4.863.350,00	15,00	215.000.000,00	23,00	215.000.000,00	26,00	215.000.000,00	30,00	215.000.000,00	30,00	873.700.978,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Penggunaan Arsip bersifat tertutup yang dikelola							70,00	20.000.000,00	80,00	20.000.000,00	90,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	80.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																		
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**																		
3	25	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	3.657.557.440,70	100,00	3.630.480.148,00	100,00	4.004.004.155,00	100,00	4.204.204.363,00	100,00	4.414.414.581,00	100,00	4.635.135.310,00	100,00	24.545.795.997,70	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Presentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	%	7.830,00	100,00	4.789.648.916,70	100,00	7.762.097.100,00	100,00	7.477.822.620,00	100,00	7.517.250.207,00	100,00	7.635.518.543,00	100,00	8.234.092.976,00	100,00	43.416.430.362,70	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Presentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	%	1.142,84	100,00	599.084.111,00	100,00	1.735.001.300,00	100,00	1.856.251.365,00	100,00	1.749.063.933,00	100,00	1.836.517.130,00	100,00	1.928.342.986,00	100,00	9.704.260.825,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Presentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%	-	100,00	0,00	100,00	12.158.800,00	100,00	12.766.740,00	100,00	13.405.077,00	100,00	14.075.331,00	100,00	14.779.098,00	100,00	241.576.500,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Presentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%	46,09	100,00	263.097.430,00	100,00	1.145.524.400,00	100,00	1.202.800.620,00	100,00	1.262.940.651,00	100,00	1.326.087.684,00	100,00	1.472.392.068,00	100,00	6.672.842.853,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																		
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	110.773	112.988	79.206.886,50	115.248	117.748.362,50	117.553	316.180.160,00	119.904	319.665.572,40	122.302	353.845.920,00	124.748	357.693.990,00	124.748	1.544.340.891,40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Jumlah Objek Wisata Super prioritas yang dikembangkan	Objek	3	3	158.413.773,00	3	235.496.725,00	4	869.495.440,00	4	879.080.324,10	5	973.076.280,00	5	983.658.472,50	5	4.099.221.014,60	
				Persentase sarana dan Prasarana di Objek wisata prioritas dalam kondisi baik	%	60	60	47.524.131,90	65	70.649.017,50	70	237.135.120,00	72	239.749.179,30	75	265.384.440,00	80	268.270.492,50	80	1.128.712.381,20	
				Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	0,45	0,47	31.682.754,60	0,50	47.099.345,00	0,60	158.090.080,00	0,70	159.832.786,20	0,80	176.922.960,00	1,00	178.846.995,00	1,00	752.474.920,80	
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi pariwisata	%	-	100,00	246.277.198,00	100,00	181.899.523,00	100,00	381.288.340,00	100,00	392.726.952,00	100,00	439.265.100,00	100,00	451.893.971,00	100,00	2.093.351.084,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase ruang berekspresi pelaku ekonomi kreatif yang di bangun	%	37,50	37,50	49.745.800,00	50,00	198.983.200,00	62,50	242.759.504,00	75,00	250.042.289,00	87,50	279.672.300,00	100,00	287.712.879,00	100,00	1.308.915.972,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peserta Pelatihan yang memahami Materi pelatihan	%	80,00	80,00	730.273.763,50	80,00	497.584.841,00	85,00	409.036.562,50	85,00	436.307.659,50	90,00	497.094.859,00	90,00	527.197.826,50	90,00	3.097.495.512,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase SDM ekonomi kreatif yang memiliki kompetensi (terlatih)	%	-	13,33	438.164.258,10	33,33	298.550.904,60	60,00	245.421.937,50	73,33	261.784.595,70	93,33	298.256.915,40	100,00	316.318.695,90	100,00	1.858.497.307,20	
				Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi (Uji Kompetensi)	%	26,67	33,33	292.109.505,40	46,67	199.033.936,40	73,33	163.614.625,00	80,00	174.523.063,80	93,33	198.837.943,60	100,00	210.879.130,60	100,00	1.238.998.204,80	
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																		
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	12.491.827.911,83	100,00	12.715.521.325,00	100,00	18.563.150.900,00	100,00	19.305.676.936,00	100,00	20.695.685.575,00	100,00	22.351.340.617,00	100,00	106.123.203.264,83	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	5,00	5,00	281.017.938,25	5,00	539.425.857,25	5,00	2.209.251.838,50	5,00	2.297.621.912,25	5,00	2.463.050.689,75	5,00	2.660.094.745,00	25,00	10.450.462.981,00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
				Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura	%	5,00	5,00	200.727.098,75	5,00	385.304.183,75	5,00	1.578.037.027,50	5,00	1.641.158.508,75	5,00	1.759.321.921,25	5,00	1.900.067.675,00	25,00	7.464.616.415,00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	5,00	5,00	160.581.679,00	5,00	308.243.347,00	5,00	1.262.429.622,00	5,00	1.312.926.807,00	5,00	1.407.457.537,00	5,00	1.520.054.140,00	25,00	5.971.693.132,00	
				Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan	%	5,00	5,00	160.581.679,00	5,00	308.243.347,00	5,00	1.262.429.622,00	5,00	1.312.926.807,00	5,00	1.407.457.537,00	5,00	1.520.054.140,00	25,00	5.971.693.132,00	
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi baik	%	75,00	75,00	5.262.204.986,00	75,00	14.130.670.217,00	75,00	4.746.472.144,00	75,00	4.936.331.028,00	75,00	5.291.746.864,00	75,00	5.715.086.612,00	75,00	40.082.511.851,00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Ternak	%	100,00	100,00	75.105.251,00	100,00	89.196.816,00	100,00	267.500.000,00	100,00	278.200.000,00	100,00	298.230.400,00	100,00	322.088.832,00	100,00	1.330.321.299,00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3	27	05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Hama Penyakit yang ditangani	%	-	80,00	312.479.894,65	80,00	750.522.204,85	80,00	698.196.400,00	80,00	726.124.256,00	80,00	778.405.202,30	80,00	840.677.618,55	80,00	4.106.405.576,35	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
				Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman pangan yang tertangani	%	-	60,00	255.665.368,35	60,00	614.063.622,15	65,00	571.251.600,00	70,00	594.101.664,00	75,00	636.876.983,70	80,00	687.827.142,45	80,00	3.359.786.380,65	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Pemberian Rekomendasi Pada Kelompok Tani Berkelanjutan yang ditindaklanjuti	%	-	100,00	33.947.566,00	100,00	14.464.000,00	100,00	53.500.000,00	100,00	55.640.000,00	100,00	59.646.080,00	100,00	64.417.766,00	100,00	281.615.412,00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	-	100,00	89.830.191,55	100,00	359.026.501,90	100,00	147.125.000,00	100,00	153.010.000,00	100,00	164.026.720,00	100,00	177.148.857,60	100,00	1.090.167.271,05	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
				Persentase kelembagaan Petani yang di Bina	%	60,00	68,00	73.497.429,45	75,00	293.748.956,10	80,00	120.375.000,00	85,00	125.190.000,00	90,00	134.203.680,00	100,00	144.939.974,40	100,00	891.955.039,95	
3	**30**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																		
3	**30**	**02**	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase permohonan ijin usaha perdagangan yang memperoleh Rekomendasi	%	-	-	0,00	-	0,00	77,00	18.431.600,00	77,00	18.431.600,00	77,00	18.431.600,00	77,00	18.431.600,00	3,09	73.726.400,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar Rakyat dalam kondisi Baik	%	45,45	50,00	333.724.271,00	54,55	558.565.049,00	59,09	393.724.270,00	63,64	543.724.271,00	68,18	643.724.271,00	86,36	643.724.271,00	86,36	3.117.186.403,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase kecukupan stock barang kebutuhan pokok daerah	%	100,00	100,00	63.601.102,00	100,00	108.386.050,00	100,00	97.182.212,00	100,00	220.786.850,00	100,00	255.786.850,00	100,00	255.786.850,00	100,00	1.001.529.914,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Usaha Komoditi Ekspor Yang Mendapat Fasilitasi Pengembangan	%	-	-	0,00	-	60.000.000,00	40,00	161.000.000,00	40,00	195.000.000,00	40,00	195.000.000,00	60,00	255.000.000,00	60,00	866.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
3	30	06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP yang bertanda Tera Sah	%	100,00	100,00	53.542.035,00	100,00	24.751.575,00	100,00	56.542.035,00	100,00	56.542.035,00	100,00	113.000.000,00	100,00	113.000.000,00	100,00	417.377.680,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
3	30	07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	%	-	-	0,00	-	0,00	20,00	65.000.000,00	20,00	65.000.000,00	20,00	195.000.000,00	43,00	230.000.000,00	10,30	555.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																		
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Sentra Industri Aktif	%	33,33	33,33	0,00	33,33	0,00	66,67	23.000.000,00	66,67	23.000.000,00	100,00	113.000.000,00	100,00	113.000.000,00	100,00	272.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
				Persentase IKM Yang Menempati Sentra Industri	%	33,33	33,33	65.222.337,00	33,33	382.981.751,00	66,67	392.981.751,00	66,67	392.981.751,00	100,00	1.289.815.352,00	100,00	1.289.815.352,00	100,00	3.813.798.294,00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM Yang Memiliki Rekomendasi Penerbitan Izin	%	8,33	16,67	0,00	33,33	0,00	50,00	10.000.000,00	66,67	10.000.000,00	83,33	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00	40.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM Yang Terdaftar di SIINas	%	8,33	16,67	0,00	33,33	0,00	50,00	11.545.300,00	66,67	11.545.300,00	83,33	11.545.300,00	100,00	11.545.300,00	100,00	46.181.200,00	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
3	**32**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**																		
3	32	02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Transmigrasi	Dokumen	ada		0,00		0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigrasi Umum	%	-	100,00	30.005.000,00	100,00	95.170.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	105.000.000,00	100,00	110.250.000,00	100,00	121.275.000,00	100,00	561.700.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang di kembangkan	%	-		0,00		0,00	100,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	450.000.000,00	100,00	1.650.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**																		
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	28.485.317.920,45	100,00	28.611.858.811,00	100,00	28.767.367.411,00	100,00	29.304.881.067,00	100,00	29.948.997.459,00	100,00	30.526.522.502,00	100,00	175.644.945.170,45	Sekretariat Daerah
				Persentase Kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan yang di fasilitasi dan terdokumentasi dengan Baik	%	100,00	100,00	1.252.128.943,00	100,00	1.339.994.779,00	100,00	1.339.994.779,00	100,00	1.339.994.779,00	100,00	1.339.994.779,00	100,00	1.339.994.779,00	100,00	7.952.102.838,00	
				Persentaae OPD dengan nilai IKM yang kategori Baik	%	-	70,00	208.473.903,30	75,00	405.953.312,00	80,00	405.953.312,00	80,00	405.953.312,00	90,00	405.953.312,00	100,00	405.953.312,00	100,00	2.238.240.463,30	
4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase tingkat Pemenuhan Data Indikator dalam dokumen LPPD	%	-	85,00	263.921.333,00	85,00	365.000.316,00	90,00	365.000.316,00	90,00	365.000.316,00	100,00	365.000.316,00	100,00	445.000.731,00	100,00	2.168.923.328,00	Sekretariat Daerah
				Persentase Produk hukum yang ditetapkan/ diterbitkan	%	-	100,00	370.815.951,56	100,00	399.997.436,00	100,00	399.997.436,00	100,00	399.997.436,00	100,00	399.997.436,00	100,00	399.997.436,00	100,00	2.370.803.131,56	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Fasilitasi layanan Kesra	%	-	100,00	2.679.902.352,00	100,00	5.212.868.403,00	100,00	5.212.868.403,00	100,00	5.212.868.403,00	100,00	5.212.868.403,00	100,00	5.291.812.678,00	100,00	28.823.188.642,00	
				Persentaae Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	-	100,00	160.000.042,25	100,00	174.999.954,00	100,00	174.999.954,00	100,00	174.999.954,00	100,00	174.999.954,00	100,00	291.920.974,00	100,00	1.151.920.832,25	
4	01	03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian	%	-	100,00	160.075.952,00	100,00	399.988.293,00	100,00	399.988.293,00	100,00	399.988.293,00	100,00	399.988.293,00	100,00	402.488.622,00	100,00	2.162.517.746,00	Sekretariat Daerah
				Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan	%	-	100,00	159.981.853,84	100,00	468.999.940,00	100,00	468.999.940,00	100,00	468.999.940,00	100,00	468.999.940,00	100,00	529.003.271,00	100,00	2.564.984.884,84	
				persentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	%	-	100,00	357.073.759,00	100,00	299.998.153,00	100,00	299.998.153,00	100,00	299.998.153,00	100,00	299.998.153,00	100,00	358.950.485,00	100,00	1.916.016.856,00	
				Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemantauan SDA	%	-	100,00	120.106.052,00	100,00	264.534.720,00	100,00	264.534.720,00	100,00	264.534.720,00	100,00	264.534.720,00	100,00	264.534.720,00	100,00	1.442.779.652,00	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	**02**		**SEKRETARIAT DPRD**																		
4	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	15.960.806.807,36	100,00	8.183.255.974,00	100,00	15.292.008.336,00	100,00	15.730.264.538,00	100,00	15.830.768.326,00	100,00	16.091.799.423,00	100,00	87.088.903.404,36	Sekretariat DPRD
				Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang untuk anggota DPRD	%	100,00	100,00	9.438.629.896,73	100,00	9.130.493.704,00	100,00	10.016.698.397,00	100,00	10.166.698.397,00	100,00	10.167.098.397,00	100,00	10.417.098.397,00	100,00	59.336.717.188,73	
4	02	03	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD yang di fasilitasi	%	100,00	100,00	6.631.243.439,93	100,00	7.494.511.586,00	100,00	8.666.500.000,00	100,00	8.966.500.000,00	100,00	9.986.500.000,00	100,00	10.530.000.000,00	100,00	52.275.255.025,93	Sekretariat DPRD
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
5	**01**		**PERENCANAAN**																		
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	3.712.850.325,90	100,00	3.658.451.099,00	100,00	5.653.588.463,00	100,00	5.730.828.464,00	100,00	6.267.617.913,00	100,00	6.827.250.880,00	100,00	31.850.587.144,90	Badan Perencanaan Daerah
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi	%	100,00	100,00	931.642.907,00	100,00	283.496.190,00	100,00	1.285.000.000,00	100,00	1.350.000.000,00	100,00	1.875.000.000,00	100,00	1.319.250.000,00	100,00	7.044.389.097,00	Badan Perencanaan Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase dokumen evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu penyusunannya berdasarkan regulasi	%	100,00	100,00	142.359.100,00	100,00	52.829.630,00	100,00	375.000.000,00	100,00	375.000.000,00	100,00	435.000.000,00	100,00	455.000.000,00	100,00	1.835.188.730,00	
5	01	03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tingkat capaiannya diatas 90%	%	85,00	38,00	684.129.269,70	40,00	343.799.733,00	45,00	1.000.000.000,00	50,00	1.030.000.000,00	55,00	1.135.000.000,00	60,00	1.160.000.000,00	60,00	5.352.929.002,70	Badan Perencanaan Daerah
				Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang tingkat capaiannya diatas 90%	%	85,00	70,00	370.103.896,08	70,00	200.000.375,00	75,00	770.000.000,00	80,00	790.000.000,00	85,00	910.000.000,00	90,00	950.000.000,00	90,00	3.990.104.271,08	
				Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang tingkat capaiannya diatas 90%	%	80,00	36,00	231.613.597,00	40,00	199.999.795,00	45,00	740.000.000,00	50,00	760.000.000,00	55,00	855.000.000,00	60,00	935.000.000,00	60,00	3.721.613.392,00	
5	**02**		**KEUANGAN**																		
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	6.217.270.691,88	100,00	5.989.877.455,00	100,00	8.156.610.811,00	100,00	8.645.983.181,00	100,00	9.337.678.911,00	100,00	10.084.699.428,00	100,00	48.432.120.477,88	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00	100,00	9.847.317.571,25	100,00	6.774.619.341,00	100,00	12.164.076.586,00	-	12.868.375.326,00	-	13.725.821.518,00	-	14.783.821.517,00	100,00	70.164.031.859,25	Badan Pendapatan Daerah
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK		WTP	WTP	74.855.294.426,33	WTP	67.226.863.806,60	WTP	79.906.383.970,80	WTP	87.281.691.888,60	WTP	93.346.294.093,20	WTP	98.826.336.829,80	WTP	501.442.865.015,33	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase SiLPA Terhadap APBD	%	1,64	1,60	12.475.882.404,39	1,50	11.204.477.301,10	1,40	13.317.730.661,80	1,30	14.546.948.648,10	1,20	15.557.715.682,20	1,00	16.471.056.138,30	1,00	83.573.810.835,89	
				Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah daerah	%	99,07	100,00	12.475.882.404,39	100,00	11.204.477.301,10	100,00	13.317.730.661,80	100,00	14.546.948.648,10	100,00	15.557.715.682,20	100,00	16.471.056.138,30	100,00	83.573.810.835,89	
				Ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	12.475.882.404,39	Tepat Waktu	11.204.477.301,10	Tepat Waktu	13.317.730.661,80	Tepat Waktu	14.546.948.648,10	Tepat Waktu	15.557.715.682,20	Tepat Waktu	16.471.056.138,30	Tepat Waktu	83.573.810.835,89	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Ketepatan waktu pengesahan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	12.475.882.404,39	Tepat Waktu	11.204.477.301,10	Tepat Waktu	13.317.730.661,80	Tepat Waktu	14.546.948.648,10	Tepat Waktu	15.557.715.682,20	Tepat Waktu	16.471.056.138,30	Tepat Waktu	83.573.810.835,89	
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	-	50,00	507.859.246,94	60,00	319.851.000,00	70,00	585.547.499,00	80,00	1.111.682.526,00	90,00	1.148.615.721,00	100,00	688.504.339,00	100,00	4.362.060.331,94	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	%	(19,56)	3,00	253.569.625,50	5,00	549.374.406,00	5,33	708.161.992,00	5,38	763.424.639,00	5,44	910.510.526,00	5,50	1.003.384.229,00	5,50	4.188.425.417,50	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase peningkatan Pendapatan	%	(5,32)	(1,50)	253.569.625,50	5,00	549.374.406,00	5,16	708.161.992,00	5,18	763.424.639,00	5,23	910.510.526,00	5,28	1.003.384.229,00	5,28	4.188.425.417,50	
5	**03**		**KEPEGAWAIAN**																		
5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	3.914.524.176,80	100,00	3.662.663.094,00	100,00	5.542.410.600,00	100,00	5.545.410.600,00	100,00	5.852.410.600,00	100,00	5.499.410.600,00	100,00	30.016.829.670,80	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase data kepegawaian yang up to date	%	100	100	1.071.520.121,12	100,00	757.552.661,00	100,00	1.384.864.262,00	100,00	1.384.864.262,00	100,00	1.441.145.636,00	100,00	1.515.756.766,00	100,00	7.555.703.708,12	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	-	10	429.130.000,00	15,00	361.700.000,00	20,00	920.500.000,00	20,00	920.500.000,00	25,00	930.500.000,00	30,00	920.500.000,00	30,00	4.482.830.000,00	
				Indek kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	%	-	70	169.538.486,99	75,00	76.905.350,00	80,00	461.009.000,00	85,00	461.009.000,00	90,00	467.009.000,00	100,00	467.009.000,00	100,00	2.102.479.836,99	
5	**04**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																		
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan Organisasi	%	-	10,00	0,00	10,00	0,00	15,00	180.000.000,00	16,00	180.000.000,00	17,00	180.000.000,00	19,00	180.000.000,00	19,00	720.000.000,00	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural	%	36,49	37,00	448.791.622,00	37,50	1.323.982.000,00	38,00	2.373.982.000,00	38,50	3.389.120.294,00	39,00	4.489.120.294,00	40,00	5.489.120.294,00	40,00	17.514.116.504,00	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	**05**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																		
5	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	-	100,00	2.041.473.313,00	100,00	1.763.097.381,00	100,00	2.277.200.000,00	100,00	2.427.200.000,00	100,00	2.577.200.000,00	100,00	2.827.200.000,00	100,00	13.913.370.694,00	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	363.943.648,50	100,00	623.850.260,50	100,00	717.812.648,50	100,00	782.807.751,50	100,00	927.412.604,00	100,00	1.024.013.862,50	100,00	4.439.840.775,50	Badan Penelitian dan Pengembangan
				Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Terdiseminasi	%	100,00	100,00	363.943.648,50	100,00	623.850.260,50	100,00	717.812.648,50	100,00	782.807.751,50	100,00	927.412.604,00	100,00	1.024.013.862,50	100,00	4.439.840.775,50	
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																		
6	**01**		**INSPEKTORAT DAERAH**																		
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%		95%	5.602.651.789,00	95%	5.211.411.672,00	95%	6.819.170.006,42	97%	7.194.926.259,00	98%	7.634.310.979,16	99%	7.935.997.456,00	100%	40.398.468.161,58	Inspektorat Daerah
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklajuti	%		100,00	2.416.308.575,00	100,00	472.950.000,00	100,00	947.176.125,00	100,00	994.534.930,00	100,00	1.044.261.677,81	100,00	1.099.474.761,70	100,00	6.974.706.069,51	Inspektorat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase catatan/saran hasil review dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00		100,00	472.950.000,00	100,00	947.176.125,00	100,00	994.534.930,00	100,00	1.044.261.677,81	100,00	1.099.474.761,70	100,00	4.558.397.494,51	
				Jumlah OPD yang dievaluasi SAKIPnya minimal B	OPD	11,00	11,00		12,00	472.950.000,00	14,00	947.176.125,00	16,00	994.534.930,00	18,00	1.044.261.677,82	20,00	1.099.474.761,60	20,00	4.558.397.494,42	
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) da-tau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)	OPD	-	1	467.325.000,00	4	328.750.000,00	6	921.920.681,58	9	968.016.719,00	12	1.016.417.551,40	15	1.067.238.429,00	15	4.769.668.380,98	
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**																		
7	01		**KECAMATAN**																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Banggae Timur	%	100,00	100,00	6.730.008.972,87	98,00	6.669.464.109,00	98,00	8.663.802.516,00	98,00	9.167.340.667,00	98,00	9.519.300.000,00	98,00	9.785.745.560,00	98,00	50.535.661.824,87	Kecamatan Banggae Timur
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Banggae	%	100,00	100,00	5.873.537.452,98	98,00	5583510346	98,00	7411351452	98,00	7879234165	98,00	8248878616	98,00	8506932537	98,00	43.503.444.569,28	Kecamatan Banggae

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Pamboang	%	100,00	100,00	2.819.155.948,00	98,00	3.049.971.430,00	98,00	3.541.472.875,00	98,00	3.764.097.247,00	98,00	3.921.745.137,00	98,00	4.041.160.490,00	98,00	21.137.603.127,00	Kecamatan Pamboang
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Sendana	%	100,00	100,00	3.384.991.622,00	98,00	3.557.293.658,00	98,00	4.288.301.172,00	98,00	4.377.899.243,00	98,00	4.644.015.212,00	98,00	4.805.885.668,00	98,00	25.058.386.575,00	Kecamatan Sendana
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Tammerodo Sendana	%	100,00	100,00	1.405.417.176,00	98,00	1.393.928.620,00	98,00	1.881.186.243,00	98,00	1.992.954.417,00	98,00	2.075.470.594,00	98,00	2.139.833.210,00	98,00	10.888.790.260,00	Kecamatan Tammerodo Sendana
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Tubo Sendana	%	100,00	100,00	1.844.353.577,00	98,00	1.931.311.920,00	98,00	2.291.239.424,00	98,00	2.440.110.789,00	98,00	2.545.313.220,00	98,00	2.627.371.115,00	98,00	13.679.700.045,00	Kecamatan Tubo Sendana
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Ulumanda	%	100,00	100,00	1.356.162.070,00	98,00	1.271.941.640,00	98,00	1.883.464.380,00	98,00	1.993.322.243,00	98,00	2.091.532.945,00	98,00	2.155.168.430,00	98,00	10.751.591.708,00	Kecamatan Ulumanda

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Malunda	%	100,00	100,00	3.318.850.228,00	98,00	3.304.403.474,00	98,00	3.867.109.402,00	98,00	4.101.531.915,00	98,00	4.248.151.774,00	98,00	4.519.444.201,00	98,00	23.359.490.994,00	Kecamatan Malunda
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Banggae Timur	nilai	75,00	75,00	3.396.368,00	75,00	2.387.400,00	80,00	10.500.000,00	80,00	13.000.000,00	85,00	14.900.000,00	90,00	18.000.000,00	90,00	62.183.768,00	Kecamatan Banggae Timur
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Banggae	nilai	75,00	75,00	38.951.502,00	75,00	16500000	80,00	20164000	80,00	22180400	85,00	24398440	90,00	27398440	90,00	149.592.782,00	Kecamatan Banggae
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Pamboang	nilai	75,00	75,00	14.700.000,00	75,00	21.255.000,00	80,00	60.000.000,00	80,00	60.000.000,00	85,00	60.000.000,00	90,00	65.000.000,00	90,00	280.955.000,00	Kecamatan Pamboang
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Sendana	nilai	75,00	75,00	14.184.123,00	75,00	10.457.178,00	80,00	22.000.000,00	80,00	22.000.000,00	85,00	22.000.000,00	90,00	22.000.000,00	90,00	112.641.301,00	Kecamatan Sendana
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Tammerodo Sendana	nilai	75,00	75,00	0,00	75,00	7.600.000,00	80,00	24.950.000,00	80,00	24.950.000,00	85,00	24.950.000,00	90,00	24.950.000,00	90,00	107.400.000,00	Kecamatan Tammerodo Sendana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Tubo Sendana	nilai	75,00	75,00	13.326.765,00	75,00	11.730.000,00	80,00	54.950.000,00	80,00	54.950.000,00	85,00	54.950.000,00	90,00	54.950.000,00	90,00	244.856.765,00	Kecamatan Tubo Sendana
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan terhadap layanan publik Kecamatan Ulumanda	nilai	75,00	75,00	0,00	75,00	13.965.000,00	80,00	25.000.000,00	80,00	29.650.000,00	85,00	29.650.000,00	90,00	29.650.000,00	90,00	127.915.000,00	Kecamatan Ulumanda
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Banggae Timur	%	98,00	98,00	351.871.670,00	98,00	381.108.385,00	98,00	587.000.000,00	98,00	623.000.000,00	98,00	669.242.294,00	98,00	702.500.000,00	98,00	3.314.722.349,00	Kecamatan Banggae Timur
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Banggae	%	98,00	98,00	218.519.595,00	98,00	332766736	98,00	443431789	98,00	448424510,3	98,00	453916503	98,00	455216503	98,00	2.352.275.636,30	Kecamatan Banggae
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Pamboang	%	98,00	98,00	137.750.000,00	98,00	92.052.976,00	98,00	115.600.000,00	98,00	115.600.000,00	98,00	115.600.000,00	98,00	115.600.000,00	98,00	692.202.976,00	Kecamatan Pamboang
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Sendana	%	98,00	98,00	137.671.671,00	98,00	144.025.210,00	98,00	257.000.000,00	98,00	437.000.000,00	98,00	437.000.000,00	98,00	437.000.000,00	98,00	1.849.696.881,00	Kecamatan Sendana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Tammerodo Sendana	%	98,00	98,00	25.800.000,00	98,00	0,00	98,00	25.000.000,00	98,00	25.000.000,00	98,00	25.000.000,00	98,00	25.000.000,00	98,00	125.800.000,00	Kecamatan Tammerodo Sendana
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Tubo Sendana	%	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	85.000.000,00	98,00	85.000.000,00	98,00	85.000.000,00	98,00	85.000.000,00	98,00	340.000.000,00	Kecamatan Tubo Sendana
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Ulumanda	%	98,00	98,00	14.994.720,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	14.994.720,00	Kecamatan Ulumanda
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi Kecamatan Malunda	%	98,00	98,00	111.332.799,00	98,00	187.086.944,00	98,00	559.531.209,00	98,00	590.707.133,00	98,00	631.776.836,00	98,00	506.882.264,00	98,00	2.587.317.185,00	Kecamatan Malunda
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Banggae Timur	%	-	50,00	41.650.000,00	52,00	28.729.300,00	54,00	25.000.000,00	56,00	61.000.000,00	58,00	65.000.000,00	60,00	68.000.000,00	60,00	289.379.300,00	Kecamatan Banggae Timur
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Banggae	%	-		0,00	52,00	0	54,00	76720947	56,00	43950000,4	58,00	43949500	60,00	43950000	60,00	208.570.447,40	Kecamatan Banggae

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Sendana	%	-	50,00	12.240.000,00	52,00	0,00	54,00	16.000.000,00	56,00	16.000.000,00	58,00	16.000.000,00	60,00	16.000.000,00	60,00	76.240.000,00	Kecamatan Sendana
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan kecamatan Kecamatan Tammerodo Sendana	%	-	50,00	9.250.000,00		2.500.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		86.750.000,00	Kecamatan Tammerodo Sendana
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti Kecamatan Banggae Timur	%	98,00	98,00	0,00	98,00	6.000.000,00	98,00	37.000.000,00	98,00	17.500.000,00	98,00	19.500.000,00	98,00	21.500.000,00	98,00	101.500.000,00	Kecamatan Banggae Timur
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti Kecamatan Banggae	%	98,00	98,00	0,00	98,00	5.000.000,00	98,00	50000000	98,00	50605000	98,00	51270500	98,00	52270500	98,00	209.146.000,00	Kecamatan Banggae
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti Kecamatan Pamboang	%	98,00	98,00	8.000.000,00	98,00	16.000.000,00	98,00	55.000.000,00	98,00	58.000.000,00	98,00	60.000.000,00	98,00	60.000.000,00	98,00	257.000.000,00	Kecamatan Pamboang
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti Kecamatan Sendana	%	98,00	98,00	18.500.000,00	98,00	30.124.000,00	98,00	90.000.000,00	98,00	100.000.000,00	98,00	90.000.000,00	98,00	105.000.000,00	98,00	433.624.000,00	Kecamatan Sendana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang ditindaklanjuti Kecamatan Tubo Sendana	%	98,00	98,00	10.000.000,00	98,00	10.000.000,00	98,00	50.000.000,00	98,00	50.000.000,00	98,00	50.000.000,00	98,00	50.000.000,00	98,00	220.000.000,00	Kecamatan Tubo Sendana
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa dan melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu Kecamatan Banggae Timur	%	-	50,00	1.785.678,00	52,00	0,00	54,00	14.000.000,00	56,00	15.700.000,00	58,00	5.500.000,00	60,00	6.500.000,00	60,00	43.485.678,00	Kecamatan Banggae Timur
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa dan melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu Kecamatan Pamboang	%	-	50,00	0,00	52,00	4.725.000,00	54,00	5.000.000,00	56,00	6.000.000,00	58,00	6.500.000,00	60,00	7.000.000,00	60,00	29.225.000,00	Kecamatan Pamboang
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa menetapkan Peraturan Desa dan melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu Kecamatan Sendana			50,00	47.755.968,00	52,00	0,00	54,00	70.000.000,00	56,00	75.000.000,00	58,00	20.000.000,00	60,00	0,00	60,00	212.755.968,00	Kecamatan Sendana
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																		
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																		
8	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	2.211.589.000,00	100,00	2.203.080.054	100,00	3.372.582.696	100,00	3.136.863.485	100,00	3.585.643.000	100,00	3.927.735.504,00	100,00	18.437.493.739,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Konflik Sara yang ditangani	%	100,00	100,00	110.210.149,00	100,00	250.165.500,00	100,00	490.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	530.000.000,00	100,00	480.000.000,00	100,00	2.460.375.649,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	%	100,00	100,00	949.084.308,00	100,00	1.085.129.416,00	100,00	620.000.000,00	100,00	980.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	4.634.213.724,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan serta budaya politik	Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Serta Budaya Politik	%	100,00	100,00	33.215.093,00	100,00	326.392.190,00	100,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	1.509.607.283,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100,00	100,00	118.584.306,00	100,00	248.729.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	1.667.313.306,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penigkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	100,00	100,00	92.108.301,00	100,00	153.128.600,00	100,00	300.000.000,00	100,00	425.000.000,00	100,00	900.000.000,00	100,00	900.000.000,00	100,00	2.770.236.901,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik